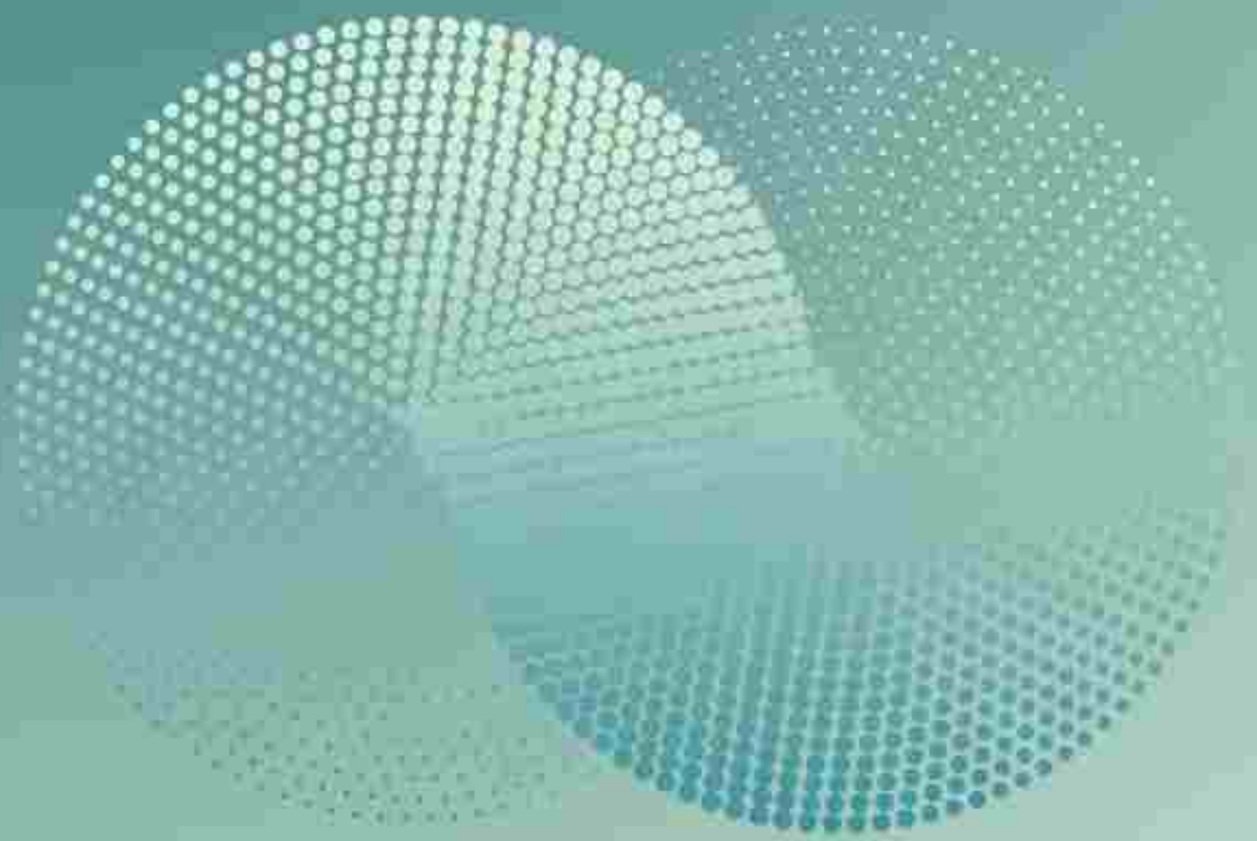
PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2024



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/345/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan ketentuan Pasal 368 bahwa Perubahan Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai Pedoman Perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

KEEMPAT : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah wajib
a. melaksanakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Agustus 2024

PJ. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
3. Perangkat Daerah lainnya.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2024



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dinamis dan berkesinambungan yang dalam implementasinya harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, permasalahan, dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian, kebijakan nasional maupun daerah membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan juga perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati No 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024. Hal tersebut diikuti oleh semua Perangkat Daerah untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan. Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024. Perubahan dokumen perencanaan tahunan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2024 perlu disusun perubahan terhadap Renja OPD tahun 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

sampai dengan Triwulan II dari masing-masing kegiatan; dan

2. Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).

Implikasi dari dua hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan dilakukan tetap dengan memperhatikan target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 I - 6 dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12)

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja) Tahun 2024, yang merupakan bagian dari dokumen rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026. Oleh karenanya dokumen Perubahan Renja tidak terlepas dari rencana program-program yang termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023 – 2026. Dalam proses selanjutnya dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini merupakan acuan sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Sebagai hasil pada proses perencanaan, Perubahan Rencana Kerja tidak terpisah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya juga dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 1) RPJPD ; 2) RPD ; 3) Renstra SKPD ; dan 4) Renja P-SKPD. Seluruh dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan ini mencakup 3 (tiga) kerangka waktu yakni rencana jangka panjang untuk perencanaan selama 20 tahun, rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan masa rencana 4 tahun, dan rencana jangka pendek untuk rencana 1 tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang juga memuat tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan,

yang nantinya menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024, Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PRAPBD) Tahun 2024, serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah ditahun berikutnya, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja tahunan kepala daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun tetap dengan berdasarkan pada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026; serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program – program pembangunan Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditahun 2024;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul dan perlu mendapat perhatian dan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas daerah, regional dan nasional (Pilkada serentak).

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah untuk :

1. Penyesuaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sampai dengan

triwulan kedua dari masing-masing kegiatan;

2. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023 – 2026;
3. Penyesuaian karena terjadinya perubahan asumsi makro yang telah disepakati pada penyusunan APBD Tahun 2024 dalam kaitannya dengan kemampuan fiskal daerah;
4. Penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dalam kaitannya dengan kemampuan fiskal daerah;
5. Penyesuaian perubahan kebijakan di tingkat nasional yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
6. Perlunya penajaman prioritas daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
7. Melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.
8. Sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024;
9. Menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
2.2 Review terhadap Rancangan Awal

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengendalian ini selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan :

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara Renja SKPD dengan Renstra, RPD dan RPJMD; dan
c. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kab. Hulu Sungai Utara dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah 2024, maka salah satu yang harus dipedomani adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang tertuang dalam APBD tahun 2024 sampai berakhirnya Triwulan II memperlihatkan bahwa perkembangan pada aspek kinerja rata-rata Sekretariat Daerah mencapai 45,05%, sedangkan dalam hal penyerapan anggaran baru mencapai 44,73%. Jumlah Belanja yang dialokasikan terhadap Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan berbagai program prioritas daerah serta pelaksanaan urusan baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang Sekretariat Daerah secara keseluruhan berjumlah Rp. 48.151.704.222 ,- dan sampai berakhirnya triwulan II atau semester I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 18.929.934.263,- atau 44,73%. Diharapkan pada sisa triwulan yang ada di semester II tahun 2024 ini dapat direalisasikan secara lebih optimal.

Adapun realisasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2870 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=(8-7)/(6-5)*100%		14=(8-5)/(6-5)*100%		15=(8-5)/(6-5)*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase pemenuhan dan pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan kesejahteraan Rakyat	400 %	41.355.511.355	80,00 %	9.600.158.657	100 %	9.350.725.929	25 %	2.337.794.901	50 %	5.338.894.633				50 %	5.338.894.633	80,00	80,00	80 %	15.038.053.290,00	13,00	20,00		
	4.01.00.3.00	Pelayanan Administrasi Perkantoran Rakyat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Rakyat	400 %	41.355.511.355	80,00 %	9.600.158.657	100 %	9.350.725.929	25 %	2.337.794.901	50 %	5.338.894.633				50 %	5.338.894.633	80,00	80,00	145,00 %	15.038.053.290,00	36,47	0,00		
1	4.01.00.3.00.01	Penyusun Pengelolaan Brng Kental Bantuan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Brng Kental dan Bantuan	50 Kegiatan	30.357.313.000	20 Kegiatan	5.600.773.657	22 Kegiatan	7.331.910.929	5 Kegiatan	2.250.544.901	10 Kegiatan	4.233.745.633				10 Kegiatan	4.233.745.633	70,70	81,80	30 Kegiatan	12.833.121.305,00	13,00	20,77	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	4.01.00.3.00.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	40 Kegiatan	3.994.240.500	12 Kegiatan	999.999.000	12 Kegiatan	1.009.000.000	3 Kegiatan	791.000.000	10 Kegiatan	933.094.000				10 Kegiatan	933.094.000	93,33	39,73	22 Kegiatan	1.499.999.000,00	25,00	37,50	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
3	4.01.00.3.00.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	30 Kegiatan	3.909.070.000	9 Kegiatan	999.991.000	12 Kegiatan	919.999.000	4 Kegiatan	199.000.000	7 Kegiatan	372.000.000				7 Kegiatan	372.000.000	58,33	91,30	15 Kegiatan	901.991.000,00	44,46	54,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							71,46	72,55			57,19	39,00		
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
																Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)							100,00	113,71			36,47	0,00		
																Predikat Kinerja (Kegiatan)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)							80,00	80,00			13,00	20,00		
																Predikat Kinerja (Program)							Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5															Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)							71,46	58,55			57,19	39,00		
																Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
			Jumlah anggaran dari seluruh Program					9.350.725.929			2.337.794.901		5.338.894.633					5.338.894.633								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																									
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																									
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																									

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA4.01.0.00.0.00.01.0007 - BAGIAN UMUM TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2018 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Triwulan (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				11		12=(11:7)x100%		13=(11-12)x100%		14=(11:7)x100%		15
					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	K	Rp	K	Rp		Rp							
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n/a	n/a	17.833.376.874	n/a	0	n/a	17.833.376.874	n/a	645.334.017	n/a	0					n/a	645.334.017	n/a	3,62	n/a	645.334.017,00	n/a	3,62	
	X.XX.01.2.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kinda)	100 %	185.000.000	0 %	0	100 %	185.000.000	0 %	0	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kinda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		
1	X.XX.01.2.09.01	Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pegawai	4 dokumen	0.000.000	0 dokumen	0	4 dokumen	0.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0,00	0,00	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
2	X.XX.01.2.09.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 orang	150.000.000	0 orang	0	30 orang	150.000.000	0 orang	0	0 orang	0					0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kinda)	100 %	1.837.000.000	0 %	0	100 %	1.837.000.000	0 %	147.982.800	0 %	0					0 %	147.982.800	0,00	1,00	0 %	147.982.800,00	0,00	0,00	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kinda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kinda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kinda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan TahunLalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 (yang direvisikan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja SIPD2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat DaerahTahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenstraPerangkat DaerahKabupaten s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11			12		13=12:7x100%		14=6+12		15=14: 5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sekda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sekda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		
3	5.XX.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	100 paket	151.999.000	0 paket	0	100 paket	151.999.000	0 paket	0	0 paket	0					0 paket	0	0,00	0,00	0 paket	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
4	5.XX.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	100 paket	510.569.000	0 paket	0	100 paket	510.569.000	0 paket	0	0 paket	0					0 paket	0	0,00	0,00	0 paket	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
5	5.XX.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 paket	114.400.000	0 paket	0	100 paket	114.400.000	0 paket	0	0 paket	0					0 paket	0	0,00	0,00	0 paket	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
6	5.XX.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 paket	112.457.000	0 paket	0	100 paket	112.457.000	0 paket	0	0 paket	0					0 paket	0	0,00	0,00	0 paket	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
7	5.XX.01.2.05.06	Pemilaan Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Pemilaan kunjungan tamu	100 Layanan	1.755.909.000	0 layanan	0	100 Layanan	1.755.909.000	1 Layanan	87.640.000	0 Layanan	0					1 Layanan	87.640.000	1,00	5,09	1 Layanan	87.640.000,00	1,00	5,09	Bagian Umum
8	5.XX.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Layanan	5.294.289.000	0 Layanan	0	100 Layanan	5.294.289.000	20 Layanan	60.333.500	0 Layanan	0					20 Layanan	60.333.500	20,00	1,19	20 Layanan	60.333.500,00	20,00	1,19	Bagian Umum
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				5,17	1,03			5,17	1,03	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.XX.01.3.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sekda)	100 %	4.600.359.000	0 %	0	100 %	4.600.359.000	0 %	0	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sekda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sekda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %						0 %		0,00		0 %		0,00		

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Triwulan/ (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Direvisikan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja SKPD2024 yang Direvisikan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat DaerahTahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		(13=12/7)x100%		(14=6+12)		(15=14/5)x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bidang)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %				0 %		0,00		0 %		0,00		
9	5.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan	100 Unit	1.774.700.000	0 Unit	0	100 Unit	1.774.700.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
10	5.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	100 Unit	174.320.000	0 Unit	0	100 Unit	174.320.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
11	5.XX.01.2.07.06	Pengadaan Perlusan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlusan dan mesin lainnya yang disediakan	100 Unit	972.480.000	0 Unit	0	100 Unit	972.480.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
12	5.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 Unit	2.979.925.000	0 Unit	0	100 Unit	2.979.925.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bidang)	100 %	1.827.567.334	0 %	0	100 %	1.827.567.334	0 %	214.900.155	0 %	0			0 %	214.900.155	0,00	11,73	0 %	214.900.155,00	0,00	0,00	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bidang)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %				0 %		0,00		0 %		0,00		
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bidang)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %				0 %		0,00		0 %		0,00		
13	5.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat	100 Laporan	55.400.000	0 Laporan	0	100 Laporan	55.400.000	0 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0			0 Laporan	5.000.000	0,00	10,83	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	10,83	Bagian Umum
14	5.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 Laporan	1.227.466.534	0 Laporan	0	100 Laporan	1.227.466.534	0 Laporan	172.517.355	0 Laporan	0			0 Laporan	172.517.355	0,00	12,40	0 Laporan	172.517.355,00	0,00	12,40	Bagian Umum
15	5.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa penyelenggaraan umum kantor yang disediakan	100 Laporan	344.900.800	0 Laporan	0	100 Laporan	344.900.800	0 Laporan	36.382.800	0 Laporan	0			0 Laporan	36.382.800	0,00	10,55	0 Laporan	36.382.800,00	0,00	10,55	Bagian Umum
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		2,87	11,55			2,87	11,55	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan TahunLalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2070/2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah(Tahun 2024) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %	2.855.797.900	0 %	0	100 %	2.855.797.900	0 %	155.701.912	0 %	0				0 %	155.701.912	0,00	5,45	0 %	155.701.912,00	0,00	0,00	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %					0 %		0,00		0 %		0,00		
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)	100 %		0 %		100 %		0 %		0 %					0 %		0,00		0 %		0,00		
16	0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	100 unit	1.841.877.900	0 unit	0	100 unit	1.841.877.900	22 unit	131.300.962	0 unit	0				22 unit	131.300.962	22,00	7,13	22 unit	131.300.962,00	22,00	7,13	Bagian Umum
17	0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan fasilit lainnya yang dipelihara	100 unit	331.100.000	0 unit	0	100 unit	331.100.000	0 unit	0	0 unit	0				0 unit	0	0,00	0,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
18	0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara rehabilitasi	100 unit	720.420.000	0 unit	0	100 unit	720.420.000	3 unit	23.420.930	0 unit	0				3 unit	23.420.930	3,00	3,25	3 unit	23.420.930,00	3,00	3,25	Bagian Umum
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			11,00	3,49			11,00	3,49	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	0.00.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah	Terlaksanya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 orang bulan	581.497.500	orang bulan	0	100 orang bulan	581.497.500	orang bulan	0	orang bulan	0				orang bulan	0	0,00	0,00	orang bulan	0,00	0,00	0,00	
			Terlaksanya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 orang bulan		orang bulan		100 orang bulan		orang bulan		orang bulan					orang bulan		0,00		orang bulan		0,00		
19	0.00.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 orang	181.497.500	0 orang	0	100 orang	181.497.500	0 orang	0	0 orang	0				0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
20	0.00.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepaladaerah	100 orang	400.000.000	0 orang	0	100 orang	400.000.000	0 orang	0	0 orang	0				0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Bagian Umum
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan TahunLalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah/Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra/Perangkat Daerah/Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12:Tx100%		14=b-12		15=14:Tx100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.00.01.2.12	Program Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kinerja)	100 %	150.000.000	0 %	0	100 %	150.000.000	0 %	122.433.400	0 %	0			0 %	122.433.400		0,00	122,43	0 %	122.433.400,00	0,00	0,00	
31	5.00.01.2.12.05	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga kepala daerah yang disediakan	100 paket	150.000.000	0 paket	0	100 paket	150.000.000	0 paket	122.433.400	0 paket	0			0 paket	122.433.400		0,00	122,43	0 paket	122.433.400,00	0,00	122,43	Bagian Umum
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	122,43			0,00	122,43	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	40,81			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		0,00	1,63			0,00	1,63	
																		Predikat Kinerja (Program)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	31																	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		3,43	3,63			3,43	8,21	
																		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program	17.833.375.874		945.224.017		0				945.224.017								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																									
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																									
	Tindak Lanjut yang ditentukan dalam Triwulan berikutnya																									

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 4.01.0.00.0.00.01.0009 - BAGIAN HUKUM
TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024/ Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		(9+11)/7x100%		14=(6+12)		(9+14)/5x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya tercapainya tertib administrasi, tata pemerintahan, administrasi keuangan, fasilitasi sistem Daerah	400 %	3.838.439.000	100 %	192.600.000	100 %	342.564.000	0 %	34.600.000	0 %	96.730.000					0 %	96.730.000	0,00	28,23	0 %	289.600.000,00	0,00	7,57	
4.01.00.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	400 %	3.838.439.000	100 %	192.600.000	100 %	342.564.000	0 %	34.600.000	0 %	96.730.000					0 %	96.730.000	0,00	28,23	100 %	289.600.000,00	25,00	0,00	
4.01.00.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	2000 Dokumen	1.153.940.000	600 Dokumen	18.120.000	650 Dokumen	121.760.000	300 Dokumen	14.600.000	300 Dokumen	32.000.000					300 Dokumen	32.000.000	50,77	19,08	600 Dokumen	89.000.000,00	15,00	5,51	Bagian Hukum
4.01.00.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang ditangani Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	1.680.274.000	1 kasus	120.174.000	2 kasus	182.870.000	1 kasus	18.340.000	0 kasus	64.990.000					1 kasus	64.990.000	50,00	35,60	2 kasus	180.754.000,00	25,00	11,31	Bagian Hukum
4.01.00.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2000 Dokumen	1.106.225.000	615 Dokumen	50.561.500	650 Dokumen	59.334.000	300 Dokumen	9.494.000	300 Dokumen	10.000.000					300 Dokumen	10.000.000	50,77	33,60	615 Dokumen	59.561.500,00	15,00	5,39	Bagian Hukum
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		27,15	25,41			85,33	7,03	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	56,50			25,00	0,00	
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		0,00	28,23			0,00	7,57	
																			Predikat Kinerja (Program)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2																			Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		27,15	28,59			85,33	7,03	
																			Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program		342.560.000		55.600.000		96.730.000								96.730.000									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA4.01.0.00.0.00.01.0003 - BAGIAN PROTOKOL DAN ADMINISTRASI PIMPINAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah/ Kabupaten Pada Tahun 2025 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(9/7)*100%		14=(9-12)		15=(14/7)*100%		16
				C	Rp	C	Rp	C	Rp	C	Rp	C	Rp	C	Rp	C	Rp	C	Rp	C	C	Rp	C	Rp	C	Rp	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	400 %	0	0 %	0	100 %	1.490.459.300	0 %	155.709.394	0 %	535.211.163					0 %	535.211.163	0,00	41,35	0 %	535.211.163,00	0,00	0,00	
	X.XX.01.2.14	Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksanya Layanan Protokol, Rakor Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	100 %	0	0 %	0	100 %	1.490.459.300	0 %	155.709.394	0 %	535.211.163					0 %	535.211.163	0,00	41,35	0 %	535.211.163,00	0,00	0,00	
1	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kegiatan Pimpinan	1500 Kegiatan	0	Kegiatan	0	480 Kegiatan	837.709.000	Kegiatan	55.651.096	Kegiatan	262.503.463					Kegiatan	262.503.463	0,00	46,74	Kegiatan	262.503.463,00	0,00	0,00	Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
2	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Kemuhkoor Pimpinan	Jumlah Hadiah Pialam, Hadiah dan Hasil Presentasi Pimpinan	1500 Hadiah	0	Hadiah	0	480 Hadiah	509.279.500	Hadiah	53.500.000	Hadiah	23.1.574.700					Hadiah	231.574.700	0,00	37,95	Hadiah	231.574.700,00	0,00	0,00	Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
3	X.XX.01.2.14.03	Penatausahaan Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	1500 Kegiatan	0	Kegiatan	0	480 Kegiatan	273.470.800	Kegiatan	52.840.298	Kegiatan	181.133.000					Kegiatan	181.133.000	0,00	66,25	Kegiatan	181.133.000,00	0,00	0,00	Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	41,35			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	53,53			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		0,00	41,35			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Program)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1																	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		0,00	41,35			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program					1.490.459.300			155.709.394		535.211.163						535.211.163							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
Tindak Lanjut yang dilaksanakan dalam Triwulan berikutnya	

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN PEMERINTAHAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12:7)x100%		14=6+12		15=(14:7)x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kelembagaan (%)	100 %	0	0 %	221.700.000	100 %	555.134.400	0 %	22.400.000	25 %	90.781.500					25 %	90.781.500	25,00	25,00	25 %	412.976.400,00	77,90	0,00	
	4.01.00.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan	100 %	0	100 %	299.481.000	100 %	540.002.000	25 %	21.965.000	25 %	87.555.900					25 %	87.555.900	25,00	25,00	100 %	587.237.900,00	155,00	0,00	
1	4.01.00.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi administrasi pemerintahan	2 Dokumen	0	2 Dokumen	93.250.500	2 Dokumen	112.559.400	1 Dokumen	12.510.000	1 Dokumen	37.760.000					1 Dokumen	37.760.000	50,00	37,97	4 Dokumen	134.513.900,00	200,00	0,00	Bagian Pemerintahan
2	4.01.00.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	1 dokumen	0	1 dokumen	28.170.000	1 dokumen	15.007.400	dokumen	0	dokumen	0					dokumen	0	0,00	0,00	1 dokumen	28.170.000,00	100,00	0,00	Bagian Pemerintahan
3	4.01.00.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	3 dokumen	0	5 dokumen	162.117.900	3 dokumen	207.918.000	1 dokumen	9.955.000	dokumen	50.030.400					2 dokumen	50.030.400	100,00	30,86	9 dokumen	233.318.400,00	300,00	0,00	Bagian Pemerintahan
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50,00	16,33			200,00	0,00	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	4.01.00.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase fasilitasi kerjasama daerah	100 %	0	100 %	32.537.900	100 %	15.612.400	25 %	900.000	15 %	2.925.000					15 %	2.925.000	15,00	15,72	115 %	35.333.800,00	115,00	0,00	
4	4.01.00.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	2 Dokumen	0	2 Dokumen	32.537.900	2 Dokumen	15.612.400	1 Dokumen	900.000	Dokumen	2.925.000					1 Dokumen	2.925.000	50,00	15,72	4 Dokumen	35.333.800,00	200,00	0,00	Bagian Pemerintahan
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50,00	15,72			200,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 dalam Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II	III	IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9			10		11		12=11/7x100%		13=6+11		14=11/5x100%		15
				4	Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp		4	Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	83,00	41,42			125,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																	83,00	35,33			17,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Program)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																	83,00	35,33			200,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			355.134.400		23.465.000		90.781.900								90.781.900								

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	akuntabilitas dan transparansi Pemerintah selama anggaran dapat dipertanggungjawabkan
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	lobby kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	kegiatan secara efektif dan efisien sesuai capaian dan output sangat dengan outcome kegiatan disahkan sehingga hasil yang maksimal

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 4.01.0.00.0.00.01.0008 - BAGIAN ORGANISASI TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=B-12		15=14/6x100%		16
				a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah Terkait	100 %	288.213.400	100 %	0	100 %	288.213.400	0 %	68.835.900	0 %	117.817.800					0 %	117.817.800	0,00	39,54	0 %	117.817.800,00	0,00	39,54	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100 %	288.213.400	100 %	0	100 %	288.213.400	0 %	68.835.900	0 %	117.817.800					0 %	117.817.800	0,00	39,54	100 %	117.817.800,00	100,00	0,00	
1	4.01.01.2.13.01	Pengkajian kelembagaan dan analisa jabatan	Jumlah Dokumen Pengkajian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	76 Dokumen	159.393.400	1 Dokumen	0	76 Dokumen	159.393.400	Dokumen	44.135.900	Dokumen	80.117.800					Dokumen	80.117.800	0,00	40,01	1 Dokumen	80.117.800,00	1,32	40,01	Bagian Organisasi
2	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Public dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Public dan Tata Laksana	1 Laporan	41.160.000	1 Laporan	0	1 Laporan	41.160.000	Laporan	10.800.000	Laporan	14.400.000					Laporan	14.400.000	0,00	34,98	1 Laporan	14.400.000,00	100,00	34,98	Bagian Organisasi
3	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	12.040.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	12.040.000	Dokumen	0	Dokumen	760.000					Dokumen	760.000	0,00	6,31	1 Dokumen	760.000,00	100,00	6,31	Bagian Organisasi
4	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pelayanan Public dan Tata Lakasana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pelayanan Public dan Tata Lakasana	1 Dokumen	12.960.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	12.960.000	Dokumen	0	Dokumen	0					Dokumen	0	0,00	0,00	1 Dokumen	0,00	100,00	0,00	Bagian Organisasi
5	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	44.660.000	4 Dokumen	0	5 Dokumen	44.660.000	2 Dokumen	13.995.000	Dokumen	22.680.000					2 Dokumen	22.680.000	33,33	50,78	4 Dokumen	22.680.000,00	133,33	50,78	Bagian Organisasi
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	0,67	22,70			33,33	22,90	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	0,00	19,20			100,00	0,00	
			Predikat Kinerja (Kegiatan)																	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Kode	Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dianalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dianalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8						12		13=12:7x100%		14=9:12		15=14:5x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	100 %	288.213.400	100 %	0	100 %	288.213.400	0 %	88.220.000	0 %	117.917.600			0 %	117.917.600	0,00	39,54	0 %	117.917.600,00	0,00	39,54		
	5.05.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100 %	288.213.400	100 %	0	100 %	288.213.400	0 %	88.220.000	0 %	117.917.600			0 %	117.917.600	0,00	39,54	0 %	117.917.600,00	0,00	0,00		
6	5.05.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	76 Dokumen	188.263.400	1 Dokumen	0	76 Dokumen	188.263.400	Dokumen	44.100.000	Dokumen	83.117.600			Dokumen	83.117.600	0,00	43,61	1 Dokumen	83.117.600,00	1,32	43,61	Bagian Organisasi	
7	5.05.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	41.150.000	1 Laporan	0	1 Laporan	41.150.000	Laporan	10.020.000	Laporan	14.400.000			Laporan	14.400.000	0,00	34,99	1 Laporan	14.400.000,00	100,00	34,99	Bagian Organisasi	
8	5.05.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	13.040.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.040.000	Dokumen	0	Dokumen	750.000			Dokumen	750.000	0,00	5,75	1 Dokumen	750.000,00	100,00	5,75	Bagian Organisasi	
9	5.05.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	13.050.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.050.000	Dokumen	0	Dokumen	0			Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	100,00	0,00	Bagian Organisasi	
10	5.05.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Dokumen	44.650.000	6 Dokumen	0	6 Dokumen	44.650.000	2 Dokumen	13.950.000	Dokumen	22.650.000			2 Dokumen	22.650.000	33,33	50,79	2 Dokumen	22.650.000,00	133,33	50,79	Bagian Organisasi	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,67	39,30			39,30	39,30	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	72,55			100,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		0,00	39,54			0,00	39,54	
																		Predikat Kinerja (Program)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	10																	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		0,67	39,54			39,93	39,93	
																		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program	856.436.800		137.279.800		220.855.600				220.855.600							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																								

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/Ex100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.03	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan dan pemeliharaan pengadaan Barang dan Jasa	100 %	0	100 %	0	100 %	771.733.700	11,3 %	29.492.336	22,5 %	102.148.976					33,5 %	102.148.976	33,50	13,25	33,5 %	102.148.976,00	33,50	0,00	
			Persentase Pengadaan Secara Elektronik	100 %		100 %		100 %		1,96		2,5 %						2,5 %		2,50		2,50 %		2,50		
			Persentase Pemilihan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	100 %		100 %		100 %		0,31 %		18,5 %						18,5 %		18,50		18,50 %		18,50		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	0	100 %	0	100 %	771.733.700	11,3 %	29.492.336	22,5 %	102.148.976					33,5 %	102.148.976	33,50	13,25	133,5 %	102.148.976,00	133,50	0,00	
			Persentase Pengadaan Secara Elektronik	100 %		100 %		100 %		1,96		2,5 %						2,5 %		2,50		4,96		2,50		
			Persentase Pemilihan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %		0,96		100 %		0,31 %		18,5 %						18,5 %		18,50		18,96		18,50		
1	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	0	100 %	0	100 %	225.340.000	11,3 %	29.492.336	22,5 %	92.944.276					33,5 %	92.944.276	33,50	33,50	133,5 %	92.944.276,00	133,50	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=8+12		15=14/6x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	4.01.03.1.03.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100 %	0	100 %	0	100 %	348.655.000	1 %	3.000.000	3,5 %	12.340.798					3,5 %	12.340.798	3,50	3,51	103,5 %	12.340.798,00	103,50	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	0	100 %	0	100 %	199.738.700	0,01 %	1.000.000	15,5 %	36.963.900					18,5 %	36.963.900	18,50	18,51	118,5 %	36.963.900,00	118,50	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		15,17	15,17			115,17	0,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		69,00	26,40			123,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		46,50	13,20			23,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																		15,17	13,20			115,17	0,00	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						772.733.700		29.492.286		102.148.976						102.148.976								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam Triwulan berikutnya	

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2023 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4.01.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	n.a	n.a	3.709.431.800	n.a	155.291.809	n.a	223.419.800	n.a	21.370.000	n.a	49.082.823					n.a	84.155.709	n.a	28,34	n.a	244.647.618,00	n.a	0,93	
	4.01.00.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	n.a	3.709.431.800	n.a	155.291.809	n.a	223.419.800	n.a	21.370.000	n.a	49.082.823					n.a	84.155.709	0,00	0,00	n.a	84.155.709	0,00	0,00	
1	4.01.00.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dokumen	1.333.031.800	4 Dokumen	74.335.809	5 Dokumen	164.958.800	1 Dokumen	13.370.000	2 Dokumen	35.007.823					2 Dokumen	35.007.823	33,33	18,75	6 Dokumen	109.351.732,00	30,00	5,14	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2	4.01.00.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	1.155.400.000	2 Laporan	81.957.000	4 Laporan	122.431.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	13.333.000					1 Laporan	13.333.000	33,33	16,66	4 Laporan	104.913.000,00	25,00	9,48	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3	4.01.00.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Bisnis Intra Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Pengendalian Bisnis Intra Kab	40.000000 Dokumen	40.000.000	2475000 Dokumen	2.475.000	15000000 Dokumen	15.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0					Dokumen	0	0,00	0,00	2475000 Dokumen	2.475.000,00	0,02	0,02	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		16,44	11,46			10,34	6,37	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.01.00.2.04	Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	n.a	0	n.a	0	n.a	0	n.a	0	n.a	0					n.a	0	0,00	0,00	n.a	0	0,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten pada Tahun 2024 akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=(12:7)x100%		Kolom 12		15=(12:5)x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	4.01.00.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Ketahanan, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Perkoperasian Kecil, Tenaga Kerja	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0			n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	4.01.00.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanahan, Daerah, Kewilayah	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0			n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6	4.01.00.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Ir	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Ir, Ketenagakerjaan Umum dan Transmigrasi Ruang, Pemberdayaan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0			n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00	0,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		0,00	33,33			0,00	0,33	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II	III										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		(9+12 / 7) x 100%		14=8+12		(9+12 / 5) x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Predikat Kinerja (Program)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	0	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																0,71	28,39			0,37	3,54	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			303.419.000		21.270.698		40.262.333							89.155.705								
	Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	50% pada Bagian Perekonomian dan SDA memiliki beberapa yang tinggi agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal																						
	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Masih kurangnya personil pegawai atau jumlah daya manusia dengan SKP, sehingganama dilaksanakan sesuai tidang tugas																						
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																						

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA4.01.0.00.0.00.01.0005 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat DaerahTahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PerangkatDaerah Kabupatens/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenstraPerangkat DaerahKabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12:7x100%		14=9-12		15=14:8x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	4.01.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	513.999.460	n/a	60.762.250	n/a	166.955.100					n/a	166.955.100	n/a	32,48	n/a	166.955.100,00	n/a	0,00	
	4.01.00.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	513.999.460	n/a	60.762.250	n/a	166.955.100					n/a	166.955.100	0,00	0,00	n/a	166.955.100	0,00	0,00	
1	4.01.00.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	426.067.260	n/a	51.825.100	n/a	150.103.400					n/a	150.103.400	0,00	35,23	n/a	150.103.400,00	n/a	0,00	
2	4.01.00.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	87.932.200	n/a	8.937.150	n/a	16.851.700					n/a	16.851.700	0,00	19,16	n/a	16.851.700,00	n/a	0,00	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				0,00	0,00				
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)				0,00	0,00				
																				Predikat Kinerja (Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)				0,00	32,48				
																				Predikat Kinerja (Program)				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)				0,00	32,48				
																				Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program							513.999.460		60.762.250		166.955.100						166.955.100							

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat DaerahTahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenstraPerangkat DaerahKabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																									
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																									
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																									

2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Review terhadap Rancangan Awal

NO						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						BAGIAN PEMERINTAHAN										
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	463,907,250	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	523,234,400	
4	01	02	2	01		Administrasi tata pemerintahan		Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.0950 (Sangat Tinggi)	340,522,000	Administrasi tata pemerintahan		Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.0950 (Sangat Tinggi)	504,622,000	
4	01	02	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	Rp 113,559,400	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	Rp 113,559,400	
4	01	02	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Rp 19,037,600	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Rp 19,037,600	
4	01	02	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Rp 227,325,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Rp 372,033,000	
4	01	02	2	04		Fasilitasi kerjasama daerah		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	100%	18,612,400	Fasilitasi kerjasama daerah		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	100%	18,612,400	
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	2 kerjasama	Rp 18,612,400	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	2 kerjasama	Rp 18,612,400	
								1 PROGRAM	2 KEGIATAN	158,154,400					523,734,400	
						BAGIAN KESRA										
4	01	02				Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. HSU	Persentase Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	100%		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. HSU	Persentase Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	100%		
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%		
4	01	02	2	02	01	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Kab. HSU	Jumlah Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	23 Kegiatan	Rp 1,706,701,100	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	23 Dokumen	Rp 3,076,018,600	
4	01	02	2	02	02	Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	20 Dokumen	Rp 700,820,000	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	27 Dokumen	Rp 1,071,720,000	
4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan	18 Dokumen	Rp 818,896,000	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tanaman Limas	18 Dokumen	Rp 873,086,000	
								2 PROGRAM	2 KEGIATAN	Rp 8,327,618,105					Rp 8,722,934,400	
						BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL										
4	01	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%		

4	01	01	2	11		Administrasi keuangan dan operasional Kepala daerah dan Wakil kepala daerah		Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	Rp	80,000,000	Administrasi keuangan dan operasional Kepala daerah dan Wakil kepala daerah		Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	Rp	-	
4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket			Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket		-	
4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menghuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang	Rp	80,000,000	Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menghuti Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang	Rp	-	
4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Tersedianya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	100%	Rp	2,535,473,300	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Tersedianya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	100%	Rp	1,819,519,300	
4	01	01	2	14	01	Fasilitasi Kemasyarakatan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kemasyarakatan	4 Laporan	Rp	1,302,723,000	Fasilitasi Kemasyarakatan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kemasyarakatan	4 Laporan	Rp	638,544,000	
4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	Rp	988,276,900	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	Rp	935,783,900	
4	01	01	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	Rp	243,470,800	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	Rp	275,241,800	
								1 PROGRAM	3 KEGIATAN	Rp	2,235,473,300					Rp	1,819,519,300	
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM												
4	01	03				Perekonomian dan Pembangunan	Kab. HSU	persentase peningk. koord., pembinaan dan monitoring Kop., UKM, BUMD, Perindustrian & Perdagangan	100%	Rp	358,429,300	Perekonomian dan Pembangunan	Kab. HSU	persentase peningk. koord., pembinaan dan monitoring Kop., UKM, BUMD, Perindustrian & Perdagangan	100%	Rp	384,429,700	
4	01	03	2	02		Evaluasi Perkembangan Kebijakan Perekonomian		Tersedianya Laporan TPID yang menggambarkan kegiatan pengendalian inflasi dan perkembangan harga bahan pokok di HSU			358,429,300	Evaluasi Perkembangan Kebijakan Perekonomian		Tersedianya Laporan TPID yang menggambarkan kegiatan pengendalian inflasi dan perkembangan harga bahan pokok di HSU			359,429,700	
4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Rp	164,998,900	Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Rp	170,998,400	
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp	133,431,300	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp	133,431,300	
4	01	03	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6 kali		15,000,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6 kali		15,000,000	
4	01	03	2	04		Penyusunan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam					65,000,000	Penyusunan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam					65,000,000	
4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan	5 Dokumen	Rp	25,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	Rp	25,000,000	
4	01	03	2	04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 dokumen	Rp	10,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 dokumen	Rp	10,000,000	
4	01	03	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 Dokumen	Rp	20,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 Dokumen	Rp	20,000,000	
								1 PROGRAM	2 KEGIATAN	Rp	358,429,300			1 PROGRAM	2 KEGIATAN	Rp	384,429,700	
						BAGIAN PEMBANGUNAN												

4	01	03				Program Perekonomian Dan Pembangunan		Program Perekonomian Dan Pembangunan				Program Perekonomian Dan Pembangunan					
4	02	08	2			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Rp	167,199,480	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
4	01	03	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	-		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen		
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 laporan	Rp	66,067,280	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 laporan	Rp	438,067,280
4	01	03	2	01	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	Rp	101,132,200	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	Rp	87,932,200
								1 PROGRAM	1 KEGIATAN	Rp	167,199,480					Rp	333,999,480
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		PERSENTASE PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100%			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		PERSENTASE PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100%		
4	02	08	2	03		*Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa*	Kab. HSU	*Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*100%*	Rp	748,793,700	*Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa*	Kab. HSU	*Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*100%*	Rp	770,733,500
4	01	03	2	03	01	1.1. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	Rp	219,340,000	1.1. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	Rp	328,340,000
4	01	03	2	03	02	1.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	Rp	341,655,000	1.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	Rp	348,655,000
4	01	03	2	03	03	1.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	30 orang	Rp	188,738,700	1.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 orang	Rp	188,738,800
								1 PROGRAM	1 KEGIATAN		748,793,700						770,733,500
						BAGIAN UMUM											
4	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%		30,468,226,374	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%		35,833,358,182
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	*100%*		*14,977,814,000*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	*100%*		15,663,997,938
4	01	01	2	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan		14,127,814,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 orang/bulan		13,853,997,938
4	01	01	2	05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	*100%*		*185,000,000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	*100%*		270,340,000
4	01	01	2	05	03	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Kab. HSU	Jumlah Monitoring yang Dilaksanakan	3		9,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	3 Dokumen		40,340,000
4	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang		180,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang		230,000,000
4	01	01	2	06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	*100%*		*7,190,598,550*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	*100%*		8,139,523,650
4	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		132,003,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		151,748,900
4	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		510,377,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		583,944,600
4	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		104,600,350	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		113,773,450
4	01	01	2	06	09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		110,487,300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		120,463,300
4	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		1,799,905,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. HSU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		1,912,905,000
4	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan		4,577,279,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan		5,294,389,000

4	01	01	2	07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100%	2,946,400,000	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kab. HSU	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100%	5,758,326,750	
4	01	01	2	07	03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Paket barang yang dibeli		650,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. HSU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1,309,830,000.00	
4	01	01	2	07	06	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. HSU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	280,446,750	
4	01	01	2	07	09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		594,900,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1,080,980,000	
4	01	01	2	07	10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1,641,400,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,078,100,000	
4	01	01	2	08		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100%	1,964,267,324	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab. HSU	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100%	3,548,907,324	
4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	49,430,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	59,430,000	
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,267,486,524	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,720,486,524	
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233,360,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	271,950,800	
4	01	01	2	09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100%	2,776,707,900	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab. HSU	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100%	2,830,507,900	
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	115 unit	1,841,577,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	115 unit	1,831,577,900	
4	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan yang dipelihara	92 unit	255,101,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah peralatan yang dipelihara	92 unit	236,901,000	
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4buah	679,938,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4buah	681,918,000	
4	01	01	2	11		*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*		*Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah*	100%	980,847,300	*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	Kab. HSU	*Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah*	100%	583,497,500	
4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	14 bulan	180,847,300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 orang bulan		
4	01	01	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	400,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan		
4	01	01	2	12		*Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*		*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100%	2,154,372,100	*Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	3,063,657,100	
4	01	01	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	1,061,372,100	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	1,063,657,100	
4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	100,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
								5 PROGRAM	9 KEGIATAN	Rp 30,462,226,374					Rp 35,015,350,162	

						BAGIAN ORGANISASI										
4	03	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
4	03	01	2	13		Penataan Organisasi	Kab. HSU	Persentase Penataan Organisasi	100%			Penataan Organisasi	Kab. HSU	Persentase Penataan Organisasi	100%	
4	01	01	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan analisis Jabatan		Jumlah dokumen kelembagaan dan anjab	79 dokumen	189,393,400		Pengelolaan Kelembagaan dan analisis Jabatan		Jumlah dokumen kelembagaan dan anjab	79 dokumen	473,598,200
4	01	01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. HSU	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tatalaksana	1 dokumen	16,790,000		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. HSU	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tatalaksana	1 dokumen	41,190,000
4	01	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	13,040,000		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	132,940,000
4	01	01	2	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. HSU	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	1 dokumen	13,090,000		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. HSU	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	1 dokumen	38,090,000
4	01	01	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	6 dokumen	44,990,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	6 dokumen	398,700,000
								1 PROGRAM	1 KEGIATAN	233,313,400						964,518,200
						BAGIAN HUKUM										
4	01	02	2			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Kab. HSU	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	100%			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Kab. HSU	Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	100%	
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. HSU					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. HSU			
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. HSU	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	630	30,040,000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. HSU	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	630	130,322,900
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah perkara yang difasilitasi bantuan hukum oleh Kuasa Hukum Pemda	2 kasus	137,370,000		Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah perkara yang difasilitasi bantuan hukum oleh Kuasa Hukum Pemda	2 kasus	146,000,000
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan reformasi Hukum		Jumlah produk Hukum daerah yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat	630 Dokuman	58,225,000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum		Jumlah produk Hukum daerah yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat	630 Dokuman	57,062,400
								1 PROGRAM	1 KEGIATAN	Rp 235,635,000						Rp 342,384,900
JUMLAH ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH										Rp 48,151,704,222						Rp 59,838,039,222

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024, Sekretariat Daerah diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (Tujuh) agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu untuk "Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing" serta mendukung "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan". Dalam Program Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing dan Program Nasional REvolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Sekretariat Daerah memiliki peran pada Program Prioritas :

A. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada :

   1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive. Dari Kegiatan Prioritas tersebut, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :

      a. Peningkatan Budaya Kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;

      b. Penerapan Disiplin, Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi.

   2. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental, dari Kegiatan Prioritas tersebut, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :

a. Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu;

b. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah.

B. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan KP pada :

1. Penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :

   a. Pengembagan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;

   b. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;

   c. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :

   a. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan;
   b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

C. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :

a. Penyederhanaan Eselonisasi;
b. Penataan Jabatan Fungsional.

2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :
   a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
   b. Penerapan SPBE terintegrasi.
3. Reformasi sistem Akuntabilitas Kinerja, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :
   a. Perluasan implementasi sistem integritas;
   b. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
   c. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
4. Transformasi pelayanan publik, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :
   a. Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
   b. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
   c. Penguatan ekosistem inovasi;
   d. Penguatan pelayanan terpadu.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Sasaran program jangka menengah SKPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima;

3. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis.

Dalam tahun anggaran 2024, Sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan sasaran strategis dalam mewujudkan birokrasi Sekretariat Daerah yang bersih, profesional dan produktif yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatnya pelayanan publik yang prima.

Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 14 (empat belas) indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Target pencapaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	A (80,50)
2	Meningkatkan Pelayanan dan Pelaksanaan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%
3	Mengkoordinasikan Pelaksanaan dan Evaluasi Kelembagaan	Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%
4	Mengkoordinasikan capaian target indikator RB Tematik dan General	Persentase Peningkatan capaian target indikator Reformasi Birokrasi	100%
5	Mengkoordinasikan Pelaksanaan dan Evaluasi Analisis jabatan terkait Kebutuhan PPPK dan CPNS sesuai regulasi	Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan	100%

6	Mengkoordinasikan Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik	100%
7	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah baik manual maupun online	Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	100%
8	Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten HSU	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
9	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Sekretariat Daerah dan Pimpinan Daerah	Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	100%
10	Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan	100%
11	Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pemantauan bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100%
12	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang	Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	100%

	pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam	kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam	
13	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi	Persentase perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi	100%
14	Mengkoordinasikan Penyusunan LKPJ dan LPPD Bupati dan Sekretariat Daerah	Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah peran anggaran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang professional juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan pada Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah, maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Pada penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini mengacu pada rancangan Renstra, RKPD dan RPJMD.

4.1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, yaitu 3 program dengan 18 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Administrasi keuangan dan operasional Kepala daerah dan Wakil kepala daerah
   a. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
   b. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Derah dan Wakil kepala Daerah
2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   a. Fasilitasi Keprotokolan
   b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
   b. Pengadaan Mebel;
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

d. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
9. Administrasi Keuangan dan Operasinal Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah;
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah.
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
   a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
   b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
11. Penataan Organisasi;
   a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
   b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
   c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
   d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan TataLaksana;
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah.

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Administrasi Tata Pemerintahan;
   a. Penataan Administrasi Pemerintahan;
   b. Pengelolaan Administrasi Kewilayanan;
   c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
   a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
   a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual;
   b. Evaluasi,Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Sosial;
   c. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
   a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
   c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
   a. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD danBLUD;
   b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
   c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
2. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam;
   a. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan;
   b. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

Pertambangan danLingkungan Hidup;

c. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
   a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
   b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
   c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
4. Pengadaan Barang dan Jasa.
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik;
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Berikut adalah rincian kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Perubahan Tahun 2024.

PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)		
		Indikator	Satuan	Target	Penetapan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah**					
	BAGIAN PEMERINTAHAN						
	Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**340.522.000,00**	**504.622.000,00**	**164.100.000,00**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	113.559.400,00	113.559.400,00	0
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	19.037.600,00	19.037.600,00	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	207.925.000,00	372.025.000,00	164.100.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persen**	**100**	**18.612.400,00**	**18.612.400,00**	**0**
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam	Dokumen	2	18.612.400,00	18.612.400,00	0
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**8.927.519.105,00**	**9.720.834.600,00**	**793.315.495,00**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	25	7.706.701.105,00	8.076.016.600,00	369.315.495,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang	Dokumen	20	701.920.000,00	1.071.720.000,00	369.800.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,Pendidikan,Kebudayaan,Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	18	518.898.000,00	579.098.000,00	54.200.000,00
	BAGIAN HUKUM						
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persen**	**100**	**215.635.000,00**	**342.384.900,00**	**126.749.900,00**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	650	20.040.000,00	120.322.500,00	100.282.500,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	2	137.970.000,00	165.000.000,00	27.030.000,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	650	58.225.000,00	57.062.400,00	-1.162.600,00

	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan**					
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase koordinasi, pembinaan dan pemantauan kebijakan perekonomian**	**Persen**	**100**	**303.428.800,00**	**309.429.700,00**	**5.999.900,00**
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Dokumen	6	164.998.500,00	170.998.400,00	5.999.900,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	123.431.300,00	123.431.300,00	0
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persen**	**100**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	5	25.000.000,00	25.000.000,00	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	10.000.000,00	10.000.000,00	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	5	20.000.000,00	20.000.000,00	0
	BAGIAN PEMBANGUNAN						
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**100**	**167.199.460,00**	**513.999.460,00**	**346.800.000,00**
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	15	66.067.260,00	426.067.260,00	360.000.000,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	101.132.200,00	87.932.200,00	-13.200.000,00
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**	**749.733.700,00**	**773.733.500,00**	**23.999.800,00**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	5	213.340.000,00	225.340.000,00	12.000.000,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	5	342.655.000,00	348.655.000,00	6.000.000,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50	193.738.700,00	199.738.500,00	5.999.800,00

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)**					
	BAGIAN UMUM						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**Persen**	**100**	**14.107.815.000,00**	**15.653.987.938,00**	**1.546.172.938,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	192	14.107.815.000,00	15.653.987.938,00	1.546.172.938,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**Persen**	**100**	**580.847.500,00**	**581.497.500,00**	**650.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ bulan	14	180.847.500,00	0	-180.847.500,00
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ bulan	12	400.000.000,00	0	-400.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**Persen**	**100**	**185.000.000,00**	**270.340.000,00**	**85.340.000,00**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	5.000.000,00	40.340.000,00	35.340.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	180.000.000,00	230.000.000,00	50.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**persen**	**100**	**7.150.816.550,00**	**8.128.123.650,00**	**977.307.100,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	102.001.200,00	151.749.300,00	49.748.100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	510.577.300,00	562.944.600,00	52.367.300,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	28	114.600.550,00	115.773.450,00	1.172.900,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	110.457.500,00	120.462.300,00	10.004.800,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	1.735.905.000,00	1.912.905.000,00	177.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	4.377.275.000,00	5.264.289.000,00	887.014.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**Persen**	**100**	**2.846.400.000,00**	**5.758.328.750,00**	**2.811.928.750,00**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	13	650.000.000,00	1.309.800.000,00	659.800.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100.000.000,00	292.443.750,00	192.443.750,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	554.920.000,00	1.082.980.000,00	528.060.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.641.480.000,00	3.073.105.000,00	1.431.625.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**Persen**	**100**	**1.964.267.324,00**	**1.548.907.324,00**	**-15.360.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	43.430.000,00	55.430.000,00	12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.287.456.524,00	1.220.496.534,00	-66.960.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	233.380.800,00	272.980.800,00	39.600.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**persen**	**100**	**2.776.707.900,00**	**2.810.507.900,00**	**33.800.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	115	1.841.677.900,00	1.831.677.900,00	-10.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	255.102.000,00	296.902.000,00	41.800.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	679.928.000,00	681.928.000,00	2.000.000,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**Persen**	**100**	**1.151.372.100,00**	**1.063.657.100,00**	**-87.715.000,00**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10	1.051.372.100,00	1.063.657.100,00	12.285.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10	100.000.000,00	0	-100.000.000,00
	BAGIAN ORGANISASI						
	Penataan Organisasi	**Persentase Penataan Organisasi**	**Persen**	**100**	**283.813.400,00**	**964.553.200,00**	**680.739.800,00**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	76	186.263.400,00	475.598.200,00	289.334.800,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	26.790.000,00	41.190.000,00	14.400.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	13.040.000,00	152.940.000,00	139.900.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Dokumen	1	13.090.000,00	28.090.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	6	44.630.000,00	266.735.000,00	222.105.000,00
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL						
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persen**	**100**	**80.000.000,00**	**0**	**-80.000.000,00**
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	3	80.000.000,00	0	-80.000.000,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Tersedianya layanan protokol, bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan**	**Persen**	**100**	**2.135.473.300,00**	**1.819.519.300,00**	**-315.954.000,00**
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4	1.202.723.000,00	618.544.000,00	-584.179.000,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	669.279.500,00	915.733.500,00	236.454.000,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	243.470.800,00	275.241.800,00	31.771.000,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengacu pada RPJM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2024, dalam menunjang visi dan misi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta target dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2024 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2024 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini disusun guna proses selanjutnya. Dengan melalui penyusunan Perubahan Renja ini dan perubahan anggaran tahun 2024 ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat pada pencapaian target kinerja yang lebih baik bagi pegawai Sekretariat Daerah. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2024.

Amuntai, September 2024
Sekretaris Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

SETDA

H. ADI LESMANA, S.Sos M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701118 199101 1 002

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN HAUR GADING

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN HAUR GADING

2023

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ 401 /KUM/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

b. bahwa schubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, Tambahan Berita Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V : PENUTUP.

KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

KELIMA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah wajib

a. melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;

b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Renja Perangkat Daerah;

c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 Agustus 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, Karunia dan Petunjuk-Nya jualah Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Haur Gading pada Tahun Anggaran 2024, serta sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran yang sifatnya membangun akan kami terima demi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini.

Amuntai, 5 Maret 2023

CAMAT HAUR GADING,

KAMARUDIN,S.STP,M.AP

NIP. 19830303 200212 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

3.3 Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Haur Gading dan Pencapaian Renstra Kecamatan Haur Gading Sampai Dengan Tahun 2022 Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 9

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2022 18

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara 20

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara 26

Tabel 2.5 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Haur Gading 38

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Guna Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diantaranya telah diatur bahwa setiap SKPD wajib untuk menyusun RencanaStrategis SKPD (Renstra SKPD) sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan SKPD dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai bentuk rencana tahunan SKPD yang mengacu pada Dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Haur Gading terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Haur Gading agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 adalah merupakan dokumen rencana tahunan, karena tahapannya tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Haur Gading 2023-2026 maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026. Namun demikian sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Dengan demikian Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 ini secara umum mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 maupun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Haur Gading Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024 yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tentunya tidak terlepas dari landasan hukum keberadaan organisasi Kecamatan dan proses perencanaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara No.140, Tambahan Lembaran Negara No. 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
16. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59/2007 dan Perubahan Kedua Permendagri No. 21/2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara RI Th. 2019 No. 1114);
21. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 288);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verefikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov. Kalsel Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2007 TentangPembentukan Kecamatan Haur Gading;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. HSU Th. 2011 No. 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kab. HSU Th. 2021 No. 28);
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan khususnya di Kecamatan Haur Gading serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi berbagi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan **Tujuan** dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Haur Gading dalam menentukan berbagai rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD Kecamatan Haur Gading dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Haur Gading berkenaan dengan upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dikarenakan masih adanya program dan kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga anggaran yang disediakan tidak sepenuhnya terserap secara maksimal hal ini mungkin disebabkan karena pelaksana teknis kegiatan masih belum memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan prioritas dimaksud maka SKPD Kecamatan Haur Gading pada **Tahun Anggaran 2022** diberikan wewenang untuk melaksanakan **4 Program** dengan **10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan**, yaitu :

1. **Program** : **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
   Kegiatan :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **Program** : **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
   Kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program** : **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
   Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. **Program** : **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
   Kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Beberapa hambatan dan permasalahan tentunya juga dihadapi oleh SKPD Kecamatan Haur Gading dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang lalu terutama mengenai permasalahan pada program pembinaan pelayanan administrasi kecamatan, yaitu terkait pembinaan dan monitoring ke desa-desa disebabkan pejabat yang berwenang tidak sepenuhnya menjalankan hal tersebut.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Haur Gading sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Haur Gading dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Haur Gading Sampai Dengan Tahun 2022
Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2023)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10:4)	12
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01					KECAMATAN										
7	01	01				**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terselenggarnya Urusan Pemerintah Daerah**	100%	100%	100%	95,98%	95,98%	100%	95,12%	95,12%	
7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	90,68%	90,68%	100%	98,89%	98,89%	
7	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	90,68%	90,68%	100%	98,89%	98,89%	
7	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen/Laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	90,68%	90,68%	100%	98,89%	98,89%	

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2023)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	87,61%	87,61%	100%	95,87%	95,87%	
7	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	87,61%	87,61%	100%	95,87%	95,87%	
7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	89,90%	89,90%	100%	98,63%	98,63%	
7	01	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	89,90%	89,90%	100%	98,63%	98,63%	
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	93,21%	93,21%	100%	97,74%	97,74%	
7	01	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	66,66%	66,66%	100%	66,95%	66,95%	
7	01	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yg dibeli sesuai dengan spesifikasi	100 %	100 %	100 %	99,77%	99,77%	100%	99,92%	99,92%	

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2023)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	88,26%	88,26%	100 %	96,43%	96,43%	
7	01	01	2	06	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan rapat yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	88,84%	88,84%	100 %	96,61%	96,61%	
7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD dalam dan luar daerah yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	99,32%	99,32%	100 %	99,77%	99,77%	
7	01	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %	100 %	88,20%	88,20%	100 %	96,07%	96,07%	
7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
7	01	01	2	07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2023)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	92,67%	92,67%	100 %	97,62%	97,62%	
7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100 %	100 %	100 %	92,11%	92,11%	100 %	97,37%	97,37%	
7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumberdaya air listrik	100 %	100 %	100 %	66,04%	66,04%	100 %	88,68%	88,68%	
7	01	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terealisasinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	98,00%	98,00%	100 %	99,33%	99,33%	
7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	99,37%	99,37%	100 %	99,79%	99,79%	
7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	83,78%	83,78%	100 %	94,59%	94,59%	

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2023)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	89,30%	89,30%	100 %	96,43%	96,43%	
7	01	01	2	09	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	37,96%	37,96%	100 %	79,33%	79,33%	
7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	99,72%	99,72%	100 %	99,91%	99,91%	
7	01	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	47,50%	47,50%	100 %	82,50%	82,50%	
7	01	02	2			**Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	80,78%	80,78%	100 %	93,59%	93,59%	
7	01	02	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	80,78%	80,78%	100 %	93,59%	93,59%	

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2023)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	02	2	04	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan perizinan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	71,53%	71,53%	100 %	90,81%	90,81%	
7	01	02	2	04	02	Sub Kegiatan PelaksanaanUrusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah administrasi pelayanan non perizinan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	94,53%	94,53%	100 %	98,18%	98,18%	
7	01	02	2	04	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah RTS-PM yang menerima BASTRA	100 %	100 %	100 %	98,95%	98,95%	100 %	99,85%	99,85%	
7	01	03				**Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	70,58%	70,58%	100 %	90,19%	90,19%	
7	01	03	2	01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	100 %	100 %	100 %	70,58%	70,58%	100 %	90,19%	90,19%	
7	01	03	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	70,58%	70,58%	100 %	90,19%	90,19%	
7	01	03	2	05		Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Masayarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	66,66%	66,66%	

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2023)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	03	2	05	01	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	66,66%	66,66%	
7	01	03	2	05	02	Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	66,66%	66,66%	
7	01	06				**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Tercapainya pembinaan & pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	83,09%	83,09%	100 %	94,36%	94,36%	
7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	83,09%	83,09%	100 %	94,36%	94,36%	
7	01	06	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina administrasinya	100 %	100 %	100 %	83,59%	83,59%	100 %	94,53%	94,53%	
7	01	06	2	01	09	Sub Kegiatan Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase usulan desa yang diakomodir pada Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	100 %	81,18%	81,18%	100 %	93,72%	93,72%	

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program/kegiatan yang **tidak memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;

   - **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

     Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tidak memenuhi target realisasi kinerja hal ini disebabkan karena capaian realisasi kinerja hanya mencapai 37,98% masih dinilai cukup rendah.

     Begitu pula pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak memenuhi target realisasi kinerja hal ini disebabkan karena capaian realisasi kinerja hanya mencapai 47,50% masih dinilai cukup rendah.

   - **Program** Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

     Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak dianggarkan, sehingga Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dan Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia yang mengakibatkan target capaian realisasi kinerja tidak terpenuhi.

2) Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;

   Seluruh Program dan Kegiatan selain yang diuraikan di atas, dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan persentase dari 70% hingga100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja SKPD Kecamatan Haur Gading dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Haur Gading. Seluruh kegiatan SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2022 dibiayai dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 1.861.116.623,-** *(Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)* dan terealisasi sebesar Rp. **1.582.630.467,-** (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh rupiah*) atau sekitar **(85,04%)**.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Derah, Kecamatan Haur Gading pada tahun 2022 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 22.000.000,- yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Adapun target dan realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2022

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Retribusi Pelayanan Pasar	10.000.000,-	0,-	
2	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.000.000,-	0,-	
	J U M L A H	**22.000.000,-**	**0,-**	

Berdasarkan data sebagaimana disajikan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 SKPD Kecamatan Haur Gading tidak dapat melaksanakan dan memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi Kas Daerah. Pada tahun 2022 tidak memenuhi target, karena realisasi pendapatan yang di terima sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Hal tersebut terjadi, karena pada tahun 2022 belum ada aturan (peraturan daerah) yang memerintahkan untuk melaksanakan penagihan retribusi tersebut.

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Haur Gading tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2022 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan substansi Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Anggaran yang di bebankan dalam DPA Perubahan Kecamatan Haur Gading untuk Tahun Anggaran 2022 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.422.385.000,- untuk gaji dan tunjangan PNS. Dari anggaran yang tersedia sampai dengan bulan Desember 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.190.758.717,- atau sebesar 83,72%.

Sedangkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 351.051.623,- yang mana sampai dengan bulan Desember 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp. 305.307.374,- atau sebesar 86,97%.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 87.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.564.376,- atau sebesar 98,73%. Belanja Modal yang dilaksanakan pada tahun 2022 menambah aset tetap bagi Kecamatan Haur Gading yang dipergunakan dalam kegiatan roda Pemerintahan.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Haur Gading
Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)n-2	(6)n-1	(7)n	(8)n+1	(9)n-2	(10)n-1	(11)	(12)	(13)
1	Program yang berkaitan dengan penyelengaraan Urusan	-	9 Program	100%	100%	100%	100%	9 Program	-	100%	100%	
2	Keberadaan Standar Operasional Prosedur	-	15 SOP	100%	100%	100%	100%	15 SOP	-	100%	100%	
3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelengaraan Urusan	-	Ada	100%	100%	100%	100%	Ada	-	100%	100%	
4	Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	-	71,42%	100%	100%	100%	100%	71,42%	-	100%	100%	
5	Keberadaan Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	-	100%	100%	
6	Rasio PNS	-	0,37%	100%	100%	100%	100%	0,37%	-	100%	100%	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan		80%	100%	100%	100%	100%	80%	-	100%	100%	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
9	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	3 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Renstra - Renja	-	100%	100%	

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)n-2	(6)n-1	(7)n	(8)n+1	(9)n-2	(10)n-1	(11)	(12)	(13)
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
11	Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	-	0,16%	100%	100%	100%	100%	0,16%	-	100%	100%	
14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi belanja APBD	-	0,11%	100%	100%	100%	100%	0,11%	-	100%	100%	
15	Total Belanja Langsung dari total belanja perangkat daerah	-	24,70%	100%	100%	100%	100%	24,70	-	100%	100%	
16	Total belanja tidak langsung dari total perangkat daerah	-	75,29%	100%	100%	100%	100%	75,29%	-	100%	100%	
17	Keberadaan Laporan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	-	Ada, 3 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Neraca - Calk - LRA	-	100%	100%	
18	Adanya invintarisasi barang atau Asset Perangkat Daerah	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)n-2	(6)n-1	(7)n	(8)n+1	(9)n-2	(10)n-1	(11)	(12)	(13)
19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh perangkat daerah	-	0	100%	100%	100%	100%	0	-	100%	100%	
20	Jumlah Fasilitas Prasarana Informasi	-	1 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Papan Pengumuman	-	100%	100%	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarkat	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	-	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Haur Gading dimaksudkan untuk menentukan permasalahan maupun hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Haur Gading berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading tahun sebelumnya.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2022 Pasal 2 disebutkan bahwa Organisasi Kecamatan Haur Gading berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Camat. Adapun tugas pokok Kecamatan Haur Gading adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daeah kabupaten, meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparat daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan dan melaksanakan urusan pemeintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit keja pemeintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Kecamatan Haur Gading berdasarkan tugas diatas yang diberikan memiliki kendala dalam penerapannya, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan Bupati tentang wewenang yang dilimpahkan kepada Camat. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Camat berpegang kepada hal-hal yang selama ini memang telah menjadi tugas Camat, hal ini demi kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas SKPD berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Haur Gading tahun 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3) Pelayanan Prima. Kecamatan Haur Gading sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat. Khususnya dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten terkait penyelenggaraan Rembuk Stunting di tingkat Kecamatan.
4) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5) Peningkatan partisipasi aparatur dan masyarakat terkait kesiapan wilayah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan cara menjaga suasana yang kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan umum.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi diwilayah Kecamatan Haur Gading.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD dapat dilihat Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SKPD : Kecamatan Haur Gading

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**2.284.581.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**KecamatanHaur Gading**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**2.344.781.000**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen	1.500.000	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen	1.500.000	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan yang disusun	6 Laporan	1.500.000	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KecamatanHaur Gading	Jumlah Laporan yang disusun	6 Laporan	1.500.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.040.010.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.064.310.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	18 Orang	2.040.010.000	**- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**KecamatanHaur Gading**	**Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan**	**24 Orang**	**2.380.210.000**	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	
	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yangmengikuti Bimtek	0 Orang	0	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KecamatanHaur Gading	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	0 Orang	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	57.689.213	Kegiatan AdministrasiUmum Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	57.689.213	
	- Sub Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Komponen Instalasi Listrik penerangan kantor yang dibutuhkan	100%	3.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KecamatanHaur Gading	Persentase Komponen Instalasi Listrik penerangan kantor yang dibutuhkan	100%	3.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	10.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	KecamatanHaur Gading	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	10.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	5 Jenis / 10 Ribu Lembar	4.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KecamatanHaur Gading	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	5 Jenis / 10 Ribu Lembar	4.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Materisi	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	30 Jenis	10.689.213	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	KecamatanHaur Gading	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	30 Jenis	10.689.213	
	- Sub KegiatanFasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Haur Gading	Persantese Pelaksanaan Rapat yang terealisasi	100%	10.000.000	- Sub KegiatanFasilitasi Kunjungan Tamu	KecamatanHaur Gading	Persantese PelaksanaanRapat yang terealisasi	100%	10.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	20.000.000	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KecamatanHaur Gading	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	20.000.000	

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	100%	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	100%	0	
	- Sub Kegiatan Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	0 Buah	0	- Sub Kegiatan Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	0 Buah	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93.600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93.600.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100%	5.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100%	5.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	15.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air &internet	100%	15.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Pelayanan umum kantor	100%	72.600.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Pelayanan umum kantor	100%	72.600.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	11.781.790	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gadin	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	11.781.790	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Mobil dan 4 Kendaran	8.781.790	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Mobil dan 4 Kendaran	8.781.790	

	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	2.000.000	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	2.000.000
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara	1 Buah	0	- Sub Kegiatan Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kecamatan Haur Gadin	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara	1 Buah	0
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah gedungkantor yang dipelihara	1 Buah	1.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunanlainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Buah	1.000.000
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**28.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**28.000.000**
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kecamatan Haur Gading	Persentase Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan	100%	25.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kecamatan Haur Gading	Persentase Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan	100%	25.000.000
	- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	25.000.000	- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	25.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya urusan yg dilimpahkan kepada Camat	100%	2.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya urusan yg dilimpah kan kepada Camat	100%	2.000.000
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan	100 Dokumen	1.000.000	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan	100 Dokumen	1.000.000
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusanpemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	4 Laporan	1.000.000	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	4 Laporan	1.000.000

	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dgn kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100%	1.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg tdk Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100%	1.000.000
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1.000.000	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kpd Masy di Wilayah Kec.	4 Laporan	1.000.000
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya PemberdayaanDesa	100%	10.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya PemberdayaanDesa	100%	10.000.000
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	100%	0	Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	100%	0
	- Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	- Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0
	- Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	- Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0

4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Trantib**	**100%**	**2.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Trantib**	**100%**	**2.000.000**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu di Kecamatan	100%	2.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemiludi Kecamatan	100%	2.000.000	
	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah TPS yang dimonitoring dan Barang Logistik yang diamankan	42 TPS/ 168 Barang Logistik	2.000.000	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah TPS yang dimonitoring dan Barang Logistik yang diamankan	42 TPS/ 168 Barang Logistik	2.000.000	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**0**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**0**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0	KegiatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec	1 Dokumen	0	
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Desa yang tertib administrasi**	**100%**	**15.000.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Desa yang tertib administrasi**	**100%**	**15.000.000**	
	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi & koordinasi pembinaan & pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan thdp pemerintah desa	100%	10.000.000	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi & koordinasi pembinaan & pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan thdp pemerintah desa	100%	10.000.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah desa yang tertib administrasi	18 Desa	5.000.000	- Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah desa yang tertib administrasi	18 Desa	5.000.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn pembangunan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Desa dgn Perencanaan Daerah	100%	10.000.000	- Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn pembangunan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Desa dgn Perencanaan Daerah	100%	10.000.000	
JUMLAH					**2.261.081.003**	**JUMLAH**				**2.601.281.003**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai hasil review terhadap rancangan awal RKPD tersebut di atas, maka setelah dilakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, maka untuk SKPD Kecamatan Haur Gading merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase pemenuhansarana dan prasarana kerja**	**100%**	**2.228.881.000**	**PAD**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen	1.500.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan yang disusun	8 Laporan	1.500.000	PAD	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.084.310.000	DAU	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	24 Orang	2.084.310.000	DAU	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	PAD	
	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yangmengikuti Bimtek	0 Orang	0	PAD	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	57.889.213	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Komponen Instalasi Listrik penerangan kantor yang dibutuhkan	100%	3.000.000	PAD	

	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	10.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	5 Jenis / 10 Ribu Lembar	4.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	30 Jenis	10.689.213	PAD	
	- Sub KegiatanFasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Haur Gading	Persantese Pelaksanaan Rapat yang terealisasi	100%	10.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	20.000.000	PAD	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	100%	0	PAD	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	0 Buah	0	PAD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93.600.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100%	5.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	15.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Pelayanan umum kantor	100%	72.600.000	PAD	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	11.781.790	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Mobil dan 4 Kendaran	9.781.790	PAD	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatandan mesin yang dipelihara	100%	2.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah rumah dinasjabatan yang dipelihara	1 Buah	0	PAD	

	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Buah	1.000.000	PAD	
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**28.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kecamatan Haur Gading	Persentase Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan	100%	25.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	25.000.000	PAD	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya urusan yg dilimpahkan kepada Camat	100%	2.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan	100 Dokumen	1.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	4 Laporan	1.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dgn kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah kewenanganlain yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	PAD	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100%	1.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1.000.000	PAD	
3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	100%	10.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kec	12 Laporan	10.000.000	PAD	

	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	100%	0	PAD	
	- Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	PAD	
	- Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	PAD	
4.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**	**2.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu di Kecamatan	100%	2.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah TPS yang dimonitoring dan Barang Logistik yang diamankan	42 TPS/ 168 Barang Logistik	2.000.000	PAD	
5.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**0**	**PAD**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0	PAD	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	PAD	
6.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Desa yang tertib administrasi**	**100%**	**15.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi & koordinasi pembinaan & pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan thdp pemerintah desa	100%	10.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah desa yang tertib administrasi	18 Desa	5.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah	100%	10.000.000	PAD	
	TOTAL				**2.283.381.000**		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.

Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Haur Gading dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selanjutnya dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Haur Gading mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sasaran

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang transparan dan akuntabel, meningkatnya pelayanan publik yang prima dan meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Haur Gading dapat dilihat dalam table berikut :

3.3. Program dan Kegiatan

Program Kantor Kecamatan Haur Gading tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan, sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Haur Gading Tahun 2023-2026. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Tabel : 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan HaurGading

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penyalenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB / 73,50	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Haur Gading	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
					Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72,46	73	73,45	73,50
2	Terwujudnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang Menjadi Desa Maju	100%	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	90%	90%	100%
3	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat Kecamatan	Persentase penurunan Angka Kriminalitas di masyarakat Kecamatan	100%	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentase penanganan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

BAB IV
RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) 2024 Kecamatan Haur Gading merupakan implementasi atas visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Haur Gading tahun 2023 s/d 2026 berisi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Haur Gading. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD Kecamatan Haur Gading, maka untuk tahun 2024 rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Haur Gading adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN HAUR GADING
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Sarana Kerja	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.204.581.003	2.204.581.003	0	0	0	0		100%	2.554.781.003
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas CapaianKinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		100%	3.000.000
7 01 01 2.01 01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kecamatan Haur Gading	4 Dokumen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		100 %	1.500.000
7 01 01 2.01 06	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Laporan yang disusun	Kecamatan Haur Gading	6 Laporan	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		100 %	1.500.000
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.040.010.000	2.040.010.000	0	0	0	0		100 %	2.380.210.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 01 2.02 01	- Sub kegiatan penyediaan gajidan tunjangan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Kecamatan Haur Gading	18 Orang	2.040.010.000	2.040.010.000	0	0	0	0		24 Orang	2.544.781.003
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7 01 01 2.05 11	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Haur Gading	100 %	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kecamatan Haur Gading	100 %	57.669.213	57.669.213	0	0	0	0		100 %	57.669.213
7 01 01 2.06 01	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	5 Jenis Komponen	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		100 %	3.000.000
7 01 01 2.06 02	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Haur Gading	5 Jenis	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 01 2.06 05	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	5 Jenis/ 20 ribu lembar	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		100 %	4.000.000
7 01 01 2.06 07	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kecamatan Haur Gading	30 Jenis	10.689.213	10.689.213	0	0	0	0		100 %	10.689.213
7 01 01 2.06 08	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan rapat yang terealisasi	Kecamatan Haur Gading	100 %	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000
7 01 01 2.06 09	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kecamatan Haur Gading	20 Kali	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0		100 %	20.000.000
7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Kecamatan Haur Gading	100 %	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7 01 01 2.07 01	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibelisesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	0 Buah	0	0	0	0	0	0		100 %	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	93.600.000	93.600.000	0	0	0	0		100 %	93.600.000
7 01 01 2.08 01	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase suratmenyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	Kecamatan Haur Gading	100 %	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	5.000.000
7 01 01 2.08 02	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhankebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
7 01 01 2.08 03	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Haur Gading	100 %	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		100 %	1.000.000
7 01 01 2.08 04	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Haur Gading	100 %	72.600.000	72.600.000	0	0	0	0		100 %	72.600.000
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	11.781.790	11.781.790	0	0	0	0		100 %	11.781.790

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 01 2.09 01	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	2 Buah	8.781.790	8.781.790	0	0	0	0		100 %	8.781.790
7 01 01 2.09 06	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	..... Buah	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		100 %	2.000.000
7 01 01 2.09 07	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	1 Buah	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7 01 01 2.09 09	- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	1 Buah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		100 %	1.000.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Haur Gading	100 %	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0		100 %	13.000.000
7 01 01 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan	Persentase PenyelenggaraanRembuk Stunting di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	100 %	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0		100 %	25.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikatorkinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Mumi	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 01 2.01 01	- Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Haur Gading	2 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0		2 Kegiatan	25.000.000
7 01 01 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Pelayanan Publik yang Prima	Kecamatan Haur Gading	100 %	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		100 %	1.000.000
7 01 01 2.02 03	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kpd Masyarakat	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		100 %	1.000.000
7 01 02 2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkankepada Camat	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		100 %	2.000.000
7 01 02 2.04 01	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Pelayanan Perizinan non usaha yang dikeluarkan	Kecamatan Haur Gading	100 Dokumen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		100 %	1.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
												APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
													Fisik	Pendamping					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	01	02	2.04	02	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		100 %	1.000.000
7	01	02	2.04	03	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah kewenangan lainyang dilaksanakan	Kecamatan Haur Gading	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi dalam pembangunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	100 %	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi dalam pembangunan	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	100 %	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000
7	01	03	2.01	03	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kecamatan Haur Gading	5 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000
7	01	03	2.05		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Persentase Suksesnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Kecamatan Haur Gading	100 %	0	0	0	0	0	0		100 %	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 03 2.05 01	- Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 d Desa	Kecamatan Haur Gading	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7 01 03 2.05 02	- Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 d Desa	Kecamatan Haur Gading	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi dalam pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi Trantib	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		100 %	2.000.000
7 01 04 2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentramandan ketertiban umum	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dlm pembangunan	Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilu Kada di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		100 %	2.000.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Desayang Tertib Administrasi	Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
7 01 06 2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yg dilaksanakan terhadap pemerintahDesa	Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 06 2.01.01	-Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Desa yang tertib administrasi	Kecamatan Haur Gading	18 Desa	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	5.000.000
7 01 06 2.01.09	-Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase sinkronnya Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000
JUMLAH KEBUTUHAN DANA TAHUN 2024							2.261.081.003	2.261.081.003							2.601.281.003

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan untuk program kegiatan kepala SKPD Kecamatan Haur Gading berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Haur Gading Tahun 2023 – 2026.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Haur Gading dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi misi Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Haur Gading.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Haur Gading. ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Haur Gading ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi dilaksanakannya Rencana Kinerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2024 ini, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2) Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin, dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk

memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Haur Gading sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk nantinya menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagisegenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Haur Gading. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Haur Gading telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Amuntai, 5 Maret 2023

CAMAT HAUR GADING



[illegible] SSTP,M.AP

NIP. 19[illegible]200212 1 004

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BABIRIK

SEKRETARIAT

SUBBAG PROGRAMDAN DATA

KECAMATAN BABIRIK

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN BABIRIK
Alamat : Jalan Alabio _ Babirik No.082 Rt.III Babirik Hilir Kec.Babirik Kab.Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan Email : kec-babirik@hsu.go.id Kode Pos 71454

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan ini berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyajian Renja Perubahan merupakan salah satu upaya kami dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis dan berisi informasi mengenai program dan kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Babirik Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini sangat kami harapkan.

Mengetahui,
CAMAT BABIRIK,

FIKRI H. HAMI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 19850402 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1 Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum Penyusunan 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BABIRIK TRIWULAN II **8**

2.1 ProgramKegiatan Tahun 2024 8

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 14

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2024 ..... **20**

3.1. Rencana Kerja pada Kantor Kecamatan Babirik 20

3.2 Anggaran Belanja Kecamatan Babitik 22

BAB V PENUTUP **30**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen rencana kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Babirik Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pada laporan realisasi Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri atas realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana kegiatan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan perlu adanya perubahan pada Renja Tahun 2024 dengan tujuan untuk memberikan hasil pencapaian target kinerja Tahun 2024 yang optimal.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Babirik Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, yang menjadi acuan seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024. Renja adalah dokumen yang dapat menginterpretasikan visi, misi dan prorgram yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kec Babirik serta sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja Kecamatan Babirik diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun yang akan datang.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan perubahan Renja Tahun 2024 adalah terdapat pergeseran anggaran antar program, kegiatan/sub kegiatan maupun antar jenis belanja serta penyesuaian target berdasarkan perkembangan terbaru.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babirik tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkup Pemerinah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dan karyawati dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2024 dapat tercapai
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Babirik dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Dalam penyusunan Renja Perubahan ada beberapa hal yang menjadi tujuan untuk dicapai oleh Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Babirik
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Babirik
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas camat berikutnya
5. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
6. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik

7. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
8. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
9. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BABIRIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
- 2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Babirik sampai dengan Triwulan II tahun 2024

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BABIRIK TAHUN 2024

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BABIRIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Babirik pada tahun 2024 maka perlu perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang memuat 4 program dengan 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Defenitif (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.125.280.886
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	1.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	1.500.000
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.972.135.436
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	1.972.135.436
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	5.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Definitif (Rp)
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.464.350
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	3.017.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	3.485.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50	Paket	6.489.850
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	20.472.000
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88.553.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.280.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	27.994.400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	57.279.000
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.127.700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	18.327.700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	4.800.000
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu

	Program/Kegiatan				Defenitif (Rp)
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.150.000
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100.150.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	300	Dokumen	57.150.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	50	Laporan	7.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25	Laporan	36.000.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				15.000.000
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	15.000.000
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.000.000
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23	Dokumen	10.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	10.000.000

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Babirik sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja merupakan langkah penting dalam mengukur keberhasilan dan efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dan target yang ditetapkan dalam Renja telah tercapai, serta untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan penyempurnaan Renja di masa depan, sehingga visi dan misi Kecamatan Babirik dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Babirik Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II maka dapat disampaikam bahwa adanya hasil capaian kinerja dari 4 program dengan 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan indikator capaian progran dengan realisasi anggaran sebesar 37,50 % atau sebesar Rp 906.075.366 (*Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) dari total anggaran 2.260.430.886 (*Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Hasil Capaian pada indikator program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sangat rendah (0 - ≤50) sebanyak 20 indikator
2. Rendah (51 - ≤65) sebanyak 1 indikator
3. Sedang (66 - ≤75) sebanyak 0 indikator
4. Tinggi (76 - ≤90) sebanyak 3 indikator
5. Sangat tinggi (91 – 100) sebanyak 4 indikator

Rincian capaian kinerja dan realisasi keuangan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Kecamatan Babirik dapat dilihat pada Formulir Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan II dari aplikasi E Monev.

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KEC. BABIRIK
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Jemabtan Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II											
												(3)	(3)										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.						
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	n/a	n/a	9	n/a	9	n/a	9	n/a	4	n/a	4					n/a	9	n/a	44%	n/a	4,44		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	1.01.03	PENGADAAN PENGELOLAAN BARJASA	n/a	n/a	9	n/a	9	n/a	9	n/a	3	n/a	3					n/a	9	n/a	33,33%	n/a	3,33		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	1.05.03	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECILMENENGAH DAN PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN UMK	n/a	n/a	9	n/a	9	n/a	9	n/a	3	n/a	3					n/a	9	n/a	33,33%	n/a	3,33		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	1.01.02	PROGRAM PENGELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tertib administrasi pemerintah kecamatan dan kelurahan	400 %	400.000.000	0 %	81.250.000	100 %	100.250.000	29 %	23.125.000	32 %	36.857.000					80 %	36.857.000	80,00%	79,69%	80 %	110.057.000,00	72,00	25,31	
	7.01.02.2.04	Pelayanan Umum Pemerintahan yang Dilaksanakan Kecuali Cukup	Terwujudnya Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	400 %	400.000.000	0,00 %	81.250.000	100 %	100.250.000	29 %	23.125.000	32 %	36.857.000					80 %	36.857.000	80,00	79,69	230 %	110.057.000,00	47,50	0,00	
5	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Lokasi dengan Kecamatan Perlunan Koordinasi	Jumlah Dokumen dan Pelayanan Publik yang Difasilitasi	1200 Dokumen	124.000.000	900 Dokumen	57.500.000	300 Dokumen	57.500.000	70 Dokumen	7.125.000	190 Dokumen	40.720.000	170 Dokumen	26.728.000	56,50	46,49	457 Dokumen	71.868.000,00	27,50	34,06	Kec. Babirik		
6	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Lokasi dengan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan	200 Laporan	24.000.000	200 Laporan	0	50 Laporan	7.500.000	Laporan	1	0 Laporan	2.184.000	0 Laporan	2.189.000	50,00	24,97	108 Laporan	2.189.000,00	108,00	0,24	Kec. Babirik		
7	7.01.02.2.04.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Lokasi dengan Kecamatan Lain yang Ditingkatkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Ditingkatkan	100 Laporan	144.000.000	75 Laporan	36.000.000	25 Laporan	30.000.000	7 Laporan	6.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	52,00	34,00	80 Laporan	56.000.000,00	38,00	27,50	Kec. Babirik		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		35,21	34,41			63,00	34,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		100,00	79,69			57,50	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Sampai dengan Tahun Lalu (2022)		Target Rencana dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2023 yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				I		II		III		I		II		III	IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7*100%		14=12/5		15=12/7*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	K	Rp	%	%	
1	1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pemenuhan/pelayanan administrasi	100 %	82.000.000	100 %	0	100 %	22.000.000	25 %	800.000	50 %	2.200.000			50 %	2.800.000	50,00	53,84	50 %	9.600.000,00	53,84	53,84	
	1.01.01.2.01	Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan Rutin	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Rutin	xxx	40.000.000	xxx	0	xxx	15.000.000	xxx	4.000.000	xxx	3.000.000			xxx	7.000.000	0,00	0,00	xxx	3.000.000	0,00	0,00	
a.	1.01.01.2.01.03	Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Perkantoran	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Perkantoran yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.000.000	0 laporan	0	4 Laporan	15.000.000	3 laporan	4.000.000	1 Laporan	3.000.000			3 Laporan	7.000.000	50,00%	50,00	3 Laporan	3.000.000,00	50,00	0,00	Kec. Bayat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				50,00	53,84				
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00						
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2	1.01.02	Program PENGEMBANGAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxx	xxx	0	xxx	0	xxx	0	xxx	0	xxx	0			xxx	0	xxx	0,00	xxx	0,00	xxx	0,00	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00						
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3	1.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	xxx	xxx	0	xxx	0	xxx	0	xxx	0	xxx	0			xxx	0	xxx	0,00	xxx	0,00	xxx	0,00	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00						
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4	1.01.06	PROGRAM PEMBINAAN UNIT PEMERINTAHAN KEWILAYAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase Desa yang ILPD sehat/cukup	100 %	82.000.000	100 %	0	100 %	22.000.000	25 %	5.500.000	50 %	3.670.000			50 %	2.470.000	50,00	50,00	50 %	2.470.000,00	53,33	3,33	
	1.01.06.2.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi kelembagaan dan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Desa	100 %	82.000.000	100 %	0	100 %	22.000.000	25 %	5.500.000	50 %	3.670.000			50 %	2.470.000	50,00	50,00	50 %	2.470.000,00	53,33	3,33	
a	1.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	83 Dokumen	82.000.000	83 Dokumen	0	83 Dokumen	22.000.000	0 Dokumen	1.500.000	0 Dokumen	3.670.000			0 Dokumen	2.470.000	0,00	0,00	0 Dokumen	2.470.000,00	53,33	3,33	Kec. Bayat
b	1.01.06.2.01.04	Fasilitasi Administrasi Perangkat Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Pemerintah Desa	83 Dokumen	82.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	22.000.000	0 Dokumen	4.000.000	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kec. Bayat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00						
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2026 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja SKPD 2026 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100%		14=4+12		15=14/1x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																000.00	00.00			00.00	0.00		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang		
6	X.XX.XX	PROGRAM PENGEMBANGAN UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	000 %	X.XXX.XXX.XXX	-9 %	(XXX.XXX.XXX	000 %	(XXX.XXX.XXX	-9 %	XXX.XXX.XXX	00 %	XXX.XXX.XXX			00 %	XXX.XXX.XXX	00.00	-40.47	00 %	(XXX.XXX.XXX.XX	00.00	27.91		
	X.XX.01.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	000 %	(XXX.XXX	000 %	(XXX.XXX	000 %	(XXX.XXX	0 %	0	00 %	(XXX.XXX			00 %	(XXX.XXX	00.00	00.00	000 %	(XXX.XXX.XX	00.00	0.00		
7	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	00 Dokumen	XXX.XXX	00 Dokumen	XXX.XXX	00 Dokumen	(XXX.XXX	Dokumen	0	0 Dokumen	XXX.XXX			0 Dokumen	XXX.XXX	00.00	00.00	00 Dokumen	(XXX.XXX.XX	00.00	00.00	Kec. Bajoeta	
8	X.XX.01.2.01.04	Monitoring dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Aset Kabupaten	00 Laporan	XXX.XXX	00 Laporan	XXX.XXX	00 Laporan	(XXX.XXX	Laporan	0	00 Laporan	XXX.XXX			00 Laporan	XXX.XXX	00.00	00.00	00 Laporan	(XXX.XXX.XX	00.00	00.00	Kec. Bajoeta	
		Rata-rata Capaian Kinerja (SUb Kegiatan) (%)																00.00	00.00			00.00	00.00		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	000 %	(XXX.XXX.XXX	000 %	(XXX.XXX.XXX	000 %	(XXX.XXX.XXX	000 %	XXX.XXX.XXX	000 %	XXX.XXX.XXX			000 %	XXX.XXX.XXX	000.00	-00.00	000 %	(XXX.XXX.XXX.XX	00.00	0.00		
9	X.XX.01.2.02.01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	000 %	(XXX.XXX.XXX	-000 %	(XXX.XXX.XXX	000 %	(XXX.XXX.XXX	-000 %	XXX.XXX.XXX	-000 %	XXX.XXX.XXX			000 %	XXX.XXX.XXX	000.00	-00.00	000 %	(XXX.XXX.XXX.XX	00.00	-27.70	Kec. Bajoeta	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																000.00	-00.00			00.00	-27.70		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	X.XX.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	000 %	XX.XXX.XXX	000 %	0	000 %	(XXX.XXX	0 %	0	0 %	0			0 %	0	0.00	0.00	000 %	0.00	00.00	0.00		
10	X.XX.01.2.03.11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 orang	XX.XXX.XXX	0 orang	0	0 orang	(XXX.XXX	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0.00	0.00	0 orang	0.00	00.00	0.00	Kec. Bajoeta	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																0.00	0.00			00.00	0.00		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	X.XX.02.2.50	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Sarana dan Prasarana Kerja	000 %	XXX.XXX.XXX	-00 %	-XX.XXX.XXX	-00 %	-XX.XXX.XXX	-00 %	(XXX.XXX	-00 %	-XX.XXX.XXX			-00 %	-XX.XXX.XXX	-00.00	-00.00	-00 %	-(XXX.XXX.XXX.XX	-00.00	-00.00		
11	X.XX.01.2.50.11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Penyediaan Fasilitas Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Fasilitas yang Disediakan	00 Paket	XX.XXX.XXX	00 Paket	0	00 Paket	(XXX.XXX	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0.00	0.00	00 Paket	0.00	00.00	0.00	Kec. Bajoeta	

Salinan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2024 yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I	II	III	IV	V		VI		VII		VIII						IX		X		XI=(IX/X)*100%		XII		XIII
				Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	I	Rp	II	Rp	III	IV	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	
1.1	1.03.01.2.04.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	118.945.000	70 Paket	4.230.000	72 Paket	2.484.000	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0,00	0,00	80 Paket	4.178.959.000	25,00	29,66	Kec. Gianyar
1.2	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	200 Paket	23.959.600	50 Paket	7.211.111	10 Paket	6.889.002	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0,00	0,00	50 Paket	7.121.000,00	15,00	17,28	Kec. Gianyar
1.4	1.03.01.2.26.18	Penyelenggaraan Tugas Bantuan Di Kecamatan (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas Bantuan Di Kecamatan (OPD	48 Laporan	80.000.000	12 Laporan	12.956.000	12 Laporan	20.670.000	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	11.470.000			6 Laporan	11.470.000	100,00	38,00	12 Laporan	29.918.000,00	90,00	93,00	Kec. Gianyar
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																23,00	14,41			28,75	23,13	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	1.03.02.2.00	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan/ Daerah	Persentase jasa pengelolaan limbah/sampah	400 %	399.213.600	200 %	92.770.845	200 %	88.155.420	25 %	10.000.424	50 %	41.110.158			50 %	51.110.000	50,00	96,45	250 %	204.840.970,00	27,42	0,00	
1.1	1.03.02.2.03.01	Pengelolaan dan Survei Pencucian	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Survei Pencucian	50 Laporan	54.120.000	12 Laporan	1.320.000	12 Laporan	1.200.000	Laporan	0	3 Laporan	2.000.000			3 Laporan	1.800.000	50,00	90,00	10 Laporan	2.700.000,00	17,00	18,00	Kec. Gianyar
1.2	1.03.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terbuka Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terbuka Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dilaksanakan	48 Laporan	222.977.600	23 Laporan	23.687.845	12 Laporan	27.995.420	3 Laporan	9.000.424	6 Laporan	12.110.158			6 Laporan	12.110.200	50,00	93,79	50 Laporan	31.696.970,00	27,00	31,79	Kec. Gianyar
1.3	1.03.02.2.08.04	Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman	48 Laporan	118.116.000	12 Laporan	38.592.000	12 Laporan	37.270.000	3 Laporan	8.000.000	6 Laporan	27.000.000			6 Laporan	33.800.000	50,00	93,34	10 Laporan	83.592.000,00	17,00	38,00	Kec. Gianyar
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																12,00	10,33			27,00	29,54	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	1.03.10.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelengkapan barang milik daerah	400 %	80.210.600	200 %	19.962.741	200 %	22.127.700	25 %	1.602.500	50 %	9.420.000			50 %	3.820.000	50,00	40,60	250 %	34.994.745,00	27,00	0,00	
1.8	1.03.10.2.08.01	Pemeliharaan dan Perawatan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	73.320.600	4 Unit	17.737.745	9 Unit	22.127.700	2 Unit	1.502.500	4 Unit	6.284.000			4 Unit	3.284.000	100,00	50,00	11 Unit	27.529.745,00	27,50	36,07	Kec. Gianyar
1.9	1.03.10.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	14.200.000	30 Unit	1.320.000	20 Unit	4.800.000	1 Unit	0	1 Unit	141.000			0 Unit	141.000	25,00	0,00	21 Unit	2.972.000,00	23,33	7,67	Kec. Gianyar
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																17,50	16,91			69,50	21,21	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																177,50	60,50			81,63	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																22,13	13,81			0,84	0,39	
		Predikat Kinerja (Program)																Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Ditetapkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja 2023 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2031 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2031		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2031		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/5x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	11																	42,79	40,98			37,21	35,71	
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program					1.260.631.886			329.710.283		609.075.300				609.075.300							
	Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja		Memiliki visi yang jelas serta tujuan yang spesifik dan terukur dalam kerangka pencapaian yang sejalan dan saling mendukung antara individu untuk mencapai tujuan bersama																					
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Kurangnya dana untuk alat kerja seperti alat tulis, atau untuk saya kurang saat mengumpulkan berkasnya untuk menyelesaikan tugas-tas mencapai tujuan yang ditetapkan.																					
	Tindak Lanjut yang Dilakukan dalam Triwulan Berikutnya		Diperlukan evaluasi efektivitas administrasi, memperkuat sistem kerjasama yang baik antara unit kerja, memberdayakan dan mengelola faktor pendukung pencapaian kinerja																					

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BABIRIK TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan semeter I hampir semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatana Babirik dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Beberapa hal yang menyebabkan tersebut disebabkan oleh sebagian besar program dan kegiatan serta sub kegiatan tersebut masuk dalam Non Urusan. Demikian pula dengan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, namun hal tersebut bukan berarti SKPD Kecamatan Babirik tidak menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 ini.

Setiap SKPD harus melakukan review terhadap Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini karena merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung penyerapan anggaran serta tercapainya visi dan misi SKPD Kecamatan sehingga menunjang pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkesinambungan.

Tahun Anggaran 2024 ini SKPD Kecamatan Babirik mendapatkan penambahan anggaran sehubungan dengan adanya program yang baru dimasukkan yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). SKPD Kecamatan Babirik perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 dengan melakukan pergeseran pagu anggaran pada beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan. Untuk SKPD Kecamatan Babirik mendapatkan

penambahan anggaran sebesar Rp. 74.582.880,- (*Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Babirik Tahun 2024 yang mengalami pergeseran baik pengurangan dan penambahan Pagu Anggarannya dapat dilihat pada rincian-rincian berikut ini :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 3.200.000,-
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 2.100.000,-
2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Tidak ada penambahan atau pengurangan pagu anggaran
3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
   a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

      Tidak ada penambahan atau pengurangan pagu anggaran
4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

c. Penyediaan Bahan/Material

d. Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tidak ada penambahan atau pengurangan pagu anggaran

5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tidak ada penambahan atau pengurangan pagu anggaran

6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak ada penambahan atau pengurangan pagu anggaran

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan

Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000,-

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Tidak ada penambahan atau pengurangan pagu anggaran

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wil. Kec.

Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000,-

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.300.000,-

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.200.000,-

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 13.800.000,-

b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 2.700.000,-

Adanya beberapa penambahan dan pengurangan pada Renja SKPD Kecamatan Babirik diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran pada SKPD Kecamatan Babirik agar tercipta efisiensi anggaran yang dapat mendukung tercapai visi dan misi SKPD sesuai dengan tujuan serta visi misi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Optimalisasi anggaran ini dapat dilihat pada Rumusan Rencana Kerja Perubahan pada program dan kegiatan serta sub kegiatan SKPD Kecamatan Babirik Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Babirik Tahun 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.125.280.886	2.182.703.766	57.422.880
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000	8.300.000	5.300.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	1.500.000	4.700.000	3.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	1.500.000	3.600.000	2.100.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.972.135.436	1.972.145.316	9.880
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	1.972.135.436	1.972.145.316	9.880
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	5.000.000	0	

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.464.350	83.905.750	50.441.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	3.017.500	3.017.500	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	3.485.000	7.250.000	3.765.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50	Paket	6.489.850	9.078.250	2.588.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	20.472.000	64.560.000	44.088.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88.553.400	89.087.000	533.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.280.000	3.280.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	27.994.400	27.994.400	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	57.279.000	57.812.600	533.600

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.127.700	29.265.700	6.138.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	18.327.700	20.327.700	2.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	4.800.000	8.938.000	4.138.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.150.000	97.610.000	(2.540.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100.150.000	97.610.000	(2.540.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	300	Dokumen	57.150.000	54.650.000	(2.500.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	50	Laporan	7.000.000	6.960.000	(40.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25	Laporan	36.000.000	36.000.000	0

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				15.000.000	16.100.000	1.100.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.000.000	16.100.000	1.100.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	15.000.000	16.100.000	1.100.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.500.000	7.500.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					4.300.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23	Laporan		4.300.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					3.200.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INdonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23	Laporan		3.200.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
				Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.000.000	31.100.000	11.100.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.000.000	31.100.000	11.100.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23	Dokumen	10.000.000	23.800.000	13.800.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	10.000.000	7.300.000	(2.700.000)
Jumlah				2.260.430.886	2.335.013.766	72.162.880

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Babirik disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tingkat kecamatan. Perubahan ini merupakan upaya untuk mencapai target pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melaluli penyusunan Renja Perubahan Ini, SKPD Kecamatan Babirik berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi yang ada, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan berfokus pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program yang telah dirumuskan diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata dan berkeadilan.

Akhirnya diharapkan agar seluruh pihak dapat bersinergi dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan seluruh target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, SKPD Kecamatan Babirik optimis dapat mencapai hasil optimal untuk kesejahteraan warganya.

Mengetahui,
CAMAT BABIRIK,

FIKRI ILHAMI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 19850402 200312 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SKPD KECAMATAN SUNGAI PANDAN TAHUN 2024

III

KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia dan HidayahNya kepada kita semua. Tak lupa pula Shalawat dan Salam kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya dari dulu hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaiaan Dokumen ini. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sungai Pandan ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kenerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (renja) Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Sungai Pandan pada Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam pembuatan Rencana Kera (Renja) Perubahan selanjutnya.

Camat Sungai Pandan,

HURIYANUR,S.IP
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19710710 199503 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Pandan Kabupate Hulu Sungai Utara s/d Tw Tahun 2024 (s/d Juni 2024)	6
Tabel 2.2	Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu sungai Utara s/d Tw Tahun 2024(s/d Juni 2024).....	9
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Renja Perubahan Tahun 2024.....	13

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			I
DAFTAR ISI			II
DAFTAR TABEL			III
BAB I :	PENDAHULUAN		1
	I.1.	Latar Belakang	1
	I.2.	Landasan Hukum	2
	I.3.	Maksud dan Tujuan	4
	I.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II :	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PANDAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		6
	2.1.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran	6
	2.2.	Rekapitulasi Capaian Kinerja	9
BAB III :	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		12
	3.1	Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Sungai Pandan	13
BAB IV:	PENUTUP		16

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2024 telah berjalan dan diketahui ada beberapa hal tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sehingga perlu adanya perbaikan dan perubahan-perubahan baik berupa indikator kegiatan maupun target kinerja. Rencana Kerja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan SKPD berperan penting dalam setiap kinerja dalam suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan diawali dengan adanya usulan dari Seksi-seksi dan Sekretariat selaku PPTK yang mengharuskan SKPD untuk melakukan perubahan dan selanjutnya menganalisa gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Pandan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun yang lalu serta mengacu pada Renstra SKPD kecamatan Sungai Pandan yang berdasarkan pada penelahaan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang Desa maupun Kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra SKPD Kecamatan Sungai Pandan dan mengacu pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
b. Rumusan program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan didasarkan atas pertimbangan-

Dipindai dengan CamScanner

pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan SKPD Kecamatan Sungai Pandan.

c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan tahun 2024 sebagian besar merupakan pergeseran pagu anggaran kegiatan yang kurang maksimal penyerapannya ke pagu anggaran yang lebih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2024.

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan tahun 2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2021 Tentang Kedudukan, Susususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perlimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
18. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor:100.3.3.2/356/KUM/2024 tentang Kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Camat;

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2024.
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

Dipindai dengan CamScanner

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2024.

4. Memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2024 disusun berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2024.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1. 1. Latar Belakang
- 1. 2. Landasan Hukum
- 1. 3. Maksud dan Tujuan
- 1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran
- 2.2. Realisasi Capaian Kinerja

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Program dan kegiatan SKPD Kantor Camat Sungai Pandan pada Renja Perubahan Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PANDAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Sebagaimana isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut maka SKPD Kecamatan Sungai Pandan perlu melakukan evaluasi untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

Adapun realisasi anggaran Kecamatan Sungai Pandan sampai dengan Triwulan II (Juni 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
REALISASI ANGGARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
S/D TW II TAHUN 2024 (S/D JUNI 2024)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW II (Rp)	%
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.648.759.100**	**1.184.711.049**	**44.72**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.700.000**	**1.486.000**	**40.16**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	1.370.000	62.27
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	116.000	7.73
1.3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.348.287.000**	**1.072.411.996**	**45.66**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.348.287.000	1.072.411.996	45.66
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.040.450**	**24.087.599**	**24.07**
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.198.600	0	0
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.916.400	871.000	1.03
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.364.800	556.800	6.65
1.3.4	Penyediaan Bahan/Material	14.651.650	3.427.000	23.38

Dipindai dengan CamScanner

1.1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.909.000	19.232.799	29.18
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**167.652.600**	**84.303.409**	**50.28**
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.199.000	21.190.009	51.43
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.453.600	63.113.400	49.91
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.079.050**	**2.422.045**	**8.3**
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.490.000	2.392.045	13.67
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	30.000	0.6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.089.050	0	0
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.900.000**	**540.000**	**13.84**
2.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1.500.000**	**0**	**0**
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.500.000	0	0
2.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2.400.000**	**540.000**	**22.5**
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.200.000	0	0
2.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.200.000	540.000	45
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**30.300.000**	**1.000.000**	**3.30**
3.1	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**30.300.000**	**1.000.000**	**3.30**
3.1.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30.300.000	1.000.000	3.30
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.200.000**	**870.000**	**72.5**
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1.200.000**	**870.000**	**72.5**
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.200.000	870.000	72.5
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**11.175.000**	**510.000**	**4.56**

Dipindai dengan CamScanner

5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	11.175.000	510.000	4.56
5.1.1	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	1.500.000	510.000	3.4
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.675.000	0	0
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.200.000**	**3.781.000**	**46.10**
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8.200.000**	**3.781.000**	**46.10**
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.200,000	0	0
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000,000	406.000	13.53
6.1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.000.000	3.375.000	84.37
Jumlah		**2.703.534.100**	**1.191.412.049**	**44.06**

Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Sungai Pandan baru terealisasi sebesar Rp.1.191.412.049,- (44.06 %) dari seluruh anggaran yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan program/kegiatan dan pembinaan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Sungai Pandan perlu dikelola secara optimal.

Dipindai dengan CamScanner

2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja.

Adapun capaian kinerja Kecamatan Sungai Pandan tahun 2024 sampai dengan triwulan II (Juni 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.2
EVALUASI CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
S/D TW II TAHUN 2024 (S/D JUNI 2024)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN TW II	INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME / KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI S/D TW II TAHUN 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100%**	**84.96**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	%	100%	90.90
Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6
Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan**	%	100%	100
Terlaksanannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	orang	22	22
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	100%	22.80
Terlaksanannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	35	0
Terlaksanannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	20	1
Terlaksanannya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	3
Terlaksanannya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	35	4
Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100%	50
Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Laporan	48	24
Terlaksanannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6

Dipindai dengan CamScanner

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**%**	**100**	**61.1**
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan di bayarkan Pajaknya	unit	11	11
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	0
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**%**	**100%**	**50**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100%**	**50**
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	6
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase TerlaksanayaUrusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat**	**%**	**100%**	**50**
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	6
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan**	**%**	**100%**	**200**
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100**	**200**
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	33	95
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**50**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**50**
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	12	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**%**	**100**	**0.83**

Dipindai dengan CamScanner

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**0.83**
Terlaksananya Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi Pancasial	Lembaga	5	5
Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100**	**62.58**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100**	**62.58**
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	330	157
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	330	245
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	11	11

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi SKPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana kerja perubahan tahun 2024 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada terutama anggaran.

Rencana kerja perubahan Kecamatan Sungai Pandan tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang sesuai dengan program dan kegiatan dengan anggaran yang ada dan rapkan dapat digunakan secara efektif dan oftimal. Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sungai Pandan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dimaksimalkan pada setiap tahapan agar diperoleh hasil yang maksimal, serta umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pandan pada renja Perubahan.

Adapaun progaram dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PADA RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BETAMBAH/BERKURANG (RP)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.648.759.100**	**2.661.579.100**	**12.820.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**3.700.000**	**3.350.000**	**-350.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	1.850.000	-350.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.348.287.000**	**2.348.287.150**	**150**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.348.287.000	2.348.287.150	150
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100.040.450**	**106.052.700**	**6.012.250**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.198.600	2.198.600	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.916.400	8.916.050	-350
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.364.800	8.367.400	2.600
Penyediaan Bahan/Material	14.651.650	14.701.650	50.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.909.000	71.869.000	5.960.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**167.652.600**	**173.952.300**	**6.299.700**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.199.000	46.198.700	4.999.700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.453.600	127.753.600	1.300.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**29.079.050**	**29.936.950**	**857.900**

Dipindai dengan CamScanner

Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.490.000	20.490.000	3.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	5.500.000	1.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.089.050	3.946.950	-3.142.100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**3.900.000**	**4.700.000**	**800.000**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.500.000	1.500.000	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**2.400.000**	**3.200.000**	**800.000**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketenteraman	1.200.000	1.200.000	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.200.000	2.000.000	800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**30.300.000**	**24.210.000**	**-6.090.000**
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**30.300.000**	**24.210.000**	**-6.090.000**
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30.300.000	24.210.000	-6.090.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.200.000	1.200.000	0

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**11.175.000**	**3.495.000**	**-7.680.000**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.175.000	3.495.000	-7.680.000
Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	1.500.000	3.495.000	1.995.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.675.000	0	-9.675.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**8.200.000**	**23.200.000**	**15.000.000**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.200.000	23.200.000	15.000.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.200.000	1.200.000	0
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000	18.000.000	15.000.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.000.000	4.000.000	0
Jumlah	2.703.534.100	2.718.384.100	14.850.000

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja perubahan Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga perubahan anggaran dapat memacu tercapainya kualitas kinerja agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja Perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara Yang Maju dan Sejahtera. Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Sungai Pandan, Juli 2024

Camat Sungai Pandan,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

FAJRIYANUR,S.IP
Pembina TK.I (III/d)
NIP. 19710710 199503 1 003

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Landasan Hukum 2
- 1.3 Maksud dan Tujuan 6
- 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 8
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II 8
- 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan 13
- 2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 15
- 2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran 15

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 18
- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 18
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disperkimlh 24
- 3.3 Program dan Kegiatan Disperrkimlh 26

BAB IV Penutup 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap perubahan dengan hirarki perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan memiliki Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja perangkat daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan yakni a) persiapan penyusunan;b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan;d) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi. Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan program. kegiatandan sub kegiatan baik yang termuat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai operasionalisasi RKPD yang disertai upaya peningkatan kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke 3 (dua) dari Rencana Strategis Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai pada triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024. permasalahan yang ada. dan dokumen perencanaan pada tahun 2024 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 berpedoman pada beberapa regulasi, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentangPerpanjanganPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan/Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Hulu Sungai Utara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032;
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
35. Peratruan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026; dan
36. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 disusun dengan maksud :

a. Menjabarkan arah rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
b. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran/dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan pagu indikatif Tahun 2024;
c. Sebagai landasan dan sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi dan keselarasan perencanaan tahunan Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Menjadikan Rencana Kerja sebagai alat/perangkat dalam manajemen perencanaan yang efektif, efesien dan akuntabel Tahun 2024;
3. Menyediakan informasi dan gambaran hasil yang akan dilaksanakan serta menyajikan indikator kinerja Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program Tahun 2024;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran(RKA-P) Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II DINAS PERUMAHAN. KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan
- 2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Capain Program Renstra Perangkat Daerah
- 2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tiwulan II

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengendalian ini selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan :

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara Renja dengan Renstra; dan
c. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pelaksanaan Perubahan Renja 2024, maka salah satu yang harus dipedomani adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan terhadap Rencana Kerja SKPD yang tertuang dalam APBD tahun 2024 sampai berakhirnya Triwulan II memperlihatkan bahwa perkembangan pada aspek kinerja rata-rata Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mencapai 19.58%, sedangkan dalam hal penyerapan anggaran baru mencapai 29.88%. Jumlah Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang berbagai program prioritas daerah serta pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta urusan bidang urusan lingkungan hidup adalah sebsar Rp. 19.493.908.145,- dan sampai berakhirnya triwulan II atau semester I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.825.331.684,- atau 29.88%. Diharapkan pada sisa triwulan yang ada di semester II tahun 2024 ini dapat direalisasikan secara lebih optimal.

Secara ringkas realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini dapat disajikan pada matriks berikut :

Realisasi Disperkimlh Per Triwulan II Tahun 2024				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Anggaran MURNI**	**Realisasi Keuangan (Rp)**	**%**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9,210,167,005**	**2,818,928,591**	**30.61**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28,131,000**	**690,000**	2.45
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,302,500	-	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,938,000	-	-
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,938,000	-	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,940,000	-	-
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,940,000	690,000	23.47
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,210,000	-	-
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,862,500	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8,218,582,155**	**2,447,607,090**	29.78
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,217,619,655	2,447,607,090	29.78
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	962,500	-	-
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**31,250,000**	**15,925,000**	50.96
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beria atribut kelengkapannya	21,250,000	15,925,000	74.94
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	-	-
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**303,542,250**	**158,291,244**	52.15
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,212,600	9,230,000	82.32
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115,737,650	50,100,600	43.29
1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176,592,000	98,960,644	56.04
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**424,722,600**	**159,788,957**	37.62

1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,895,000	73,389,557	48.96
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,250,000	3,915,000	18.47
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253,577,600	82,474,400	32.52
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**203,939,000**	**36,626,300**	17.96
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174,539,000	36,626,300	20.98
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,400,000	-	-
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**46,398,960**	**8,795,000**	**18.96**
2.1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**40,599,200**	**4,745,000**	**11.69**
2.1.1	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	9,000,000	-	-
2.1.2	identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	19,999,200	4,745,000	
2.1.3	pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	11,600,000		
2.2	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**5,799,760**	**4,050,000**	**69.83**
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5,799,760	4,050,000	**69.83**
3	**Program Kawasan Pemukiman**	**233,812,400**	-	-
3.1	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**233,812,400**	-	-
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	233,812,400	-	-
4	**Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman kumuh**	**671,520,000**	**7,560,000**	**1.13**
4.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**671,520,000**	**7,560,000**	**1.13**
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	671,520,000	7,560,000	**1.13**
5	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan**			

	Utilitas Umum (PSU)	**2,714,773,925**	**643,516,300**	**23.70**
5.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**2,714,773,925**	**643,516,300**	**23.70**
5.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,714,773,925	643,516,300	**23.70**
6	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**749,875,000**	**132,715,573**	**17.70**
6.1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**8,350,000**	**5,895,200**	**70.60**
6.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	8,350,000	5,895,200	**70.60**
6.2	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**741,525,000**	**126,820,373**	**17.10**
6.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	741,525,000	126,820,373	**17.10**
7	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**240,026,000**	**43,900,300**	**18.29**
7.1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**240,026,000**	**43,900,300**	**18.29**
7.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	79,810,000	26,249,300	**32.89**
7.1.2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	160,216,000	17,651,000	**11.02**
8	**Program Pengelolaan Keanekagaman Hayati (Kehati)**	**15,000,000**	**6,946,000**	**46.31**
8.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**15,000,000**	**6,946,000**	**46.31**
8.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15,000,000	6,946,000	**46.31**
9	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**8,921,000**	**2,222,000**	**24.91**
9.1	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**8,921,000**	**2,222,000**	**24.91**
9.1.1	Fasilitasi Penerbitan komitmen izinpenyimpanan sementara limbah B3 dilaksanak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegritas swecara elektronik	8,921,000	2,222,000	**24.91**
10	**Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**40,278,300**	**10,460,000**	**25.97**

10.1	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**40,278,300**	**10,460,000**	**25.97**
10.1.1	Fasilitasi Pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	21,013,450	4,442,000	**21.14**
10.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19,264,850	6,018,000	**31.24**
11	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**49,848,500**	**15,445,000**	**30.98**
11.1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**49,848,500**	**15,445,000**	**30.98**
11.1.1	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	49,848,500	15,445,000	**30.98**
12	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**110,800,000**	**50,211,000**	**45.32**
12.1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**110,800,000**	**50,211,000**	**45.32**
12.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	110,800,000	50,211,000	**45.32**
13	**Program Penanganan Pengaduan LH**	**7,500,000**	-	-
13.1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**7,500,000**	-	-
13.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	7,500,000	-	-
14	**Program Pengelolaan Persampahan**	**5,394,987,055**	**2,084,631,920**	**38.64**
14.1	**Pengelolaan Sampah**	**5,394,987,055**	**2,084,631,920**	**38.64**
14.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	1,786,629,700	527,903,920	**29.55**
14.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3,571,607,355	1,542,178,000	**43.18**
14.1.2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	36,750,000	14,550,000	**39.59**
	TOTAL	**19,493,908,145**	**5,825,331,684**	**29.88**

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program/kegiatan. antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dari pagu anggaran Rp. 9.210.167.005 baru terealisasi Rp. 2.828.928.591 atau 30.61%. hal ini disebabkan pada program tersebut sebagian besar belanjanya adalah belanja barang melalui proses e-katalog. dengan adanya kebijakan bahwa pejabat pengadaan adalah PNS dengan jabatan fungsional pengadaan. sehingga mengakibatkan proses pengadaan dilaksanakan oleh PP yang ditunjuk oleh bagian pengadaan yang 1 (satu) orangnya menangani lebih dari 1 (satu) SKPD. akibatnya proses pengadaan lambat dan penyerapan anggaran juga terlambat.
b. Program pengembangan perumahan dari pagu anggaran 46.398.960,- baru realisasi sebesar Rp 8.795.000,- atau 18.96%. Melalui kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang sudah dalam tahap perencanaan pemilihan konsultan penyedia.
c. Program kawasan permukiman dengan indikator jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dengan realisasi anggaran Rp 233.812.400 atau 0%. Melalui program ini akan disalurkan bantuan sosial peningkatan 10 unit rumah tidak layak huni. Program ini sudah tahap verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial uang peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
d. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman kumuh dengan indikator Jumlah rumah tidak layak huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.560.000,- atau 1.13%. Melalui program ini akan disalurkan bantuan sosial peningkatan 30 unit rumah tidak layak huni. Program ini sudah tahap verifikasi dan validasi calon penrima bantuan sosial uang peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
e. Program peningkatan prasarana. sarana dan utilitas umum (PSU) persentase PSU pada perumahan dalam kondisi baik yang realisasinya sebesar Rp 643.516.300,- atau 23.70%. Realisasi fisik peningkatan jalan lingkungan dan rehabilitasi taman junjung buih akan dilakukan pada triwulan III/IV.

f. Program perencanaan lingkungan hidup dengan indikator persentase ketersediaan data perencanaan lingkungan hidup yang capaian realisasi Rp 132.715.573,- atau 17.70%. Dokumen KLHS RPJPD menunggu tahap validasi. dan dokumen KLHS RTRW menunggu tahap pravalidasi oleh DLH Provinsi. Dokumen RPJMD dalam tahap penyusunan.

g. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup realisasi Rp 43.900.300,- atau 18.29%. Dan untuk UPT Laboratorium Lingkungan telah mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji sebanyak 15 dokumen. Banyak kegiatan yang rencannya akan dirubah diperubahan karena dalam tahun berjalan ada belanja yang sudah tidak sesuai dengan perkembanagn keadaan.

h. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) dengan target kinerja 100% pengelolaan keanekaragaman hayati telah mencapai 100% karena program ini adalah pemeliharaan/pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Realisasi keuangan Rp 6.946.000,- atau 46.31%.

i. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) ditargetkan 1 usaha/kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan limbah B3. selama 2024 belum ada usaha/kegiatan yang mengajukan rekomendasi. Realisasi keuangan Rp 2.2222.000,- atau 24.91%.

j. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah 100%, dimana jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana sebanyak 15 usaha/kegiatan dari target 25 usaha/kegiatan. Realisasi keuangan Rp 10.460.000,- atau 25.97%.

k. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator persentase pendidikan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup ditargetkan 85% dan capaian 65.56% pada triwulan II tahun 2024. Realisasi keuangan Rp 15.445.000,- atau 30,98%.

l. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator persentase penghargaan yang diterima masyarakat yang ditargetkan 100%, dan capaian 0% pada triwulan II tahun 2024. Karena belum ada pemberian penghargaan

lingkungan hidup tingkat kabupaten yang diterima masyarakat. Realisasi keuangan Rp 50.211.000,- atau 45.32%.

m. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dimana jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani sampai triwulan 2 tahun 2024 adalah 2 kasus dari target 6 kasus. Realisasi keuangan masih 0% karena program ini berisi makan minum rapat. tidak dapat direalisasikan karena penanganan pengaduan selesai pada saat survey verifikasi ke lapangan. Tidak sampai tahap mediasi berkali-kali.

n. Program pengelolaan persampahan dengan indikator peningkatan persentase sampah yang terkelola 0.10%. Sedangkan capaian 0% karena masih tidak ada peningkatan persentase sampah yang terkelola sampai triwulan II tahun 2024. Sampai triwulan II sampah yang terkelola sebesar 7.630 ton. Realisasi keuangan Rp 2.084.631.920,- atau 38.64%.

2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Capaain Program Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran triwulan I dan II Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk dalam kategori sangat rendah. oleh karena itu, implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah belum tergambarkan pada triwulan II ini.

2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta dengan mengamati perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana RPD Tahun 2023-2026 adalah :

1. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Peningkatan potensi produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;

3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Penguatan ketahanan pangan daerah;
5. Penataan pasar;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan nilai tambah produk;
7. Peningkatan manajemen sektor jasa;
8. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
9. Peningkatan investasi daerah;
10. Peningkatan kemandirian berusaha/*entrepreneurship*;
11. Pemberdayaan ekomoni masyarakat miskin.

Arah pembangunan pada tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026, dimana dokumen tersebut tidak berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih hanya meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan lebih bersifat perencanaan teknokratik.

Prioritas dan sasaran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan pada tahun 2024, diarahkan pada:

1. Peningkatan kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan sasaran :
   a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
   b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah;
   c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
   b. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting;
   c. Menurunnya angka kemiskinan.
3. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran :
   a. Pemerataan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
   b. Penurunan angka pernikahan anak;
   c. Perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Salah satu prioritas dan sasaran pada bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan dan stunting.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, adalah :

1. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan kawasan permukiman
2. Penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Masih ada dan tumbuhnya kawasan kumuh baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan RTH publik/taman.
5. Perbaikan rumah tidak layak huni yang masih banyak.
6. Semakin menurunnya kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas manusia.
7. Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
8. Penanganan sampah masih relatif tinggi dan pengurangan masih belum optimal.
9. Program 3R dan Bank sampah masih belum optimal.
10. Kapasitas daya tampung TPA Tabing Liring yang saat ini sudah over kapasitas.
11. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.
12. Lemahnya sanksi penegakan hukum di bidang lingkungan.
13. Inkonsistensi dan tumpang-tindih peraturan perundangan-undangan pengelolaan lingkungan baik di Pusat dan Daerah.
14. Kurangnya koordinasi antar sektor, antar lembaga, antar kepentingan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 :

a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m^3/kapita/tahun;
b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*;
c. 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan (disesuaikan dengan masa Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup):

Tahun 2020 – 2024

1) 88% Pelayanan Air Minum, ***menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha)***, dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 128 Triliun
2) ***Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit***, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

Keberadaan 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 merupakan fokus utama yang diarahkan oleh RPJP Nasional 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari periode terakhir dari acuan rencana pembangunan nasional yang diterjemahkan dalam Tema RPJMN IV tahun 2020 – 2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong". Arah kebijakan dan Strategi tersebut lebih jauh meliputi :

1) Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman*Smart living* yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatanpenyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu ***perwujudan permukiman layak huni***, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah :

a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam Menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk
d. meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan :

a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

2) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; ***(2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah***/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dankebutuhan khusus lainnya; ***(3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan***, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam

rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD;(4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum *(public housing)* melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta

target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020–2024. Untuk tahun 2024 target kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2024)
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (%)	89,93
		2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	58.71

Sumber : Renstra Kementerian PUPR, 2020

3.1.2 Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK dan berhubungan langsung dengan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah ***Prioritas Nasional (PN) (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.*** Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi :
   1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
b. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi :
   1) Pembangunan rendah karbon
   2) Pemulihan lahan berkelanjutan
   3) Pengelolaan limbah

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi :

a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: *(1) pemantauan kualitas udara, air* dan air laut, (2) pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan, (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan, (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman

hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan, (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;

b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, *(2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik,* (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK), dan (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu;

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis KLHK 2020-2024 dan yang menjadi target di tahun 2024 dan terkait dengan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target kinerja KLHK Tahun 2025-2045 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Target(2026)
SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.68

Sumber : Renstra Kementerian KLHK 2020

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berlandaskan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, serta didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel III.1 di bawah ini:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan kondisi Akhir Tahun RPD (2026)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	B (66)	B (66.5)	B (67)	B (67.5)
				SASARAN RENTRA DISPERKIMLH					
				Meningkanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimlh	Nilai SAKIP Dinas Perkimlh	83.63	83.73	83.83	83.93
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.98	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.7	67.96	67.97	67.98
				SASARAN RENTRA DISPERKIMLH					
				Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) & Indeks Kualitas Lahan (IKL)	56 89.52 40.39	57 89.62 41.58	59 89.7 41.6	60 89.8 41.65
3	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	35	36	37	38
				SASARAN RENTRA DISPERKIMLH					
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	35	36	37	38

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 2024

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 meliputi 14 program, 22 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup beserta UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Tebing Liring dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
      - Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
      - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan : P engadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan
   a. Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
      - Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
      - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
   a. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha
      - Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
      - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
      - Sub Kegiatan : Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   a. Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   a. Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      - Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   a. Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
   a. Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

10. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup (PPLH)
    a. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
        - Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Peningkatan Pendidikan. Pelataan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
    a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
    a. Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    a. Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
14. Program Pengelolaan Persampahan

a. Kegiatan : Pengelolaan Sampah
   - Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkimlh Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkimlh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun Anggaran 2024, menjadi sebesar Rp. 19.092.645.340,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*). Terdapat pengurangan pagu indikatif pada sub kegiatan gaji dan pergeseran pagu anggaran antar sub kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya rancangan akhir perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja Perubahan TA 2024;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Perubahan Tahun Anggaran 2024.

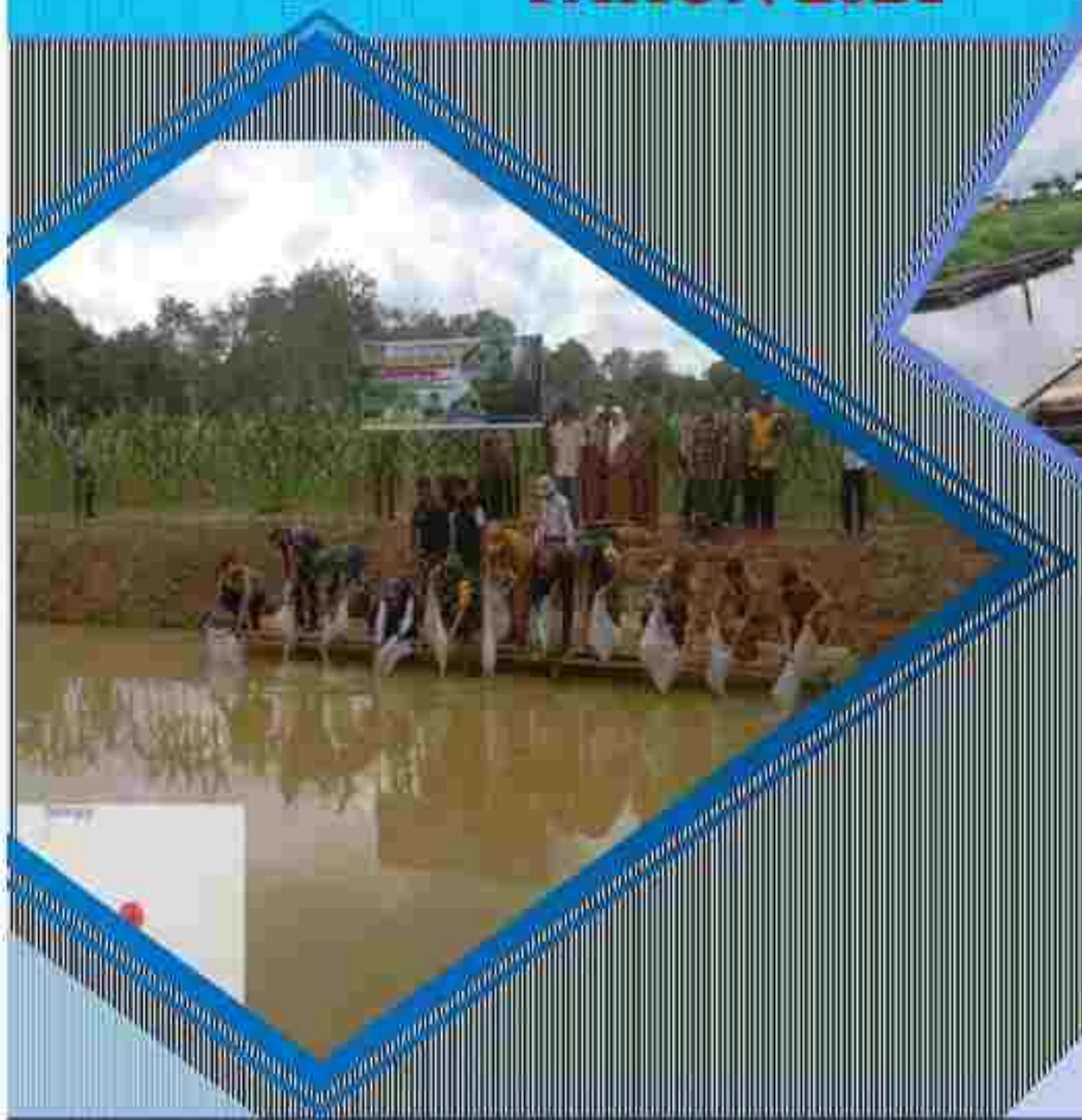
Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini dibuat untk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai, Juni 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGN HIDUP
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

H. HERMANI JOHAN, SKM, MAP, MMKes
Pembina Tk. I
Nip 19660717 198903 1 007

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERIKANAN

Jl. Sukmaraga No. 062, Kel. Sungai Malang Telp. (0527)61639 Fax.(0527)61415
Amuntai 71428

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/345/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan ketentuan Pasal 368 bahwa Perubahan Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai Pedoman Perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

KEEMPAT : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah wajib
a. melaksanakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Agustus 2024

PJ. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
3. Perangkat Daerah lainnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan tindaklanjut atas Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 000.7.2.1/389/Bappedalitbang perihal Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Sifat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) adalah pergeseran anggaran dan penambahan pagu anggaran. Adanya pergeseran anggaran dikarenakan ada hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sedangkan penambahan pagu untuk anggaran pendampingan dan belanja penunjang kegiatan DAK tahun 2024. Sehingga diperlukan langkah-langkah dalam upaya penajaman guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini menyajikan : Analisis gambaran pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara; Analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024; Penelaahan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimasa yang akan datang.

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kab. Hulu Sungai Utara,

Dra. HJ. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP
NIP. 19641208 198503 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-4

1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DINAS PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024 II-1

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara II-1

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 II-2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara II-5

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD II-5

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan III-1

3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja III-1

3.3. Kesesuaian Antara Rumusan Program/Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 III-8

3.4. Rencana Program/Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 III-9

BAB IV. PENUTUP IV-1

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Lampiran 2. Telaahan Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

Lampiran 3. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;

Lampiran 4. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.

DAFTAR TABEL

1. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara..... II-1
2. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024..... II-2
3. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024..... II-3
4. Capaian Kinerja Usaha Perikanan yang Diawasi Tahun 2024..... II-3
5. Capaian kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Tahun 2024..... II-4
6. Capaian Kinerja Pelaku Usaha Perikanan Yang Memperoleh Bantuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020..... II-4
7. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan KabupatenHulu Sungai Utara..... III-2

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
2. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kaupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
3. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan tindaklanjut atas Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 000.7.2.1/389/Bappedalitbang perihal Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Sifat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) adalah pergeseran anggaran dan penambahan pagu anggaran. Adanya pergeseran anggaran dikarenakan ada hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sedangkan penambahan pagu untuk anggaran pendampingan dan belanja penunjang kegiatan DAK tahun 2024, yang mana belum terakomodir antara lain rapat koordinasi dan monev untuk kegiatan DAK tersebut, serta kekurangan pembulatan gaji PNS untuk Tahun 2024 dan untuk menunjang proses pengadaan barang/jasa. Sehingga diperlukan langkah-langkah dalam upaya penajaman guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini bersifat pergeseran anggaran dan penambahan pagu anggaran. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu dan penyesuaian alokasi sebagai upaya penajaman guna pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan dan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, dan Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 terdiri atas : a) perumusan rancangan perubahan

rencana kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024; dan b) penyajian rancangan perubahan rencana kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansu Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) di Lingkup Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah Dengan Masa

Jabatan Kepada Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini adalah :

1. Mengintegrasikan program pembangunan perikanan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis;
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

3. Mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan perikanan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
2. Sebagai upaya mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan perikanan, pedoman dan alat pengendali dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, Proses penyusunan, keterkaitan antara perubahan Renja dengan dokumen Perubahan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang sistematika penulisan dari penyusunan Perubahan

Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DINAS PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara

Memuat hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan.

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, tantangan dan peluang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta tingkat kinerja Pelayanan SKPD.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan proses, dan temuan-temuan setelah proses tersebut serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan, uraian garis besar mengenai reakpitulasi program/kegiatan, kesesuaian rumusan program/kegiatan dengan rancangan awal Perubahan RKPD. Rumusan rencana program dan kegiatan dan pendanaan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis indikator yang diukur pada sektor perikanan adalah produksi perikanan budidaya; produksi perikanan tangkap dan peningkatan kapasitas dan kualitas kelompok. Menurut analisis kinerja dari berbagai program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sudah terlaksana dengan baik dimana terlihat dari kinerja-kinerja yang strategis dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat perikanan dapat berhasil dilaksanakan akan tetapi belum optimal meningkatkan produksi.

Adapun Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	(%)	Tahun 2024	Tahun 2025	
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9.595,85	9.654,23	9.672,73	9.716,29	9.320,22	97,06	9.654,23	9.672,73	Belum tercapainya target produksi tahun 2022 karena mahalnya harga pakan ikan, tidak sebanding dengan harga jual
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	12.326,48	12.329,58	12.332,64	12.335,73	12.323,77	100	12.323,4	12.326,48	Banyaknya areal penangkapan ikan yang ditutupi oleh supsipan gunung mengakibatkan areal penangkapan semakin menyempit, komoditas hasil tangkapan ternyata banyak ditemui ikan nila dan patin dengan ukuran yang cukup besar kondisi ini mengakibatkan banyaknya komoditas local yang sudah jarang ditemui

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	(%)	Tahun 2024	Tahun 2025	
Jumlah kelompok perikanan yang naik kelas kelompok (%)	10	10	10	10	10	100	10	10	Sinergi antara Dinas dengan Penyuluh Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan kelompok perlu ditingkatkan.
Nilai Akuntabilitas (Kategori)	B	B	BB	BB	A	Kategori	A	A	Pengukuran secara berkala yang dilakukan perlu diberangi dengan reward dan punishment

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2.1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dilaksanakan melalui dua (2) kegiatan : kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidaya ikan, pengelolaan pembudidaya ikan.

Indikator capaian kinerja program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya adalah produksi perikanan budidaya.

Indikator capaian kinerja program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya adalah produksi perikanan budidaya. Adapun capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Triwulan II	%
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	9.810,76	5.198,01	52,98

2.2.2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program pengelolaan perikanan tangkap, dilaksanakan melalui dua (2) kegiatan antara lain : Kegiatan pengeloaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program ini adalah jumlah produksi perikanan tangkap. Adapun capaian produksi perikanan tangkap Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Triwulan II	%
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	12.329,56	6.424,14	52

2.2.3 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki satu (1) kegiatan yaitu : Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program adalah usaha perikanan yang diawasi. Adapun target dan capaian Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Usaha Perikanan yang Diawasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Triwulan II	%
Usaha Perikanan yang Diawasi (Kecamatan)	2	2	100

2.2.4 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dilaksanakan melalui tiga (3) kegiatan antara lain : Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja program ini adalah jumlah produksi hasil olahan perikanan

perikanan. Adapun target dan capaian kinerja jumlah produksi hasil olahan perikanan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 5. Capaian kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Triwulan II	%
Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Kg)	121.287	261.571	216

2.2.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

a. Program pakan mandiri, yaitu pemenuhan pakan dengan cara memproduksi pakan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan pembuat pakan yang banyak ditemui dan mudah didapat oleh petani;
b. Mencarikan akses pasar yang berkesinambungan dengan cara mengatur pola tanam, jenis ikan yang dipelihara, memberikan informasi pasar, menyelenggarakan perbenihan dan pengakajian pembesaran komoditas lain selain patin dikolam;
c. Pengembangan ikan lokal melalui kegiatan demcara baik aspek perbenihan maupun pembesaran;
d. Peningkatan SDM aparatur dan pelaku usaha melalui pelatihan, magang dan studi banding, fasilitas dan operasional Balai Benih Ikan Lokal agar kedepan dapat meningkatkan jumlah dan jenis benih yang dihasilkan;
e. Optimalisasi kolam-kolam rawa, dengan memanfaatkan mesin pompa air.
a. Melakukan demcara tangkap lestari dalam upaya merubah perilaku nelayan dalam menangkap ikan yang pada akhirnya kegiatan berdampak terjaganya perairan dari tindakan illegal fishing
b. Melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
c. Melakukan sosialisasi, pemantauan dan penegakan hukum atas tindakan illegal fishing;
d. Pengkayaan stock ikan lokal;

e. Koordinasi dengan dinas provinsi mengingat kebijakan akan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya perikanan berada di provinsi.

Adapun Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara :

1) Masih maraknya kegiatan illegal fishing sehingga secara langsung berdampak terhadap produksi perikanan tangkap;
2) Masih rendahnya sumberdaya manusia di tingkat pelaku usaha perikanan sehingga diperlukan pembinaaan, sosialisasi dan desiminasi teknologi;
3) Penurunan produksi perikanan budidaya, salah satu faktor penyebabnya akibat tingginya mortalitas terhadap ikan yang ditebar akibat dari waktu tebar yang tidak sesuai, kualitas benih, banyak petani yang tidak melaksanakan aklimatisasi terhadap benih yang ditebar serta masih adanya kondisi kematian total akibat terserang hama penyakit ikan;
4) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada secara lestari dan berkelanjutan;
5) Nilai tukar nelayan, dengan diketahui nilai tukar nelayan memudahkan kita untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan masih mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan produksi, pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa

Pada tahun 2023 pembangunan tidak lagi mengacu pada visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 – 2026 karena dokumen RPD bukan produk yang dihasilkan oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih sehingga RPD hanya meliputi tujuan, sasaran, strategis dan arahan kebijakan yang sifatnya perencanaan teknokratik.

Sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perikanan adalah meningkatkan perekonomian daerah, sedangkan sasaran pembangunan adalah meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa. Indikator Tujuan yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Tahun 2024 yaitu pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkam indikator sasaran adalah Nilai PDRB Sektor Pertanian.

Terjadinya penyesuaian alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, adanya pergeseran anggaran dikarenakan ada hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sedangkan penambahan pagu untuk anggaran pendampingan dan belanja penunjang kegiatan DAK tahun 2024, yang mana belum terakomodir antara lain rapat koordinasi dan monev untuk kegiatan DAK tersebut, serta kekurangan pembulatan gaji PNS untuk Tahun 2024 dan untuk menunjang proses pengadaan barang/jasa. Sehingga diperlukan langkah-langkah dalam upaya penajaman guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara I. Sedangkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini bersifat pergeseran anggaran dan penambahan pagu anggaran.

Adapun rekapitulasi hasil reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

3.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/ Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, dan Peruahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 serta Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menjawab permasalahan dan isu-isu strategis;
4. Pengembangan potensi lokal;
5. Peningkatan sumberdaya manusia perikanan.

3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Berikut diuraikan mengenai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024. Adapun rekapitulasi jenis Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan		
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)
	1) Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kab/kota yang tersedia (dokumen)
	2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit)
	3) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia (unit)
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitasnya (kelompok)
	1) Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)
	2) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)
	3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan pembiayaan kemitraan usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitraan usaha (unit usaha)
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang meningkat kapasitasnya (kelompok)

	1) Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)
	2) Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan,bantuan pembiayaan kemitraan usahanya (kelompok)
	3) Pemberian pendampingan kemudahan akses Ilmu pengetahuan teknologi & informasi Serta penyelenggaraan pendidkan dan pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase cakupan wilayah pembudidaya ikan yang dapat dibina (%)
	1) Penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1(satu) Daerah kab/kota	Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (dokumen)
	2) Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikaan dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (unit)
	3) Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (unit)
	4) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)
	5) Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat (orang)
	6) Perencanaan, pengembangan,pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan didarat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan, dilindungi (ha)

	7) Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidaya ikan di darat	Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat (orang)
3.	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Usaha perikanan yang terawasi (kecamatan)
	Kegiatan Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha dibidang tangkap dan budidaya ikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan (%)
	1) Pengawasan usaha perikanan tangkap diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dam genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumberdaya perikanan tangkap diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahkaan dalam kab/kota (dokumen)
	2) Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, rawa, waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota (dokumen)
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Kg)
	Kegiatan penerbitan daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (dokumen)
	1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan skala usaha dan resiko (dokumen)
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase bimbingan persiapan dan fasilitas pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro (%)

	1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (unit usaha)
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/kota	Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan (kg)
	1) Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah/kabupaten/kota (ton)
	2) Pemberian Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah/kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)
Non Urusan (Rutin)		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP (Point)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja dinas (dokumen)
	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (laporan)
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi direkonsilisasi oleh instansi terkait (%)
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bln)
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN (dokumen)
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan admimitrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (%)
	1) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai kettentuan yang berlaku (%)

	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (paket)
	2) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)
	3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)
	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)
	2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)
	3) Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)
	4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (paket)
	5) Penyediaan bahan material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)
	6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)
	7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)
	8) Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan (%)
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)
	2) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (dokumen)

	3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (laporan)
	4) Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (laporan)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%)
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)
	3) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)

3.3. Kesesuaian Antara rumusan Program/ Kegiatan dengan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Berdasarkan Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) apabila dilihat dari rumusan yang ada terjadi kesesuaian antara program dan kegiatan yang digunakan oleh Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Di mana dalam rancangan Perubahan RKPD terdapat 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 1 (satu) program urusan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada tahun anggaran 2024. Pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 1 (satu) program urusan rutin untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.4. Rencana Program/Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten, dan APBN. Guna pencapaian indikator kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ditunjang dengan 5 program, 15 kegiatan dan 52 sub kegiatan yang sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sumberdana APBN.

Adapun Rumusan Program/Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 3.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan *(Stakeholders)* yang berkaitan dengan pembangunan bidang perikanan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing- masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahun 2024;
3. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2024.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kab. Hulu Sungai Utara,



Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP
NIP. 19641208 198503 2 007

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Utara
Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara
Periode Renja Perangkat Daerah : 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Ya	Tidak			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024							
1	2					3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Dinas Perikanan				5.113.376.308,00	7.088.910.788,00		6.837.326.417,00					
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.113.376.308,00	7.088.910.788,00		6.837.326.417,00					
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.113.376.308,00	7.088.910.788,00		6.837.326.417,00					
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)	100 %	100 %	5.583.867.303,00	4.817.770.788,00	100 %	4.894.001.783,00	Y				
	3	25	01	2.01		Perancangan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengenggaran dan evaluasi Kinerja Dinas Perikanan	9 dokumen	9 dokumen	83.000.000,00	83.041.000,00	9 dokumen	142.457.150,00	Y				
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	16.950.000,00	1 Dokumen	67.388.350,00	Y				
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	1 Dokumen	3.900.000,00	Y				
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	1 Dokumen	3.900.000,00	Y				
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	1 Dokumen	3.900.000,00	Y				
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	1 Dokumen	1.903.000,00	Y				
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	17.000.000,00	18.350.000,00	3 Laporan	17.079.700,00	Y				
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33.900.000,00	32.691.000,00	1 Laporan	34.572.100,00	√				
	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja Dinas yang telah diverifikasi/diskonsiliasi oleh instansi terkait (%)	100 %	100 %	3.062.310.000,00	4.191.334.815,00	100 %	4.173.009.282,00	√				
	3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.040.810.000,00	4.167.754.815,00	28 Orang/bulan	4.167.619.282,00	√				
	3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	18.000.000,00	0	0	√				
	3	29	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.900.000,00	5.900.000,00	1 Laporan	5.400.000,00	√				
	3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukan yang telah ditetapkan	100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	100 %	5.850.000,00	√				
	3	29	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	1 Laporan	5.850.000,00	√				
	3	29	01	1.09		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100 %	100 %	94.657.800,00	94.157.800,00	100 %	98.790.000,00	√				
	3	29	01	1.09	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	18.157.800,00	18.157.800,00	1 Paket	8.790.000,00	√				
	3	29	01	1.09	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28 Dokumen	28 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	√				
	3	29	01	1.09	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	15.500.000,00	14.500.000,00	10 Orang	50.000.000,00	√				
	3	29	01	1.09		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)	100 %	100 %	178.200.000,00	260.024.000,00	100 %	262.072.800,00	√				
	3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	4 Paket	3.192.900,00	Y			
	3	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	4 Paket	63.947.600,00	Y			
	3	23	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	1 Paket	3.631.300,00	Y			
	3	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4 Paket	28.838.700,00	Y			
	3	23	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0	Y			
	3	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	12 Laporan	4.980.500,00	Y			
	3	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	103.000.000,00	188.834.000,00	12 Laporan	159.962.000,00	Y			
	3	23	01	1.06	0010	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1 Dokumen	2.070.000,00	Y			
	3	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	100 %	100 %	120.999.708,00	148.949.970	100 %	111.382.700,00	Y			
	3	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1825 Laporan	1825 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1825 Laporan	4.348.000,00	Y			
	3	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.999.708,00	29.949.970,00	12 Laporan	33.191.500,00	Y			
	3	23	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	4 Laporan	1.000.000,00	Y			
	3	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	113.600.000,00	12 Laporan	83.843.200,00	Y			
	3	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%)	100 %	100 %	77.500.000,00	91.790.000	100 %	132.490.000,00	Y			
	3	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	29.000.000,00	1 Unit	42.750.000,00	%				
	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	22.900.000,00	30.000.000,00	28 Unit	83.440.000,00	%				
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	7.750.000,00	10 Unit	6.900.000,00	%				
	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	%				
2	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12828,98 Ton	12828,98 Ton	396.000.000,00	950.818.000,00	12832,64 Ton	897.330.000,00	%				
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Perairan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosenti tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	100 %	100 %	340.000.000,00	904.818.000	100 %	964.220.000,00	%				
	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	30.760.000,00	3 Dokumen	35.988.000,00	%				
	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap											
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	6 Unit	6 Unit	280.000.000,00	439.088.000,00	7 Unit	497.129.000,00	%				
	3	25	03	1.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap											
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	4 Unit	31.725.000,00	%				
	3	25	03	1.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)	5 kelompok	5 kelompok	36.000.000,00	36.000.000,00	5 kelompok	66.000.000,00	%				
	3	25	03	1.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil											
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	50 Orang	18.450.000,00	%				
	3	25	03	1.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil											
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	10 Kelompok	15.000.000,00	15.000.000,00	10 Kelompok	11.600.000,00	%				
	3	25	03	1.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Perbenihan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha											

							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Dansan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	11.000.000,00	11.000.000,00	5 Unit Usaha	26.090.000,00	√				
3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9810,7 Ton	9810,7 Ton	906.749.900,00	1.047.771.900,00	9811,74 Ton	709.169.450,00	√				
	3	25	04	2.03		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitas (kelompok)	9 Kelompok	9 kelompok	98.830.000,00	98.830.000,00	9 kelompok	98.549.790,00	√				
	3	25	04	2.03	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil												
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok	16.090.000,00	16.090.000,00	10 Kelompok	16.049.800,00	√				
	3	25	04	2.03	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha												
							Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4 Kelompok	4 Kelompok	7.500.000,00	7.500.000,00	4 Kelompok	7.500.000,00	√				
	3	25	04	2.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	4 Kelompok	75.000.000,00	75.000.000,00	4 Kelompok	74.999.950,00	√				
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina	100 %	100 %	705.199.900,00	948.221.900	100 %	610.643.900,00	√				
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	3 Dokumen	19.999.800,00	√				
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit	615.000.000,00	633.182.000,00	7 Unit	582.449.250,00	√				
	3	25	04	2.04	0003	Penyediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	130.000.000,00	232.830.000,00	5 Unit	169.000.000,00	√				
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tanjil Mutu Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.700.000,00	16.700.000,00	1 Dokumen	16.700.000,00	√				
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat												
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Orang	10 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	10 Unit	7.499.950,00	√				

	3	23	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
							Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0.5 Ha	0.5 Ha	11.499.900,00	11.499.900,00	15 Unit	7.485.000,00	√						
	3	23	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
							Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Orang	10 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	1 Dokumen	11.499.900,00	√						
4	3	23	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Usaha Perikanan yang Diawasi	2 Kecamatan	2 Kecamatan	120.139.100,00	120.139.100,00	2 Kecamatan	154.991.300,00	√						
	3	23	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan yang ditetapkan (%)	100 %	100 %	120.139.100,00	120.139.100,00	1,8 %	154.991.300,00	√						
	3	23	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	110.139.100,00	111.799.100,00	483 Pelaku Usaha	94.816.300,00	√						
	3	23	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	8.400.000,00	4 Pelaku Usaha	10.675.000,00	√						
5	3	23	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	121287 Kg	121287 Kg	211.000.000,00	941.991.000,00	124823 Kg	818.999.735,00	√						
	3	23	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (dokumen)	10 dokumen	10 dokumen	15.000.000,00	20.790.000,00	10 dokumen	18.000.000,00	√						
	3	23	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Rinci	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	20.790.000,00	10 Dokumen	18.000.000,00	√						

	3	25	06	1.03		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Bimbingan Penilapan dan Fasilitasi Pra SKP yang dapat difasilitasikan kepada usaha mikro (%)	100 %	100 %	30.000.000,00	272.281.000,00	100 %	39.900.000,00	Y				
	3	25	06	1.03	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil												
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	40 Unit Usaha	30.000.000,00	272.281.000,00	30 Unit Usaha	39.900.000,00	Y				
	3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan (kg)	363861 kg	363861 kg	180.000.000,00	349.000.000,00	374779 kg	261.499.733,00	Y				
	3	25	06	1.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,4 Ton	8,4 Ton	125.000.000,00	183.867.500,00	8,4 Ton	199.999.983,00	Y				
	3	25	06	1.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	55.000.000,00	55.633.000,00	10 Pelaku Usaha	61.499.732,00	Y				
									JUMLAH	5.113.576.503,00	7.088.910.705,00		6.667.526.457,00					

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kab. Hulu Sungai Utara,

Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP
NIP. 19641208 198503 2 007

Lampiran 2. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Urusan Rutin											
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		HSU	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)**	**100**	**4.817.770.785**			**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)**	**100**	**4.817.770.785**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas (Dokumen)**	**9 dokumen**	**85.041.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	HSU	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas (Dokumen)**	**9 dokumen**	**85.041.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	18.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	18.550.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	9.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	9.300.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	9.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.900.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.900.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	9.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	9.900.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	18.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	18.160.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	33.831.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	33.831.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas yang telah diverifikasi/ direkonsiliasi oleh instansi terkait (%)	**100**	**4.191.254.615**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	HSU	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas yang telah diverifikasi/ direkonsiliasi oleh instansi terkait (%)	**100**	**4.191.254.615**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	23	4.167.754.615	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	23	4.167.754.615	Terjadi penambahan karena ada temuan perhitungan pppk (Dalam setahun 12 orang dengan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	18.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	18.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	0	5.500.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dapat dimanfaatkan/ dioperasionalkan digunakan sesuai dengan fungsi peruntukkan yang telah ditetapkan (%)	**100**	6.000.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dapat dimanfaatkan/ dioperasionalkan digunakan sesuai dengan fungsi peruntukkan yang telah ditetapkan (%)	**100**	6.000.000	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6.000.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (%)**	**100**	34.157.800	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (%)**	**100**	34.157.800	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35	18.157.800	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35	18.157.800	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	23	1.900.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	23	1.900.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	14.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	14.500.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)**	**100**	**260.024.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)**	**100**	**260.024.000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	30.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	10.000.000	
		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	15.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.700.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	186.824.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	186.824.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.800.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.800.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantoryang telah diberikan (%)**	**100**	**149.543.370**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantoryang telah diberikan (%)**	**100**	**149.543.370**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1825	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1825	4.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	12	29.943.370	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	12	29.943.370	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)	4	2.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)	4	2.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	12	113.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	12	113.600.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%)	100	91.750.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%)	100	91.750.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	29.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	29.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	29	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	29	30.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.750.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	23.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	23.000.000	
II	**Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**											
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	12.325,48	560.818.000			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	12.325,48	560.818.000	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)		504.818.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	100	504.818.000	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		30.790.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3	30.790.000	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)		439.058.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	6	439.058.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		35.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	4	35.000.000	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kelompok Nelayan yang Meningkat Kapasitas (Kelompok)**		**56.000.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kelompok Nelayan yang Meningkat Kapasitas (Kelompok)**	5	56.000.000	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		20.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50	20.000.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		23.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	10	23.000.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)		11.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3	11.000.000	
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**			**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	9.809,78	1.947.771.900			**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	9.809,78	1.947.771.900	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Meningkat Kapasitas (Kelompok)**	5	98.550.000	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Meningkat Kapasitas (Kelompok)**	5	98.550.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10	18.050.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10	18.050.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	4	7.500.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	4	7.500.000	
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	4	75.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	4	75.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina (%)**	**100**	**949.221.900**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina (%)**	**100**	**949.221.900**	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	20.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	20.000.000	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	633.192.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	633.192.000	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	9	252.830.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	9	252.830.000	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	18.700.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	18.700.000	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	10	7.900.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	10	7.900.000	
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindung (Ha)	0,50	11.499.900	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindung (Ha)	0,50	11.499.900	
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	10	7.900.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	10	7.900.000	
4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			Usaha Perikanan yang Diawasi (Kecamatan)	2	120.159.100			Usaha Perikanan yang Diawasi (Kecamatan)	2	120.159.100	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota.		**Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya ikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan (%)**	**100**	**120.159.100**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota**		**Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya ikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan (%)**	**100**	**120.159.100**	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	9	111.759.100	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	9	111.759.100	
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	8.400.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	8.400.000	
3	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**			**Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Kg)**		**541.991.000**			**Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Kg)**		**541.991.000**	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (Dokumen)**	**10**	20.760.000	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan kecil**		**Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (Dokumen)**	**10**	20,760,000	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	20.760.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	20,760,000	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Bimbingan persiapan dan fasilitasi pra SKP yang dapat di sosialisasikan kepada Usaha Mikro (%)	**100**	272.231.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Bimbingan persiapan dan fasilitasi pra SKP yang dapat di sosialisasikan kepada Usaha Mikro (%)	**100**	**272.231.000**	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	80	272.231.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	80	272.231.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan ikan (Kg)	383.288	249.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan ikan (Kg)	383.288	249.000.000	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	121,29	193.567.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	121,29	193.567.000	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	55.633.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	55.633.000	
						7.088.510.788					7.088.510.788	

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kab. Hulu Sungai Utara,

Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP
NIP. 19641208 198503 2 007

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan: Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Hasil Output	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 (Awal Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2024 yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja DAPA 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun (RAT)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13 = 8/12 x 100%		14 = 9/13		15 = 8/7 x 100%		16
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.			Fisik	Rp.			Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	
1	X.XX.XX	Urusan/sub Urusan/Jenis Belanja/Kode Rekening Tahun 2024	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.216,7 Ton	2.241.000.000	11.618 Ton	600.000.000	12.216,7 Ton	2.241.000.000	4.000 Ton	1.120.000.000	4.674,13 Ton	840.000.000			8.822,13 Ton	1.960.000	72,20	0,09	8.822,13 Ton	3.120.000.000	72,20	0,09		
	X.XX.XX.X.XX	Pengelolaan Perlengkapan Alat & Sarana Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Lahan Gambut Air Lainnya yang Akan Dioperasikan Oleh Unit Teknis Daerah Kabupaten/ Kota	Prasarana penggerak perut (ton) di 70,0 yang berada dalam kawasan konservasi yang aman.	600 ton	971.000.000	60,00 ton	225.000.000	200 ton	400.000.000	75,00 ton	8.400.000	25 ton	20.000.000			25 ton	56.000.000	12,50	5,60	125,00 ton	220.000.000	20,00	0,00		
1	X.XX.XX.X.XX.XX	Penyelenggaraan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Tumbuh Dua Kali di Kabupaten Data Ikan di Kabupaten/Kota yang Terkendali	12 Dokumen	48.000.000	3 Dokumen	14.000.000	7 Dokumen	21.000.000	4 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	15.000.000	14,29	42,78	4 Dokumen	22.000.000,00	33,33	38,78	Dinas Perikanan
2	X.XX.XX.X.XX.XX	Pengembangan Pemanfaatan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Pemanfaatan Usaha Perikanan Tangkap yang Terkendali	40 Unit	780.000.000	8 Unit	300.000.000	8 Unit	400.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	7.000.000			4 Unit	7.000.000	0,00	1,80	16 Unit	309.000.000,00	20,00	27,47	Dinas Perikanan
3	X.XX.XX.X.XX.XX	Pengembangan Pemanfaatan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjaga dan Terawat	16 Unit	1.500.000	8 Unit	50.000.000	8 Unit	75.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	11.000.000			4 Unit	21.000.000	50,00	93,33	8 Unit	61.000.000,00	50,00	54,12	Dinas Perikanan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 serta Periode Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Benda Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Edit yang Diperlukan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Benda 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Unit Kerangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=8/12*100%		14=9/13		15=(13+14)/2		16
				Target	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			Realisasi	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
8	5.25.44.2.20.20	Pengelolaan sarana Sanitasi Pemukiman, Sanitasi Rumah Ibadah, Fasilitasi Usaha	jumlah rekomendasi usaha yang terkait Izin Sanitasi Pemukiman, Sanitasi Rumah Ibadah, Fasilitasi Usaha	24 rekomendasi	72.500.000	4 rekomendasi	5.800.000	4 rekomendasi	7.500.000	1 rekomendasi	0	3 rekomendasi	1.875.000			1 rekomendasi	1.875.000	25,00	25,00	1 rekomendasi	5.675.000,00	25,00	25,00	Dinas Perikanan
9	5.25.44.2.20.21	Pembinaan Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Pengendalian, Teknologi dan Lingkungan, serta Pengembangan Sanitasi dan Kesehatan	jumlah rekomendasi usaha yang memerlukan Pengelolaan, Pemanfaatan Jenis Ikan, Pengendalian, Teknologi dan Lingkungan, Serta Pengembangan Sanitasi dan Kesehatan	12 rekomendasi	181.000.000	3 rekomendasi	27.000.000	4 rekomendasi	72.000.000	1 rekomendasi	2.000.000	3 rekomendasi	1.000.000			3 rekomendasi	1.000.000	75,00	8,33	1 rekomendasi	41.000.000,00	41,67	208,33	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		83,33	91,67			41,67	52,08	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Memuaskan			Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	
	5.25.44.2.24	Penyelenggaraan Perlindungan Sumberdaya Ikan	Persentase Cakupan Wilayah Sumberdaya Ikan yang Dapat Dilindungi	100 %	1.000.000.000	100 %	250.000.000	100 %	400.000.000	0 %	0.000.000	50 %	50.000.000			50 %	50.000.000	50,00	6,25	100 %	300.000.000,00	187,50	6,25	
10	5.25.44.2.24.01	Pengadaan Data dan Informasi Perikanan(Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	jumlah Data dan Informasi Perikanan(Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	12 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	17.750.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	3.187.500	6 Dokumen	4.800.000			6 Dokumen	4.800.000	6,00	24,00	3 Dokumen	22.950.000,00	24,00	24,00	Dinas Perikanan
11	5.25.44.2.24.02	Pengadaan Peralatan Pemantau(Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	jumlah Peralatan Pemantau(Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	12 Unit	800.000.000	3 Unit	94.725.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	240.000	6 Unit	2.100.000			6 Unit	2.100.000	6,00	0,35	3 Unit	96.825.000,00	6,35	0,35	Dinas Perikanan
12	5.25.44.2.24.03	Pengembangan Kelembagaan Pemantau Pemanfaatan Ikan Ilegal (Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	jumlah Kelompok Pemantau(Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	12 Unit	150.000.000	3 Unit	62.707.878	3 Unit	25.000.000	3 Unit	18.812.500	3 Unit	87.500.000			3 Unit	87.500.000	58,33	58,33	3 Unit	150.207.878,00	58,33	29,17	Dinas Perikanan
13	5.25.44.2.24.04	Pengembangan Kawasan Ikan Ilegal (Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	jumlah Kawasan Ikan Ilegal (Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota yang Terus Menerus Dikembangkan, Kawasan Ikan	6 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	600.000	0 Dokumen	1.875.000			0 Dokumen	1.875.000	0,00	12,50	1 Dokumen	24.687.500,00	25,00	12,50	Dinas Perikanan
14	5.25.44.2.24.05	Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Ikan di Darat	jumlah Pembudidaya yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Ikan di Darat	60 Orang	75.000.000	12 Orang	6.000.000	12 Orang	7.500.000	6 Orang	750.000	0 Orang	0.000.000			0 Orang	0.000.000	0,00	0,00	12 Orang	6.750.000,00	50,00	12,50	Dinas Perikanan
15	5.25.44.2.24.06	Pemeliharaan Pengelolaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Jenis Perikanan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Dimeliharakan, Dikembangkan, Dilindungi dan Dimanfaatkan	2 Ha	87.500.000	2 Ha	14.875.000	2 Ha	12.500.000	1 Ha	0	0,25 Ha	0.000.000			0,25 Ha	0.000.000	12,50	0,00	0,75 Ha	14.875.000,00	37,50	12,50	Dinas Perikanan
16	5.25.44.2.24.07	Pembinaan, dan Pengembangan Pembudidaya Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah Pembudidaya ikan yang Mengikuti Pembudidaya, dan Pengembangan Pembudidaya ini untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Orang	24.000.000	12 Orang	3.150.000	12 Orang	7.500.000	8 Orang	0	8 Orang	1.500.000			8 Orang	1.500.000	50,00	6,25	12 Orang	4.650.000,00	62,50	18,75	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		31,25	15,97			18,75	17,17	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		107,03	107,18			122,71	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Memuaskan			Sangat Tinggi	Sangat Memuaskan	
3	5.25.44	Pengelolaan Perikanan(Dapat dipisah 1 Suku) Operasional Kabupaten/Kota	Capaian pengelolaan perikanan yang Berkelanjut	4 Kecamatan	112.500.000	1 Kecamatan	62.406.000	1 Kecamatan	100.000.000	1 Kecamatan	2.500.000	1 Kecamatan	6.250.000			1 Kecamatan	6.250.000	100,00	25,00	2 Kecamatan	68.656.000,00	50,00	25,00	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 serta Pelaku Kontrak Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggai Sangen Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2026 yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (s/d) 2026 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Kerangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13 = (12/7)*100%		14 = (12/11)		15 = (12/9)*100%		16
				Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	I	II	III	IV	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	
	5.01.01.2.01	Penyelenggaraan Gerakan Satu Pemerintah di Kawasan Sangai Sangen, Sindidik, Sawah, dan Lainnya di Kabupaten Sangai Sangen	Persentase pelaku usaha perikanan yang memperoleh edukasi usaha di bidang hulu-hilir dan pemasaran yang diterapkan	100 %	723.500.000	100 %	10.536.500	100 %	100.000.000	0,2 %	2.000.000	45 %	4.000.000					80 %	4.750.000	80,00	0,00	100 %	80.500.000,00	80,00	0,00	
11	5.01.01.2.01.01	Pelaksanaan Usaha Perikanan Tangkap di Kawasan Sangai Sangen, Sindidik, Sawah, dan Lainnya di Kabupaten Sangai Sangen	jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sangai, Sangen, Widdal, Sawa, dan Lainnya di Kabupaten Sangai Sangen	10 Dokumen	672.500.000	1 Dokumen	10.536.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	4.000.000					2 Dokumen	4.750.000	80,00	0,00	1 Dokumen	80.500.000,00	80,00	0,00	Dinas Perikanan
12	5.01.01.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Sidang Pembudidayaan Dan di Wilayah Sangai, Sangen, Widdal, Sawa, dan Lainnya di Kabupaten Sangai Sangen	jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Sidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sangai, Sangen, Widdal, Sawa, dan Lainnya yang Dapat Diidentifikasi di Kabupaten Sangai Sangen	0 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	0 Rupiah	1 Dokumen	0 Rupiah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	0 Rupiah	0,00	0,00	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		70,00	0,00			23,33	0,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		80,00	0,00			26,66	0,00	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	5.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI	jumlah Produksi Hasil Dalam Perikanan	84000 Kg	1.200.867.000	77700 Kg	156.000.000	82000 Kg	900.127.000	20000 Kg	0	30000 Kg	30.000.000					50.000 Kg	47.800.000	60,98	29,89	200.000 Kg	240.000.000,00	24,99	19,99	
	5.01.02.2.01	Pelaksanaan Upaya Dalam Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Lebih Baik Oleh Ibu Ikan	jumlah Jenis Ikan usaha pengolahan hasil perikanan yang Usaha Baik Ikan	45 Dokumen	85.000.000	10 Dokumen	0 Rupiah	10 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	3.000.000					3 Dokumen	5.000.000	66,66	33,33	12 Dokumen	12.000.000,00	26,66	0,00	
13	5.01.02.2.01.01	Pengadaan Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan di Kawasan Sangai Sangen	jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan yang Dikumpulkan Tanpa Usaha dari Pusat	10 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	0 Rupiah	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000					1 Dokumen	5.000.000	33,33	66,66	3 Dokumen	12.000.000,00	33,33	33,33	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		33,33	66,66			33,33	66,66	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tunggu Kembali	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tunggu Kembali	
	5.01.02.2.02	Pemanfaatan Pasar dan Usaha Perikanan Sagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pasar Ikan Hasil	Persentase Kunjungan, pemanfaatan dan fasilitasi pra TPI yang dapat di evaluasi/dan meskipun proses Akses	100 %	175.000.000	100 %	10.536.500	100 %	100.000.000	0,5	0	47 %	4.000.000					47 %	0,00	47,00	0,00	147 %	80.500.000,00	46,75	0,00	
14	5.01.02.2.02.01	Pengembangan Pemanfaatan dan Pemanfaatan Pasar Usaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pasar Ikan Hasil	jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memanfaatkan Pemberian Fasilitasi Kunjungan Pengolahan Pemasaran Kunjungan Sehingga unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Skala Usaha dan Kredit	10 Unit Usaha	175.000.000	10 Unit Usaha	10.536.500	10 Unit Usaha	100.000.000	10 Unit Usaha	0	10 Unit Usaha	0,00					10 Unit Usaha	0,00	46,00	0,00	10 Unit Usaha	80.500.000,00	46,00	0,00	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		46,00	0,00			46,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tunggu Kembali	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tunggu Kembali	
	5.01.02.2.03	Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam Pengolahan dan pesisir Kawasan Sangai Sangen	Persentase dan meningkatnya Sumber Daya Alam pengolahan dan	147.000 Kg	1.025.111.000	140.000 Kg	127.536.000	150.000 Kg	200.000.000	0 Kg	0,00	60.000 Kg	60.000.000					60.000 Kg	0,00	40,00	0,00	140.000 Kg	200.000.000,00	93,33	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 serta Pelaku Kontrak Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Edit yang Disesuaikan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (Renja 2025) yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2025		Unit Kerangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=(12/7)*100%		14=(12/8)*100%		15=(12/9)*100%		16
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	1.03.08.2.10.01	Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Angkut Transportasi, dan Usaha Pengolahan Arsip 2 Jumlah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Kendaraan dan Alat Angkut Transportasi, dan Usaha Pengolahan Arsip 2 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	505,000,000	6 Unit	303,000,000	6 Unit	44,000,000	1.5 Unit	16,445,128	3.5 Unit	39,738,570			5 Unit	55,738,000	83,33	59,82	7.5 Unit	100,211,815,000	66,38	72,11	Dinas Perhubun
12	1.03.04.2.10.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Paratur Usaha Penunjang Teknis Pihak dan Ke 2 dalam 1 Jumlah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petaka Usaha melakukan Satu Misi dan Visi Dalam 1 Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terpenuhi	50 Paraku Usaha	330,117,400	15 Paraku Usaha	75,128,000	15 Paraku Usaha	55,000,000	5 Paraku Usaha	2,100,000	6 Paraku Usaha	31,612,000			6 Paraku Usaha	33,312,000	66,00	59,64	18 Paraku Usaha	61,000,000,000	60,00	3,60	Dinas Perhubun
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		62,33	67,53			63,00	73,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		111,71	97,24			207,94	3,60	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1	1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12,777,322,200	100 %	3,193,330,550	100 %	9,583,991,650	12,79 %	3,197,997,912	4 %	2,557,598,524			12,79 %	2,557,598,524	100,00	100,00	12,79 %	2,557,598,524	0,00	100,00	
	1.03.01.2.01.01	Penyediaan, Penggandaan, dan Dokumen Umum Kepentingan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan, Penggandaan dan Dokumen Umum Dalam Dinas	30 Dokumen	75,0,000,000	6 Dokumen	18,810,000	6 Dokumen	50,000,000	7 Dokumen	17,500,000	2 Dokumen	28,342,750			2 Dokumen	37,960,750	116,67	126,27	11 Dokumen	80,000,000,000	36,36	0,00	
13	1.03.01.2.01.02	Pemeliharaan Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,118,720	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	2,810,000	1 Dokumen	8,000,000			1 Dokumen	8,000,000	100,00	79,05	3 Dokumen	18,472,000,000	33,33	33,00	Dinas Perhubun
14	1.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	1,017,200	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,200,700	1 Dokumen	2,200,700			1 Dokumen	3,200,700	100,00	81,35	3 Dokumen	9,000,000,000	33,33	68,13	Dinas Perhubun
15	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	15,750,000	1 Dokumen	1,270,730	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	225,000			0 Dokumen	227,000	0,00	8,00	1 Dokumen	8,000,000,000	25,00	25,00	Dinas Perhubun
16	1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	1,357,240	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	600,000	0 Dokumen	1,141,000			1 Dokumen	1,900,000	100,00	57,00	3 Dokumen	7,000,000,000	33,33	25,00	Dinas Perhubun
17	1.03.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Pengelolaan BMN-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan BMN-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN-SKPD	4 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	3,140,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0,00	0,00	3 Dokumen	9,000,000,000	25,00	25,00	Dinas Perhubun
18	1.03.02.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	48,000,000	3 Laporan	8,814,000	3 Laporan	12,000,000	3 Laporan	4,720,000	0 Laporan	2,000,000			3 Laporan	2,187,000	100,00	39,68	9 Laporan	18,000,000,000	33,33	33,00	Dinas Perhubun
19	1.03.02.2.02.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	240,000,000	1 Laporan	57,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	0	0 Laporan	2,000,000			0 Laporan	2,000,000	0,00	8,00	1 Laporan	28,000,000,000	25,00	25,00	Dinas Perhubun
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		57,16	37,21			39,00	34,01	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.03.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung jawaban keuangan Tahunan yang telah diverifikasi dan/atau telah diverifikasi oleh pihak terkait	100 %	12,648,000,000	100 %	2,965,330,400	100 %	8,268,114,000	12,80 %	199,438,716	50 %	1,838,015,000			50 %	1,838,625,000	50,00	99,03	100 %	3,684,437,861,00	37,00	0,00	
10	1.03.02.2.02.03	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Melakukan Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/Bulan	12,142,200,000	211 Orang/Bulan	2,823,330,400	211 Orang/Bulan	4,127,214,000	214 Orang/Bulan	199,373,200	211 Orang/Bulan	1,838,015,000			214 Orang/Bulan	1,833,330,000	101,39	99,75	211 Orang/Bulan	3,684,000,861,00	99,05	97,00	Dinas Perhubun

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pada Tahun 2026 sesuai Periode Komitmen Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2024 yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2025		Unit Kerangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7*100%		14=12/11		15=12/9*100%		16
				Target	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	I	II	III	IV	Realisasi	Rp	Capaian	Rp	Realisasi	Rp	Capaian	Rp	
(1)	X.XX.01.2.22.01	Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas OPD	jumlah dokumen dan layanan yang disediakan untuk mendukung Pelaksanaan Tugas OPD	12 Dokumen	48,720,000	7 Dokumen	11,237,500	7 Dokumen	17,000,000	5 Dokumen	3,875,000	1 dokumen	7,925,000					1 Dokumen	2,800,000	5.00	23.53	5 Dokumen	23,562,500.00	71.43	16.71	Dinas Perikanan
(2)	X.XX.01.2.22.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SAP)	jumlah dokumen keuangan akhir Tahun SAP, dan laporan lain Dokumen Pertanggungjawaban Laporan Keuangan akhir Tahun SAP)	4 Laporan	25,200,000	1 Laporan	3,675,000	1 Laporan	5,300,000	1 Laporan	1,200,000	0 Laporan	1,200,000					1 Laporan	1,200,000	100.00	22.64	2 Laporan	3,700,000.00	50.00	14.42	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		72.84	22.22			64.29	23.71	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tidak Baik	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.22	Administrasi Barang Milik Daerah pada lingkup Dinkes	Persentase aset dan pelayanan yang terkait aset Dinkes yang dapat dinilai dan dikelola secara profesional sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	100 %	12,400,000	100 %	1,700,000	100 %	4,000,000	0 %	0	0 %	0					0 %	0	0.00	0.00	100 %	1,700,000.00	25.00	0.00	
(3)	X.XX.01.2.22.03	Pemeliharaan/rehab Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen Pemeliharaan/rehab Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	13,600,000	1 Laporan	1,250,000	3 Laporan	8,000,000	2 Laporan	0	0 Laporan	0					0 Laporan	0	0.00	0.00	1 Laporan	1,000,000.00	33.33	12.50	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0.00	0.00			33.33	12.50	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.22	Administrasi pelaksanaan Perangkat Daerah	Persentase e-Clik yang wajib menyediakan pengaduan pelayanan publik/Dinas Kesehatan sebesar 100% dan telah ditindaklanjuti yang berlaku	100 %	2,92,200,000	100 %	9,000,000	100 %	50,677,000	0 %	0	0 %	0					0 %	0	0.00	0.00	100 %	9,000,000.00	33.33	6.00	
(4)	X.XX.01.2.22.01	Pengelolaan Layanan Umum Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	jumlah Visi/ Misi/arah Dinas, rencana strategis Dinas	3 Paket	10,000,000	0 Paket	0	1 Paket	18,277,000	0 Paket	0	0 Paket	0					0 Paket	0	0.00	0.00	0 Paket	0.00	0.00	0.00	Dinas Perikanan
(5)	X.XX.01.2.22.02	Pelaksanaan Tata Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	4,500,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1,500,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0.00	0.00	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	Dinas Perikanan
(6)	X.XX.01.2.22.03	Peningkatan Tertib Pengelolaan Perlengkapan Perkantoran Lingkungan	jumlah Orang yang mengikuti Diklat/Bimtek Perlengkapan Perkantoran Perundang-undangan	4 Orang	7,2,200,000	2 Orang	4,200,000	2 Orang	13,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0.00	0.00	2 Orang	4,200,000.00	0.00	0.00	Dinas Perikanan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0.00	0.00			0.00	0.00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.02.2.22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum internal yang telah diberikan	100 %	337,120,000	80.77 %	220,810,249	100 %	178,300,000	0 %	0	0 %	89,66,,338					0 %	63,441,,838	0.00	35.65	210.77 %	240,000,,181,,87	35.00	0.00	
(7)	X.XX.02.2.22.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	37,900,000	2 Paket	3,471,500	4 Paket	5,000,000	0 Paket	0	2 Paket	1,500,000					2 Paket	1,500,000	50.00	30.00	0 Paket	4,971,500.00	75.00	75.00	Dinas Perikanan
(8)	X.XX.02.2.22.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	91,220,000	3 Paket	21,738,738	4 Paket	50,000,000	0 Paket	0	2 Paket	10,000,000					3 Paket	10,000,000	75.00	70.40	4 Paket	32,738,738.00	75.00	50.00	Dinas Perikanan
(9)	X.XX.02.2.22.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	18,000,000	1 Paket	1,200,000	1 Paket	3,000,000	0 Paket	0	1 Paket	1					1 Paket	0	100.00	0.00	2 Paket	1,200,000.00	50.00	6.00	Dinas Perikanan
(10)	X.XX.02.2.22.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	30,000,000	2 Paket	1,200,,000	4 Paket	13,000,000	0 Paket	0	2 Paket	1,000,000					2 Paket	1,000,000	50.00	13.33	2 Paket	2,200,000.00	50.00	11.67	Dinas Perikanan
(11)	X.XX.02.2.22.21	Penyediaan Bahan/Material	jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	2 Paket	3,400,000	4 Paket	13,000,000	0 Paket	0	0 Paket	0					0 Paket	0	0.00	0.00	2 Paket	3,400,000.00	50.00	11.33	Dinas Perikanan
(12)	X.XX.02.2.22.24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	jumlah Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	40 Laporan	72,800,000	10 Laporan	1,700,,000	40 Laporan	7,300,000	1 Laporan	600,000	0 Laporan	600,000					1 Laporan	600,000	10.00	10.40	2 Laporan	2,300,000.00	10.00	11.50	Dinas Perikanan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 serta Pelaku Kontrak Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggai Sangen Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Edit yang Disesuaikan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Unit Kerangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13 (=12/7*100%)		14 (=12/13)		15 (=12/8*100%)		16
				a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp			a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	
13	X.XX.01.2.22.04	Penyelenggaraan Hukum Lain/Khusus dan Konsultasi (SDG)	jumlah Laporan Penyelenggaraan Hukum Lain/Khusus dan Konsultasi (SDG)	40 Laporan	221.000.000	0 Laporan	124.737.716	0 Laporan	221.000.000	2 Laporan	0 (0.0%)	0 Laporan	49.500.000			1 Laporan	49.500.000	25,00	44,72	22 Laporan	124.802.275.000	11,36	61,00	Dinas Perikanan
14	X.XX.01.2.22.14	Pendokumentasian Arsip Umum di publik (SDG)	jumlah Dokumen Pendokumentasian Arsip Umum di publik (SDG)	2 Dokumen	1.500.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.500.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.275.000			1 Dokumen	1.275.000	100,00	85,00	1 Dokumen	1.275.000.000	100,00	85,00	Dinas Perikanan
																		32,75	32,00			37,24	39,61	
																		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	X.XX.01.7.06	Penyelidikan atau Pemulung Umum Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan asuransi atau bantuan yang telah diberikan	100 %	194.000.000	98,27 %	114.290.720	100 %	210.189.762	18,27 %	0 (0.0%)	0 %	0			18,27 %	31.544.762	18,27	16,75	108,14 %	147.900.700.000	17,36	0,02	
15	X.XX.01.2.22.01	Pengelolaan atau Surat Masyarat	jumlah Laporan Pengelolaan surat Surat Masyarat	12121 Laporan	77.000.000	12074 Laporan	0.7.00.000	12121 Laporan	0.000.000	2 Laporan	400.000	0 Laporan	0			0 Laporan	400.000	0,00	0,00	12074 Laporan	0.500.000.000	22,184	0,07	Dinas Perikanan
16	X.XX.02.2.08.01	Pemanfaatan atau Memanfaatkan, Sumber Daya Air Baku (SDA)	jumlah Laporan Pemanfaatan atau memanfaatkan, Sumber Daya Air dan Lahan yang Dimanfaatkan	40 Laporan	90.000.000	35 Laporan	21.000.000	12 Laporan	19.999.727	3 Laporan	8.400.000	0 Laporan	0			2 Laporan	8.400.000	33,00	33,00	12 Laporan	22.254.119.000	17,00	33,00	Dinas Perikanan
17	X.XX.02.2.08.02	Pemanfaatan atau Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hutan	jumlah Laporan Pengelolaan atau Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hutan yang Dimanfaatkan	20 Laporan	8.000.000	2 Laporan	1.000.000	0 Laporan	1.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0			0 Laporan	0	0,00	0,00	2 Laporan	1.000.000.000	12,00	12,00	Dinas Kelautan
18	X.XX.01.2.08.04	Penyelidikan atau Pelayanan umum Laporan	jumlah Laporan Penyelidikan atau Pelayanan Umum Laporan yang Dimanfaatkan	80 Laporan	978.000.000	15 Laporan	84.247.287	15 Laporan	197.000.000	2 Laporan	29.850.000	0 Laporan	0			2 Laporan	29.850.000	13,00	15,23	21 Laporan	134.000.987.000	11,25	15,23	Dinas Perikanan
																		12,50	11,74			18,20	13,73	
																		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Kurang	Sangat Kurang	
	X.XX.01.7.01	Pemeliharaan Gedung Kolo Gapoh Pedurung Lingkup Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan cepat diverifikasi sebagaimana mestinya	100 %	184.000.000	0 %	0.0.000.000	100 %	77.000.000	0 %	0.0.000.000	0 %	0.000.000			0 %	0.000.000	0,00	0,00	79,0 %	84.000.000.000	0,00	0,00	
19	X.XX.01.2.08.01	Penyelidikan atau Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Daftar Usul/Bahan Pemenangan Dinas atau Dokumen Dinas	jumlah dokumen Perencanaan Dinas atau dokumen yang Diperiksa dan dipublikasikan Pelaporan	0 Unit	88.000.000	1 Unit	21.247.344	1 Unit	21.000.000	1 Unit	0.000.000	1 Unit	7.304.500			1 Unit	7.304.500	100,00	34,77	2 Unit	28.000.000.000	50,00	67,00	Dinas Perikanan
20	X.XX.01.2.08.02	Penyelidikan atau Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dipublikasikan Pajak dan Perizinannya	1 Unit Unit	72.000.000	29 Unit	0.000.700	29 Unit	72.000.000	1 Unit	0 (0.0%)	1 Unit	1.000.000			1 Unit	1.000.000	3,00	0,13	31 Unit	11.700.000.000	10,72	13,00	Dinas Perikanan
21	X.XX.01.2.08.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Alat/mesin dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25.000.000	12 Unit	5.250.000	12 Unit	5.000.000	1 Unit	500.000	0 Unit	0 (0.0%)			1 Unit	500.000	20,00	10,00	13 Unit	6.000.000.000	22,50	10,00	Dinas Perikanan
22	X.XX.01.2.08.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Gerbil Dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Gerbil dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	1 Unit	0 (0.0%)	1 Unit	25.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0,00	0,00	1 Unit	000.000.000	25,00	0,00	Dinas Perikanan
																		24,27	14,04			22,50	23,00	
																		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																		32,75	32,00			37,24	39,61	
																		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																		30,72	12,00			18,20	12,00	
																		Tidak	Sangat Kurang			Tidak	Sangat Kurang	
	12																	30,00	22,24			23,307	21,93	
																		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggai Sangen Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Benja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2024 yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Benja Sd/Di 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Benja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15
				a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	
			Jumlah Anggaran dari semua Program	6.974.660.780							748.589.527		2.256.198.021					2.256.198.021					
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Target dan indikator yang ditetapkan berdasarkan Dokumen Perencanaan dan SOP yang sudah ditetapkan untuk tahun 2023																					
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Terbatas Sdm yang sangat dan sesuai dibidang di pelaksanaan SOP, dan sekarang masih dilakukan pekerjaan, dan SK tugas di beberapa kecamatan belum																					
	Tindak Lanjut yang dilaksanakan dalam triwulan berkutnya	Evaluasi di triwulan tidak semua sesuai target, melakukan pembinaan (pendampingan), proses segera di lakukan sesuai dan sop yang ada di kecamatan, untuk saat ini pengadaan barang dan jasa di laksanakan di pusat melalukan pengadaan (pengadaan terpusat)																					

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERHUBUNGAN KAB. HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renstra OPD Tahun 2023	Prosentase Capaian Target Renstra OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Akuntansi Standar	Prakiraan Hasil Renstra Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Rpg. Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Rpg. Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	SHSD Penyesuaian 2023	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perhubun							2.118.379.000,00	2.091.369.795,01	7.088.510.769,00							2.497.926.217,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.118.379.000,00	2.091.369.795,01	7.088.510.769,00							2.497.926.217,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA							2.118.379.000,00	2.091.369.795,01	7.088.510.769,00							2.497.926.217,00	
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksanganinya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perhubun)				100 %	100 %	2.540.647.000,00	1.711.476.795,01	6.817.770.769,00							100 %	2.990.011.783,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubun	-			9 dokumen	9 dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			Meningkatnya Stabilitas Pelbuhanterm Dan Transformasi Pela ahan Pu ng	E. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang amanah, ak% ang inovatif	Pegawai Dinas Perhubun	9 dokumen	110.027.000,00	DINAS PERHUBUN
	2	19	01	2.01	2003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab uu.Sungai Utara, Semua ke ama an, Semua ke Desa	Dana Transfer Umum Dana Bagi asil	Meningkatnya Stabilitas Pelbuhanterm Dan Transformasi Pela ahan Pu ng	E. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang amanah, ak% ang inovatif		1 Dokumen	97.980.000,00	DINAS PERHUBUN
	2	19	01	2.01	2005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA SKPD dan ajukan Hasil Koordinasi Penyusunan DOkumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	000.000,00	3.000.000,00	Kab uu.Sungai Utara, Semua ke ama an, Semua ke Desa	Dana Transfer Umum Dana Bagi asil	Meningkatnya Stabilitas Pelbuhanterm Dan Transformasi Pela ahan Pu ng	E. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang amanah, ak% ang inovatif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERHUBUN
	2	19	01	2.01	2006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perub ahan RKA SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan ajukan asil Koordinasi Penyusunan DOkumen Perubaha an RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab uu.Sungai Utara, Semua ke ama an, Semua ke Desa	Dana Transfer Umum Dana Bagi asil	Meningkatnya Stabilitas Pelbuhanterm Dan Transformasi Pela ahan Pu ng	E. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang amanah, ak% ang inovatif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERHUBUN
	2	19	01	2.01	2007	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA SKPD dan ajukan Hasil Koordinasi Penyusunan DOkumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab uu.Sungai Utara, Semua ke ama an, Semua ke Desa	Dana Transfer Umum Dana Bagi asil	Meningkatnya Stabilitas Pelbuhanterm Dan Transformasi Pela ahan Pu ng	E. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang amanah, ak% ang inovatif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERHUBUN
	2	19	01	2.01	2008	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan ajukan asil Koordinasi Penyusunan DOkumen Perubaha an DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	000.000,00	3.000.000,00	Kab uu.Sungai Utara, Semua ke ama an, Semua ke Desa	Dana Transfer Umum Dana Bagi asil	Meningkatnya Stabilitas Pelbuhanterm Dan Transformasi Pela ahan Pu ng	E. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang amanah, ak% ang inovatif		1 Dokumen	1.903.000,00	DINAS PERHUBUN
	2	19	01	2.01	2009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah laporan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ajukan Hasil Koordinasi Penyusunan La oran La oran Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.180.000,00	Kab uu.Sungai Utara, Semua ke ama an, Semua ke Desa	Dana Transfer Umum Dana Bagi asil	Meningkatnya Stabilitas Pelbuhanterm Dan Transformasi Pela ahan Pu ng	E. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang amanah, ak% ang inovatif		5 Laporan	27.07 .700,00	DINAS PERHUBUN
	2	19	01	2.01	2007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.951.300,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	34.871.100,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja Dinas yang telah diverifikasi/diaudit/reviu dan tidak terdapat temuan	-			100 %	000 %	3.048.217.000,00	3.180.118.240,00	3.180.118.240,00			Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pegawai Dinas Perikanan	000 %	3.178.118.240,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2	2.1.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	3.110.810.000,00	3.147.618.240,00	3.147.754.818,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		33 Orang/Bula n	3.147.618.240,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2	2.1.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		2	2		DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2	2.1.2.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD																							
							Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan barang dan pelaporan yang dimiliki unit kerja Dinas yang dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan/digunakan sesuai dengan fungsi/kewenangan yang telah ditetapkan	-			100 %	000 %	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pegawai Dinas Perikanan	000 %	6.000.000,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2	2.1.2.04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penerimaan, DP3 yang dapat menerbitkan pengkajian administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya	-			100 %	000 %	32.457.600,00	32.457.600,00	32.457.672,23			Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pegawai Dinas Perikanan	000 %	34.750.000,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2	2.1.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																							
							Jumlah Pasal Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan				28 Pasal	28 Pasal	28.157.600,00	28.157.600,00	28.157.672,23	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		0 Pasal	0.750.000,00	DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2	2.1.2.06	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi kepegawaian																							
							Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi kepegawaian				33 Dokumen	33 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		0	0		DINAS PERKEBUN	
	2.	2.0	2.1	2.1.2	2.1.2.07	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan																							

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		05 Orang	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana tingkat kepatuhan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah ditetapkan (%)				100 %	000 %	278.300.000,00	278.000.000,00	278.000.000,00			Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pegawai Dinas Perhubun	000 %	260.272.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	88.927.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.03	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga																						
							Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	58.808.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.07	Penyediaan Bahan/Material																						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.08	Jumlah Kunjungan Tamu																						
							Jumlah Laporan Jumlah Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	4.960.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.	2.0	2.1	2.1.06	2.1.06.2.10	Pemeliharaan Arsip (Records) pada SKPD																						
							Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip (Records) pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Polhukhamtam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	2.370.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	0	19	01	1.19		Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah disediakan	%			100 %	100 %	100.000.700,00	175.000.700,00	175.000.700,00			Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pegawai Dinas Perikanan	100 %	100 %	125.000.700,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0001	Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat																								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat				4800 Laporan	4800 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		4800 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0002	Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan				12 Laporan	12 Laporan	19.999.700,00	19.999.700,00	19.999.670,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0003	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor																								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Dilaksanakan				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0004	Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan				12 Laporan	12 Laporan	99.000.000,00	107.000.000,00	119.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	99.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%)	%			100 %	100 %	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00			Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pegawai Dinas Perikanan	100 %	100 %	123.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0005	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	40.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0006	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	33.900.000,00	33.900.000,00	80.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		29 Unit	86.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0008	Pemeliharaan Rehabilitasi dan Alam Lainnya																								
							Jumlah Rehabilitasi dan Alam Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.500.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	8.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	0	19	01	1.19	0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		0	0	DINAS PERIKANAN
1	0	19	05			PROGRAM PEN... VOLUSI PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				13818,34 Ton	13818,34 Ton	394.000.000,00	394.000.000,00	440.818.000,00						13981,94 Ton	440.818.000,00	

	6	19	19	1.19		Pengelolaan Peninggalan Hari (Fisik Warisan Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Bentangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase terjaganya jenis hari di Hutan yang berada dalam kawasan ekologis yang aman (%)			100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00			Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tangkap	100 %	240.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19	19001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																							
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	60.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		5 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19	19002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																							
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				6 Unit	6 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	486.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pelayanan Kelautan dan Perikanan-Pengajuan Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		7 Unit	187.110.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19	19003	Penjaminan Kelaikadilan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																							
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	93.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		4 Unit	81.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)	--			5 Kelompok	5 Kelompok	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00			Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tangkap	5 Kelompok	94.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19	19004	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																							
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		50 Orang	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19	19005	Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																							
							Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan kelembagaannya				10 Kelompok	10 Kelompok	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		10 Kelompok	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19	19006	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Peralatan, Bantuan Pembudaya, Kemitraan Usaha																							
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Pemberian Bantuan Peri Dahsan, Bantuan Pembudaya, kemitraan usaha				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		5 Unit Usaha	24.000.000,00	DINAS PERIKANAN
6	6	19	19			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				9853,7 Ton	9853,7 Ton	804.708.800,00	827.139.800,00	1.227.771.800,00						9853,7 Ton	709.286.880,00	
	6	19	19	1.19		Pemberdayaan Pembudi Daya dan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitas (kelompok)	--			5 kelompok	5 kelompok	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00			Meningkatnya Kesehatan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	5 kelompok	99.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	6	19	19	1.19	19008	Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																							

							Jumlah Kelompok Pemuda Desa (sebi Kasi yang Mengikuti Pemantauan dan Pengembangan Kelembagaan				20 Kelompok	20 Kelompok	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		20 Kelompok	24.000.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.02	1.02.02	20202	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pemasaran, Kemitraan Usaha																			
							Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pemasaran, Kemitraan usahanya				5 Kelompok	5 Kelompok	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		5 Kelompok	7.500.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.02	1.02.03	20203	Pemberian Pendampingan, Konsultasi dan Jasa Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																			
							Jumlah Kelompok usaha yang Memperoleh Pendampingan, Konsultasi dan Jasa Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	4 Kelompok	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		4 Kelompok	75.000.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.03			Pengelolaan Pemberdayaan Hak	Persentase kelompok sasaran sebagai subjek hak yang dapat dicapai	%		100 %	100 %	738.000.000,00	738.000.000,00	738.000.000,00			Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Meningkatnya Pemberdayaan Hak (PEMERINTAH)	100 %	810.000.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.03	1.03.01	20301	Penyediaan Data dan Informasi Pemberdayaan Hak dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Data dan Informasi Pemberdayaan Hak dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.03	1.03.02	20302	Penyediaan Prasarana Pemberdayaan Hak dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Prasarana Pemberdayaan Hak dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	615.000.000,00	615.000.000,00	462.151.000,00	Semua Kota/Kec, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dok Pelin Bidang Kebauran dan Pertanian-Perkebunan Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		7 Unit	847.000.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.03	1.03.03	20303	Penjaminan keberadaan Sarana Pemberdayaan Hak dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Sarana Pemberdayaan Hak dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dok Pelin Bidang Kebauran dan Pertanian-Perkebunan Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		3 Unit	540.000.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.03	1.03.04	20304	Pengelolaan Kawasan dan/atau Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah wadah dan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan Pengelolaan kawasan dan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		1 Dokumen	14.700.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.03	1.03.05	20305	Pembinaan dan Pemantauan Pemberdayaan Hak di Darat																			
							Jumlah Pemberdaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pemberdayaan Hak di Darat				10 Orang	10 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Kebahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi terjaga, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		10 Unit	7.500.000,00	DINAS PERKEBUN
2	20	01	1.03	1.03.06	20306	Pengadaan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Perlindungan Lahan untuk Pemberdayaan Hak di Darat																			

							Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Dikembalikan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				0,6 Ha	0,6 Ha	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		60 Unit	7.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	2	10	11	2.11	11007	Pelestarian, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																			
							Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Pelatihan/ dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				60 Orang	60 Orang	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		5 Dokumen	11.200.000,00	DINAS PERIKANAN
3	2	10	12			PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PERIKANAN	Usaha Perikanan yang Dikelola				3 Kecamatan	3 Kecamatan	100.100.100,00	100.100.100,00	100.100.100,00							3 Kecamatan	104.850.300,00	
	2	10	12	2.11		Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rerata/rata pelaku usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan yang ditetapkan (%)	-			100 %	100 %	100.100.100,00	100.100.100,00	100.100.100,00			Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Pelaku Usaha Perikanan	2,8 %	104.850.300,00	DINAS PERIKANAN
	2	10	12	2.11	12001	Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	111.100.100,00	111.100.100,00	111.700.100,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		600 Pelaku Usaha	84.310.300,00	DINAS PERIKANAN
	2	10	12	2.11	12002	Pengelolaan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.400.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		2 Pelaku Usaha	10.970.000,00	DINAS PERIKANAN
4	2	10	14			PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan				111187 Kg	111187 Kg	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							111111 Kg	300.000.700,00	
	2	10	14	2.11		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (dokumen)	-			10 dokumen	10 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR)	10 dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	2	10	14	2.11	12003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Wilkit				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.700.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lainnya PAD Yang Sah	Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		10 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	2	14	14	2.11		Pemberian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Bimbingan Pelayanan dan Pengawasan Mutu dan K3P yang dapat dimanfaatkan/ digunakan oleh usaha mikro (%)	-			100 %	100 %	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR)	100 %	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	2	14	14	2.11	12004	Pelaksanaan Bimbingan dan Pelayanan Pengawasan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																					
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Wilkit				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	171.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kota Sungai Utara, Dinas Perizinan Perikanan	Lainnya PAD Yang Sah Dan Pajak Bidang Kehutanan dan Perikanan-Penagaran	Meningkatkan Kesehatan Ekonomi Umum, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		60 unit Usaha	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN

	4	10	06	0.03		Penyelesaian dan Pengurusan Sampah Sesuai Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselesaikan dan terkelola dengan baik sampah sesuai industri pengolahan ikan (kg)	-			888882 kg	888882 kg	180.000.000,00	200.000.000,00	249.000.000,00			Mempertahankan Kelestarian Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan PONTIANAK	870.776 kg	261.232.752,00	DINAS PERIKANAN
	4	10	06	0.03	0003	Peningkatan Kelestarian dan untuk konservasi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Peningkatan Kelestarian dan untuk Konservasi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					8,0 Ton	8,0 Ton	120.000.000,00	150.000.000,00	199.897.000,00	Kab. Kota Sungai Jawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lahirkan FKD Yang Sah	Mempertahankan Kelestarian Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		8,0 Ton	199.999.999,00	DINAS PERIKANAN
	5	10	06	0.03	0003	Pemberian Kesitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Micro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Micro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	30.000.000,00	50.000.000,00	99.899.000,00	Kab. Kota Sungai Jawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lahirkan FKD Yang Sah	Mempertahankan Kelestarian Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM		10 Pelaku Usaha	62.232.752,00	DINAS PERIKANAN
													1.010.000.000,00	1.113.370.000,00	6.361.882.792,00	7.088.210.792,00							6.857.335.417,00	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA/P)

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jl. H. Kurdi Yusni No.066 Telp. (0527)61406 Amuntai, 71418

Instagram
dinkes_hsu

Email
dinkes.k4b.hsu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebanyak-banyak puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja Perubahan ini merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) Tahun berjalan (Tahun 2024) melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dibuat, atas perhatiannya dan bantuannya diucapkan tarima kasih.

Amuntai, September 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM
NIP. 19660717 198903 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TRIWULAN II 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Triwulan II 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan II 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan. 25

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024 27

BAB IV PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II	22
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Kerja Pendanaan dan Perubahan Pendanaan Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024	28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026. Pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah dalam rangka merealisasikan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RPD. Dengan demikian penyusunan dokumen RKPD sangatlah penting dalam rangka pemenuhan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memuat berbagai kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, serta memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2024, berdasarkan kondisi dan keadaan keuangan/kemampuan keuangan daerah hingga pertengahan tahun ditemukan adanya ketidaksesuaian, sehingga diperlukan adanya perubahan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah", pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangandaerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka perlu untuk diadakannya perubahan terhadap dokumen RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang selanjutnya akan diikuti dengan perubahan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024. RKPD Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan RKPD Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang–UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020 -2024
9. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RPKD;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permenkes No. 21 tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes 2020 -2024;
15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Dinas Kesehatan tahun 2024 disusun tetap dengan berdasarkan pada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tujuan penyusunan RKPD Perubahan Dinas Kesehatan adalah melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul dan perlu mendapat perhatian dan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas daerah, regional dan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Triwulan II
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

BAB III. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAN PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KAB. HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Triwulan II

Renja Perubahan Dinas Kesehatan adalah penjabaran perencanaan tahunan sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan Renstra Dinas Kesehatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan menyajikan dasar pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2024 s/d triwulan II dan target tahun 2024. Berikut hasil evaluasi capaian dan analisis kinerja Dinas Kesehatan Indikator Kinerja RKPD Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sampai dengan triwulan II

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2025 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja (Renja) 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/8x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8)	(9)	(10)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	1.03.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Lain	Lain	12.992.488.372	Lain	%	Lain	12.992.488.372	Lain	11.733.378.758	Lain	22.924.303.947				Lain	22.924.303.947	Lain	17,80	Lain	22.924.303.947	90,81	17,80	
	1.03.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Lainnya yang Memenuhi Standar Kelaikan Kesehatan, Alat Kesehatan Sesuai Standar dan Terkalibrasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Memenuhi Standar dan Terkalibrasi	100 %	10.821.549.80	0 %	0	100 %	12.401.384.800	22 %	121.738.000	0 %	326.757.000				22 %	326.757.000	22,00	0,74	22 %	326.757.000,00	22,00	0,00	
	1.03.02.2.01	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan (Rawat Jalan, Rawat Inap, Alat Kesehatan dan SDM) sesuai Standar	10 Unit	6.023.534.400	1 Unit	0	10 Unit	8.320.504.400	2 Unit	118.632.000	4 Unit	317.257.000				4 Unit	317.257.000	40,00	0,74	4 Unit	317.257.000,00	40,00	0,74	Dinas Kesehatan
	1.03.02.2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rawat Jalan, Pemasaran dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15 Unit	133.424.000	0 Unit	0	15 Unit	126.424.000	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
	1.03.02.2.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diverifikasi	40 Unit	2.132.340.400	0 Unit	0	40 Unit	2.722.340.400	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
	1.03.02.2.01	Pemeliharaan Kolam dan Sistem Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Secara Daerah	52 Unit	35.467.800	0 Unit	0	52 Unit	35.467.800	0 Unit	3.150.000	0 Unit	3.150.000				0 Unit	3.150.000	0,00	0,09	0 Unit	3.150.000,00	0,00	0,09	Dinas Kesehatan

6	1.02.02.2.07.2.2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Terealisasi	40 paket	[illegible]	0 paket	0	40 paket	[illegible]	paket	0	0 paket	0					1 paket	0	0,00	0,00	1 paket	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
8	1.02.02.2.07.2.8	Pembinaan Apotek Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pembinaan Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	28 Fasilitas	[illegible]	0 Fasilitas	0	28 Fasilitas	[illegible]	Fasilitas	0	1 Fasilitas	[illegible]					1 Fasilitas	[illegible]	3,57	21,88	1 Fasilitas	[illegible]	3,57	21,88	Dinas Kesehatan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						10,24	9,04	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.02.02.2.02	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 %	[illegible]	0 %	0	100 %	[illegible]	25 %	[illegible]	0 %	[illegible]					25 %	[illegible]	25,00	21,25	25 %	[illegible]	25,00	21,25	
7	1.02.02.2.02.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu (hamil/melahirkan) Kesehatan hamil/ yang pelayanan	5272 Orang	[illegible]	0 Orang	0	5272 Orang	[illegible]	2637 Orang	0	1280 Orang	[illegible]					1280 Orang	[illegible]	48,59	11,69	1280 Orang	[illegible]	48,59	11,69	Dinas Kesehatan
8	1.02.02.2.02.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu (hamil/melahirkan) Kesehatan hamil/ yang pelayanan	3100 Orang	[illegible]	0 Orang	0	3100 Orang	[illegible]	1550 Orang	[illegible]	1443 Orang	[illegible]					1443 Orang	[illegible]	46,53	9,26	1443 Orang	[illegible]	46,53	9,26	Dinas Kesehatan
9	1.02.02.2.02.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3178 Orang	[illegible]	0 Orang	0	3178 Orang	[illegible]	1589 Orang	0	1434 Orang	[illegible]					1434 Orang	[illegible]	44,16	9,71	1434 Orang	[illegible]	44,16	9,71	Dinas Kesehatan
10	1.02.02.2.02.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	14208 Orang	[illegible]	0 Orang	0	14208 Orang	[illegible]	7104 Orang	[illegible]	1539 Orang	[illegible]					1539 Orang	[illegible]	10,83	2,60	1539 Orang	[illegible]	10,83	2,60	Dinas Kesehatan
11	1.02.02.2.02.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	34035 Orang	[illegible]	0 Orang	0	34035 Orang	[illegible]	17018 Orang	0	1142[illegible] Orang	[illegible]					1142[illegible] Orang	[illegible]	33,56	3,36	1142[illegible] Orang	[illegible]	33,56	3,36	Dinas Kesehatan
12	1.02.02.2.02.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah [illegible] (Jumlah/UKM yang mendapatkan pelayanan kesehatan)	144342 Orang	[illegible]	0 Orang	0	144342 Orang	[illegible]	28571 Orang	[illegible]	6128[illegible] Orang	[illegible]					6128[illegible] Orang	[illegible]	4,25	15,81	6128[illegible] Orang	[illegible]	4,25	15,81	Dinas Kesehatan
13	1.02.02.2.02.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut (yang mendapatkan pelayanan kesehatan	23324 Orang	[illegible]	0 Orang	0	23324 Orang	[illegible]	10527 Orang	[illegible]	2031[illegible] Orang	[illegible]					2031[illegible] Orang	[illegible]	8,71	19,29	2031[illegible] Orang	[illegible]	8,71	19,29	Dinas Kesehatan
14	1.02.02.2.02.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	23528 Orang	[illegible]	0 Orang	0	23528 Orang	[illegible]	11764 Orang	0	1289[illegible] Orang	[illegible]					1289[illegible] Orang	[illegible]	5,48	10,96	1289[illegible] Orang	[illegible]	5,48	10,96	Dinas Kesehatan

18	1.02.02.2.02.1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3824 Orang	58.311.000	0 Orang	0	3824 Orang	58.311.000	1866 Orang	0	1872 Orang	0					2812 Orang	0	100	0,00	2812 Orang	0,00	100,00	0,00	Dinas Kesehatan
19	1.02.02.2.02.1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Rentan, Termasuk Jiwa Dalam	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan kesehatan	115 Orang	132.368.000	0 Orang	0	570 Orang	132.368.000	115 Orang	1.289.200	171 Orang	10.175.400					171 Orang	10.175.400	100,27	1,89	171 Orang	10.175.400,00	100,27	1,89	Dinas Kesehatan
17	1.02.02.2.02.1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2143 Orang	668.554.000	0 Orang	0	8743 Orang	668.554.000	817 Orang	0	434 Orang	2.810.200					1434 Orang	2.810.200	52,28	0,32	1434 Orang	2.810.200,00	52,28	0,32	Dinas Kesehatan
16	1.02.02.2.02.1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan skrining sesuai standar (ODHA, Pasangan Risiko Tinggi, Populasi Kunci) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6027 Orang	60.958.570	0 Orang	0	6027 Orang	60.958.570	1179 Orang	0	2941 Orang	0					2941 Orang	0	48,84	0,00	2941 Orang	0,00	48,84	0,00	Dinas Kesehatan
19	1.02.02.2.02.1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Non-Alam, Bencana Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Non-Alam, Bencana Sosial Standar	7 Dokumen	13.000.972	0 Dokumen	0	7 Dokumen	13.000.972	0 Dokumen	74.111.400	0 Dokumen	22.005.700					0 Dokumen	22.005.700	0,00	31,97	0 Dokumen	22.005.700,00	0,00	31,97	Dinas Kesehatan
20	1.02.02.2.02.1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	748.998.870	0 Dokumen	0	7 Dokumen	748.998.870	2 Dokumen	12.613.000	4 Dokumen	213.942.400					4 Dokumen	213.942.400	57,14	28,57	4 Dokumen	213.942.400,00	57,14	28,57	Dinas Kesehatan
21	1.02.02.2.02.1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	41.031.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	40.031.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	9.100.000					5 Dokumen	9.100.000	500,00	21,95	5 Dokumen	9.100.000,00	500,00	21,95	Dinas Kesehatan
22	1.02.02.2.02.1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6.130.020.000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	6.130.020.000	0 Dokumen	9.254.380	1 Dokumen	211.608.920					3 Dokumen	211.608.920	50,00	2,09	3 Dokumen	211.608.920,00	50,00	2,09	Dinas Kesehatan
23	1.02.02.2.02.1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	233.304.970	0 Dokumen	0	7 Dokumen	233.304.970	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0					1 Dokumen	0	100,00	0,00	1 Dokumen	0,00	100,00	0,00	Dinas Kesehatan
24	1.02.02.2.02.1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur Kering, Akupunktur Basah, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur Kering, Akupunktur Basah dan Tradisional Lainnya	200 Dokumen	20.460.000	0 Dokumen	0	200 Dokumen	20.460.000	10 Dokumen	0	22 Dokumen	0					22 Dokumen	0	11,00	0,00	22 Dokumen	0,00	11,00	0,00	Dinas Kesehatan

25	1.02.02.2.02.0	Pengendalian Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	425.431.700	0 Dokumen	[1]	8 Dokumen	425.431.700	1 Dokumen	3.918.400	1 Dokumen	421.548.700				3 Dokumen	40.246.700	100,00	17,65	3 Dokumen	40.246.700,00	95,53	17,65	Dinas Kesehatan
26	1.02.02.2.02.0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	224 Orang	28.750.000	0 Orang	[1]	224 Orang	28.750.000	247 Orang	0	260 Orang	2.282.500				260 Orang	2.282.500	110,14	1,90	260 Orang	2.282.500,00	110,14	0,90	Dinas Kesehatan
27	1.02.02.2.02.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasyankes NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	45.176.000	0 Orang	[1]	25 Orang	45.176.000	0 Orang	0	5 Orang	4.420.000				5 Orang	4.420.000	19,23	0,78	5 Orang	4.420.000,00	19,23	0,78	Dinas Kesehatan
28	1.02.02.2.02.0 3	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	753.429.000	0 Dokumen	[1]	1 Dokumen	153.468.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.938.200				1 Dokumen	10.938.200	74,23	1,42	1 Dokumen	10.938.200,00	74,23	1,42	Dinas Kesehatan
29	1.02.02.2.02.0 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	43.268.578.000	0 Dokumen	[1]	1 Dokumen	42.685.678.000	1 Dokumen	11.211.948.700	1 Dokumen	21.121.903.300				1 Dokumen	21.121.903.300	100,00	48,83	1 Dokumen	21.121.903.300,00	100,00	48,83	Dinas Kesehatan
30	1.02.02.2.02.0 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	101.675.000	0 Dokumen	[1]	1 Dokumen	101.675.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
31	1.02.02.2.02.1 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	103.080.000	0 Dokumen	[1]	3 Dokumen	103.080.000	1 Dokumen	27.005.100	1 Dokumen	17.451.100				1 Dokumen	11.957.700	33,33	16,27	1 Dokumen	11.451.100,00	33,33	16,27	Dinas Kesehatan
32	1.02.02.2.02.1 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	16 Unit	998.818.000	0 Unit	[1]	16 Unit	998.818.000	16 Unit	7.900.000	16 Unit	6.750.000				16 Unit	6.750.000	100,00	0,68	16 Unit	6.750.000,00	100,00	0,68	Dinas Kesehatan
33	1.02.02.2.02.1 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bulan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bulan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	9.200.000	0 Laporan	[1]	2 Laporan	9.200.000	0 Laporan	0	1 Laporan	232.000				1 Laporan	232.000	50,00	2,59	1 Laporan	232.000,00	50,00	2,59	Dinas Kesehatan
34	1.02.02.2.02.1	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	355.940.000	0 Dokumen	[1]	12 Dokumen	355.940.000	3 Dokumen	46.031.402	3 Dokumen	40.319.218				3 Dokumen	40.319.218	9,67	11,34	3 Dokumen	40.319.218,00	9,67	11,34	Dinas Kesehatan
35	1.02.02.2.02.1 8	Pemeriksaan dan Pengobatan Dalam Pemberangkatan Kasus Gakumdi Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Terselesaikan Berdasarkan Sistem Informasi Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	11.410.000	0 Unit	[1]	1 Unit	11.410.000	1 Unit	0	1 Unit	3.430.000				1 Unit	3.430.000	100,00	0,81	1 Unit	3.430.000,00	100,00	0,81	Dinas Kesehatan

30	1.03.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Matura	Jumlah orang yang memperoleh pelayanan kesehatan matura	100 Orang	83.220.000	0 Orang	0	120 Orang	83.220.000	0 Orang	0	50 Orang	0				50 Orang	0	50,00	0,00	50 Orang	0,00	50,00	0,00	Dinas Kesehatan
31	1.03.02.2.02.43	Pengelolaan Kesehatan kerja rutin/	Jumlah fasilitasi Kesehatan kerja rutin/ yang telah dilaksanakan aktifitas monitorik	4 kabupaten	69.621.400	1 kabupaten	1	4 kabupaten	69.621.400	1 kabupaten	0	1 kabupaten	1.660.000				1 kabupaten	1.660.000	25,00	2,75	1 kabupaten	1.660.000,00	25,00	2,75	Dinas Kesehatan
32	1.03.02.2.02.44	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	109.920.000	1 Dokumen	1	4 Dokumen	109.920.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0				1 Dokumen	0	0,00	0,00	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		93,74	0,42			93,74	0,42	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Memuaskan	Sangat Rendah			Memuaskan	Sangat Rendah	
	1.03.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten yang memanfaatkan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	100 %	30.934.800	0 %	0	100 %	30.934.800	25 %	21.837.964	0 %	20.038.807				25 %	20.038.807	25,00	17,97	25 %	20.038.807,00	25,00	0,00	
33	1.03.02.2.03.01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	30.934.800	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.934.800	1 Dokumen	21.837.964	1 Dokumen	20.038.807				1 Dokumen	20.038.807	100,00	17,97	1 Dokumen	20.038.807,00	100,00	17,97	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	17,97			100,00	17,97	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	1.03.02.2.04	Penyediaan dan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas (0122	100 %	1.245.463.200	0 %	0	100 %	1.245.463.200	25 %	233.626.200	0 %	210.864.200				25 %	210.864.200	25,00	17,04	25 %	210.864.200,00	25,00	0,00	
40	1.03.02.2.04.02	Penyelenggaraan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Kepuasan Mutu (IKM) Pelayanan Kesehatan	12 Unit	745.958.233	0 Unit	0	12 Unit	745.958.233	12 Unit	12.744.200	12 Unit	47.201.000				12 Unit	47.201.000	100,00	6,33	12 Unit	47.201.000,00	100,00	6,33	Dinas Kesehatan
41	1.03.02.2.04.06	Penyelenggaraan Pemenuhan Alat Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rutilahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pemeliharaan dan Kalibrasinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Klinik)	10 Dokumen	614.970.000	0 Dokumen	0	10 Dokumen	614.970.000	1 Dokumen	121.832.000	1 Dokumen	189.663.000				1 Dokumen	189.663.000	10,00	12,74	1 Dokumen	189.663.000,00	10,00	12,74	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		75,00	13,57			75,00	13,57	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		90,00	44,00			91,87	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	1.02.01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	n/a	n/a	1.221.674.348	n/a	0	n/a	1.221.674.348	n/a	324.176.000	n/a	454.115.400				n/a	454.115.400	n/a	18,57	n/a	454.115.400,00	n/a	18,57	

		[illegible]																						
	1.02.03.2.02	Pemenuhan Kebutuhan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya tenaga kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi	100 %	2.114.084.340	0 %	0	100 %	2.114.084.340	0 %	324.715.400	0 %	444.715.400			0 %	454.715.400	0,00	16,50	0 %	454.715.400,00	0,00	0,00	
42	1.02.03.2.02.01	Pemberdayaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	409.264.340	1 Dokumen	0	1 Dokumen	409.264.340	1 Dokumen	9.675.000	1 Dokumen	21.675.400			1 Dokumen	21.675.400	0,00	6,11	1 Dokumen	21.675.400,00	0,00	6,11	Dinas Kesehatan
43	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Perpetahun)	6 Orang	2.000.820.000	0 Orang	0	6 Orang	2.000.820.000	0 Orang	314.800.000	0 Orang	417.000.000			0 Orang	417.000.000	0,00	15,67	6 Orang	417.000.000,00	0,00	15,67	Dinas Kesehatan
44	1.02.03.2.02.03	Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	272.500.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	272.500.000	0 Dokumen	0	0,00 Dokumen	98.250.000			6 Dokumen	18.250.000	50,00	5,94	6 Dokumen	18.250.000,00	50,00	5,94	Dinas Kesehatan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Pemerataan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan	100 %	440.820.000	0 %	0	100 %	440.820.000	0 %	0	0 %	0			0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
45	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Pemerataan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	440.820.000	0 Orang	0	20 Orang	440.820.000	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	[illegible]	[illegible]	120.276.400	[illegible]	0	[illegible]	120.276.400	[illegible]	0	[illegible]	28.376.220			[illegible]	20.376.220	[illegible]	30,21	[illegible]	28.376.220,00	[illegible]	30,21	

	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perseorangan Rumah Tangga	Persentase Sarana produksi Alkes dan PKRT yang diterbitkan sertifikasinya	100 %	[illegible]	0 %	0	100 %	[illegible]	25 %	0	0,0 %	0				25 %	0	25,00	0,00	25 %	0,00	25,00	0,00	
40	1.02.04.2.02.01	Penyelenggaraan dan Pengawasan serta Untuk Lanjut Penyelenggaraan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perseorangan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyelenggaran dan Pengawasan serta Untuk Lanjut Penyelenggaran Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perseorangan Rumah Tangga	12 Dokumen	[illegible]	0 Dokumen	0	12 Dokumen	[illegible]	3 Dokumen	0	0,0 Dokumen	0				3 Dokumen	0	3,00	0,00	3 Dokumen	0,00	3,00	0,00	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Kurang	Sangat Kurang				Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana industri Rumah Tangga dan Pangan yang diterbitkan penyelenggaraan	100 %	[illegible]	0 %	0	100 %	[illegible]	25 %	0	0,0 %	0				25 %	0	25,00	0,00	25 %	0,00	25,00	0,00	
41	1.02.04.2.03.01	Penyelenggaraan dan Pengawasan serta Untuk Lanjut Penyelenggaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Notice (-IRT) sebagai Sim Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran dan Pengawasan serta Untuk Lanjut Penyelenggaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Notice (-IRT) sebagai Sim Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	[illegible]	0 Dokumen	0	1 Dokumen	[illegible]	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0				1 Dokumen	0	1,00	0,00	1 Dokumen	0,00	1,00	0,00	Dinas Kesehatan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Kurang				Sangat Tinggi	Sangat Kurang	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tahapan Pengolahan Makanan (TPM) selain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	100 %	[illegible]	0 %	0	100 %	[illegible]	25 %	0	0,0 %	0				25 %	0	25,00	0,00	25 %	0,00	25,00	0,00	

		Dayun Air Minum (DAM)																							
43	1.02.04.2.04.2	Pengoperasian dan Pengawasan serta Teknik Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengoperasian dan Pengawasan serta Teknis Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	7.040.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.040.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0				1 Dokumen	0	100,00	0,00	1 Dokumen	0,00	100,00	0,00	Dinas Kesehatan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase (1%) yang memenuhi pembinaan	100 %	4.998.000	0 %	0	100 %	4.998.000	25 %	0	0 %	0				25 %	0	25,00	0,00	25 %	0,00	25,00	0,00	
44	1.02.04.2.05.0	Pengoperasian dan Pengawasan serta Teknik Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengoperasian dan Pengawasan serta Teknis Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	4.998.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.998.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0				1 Dokumen	0	100,00	0,00	1 Dokumen	0,00	100,00	0,00	Dinas Kesehatan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Alat Masak pada Produk dan Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan alat masak pada produk dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	84.801.500	0 %	0	100 %	84.801.500	25 %	0	0 %	29.318.220				25 %	29.318.220	25,00	25,00	25 %	29.318.220,00	25,00	0,00	
45	1.02.04.2.06.0	Pemeriksaan Alat Masak pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Diperiksa dan Tergarasikan serta Tindak Lanjut Tergarasikan	Jumlah Produk dan Bahan Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Makanan yang Diperiksa (Pemeriksaan Alat Masak) dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25 unit	84.801.500	0 unit	0	25 unit	84.801.500	17 unit	0	17 unit	29.318.220				17 unit	29.318.220	100,00	25,00	17 unit	29.318.220,00	100,00	25,00	Dinas Kesehatan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														

		Anggaran																						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						

69	2.XX.01.2.05.0 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.878.800	12 Laporan	100	12 Laporan	181.878.800	3 Laporan	45.000.000	9 Laporan	52.878.800			9 Laporan	53.878.800	100,00	40,00	9 Laporan	52.878.800,00	100,00	40,00	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																100,00	40,00			100,00	40,00	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan			Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	
	2.XX.01.2.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	734.712.264	0 %	0	100 %	734.712.264	24 %	10.740.000	0 %	67.140.000			20 %	67.140.000	20,00	0,27	20 %	67.140.000,00	100,00	0,00	
84	2.XX.01.2.05.0 9	Pemeliharaan Jaga Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Administrasi Pajak dan Perizinannya	34 Unit	159.673.400	0 Unit	0	34 Unit	159.673.400	0 Unit	10.740.000	15 Unit	55.280.000			15 Unit	55.280.000	44,12	34,56	15 Unit	55.280.000,00	44,12	34,56	Dinas Kesehatan
70	2.XX.01.2.05.0 8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	2.700.000	0 Unit	0	30 Unit	2.700.000	0 Unit	0	0 Unit	0			13 Unit	0,00	43,33	0,00	13 Unit	0,00	43,33	0,00	Dinas Kesehatan
71	2.XX.01.2.05.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran dan Pembuangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saluran dan Pembuangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	527.203.944	0 Unit	0	11 Unit	527.203.944	0 Unit	0	0,5 Unit	0			0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
72	2.XX.01.2.05.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Pembangunan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	26.400.000	0 Unit	0	80 Unit	26.400.000	1 Unit	0	35 Unit	77.060.000			0 Unit	77.060.000	43,86	40,00	23 Unit	77.060.000,00	65,71	40,00	Dinas Kesehatan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																43,29	13,19			43,29	13,19	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan			Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																100,00	28,60			100,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan			Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																0,00	23,07			0,00	23,07	
		Predikat Kinerja (Program)																Sangat Rendah	Sangat Memuaskan			Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																100,00	17,17			93,04	10,66	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																Memuaskan	Sangat Memuaskan			Memuaskan	Sangat Memuaskan	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		775.624.103.730				34.239.013.242		98.331.053.030						98.331.053.030							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan melaksanakan misi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Kedua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-Nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah, dan misi Keempat yaitu Membangun Infrasturktur Daerah yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Lokal.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II tahun 2024, mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas serta dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target dalam Renstra Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan pada tahun 2024 telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan kesehatandi wilayahnya sesuai permasalahan di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sasaran strategis ini mengacu pada SPM kesehatan dan RAD SDG's Kabupaten Hulu Sungai Utara serta tetap mengacu dengan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

Indikator kinerja makro bidang kesehatan selain umur harapan hidup (UHH) adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dikarenakan angka kematian ibu itu pembaginya adalah100.000 kelahiran hidup maka dalam hal ini digunakan jumlah absolut.

Sampai dengan triwulan II jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 3 (tiga) Orang. Adanya kematian ibu berhubuhangan dengan kualitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dalam memberikan penanganan terhadap komplikasi neonatus dan kualitas pelayanan ANC, sistem rujukan serta pengetahuan ibu dan keluarga dalam kondisi tanda bahaya bayi baru lahir.

Jumlah Kematian bayi di Kab. Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II sebanyak 19 (Sembilan Belas) Orang. Penyebab kematian bayi

masih didominasi oleh Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Hal ini selain dipengaruhi oleh keterampilan dan kompetensi nakes dalam memberikan pelayanan juga terkait dengan sarana prasaran yang tersedia, status kesehatan ibu dan bayi terutama status gizi dan penyakit penyerta.

Data hasil pengukuran dan penimbangan dalam Intervensi serentak dalam penanganan Stunting yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2024 menunjukkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 18.31%.

Alternatif solusi yang telah dilakukan maupun yang direncanakan bagi untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan, peningkatan kapasitas bidan desa selain masih menjalin kerjasama kemitraan dengan dukun kampung
2. Peningkatan bimbingan oleh dinas kesehatan kepada semua bidan dapat memberikan pelayanan optimal.
3. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan, pertolongan persalinan diupayakan di fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas bidan desa selain masih menjalin kerjasama kemitraan dengan dukun kampong, peningkatan kualitas Kunjungan Neonatus (KN), peningkatan kapasitas nakes dengan pelatihan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Sakit (MTBM, MTBS serta pendidikan perawatan bayi melalui kelas Ibu Hamil.
4. Mendekatkan akses ibu hamil untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter kandungan sehingga adanya komplikasi atau penyulit bisa segera diatasi dengan program kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.
5. Meningkatkan upaya promotof dan preventif bidang kesehatan
6. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sector dalam penanganan masalah kesehatan

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	S.d Juni 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)
1	Menurunnya jumlah kematian ibu		2	9	8	6	5	6	3	
2	Menurunnya jumlah kematian bayi		52	15	14	13	12	66	19	
3	Cakupan kunjungan bayi			96	97	98	100	102,2	44,14	
4	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			65	66	67	68	105	32,44	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			100	100	100	100	166,5	98,9	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			95	96	97	98	105,1	45,4	
7	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai Standar	100		100	100	100	100	91,2	40,9	
8	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100		89	90	92	94	99,4	45,30	
9	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)	100		96	97	98	100	94,66	44,18	
10	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100		59	60	61	62	92,95	52,40	
11	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100		80	80	90	90	98,17	49,88	
12	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		110	100	100	100	100	197	207,6	
13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		16	11	10	9	8	19,7	15,4	
14	Prevalensi balita stunting (TB/U)		24	16	14	12	10	19,54	18,31	
15	Prevalensi kasus gizi buruk (BB/TB)			7,3	7	6,5	6,3	10,3	0,03	
16	Prevalensi balita gizi kurang (BB/U)			11	10,7	10,4	10,1	23,51	9,94	
17	Cakupaan balita gizi buruk mendapatkan perawatan			100	100	100	100	100	100	
18	Cakupan pemberian makanan pendampingan ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin			100	100	100	100	100	89,8	
19	Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana kesehatan			100	100	100	100	96	87,5	
20	Persentase industri rumah tangga yang dibina			100	100	100	100	100	80	
21	Persentase toko obat dan apotik yang dibina			100	100	100	100	100	42	
22	Cakupan pelayanan skrihning kesehatan warga negara (15-59 tahun) sesuai standar	100		60	70	80	90	48,08	35,37	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	S.d Juni 2024	
23	Cakupan pelayanan skrinning kesehatan warga negara (60 tahun ke atas) sesuai standar	100		45	60	70	80	38,9	87,33	
24	Cakupan pelayanan standar bagi penderita hipertensi	100		50	70	90	100	38	56,05	
25	Cakupan pelayanan kesehatan sesuai penyandang DM	100		100	100	100	100	196,61	68,02	
26	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat	100		85	90	95	100	141,38	100,27	
27	Cakupan pemberian pelayanan orang dengan TB sesuai Standar	100		100	100	100	100	51,85	62,25	
28	Cakupan pemberian pemeriksaaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV	100		100	100	100	100	81,66	45,94	
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			40	45	50	55	62,55	37,01	
30	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			162	165	167	170	217	78	
31	Proporsi kasus Tuberkulosis			85	85	85	85	50,66	52,28	
32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100	100	100	100	100	100	
33	Penderita diare yang ditangani			100	100	100	100	100	100	
34	Cakupan desa/kelurahan UCI			100	100	100	100	69,9	5,9	
35	Cakupan bayi imunisasi lengkap			96	97	98	100	72,2	20,7	
36	Persentase PHBS di rumah tangga			50	55	60	70	46,92	18	
37	Persentase kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat			95	95	95	95	99,77	100,93	
38	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas			100	100	100	100	93,14	93,5	
39	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat			72	76	80	84	76,81	51,19	
40	Persentase penduduk yang memiliki akses jamban Keluarga			65	66	67	68	94,78	93,87	
41	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM			100	100	100	100	100	100	
42	Persentase Puskesmas yang terkareditasi			100	100	100	100	100	100	
43	Persentase keluarga sehat			54	54	54	54	26,58	0	
44	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			0,2	0,2	0,2	0,2	0,19	0,20	
45	Jumlah Puskesmas Yang di Bangun/ relokasi			1	2	3	4	0	0	
46	Rasio dokter per satuan penduduk			0,16	0,17	0,18	0,19	0,16	0,10	
47	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			3,6	3,7	3,8	3,9	3,62	2,22	
48	Persentase belanja langsung APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Bidang Kesehatan			10	10	10	10	20,97	9,45	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	S.d Juni 2024	
48	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara			A (81)	A (81)	A (81)	A (81)	A (80,26)		
49	Indeks Kepuasanan Masyarakat			80	81	82	83	76,61	84,88	
50	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarkat Miskin		100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan laporan hasil kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni, beberapa indikator kesehatan masih belum tercapai dan dalam hal ini menjadi isu penting di tahun berjalan, sehingga diperlukan upaya keras dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat memenuhi sumber daya yang dibutuhkan seperti kegiatan pengadaan sarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan, selain itu optimalisasi kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar berupa perencanaan untuk tenaga ASN, PPPK dan penugasan khusus.

Pencapaian SPM bidang kesehatan juga menjadi isu penting pada Dinas Kesehatan. Indikator SPM merupakan indikator kinerja Pemerintah di bidang Kesehatan. Tahun 2024, Penetapan target sasaran sudah menggunakan target Riil yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati No. 100.3.3.2/106/KUM/2024. Optimalisasi pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui DAK Non Fisik dan DAU peruntukkan bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat yang dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu diperlukan formulasi isu penting berupa inovasi serta koordinasi lintas program dan lintas sektor agar dapat mengoptimalkan pelayanan Dinas Kesehatan, antara lain:

1. Pengelolaan pencatatan dan pelaporan secara digital yang lebih optimal melibatkan tidak hanya unsur Pemerintahan namun juga sektor swasta
2. Sinergitas lintas program di internal Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
3. Sinergitas lintas sektor, baik antar Perangkat Daerah, maupun stakeholder mitra kesehatan, pihak swasta dan masyarakat.
4. Optimalisasi SIK dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

5. Penguatan Tim Pembina Puskesmas serta Tim Pengawas Peraturan Daerah bidang kesehatan.

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN DINAS KESEHATAN

Renja instansi pemerintah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Renja meliputi apa yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, target, pendanaan dan keluaran dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan, yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sangat tergantung pada situasi yang dinamis serta isu-isu terkini yang memungkinkan tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun pada Renja tahun 2024. Untuk itu agar perencanaan lebih realibel, efektif dan effisien perlu dilakukan kajian dan mempertimbangkan situasi yang dinamis yang menjadi faktor peluang, penghambat serta perubahan pada kekuatan dan kelemahan yang muncul dan dilakukan evaluasi dan perubahan Renja pada tahun berjalan.

Rumusan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	APBD 2024 (Sebelum)			APBD-P 2024 (Sesudah)		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD 2024	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD-P 2024
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**Rp. 143.592.120.776**			**Rp. 167.143.241.776**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**Rp. 143.592.120.776**			**Rp. 167.143.241.776**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)**				**Rp. 93.275.707.158**			**Rp. 91.275.740.758**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja**				**Rp. 16.842.396**			**Rp. 16.842.396**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp. 3.590.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp. 3.590.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	Rp. 13.252.396	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	Rp. 13.252.396
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan**				**Rp. 91.340.127.965**			**Rp. 89.260.927.965**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602 Orang/ Bulan	Rp 89.134.747.625	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602 Orang/ Bulan	Rp. 87.216.347.625
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kenamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 490.300.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 490.300.000

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 1.698.035.500	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 1.537.235.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 8.324.040	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 8.324.040
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	Rp. 8.720.800	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	Rp. 8.720.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi**				**Rp. 392.320.120**			**Rp. 468.464.120**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Rp. 100.059.920	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Rp. 100.059.920
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	Rp. 31.238.300	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	Rp. 31.238.300

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Rp. 39.616.800	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Rp. 39.616.800
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Rp. 48.811.100	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Rp. 48.811.100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp. 172.384.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp. 248.528.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan**				**Rp. 48.500.000**			**Rp. 120.345.000**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Rp. 48.500.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Rp. 120.345.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**				**Rp. 753.744.583**			**Rp. 753.744.583**

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp. 565.867.783	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp. 565.867.783
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp. 187.876.800	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Rp. 187.876.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**				**Rp. 724.172.094**			**Rp. 655.416.694**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	Rp. 158.418.450	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	Rp. 161.508.050
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Unit	Rp. 9.150.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Unit	Rp. 9.150.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp. 527.203.644	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp. 455.358.644

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Unit	Rp. 29.400.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Unit	Rp. 29.400.000
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan**				**Rp. 49.336.821.872**			**Rp. 70.882.432.772**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas**				**Rp. 4.248.883.780**			**Rp. 10.491.594.650**
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan - DAU yang	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp. 3.624.171.385	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	Rp. 6.029.504.485

			Ditentukan Penggunaan nya Bidang Kesehatan						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp. 128.434.500	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp. 128.434.500
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaan nya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Unit	Rp.21.772.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Unit	Rp. 2.122.340.400
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabopaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Unit	Rp. 61.030.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Unit	Rp. 95.497.600

	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	Rp. 351.599.985	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Paket	Rp. 2.053.941.665
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Paket	Rp. 61.876.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	Rp. 61.876.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan**				**Rp. 44.335.969.972**			**Rp. 59.034.480.092**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4104 Orang	Rp. 53.632.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3272 Orang	Rp. 259.037.000

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3918 Orang	Rp. 119.609.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3185 Orang	Rp. 184.749.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3448 Orang	Rp. 26.311.600	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3178 Orang	Rp. 487.696.170
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler- Penurunan AKI dan AKB - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18601 Orang	Rp. 102.361.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14904 Orang	Rp. 358.567.800

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33000 Orang	Rp. 80.000.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.935 Orang	Rp. 147.389.700
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38000 Orang	Rp. 159.710.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.942 Orang	Rp. 338.672.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16039 Orang	Rp. 46.255.200	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.324 Orang	Rp. 336.281.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kenamatan, Semua Kel/Desa	73800 Orang	Rp. 22.150.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.626 Orang	Rp. 22.150.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3900 Orang	Rp. 33.160.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3928 Orang	Rp. 36.910.000

			Penggunaan nya Bidang Kesehatan						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- DAU yang Ditentukan Penggunaan nya Bidang Kesehatan				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 132.368.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaan nya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/K ota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4000 Orang	Rp. 135.547.500	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2743 Orang	Rp. 558.335.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaan nya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3000 Orang	Rp. 34.389.500	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5531 Orang	Rp. 69.656.500

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 79.999.872	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370 Orang	Rp. 79.999.872
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 322.853.600	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 766.556.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 12.420.300	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 43.220.300

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler- Penguata n Sistem Kesehatan - DAU yang Ditentukan Penggunaan nya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/K ota - Insentif Fiskal	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 381.007.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	Rp. 9.190.020.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/K ota				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 203.304.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Dokumen	Rp. 28.460.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Dokumen	Rp. 28.460.000

	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	Rp. 81.556.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	Rp. 425.433.700
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255 Orang	Rp. 24.875.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255 Orang	Rp. 29.750.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang	Rp. 15.975.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang	Rp. 45.179.050

	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	Rp. 57.840.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	Rp. 753.498.100
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 42.000.000.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.588.544.400
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 107.979.400	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 107.979.400
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Dokumen	Rp. 68.110.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	Rp. 103.985.000

			Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	Rp. 86.118.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	Rp. 166.918.000
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	Rp. 9.000.000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 255.840.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 255.840.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedianya, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	Rp. 77.410.000

		Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	Rp. 63.220.000
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Tatanan	Rp. 68.827.400
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	Rp. 105.520.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**				**Rp. 21.894.800**			**Rp. 90.894.800**
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 21.894.800	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 90.894.800

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Puskesmas BLUD**				**Rp. 730.073.230**			**Rp. 1.265.463.230**
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	Rp. 253.168.230	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	Rp. 750.958.230
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115 Dokumen	Rp. 476.905.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	Rp. 514.505.000
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**Rp. 708.243.345**			**Rp. 3.223.674.346**
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Komptensi**				**Rp. 708.243.345**			**Rp. 2.774.984.346**

	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	Rp. 83.473.346	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	Rp. 406.284.346
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Orang	Rp. 397.800.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Orang	Rp. 2.095.800.000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 226.970.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Rp. 272.920.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**Rp. 448.690.000**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/K				- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan,	39 Orang	Rp. 448.690.000

	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	ota				Semua Kel/Desa		
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar**				**Rp. 56.518.400**			**Rp. 125.278.400**
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persenatse Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan**				**Rp. 11.700.000**			**Rp. 11.700.000**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	Rp. 11.700.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	Rp. 11.700.000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	**Persentase Sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan yang dilakukan pengawasan**				**Rp. 16.850.000**			**Rp. 16.850.000**

	Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 16.850.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 16.850.000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan**				**Rp. 7.040.900**			**Rp. 7.040.900**

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 7.040.900	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 7.040.900
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Persentase TPM yang mendapatkan pembinaan**				**Rp. 4.886.000**			**Rp. 4.886.000**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 4.886.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 4.886.000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga**				**Rp. 16.041.500**			**Rp. 84.801.500**

	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	Rp. 16.041.500	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	Rp. 84.801.500
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**				**Rp. 214.830.000**			**Rp. 1.636.115.500**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase promosi/advokasi pada organisasi kemasyarakatan/ Lintas Sektor yang mendukung kesehatan**				**Rp. 33.640.000**			**Rp. 233.040.000**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 33.640.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 233.040.000

	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan Promosi dan Hidup Bersih dan Sehat**				**Rp. 181.190.000**			**Rp. 1.393.465.000**
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 181.190.000	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 1.393.465.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**Rp. 9.610.500**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	Rp. 9.610.500
	JUMLAH					**Rp. 143.592.120.776**			**Rp. 167.143.241.776**

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat penambahan Kegiatan dan Sub kegiatan serta Penambahan dan pengurangan Anggaran. Penambahan dan Pengurangan Anggaran ini sebagai bentuk rasionalisasi pada beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dengan memperhatikan perubahan situasi dan pendapatan daerah serta masukan dari berbagai pihak, lintas sektor, masyarakat, mitra kesehatan dan kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun berjalan sampai triwulan II.

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan petunjuk dan izin-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini merupakan dokumen untuk pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2024 dan rencana kerja ini juga mengacu pada rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, sehingga terdapat sinergitas dalam penyusunan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

Amuntai, September 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

H. AMBERANI, SH, MH
NIP. 19700421 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 24
BAB V PENUTUP
Penutup 28

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
2. Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
3. Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara
5. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
6. Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2024 merupakan pedoman dalam awal pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran untuk tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026, didalamnya terdapat penjabaran visi misi dan program prioritas pembangunan. Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara tahun 2024 dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Pembinaan Kerukunan antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang memiliki sinergitas dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mencapai visi dan misinya dalam mendukung pelaksanaan di tahun 2024.

Melalui Rencana Kerja tersebut Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dapat diaplikasikan serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2024 adalah :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada Pasal 78 ayat (1.d) menyatakan bahwa dalam penyusunan Rancangan awal RKPD diperlukan penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 nomor 12) ;
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 adalah memberikan arah kebijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2024 adalah :

- Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik ditingkat daerah maupun nasional;
- Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara;
- Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
- Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam

memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan publik;

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana Indikatif Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat Uraian penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya, Kaidah-kaidah Pelaksanaan Dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep yang mana diperlukan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2022 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana **Tabel 2.1.1.** berikut :

Tabel 2. 1.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Urusan	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Umum	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,281,811,981**	**1,209,649,427**	**53.06%**
	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,622,800,000	734,007,490	45.29%
	1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	1,577,200,000	688,407,490	43.71%
	1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	45,600,000	45,600,000	100.00%
	1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	-	0.00%
	1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	-	0.00%
	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459,832,800	417,438,250	90.78%
	1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	129,045,000	99,495,000	77.10%
	1.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	28,977,800	19,887,750	68.64%
	1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	18,850,000	15,327,500	81.32%
	1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	282,960,000	282,728,000	99.92%
	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,418,181	58,112,404	62.20%
	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	32,244,480	27,657,200	85.77%
	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	39,659,988	13,834,904	34.89%
	1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	21,513,713	16,620,300	77.26%
	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,377,500	79,282,671	95.09%

	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	54,500,000	51,008,171	93.60%
	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	16,450,000	6,950,000	42.25%
	1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	24,811,000	21,324,500	85.95%
	2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**254,575,000**	**199,475,000**	**78.38%**
	2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	254,575,000	199,475,000	78.38%
	2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	52,495,000	45,545,000	86.76%
	2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	123,815,000	99,115,000	80.05%
	2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	78,265,000	54,815,000	70.04%
	3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1,066,897,000**	**1,019,720,000**	**95.50%**
	3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,066,897,000	1,019,720,000	99.50%

3.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	991,552,000	949,970,000	95.73%
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	75,345,000	69,750,000	92.57%
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**9,475,000**	**9,000,000**	**94.99%**
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9,475,000	9,000,000	94.99%
4.1.1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	9,475,000	9,000,000	94.99%
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**47,410,000**	**44,410,000**	**93.67%**
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	47,410,000	44,410,000	93.67%
5.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	47,410,000	44,410,000	93.67%
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**684,445,000**	**620,615,000**	**90.67%**
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	684,445,000	620,615,000	90.67%

	6.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)	684,445,000	620,635,000	90.68%
	Total		4,344,613,981	3,181,307,815	73.22%

Berdasarkan **Tabel 2.1.2** diatas, bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di tahun 2022 melaksanakan 6 Program, 9 Kegiatan dan 20 sub Kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp 4,344,613,981,00,- dan realisasi sebesar Rp 3,181,307,815,00,- atau 73.22% sehingga dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan yang belum memenuhi target yang direncanakan pada Renja PD Tahun Lalu (2022)**

   Dari 6 Program, 9 Kegiatan dan 20 sub Kegiatan tersebut, setelah pelaksanaannya bahwa Realisasi program/kegiatan yang *telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran* yang direncanakan pada Renja-PD Tahun Lalu (2022) sebanyak 6 Program, 8 Kegiatan dan 19 sub Kegiatan (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi belum terlaksana karena tidak ada undangan Bimbingan teknis) dengan capaian keseluruhan 95%.

2. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau belum tercapai sepenuhnya target kinerja program/kegiatan, antara lain :

   - Anggaran yang disediakan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disediakan sesuai dengan struktur SOTK SKPD, Capaian realisasi keuangan tidak tercapai 100% karena SOTK yang ada tidak terisi sepenuhnya pegawai yang ada pada Badan Kesbangpol Tahun 2022 hanya terisi 2 orang kasubag, 3 Kabid, dan 4 pelaksana
   - Anggaran Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi disediakan ternyata sampai akhir tahun tidak ada undangan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
   - Anggaran Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pengadaan Tangga tidak bisa direalisasikan karena harga tidak sesuai dengan speck yang

direncakan, sedangkan pengadaan barang yang lain SSH harga Tinggi sedangkan harga realisasi nya masih rendah

- Anggaran Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia sesuai dengan pilihan SSH ternyata harga pasaran lebih rendah dan realisasikan hanya sesuai keperluan
- Anggaran Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia, ternyata beban tarif listrik, air, internet lebih rendah, yang dibayarkan sesuai tagihan perbulan kerana ASN dan tenaga kontrak hanya berjumlah 14 orang saja serta ruangan kantor nya masih kecil
- Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tersedia, ternyata perallatan masih dalam kondisi baik
- Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu tersedia, ternyata tamu yang datang tidak sesuai dengan perhitungan jumlah anggaran yang tersedia
- Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedia sesuai dengan pilihan SSH ternyata harga pasaran lebih rendah dan realisasikan hanya sesuai keperluan
- Capaian kinerja yang tidak tercapai dipengaruhi oleh adanya Sub kegiatan pada GNRM sebagian yang diundang tidak berhadir jadi realisasi keuangan tidak 100% terpenuhi yang mengakibatkan tidak tercapainya target realisasi keuangan secara penuh.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pencapaian target kinerja serta pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pencapaian target kinerja yang rata-rata sebagian besar telah mencapai target bahkan melebihi target sangat berimplikasi mendukung terhadap pencapaian target program RENSTRA pada akhir periode Tahun 2026.

Untuk program dan kegiatan yang belum mencapai target diharapkan dalam tahun rencana dan pelaksanaan berikutnya harus tercapai bahkan harus melebihi target agar pencapaian target RENSTRA pada akhir periode Tahun 2026 dapat tercapai.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya sehingga konsistensi terhadap terget Renstra dapat tercapai.

Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran) sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026, bahwa dalam rangka mendukung pedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

terdapat keselarasan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja pada RPJMD Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dijelaskan dalam **tabel 2.2.1** berikut :

No	Indikator	SPM	MS	Target Kinerja Perangkat Daerah				Kondisi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(Sesuai 2)	(Sesuai 3)	(Sesuai 4)	(Sesuai 5)	(Sesuai 5) (%)	(Sesuai 6) (%)	(Sesuai 7) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau Ditangani			100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam mendukung Wawasan Kebangsaan			100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik			80	80	80	80	80	80	80	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Analisis Tingkat Kinerja

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dari tahun 2023-2026 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu :

- Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan

ekonomi.

- Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk perencanaan, pengendalian,dan evaluasi pembangunan.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- Belum terpenuhinya formasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan struktur perangkat daerah.
- Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan

b. Isu-Isu strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami

dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikemukakan beberapa Isu-Isu strategis terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut :

- Mengoptimalkan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
- Peningkatan penyediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Selatan guna keperluan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengoptimalkan pengimplementasian regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan.

- Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Peningkatan pencapaian sasaran pembangunan baik dalam RPJMD dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
- Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang profesional.
- Peningkatan penerapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang merupakan kegiatan yang dialihkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Masih rendahnya pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi
- Rendahnya partisipasi politik masyarakat
- Masih kurangnya pemberdayaan dan pengawasan ormas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2024 yang disusun

ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Rancangan Awal Renja-PD yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Ahkir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan sebelum ditetapkannya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024. Melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam **tabel 2.4.1** berikut

No.	Analisis Kebutuhan						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100	%	3.119.428.979,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100	%	3.119.428.979,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	%	179.487.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	%	179.487.400,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	1.800.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	%	1.800.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	175.707.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	%	175.707.400,00	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3.880.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	%	3.880.000,00	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase penyelesaian anggaran SKPD	100	%	2.285.956.100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase penyelesaian anggaran SKPD	100	%	2.285.956.100,00	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	2.285.956.100,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	2.285.956.100,00	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen	0,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen	0,00	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan Sertifikat	100	%	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan Sertifikat	100	%	0,00	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	0,00	
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100	%	341.938.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100	%	341.938.800,00	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15.078.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15.078.900,00	
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. HSU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	15.125.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. HSU	Jumlah Laporan Fasilitasi	1	Laporan	15.125.000,00	

									Kunjungan Tamu				
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD	1	Laporan	311.110.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD	1	Laporan	311.110.000,00	
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang disediakan SOPD	100	%	247.181.138,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang disediakan SOPD	100	%	247.181.138,00	
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	11.807.550,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	11.807.550,00	
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	81.700.778,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	81.700.778,00	
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	165.822.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	165.822.800,00	
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang disediakan SOPD	80	%	89.189.450,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang disediakan SOPD	80	%	89.189.450,00	
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	55.259.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	55.259.000,00	
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	5.150.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	5.150.000,00	
15.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	3.758.450,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	3.758.450,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. HSU	Indeks Capaian Revolusi Mental	70	%	1.350.267.500	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. HSU	Indeks Capaian Revolusi Mental	70	%	1.350.267.500,00	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. HSU	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Karakter Nasional Revolusi Mental	70	%	1.350.267.500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. HSU	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Karakter Nasional Revolusi Mental	70	%	1.350.267.500,00	
a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	Dokumen	12.425.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	Dokumen	12.425.000,00	

b.	Penyusun Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. HSU	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dokumen	84.976.000	Penyusun Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. HSU	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dokumen	84.976.000,00	
c.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1155	Orang	1.180.708.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	Orang	1.180.708.800,00	Pemindahan kegiatan dari disposisi ke badan kesbangpol untuk TA. 2024 sejumlah Rp. 700.000.000
d.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	Orang	33.920.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Sinergitas Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	Orang	33.920.000,00	
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. HSU	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada	70	%	33.456.888.080,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. HSU	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada	70	%	33.456.888.080,00	
1.	Penyusun Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Bela Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. HSU	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	80	%	33.456.888.080,00	Penyusun Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Bela Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. HSU	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	80	%	33.456.888.080,00	

8	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	14	Dokumen	83.302.810.000,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	14	Dokumen	83.302.810.000,00	Hibah Dana Parpol, KPU, Banpolu untuk Kegiatan Pemilu 2024
9	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350	Orang	69.310.000,00	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350	Orang	69.310.000,00	
10	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350	Orang	51.990.000,00	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Pantai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350	Orang	51.990.000,00	

2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penelitian dan Pertai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penelitian dan Pertai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Laporan	14.850.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penelitian dan Pertai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penelitian dan Pertai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Laporan	14.850.000,00	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. HSU	Indeks Kinerja Ormas	80	%	10.472.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. HSU	Indeks Kinerja Ormas	80	%	10.472.000,00	
1	Penumuan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembinaanyaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. HSU	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	80	%	10.472.000,00	Penumuan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembinaanyaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. HSU	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	80	%	10.472.000,00	
2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembinaanan Ormas, Evaluasi dan Modasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembinaanyaan Ormas, Evaluasi dan Modasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	Laporan	10.472.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembinaanyaan Ormas, Evaluasi dan Modasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembinaanyaan Ormas, Evaluasi dan Modasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	Laporan	10.472.000,00	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. HSU	Indeks Ketahanan Nasional	80	%	512.975.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. HSU	Indeks Ketahanan Nasional	80	%	512.975.000,00	
1	Penumuan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kab. HSU	Persentase pelaksanaan program PADN di daerah	100	%	512.975.000,00	Penumuan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. HSU	Persentase pelaksanaan program PADN di daerah	100	%	512.975.000,00	

24	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Kapemilikan di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Kapemilikan di Daerah	808	Org	512.875.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Kapemilikan di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Kapemilikan di Daerah	808	Orang	512.875.000,00	
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. HSU	Indeks Kewaspadaan Nasional	100	%	700.310.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. HSU	Indeks Kewaspadaan Nasional	100	%	700.310.000,00	
10	Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. HSU	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	100	%	700.310.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. HSU	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	100	%	700.310.000,00	
22	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	84	Org	24.195.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	84	Orang	24.195.000,00	
28	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12	Dokumen	788.015.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12	Dokumen	788.015.000,00	adanya penambahan anggaran untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan umum di HSU perlu membentuk kerbagenda
JUMLAH ANGGARAN						39.169.926.539						39.169.926.539	

Dari tabel 2.4.1 tentang review rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat bahwa program yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 6 program dengan 12 kegiatan dan 28 subkegiatan, dengan pagu anggaran sesuai Pagu Indikatif Penyesuaian sebesar Rp. 39.169.926.539,-,

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Usulan untuk program dan kegiatan kepada masyarakat Untuk usulan program dan kegiatan pada Renja tahun 2024 belum mengakomodir usulan dari masyarakat dan pokir dewan (para pemangku kepentingan)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri (Halaman 010.A.1) dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : "Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum". Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut (Halaman 010.B.66 dan 010.B.67), yaitu :

1) Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri (4 indikator);
3) Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (2 indikator);
5) Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (2 Indikator).

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama;
7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Disamping itu terdapat juga Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga Stabilitas Politik dan Ketahanan Bangsa, yaitu :
   a. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan
   b. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut :

1. Tujuan :
   - Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
   - Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial agama di masyarakat
2. Sasaran :
   - Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
   - Terwujudnya tata kehidupan sosial agama yang harmoni

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR RPJMD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KAB. HSU KAB. HSU									
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	71	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	68	68	68	68
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KAB. HSU KAB. HSU									
2	Meningkatnya kerukunan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Angka Kriminalitas	6	Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Persentase pemahaman 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Sendiri Nasional Revolusi	70%	70%	70%	70%
					Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	80%	80%	80%	80%
					Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100%	100%	100%	100%
					Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100%	100%	100%	100%
					Persentasi pelaksanaan program PKBM di daerah	100%	100%	100%	100%
					Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	100%	100%	100%	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen danindikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang diupayakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2024, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
        3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
      1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan

Sejarah Kebangsaan

4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
      1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
      1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
      1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
      1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
      2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Rancangan Awal RENJA ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 disajikan dalam **tabel 4.1** berikut :

Kode					Nomenklatur Urusan Kabupaten / Kota	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (hasil)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana Perubahan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
Urusan / Urusan	Bidang Urusan / Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja (%)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0	0				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
0	0				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
0	0	1 . 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100	%	3.113.429.870	APBD		100	%	3.197.842.000
	0	1 . 1	2 . 01		Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat daerah	100	%	376.467.420	APBD		100	%	88.667.000
	0	1 . 1	2 . 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.600.000	APBD		1	Dokumen	1.870.000
	0	1 . 1	2 . 01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	370.707.420	APBD		5	Laporan	87.022.000
	0	1 . 1	2 . 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3.160.000	APBD		4	Laporan	3.160.000
0	0	1 . 1	2 . 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian anggaran SKPD	100	%	2.736.962.450	APBD		100	%	3.006.282.820
0	0	1 . 1	2 . 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 / Orang / Bulan	Orang/bulan	2.736.962.450	APBD		33 / Orang / bulan	Orang/bulan	3.006.282.820
0	0	1 . 1	2 . 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	0	APBD		5	Dokumen	87.500.000
0	0	1 . 1	2 . 11		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Simlok dan mendapatkan Sertifikat	100	%	0	APBD		100	%	80.000.000
0	0	1 . 1	2 . 11	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang		APBD		3	Orang	80.000.000
0	0	1 . 1	2 . 11		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fomor,Jhan Senara dan Trasnsana yang dikunjhkan SKPD	100	%	340.506.000	APBD		100	%	481.999.000

3	3	1 1	1 . 0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Ketahanan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Ketahan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	Orang	30.450.000	APBD		300	Orang	45.000.000
3	3	1 1			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada	70	%	33.450.000.000	APBD		70	%	1.945.000.000
3	3	1 1	1 . 0 1		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	80	%	33.450.000.000	APBD		80	%	1.945.000.000
3	3	1 1	1 . 0 1	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	14	Dokumen	33.922.516.283	APBD		14	Dokumen	1.784.332.000
3	3	1 1	1 . 0 1	2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250	Orang	88.210.000	APBD	penambahan anggaran untuk sosialisasi untuk pemilih pemula, Penambahan anggran hibah Bawaslu (Rp. 22.000.000.000) dan hibah KPU (Rp. 18.000.000.000)	250	Orang	88.210.000
3	3	1 1	1 . 0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250	Orang	31.280.000	APBD		250	Orang	31.280.000
3	3	1 1	1 . 0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	Laporan	14.850.000	APBD		12	Laporan	14.850.000
3	3	1 1			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	80	%	10.475.000	APBD		80	%	10.475.000

BAB V
PENUTUP

Pada prinsipnya bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan RENJA juga berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RENJA juga dilakukan dengan tahapan dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Kabupaten Hulu Sungai Utara, Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-PD, KUA-PPAS, Renja-PD, DPA SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana tindak lanjut dari rumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2024 ini juga adalah sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan Rencana Operasional pada rencana Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RENJA) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif danefisien.

Amuntai, September 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

H. AMBERANI, SH, MH
NIP. 19700421 199603 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

JALAN KHURIPAN NOMOR 21 TELP. (0527) 61468 AMUNTAI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Implementasi dari tata pemerintahan yang baik *(Good Governance)* mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada satu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya segenap unsur Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam serangkaian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setiap tahunnya ditumpahkan dalam Rencana Kerja Perubahan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama sisa tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan/karyawati dan manajemen Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Amuntai, Juli 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

JUMADI, SAp, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197306081900293111

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL.....			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	1
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
	1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN 2024)		7
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Triwulan II Tahun 2024	7
	2.2.	Faktor -faktor Penyebab pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Bappedalitbang	11
	2.3.	Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran	18
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG.....		20
	3.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	20
BAB IV	PENUTUP		42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pembangunanan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pembangunan maupun antara Pusat dan Daerah.

Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Peruban SKPD (Renja Perubahan SKPD) dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada RKPD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinth Daerah (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Renja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang yaitu meliputi urusan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana 2024 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-

PPAS Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan peran Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Selain itu, tujuan disusunnya dokumen Renja Kerja Perubahan Bappedalitbang tahun 2024 adalah untuk :

1. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025.
2. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappedalitbang.
3. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Berkenaan

Bab ini memuat Realisasi program/kegiatan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023, faktor-faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan, implikasi yang

timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPD.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPD.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Triwulan II Tahun 2024

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitaanya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Rencana Strategis, pada umumnya capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan tahapan perencanaan.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dilihat dari tugas pokok adalah :

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan dalam Rencana Pembangunan untuk menjamin agar program dan kegiataan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efesien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Bappedalitbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Bappedalitbang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinth Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II tahun 2024, pelaksanaan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.657.6592.445,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.364.188.256,00 atau 27,31% untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tebal 2.1.1 berikut.

Tabel 2.1.1 Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**6.118.708.825,-**	**2.254.680.110,-**	**36,85%**
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.410.990,-	7.500.000,-	13,78%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.759.800,-	7.500.000,-	24,38%
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.956.000,-	0,-	0%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.198.000,-	0,-	0%
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.497.190,-	0,-	0%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.362.579.285,-	1.901.828.224,-	43,59%
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.353.582.485,-	1.901.828.224,-	43,59%
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.999.800,-	0,-	0%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.200.000,-	0,-	0
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.200.000,-	0,-	0%
8.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	110.000.000,-	0,-	0%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.904.000,-	165.405.322,-	18,36%
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000,-	0,-	0%
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.991.300,-	3.830.500,-	12,77%
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	329.997.00,-	2.976.600,-	9,02%
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	750.913.000,-	158.598.222	21,12%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.233.050,-	121.967.989,-	27,39%
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.996.250,-	3.480.000,-	29,01%
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	159.956.000,-	40.770.092,-	29,13%
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.150.000,-	9.050.000,-	22,54%
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.130.800,-	68.667.897	27,13%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.379.500,-	57.978.575,-	33,83%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.387.500,-	40.833.575,-	2,70%
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.992.000,-	17.145.000,-	85,76%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
II	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**1.161.572.850,-**	**274.570.334,-**	**23,64%**
G	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	888.314.500,-	213.386.344,-	24,02%
19.	Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis Pembangunan daerah	24.999.750,-	2.875.500,-	11,50
20.	Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan Pembangunan daerah dengsan dokumen kebijakan lainnya	22.800.000,-	17.393.000,-	76,29%
21.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	29.999.850,-	18.610.000,-	62,03%
22.	Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	19.999.800,-	0,-	0%
23.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	88.025.000,-	52.121.000,-	59,21%
24.	Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	9.989.950,-	4.480.000,-	44,85%
25.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	692.500.150,-	117.906.844,-	17,03%
H	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	39.984.150,-	0,-	0%
26.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	39.984.150,-	0,-	0%
I	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	156.000.000,-	56.078.990,-	35,08%
27.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100.000.000,-	53.078.990,-	53,08%
28.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	56.000.000,-	3.000.000,-	5,36%
J	Implemtasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	77.274.200,-	5.105.000,-	**6,61%**
29.	Pengelolaan Data dalam system Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	26.999.800,-	0,-	**0%**
30.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	50.274.400,-	5.105.000,-	**10,15%**
III	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**537.482.140,-**	**135.608.600,-**	**25,23%**
K	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	146.488.980,-	54.961.500,-	37,52%
31.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.995.700,-	10.142.000,-	40,57%
32.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.499.950,-	4.480.000,-	59,73%
33.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.998.450,-	1.120.000,-	11,20%
34.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4.999.800,-	1.405.100,-	28,10%
35.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD	48.999.700,-	21.727.200,-	44,34%
36.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.999.630,-	6.720.000,-	74,67%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
37.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.999.850,-	1.310.000,-	10,92%
38.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.995.900,-	8.057.200,-	27,79%
L	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	212.993.160,-	42.142.400,-	19,78%
39.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.999.980,-	5.553.400,-	8,29%
40.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.999.820,-	11.867.200,-	47,47%
41.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	29.993.500,-	4.776.100,-	15,92%
42.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.999.860,-	1.994.200,-	7,89%
43.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.000.000,-	7.546.000,-	68,60%
44.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000,-	0,-	0,00%
45.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	40.000.000,-	10.405.500,-	26,01%
M	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	178.000.000,-	38.504.700,-	21,63%
46.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000,-	17.996.200,-	71,98%
47.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.000.000,-	5.824.000,-	97,07%
48.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.000.000,-	0,-	0,00%
49.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	38.000.000,-	8.479.500,-	22,31%
50.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000,-	1.431.000,-	5,72%
51.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidangkewilayahan	53.000.000,-	4.774.200,-	9,01%
IV	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**839.935.140,-**	**63.396.400,-**	**7,55%**
N	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	19.999.800,-	**2.809.000,-**	**14,05%**
52.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	19.999.800,-	**2.809.000,-**	**14,05%**
O	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	649.999.540,-	**50.826.100,-**	**7,82%**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
53.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	159.999.950,-	3.558.000,-	2,22%
54.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	149.999.750,-	25.800.400,-	17,20%
55.	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	339.999.840,-	21.467.700,-	6,31%
P	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	169.935.800,-	9.761.300,-	5,74%
56.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	169.935.800,-	9.761.300,-	5,74%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra Bappedalitbang, RKPD, Renja SKPD.

Secara umum target kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tercapai dengan hasil sebagaimana yang direncanakan. Adapun penjabaran capaian kinerja Bappedalitbang triwulan II Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada tabel 2.2.1 tersebut dibawah ini :

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**n/a**	**n/a**	**1.161.572.850**	**n/a**	**93.868.433**	**n/a**	**274.570.334**	**n/a**	**274.570.334**	**n/a**	**23,64**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	868.314.500	0 Dokumen	82.628.433	0 Dokumen	213.386.344	0 Dokumen	213.386.344	0	24,02
1	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan Jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	24.999.760	0 Dokumen	2.875.500	0 Dokumen	2.875.500	0 Dokumen	2.875.500	0	11,5
2	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	22.800.000	0 Dokumen	10.931.000	0 Dokumen	17.393.000	0 Dokumen	17.393.000	0	76,29
3	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	29.999.550	1 Berita Acara	18.610.000	1 Berita Acara	18.610.000	1 Berita Acara	18.610.000	100	62,03
4	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	19.999.600	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0	0

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
5	6.01.02.2.01.06	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	88.026.000	0 Berita Acara	0	2 Berita Acara	52.121.000	2 Berita Acara	52.121.000	100	59,21
6	6.01.02.2.01.08	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	800 Usulan	9.989.950	0 Usulan	4.480.000	0 Usulan	4.480.000	0 Usulan	4.480.000	0	44,85
7	6.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/	4 Dokumen	692.500.160	0 Dokumen	49.731.933	0 Dokumen	117.906.844	0 Dokumen	117.906.844	0	17,03
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			28,57	38,7
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	6.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1 dokumen	39.984.160	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0
8	6.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	1 Dokumen	39.984.160	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0	0
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
	5.01.02.2.03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	5 Dokumen	158.000.000	2 Dokumen	8.135.000	4 Dokumen	56.078.990	4 Dokumen	56.078.990	80	35,95
9	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	100.000.000	0 Laporan	8.135.000	0 Laporan	53.078.990	0 Laporan	53.078.990	0	53,08
10	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	4 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	0	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	50	5,38
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			25	29,22
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan dan Implemtasi aqplikasi SIPD	10 Dokumen	77.274.200	0 Dokumen	5.105.000	0 Dokumen	5.105.000	0 Dokumen	5.105.000	0	6,61
11	5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah yang dikeola	1 dokumen	26.999.500	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
12	5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja pembangunan daerah	9 Laporan	50.274.400	2 Laporan	5.105.000	4 Laporan	5.105.000	4 Laporan	5.105.000	44,44	10,15
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			22,22	5,08
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
									Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			40	33,29
									Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	n/a	n/a	537.482.140	n/a	29.197.200	n/a	135.608.600	n/a	135.608.600	n/a	25,23
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	146.488.980	0%	18.738.200	0%	54.961.600	0%	54.961.600	0	37,52
13	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	24.995.700	0 dokumen	1.196.000	0 dokumen	10.142.000	0 dokumen	10.142.000	0	40,57

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
14	6.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	1 Laporan	7.499.950	1 Laporan	0	1 Laporan	4.480.000	1 Laporan	4.480.000	100	59,73
15	6.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	9.998.450	0 Laporan	0	0 Laporan	1.120.000	0 Laporan	1.120.000	0	11,2
16	6.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada bidang Pemerintahan	1 Laporan	4.999.800	0 Laporan	0	0 Laporan	1.405.100	0 Laporan	1.405.100	0	28,1
17	6.01.03.2.01.06	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	48.999.700	0 Dokumen	13.084.000	0 Dokumen	21.727.200	0 Dokumen	21.727.200	0	44,34

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
18	5.01.03.2.01.08	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	8.999.630	1 Laporan	0	1 Laporan	6.720.000	1 Laporan	6.720.000	100	74,67
19	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	11.999.850	0 Laporan	1.310.000	0 Laporan	1.310.000	0 Laporan	1.310.000	0	10,92
20	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Ranstra /Renja dengan RKPD /RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	28.995.900	0 Laporan	3.148.200	0 Laporan	8.057.200	0 Laporan	8.057.200	0	27,79
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			25	37,17
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	212.993.180	0%	0	0%	42.142.400	0%	42.142.400	0	19,79
21	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang di koordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	66.999.980	0 Dokumen	0	0 Dokumen	5.553.400	0 Dokumen	5.553.400	0	8,29
22	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	24.999.820	0 Laporan	0	0 Laporan	11.867.200	0 Laporan	11.867.200	0	47,47
23	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	1 Laporan	29.993.500	0 Laporan	0	0 Laporan	4.776.100	0 Laporan	4.776.100	0	15,92

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
24	6.01.03.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	24.999.880	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.994.200	0 Dokumen	1.994.200	0	7,98
25	6.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	7.546.000	1 Laporan	7.546.000	100	68,6
26	6.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0
27	6.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD dan RPJMD pada bidang SDA	1 Laporan	40.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	10.405.500	0 Laporan	10.405.500	0	26,01
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		14,29	24,9
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	178.000.000	0%	10.459.000	0%	38.504.700	0%	38.504.700	0	21,63
28	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	4.047.000	0 Dokumen	17.998.200	0 Dokumen	17.998.200	0	71,99
29	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	5.824.000	1 Laporan	5.824.000	100	97,07
30	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	31.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
31	6.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	38.000.000	0 Laporan	3.912.000	0 Laporan	8.479.300	0 Laporan	8.479.300	0	22,31
32	6.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	100.000	0 Dokumen	1.431.000	0 Dokumen	1.431.000	0	5,72
33	6.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinktonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	1 Laporan	53.000.000	0 Laporan	2.400.000	0 Laporan	4.774.200	0 Laporan	4.774.200	0	9,01
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			16,67	34,35
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
									Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			0	52,62
									Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	n/a	n/a	839.935.140	n/a	23.484.400	n/a	63.396.400	n/a	63.396.400	n/a	7,55

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
	6.06.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Dokumen	19.999.800	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.809.000	0 Dokumen	2.809.000	0	14,05
34	6.06.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	19.999.800	0 Laporan	0	0 Laporan	2.809.000	0 Laporan	2.809.000	0	14,05
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0	14,05
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	6.06.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen	649.999.540	0 Dokumen	18.075.100	0 Dokumen	50.826.100	0 Dokumen	50.826.100	0	7,82
35	6.06.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	159.999.950	0 Dokumen	0	0 Dokumen	3.558.000	0 Dokumen	3.558.000	0	2,22
36	6.06.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	149.999.750	0 Dokumen	8.787.100	0 Dokumen	25.800.400	0 Dokumen	25.800.400	0	17,2

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
37	6.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	339.999.840	0 Dokumen	7.288.000	0 Dokumen	21.467.700	0 Dokumen	21.467.700	0	6,31
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0	6,58
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	6.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	1 Dokumen	169.935.600	0 Dokumen	7.409.300	0 Dokumen	9.761.300	0 Dokumen	9.761.300	0	5,74
38	6.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	169.935.600	0 Dokumen	7.409.300	0 Dokumen	9.761.300	0 Dokumen	9.761.300	0	5,74
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0	5,74
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
									Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			0	18,41
									Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
4.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100%**	**6.118.706.625**	**25%**	**887.707.413**	**50%**	**2.254.680.110**	**50%**	**2.254.680.110**	**50**	**36,85**
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	54.410.990	25%	4.500.000	50%	7.500.000	50%	7.500.000	50	13,78

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
39	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	30.759.800	0 Dokumen	4.600.000	0 Dokumen	7.600.000	0 Dokumen	7.600.000	0	24,38
40	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.956.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100	0
41	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.198.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0
42	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	13.497.190	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	33,33	0
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			33,33	8,1
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	100%	4.362.579.285	0%	717.485.402	0%	1.901.828.224	0%	1.901.828.224	0	43,59

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
43	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	434 Orang/Bulan	4.363.582.485	69 Orang/Bulan	717.485.402	153 Orang/Bulan	1.901.828.224	153 Orang/Bulan	1.901.828.224	35,25	43,88
44	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.996.800	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	100	0
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			67,63	21,84
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian Bappedalitbang	100%	184.200.000	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
45	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut bappedalitbang	3 Paket	74.200.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0
46	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang-undangan	24 orang	110.000.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0	0
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	100%	900.804.000	0%	59.266.446	0%	185.405.322	0%	185.405.322	0	18,98
47	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	87.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
48	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	6 Paket	29.991.300	0 Paket	0	0 Paket	3.830.500	0 Paket	3.830.500	0	12,77
49	X.XX.01.2.08.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	1 Paket	32.999.700	0 Paket	0	0 Paket	2.976.600	0 Paket	2.976.600	0	9,02
50	X.XX.01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	750.913.000	1 Laporan	59.268.446	2 Laporan	158.596.222	2 Laporan	158.596.222	50	21,12
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	12,5	10,73
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100%	445.233.050	25%	67.932.050	50%	121.967.999	50%	121.967.999	50	27,39
51	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan surat menyurat	1 Laporan	11.996.250	0 Laporan	1.000.000	0 Laporan	3.480.000	0 Laporan	3.480.000	0	29,01
52	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sewakan	1 Laporan	139.958.000	0 Laporan	20.234.183	0 Laporan	40.770.092	0 Laporan	40.770.092	0	29,13
53	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakab	1 Laporan	40.150.000	0 Laporan	1.800.000	0 Laporan	9.050.000	0 Laporan	9.050.000	0	22,54
54	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	253.130.800	0 Laporan	44.697.897	0 Laporan	68.667.897	0 Laporan	68.667.897	0	27,13
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	0	26,95

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
						I		II					
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	100%	171.379.500	0%	18.523.505	0%	57.978.575	0%	57.978.575	0	33,83
55	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	151.387.500	0 unit	18.523.505	0 unit	40.833.575	0 unit	40.833.575	0	26,97
56	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /di rehabilitasi	1 unit	19.992.000	0 unit	0	1 unit	17.145.000	1 unit	17.145.000	100	85,76
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	56,37
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Rendah
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	33,33	46,66
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
												Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	12,5	23,32
												Predikat Kinerja (Program)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
												Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	19,88	31,51
												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			8.657.696.955		1.014.257.446		2.728.255.444		2.728.255.444		

Untuk hasil Realisasi Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, meliputi 4 (program) program yang terdiri dari:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota target anggaran sebesar Rp 6.118.708.825,00, pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 2.254.680.110,00 atau sebesar 36,85%.
b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah target anggaran sebesar Rp 1.161.572.850,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 274.570.334,00 atau sebesar 23,64%.
c) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp 537.482.140,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 135.608.600,00 atau 25,23%.
d) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, anggaran sebesar Rp 839.935.140,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 63.396.400,00 atau 7,55%. Realisasi anggaran Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Triwulan II yang ditampilkan adalah data realisasi per tanggal 30 Juni 2024.

2.2. Faktor-faktor Penyebab pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Bappedalitbang

Secara umum penyerapan realisasi anggaran sudah sesuai rencana pelaksanaan kegiatan. Dimana dalan penyusunan anggaran kas sudah memperhatikan target-target jadwal pelaksanaan kegiatan. Dalam penyelenggaraan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan, antara lain :

a) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Beberapa sub kegiatan masih belum dilaksanakan dikarenakan rencana pelaksanaan subkegiatan di semester II. Serta ada beberapa subkegiatan yang hanya berupa ATK saja, Hal ini menyebabkan adanya kurang efektif dan efesien dalam hal pelaksanaan. Ke depan sub kegiatan seperi ini dilakukan penggabungan dengan sub kegiatan yang hamper sama atau sejenis.

b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembamgunan daerah belum direalisasikan dikarenakan akan dilakukan rasionalisasi dan akan digabung pada sub kegiatan lain.
c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada beberapa sub kegiatan belum terealisasi dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tribulan III dan IV.
d) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Secara kinerja sudah dilaksanakan namun belum dilakukan realisasi anggaran.

2.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Dari hasil evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran triwulan II, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk dalam kategori rendah, begitu pula dengan penyerapan anggaran telah mencapai 27,31%. Oleh karena itu, Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah tercapainya target kinerja pada triwulan II/Semester I dan terus melakukan perbaikan untuk dapat melewati target capaian pada akhir tahun anggaran.

Adapun Faktor penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

1. Semakin berkurangnya pejabat fungsional perencana dikarenakan mutasi ke jabatan structural.
2. Adanya rangkap jabatan fungsional dan jabatan struktural
3. Belum optimalnya koordinasi dengan antar SKPD
4. Masih rendah akurasi data perencanaan karena kompleksitas data perencanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan;
5. Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk kajian dan identifiasi perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim;
6. Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang masih lemah;
7. Keterbatasan waktu di dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga keterbatasan SDM yang

profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sedangkan faktor *pendorong* Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mencapai tujuan, sasaran dan target untuk 5 tahun mendatang antara lain :

1. Melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
2. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi untuk keperluan kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan.
3. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta dinamika sistem pemerintahan.
4. Usaha untuk melakukan efisiensi waktu proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan pada setiap SKPD sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANG

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan 4 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan dan 56 sub kegiatan total pagu anggaran sebesar Rp. 8.657.6592.445,00. Setelah dilakukan evaluasi semester I mengenai kebutuhan anggaran dan kinerja diperlukan adanya perubahan pada beberapa sub kegiatan beserta anggarannya. Adapun Setelah dilakukan perubahan ada beberapa sub kegiatan tambahan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja dan sub kegiatan yang di kurangi beserta targetnya. Adapun total pagu anggaran menjadi Rp. 8.782.692.445,00 dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja perubahan Bappedalitbang adalah

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
   A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
      1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
      2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
      3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
      4) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
      5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
      6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
      7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
   B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
      1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
      1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
      2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   D. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
      1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
      2) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
   A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
      1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia.
7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perekonomian.
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
7) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
   1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
   1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
   2) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
   3) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
   1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tabel. 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				7.513.023.640,00	8.657.692.445,00	8.782.692.445,00	6.720.964.180,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.513.023.640,00	8.657.692.445,00	8.782.692.445,00	6.720.964.180,00	
	PERENCANAAN				6.748.024.600,00	7.817.739.505,00	7.818.264.805,00	6.415.964.180,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	5.048.989.500,00	6.118.704.405,00	6.141.352.245,00	4.962.464.180,00	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	100 %	100 %	48.408.790,00	54.408.790,00	54.408.790,00	48.459.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	24.759.600,00	30.759.600,00	30.759.300,00	24.759.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.956.000,00	4.956.000,00	4.956.000,00	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.196.000,00	5.196.000,00	5.196.000,00	5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	13.497.190,00	13.497.190,00	14.117.690,00	13.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	100 %	100 %	3.364.864.360,00	4.362.579.265,00	4.362.579.265,00	3.510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Orang/bulan	434 Orang/bulan	3.355.867.560,00	4.353.582.465,00	4.353.588.655,00	3.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.996.800,00	8.996.800,00	22.880.250,00	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian bappelitbang Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	100 %	100 %	184.200.000,00	184.200.000,00	184.200.000,00	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	74.200.000,00	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	24 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	100 %	100 %	900.904.000,00	900.904.000,00	900.904.000,00	828.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	87.000.000,00	87.000.000,00	339.650.000,00	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	29.991.300,00	29.991.300,00	42.579.100,00	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.999.700,00	32.999.700,00	32.999.700,00	23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	750.913.000,00	750.913.000,00	616.041.000,00	675.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	100 %	379.232.850,00	445.232.850,00	445.232.850,00	376.004.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	11.996.250,00	11.996.250,00	11.996.250,00	12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	139.956.000,00	139.956.000,00	139.956.000,00	185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	40.150.000,00	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	187.130.600,00	253.130.600,00	212.630.600,00	179.004.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	100 %	100 %	171.379.500,00	171.379.500,00	171.379.500,00	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	151.387.500,00	151.387.500,00	159.667.500,00	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	19.992.000,00	19.992.000,00	39.984.000,00	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	100 %	100 %	1.161.553.360,00	1.161.553.360,00	1.142.541.750,00	928.000.000,00	
G	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	888.315.010,00	888.315.010,00	888.315.010,00	620.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
19	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	24.999.750,00	24.999.750,00	3.195.000,00	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
20	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	22.800.000,00	22.800.000,00	17.415.000,00	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
21	Pelaksanaan Konsultasi Publik								
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	29.999.860,00	29.999.860,00	18.750.000,00	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
22	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.999.800,00	19.999.800,00	0,00	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
23	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	88.025.500,00	88.025.500,00	67.882.300,00	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
24	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	800 Usulan	9.989.950,00	9.989.950,00	4.500.000,00	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
25	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	692.500.150,00	692.500.150,00	769.561.100,00	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
H	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	39.964.150,00	39.964.150,00	39.964.150,00	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
26	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	39.964.150,00	39.964.150,00	27.964.150,00	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
I	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengedalaian dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	156.000.000,00	136.000.000,00	156.000.000,00	176.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
28	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	9 Laporan	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari implementasi Aplikasi SIPD	2 Dokumen	2 Dokumen	77.274.200,00	77.274.200,00	77.274.200,00	82.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
29	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	26.999.800,00	26.999.800,00	26.999.800,00	27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
30	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.274.400,00	50.274.400,00	50.274.400,00	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100 %	100 %	537.481.740,00	537.481.740,00	534.370.810,00	525.500.000,00	
K	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	146.488.780,00	146.488.780,00	146.488.780,00	135.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.995.700,00	24.995.700,00	24.995.700,00	12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	7.499.950,00	7.499.950,00	7.499.950,00	7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	9.998.450,00	9.998.450,00	8.648.450,00	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	4.998.800,00	4.998.800,00	4.998.800,00	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	48.999.700,00	48.999.700,00	51.969.700,00	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	8.999.630,00	8.999.630,00	8.089.700,00	9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	11.999.650,00	11.999.650,00	11.249.650,00	12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	28.996.900,00	28.996.900,00	28.996.900,00	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
L	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	212.992.960,00	212.992.960,00	212.992.960,00	216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	66.999.980,00	66.999.980,00	57.561.700,00	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	24.999.620,00	24.999.620,00	11.911.200,00	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	29.993.500,00	29.993.500,00	37.062.000,00	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.860,00	24.999.860,00	30.691.060,00	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	7.716.000,00	11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.590.000,00	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
M	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	174.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	22.715.000,00	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.430.000,00	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	53.000.000,00	53.000.000,00	67.395.000,00	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				764.999.040,00	839.952.940,00	964.427.640,00	305.000.000,00	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	100 %	764.999.040,00	839.952.940,00	964.427.640,00	305.000.000,00	
N	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
52	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	19.999.800,00	19.999.800,00	14.014.800,00	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
O	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen	3 Dokumen	649.999.340,00	649.999.340,00	649.999.340,00	170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
53	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	159.999.950,00	159.999.950,00	159.999.860,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
54	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.750,00	149.999.750,00	147.239.750,00	170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
55	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	339.999.640,00	339.999.640,00	339.999.440,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024	DPA APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	Pengembangan inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	94.999.900,00	169.953.800,00	169.953.800,00	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
56	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	94.999.900,00	169.953.800,00	303.173.800,00	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				J U M L A H	**7.513.023.640,00**	**8.657.692.445,00**	**8.752.692.445,00**	**6.720.964.180,00**	

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman yang bersifat konseptual dan operasional dalam melaksanakan tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perubahan Bappedalitbang Tahun 2024 ini didasarkan pada Renstra Bappedalitbang Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selalu sinergitas antara dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja(Renja) Perubahan ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Perubahan ini.

Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawaqal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Penyusunan Renja Perubahan memerlukan waktu yang cukup panjang sesuai, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta perubahannya. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harusditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;

b. pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang;

c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparan akan lebih terwujud;

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

JUMADI, SAp, MT
NIP. 19730608 199311 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN

HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2024

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara..... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara 20

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara..... 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKUPERINDAG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara..... 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubanan Renja SKPD) untuk menyesuaikan perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan untuk menyesuaikan perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023–2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 memuat pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan target kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan Penyusunan RKA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :02/M-IND/PER/1/2014 tetntang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (tentang Tahapan,) Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ttentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu SungaiUtara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
k. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.
l. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana trategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

m. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKPD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini untuk mensinergikan antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenngah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dilaksanakan tahun 2024.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, APBN dan sumber dana lainnya.
3. Sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULLAN II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta beberapa proses yang membutuhkan waktu.

Dalam tahun anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan yang akan dicapai yaitu meningkatnya peran ekonomi kreatif industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mendapat dana dari APBD Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 13,257,583,403,- (Tiga Belas Milyard Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah), dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan triwulan II (dua) pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	KODE REK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
SEKRETARIAT					
1	2.17.01.2.01.0006	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46,610,000	376,000	1
2	2.17.01.2.02.0001	Penyedia Gaji Dan Tunjangan ASN	6,150,801,310	2,540,681,306	41
3	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	4,000,000	-	-
4	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	-	-
5	2.17.01.2.06.0009	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultansi Keluar Daerah	82,569,000	55,562,534	67

6	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	15,399,800	1,051,600	7
7	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air & Listrik	219,580,400	49,543,341	23
8	2.17.01.2.08.0003	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	105,142,780	4,131,000	4
9	2.17.01.2.08.0004	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	329,177,000	143,125,000	43
10	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pmlhr & Peizin Kend. Dinas / Operasional	62,561,000	40,399,000	65
11	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13,750,000	10,127,500	74
12	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68,000,000	-	-
		JUMLAH	**7,112,811,200**	**2,845,197,181**	**40**
		KOPERASI			
1	2.17.03.2.01.0004	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	11,610,000	5,430,000	47
2	2.17.04.2.01.0001	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,490,000	2,030,000	14
3	2.17.05.2.01.0001	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,049,800	40,431,200	41
		JUMLAH	**125,149,800**	**47,891,200**	**38**
		USAHA KECIL MENENGAH			
1	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	6,721,900	-	-
2	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	28,669,800	13,395,000	47
3	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	99,159,600	13,580,000	14
4	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	25,710,000	1,140,000	4
		JUMLAH	**160,261,300**	**28,115,000**	**18**
		PERINDUSTRIAN			
1	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	628,914,250	163,722,790	26
2	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	424,478,400	39,320,000	9
3	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	85,863,800	18,000,000	21
4	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui SINas	45,330,000	-	-
		JUMLAH	**1,186,586,450**	**221,042,790**	**19**
		PERDAGANGAN			
1	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	14,415,800	5,078,000	35
2	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	9,580,760	4,991,000	52

3	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2,307,789,800	472,945,600	21
4	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	122,866,435	19,747,200	16
5	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	600,435,000	254,116,884	42
6	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	921,090,768	360,786,176	39
7	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	696,695,000	330,668,000	47
		JUMLAH	4,672,974,563	1,449,352,860	31
TOTAL			[illegible]	[illegible]	35

Di lihat dari tabel di atas alokasi anggaran dana untuk belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp. 46,610,000,00 realisasi sebesar Rp. 376.000,00 atau 1 %, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan kinerja dan laporan evaluasi.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Rp. 6,150,801,310,00 realisasi Rp. 2,540,881,306,00 atau 41%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi anggaran Rp. 4.000.000,00 realisasi Rp. 0 atau 0%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Anggaran Rp. 15.000.000,00 realisasi Rp. 0 atau 0%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran Rp. 82,569,000,00 realisasi Rp. 55,562,534,00 atau 67%, kegiatan yang

dilaksanakan berupa rapat koordinasi dan konsultasi.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran Rp. 15,399,800,00 realisasi Rp. 1.051.600,00 atau 7%, kegiatan berupa surat masuk dan surat keluar yang disistribusikan sesuai peruntukkanya.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Rp. 219.580.400,00 realisasi Rp. 49.543.241,00 atau 23%, kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet serta langganan TV Kabel.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran Rp. 105.142.780,00 realisasi Rp. 4.131.000,00 atau 4%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran Rp. 329.177.000,00 realisasi Rp. 143.125.000,00 atau 43%, kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan operasional kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran Rp. 62.581.000,00 realisasi Rp. 40.399.000,00 atau 65%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang dan pajak STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 mobil dinas operasional atau lapangan.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran Rp. Rp. 13.750.000,00 realisasi Rp. 10.127.500,00 atau 74% kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemeliharaan Peralatan.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran 68.000.000,00 realisasi Rp. 0 atau 0%

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

a. Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta

Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran Rp.11.610.000,00 realisasi Rp. 5.430.000,00 atau 47%, kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengawasan ketaatan dan ketangguhan Koperasi, KSP/ USP di Wilayah Kabupaten/ Kota.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran Rp. 14.490.000,00 realisasi Rp. 2.030.000,00 atau 14%, kegiatan penilaian KSP/USP yang sehat dan berkualitas.

4. Program Pendidikan Pelatihan Perkoperasian

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi anggaran Rp. 99.049.800,00 realisasi Rp. 40.431.200,00 atau 41%, kegiatan berupa Bimbingan, Pelatihan, Penyuluhan mengenai pemahaman perkoperasian.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

a. Sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro anggaran Rp. 6.721.900,00 realisasi Rp. 0 atau 0 %, kegiatan Kemitraan terhadap keragaman jenis wirausaha

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro anggaran Rp. 28.669.800,00 realisasi Rp.13.395.000,00 atau 47%, kegiatan berupa pemberian fasilitas untuk kemudahan pelaku usaha dalam legalitas izin

c. Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro anggaran Rp. 99.159.600,00 realisasi Rp. 13.580.000,00 atau 14%, kegiatan berupa pemberian pelatihan terhadap Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

d. Sub Kegiatan Penyusunan Basis DataUsaha Mikro anggaran Rp.25.710.000,00 realisasi Rp.1.140.000,00 atau 4%

6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan :

Kegiatan Penertiban tanda daftar gudang

a. Sub kegiatan Fasilitasi Penerbitan tanda daftar gudang dengan anggaran Rp. 14.416.800,00 terealisasi Rp. 5.078.000,00 atau 35%

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan anggaran Rp. 921.090.768,00 realisasi Rp. 360.786.176,00 atau 39%, kegiatan berupa pengelolaan terhadap sarana Distribusi Perrdagangan

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

a. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan anggaran Rp. 696.695.000,00 realisasi Rp. 330.688.000,00 atau 47%, kegaiatan pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan anggaran Rp. 9.680.760,00 realisasi Rp. 4.991.000,00 atau 52% kegiatan berupa pendataan terhadap kestabilan Stok dan harga barang dan pokok dan barang penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota anggaran Rp. 2.307.789.800,00 dengan realisasi Rp. 473.945.600,00 atau 21%, kegiatan berupa pelaksanaan pasar murah di wilayah Kabupatem Hulu Sungai Utara

9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang anggaran Rp. 122.866.435,00 realisasi Rp. 19.747.200,00 atau 16% kegiatan berupa Pelayanan Unit Metrologi Legal, berupa tera ulang UUTP yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota anggaran Rp. 600.435.000,00 realisasi Rp. 254.116.884,00 atau 42%, kegiatan berupa Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berupa pameran promosi perdagangan

11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri anggaran Rp. 628.914.250,00 realisasi Rp. 163.722.790,00 atau 26%, kegiatan berupa pelatihan teknis, magang bagi IKM dan pameran.
b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri anggaran Rp. 424.478.400,00 realisasi Rp. 39.320.000,00 atau 9%, kegiatan berupa pelatihan UPT produk industri daerah, magang bagi UPT dan hibah kepada kelompok IKM.
c. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan

Peran Serta Masyarakat anggaran Rp. 86.863.800,00 realisasi Rp. 18.000.000,00 atau 21% kegiatan berupa bimbingan dan penyuluhan kepada IKM

12. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) anggaran Rp. 46.330.000,00 realisasi Rp. 0 atau 0%, kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi pendataan.

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
3.31.3.30.2.17.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TRIWULAN I TAHUN 2024

No.	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Hasil Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dinilaikan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (s/d) Triwulan ini		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten sd Triwulan ini Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sd tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I	II	III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11=(10/7)*100%		12=(10/5)*100%		13=(10/9)*100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	3.17.00	[illegible]	n/a	n/a	[illegible]	n/a	[illegible]	n/a	[illegible]	n/a	0					n/a	[illegible]	n/a	-46,77	n/a	[illegible]	n/a	46,90	
	3.17.03.2.03.	[illegible]	[illegible]	10 Koperasi	[illegible]	9 Koperasi	[illegible]	10 Koperasi	[illegible]	0 Koperasi	0					0 Koperasi	0	0,00	0,00	0 Koperasi	[illegible]	11,11	0,00	
1	3.17.03.2.17.01.0	[illegible]	[illegible]	80 Unit Usaha	[illegible]	0 Unit Usaha	[illegible]	20 Unit Usaha	[illegible]	0 Unit Usaha	0					0 Unit Usaha	0	0,00	0,00	0 Unit Usaha	[illegible]	11,25	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			11,25	0,00	
																Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			11,25	0,00	
																Prediksi Kinerja (Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
2	3.17.04	[illegible]	n/a	n/a	[illegible]	n/a	[illegible]	n/a	[illegible]	n/a	0					n/a	[illegible]	n/a	-37,50	n/a	[illegible]	n/a	23,50	
	3.17.04.2.01.	[illegible]	[illegible]	110 Koperasi	[illegible]	10 Koperasi	[illegible]	10 Koperasi	[illegible]	0 Koperasi	0					0 Koperasi	0	0,00	0,00	10 Koperasi	[illegible]	33,00	0,00	
3	3.17.04.2.01.01	[illegible]	[illegible]	100 Unit Usaha	[illegible]	11 Unit Usaha	[illegible]	30 Unit Usaha	[illegible]	0 Unit Usaha	0					0 Unit Usaha	0	0,00	-9,09	11 Unit Usaha	[illegible]	33,00	-36,63	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			33,00	33,00	
																Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			33,00	0,00	
																Prediksi Kinerja (Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
A	3.17.00	[illegible]	n/a	n/a	[illegible]	n/a	[illegible]	n/a	[illegible]	n/a	0					n/a	[illegible]	n/a	-56,63	n/a	[illegible]	n/a	-56,63	

No	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 dalam Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dikontrakan		Penilaian Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RAN) 2024 yang dikontrak		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Kerja/Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		12		13=12/5*100%		Lanjutan 12		15=(8+12)/(5+6)*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.09.2.01	Pendidikan dan Latihan Penyelenggaraan Sipil Negara/ yang Menjalani Kewajiban Dalam Jawatan Ketugasan/Kedinasan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan/Latihan	330 Orang	407.716.800	88 Orang	96.738.000	88 Orang	99.608.000	0 Orang	0					0 Orang	0	0,00	0,00	88 Orang	99.716.800,00	17,50	0,00		
9	2.17.09.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengetahuan, Pembentukan sikap, Keterampilan dan Kompetensi ASN Instansi	Jumlah ASN yang memenuhi Pengetahuan, Keterampilan	330 Orang	407.716.800	88 Orang	96.738.000	88 Orang	99.608.000	0 Orang	0					0 Orang	0	0,00	0,00	88 Orang	99.716.800,00	17,50	24,22	Dinas Kepemud, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			17,50	24,22		
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			17,50	0,00		
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
A.	2.17.07	Program	n/a	n/a		n/a		n/a		n/a						n/a		n/a		n/a		n/a			
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang (Sebesar-besarnya Pemberian, Kendalinan, Kemudahan Perizinan, Pengawasan Pelindungan dan Fasilitasi dengan Rasa Tanggung Jawab)	Persentase UMKM yang dibina	1,00 %		1,57 %		0,57 %		1,57 %						0 %		1,00 %	0,00	57,00 %		628,00	0,00		
4	2.17.07.2.01.01	Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UKM Usaha yang memberdayakan Pemerintah Usaha Mikro	80 Unit Usaha		0 Unit Usaha		25 Unit Usaha		0 Unit Usaha						0 Unit Usaha		0,00	0,00	0 Unit Usaha		0,00		Dinas Kepemud, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	2.17.07.2.01.02	Fasilitasi Pemasaran Produksi Usaha Mikro	Jumlah usaha Mikro yang telah mendapatkan Fasilitasi	20 Unit Usaha		0 Unit Usaha		20 Unit Usaha		0 Unit Usaha						20 Unit Usaha		0,00	0,00	75 Unit Usaha		0,00		Dinas Kepemud, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah mendapatkan Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	125 Unit Usaha		0 Unit Usaha		125 Unit Usaha		0 Unit Usaha						0 Unit Usaha		0,00	0,00	200 Unit Usaha		0,00		Dinas Kepemud, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7	2.17.07.2.01.14	Pengawasan Pasca Izin Usaha Mikro	Jumlah Data Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Mikro	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen						0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Kepemud, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00		

No	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai dengan Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2026 yang dimutakhirkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dimutakhirkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sampai dengan Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8				12		13=12/7x100%		14=12/5x100%		15=12/6x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	A	Rp	K	Rp	A	Rp	
																Prediksi Kinerja (Kab Kegiatan)		Target Realisasi	Target Realisasi			Tinggi	Target Realisasi	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		4.779.23	0.00			4.00.00	0.00	
																Prediksi Kinerja (Kegiatan)		Target Tinggi	Target Realisasi			Sangat Tinggi	Target Realisasi	
X.	X.00.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/XXX	xxx	xxx	X	xxx	X	xx	14.432.000	xxx	X			xxx	3.570.000	xxx	30,11	xxx	3.570.000,00	xxx	3,00		
	X.00.XX.2.02	Pengelolaan Tanda Daftar Gudang	Persentase Perizinan Pendaftaran Gudang, TDP, TDG	X %	X	X %	X	00 %	14.432.000	X %	X			X %	X	0,00	0,00	X %	0,00	0,00	0,00		
X	X.00.XX.2.02.01	Penilaian Persyaratan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	X Dokumen	X	X Dokumen	X	00 Dokumen	14.432.000	X Dokumen	X			X Dokumen	X	0,00	0,00	X Dokumen	0,00	0,00	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Realisasi	Sangat Realisasi			Sangat Realisasi	Sangat Realisasi	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																Prediksi Kinerja (Kegiatan)		Sangat Realisasi	Sangat Realisasi			Sangat Realisasi	Sangat Realisasi	
X.	X.00.XX	PROGRAM PEMBINAAN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	xxx	xxx	4.741.467.240	xxx	5.157.438.863	xxx	3.417.708.758	xxx	X			xxx	Rp0.472.178	xxx	87,74	xxx	1.494.132.156,00	xxx	90,10		
	X.00.XX.2.XX	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Pasar	10 Kecamatan	3.302.311.240	10 Kecamatan	753.282.463	10 Kecamatan	321.698.758	Kecamatan	X			Kecamatan	X	0,00	0,00	10 Kecamatan	753.282.463,00	100,00	0,00		
X	X.00.XX.2.XX.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24 Unit	3.302.311.240	24 Unit	753.282.463	25 Unit	321.698.758	-1 Unit	X			X Unit	X	0,00	0,00	24 Unit	753.282.463,00	100,00	24,24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Realisasi	Sangat Realisasi			Sangat Tinggi	Sangat Realisasi	
	X.00.XX.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengelolaan Pasar dan Retribusi	70 %	1.439.370.240	67 %	406.307.534	70 %	049.095.903	X %	X			0 %	X	0,00	0,00	67 %	406.947.500,00	138,57	0,24		
10	X.00.XX.2.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2000 Dokumen	1.439.370.240	250 Dokumen	406.307.534	700 Dokumen	049.095.903	X Dokumen	X			X Dokumen	X	0,00	0,00	701 Dokumen	406.947.500,00	37,50	26,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2025-2026/ Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dimutakhirkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang Dimutakhirkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.					Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dimutakhirkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD 2024 yang dimutakhirkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 /Thn		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d. Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12			13=12/5 (100%		Lanjut 12		15=14/5 (100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		%	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Aurdasi	Sangat Aurosa			Baseline	Sangat Aurosa	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	0.00	0.00			96.00	0.00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Aurdasi	Sangat Aurdasi			Aurdasi	Sangat Aurdasi	
X.	X.XX.XX	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK DALAM NEGERI	n/a	n/a	357,868,000	n/a	354,525,114	n/a	666,430,000	n/a	0						n/a	750,120,000	n/a	40.00	n/a	666,430,000.00	n/a	93.00	
	X.XX.XX.X.01	Fasilitasi dan Promosi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pengadaan dan Pemanfaatan Produk Unggulan Kabupaten	400 %	357,868,000	100 %	354,525,114	100 %	666,430,000	25 %	0						25 %	0	0.00	0.00	125 %	354,525,114.00	96.00	0.00	
1a	X.XX.XX.X.01.01	Fasilitasi dan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	0 UMKM	357,868,000	7 UMKM	354,525,114	25 UMKM	666,430,000	0 UMKM	0						0 UMKM	0	0.00	0.00	00 UMKM	354,525,114.00	125.00	25.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	12.50	0.00			125.00	25.00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Aurdasi	Sangat/ Aurdasi			Sangat Tinggi	Sangat Aurdasi	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	00.00	0.00			96.00	0.00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Aurdasi	Sangat Aurdasi			Sangat Aurdasi	Sangat Aurdasi	
2a	X.XX.02	PROGRAM PENDUKUNGAN DAN PEMBINAAN INSUSTRI	n/a	n/a	3,000,220,000	n/a	000,170,040	n/a	1,340,336,050	n/a	00,000,000						n/a	222,042,700	n/a	16.20	n/a	1,237,222,040.00	n/a	37.20	
	X.XX.XX.X.01	Pemasaran dan Promosi Produk Pendampingan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang meningkat	0.2 %	3,000,220,000	15 %	000,170,040	1.00 %	1,340,336,050	0 %	00,000,000						0 %	00,000,000	0.00	7.50	10 %	1,224,676,040.00	000.51	0.00	
2b	X.XX.XX.X.01.01	Fasilitasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100 Dokumen	1,011,047,400	22 Dokumen	027,057,040	22 Dokumen	520,510,270	5 Dokumen	00,000,000						1 Dokumen	00,000,000	7.00	0.01	22 Dokumen	000,205,040.00	10.57	22.72	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2c	X.XX.XX.X.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Perancangan Industri	22 Dokumen	111,002,200	5 Dokumen	22,022,000	2 Dokumen	020,170,000	0 Dokumen	10,000,000						0 Dokumen	10,000,000	5.00	4.50	2 Dokumen	222,222,040.00	5.00	100.20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2026 yang Dievaluasi		Kondisi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II	III	IV											
1.	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11=(9/7)x100%		Lanjut 12		13=(9/5)x100%		14
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	I	II	III	IV	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
17	5.10.01.2.02.09	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Fakultif dan Non Teknis Masyarakat	urusan Koordinasi Input Stakeholder, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dan Pusat-pusat Masyarakat	10 Dokumen	575.472.000	4 Dokumen	34.675.000	4 Dokumen	60.892.000	3 Dokumen	5.000.000					4 Dokumen	5.000.000	0,00	92,36	4 Dokumen	60.675.000,00	75,00	74,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai Hasil Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																2,50	4,33			12,10	86,70	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
		Nilai Hasil Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0,00	77,24			200,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
11.	5.10.34	PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI (SELUTH kecuali Bid.	dan	dan	185.311.000	dan	61.000.000	0%	66.100.000	nol	0					dan	0	0,00	0,00	dan	61.000.000,00	0,00	13,67	
	5.10.34.2.03	Pengelolaan informasi kekuatan untuk informasi (SELUH UTUK SJ, IPW, SDT dan IP) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang terlatih	100 %	185.311.000	30 %	61.000.000	30 %	66.100.000	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	30 %	61.000.000,00	75,00	0,00	
18	5.10.34.1.03.01	Pendidikan Pengorganisasi, Pengelolaan dan Analisis Data Kekuatan, Data Kawasan industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Kekuatan Nasional (SINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Pengorganisasi, Pengelolaan dan analisis Data Khusus, Data Kawasan industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Kekuatan Nasional (SINas)	40 Dokumen	185.311.000	10 Dokumen	61.000.000	10 Dokumen	66.100.000	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0,00	0,00	10 Dokumen	61.000.000,00	75,00	13,67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai Hasil Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																0,00	0,00			13,00	13,67	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Nilai Hasil Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0,00	0,00			75,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12.	5.10.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dan	dan	5.611.900.400	nol	4.277.510.270	dan	7.111.611.500	nol	0					dan	3.270.117.640	nol	53,00	dan	5.407.138.414,00	dan	114,00	
	5.10.12.2.12	Penatausahaan, Pengelolaan, dan Evaluasi Barang Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan APP	100 %	37.000.000	97,00 %	37.257.254	100 %	48.610.000	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	97,00 %	37.257.254,00	97,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2025 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan (2025 yang dianalisis)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja (SOTK 2024 yang dianalisis)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		12		13=12/7*100%		14=thn12		15=14/5.6*100%		16
				a	Rp	c	Rp	d	Rp	e	Rp					e	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	
79	5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA) dan Laporan Capaian Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA)	4 Laporan	97.064.500	3 Laporan	91.477.229	4 Laporan	48.610.000	4 Laporan	0					4 Laporan	0	0,00	0,00	3 Laporan	97.477.229,00	75,00	56,17	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			22,50	56,17	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Kurang	
	5.05.01.2.01	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan APP	100 %	4.287.344.250	100 %	2.405.710.000	100 %	4.150.000.250	25 %	0					100 %	0	0,00	0,00	1,12 %	2.405.710.000,00	112,00	0,00	
80	5.05.01.2.01.01	Penyediaan data dan Pelayanan ADM	Jumlah orang yang memerlukan dan Pelayanan ADM	10 Orang/Kelurahan	4.287.344.250	11 Orang/Kelurahan	2.405.710.000	10 Orang/Kelurahan	4.150.000.250	2 Orang/Kelurahan	0					2 Orang/Kelurahan	0	0,00	0,00	11 Orang/Kelurahan	2.405.710.000,00	44,00	82,00	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			44,00	82,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Tinggi	
	5.05.01.2.03	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan APP	100 %	82.064.000	0 %	0	100 %	24.000.000	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
81	5.05.01.2.03.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4 Orang	34.064.000	0 Orang	0	4 Orang	4.000.000	0 Orang	0					0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
82	5.05.01.2.03.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	28.000.000	0 Orang	0	4 Orang	20.000.000	0 Orang	0					0 Orang	0	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	5.05.01.2.04	Administrasi Data Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan APP	100 %	108.064.500	90 %	34.000.000	100 %	52.500.000	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	90 %	34.000.000,00	90,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2025 dalam Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dikontrakan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja APPA 2024 yang diverifikasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II	III	IV										
1.	2	3	4	5		6		7		8				12		13=12/7*100%		Lanjutan 2		25=24/5x100%		26	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K=Tw I	K=Tw II	K=Tw III	K=Tw IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23	5.XX.01.2.23.XX	Penyelenggaraan Sigap Kependudukan dan Kesadaran (SPS)	Persentase Terlaksananya rutan dan kesadaran adalah satu-bahasa	100 Persen	500.000.000	80 Persen	15.000.000	100 Persen	62.500.000	0 Persen	0					0 Persen	0	0,00	0,00	80 Persen	10.000.000,00	80,00	0,27	Dinas Kependud. Catatan Sipil Masyarakat, Pemberdayaan dan Perlindungan
																						80,00	0,27	
																						Tinggi	Sangat Rendah	
	5.XX.01.2.XX	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tingkat Aksesibilitas pelo	100 %	677.365.232	100 %	444.275.234	100 %	888.290.000	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	100 %	644.275.234,00	100,00	0,00	
24	5.XX.01.2.XX.01	Penyelenggaraan Data Kota Masyarak	jumlah Laporan Penyedia Data Kota Masyarak	10 Laporan	0	10 Laporan	12.417.000	10 Laporan	15.200.000	0 Laporan	0					0 Laporan	0	0,00	0,00	10 Laporan	12.417.000,00	0,00	0,00	Dinas Kependud. Catatan Sipil Masyarak Pemberdayaan dan Perlindungan
25	5.XX.01.2.XX.07	Penyelenggaraan Kependudukan, Sumber Daya Manusia	jumlah Laporan Penyedia data Kependudukan, Sumber Daya Manusia yang disediakan	48 Laporan	101.010.000	48 Laporan	101.768.000	48 Laporan	110.500.000	12 Laporan	0					12 Laporan	0	25,00	0,00	48 Laporan	101.010.000,00	0,00	90,24	Dinas Kependud. Catatan Sipil Masyarak, Pemberdayaan dan Perlindungan
26	5.XX.01.2.XX.03	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Kependud	Persentase penduduk sudah dipakai kependud sudah adapat dikependuduk	100 %	535.465.000	100 %	333.457.225	100 %	665.245.750	100 %	0					100 %	0	100,00	0,00	100 %	514.457.225,00	100,00	94,00	Dinas Kependud. Catatan Sipil Masyarak, Pemberdayaan dan Perlindungan
27	5.XX.01.2.XX.04	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor	jumlah Laporan Penyedia data Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	362.783.000	12 Laporan	330.177.250	12 Laporan	0					3 Laporan	0	25,00	0,00	12 Laporan	362.783.000,00	0,00	0,00	Dinas Kependud. Catatan Sipil Masyarak, Pemberdayaan dan Perlindungan
																		41,75	0,00			141,75	1,1.41	
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	5.XX.01.2.XX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Aksesibilitas pelo	100 %	336.000.475	100 %	223.600.850	100 %	444.225.000	0 %	0					0 %	0	0,00	0,00	100 %	223.600.850,00	100,00	0,00	
28	5.XX.01.2.XX.XX	Penyelenggaraan Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak, dan Pengurus Administrasi Utama Operasional dan Lainnya	jumlah Pemerintah Utama operasional atau kegiatan yang disediakan dan Administrasi pajak dan pemerintahan.	4 Unit	12.305.475	0 Unit	10.833.850	4 Unit	42.250.000	0 Unit	0					0 Unit	0	0,00	0,00	3 Unit	10.833.850,00	75,00	87,10	Dinas Kependud. Catatan Sipil Masyarak, Pemberdayaan dan Perlindungan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 dan Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2026 yang ditandatangani		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja (s/d) (2026 yang ditandatangani		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%))		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I														
												II	III	IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=(12/7)x100%		14=(12/5)x100%		15=(12/5)x100%		16	
19	5.19.01.2.19.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	79 Unit	47.450.000	20 Unit	11.690.000	10 Unit	11.750.000	0 Unit	0				0 Unit	0	0,00	0,00	20 Unit	11.690.000,00	24,47	24,65	Dinas Pangan, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
31	5.19.02.2.19.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100	125.000.000	20	26.233.000	100	88.000.000	0	0				100	0	0,00	0,00	100	26.233.000,00	0,00	59,41	Dinas Pangan, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
																	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		0,00	0,00			37,89	48,28	
																	Predikat Kinerja Sub Kegiatan		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Efektivitas Capaian Kinerja Kegiatan (%)		7,77	0,00			47,89	0,00	
																	Predikat Kinerja Kegiatan		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Program (%)		0,00	37,52			0,00	50,00	
																	Predikat Kinerja (Program		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	19																Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		0,19	05,00			59,07	29,15	
																	Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program	72.750.785.853			90.500.000								4.421.678.799									
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Adanya penyusunan kebutuhan secara dini prasarana yang menjadi prioritas																					
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Kurangnya koordinasi lapat akan adanya kegiatan sehingga kegiatan menjadi tertunda oleh Dinas Kesehatan																					
	Tindak Lanjut yang dilaksanakan dalam Triwulan berikutnya		Upaya peningkatan kinerja koordinasi antar bidang akan kegiatan kegiatan berikutnya agar lebih terjadwal																					

2.2 Analisis Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat di identifikasikan melalui faktor internal dan eksternal yang berpedoman kepada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Hulu Sungai Utara :

a. Faktor Internal

Pada faktor internal organisasi terdapat kekuatan yang dapat mendorong dan menunjang organisasi yang meningkatkan kinerja dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan, antara lain :

1. Kekuatan (Strenigth)
   - Dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara
   - Jumlah Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara
   - Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
   - Transportasi dapat di tempuh dengan angkutan darat dan sungai
2. Kelemahan (Weakness)
   - Sumber Daya Manusia, enterpreneur, inovasi dan profesinalisme masih rendah
   - Kurangnya sarana pendukung produksi dan kemampuan penerapan teknologi
   - Lemahnya dalam promosi dan pemasaran
   - Lemahnya daya saing (Kualitas, desain dan harga)
   - Lemahnya kelembagaan dan jaringan usaha
   - Lemahnya dalam permodalan

b. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal dapat dianalisa dari peluang yang ada menjadi harapan dalam mencapai tujuan dan ancaman yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang di harapkan.

1. Peluang (Opportunities)
   - Potensi pasar dalam negeri baik lokal ataupun regional cukup tinggi
   - Komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam hal ini adalah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM cukup kuat
   - Industri kerajinan dan UMKM memiliki segmen pasar tersendiri

2. Ancaman (Threat)

- Masuknya produk luar yang sejenis dengan kualitas, desain dan harga yang lebih kompetitif
- Pesatnya perkembangan teknologi yang belum bisa diikuti pelaku usaha di daerah
- Kuatnya persaingan dan profesionalisme usaha bidang industri

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu : kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik dari permasalahan, hambatan, peluang dan tangtangan dalam pencapaian tujuan dari penyelenggraan tugas dan fungsi :

1. Masih kurangnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan dari masyarakat Industri IKM terhadap produk yang berkualitas.
2. Masih rendahnya kualitas, mutu dan desain produk IKM di karenakan kurangnya peralatan dan desain yang dimiliki IKM.
3. Belum optimalnya pelayanan dari UPT Produk industri daerah kepada IKM serta kurangnya sarana informasi yang dapat di akses oleh masyarakat.
4. Kurangnya produk IKM yang bersetifikasi halal dan memiliki perijinan-perijinan seperti IUMK, IUI dan PIRT.
5. Belum adanya bangunan khusus operasional Unit Metrologi Legal (UML).
6. Kualitas kelembagaan koperasi masih lemah yang antara lain adalah masih adanya koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu (sampai dengan bulan Maret), SDM pengawas belum cukup memadai utk melakukan pemeriksaan/ pengawasan koperasi (Pengawasan Internal), administrasi organisasi dan administrasi usaha masih lemah (masih menggunakan sistem manual), serta masih banyak koperasi yang belum mampumenyusun laporan keuangan (bahan pertanggung jawaban khususnya dalam RAT).
7. Minimnya pengelola yang mempunyai sertifikasi/ lulus uji sertifikasi dibidang Koperasi (lulus uji kompetensi), baik sebagai Manager, Kasir maupun Juru Buku Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.
8. Masih kurangnya SDM dan kemampuan manajemen UMKM serta belum maksimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan, masih banyaknya barang kadaluarsa dan harga yang tidak menentu dipasaran, terbatasnya informasi pemasaran produk dan belum dikenalnya produk unggulan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Karena sudah terbitnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang menyediakan pagu indikatif awal anggaran untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 13,257,583,403 sedangkan kebutuhan anggaran pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 1 Perbedaan yang besar antara Anggaran di Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan Rancangan Awal RKPD masih terdapat kekurangan anggaran yang akan diusulkan dimana hal itu untuk memenuhi kebutuhan anggaran terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang tercantum dal sub kegiatan

No	Pagu Awal 2024					Kebutuhan Tahun 2024					Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. HSU**	**Nilai SAKIP SKPD**	**A**	7,112,611,290.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. HSU**	Nilai SAKIP SKPD	**A**	**6,376,398,760**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. HSU**	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	**100%**	**46.610.000.00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. HSU**	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	**100%**	**55.639.000,00**	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja danIkhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi	6 Laporan	46.610.000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja danIkhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi	6 Laporan	51.710..000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentasi realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	6.150.801.310,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. HSU**	Persentasi realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	**100%**	**5.392.801.310,00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	6.150.801.310,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.392.801.310,00	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab.HSU**	Persentase realisasi Pegawai yang mengikuti Bimtek	**100%**	***19.000.000,00***	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. HSU**	Persentase realisasi Pegawai yang mengikuti Bimtek	**100%**	**9.000.000,00**	
	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya	Kab.HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	4.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya	Kab.HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	4.000.000,00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	15.000.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	5.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab.HSU**	Persentasi realisasi bahan logistik kantor	100%	**82.569.000,00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.HSU**	Persentasi realisasi bahan logistik kantor	**100%**	**225.399.000,00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	100.440.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	82.569.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	124.559.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab.HSU**	Persentasi realisasi jasa kantor	100%	**669.299.980,00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.HSU**	**Persentasi realisasi jasa kantor**	100%	**621.157.450,00**	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	15.399.800,00	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	16.999.600,00	

	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	219.580.400,00	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	159.599.600,00	
	Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	105.142.780,00	Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	115.381.250,00	
	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	329.177.000,00	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	329.177.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.HSU	Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin	**100%**	**144.331.000,00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab.HSU	Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin	**100%**	**76.331.000,00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	82.581.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	82.581.000,.00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	13.750.000,.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	13,750,000.00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Kab.HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil	100%	68.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Kab.HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	0	

	Bangunan		itas			Bangunan Lainnya					
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kab. HSU	Persentase KSP/USP, Koperasi yang Telah dilakukan Pemeriksaan	50%	11.610.000,00	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kab. HSU	Persentase KSP/USP, Koperasi yang Telah dilakukan Pemeriksaan	50%	11.609.950,00	
	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. HSU	Jumlah koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	28 Koperasi	*11.610.000,00*	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. HSU	Jumlah koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	28 Koperasi	*11.609.950,00*	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	28 Unit Usaha	11.610.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	28 Unit Usaha	*11.609.950,00*	
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Kab. HSU	Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai Kesehatannya	50%	14.490.000,00	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Kab. HSU	Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai Kesehatannya	50%	14.490.000,00	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Koperasi Sehat	30 Koperasi	*14.490.000,00*	*Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. HSU*	*Jumlah Koperasi Sehat*	*30 Koperasi*	*14.490.000,00*	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penilaian	30 Unit Usaha	14.490.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan	30 Unit Usaha	14.490.000,00	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya**	50%	99.049.800,00	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya**	50%	99.049.800,00	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan Pelatihan**	**20 Koperasi**	99.049.800,00	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Koperasi yang diberikan pendidikan dan Pelatihan**	**20 Koperasi**	99.049.800,00	
	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 orang	99.049.800,00	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 orang	99.049.800,00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Persentase UMKM Yang Dibina**		160.261.300,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Persentase UMKM Yang Dibina**		238.996.100,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan		**Jumlah UMKM yang Dibina**		160,261,300,00	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui**		**Jumlah UMKM yang Dibina**		238,996,100,00	

	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					**Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**					
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah Lapora Basis Data	1 Laporan	25.710.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah Lapora Basis Data	1 Laporan	25.710.000,00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Umkm	6.721.900,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Umkm	6.721.900,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	80 UMKM	28.689.800,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	80 UMKM	59.425.800,00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	99.159.800,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	147.138.400,00	
6	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Kab. HSU	persentase Sarana Distribusi Perdagangan	100%	**1.617.785.768,00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Kab. HSU	persentase Sarana Distribusi Perdagangan	100%	**1.690.906.868,00**	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	**Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan**		***921.090.768,00***	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Kab. HSU			***994.216,868,00***	

	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24 Unit	921.090.768,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24 Unit	934.216.868,00	
	Kegiatan pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. HSU	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	696.695.000,00	Kegiatan pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	696.690.000,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peng endalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	696.695.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	696.690.000,00	
7	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. HSU**	**persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting**	**100%**	**2.317.470.560,00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**KAB. HSU**	**persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting**	**100%**	**2.406.369.600,00**	
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Kab. HSU**	**Jumlah Pemantauan harga dan stock bahan pokok**	**264 Laporan**	**2.317.470.560,00**	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**KAB. HSU**	**Jumlah Pemantauan harga dan stock bahan pokok**	**264 Laporan**	**2.406.369.600,00**	
	Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok	252 Laporan	9.680.760,00	Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	264 Laporan	9.680.000,00	

			Sarang								

	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Kec. 33 Kegiatan/ Kali	2.307.769.800,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Kec. 33 Kegiatan/ Kali	2.396.689.800,00	
8	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Kab. HSU	**Persentase pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU**	**100%**	**122.866.435,00**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**KAB. HSU**	Persentase pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU	**100%**	**120.966.435,00**	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. HSU	**jumlah UTTP yang dilayani tera/ tera ulang atau pengawasan BDKT yang telah dilaksanakan**	**1200 Unit**	*122.866.435,00*	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kab. HSU**	jumlah UTTP yang dilayani tera/ tera ulang atau pengawasan BDKT yang telah dilaksanakan	**1200 Unit**	*120.966.435,00*	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.HSU	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera atau Tera Ulang	1200 Unit	122.866.435,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. HSU	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera atau Tera Ulang	1200 Unit	120.966.435,00	
9	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM MEGERI**	**Kab.HSU**	**Persentase pelaksanaan Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten**	100%	**600.435.000,00**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Kab. HSU	**Persentase pelaksanaan Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten**	100%	**589.860.000,00**	

	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		jumlah promosi perdagangan yang diikuti	20 UMKM	600.435.000,00	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. HSU	jumlah promosi perdagangan yang diikuti	20 UMKM	589.860.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	20 UMKM	600.435.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	20 UMKM	589.860.000,00	
10	**PROGRAM PELZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Kab. HSU	**persentase pelaksanaan Pendaftaran gudang**	**100%**	**14,416,880.00**	**PROGRAM PELZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Kab. HSU	**persentase pelaksanaan Pendaftaran gudang**	**100%**	**14,407.900,00**	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. HSU	**Jumlah Pemantauan dan pengawasan tanda Daftar Gudang**	**50 Dokumen**	**14,416,880.00**	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Kab. HSU	**Jumlah Pemantauan dan pengawasan tanda Daftar Gudang**	**50 Dokumen**	**14,407.900,00**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. HSU	Jumlah Pendaftaran Gudang di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	50 Dokumen	14,416,880.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. HSU	Jumlah Pendaftaran Gudang di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	50 Dokumen	14,407.900,00	
11	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kab. HSU**	**Persentase Peningkatan IKM**	**4,82%**	**1.186.586.450,00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kab. HSU**	**Persentase Peningkatan IKM**	**4,82%**	**1.162.800.250,00**	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Kab. HSU**	**Jumlah Dokumen Pembangunan Industri**	**1 Dokumen**	*1.140.256.450,00*	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**Jumlah Dokumen Pembangunan Industri**	**1 Dokumen**	*1.083.500.250,00*	

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	628.914.250,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	620.142.750,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	424.478.400,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	377.887.500,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	86.863.600,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	85.470.000,00	
12	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Informasi Data yang terupdate**	**100%**	**46.330,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Informasi Data yang terupdate**	**100%**	79.300.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Data IKM di HSU untuk mendukung Siinas**	**30 IKM**	**46.330,000.00**	**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Data IKM di HSU untuk mendukung Siinas**	*30 IKM*	79.300.000,00	
	Sub Kegiatan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	46.330,000.00	Sub Kegiatan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	79.300.000,00	

	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	JUMLAH TOTAL				13,257,583,403	**JUMLAH TOTAL**				12.725.855.863,00	

1

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pengkajian usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dengan memperhatikan berbagai kebutuhan dari berbagai usulan masyarakat dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah

1. Penyediaan alat dan mesin industri

   Masih minimnya pemanfaatan teknologi dibidang industri cukup mempengaruhi kemajuan disektor ini. Perlunya peralatan dan mesin sebagai pendukung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri di Hulu Sungai Utara, khususnya industri kerajinan. Bantuan peralatan dan pelatihan penggunaan alat tersebut sangat membantu para pengrajin untuk meningkatkan produksi mereka.

2. Perbaikan dan Penambahan Sarana Perdagangan

   Minimnya sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengakibatkan tuntutan kreatifitas, enovasi dan kerja keras kepada masyarakat untuk menggali potensi daerah. Sektor perdagangan adalah salah satu sektor yang bisa meningkatkan perekonomian masyakarat diKabupaten Hulu Sungai Utara. Sarana dan Prasarana berupa pasar dan kelengkapannya memberikan *"multiplier effect"* yang cukup besar sehingga masyarakat bisa meningkatkan taraf penghidupan mereka.

   Adanya pembangunan pasar-pasar baru di kecamatan dan pedesaan sangat memudahkan masyarakat Hulu Sungai Utara dalam sarana akses jual beli, karena itu pihak pemerintah berencana di tahun 2023 akan menambah infrastruktur (Bangunan Pasar) dan sarana jalan berupa pasar desa, pasar kecamatan dan pasilitas jalan.

3. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

   Pembinaan dan pengembangan koperasi merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan, serta tanggungjawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam pembangunan. Sebagian besar masyarakat dari golongan ekonomi lemah berada di daerah-daerah pedesaan, dan karena itu pemberian perhatian khusus pada pemberdayaan koperasi yang berada di pedesaan merupakan langkah yang sangat diperlukan. Pemberdayaan koperasi di pedesaan dapat membangkitkan swadaya

masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidupnya, mengurangi tingkat kemiskinan, lagi pula pengembangan koperasi di pedesaan juga akan membantu masyarakat pedesaan untuk mendorong perkembangan kewirausahaan. Dan apabila berhasil, juga mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang selanjutnya akan mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas penduduk daerah serta peningkatan kesejahteraan di pedesaan, dengan perkataan lain, pengembangan koperasi di pedesaan apabila berhasil, akan membantu usaha peningkatan pendapatan nyata penduduk desa dan dengan demikian membantu usaha pemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan.

Berikut Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat yang langsung memasukan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024 :

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH					
KODE	USULAN KEGIATAN	LOKASI	PENGUSUL	SUMBER DANA	PERMASALAHAN
1	Hibah Mesin Penunjang Anyaman Purun	Desa Tambak Sari Panji, Kec. Haur Gading	KUB Manuntung	-	Kelompok Usaha KUB Manuntung memerlukan mesin penunjang untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi produk
2	Hibah bahan baku purun & Jukung untuk mencari bahan purun	Desa Jingah Bujur, Kec. Haur Gading	Kelompok Sentra Kerajinan JB Berkarya	-	Kelompok usaha memerlukan bahan baku purun untuk mengatasi keterbatasan bahan baku & Jukung diperlukan untuk mencari bahan baku purun

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM, maka sejalan dengan itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran keempat adalah Meningkatnya Koperasi Aktif, dan sasaran kelima adalah Pertumbuhan Pelaku UMKM, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang Koperasi dan UMKM.

Kemudian menelaah sasaran strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas, maka sejalan dengan itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran kedua adalah Meningkatnya produksi industri kecil mikro, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang pengolahan non migas.

Menelaah sasaran strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Meningkatnya pasar produk dalam negeri, maka sejalan dengan itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran kedua adalah Meluasnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah di Dalam Negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, disebutkan tujuan yang ingin di capai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Penerapan SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Meningkatkan produksi IKM
3. Meluasnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah di Dalam Negeri
4. Meningkatkan Pembinaan Terhadap Koperasi
5. Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku UMKM

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis yang ingin di capai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
2. Peningkatan nilai produksi
3. Meluasnya pemasaran produk unggulan dalam daerah
4. Meningkatnya Koperasi, KSP/ USP sehat
5. Pertumbuhan Pelaku UMKM

Keterkaitan antara Renstra K/L, RPD dan Renstra Diskuperindag

NO	Renstra K/ L	RPD Daerah	Renstra Diskuperindag
1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa	Meningkatkan produksi IKM
2.	Meningkatnya pasar produk dalam negeri		Meluasnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah di Dalam Negeri
3.	Menigkatkan daya saing Koperasi dan UMKM		Meningkatkan Pembinaan Terhadap Koperasi
			Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku UMKM

Dari tabel diatas sudah selaras antara Sasaran di Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 dan juga dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan peran anggaran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan peningkatankualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Pada penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini mengacu pada rancangan Renstra, RKPD dan RPD. Adapun kedudukan tahun rencana Renja Tahun 2024 ini masuk pada tahapan ke-2 (Kedua) dari dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Tabel T-C-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan-Sub Kegiatan	Capaian Program (outcome)	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Terkait pencapaian sasaran/tujuan SKPD)	Lokasi Output Kegiatan	2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Tolak Ukur	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	11	13
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase pelaksanaan Pembangunan Industri**			**Kab. HSU**		**Rp 1,257,900,500**	**APBD**	**Persentase IKM yang meningkat**	**Rp 1,409,480,600**
Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Kab. HSU		Rp 1,257,900,500	ARBD	Persentase IKM yang meningkat	Rp 1,409,480,600
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Terlaksananya pembangunan sumber daya industri		Kab. HSU	20 Kali	Rp 879,572,500	ARBD	Terlaksananya pembangunan sumber daya industri	Rp 966,247,000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana industri		Kab. HSU	6 Semra	Rp 239,220,000	APBD	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana industri	Rp 287,364,200

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Terlaksananya pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		Kab. HSU	140 Orang IKM	Rp	109,506,000	APBD	Terlaksananya pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Rp	167,169,600
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase IKM yang terdata**			**Kab. HSU**		**Rp**	**69,495,000**	**APBD**	**Persentase IKM yang terdata**	**Rp**	**83,394,000**
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				Kab. HSU		Rp	69,495,000	APBD	Persentase IKM yang terdata	Rp	83,394,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Data IKM Kab. HSU		Kab. HSU	10 Kec	Rp	69,495,000	APBD	Data IKM Kab. HSU	Rp	83,394,000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Fasilitasi Perizinan Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)**				**100%**	**Rp**	**14,418,200**	**APBD**	**Persentase Perizinan Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)**	**Rp**	**17,301,840**
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Jumlah Perizinan (SIUP, TDP, dan TDG) yang diterbitkan	Kab. HSU	600 izin	Rp	14,418,200	APBD	Jumlah Perizinan (SIUP, TDP, dan TDG) yang diterbitkan	Rp	17,301,840
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan			600 Rekomendasi	Rp	14,418,200	APBD	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	Rp	17,301,840
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting**				**100%**	**Rp**	**56,806,566**	**APBD**	**Persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting**	**Rp**	**68,168,359**

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Kestabilan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. HSU	10 Kecamatan	Rp	56,806,566	APBD	Kestabilan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	Rp	68,168,399
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Laporan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting		Kab. HSU	48 Laporan Tahun	Rp	25,291,566	APBD	Laporan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Rp	30,350,399
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berlangsung dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Operasi Pasar Reguler Khusus			10 Kecamata n	Rp	31,515,000	APBD	Operasi Pasar Reguler Khusus	Rp	37,818,000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Pelayanan Unit Metrologi Legal di Seluruh Wilayah Kab. HSU**				**100%**	Rp	233,998,637	**APBD**	**Pelayanan Unit Metrologi Legal di Seluruh Wilayah Kab. HSU**	Rp	280,798,424
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Jumlah Sidang Tera Ulang Pasar	Kab. HSU	10 Sidang Tera Ulang	Rp	233,998,637	APBD	Jumlah Sidang Tera Ulang Pasar	Rp	280,798,424
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang		Kab. HSU	1000 UTTP	Rp	233,998,637	APBD	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	Rp	280,798,424
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Pengenalan dan Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten**				**100%**	Rp	145,962,423	**APBD**	**Pengenalan dan Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten**	Rp	175,154,908
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			Jumlah Pameran Produk Unggulan Daerah yang diikuti	Kab. HSU	3 Pame ran	Rp	145,962,423	APBD	Jumlah Pameran Produk Unggulan Daerah yang diikuti	Rp	175,154,908

Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Pameran Produk Unggulan yang diikuti		Kab. HSU	3 Pame ran	Rp 145,962,423	APBD	Jumlah Pameran Produk Unggulan yang diikuti	Rp 175,154,908
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase pertakaananya pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL**			**Kab.HSU**	**10 kecamatan**	**Rp 1,703,210,739**	**APBD**	**Persentase kenyamanan penjual dan pembeli**	**Rp 2,043,852,887**
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				Kab.HSU			ARBD	**Persentase kenyamanan penjual dan pembeli**	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Meningkatkan pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL		Kab.HSU		Rp 1,088,365,032	APBD	Meningkatkan pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL	Rp 1,306,038,039
Kegiatan pembangunan dan Pengelolaan sarah distribusi perdagangan	Persentase Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar							Persentase Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar		Kab.HSU	24 pasar	Rp 614,845,707	APBD	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar	Rp 737,814,848
BIDANG KOPERASI									

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi**				**100%**	**Rp**	**29,740,000**	**APBD**	**Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi**	**Rp**	**35,686,000**
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wil. anggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota			Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian	Kab. HSU	126 Koperasi	Rp	17,340,000	APBD	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian	Rp	20,806,000
Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kab/ Kota		Jumlah Koperasi KSP/USP yang diberikan Penghargaan			126 Koperasi	Rp	17,340,000	APBD	Jumlah Koperasi KSP/USP yang diberikan Penghargaan	Rp	20,806,000
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wil. anggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota			Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian	Kab. HSU	40 Koperasi	Rp	12,400,000	APBD	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian	Rp	14,880,000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/ Kota		Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian			40 Koperasi	Rp	12,400,000	APBD	Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian	Rp	14,880,000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara**				**100%**	**Rp**	**17,475,000**	**APBD**	**Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara**	**Rp**	**20,970,000**
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wil. Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota			Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	Kab. HSU	20 Koperasi	Rp	17,475,000	APBD	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	Rp	20,970,000

Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota		Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan			20 Koperasi	Rp	17,475,000	APBD	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	Rp	22,975,000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Meningkatnya Kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian**				**100%**	**Rp**	**152,699,500**	**APBD**	**Meningkatnya Kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian**	**Rp**	**186,479,400**
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wil anggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota			Jumlah Pengurus dan Pengawas Koperasi yang mendapat pengetahuan	Kab/ HSU	200 Orang	Rp	182,699,500	APBD	Jumlah Pengurus dan Pengawas Koperasi yang mendapat pengetahuan	Rp	186,479,400
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah Pengurus Koperasi yang diberikan Pemahaman dan Pengetahuan			200 Orang	Rp	182,699,500	APBD	Jumlah Pengurus Koperasi yang diberikan Pemahaman dan Pengetahuan	Rp	186,479,400
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM											
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	**Persentase pertumbuhan tenaga kerja UMKM**			**Kab/ HSU**		**Rp**	**314,061,850**	**APBD**	**Persentase UMKM Yang Dibina**	**Rp**	**261,911,700**

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				Kab. HSU		Rp	314,061,650	APBD	Jumlah UMKM yang Dibina	Rp	261,911,700
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaa, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. HSU	1 Laporan	Rp	63,788,000	APBD	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	21,078,708
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Kab. HSU	2 Mitra	Rp	23,268,000	APBD	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Rp	27,987,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Terfasilitasinya Kemudahaan Perizinan Usaha Mikro		Kab. HSU	50%	Rp	89,050,000	APBD	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Rp	64,820,000
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Kab. HSU	550 UMKM	Rp	167,375,650	APBD	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Rp	146,830,994

SIDANG SEKRETARIAT										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**			**Kab. HSU**	**100%**	**Rp 4,795,467,445**	**APBD**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**Rp 5,001,916,695**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Kab. HSU				Tingkat Kapabilitas APIP	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		gaji dan tunjangan ASN lancar terbayar		Kab. HSU	12 bulan	Rp 4,266,248,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	gaji dan tunjangan ASN lancar terbayar	Rp 4,266,248,150
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Kab. HSU		Rp 40,000,000	APBD	Tingkat Kapabilitas APIP	Rp 40,000,000
Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase pemenuhan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya		Kab. HSU	100 %	Rp 20,000,000	APBD	Persentase pemenuhan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Rp 24,000,000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		Kab. HSU	100 %	Rp 20,000,000	APBD	Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Rp 24,000,000

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Kab. HSU		Rp	287,000,000	APBD	Tingkat Kapabilitas APIP	Rp	334,400,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase kesesuaian spesifikasi barang yang dibutuhkan		Kab. HSU	100%	Rp	37,000,000	APBD	Persentase kesesuaian spesifikasi barang yang dibutuhkan	Rp	44,400,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Kapabilitas APIP	Terlaksananya rapat dan koordinasi selama satu tahun		Kab. HSU	100 %	Rp	250,000,000	APBD	Terlaksananya rapat dan koordinasi selama satu tahun	Rp	350,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kab. HSU		Rp	871,107,295	APBD	Tingkat Kapabilitas APIP	Rp	1,102,861,205
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya		Kab. HSU	100 %	Rp	30,799,875	APBD	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	Rp	52,359,787
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik dan air serta internet		Kab. HSU	100 %	Rp	215,569,295	APBD	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik dan air serta internet	Rp	291,018,548
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)		Kab. HSU	100 %	Rp	301,738,125	APBD	Persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	Rp	336,482,668

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi		Kab. HSU	100 %	Rp	423,000,000	APBD	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi	Rp	423,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kab. HSU		Rp	234,545,475	APBD	Tingkat Kapabilitas APIP	Rp	234,545,475
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Tingkat Kapabilitas APIP	Jumlah mobil kendaraan dinas dalam keadaan baik		Kab. HSU	35 buah	Rp	61,695,475	APBD	Jumlah mobil kendaraan dinas dalam keadaan baik	Rp	61,695,475
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Tingkat Kapabilitas APIP	Jumlah peralatan dan mesin dalam keadaan baik		Kab. HSU	75 buah	Rp	27,650,000	APBD	Jumlah peralatan dan mesin dalam keadaan baik	Rp	47,650,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase sarana dana prasarana dalam kondisi baik		Kab. HSU	100 %	Rp	95,000,000	APBD	Persentase sarana dana prasarana dalam kondisi baik	Rp	105,000,000
JUMLAH						**Rp**	**3,995,968,865**			**Rp**	**4,583,200,118**
									GAJI	Rp	4,265,248,150

BAB V
P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, maka setiap bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program kegiatan, baik kerangka regulasi dan pelayanan publik mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 diharapkan dapat mengakomodir program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu Renja Perubahan ini juga dapat memberikan umpat balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Renja di masa yang akan datang oleh para pimpinan manajemen dan seluruf staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. KAMARUDIN, S. STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830303 200212 1 00

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
(PERUBAHAN RENJA)
TAHUN 2024

Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai

Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/345/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan ketentuan Pasal 368 bahwa Perubahan Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai Pedoman Perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

KEEMPAT : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah wajib
a. melaksanakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
3. Perangkat Daerah lainnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya jua sehingga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini telah disusun.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini diharapkan menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahap selanjutnya, demi mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Dinas,

H. M. Haridi, SP, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680915 199703 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 8

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah 31

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD 33

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

BAB IV. PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1	Realisasi Keuangan Per Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	13
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara	32
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2024	41
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara	44
Tabel 3.1	Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara	48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan untuk menyesuaikan perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanian tahun 2023–2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang terkait dengan urusan masing-masing perangkat daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan serta mengukur pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

13. Perauran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil /aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan pertanian di Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanain, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bidang Penyuluhan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai;
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, *monitoring* dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (s*takeholders*) tentang rencana pembangunan di sektor Pertanian;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya dalam

upaya meningkatkan kualitas pembangunan di sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan;

5. Sebagai acuan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Sebagai acuan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
      - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

   a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
      - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

   b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

   c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
      - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
      - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
   - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
   - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
   - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Pengembangan Prasarana Pertanian
      - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
      - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B
   b. Pembangunan Prasarana Pertanian
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
      - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
   c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota
   b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya
   c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
      - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
   d. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
      - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
      - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
      - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
      - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
      - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
      - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6) Program Perizinan Usaha Pertanian

a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota
   - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
   - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

7) Program Penyuluhan Pertanian
   a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
      - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
      - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan TW II Tahun 2024 menghasilkan capaian indikator kinerja output sebesar 29,38 %. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 9.039.598.045,- atau 29,38% dari total target anggaran dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebesar Rp. 30.771.190.182,-.

Besarnya alokasi anggaran per program dan kegiatan serta realisasinya untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Realisasi Keuangan Per Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.532.586.582**	**8.675.130.745**	**40,29**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**254.143.500**	**74.802.000**	**29,43**
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.150.000	3.045.000	96,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.575.000	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.575.000	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.954.500	375.000	19,19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.954.500	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205.384.500	58.965.000	28,71
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.550.000	12.417.000	32,21
No.	**PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**ANGGARAN (Rp.)**	**REALISASI (Rp.)**	**%**
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.062.485.990**	**8.257.553.545**	**41,16**

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.062.485.990	8.257.553.545	41,16
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.206.050**	**1.839,100**	**12,95**
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.206.050	1.839,100	12,95
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**156.543.850**	**8.605.900**	**5,50**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserat atribut kelengkapannya	67.500.000	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.451.850	8.605,900	**44,24**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	19.592.000	-	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	-	-
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**547.965.292**	**211.866.624**	**38,66**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.046.800	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.174.370	76.319.900	31,51
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.854.872	19.865.300	25,19

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.956.000	108.181.424	54,10
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.933.250	7.500.000	34,19
6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**271.371.900**	**102.122.076**	**37,63**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.493.500	51.544.576	42,78
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.878.400	50.577.500	33,52
7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**225.870.000**	**18.341.500**	**8,12**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.370.000	13.441.500	16,32
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.200.000	4.900.000	43,75
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.300.000	-	-
II.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.014.956.970**	**129.233.100**	**6,41**
1	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**1.488.880.070**	**49.666.000**	**3,34**

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuaidengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	309.310.750	176.000	**0,06**
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.179.569.320	49.490.000	4,20
2	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**139.516.400**	**37.496.100**	**26,88**
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	29.350.000	-	-
	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	110.166.400	37.496.100	34,04
3	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**135.246.100**	**23.115.000**	**17,09**
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	93.086.100	18.331.000	19,69
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	42.160.000	4.784.000	11,35
4	**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**251.314.400**	**18.956.000**	**7,54**

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	226.158.200	16.282.000	7,20
	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	25.156.200	2.674.000	10,63
III.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.785.645.710**	**48.560.500**	**0,84**
1	**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**1.093.751.600**	**5.798.000**	**0,53**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	793.898.100	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	139.368.000	5.798.000	4,16
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	160.485.500	-	-
2	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**4.464.815.310**	**38.712.500**	**0,87**
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.365.863.410	31.302.000	0,93
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	404.900.000	-	-

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	428.860.000	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	242.850.000	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	22.341.900	7.410.500	33,17
3	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**227.078.800**	**4.050.000**	**1,78**
	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	227.078.800	4.050.000	**1,78**
IV.	**PROGRAN PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**267.956.934**	**38.034.400**	14,19
1	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**76.661.049**	-	-
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.661.049	-	-
2	**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**11.350.000**	**228.000**	**2,01**

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	11.350.000	228.000	2,01
3	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**91.623.425**	**24.282.400**	**6,50**
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	15.330.000	1.038.000	6,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	76.293.425	23.244.400	30,47
4	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**88.322.460**	**13.524.000**	**5,31**
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	64.958.500	9.588.000	4,76
	Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	10.470.000	928.000	8,86
	Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	12.893.960	3.008.000	23,33
V.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**611.033.500**	**81.073.000**	13,27
1	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**611.033.500**	**81.073.000**	**13,27**
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	405.233.500	78.097.000	19,27

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	198.000.000	2.986.000	1,51
	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	7.800.000	-	-
VI.	**PROGRAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**42.100.000**	**2.208.000**	**5,24**
1	**Penerbitan izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20.900.000**	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	20.900.000	-	-
2	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**21.200.000**	**2.208.000**	**10,42**
	Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	21.200.000	2.208.000	10,42
VII.	**PROGRAN PENYULUHAN PERTANIAN**	**516.910.486**	**65.358.300**	**12,64**
1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**516.910.486**	**65.358.300**	**12,64**

No.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	183.375.000	21.937.000	11,96
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	305.332.500	35.555.000	11,64
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	28.202.986	7.866.300	27,89
JUMLAH		**30.771.190.182**	**9.039.598.045**	**29,38**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, beberapa hal yang akan di evaluasi adalah :

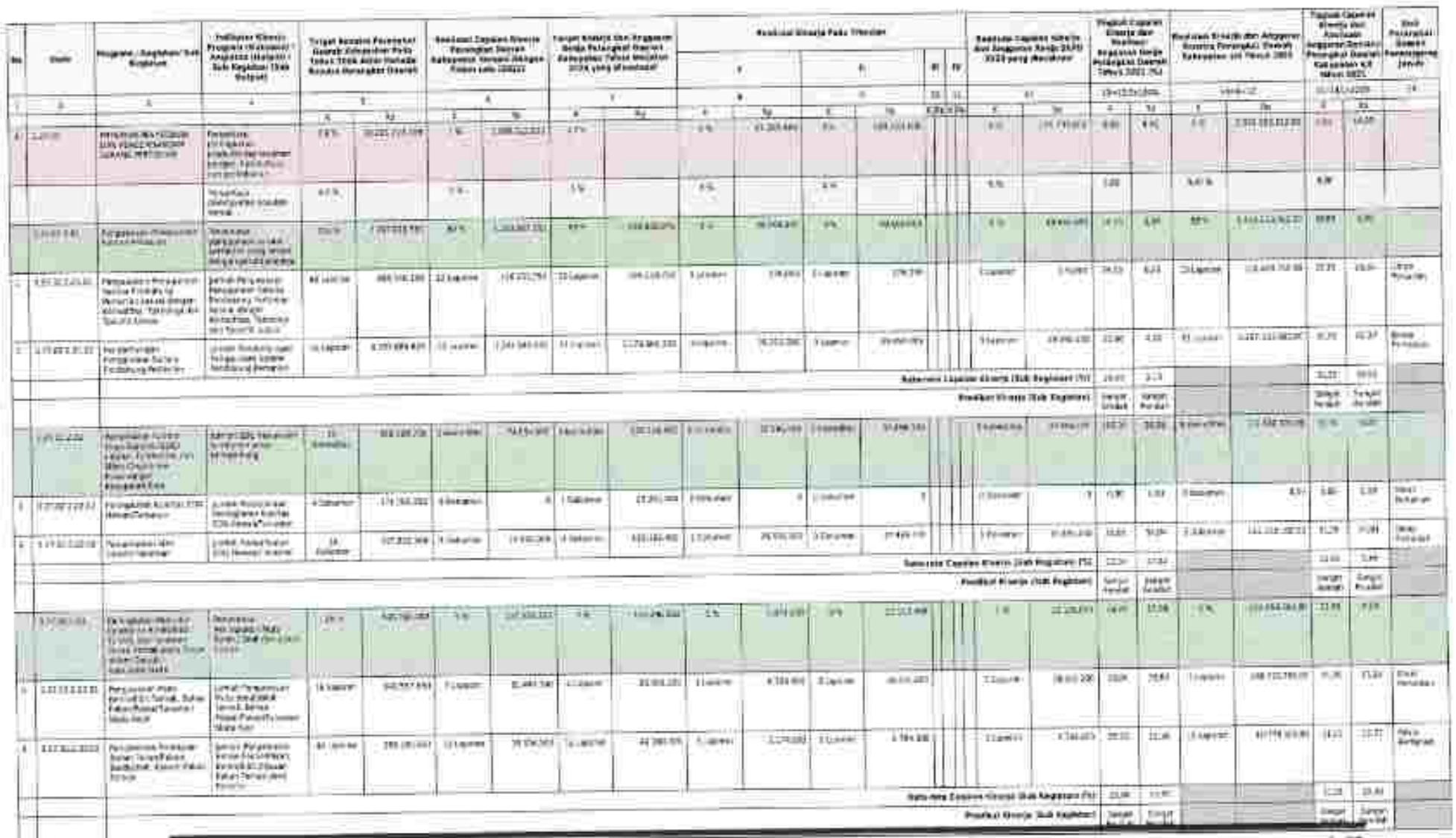
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu dari beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target masih dalam proses pembuatan SPJ dan masih dalam pemesanan barang.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ada beberapa hampir keseluruhan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2024 pada TW II yang belum tercapai sesuai target.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan adalah untuk di TW selanjutnya di tahun 2024 dalam proses pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan.

Dengan belum terlaksananya seluruh target kinerja hasil/keluaran dari program/kegiatan memberikan implikasi yang negatif terhadap pencapaian target program Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dimana belum dapat

mempercepat pencapaian target sehingga menjadi beban pada tahun selanjutnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab tercapainya sebagian target kinerja program/kegiatan adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 terkait pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut :

2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



No	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Untuk Kontribusi Pada Tahun 2024 dalam Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampel Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Paket Kebijakan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten HSU Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2023		Unit Pengukur Kinerja Perangkat Daerah
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16		17
				C	Sat	F	Rp	C	Rp	C	Rp	C	Rp					C	Rp	C	Rp	C	Rp	C	Rp	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										

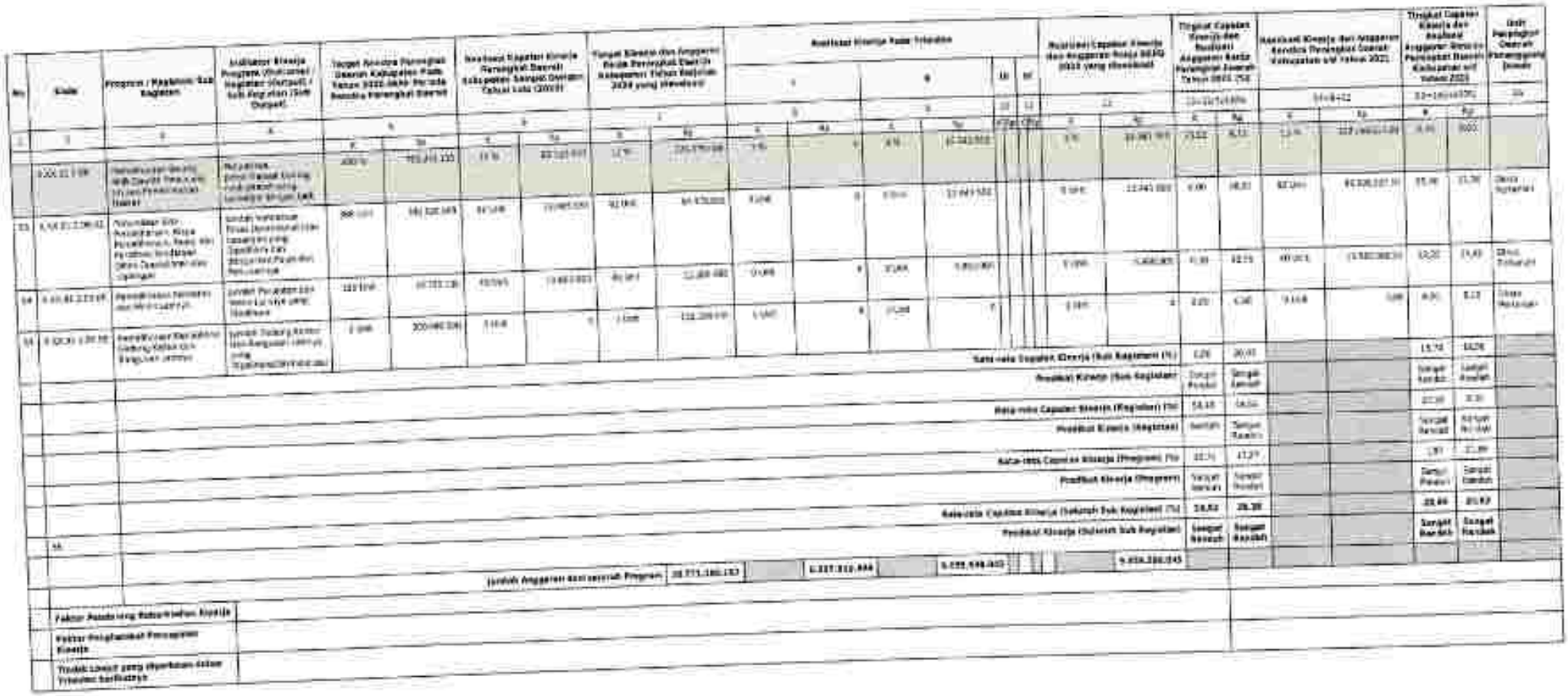
No	Kode	Program / Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output) (Jika Ada)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2026 Pada Saat Perubahan Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Kerangka Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Diperubah		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Anggaran yang Tersedia untuk Kegiatan Tahun 2024 (Rp)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Terkait Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (%)		Kondisi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Target Capaian Kinerja dan Kerangka Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 (%)		Unit Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Kode	Uraian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Out Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun (n-1) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 yang dimasukkan		Rencana Kinerja Pada Triwulan				Rasio dari Capaian Kinerja dan Anggaran Pada RKPD 2024 yang dimasukkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=(7/5)*100%		14=(6+12)		15=(6+8+10)		16
				Tk	Rp	%	Rp	Tk	Rp	%	Rp	%	Rp			%	Rp	%	%	Tk	Rp	%	Rp	%	
23																								
24																								
32																								
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								

Kode	Uraian	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Akuntansi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja SKPD (2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Akhir 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12:5x100%		14=15:12		15=14:6x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

No	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2023 akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPD) 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Efektivitas dan Realisasi Anggaran Pada Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7*100%		14=8+12		15=14/7*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Predikat kinerja (Nagetaif)															Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat kurang	Sangat Kurang	
1		PROGRAM PENGADAAN, PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja/organisasi yang sudah Terevaluasi Kinerja	100 %	100,00	-18 %	-18,00	-18 %	82,00	25 %	6,175,111,649	50 %	3,087,555,825				80 %	83,75,280,791	83,75	80,00	80,00	80 %	74,704,880,591.00	13,50	79,50	
		Pembinaan, Pengembangan, dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan standar/acuan pengembangan dan evaluasi sistem pengelolaan SDM aparatur yang diselenggarakan sesuai standar	100 %	95,00	-18 %	-18,00	-18 %	82,00	25 %	12,350,000	0 %	19,850,000				25 %	19,850,000	19,85	25,00	25,00	100 %	723,350,000.00	95,00	9,00	
2		Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	34,872,720,000	3 Dokumen	8,718,180	3 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	0	0 Dokumen	2,940,000				2 Dokumen	2,940,000	98,00	66,67	1 Dokumen	7,812,500.00	95,00	9,00	Bidang Perencanaan
3		Monitoring dan Penyusunan Dokumen SAKIP/EKPD	Jumlah Dokumen Nota SKPD dan Laporan hasil Monitoring Pelaporan SAKIP	4 Dokumen	17,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	1,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	3,500,000.00	12,00	12,00	Bidang Perencanaan
4		Monitoring dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koreksi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	3,125,000	1 Dokumen	1,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	3,125,000.00	20,00	16,00	Bidang Perencanaan
5		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	3,125,000	1 Dokumen	1,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	3,125,000.00	20,00	16,00	Bidang Perencanaan
6		Monitoring dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	3,125,000	1 Dokumen	1,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	3,125,000.00	20,00	16,00	Bidang Perencanaan
7		Monitoring dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	3,125,000	1 Dokumen	1,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0,00	0,00	0 Dokumen	3,125,000.00	20,00	16,00	Bidang Perencanaan
8		Monitoring dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Monitoring Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	602,343,123	12 Laporan	150,585,780	12 Laporan	200,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000				3 Laporan	50,000,000	25,00	25,00	12 Laporan	150,000,000.00	25,00	25,00	Bidang Perencanaan
9		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan	600,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	50,000,000	3 Laporan	0	0 Laporan	0				0 Laporan	0	0,00	0,00	12 Laporan	150,000,000.00	25,00	25,00	Bidang Perencanaan
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															0,00	0,00			0,00	0,00	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan Sesuai SOP	100 %	12,000,000	100 %	12,000,000	100 %	30,000,000	25 %	6,000,000	0 %	6,000,000				20 %	6,000,000	20,00	20,00	100 %	60,000,000.00	20,00	20,00	
10		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/Bulan	10,000,000,000	151 Orang/Bulan	12,000,000,000	151 Orang/Bulan	36,000,000,000	151 Orang/Bulan	9,000,000,000	Orang/Bulan	9,000,000,000				151 Orang/Bulan	9,000,000,000	100,00	25,00	300 Orang/Bulan	36,000,000,000.00	200,00	50,00	Bidang Perencanaan
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															100,00	25,00			200,00	50,00	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengelola Daerah	Persentase pemenuhan/pengadaan barang milik daerah yang memenuhi standar/acuan	100 %	120,000,000	100 %	30,000,000	100 %	40,000,000	25 %	10,000,000	0 %	10,000,000				25 %	10,000,000	25,00	25,00	100 %	90,000,000.00	25,00	25,00	
11		Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan	120,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	40,000,000	1 Laporan	10,000,000	0 Laporan	10,000,000				1 Laporan	10,000,000	25,00	25,00	4 Laporan	90,000,000.00	25,00	25,00	Bidang Perencanaan
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															25,00	25,00			25,00	25,00	

No	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ASN Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Sampai dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sd Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sd tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14=8-12		15=12/8x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat tercapai	Sangat Aspesif			Sangat tercapai	Sangat Aspesif	
	X.XX.01.2.XX	Jalan Lainnya Anggaran Kerangka Daerah	Persentase pengaduan pembangunan kewenangan dengan SAS	100 %	809.254.382	100 %	16.910.000	100 %	246.241.000	28 %	1.120.000	42 %	9.800.000			80 %	8.690.000	70.00	1.40	4.99 %	32.570.000.00	57.34	4.90	
43	X.XX.01.2.XX.03	Pengadaan Rakit di Dinas Bencana dan Kebakaran	Jumlah Rakit Pelatihan Dinas Kesehatan Kondisi Kebakaran	2 Rakit	202.000.000	0 Rakit	0	1 Rakit	87.500.000	0 Rakit	0	0 Rakit	0			0 Rakit	0	0.00	0.00	0 Rakit	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebakaran
44	X.XX.01.2.XX.04	Pengadaan dan Pengadaan Alkom dan Sistemnya	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen	14.400.000	11 Dokumen	(4,57) (0,00)	12 Dokumen	18.400.000	3 Dokumen	7.150.000	0 Dokumen	8.400.000			3 Dokumen	8.600.000	25.00	16.24	15 Dokumen	25.600.000.00	31.25	34.13	Dinas Perkebunan
45	X.XX.01.2.XX.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Pendidikan dan Tugas dan Fungsi yang Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan	5 Orang	80.200.000	0 Orang	0	2 Orang	35.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0.00	0.00	0 Orang	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebakaran
46	X.XX.01.2.XX.06	Pembinaan Pasca Kebakaran Pemadam Penyuluhan Penyuluhan	Jumlah Orang yang Mendapat Pembinaan Tata Laksana Pemadam Pelayanan Lapangan	10 Orang	175.500.000	5 Orang	0	10 Orang	30.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0.00	0.00	0 Orang	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebakaran
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0.00	0.00			0.00	0.00	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat tercapai	Sangat tercapai			Sangat tercapai	Sangat tercapai	
	X.XX.01.2.XX	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pembinaan umum perangkat daerah	100 %	1.241.210.842	100 %	151.200.000	100 %	147.661.292	28 %	1.170.000	0 %	151.844.624			25 %	71.000.000	71.00	58.00	232 %	160.200.000.00	107.71	5.97	
48	X.XX.01.2.XX.01	Pengadaan Kompensasi Dinas Listrik Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Listrik Kompensasi Kegiatan Kantor yang Dilaksanakan	10 Paket	15.200.000	5 Paket	1.000.000	10 Paket	5.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0.00	0.00	0 Paket	1.000.000.00	10.00	6.58	Dinas Perhubungan
47	X.XX.01.2.XX.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.146.200	0 Paket	80.000.000	10 Paket	142.174.200	0 Paket	78.200.000	0 Paket	20.000.000			0 Paket	58.200.000	0.00	72.00	0 Paket	175.200.000.00	00.00	90.71	Dinas Perhubungan
48	X.XX.01.2.XX.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	60.170.000	3 Paket	20.000.000	13 Paket	70.000.000	4 Paket	0	0 Paket	10.000.000			0 Paket	10.000.000	0.00	00.00	7 Paket	10.000.000.00	00.00	00.00	Dinas Perhubungan
49	X.XX.01.2.XX.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	48 Laporan	840.000.000	12 Laporan	210.000.000	12 Laporan	150.000.000	3 Laporan	60.000.000	0 Laporan	100.000.000			3 Laporan	100.000.000	25.00	66.66	111 Laporan	310.000.000.00	31.25	31.00	Dinas Perhubungan
50	X.XX.01.2.XX.07	Pemeliharaan Jalan Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Jalan Dinas pada SKPD	48 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	11.000.000	3 Dokumen	3.000.000	0 Dokumen	7.000.000			0 Dokumen	7.000.000	00.00	63.63	11 Dokumen	32.000.000.00	00.00	00.00	Dinas Perhubungan
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0.00	00.00			34.23	40.67	
																Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat tercapai	Sangat tercapai			Sangat tercapai	Sangat tercapai	
	X.XX.01.2.XX	Pelayanan dan Pengadaan Jalan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan jalan pemerintahan daerah	100 %	630.000.000	100 %	120.000.000	100 %	570.000.000	20 %	50.000.000	0 %	110.000.000			25 %	100.000.000	25.00	57.61	129 %	360.200.000.00	32.02	8.09	
51	X.XX.01.2.XX.08	Pengadaan Jasa Konsultasi - Bantuan Jasa Air dan Listrik	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Konsultasi, Bantuan Jasa Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	120.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	3 Laporan	40.000.000	0 Laporan	80.000.000			0 Laporan	82.500.000	00.00	42.75	111 Laporan	90.000.000.00	31.25	31.00	Dinas Perhubungan
52	X.XX.01.2.XX.09	Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	90.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	100.000.000	3 Laporan	40.000.000	0 Laporan	80.000.000			3 Laporan	80.000.000	25.00	80.00	111 Laporan	70.000.000.00	31.25	31.00	Dinas Perhubungan
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		25.00	80.00			31.25	34.00	
																Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat tercapai	Sangat tercapai			Sangat tercapai	Sangat tercapai	



2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

a. Pelayanan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
b. Pelayanan penyediaan sarana produksi tanaman pangan
c. Pelayanan penyediaan sarana produksi peternakan
d. Pelayanan penyediaan sarana produksi tanaman perkebunan
e. Pelayanan penyediaan sarana produksi tanaman hortikultura
f. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
g. Pelayanan penyuluhan pertanian
h. Pelayanan data dan informasi pertanian.

Sedangkan kelompok sasaran dari pelayanan tersebut adalah petani, kelompok tani dan peternak, gabungan kelompok tani, penangkar benih, kelompok usaha bidang pertanian dan stakeholder bidang pertanian.

Pada dasarnya kinerja pelayanan perangkat daerah dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, maka target kinerja pelayanan yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.

Secara umum indikator kinerja Dinas Pertanian telah tercapai dengan hasil-hasil yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
1.	Produksi padi	Ton	110.076	110.496	111.034	113.602	86.020	37.128	80.843	111.034	
2.	Produksi jagung	Ton	515	526	559	576	451	163	526	559	
3.	Produksi kacang tanah	Ton	482	494	508	520	354	21	494	508	
4.	Produksi cabe besar	Ton	182	198	214	230	134	170	198	214	
5.	Produksi cabe rawit	Ton	118	124	136	143	111	136	177	136	
6.	Produksi karet	kg	406.000	409.000	412.000	415.000	402.000	403.486	409.000	412.000	
7.	Produksi daging ternak besar	Kg	363.250	371.758	386.644	401.751	346.021	380.445	381.070	386.644	
8.	Produksi daging ternak kecil	Kg	8375	8.762	9.035	9.307	8.262	8.458	8.532	9.035	
9.	Produksi daging ternak unggas	Kg	2.262.955	2.558.380	2.791.681	3.024.982	2.183.928	2.348.871	2.556.380	2.791.681	
10	Produksi telur unggas	Kg	6.9160.56	7.032.737	7.149.794	7.267.227	6.830.606	7.090.123	7.093.780	7.149.794	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu antara lain:

a. Pengembangan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura yaitu:

1) Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) masih terbatas dan belum optimal.
2) Penggunaan varietas unggul benih bermutu masih rendah.
3) Penggunaan pupuk berimbang masih terbatas.
4) Dukungan penyediaan alat mesin pertanian bagi petani /kelompok tani masih terbatas.
5) Perubahan iklim yang sulit diprediksi, sehingga kerusakan tanaman akibat bencana alam masih cukup besar, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) masih perlu diwaspadai.
6) Lemahnya daya beli petani terhadap sarana produksi.
7) Belum berkembangnya sistem pemasaran yang dapat memberikan margin keuntungan bagi petani.
8) Belum berkembangnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha dalam bidang pertanian.

b. Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produksi peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

1) Kurangnya jumlah bibit ternak yang berkualitas
2) Rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam budidaya peternakan serta pola pikir/perilaku peternak masih tradisional.
3) Usaha pengolahan hasil peternakan yang belum optimal.
4) Masih adanya kejadian kasus penyakit pada hewan dan ternak.
5) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyedia bahan pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

6) Pengembangan wilayah sumber bibit ternak itik.

c. Prasarana dan Sarana Pertanian

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana pertanian yaitu:

1) Pemanfaatan jaringan irigasi belum optimal dalam peningkatan Indeks Pertanaman (IP).
2) Kurang terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat desa dan jaringan irigasi tingkat usahatani.
3) Rendahnya daya beli petani untuk pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan) dan kurangnya tenaga terampil dalam mengoperasikan dan memperbaiki/pemeliharaan alsintan.
4) Pemanfaatan pupuk bersubsidi masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
5) Terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan pertanian.

d. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan penyuluhan pertanian yaitu:

2) Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
3) Kinerja kelembagaan tani yang belum optimal.
4) Belum meratanya kompetensi penyuluh pertanian.
5) Terbatasnya akses petani terhadap informasi pertanian.

e. Kondisi Data, Koordinasi, Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam lemahnya koordinasi, tidak sinkronnya sistem perencanaan dan lemahnya ketersediaan data yang tepat dan akurat yaitu:

1) Belum berkembangnya sistem perencanaan yang terpadu yang terintegrasi dari semua aspek pendukungnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Masih lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian.
3) Masih lemahnya kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4) Masih lemahnya ketersediaan data secara cepat, tepat dan akurat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum strategi pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 tetap diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan yang dimaksudkan untuk terciptanya rasa keadilan di masyarakat, fungsi pembangunan yang terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan guna terciptanya kemandirian di masyarakat. Dengan berlandaskan keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka rumusan strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sampai tahun 2026 ini adalah :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan
5. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
6. Peningkatan kualitas dan pelayanan data dan informasi kependudukan
7. Optimalisasi jangkauan jaringan internet
8. Optimalisasi jaringan intranet
9. Peningkatan Kualitas Pendapatan Daerah
10. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan
11. Peningkatan budaya baca dan literasi
12. Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya

13. Peningkatan promosi kesehatan
14. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
15. Peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting
16. Peningkatan keberdayaan masyarakat
17. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
18. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
19. Peningkatan pemahaman terhadap resiko perkawinan anak
20. Peningkatan penyelenggaraan keluarga berencana
21. Peningkatan prestasi olahraga
22. Pengembangan organisasi kepemudaan
23. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
24. Peningkatan ketahanan sosial
25. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan
26. Peningkatan keamanan ketertiban umum
27. Revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan
28. Efektivitas manajemen pengelolaan pasar
29. Pemberdayaan IKM, UMKM dan koperasi
30. Peningkatan pelayanan sektor jasa
31. Pengembangan pariwisata local
32. Penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja
33. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
34. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
35. Meningkatkan cakupan layanan air bersih, layak dan aman
36. Meningkatkan cakupan sanitasi layak dan aman
37. Meningkatkan layanan persampahan
38. Meningkatkan jalan dalam kondisi baik
39. Meningkatkan akses pelayanan transportasi darat dan sungai
40. Pencegahan dan penurunan tingkat kekumuhan di permukiman
41. Pengurangan rumah tidak layak huni
42. Peningkatan kualitas air
43. Peningkatan kualitas udara

44. Peningkatan kesesuaian tata ruang
45. Mengoptimalkan kajian resiko bencana daerah
46. Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebagaimana penjabaran di atas, maka rumusan arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah;
2. Pengembangan instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan;
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan daerah;
4. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
5. Peningkatan efektivitas penatausahaan keuangan dan aset daerah;
6. Penguatan kualitas sistem pengawasan daerah;
7. Pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip;
8. Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan daerah;
9. Peningkatan kompetensi aparatur;
10. Peningkatan pencapaian SPM dan SOP;
11. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Penyediaan internet Broadband cepat dan terjangkau;
13. Integrasi jaringan antar instansi;
14. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan PAD;
15. Meningkatkan aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
16. Pengembangan manajemen sekolah;
17. Peningkatan kompetensi guru;
18. Pemenuhan standar minimum pendidikan (SPM);
19. Peningkatan koleksi buku dan fasilitas perpustakaan;
20. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan karakter;
21. Pelestarian cagar budaya dan nilai warisan tradisi;
22. Pengembangan kreativitas kesenian;

23. Pemberdayaan masyarakat dalam mendorong pembudayaan pola hidup bersih dan sehat;
24. Peningkatan persediaan obat dan perbekalan kesehatan;
25. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
26. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
27. Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak dan remaja;
28. Peningkatan kualitas kesehatan lansia;
29. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil;
30. Peningkatan gizi bayi dan balita;
31. Optimalisasi tekhnologi tepat guna (TTG);
32. Optimalisasi potensi dan aset desa;
33. Optimalisasi kawasan perdesaan;
34. Pengembangan kebijakan gender;
35. Pemenuhan hak-hak anak;
36. Peningkatan akses perempuan dalam pemerintahan, ekonomi dan politik;
37. Pengembangan strategi komunikasi resiko perkawinan anak;
38. Pendampingan terhadap keluarga yang potensial melakukan perkawinan anak;
39. Peningkatan partisipasi KB aktif;
40. Pendataan dan fasilitasi pasangan usia subur yang ingin be KB;
41. Peningkatan ketahanan keluarga;
42. Pemerataan fasilitas dan kualitas olahraga;
43. Pembinaan klub olahraga;
44. Perbaikan manajemen pembibitan atlet;
45. Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan;
46. Peningkatan kualitas dan kreativitas pemuda;
47. Peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat;
48. Peningkatan kerukunan ummat beragama;
49. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum dan pencegahan perkembangan kriminalitas;

50. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum;
51. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
52. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
53. Penguatan ketahanan pangan daerah;
54. Penataan pasar;
55. Peningkatan kapasitas SDM dan nilai tambah produk;
56. Peningkatan manajemen sektor jasa;
57. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
58. Peningkatan investasi daerah;
59. Peningkatan kemandirian berusaha/enterpreneurship;
60. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
61. Meningkatkan Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
62. Peningkatan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat;
63. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
64. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu;
65. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
66. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
67. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih layak dan aman;
68. Perluasan dan pemeliharaan jaringan perpipaan kabupaten;
69. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
70. Mengoptimalkan pengelolaan persampahan dengan prinsip keberlanjutan;
71. Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
72. Pemasangan dan pemeliharaan marka jalan;
73. Pemeliharaan alur sungai dan rambu sungai;

74. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;
75. Meningkatkan kualitas rumah layak huni;
76. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi pencemaran sungai, air tanah dan rawa;
77. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi pencemaran udara;
78. Pengendalian pemanfaatan peruntukkan lahan yang sesuai RTRW;
79. Meningkatkan kualitas dengan review dokumen rencana penanggulangan bencana;
80. Pembentukkan desa tangguh bencana.

Secara sistematis penjabaran isu strategis, tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	Revitalisasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Peningkatan produksi dan produktifitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Semua Kecamatan	0,7%	1.576.089.549	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Semua Kecamatan	0,7%	2.156.203.929	Bantuan sarana berupa benih padi unggul tidak mencukupi untuk semua kecamtan perlu tambahan dana untuk mencukupi kebutuhan petani
		Persentase peningkatan populasi ternak	Semua Kecamatan	1,2%			Persentase peningkatan populasi ternak	Semua Kecamatan	1,2%		
2.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Semua Kecamatan	4%	2.119.939.233	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Semua Kecamatan	4%	4.863.210.000	Usulan pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani , JUT dan prasarana lainnya tahun 2024 yang masuk ke dinas pertanian tidak bisa dianggarkan semua karena kurangnya dana yang dianggarkan
3.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Semua Kecamatan	8%	272.051.926	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Semua Kecamatan	8%	272.051.926	
		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Semua Kecamatan	86%			Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Semua Kecamatan	86%		
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT	Semua Kecamatan	95%	217.731.785	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT	Semua Kecamatan	95%	217.731.785	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			-	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Semua Kecamatan	250 ha	229.000.000	Selama ini tidak adanya bantuan benih ke petani untuk menggantikan kerugian yang dirasakan petani akibat dampak dari perubahan iklim terkena banjir setiap tahun sehingga pada tahun 2024 perlu adanya tambahan dana untuk kegiatan tersebut
5.	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Semua Kecamatan	100%	35.484.000	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Semua Kecamatan	100%	35.484.000	
6.	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%	561.513.424	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%	561.513.424	
		Persentase SDM penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%			Persentase SDM penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%		
		Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	25%			Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	25%		
7.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pertanian	Semua Kecamatan	100	1.249.779.263	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pertanian	Semua Kecamatan	100	1.339.779.263	Semakin banyaknya aplikasi keuangan dan aset ,aplikasi pelaporan program dan data yang memerlukan processor minimal core i5 perlu adanya pembelian laptop karena terakhir pembelian tahun 2019 pemakaian sudah tidak maksimal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		151	14.986.350.723	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		151	15.633.677.503	Tahun 2023 tidak tersedia anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas dan kelangkaan profesi dan masih kurangnya anggaran berdasarkan kondisi kerja, untuk kebutuhan PPPK masih terpenuhi karena untuk tahun 2023 ini PNS yang pensiun ada 7 orang.
Jumlah					**20.633.616.405**	**Jumlah**				**25.228.651.840**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat, dengan program dan kegiatan pada masing masing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.

Berdasarkan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut, usulan program, kegiatan dari masyarakat dan usulan pokok – pokok pikiran DPRD yang diampu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2024 tertuang dalam tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				
1.1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				
1.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				
	Bantuan Benih Padi	Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	2.000 kg	
	Bantuan Benih Padi	Desa Datu Kuning kecamatan Amuntai Tengah	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	1.500 kg	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1. 2	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**				
1.2.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				
	Bantuan Ternak Itik dan Ayam	Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya		
2.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				
2.1	**Pembangunan Prasarana Pertanian**				
2.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
		Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Simpang Empat kecamatan Amuntai Selatan	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Baruh Tabing kecamatan Banjang	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Hambuku Lima Kecamatan Babirik	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa Hambuku Raya Kecamatan Sungai Pandan	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Waringin Kecamatan Haur Gading	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Datu Kuning kecamatan Amuntai Tengah	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Rantau Karau Hilir Kecamatan Sungai Pandan	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Kandang Halang kecamatan Amuntai tengah	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
		Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1unit	
		Desa Kalintamui Kecamatan Beriang	Jumlah Prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik	1 unit	
3.	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**				
3.1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**				
3.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
	Bantuan Alat Semprot dan Obat Herbisidas	Kecamatan Sungai Tabukan dan Kecamatan Sungai Pandan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		

BAB. III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja tahun 2024 yang akan dilaksanakan mengakomodasi program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Proses Perubahan Renja Tahun 2024 mengakomodir beberapa kali pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain :

a. Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2024

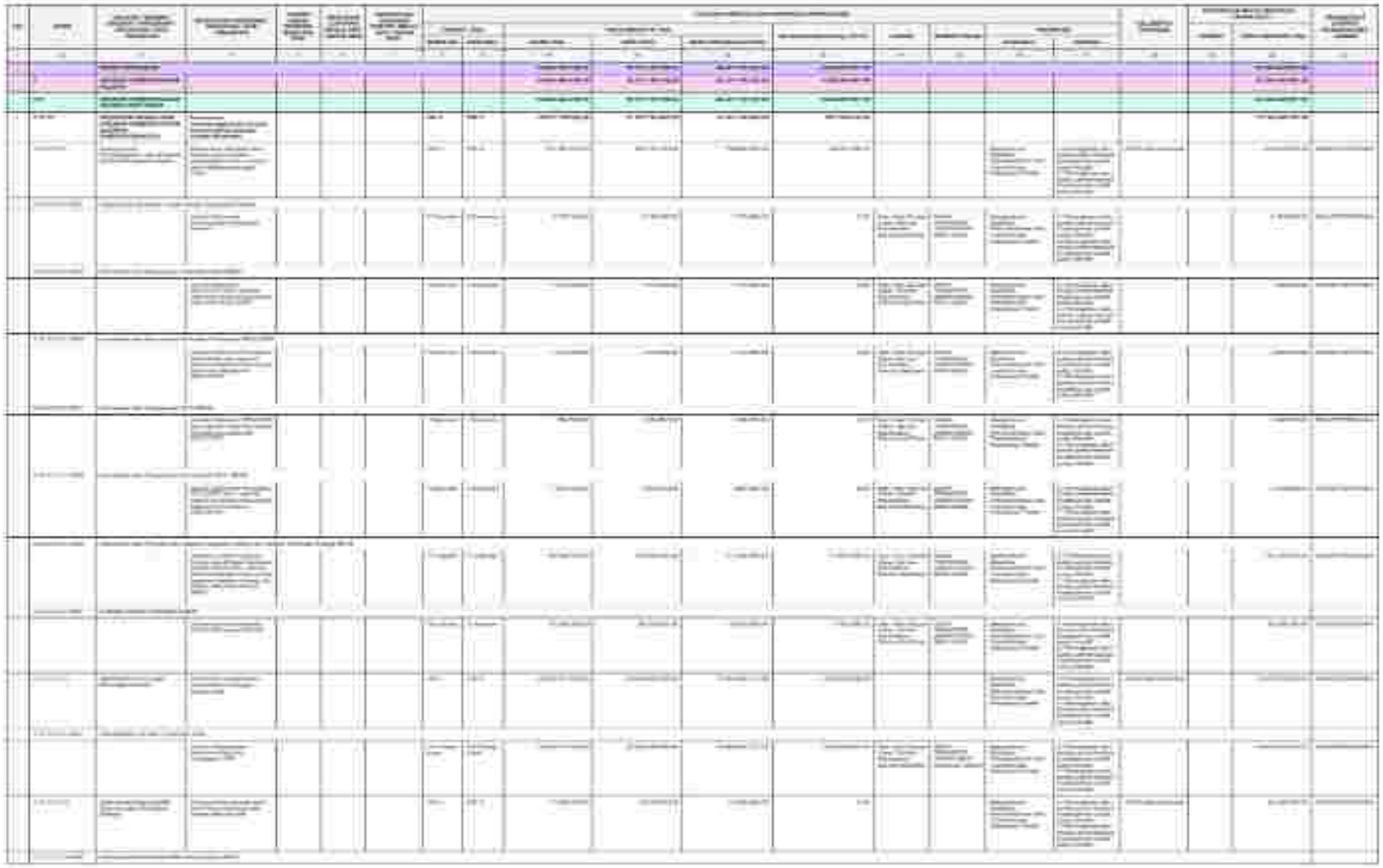
   Penyesuaian rincian belanja berdasarkan berita acara pembahasan pemetaan DAK Non fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari.

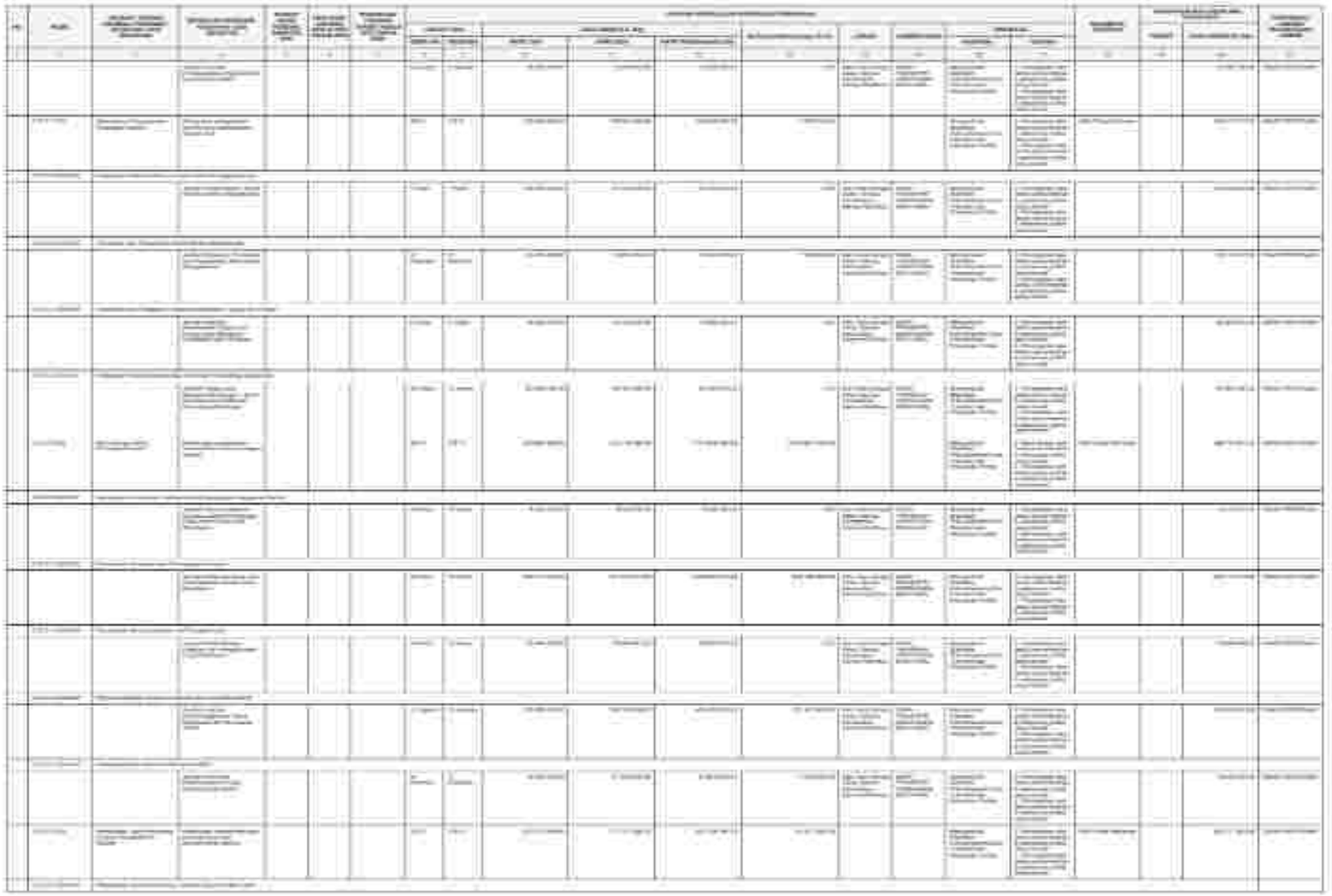
b. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2024

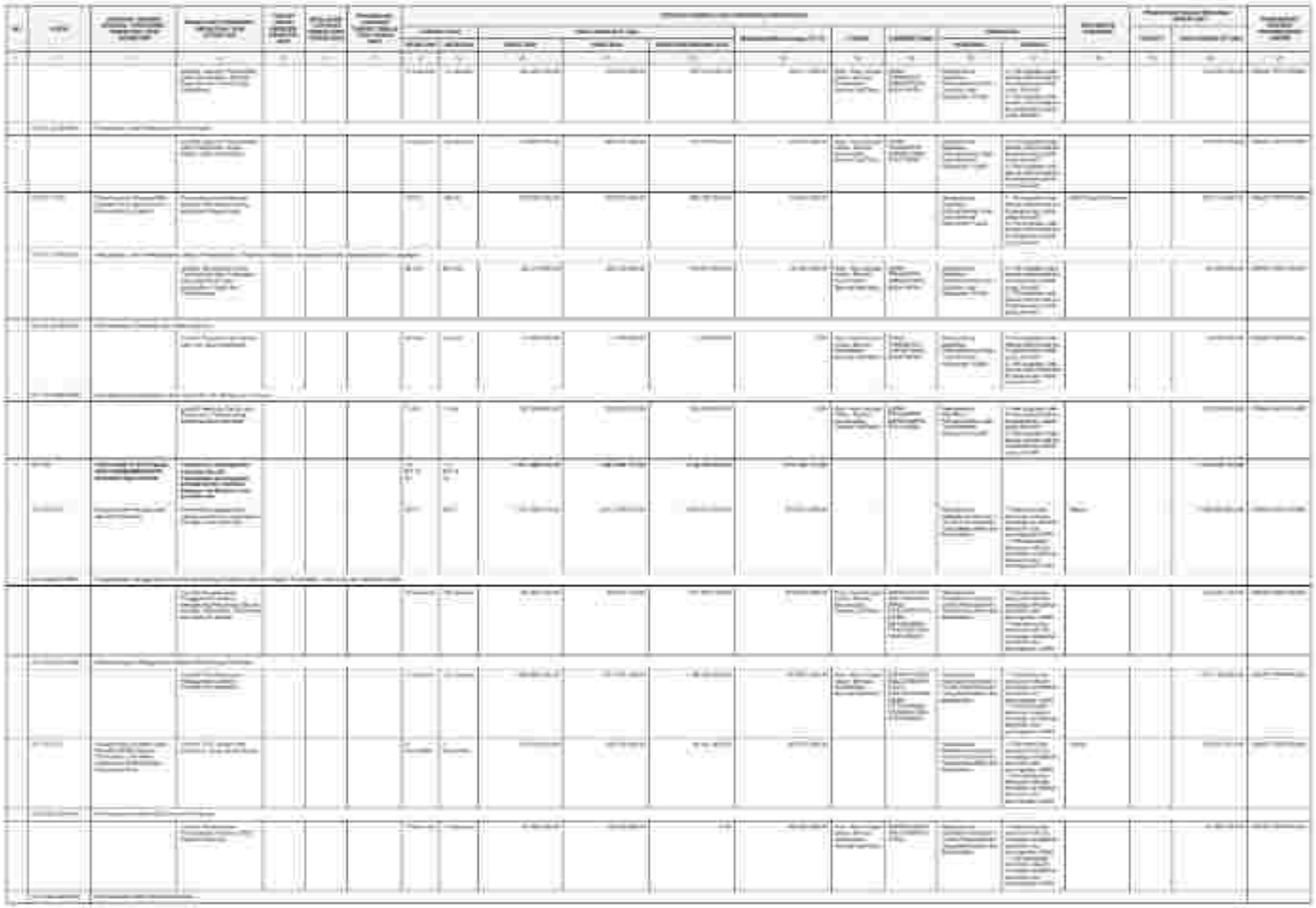
   - Penyesuaian rincian belanja DBH Sawit berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda Perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus Serta TDF Tanggal 15 Desember 2023.
   - Tambahan dana Insentif Fiskal dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah

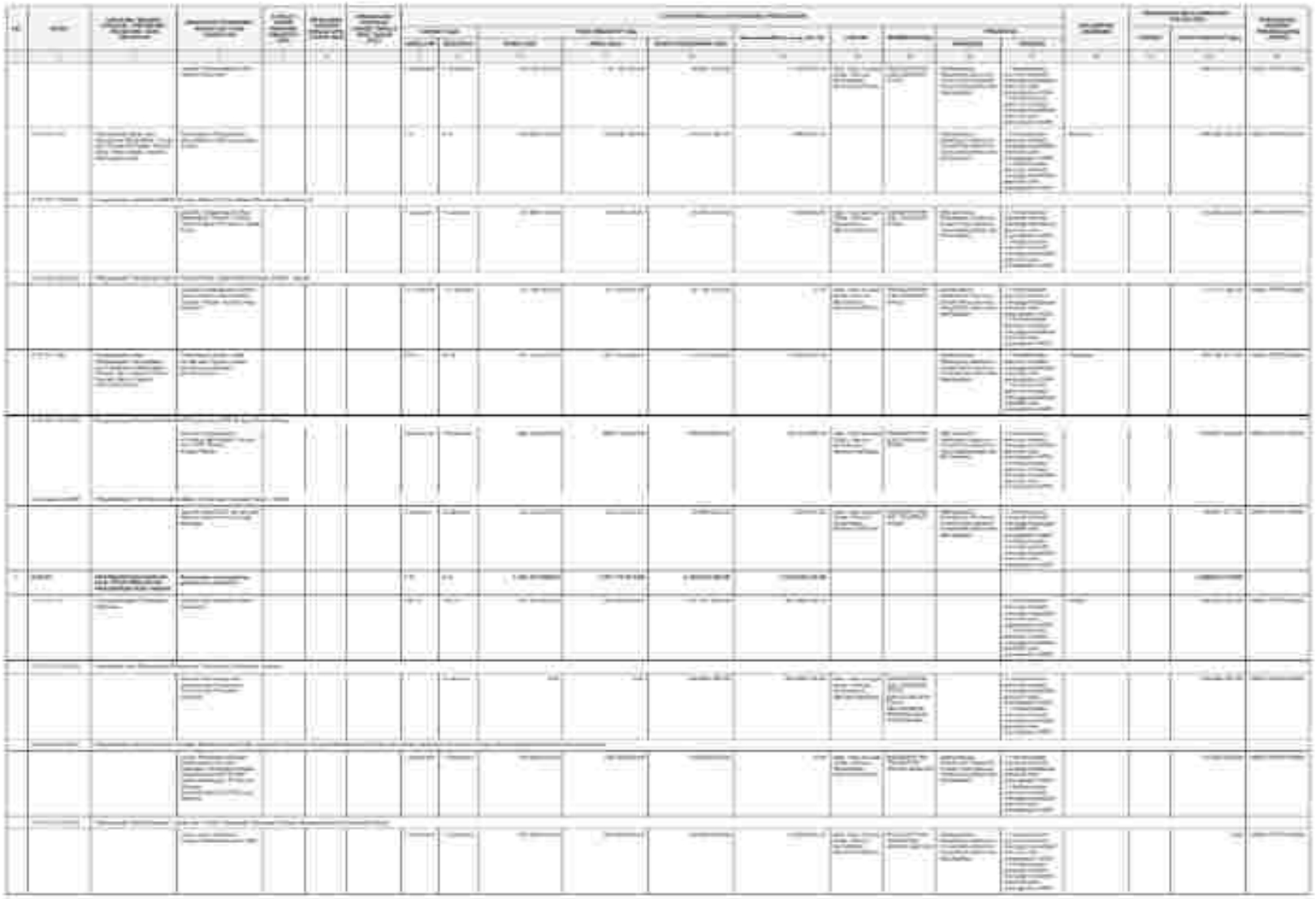
Program, kegiatan dan pendanaan mendasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024, serta memperhatikan isu penting pada urusan bidang ketahanan pangan pertanian dan perikanan. Secara rinci Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 tercantum pada Tabel 3.1

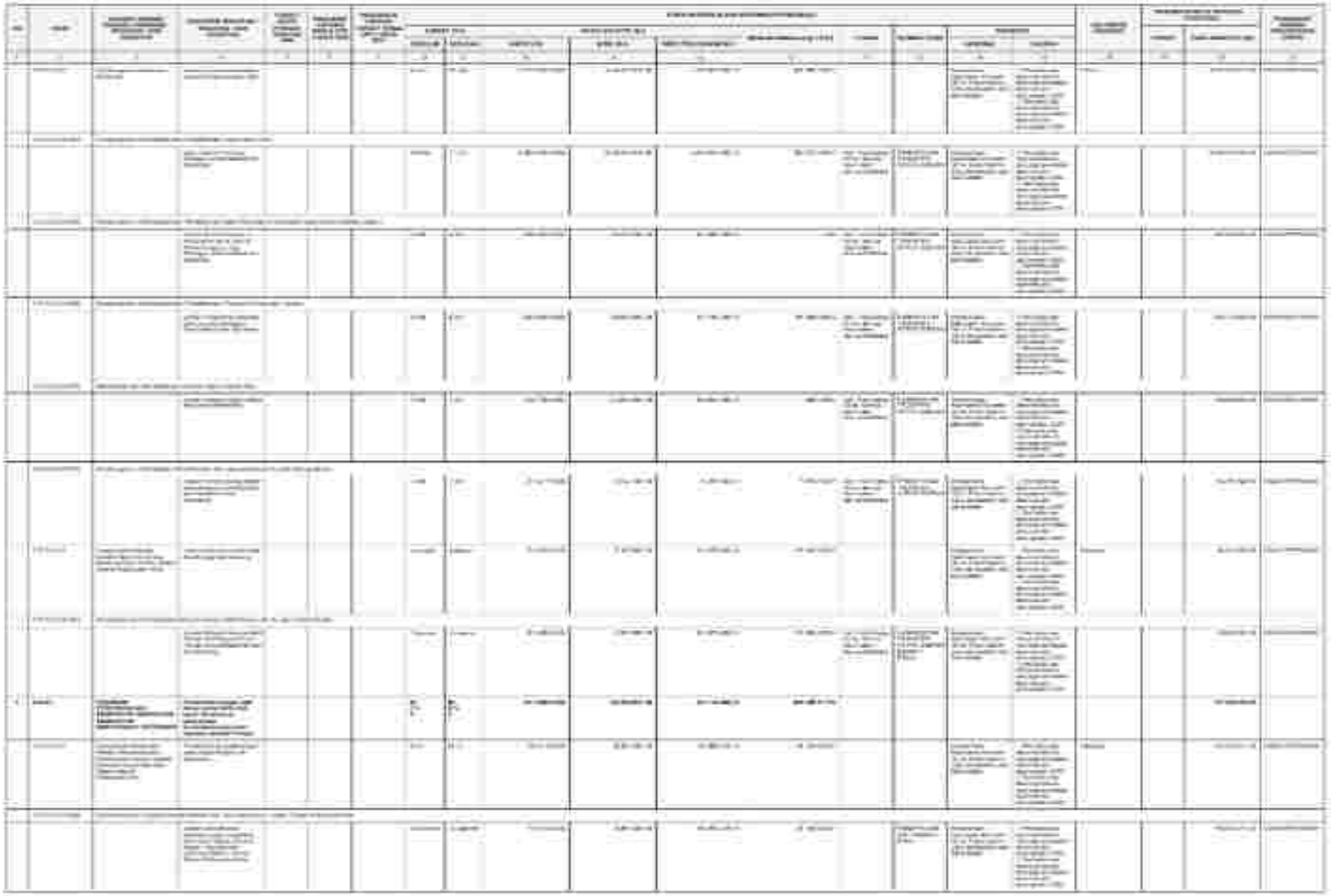
3.1 Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara



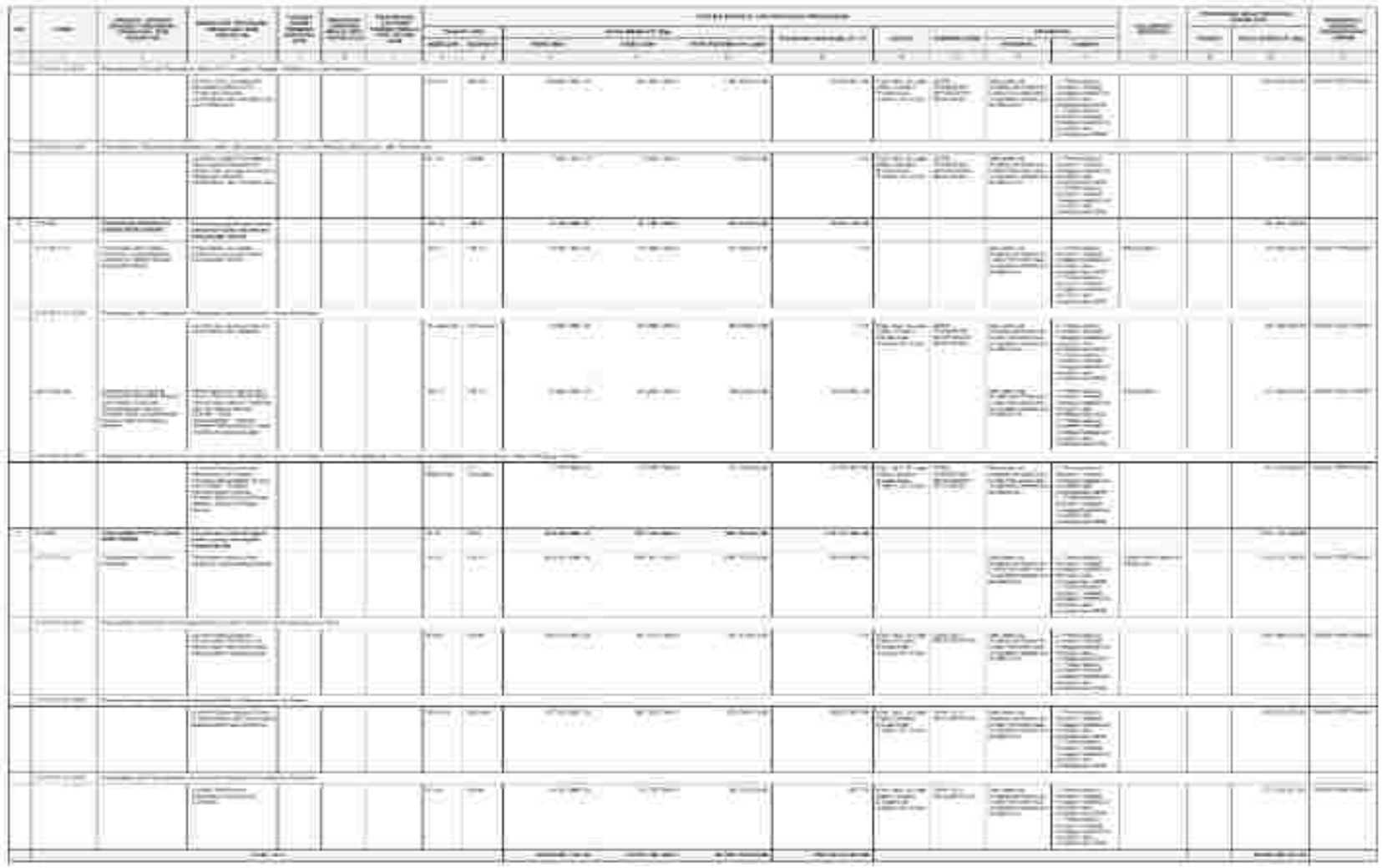












BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 disusun dalam rangka melakukan perubahan DPA. Penyusunan Renja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2023-2026 dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024. Perubahan Renja akan menjadi acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 yang akan ditetapkan menjadi DPPA tahun Anggaran 2024.

Kaidah pelaksanaan yang perlu dipedomani agar Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja agar dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024.
2. Bidang-bidang dan sekretariat agar melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai dengan akhir Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan pertanian pada tahun 2024 serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Amuntai, Agustus 2024
Kepala Dinas Pertanian,

H. M. Haridi, SP, MP
NIP. 19680915 199703 1 004



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan mengacu pada dokumen RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026. Rencana ini akan menjadi acuan dan kerangka dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Amuntai, September 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

ASIKIN NOOR, SSTP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 .	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kab. HSU dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	II-4
Tabel II.2	Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022	II-15
Tabel II.3	Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-19
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-22
Tabel II.5	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022	II-25
Tabel II.6	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022	II-32
Tabel II.7	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan kabupaten HSU	II-40
Tabel II.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten HSU	II-44
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara	III-4
Tabel III.2	Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024	III-7
Tabel III.3	Target Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024	III-7
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	IV-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efesien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stakeholder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan

sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk penyempurnaan RKPD, dan untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Renstra SKPD. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten HSU tahun 2024 yang mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD Tahun 2024. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Sosial Budaya yang diprioritaskan untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting; Menurunnya angka kemiskinan; Pemerataan

dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak; Penurunan angka pernikahan anak; Perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1 Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran.
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
   h. Perumusan kegiatan prioritas.
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
   j. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 – 2026.

26. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (Renja-P SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program – program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 - 2026.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (Renja_P) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan usulan program sebanyak 3 dengan 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2. Penyediaan Bahan/Material
      3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2). Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota
2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota

3). Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SATPOLPP DAN DAMKAR KAB. HULU SUNGAI UTARA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

		Perangkat Daerah								
		(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
9		*(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan	-	58 Orang	58 orang	46 Orang	81,03	-	-	-
		(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya yang disediakan	-	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	-	-	-
		(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	35 Jenis	31 Jenis	29 Jenis	93,55%	-	-	-

		(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang disediakan	-	55 Jenis	55 Jenis	51 Jenis	92,73%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	-	14 Kali	20 Kali	20 kali	100%	-	-	-
		(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	-	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Gedung dalam Kondisi Baik	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

		Lainnya									
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	-	35 Buah	30 Buah	28 Buah	93,33%	-	-	-
2.	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		***Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pelanggaran yang Ditertibkan	-	168 Kegiatan	192 Kegiatan	192 Kegiatan	100%	-	-	-

		(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Satlinmas yang dilaksanakan	-	96 Kegiatan	72 Kegiatan	72 Kegiatan	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-	7 Orang	12 Orang	9 Orang	75%	-	-	-
		(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	**Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup**	-	**68,17%**	**80%**	**74,42%**	**93,03%**			
		(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggar Perda	-	240 Kali	145 Kali	145 Kali	100%			
		(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah kegiatan penanganan dan penindakan Pelanggar perda yang dilaksanakan	-	31 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	100 %	-	-	-
3	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-

		(Kegiatan) Pencegahan Pengendalian , Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan	-	147 Kegiatan	96 Kegiatan	86 Kegiatan	89,58%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Musibah Kebakaran yang Ditangani	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	**(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan	***Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	-
		(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-
		(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	-	-	-	-	58 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	100%
		(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	-	-	-	-	Paket	Paket	-
		(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	-	-	-	-	32 Paket	32 Paket	100%

		(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	-	-	-	-	12 Paket	12 Paket	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang disediakan	55 Jenis	-	-	-	-	55 Jenis	55 Jenis	100%
		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	-	-	-	-	20 Kali	20 Kali	100%
		(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	-		-	-	-	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-							
		(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

		(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	-
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	-	-	-	30 Unit	30 Unit	-
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	-
2.	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah	***Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	144 Kasus	-	-	-	-	144 Kasus	144 Kasus	100%

		Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							
		(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	150 Kasus	-	-	-	-	150 Kasus	150 Kasus	100%
		(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		(Sub Kegiatan) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
		(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	***Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***

		(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
3	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Pencegahan Pengendalian , Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	***Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran***	***100%***	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%

		/ Kota	dalam Daerah Kabupaten / Kota								
		(Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	-	-	-	-	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran	1 Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	100%

Untuk capaian hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun ke-(empat) Renstra Satpol PP dan Damkar (Tahun 2022) cukup berhasil dengan baik, walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis SKPD, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan/ kegagalan SKPD menjalankan misinya.

Pada dasarnya kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, yaitu urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan lingkup pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas :

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mencakup Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan Perda; dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mencakup Seksi Operasional, pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi; dan Seksi Pengamanan dan Pengawalan
3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang mencakup Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat; dan Seksi Pencegahan, Pemulihan, Penanganan dan Pengendalian kebakaran.

Dalam tahun anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah
3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara
4. Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan

realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2. Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	BB	A*	100%
2.	Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Diselesaikan (%)	80	80	100%
3.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani (%)	90	72,07	80,08%
4.	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran	Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km (%)	100	95	95%

Catatan : Bertanda bintang (*) Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2022 adalah cukup berhasil.

Berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Tahun 2022 :

1. **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel**

   a. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

   Pencapaian Indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan kategori "BB". Untuk Penilaian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 dijadwalkan tahun 2023 setelah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan di Tahun 2022 penilaian SAKIP dari Inspektorat adalah untuk SAKIP 2021, dimana nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 adalah kategori "A" dengan nilai 80,06.

2. **Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah**

   ❖ Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan

   Tingkat capaian kinerja untuk Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan secara umum dapat dicapai. Dari target yang ditetapkan 80% terealisasi sebesar 80% sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 100%. Dengan penjelasan jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan berjumlah 8 perda dibandingkan dengan jumlah pelanggaran perda sebanyak 10 perda, hal ini dikarenakan masih kurangnya aparatur penegak perda dibandingkan dengan jumlah penduduk dan cakupan wilayah yang harus dilayani serta jumlah perda/perkada yang harus diawasi.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Peraturan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kuantitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib dilaksanakan.

3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara

- Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani

Pencapaian Indikator kinerja untuk Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani secara umum telah berhasil, dari target yang ditetapkan 90% terealisasi sebesar 72,07%, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 80,08%. Dengan penjelasan Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi atau dilaporkan pada tahun 2022 sebanyak 906 pengaduan, dari jumlah tersebut yang dapat ditangani dan diselesaikan sebanyak 653 pengaduan atau 72,07%. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan penertiban terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

peraturan daerah, masih rendahnya tingkat kesadaran PKL terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta diperparah dengan jumlah PKL liar yang terus bertambah, serta masih rendahnya kesadaran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dilingkungannya

4. Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran

- Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km

Pencapaian Indikator kinerja untuk Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km secara umum telah berhasil dicapai melebihi target yang ditetapkan. Adapun untuk Target Persentase Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km pada tahun 2020 dari target 100% terealisasi sebesar 95%, dimana target capaian kinerjanya mencapai 95%.

Hal ini dijelaskan dari jumlah musibah kebakaran yag terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 sebanyak 20 kali, dan yang dapat tertangani dalam waktu tanggap (Respon Time) sebanyak 19 kali, sedangkan 1 kali kejadian kebakaran tidak dapat terlayani dalam waktu tanggap, yaitu di Desa Padang Bangkal Kecamatan Sungai Pandan, karena kondisi akses jalan yang sangat minim.

Untuk mendukung sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh beberapa sasaran program yang ada di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta , Bidang Perlindungan

Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

II.3 Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan pelanggaran perda	80%	74,42%	93,03%	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per Undang-undangan Daerah
2.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ter hadap pelanggaran perda	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran perda	145 kali	145 kali	100%	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda
3.	Melaksanakan Penindakan Pelanggaran Perda	Jumlah kegiatan penanganan dan penindakan pelanggar perda yang dilaksanakan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	100%	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	

5.	Melaksanakan Penertiban Umum	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	192 kali	192 kali	100%	Kepala Seksi Operasional Pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi
6.	Memfasilitasi Anggota Satpol PP dan Damkar untuk mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan pemadam kebakaran	12 orang	9 orang	75%	
7.	Melaksanakan kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	100%	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan
8.	Meningkatkan perlindungan masyarakat dan pelayanan kebakaran	Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	**Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran**
		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	
		Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	
9.	Melaksanakan Pembinaan	Jumlah pembinaan	72 kali	72 kali	100%	Kepala Seksi Satuan Perlindungan

	Satlinmas	satlinmas yang dilaksanakan				dan Partisipasi Masyarakat
10.	Melaksanakan penanganan musibah kebakaran	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan	96 kali	86 kali	89,58%	Kepala Seksi Pencegahan, Pemulihan, penanganan dan Pengendalian Kebakaran
		Persentase musibah kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%	

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Ditindaklanjuti	-	-	60 %	70%	80%	100%	71,43 %	70%	80%	100%	
2	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani	-	-	75%	80%	90%	100%	86,44%	79,27%	72,07%	100%	
3	Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km	-	-	88%	96%	100%	96%	94,74%	81,82%	95%	96%	

Memasuki tahun terakhir Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, pencapaian Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebesar 100% atau 100% dari target Renstra 2017-2022 sebesar 80%, untuk pencapaian indikator Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani adalah sebesar 80,08% atau 80,08% dari target Renstra 2017- 2022 sebesar 90%. Sedangkan untuk indikator Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km pada tahun 2022 tercapai sebesar 95% atau 95% dari target Renstra 2017-2022 sebesar 100%. Pencapaian kinerja tersebut dapat tercapai dengan baik melalui upaya meningkatkan sosialisasi peraturan daerah yang terkait ketentraman dan ketertiban umum secara lebih intensif, melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam upaya-upaya pendekatan dimasyarakat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keindahan sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud. Melakukan patroli dalam kota dan wilayah kecamatan-kecamatan dilingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Melakukan sosialisasi dan himbauan secara lebih intensif tentang risiko bahaya kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran.

Untuk capaian indikator kinerja program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2022 cukup berhasil dengan baik, namun masih ada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan yang belum tercapai, hal ini dapat dilihat pada tabel capaian indikator kinerja program dan kegiatan berikut ini :

Tabel II.5. Capaian Realisasi Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	BB	A*	100%	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100
								(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	*100%*	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100
								(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100
								(Kegiatan) Administrasi keuangan perangkat daerah	*Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah*	*100%*	100%	100

								(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan	58 Orang	46 Orang	81,03
								(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100%***	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100
								(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat daerah	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***100%***	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 Jenis	29 Jenis	93,55
								(Sub Kegiatan) Penyediaan bahan material	Jumlah ATK yang disediakan	55 Jenis	51 Jenis	92,73
								(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 kali	20 kali	100
								(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***100%***	***100***
								(Sub Kegiatan) Penyediaan	Persentase Surat Masuk	100%	100%	100

								Jasa Surat Menyurat	dan Surat Keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya			
								(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100
								(Kegiatan) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	100
								(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Gedung dalam kondisi baik	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah peralatan gedung kantor yang	30 buah	28 Buah	93,33

								Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	dipelihara			
2.	Mewujudkan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif	Jumlah kejadian berlatar belakang konflik SARA	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	90%	72,07%	80,08%	(Program) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan kebindahan)	100%	100%	100
								(Kegiatan) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	100
								(Sub Kegiatan) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasakan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	192 Kegiatan	192 Kegiatan	100

								kerusuhan massa				
								(Sub Kegiatan) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan satlinmas yang dilaksanakan	72 Kegiatan	72 Kegiatan	100
								(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang berhuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan pemadam kebakaran	12 Orang	9 Orang	75
			Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	80%	80%	100%	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan***	***Persentase Penegakan Pelanggaran Perda***	*80%*	74,42%	93,03
								(Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar perda	145 kali	145 kali	100
								(Sub Kegiatan) Penanganan atas pelanggaran Peraturan	Jumlah penanganan dan penindakan pelanggar	27 kegiatan	27 kegiatan	100

								Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	perda yang dilaksanakan			
			Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran	Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) penanganan kebakaran dalam radius 10 km	100%	95%	95%	(Program) Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
								(Kegiatan) Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	***Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran***	***100%***	100%	100%
								(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan	96 Kegiatan	86 Kegiatan	89,58
								(Sub Kegiatan) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Persentase musibah kebakaran yang ditangani	100%	100%	100

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten HSU Tahun 2022 mendapat alokasi dana yang bersumber dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 7.209.896.530,- dan setelah mengalami revisi-revisi pergeseran melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.227.184.093,-, adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.6 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	**(PROGRAM) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**4.888.774.093,-**	***4.004.192.597***	***81,91***
1.	***(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***3.375.000,-***	***3.112.500,-***	***92,22***
a.	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.575.000,-	1.312.500,-	83.33
b.	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,-	1.800.000,-	100
2.	***(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***4.357.888.700,-***	***3.538.020.738***	***81,19***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.888.700,-	3.538.020.738	81,19
3.	***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***69.597.550,-***	***67.133.000,-***	***96,46***
a.	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	69.597.550,-	67.133.000,-	96,46
4.	***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***163.919.335,-***	***140.341.080,-***	***85,62***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.343.034,-	21.079.500,-	71,84
b.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	55.576.301,-	41.700.750,-	75,03
c.	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat	79.000.000,-	77.560.830,-	98,18

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
5.	***(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***147.934.008,-***	***134.071.629,-***	***90,63***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.150.000,-	16.005.000,-	99,10
b.	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,536,008,-	44.834.831,-	76,59
c.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.248.000,-	73.231.798,-	99,98
6.	***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***146.059.500,-***	***121.513.650,-***	***83,19***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	136.500.000,-	114.583.650,-	83,94
b.	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.059.500	2.050.000	99,54
c.	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7.500.000,-	4.880.000,-	65,07
2)	**(PROGRAM) PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.803.505.000,-**	**1.767.950.000**	**98,03**
7.	***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota***	***1.446.855.000,-***	**1.414.945.000**	**97,79**
a.	(Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.023.650.000,-	1.021.150.000	99,76
b.	(Sub Kegiatan) Penindakan dan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	234.925.000,-	234.895.000,-	99,99

	Massa			
c.	(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	89.425.000,-	89.350.000,-	99,92
d.	(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	98.855.000,-	69.550.000,-	70,36
8.	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota***	***356.650.000,-***	***353.005.000,-***	***98,98***
a.	(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	332,250.000,-	329.155.000,-	99,07
b.	(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24.400.000,-	23.850.000,-	97,75
3)	**(PROGRAM) PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**534.905.000,-**	**517.329.000,-**	**96,71**
9.	***(Kegiatan) Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***534.905.000,-***	***517.329.000,-***	***96,71***
a.	(Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.430.000,-	275.980.000,-	99,84
b.	(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	258.475.000,-	241.349.000,-	93,37
Total Belanja		***7.227.184.093,-***	***6.289.471.597***	***87,03***

Realisasi anggaran Pada Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 7.227.184.093,- atau 90,09 % dari total anggaran sebesar Rp. 8.021.161.750,- .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, mempunyai tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP dan Damkar untuk tahun 2022 dapat dilihat bahwa :

1. Pencapaian indikator kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan telah berhasil tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan 80% terealisasi sebesar 80%.
2. Pencapaian indikator kinerja Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani telah berhasil tercapai sebesar 80,08% dari target yang ditetapkan 90% terealisasi sebesar 72,07%.
3. Pencapaian Indikator kinerja Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km telah berhasil tercapai sebesar 95% dari target yang ditetapkan 100% realisasinya mencapai 95% .

Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2022 telah tercapai dengan baik. Hal ini didukung dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu antara lain :

- Melibatkan semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengoptimalkan potensinya, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Memberi pemahaman kepada anggota Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bahwa substansi dan Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja.
- Mengupayakan pelaksanaan diklat fungsional bagi pegawai PNS untuk menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja, serta melakukan pendidikan dan pelatihan teknis serta bimbingan teknis untuk anggota trantibum dan anggota PPNS

- Peningkatan jalinan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait, dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Perda dan Perbup sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tantangan yang harus dihadapi, meliputi tantangan Internal dan tantangan eksternal, yaitu :

1. Masih kurangnya personil (Tenaga Teknis Lapangan).
2. Masih minimnya Sumber Daya Aparatur (Manusia) yang handal.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
5. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
6. Tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan pada kawasan pemukiman yang cukup tinggi menyebabkan kawasan yang ada menjadi rentan terhadap kejadian bencana kebakaran.

Sedangkan peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, meliputi :

1. Tuntutan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan aturan semakin kuat, sehingga keperdulian dan partisipasi masyarakat diharapkan juga meningkat.
2. Adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Aparatur (Manusia).

3. Adanya produk – produk peraturan dan perundang – undangan terkait penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat semakin kuat.
4. Optimalisasi koordinasi antar instansi baik instansi vertikal maupun horizontal.
5. Banyaknya jumlah Kelompok BPK yang ada dimasyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demi mewujudkan keberhasilan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara disamping memperhatikan strategi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat juga perlu penentuan isu-isu strategis SKPD, adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Kurangnya SDM dan PPNS penegak perda yang akan melaksanakan penegakkan hukum perda dan perkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kurangnya kesadaran / kepatuhan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
3. Perlu memaksimalkan pelayanan terhadap warga Negara akibat dari penegakkan Hukum Perda dan Perkada di Kabupaten
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
5. Perlu peningkatan terhadap sarana dan prasarana Damkar dalam penanganan kebakaran
6. Perlunya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan bahaya kebakaran.
7. Perlunya pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arahan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tidak terlepas dari apa yang telah dituangkan pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 -2026. Selain itu arah pembangunan tentunya tidak terlepas dan berkesinambungan dengan yang dilaksanakan pada tahun berjalan ditahun 2023. Dalam aspek pemerintahan yakni terlaksananya berbagai urusan layanan umum, urusan wajib, urusan pilihan, dan berbagai urusan lainnya yang menjadi kewajiban daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan pemerintahan juga dengan mendorong adanya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kompetensi aparatur juga semakin ditingkatkan guna terciptanya perbaikan kinerja pemerintahan, terbinanya kelembagaan pemerintah, meningkatnya kinerja dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam rangka menjalani masa-masa transisi pemerintahan sampai terlaksana dan terpilihnya pimpinan daerah yang akan datang, serta terpeliharanya kerukunan hidup dalam suasana keagamaan.

Untuk Indikator Capaian Kinerja tahun 2024 yang diinginkan pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.7. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten HSU

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun	Capaian Akhir Periode
			2024	2026
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
	PELAYANAN URUSAN WAJIB			
A.	**Terkait Pelayanan Dasar**			
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	NA	1,4	1,4
5.2	Cakupan pelayanan Musibah kebakaran Kabupaten / Kota (%)	NA	100	100
5.3	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) pelayanan kebakaran (%)	NA	96	96

Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap SKPD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Rencana Program dan Kegiatan ini harus terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 yang ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 terdiri dari 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum
3. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebanyak 3 Program sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Prioritas dan sasaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yakni Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RKPD. Adapun Prioritas pembangunan pada Bidang Sosial Budaya tahun 2024 terarah pada :

1. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik, dengan sasaran :
   a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
   b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah
   c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manuasia, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
   b. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting
   c. Menurunnya angka kemiskinan

3. Penanganan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sasaran :
   a. Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

b. Penurunan angka pernikahan anak
c. Perencanaan penganggaran yang responsive gender

Prioritas pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas sosial budaya
2. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial budaya
3. Peningkatan pengelolaan bencana kebakaran

Adapun untuk Rencana kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.257.949.704,-.

Kemudian dari hasil analisis kebutuhan, dilihat dari beberapa permasalahan dan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk bidang Pemadam Kebakaran perlu merencanakan penerimaan personil damkar dan membentuk pasukan Damkar dan menyusun rencana perlengkapan safety, dan perlengkapan lainnya, serta menambah biaya operasional dan kompensasi aparatur yang memiliki resiko kerja dengan penambahan anggaran untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga terkendala dengan masih minimnya anggaran operasional dalam pembiayaan kegiatan, baik untuk kegiatan patroli maupun pengamanan kantor dan rumah pejabat (Upah Jaga Piket). Selain itu pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan anggota DPRD, serta pemilihan Kepala daerah, sehingga berdasarkan analisis kebutuhan yang ada, perlu

penambahan alokasi pembiayaan untuk kegiatan patroli, penertiban dan panwal, serta penambahan alokasi pembiayaan untuk kegiatan pam pemilihan Kepala Daerah.

Untuk Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasarkan dari Hasil Analisis Kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.8. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I.	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%		(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%		
1.)	*(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	100%		*(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	100%		
	- (Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	Rp 630,000	- (Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	Rp 630,000	
	- (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	1,575,000	- (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	1,575,000	
2)	*(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	*100%*		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	*100%*		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / bulan	6,835,777,249	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		6,835,777,249	
3)	***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	*100%*		***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	*100%*		
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	
4)	***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	***100%***		***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket penalatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Paket	83,921,310	(Sub Kegiatan) Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket penalatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Paket	83,921,310	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	28,513,500	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	28,513,500	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	42 Paket	26,695,150	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	42 Paket	26,695,150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten / Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	125,189,000	- (Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten / Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	125,189,000	
5)	***(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	***100%***		***(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	
6)	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,600,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,600,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	62,372,500	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	62,372,500	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87,192,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87,192,000	
7)	***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	***100%***		***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***		***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp & Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	200,793,500	- (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp & Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	200,793,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	9,000,000	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	9,000,000	
	- (Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	-	- (Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	-	
II	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan kebudahan)**	**100%**		**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan kebudahan)**	**100%**		
8)	***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**100%**		***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**100%**		
	- (Sub Kegiatan) Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	1,727,260,000	- (Sub Kegiatan) Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	1,727,260,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 laporan	150,225,000	(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 laporan	150,225,000	
	- (Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. HSU	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	189,805,000	(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. HSU	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	189,805,000	
	- (Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuatan Hak Asasi Manusia	Kab. HSU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	48,645,000	(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuatan Hak Asasi Manusia	Kab. HSU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	48,645,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak penegakan perda dan perkda yang terlayani	2 Laporan	7,000,000	(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkda yang Terlayani, Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak penegakan perda dan perkda yang terlayani	2 Laporan	7,000,000	
9)	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***		***Persentase Penegakan pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***		***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***		***Persentase Penegakan pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kesesuaian					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kesesuaian Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	171,307,500	- (Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	171,307,500	
	- (Sub Kegiatan) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	14,550,000	- (Sub Kegiatan) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	14,550,000	
III	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**		**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**		
10	***(Kegiatan) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / Kota***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran***	***100%***		***(Kegiatan) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / Kota***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	186,500,000	- (Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	186,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	277,393,000	- (Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	277,393,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	10,725,000	- (Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	10,725,000	
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	6,330,000	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	6,330,000	
	- (Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. HSU	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Audit Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	-	- (Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Audit Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	-	
Jumlah					**10,257,949,784**	**Jumlah**				**10,257,949,784**	

Dari tabel II.8 tentang review rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat bahwa program yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 3 program dengan 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan pagu anggaran sesuai Pagu Indikatif Penyesuaian sebesar Rp. 10.257.949.704,-,

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembagunan (Musrenbang) di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengakomodir usulan masyarakat dan pokok pikiran (Pokir) DPRD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap IV Tahun (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat, terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal, terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum, terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Sasaran Strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Untuk pencapaian sasaran tersebut ditetapkan program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Adapun Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terpadu dan berkesinambungan melalui penelaahan isu strategis rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan sasaran pokok untuk RPJPD ke IV (RPJMN Tahun 2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan fokus pembangunan, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditanda dengan daya saing perekonomian yang kompetitif

4. Terjaganya daya dukung dan daya tamping lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Adapun beberapa isu strategis nasional pada rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya adalah :

1. Penciptaan nilai tambah dan devisa, serta tantangan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru (Pariwisata dan Ekonomi Digital/Kreatif)
2. Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan manusia yang holistik dan terintegrasi
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Pembangunan infrastruktur dan penurunan ketimpangan antar wilayah
5. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
6. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
7. Daya Dukung dan Daya Tampung SDA dan LH
8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkait tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 serta terintegrasi dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

3. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU.
4. Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	-	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B/66	B/66,5	B/67	B/67,5
SASARAN RENSTRA SATPOL PP & DAMKAR									
				Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A / 80,62 Poin	A / 81,12 Poin	A / 81,62 Poin	A / 82,12 Poin
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
2.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan Sosial, agama di masyarakat	Angka Kriminalitas	-	Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Jumlah Kasus Konflik Sosial	-	-	-	-
SASARAN RENSTRA SATPOL PP & DAMKAR									
				Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan (%)	100%	100%	100%	100%

				Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	Persentase Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani (%)	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran	Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) penanganan kebakaran dalam radius 10 km (%)	96%	96%	96%	96%

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masuk dalam aspek kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pengemban urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum. Untuk penerima jenis pelayanan dasar sub urusan

trantibum ini adalah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Sedangkan jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tersebut meliputi layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Adapun target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda/Perkada sesuai mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan perda/perkada	Jumlah penegakan perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar	Capaian (%)	Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	Capaian (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	650	650	100%	0	0	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel III.3.Target Capaian SPM Sub sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Total persentase (%) capaian SPM kebakaran (Layanan Penyelamatan dan evalusai korban kebakaran	Jumlah Operasi Non Kebakaran	Korban Jiwa				Jumlah Taksiran Aset	
				Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan	Jumlah korban meninggal dunia	Jumlah korban mengalami luka bakar	Jumlah korban mengalami luka fisik lainnya	Jumlah taksiran aset yang berhasil diselamatkan	Jumlah taksiran kerugian aset
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Hulu Sungai Utara	100%	30 kegiatan	200 jiwa	-	-	-	Rp. 500.000.000	Rp. 2.000.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Kinerja Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka dilaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan beberapa

program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 meliputi :

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
      3. Penyediaan Bahan/Material
      4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu :
      1. Pengadaan Mebel

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

2). Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum :
   a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah, dengan 5 sub kegiatan, yaitu :
      1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM) / (Analisis Responsif Gender)***
      2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM) / (Analisis Responsif Gender)***
      3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
2. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. ***(Kegiatan Pendukung pencapaian SPM) / (Analisis Responsif Gender)***
2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

3). Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota, dengan 5 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
4. Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

Pada tahun 2024 ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan akan melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 Kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.150.391.204,-, yaitu untuk pagu belanja Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 7.235.759.144,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 2.914.632.060,-. Setelah ada pergeseran dan penambahan anggaran berubah menjadi Rp. 10.257.949.704,-, untuk pagu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.835.777.244, sedangkan belanja kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.422.172.460,-.

Adapun rumusan rencana program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 tercantum pada tabel berikut :

Tabel IV.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA THN 2025	
			LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 01	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 01 0001	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. HSU	6 Dokumen	Rp 6.00.000	-	-	6 Dokumen	Rp 1,811,250
1 0.5 01 2 01 0006	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. HSU	4 Laporan	Rp 3,535,000	-	-	4 Laporan	Rp 4,534,000
1 0.5 01 2 02	(Kegiatan) Administrasi Kewanguan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanya Administrasi Kewanguan Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 02 0001	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	58 Orang / Bulan	Rp 6,033,777,244	-	-	58 Orang / Bulan	Rp 6,033,777,244
1 0.5 01 2 03	(Kegiatan) Administrasi Perlengkapan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanya Administrasi Perlengkapan Perangkat Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 03 0002	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. HSU	Paket	Rp -	-	-	1 Paket	Rp 92,000,000
1 0.5 01 2 06	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%				100%	
1 0.5 01 2 06 0002	(Sub Kegiatan) Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket perlengkapan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. HSU	33 Paket	Rp 83,021,330	-	-	34 Paket	Rp 12,030,045
1 0.5 01 2 06 0005	(Sub Kegiatan) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. HSU	12 Paket	Rp 25,511,500	-	-	13 Paket	Rp 15,500,000
1 0.5 01 2 06 0007	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kab. HSU	42 Paket	Rp 26,693,350	-	-	43 Paket	Rp 23,739,467

KODE							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN AWAL RENCANA TAHUN 2025	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	0.5	01	2	06	0005		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	21 Laporan	Rp 115,300,000	-	-	22 Laporan	Rp 253,630,330
1	0.5	01	2	07			(Kegiatan) Pengelolaan Barang Milik Daerah Penanggung Jawab Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		%				%	
1	0.5	01	2	07	0005		(Sub Kegiatan) Pengadaan Mobil	Jumlah Unit Mobil yang Diadakan	Kab. HSU	0 Unit	Rp -	-	-	4 Unit	Rp 23,000,000
1	0.5	01	2	08			(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
1	0.5	01	2	08	0001		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 6,600,000	-	-	12 Laporan	Rp 12,666,740
1	0.5	01	2	08	0002		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. HSU	36 Laporan	Rp 62,322,500	-	-	36 Laporan	Rp 56,536,000
1	0.5	01	2	08	0004		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 82,192,000	-	-	12 Laporan	Rp 82,192,000
1	0.5	01	2	09			(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanggung Jawab Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100%				100%	
1	0.5	01	2	09	0002		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. HSU	8 Unit	Rp 200,243,500	-	-	8 Unit	Rp 305,810,000
1	0.5	01	2	09	0006		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. HSU	30 Unit	Rp 9,000,000	-	-	30 Unit	Rp 5,775,000

KODE							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PERUBAHAN	PROGRAM MASA RENCANA TAHUN 2025	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	01	2	01	0003		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung, Bangunan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung, Bangunan dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab/Kota	1 Unit		-	-	1 Unit	Rp 1,225,500
							Jumlah Program 1				Rp 7,468,200,294				Rp 7,540,605,200
URAIAN PENDISTRIBUSIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM SERTA PERUBAHAN ANTAR URUSAN															
1	05	02					(Program) Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Ketertiban		100%				100%	
1	05	02	2	01			(Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kabupaten	Persentase Penyelesaian Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%				100%	
1	05	02	2	01	0035		(Sub Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berpotensi Mengganggu Ketertiban Umum dan Cegah Dini, Penyelesaian dan Penyelesaian, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berpotensi Mengganggu Ketertiban Umum dan Cegah Dini, Penyelesaian dan Penyelesaian, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab/Kota	12 Laporan	Rp 1,227,300,000	-	-	12 Laporan	Rp 1,254,750,000
1	05	02	2	01	0036		(Sub Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Meliputi Penertiban dan Penanganan Bagi Kawasan Ketentraman Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Meliputi Penertiban dan Penanganan Bagi Kawasan Ketentraman Umum yang Dilakukan Penanganan	Kab/Kota	12 Laporan	Rp 300,225,000	-	-	12 Laporan	Rp 355,105,150
1	05	02	2	01	0038		(Sub Kegiatan) Penanganan Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Ketertiban dan Ketentraman Umum	Jumlah Dokumen yang Dievaluasi Hasil Penanganan Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Ketertiban dan Ketentraman Umum	Kab/Kota	1 Dokumen	Rp 895,855,000	-	-	1 Dokumen	Rp 60,000,000

KODE							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERUBAHAN MAKI RENCANA THR 2025	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	02	2	01	0003		*(Sub Kegiatan)* Penanggulangan Gangguan Sosial Lainnya Akibat Konflik Sosial, Pengungsi, Pengungsian Sosial, Pemulangan Pengungsi, Penanganan Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Korban Tindak Kekerasan Lainnya yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang Korban Konflik Sosial, Pengungsi, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Korban Tindak Kekerasan Lainnya yang Ditanggulangi Kebutuhannya	Kab. HSU	3 Orang	Rp 45,685,000	-	-	3 Orang	Rp 93,400,000
1	03	02	2	01	0007		(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam Gedung Bagi Penyandang Permasalahan Disabilitas dan Psikotik	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dasar, Penyediaan Rehabilitasi Sosial Dasar, Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Layanan yang Tidak Dampak, Penanganan Penduduk Rehabilitasi yang Terdaftar	Kab. HSU	2 Laporan	Rp 3,000,000	-	-	2 Laporan	Rp 3,750,000
1	03	02	2	02			(Regulasi) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup		100%				100%	
1	03	02	2	03	0012		*(Sub Kegiatan)* Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 313,307,500	-	-	12 Laporan	Rp 313,240,500
1	03	02	2	03	0013		*(Sub Kegiatan)* Penanganan dan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan dan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Satpol PP	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 14,550,000	-	-	12 Laporan	Rp 11,212,500
							Jumlah Program 2				Rp 2,886,787,500				Rp 1,749,805,500
1	03	03					*(Program)* Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten / Kota		100%				100%	
1	03	04	2	01			(Regulasi) Penanggulangan Bencana, Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Bencana, Penanggulangan dan Pencegahan di Kabupaten		100%				100%	
1	03	04	2	01	0003		*(Sub Kegiatan)* Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Korban KSPM Penanggulangan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. HSU	3 Dokumen	Rp 350,500,000			3 Dokumen	Rp 975,955,500

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN PERENCANAAN)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MASA RENCANA THN 2025	
								LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	04	2	01	0003	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan dan Pengendalian Ketertiban Dalam Rumah Ibadah / Gereja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pemeliharaan Ketertiban dalam Rumah Ibadah / Gereja	Di Kab.OKU	2 Laporan	Rp 275,950,000			2 Laporan	Rp 303,545,000
1	05	04	2	01	0003	(Sub Kegiatan) Pengamanan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Non Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Perundang-Undangan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Non Kelembagaan	Di Kab.OKU	1 Dokumen	Rp 10,725,000			1 Dokumen	Rp 11,500,000
1	05	04	2	01	0013	(Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Siap dan Layak Operasional Standar Tertib Lantas	Di Kab.OKU	10 Unit	Rp 6,330,000			10 Unit	Rp 20,000,000
1	05	04	2	01	0007	(Sub Kegiatan) Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Mengikuti Sertifikasi Bersertifikat Tertib dan Aman Dalam Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran	Di Kab.OKU	0 orang	-			1 Orang	Rp 15,232,500
						Jumlah Program 1				Rp 480,000,000				Rp 130,000,000
						JUMLAH TOTAL ANGGARAN				Rp 10,297,980,704				Rp 9,010,000,000

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Ulu Sungai Utara

ADRIAN NOOR, SSTP, MAP
NIP. 197504041994031003

Pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024, dapat dilihat bahwa rencana program dan kegiatan dari APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan sebanyak 3 Program dengan 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar 10.257.949.704,-, yaitu untuk pagu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.835.777.244, sedangkan belanja kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.422.172.460,-.

Sedangkan rumusan prakiraan maju rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 9.619.003.501,-.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024.

Isi dokumen Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 3 Program dengan 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 10.150.391.204,-, yaitu untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp. 7.235.759.144,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 2.914.632.060,- sesuai dengan pagu indikatif penyesuaian tahun 2024 untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian setelah ada pergeseran dan penambahan anggaran berubah menjadi Rp. 10.257.949.704,-, dengan untuk pagu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.835.777.244, sedangkan belanja kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.422.172.460,-.

Amuntai, September 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

ASIKIN NOOR, SSTP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199403 1 003

kec-seitabukan.hsu.go.id

RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kecamatan Sungai Tabukan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian rencana kerja perubahan Kecamatan Sungai Tabukan ini merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Kecamatan Sungai Tabukan atau Renstra 2023-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Sungai Tabukan sampai dengan Tanggal 30 bulan Juni 2024 atau TW II, renja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Kecamatan Sungai Tabukan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Banua Hanyar, 19 Agustus 2024

CAMAT SUNGAI TABUKAN

FAHRIADI, S.Sos.,M.I.P

NIP. 198101517 200604 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Sungai Tabukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2023-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kecamatan Sungai Tabukan
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
e. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Surat Seketaris Daerah No : 000.7.2.1/389/BAPPEDALITBANG tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan Sungai Tabukan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka kerja dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Sungai Tabukan.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai tabukan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
15. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
16. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah*
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendegri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOMOR 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verefikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
26. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

29. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah kabupaten Hulu sungai utara tahun 2023 Nomor 12)
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 12 Tahun 2024 Tanggal 24 Juli Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, Penambahan dan Pengurangan Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Keacamatan Sungai Tabukan tahun 2024 adalah :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan**, yang diukur dengan Indikator Sasaran **"Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan"**. Pada tahun 2024 target Nilai SAKIP adalah 73 Point atau dengan Pridikat BB, Penilaian SAKIP 2024 oleh Inspektorat akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023 yang diterbitakan oleh Inspektorat melalui LHE pada Tanggal 28 Maret 2024 mendapatkan point 73,90 atau BB
2. **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan**, yang diukur dengan indikator sasaran **"Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan"**. Adapun nilai di tahun berjalan Periode 1 Januari-30 Juni tahun 2024 adalah 100 % . Indikator Partisipasi Masyarakat Diukur /Dinilai Berdasarkan Partisipasi Pemerintah Desa mengajukan usulan pembangaunan dalam musrenbang Kecamatan. Pada bulan Maret Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan Sungai Tabukan untuk perencanaan Tahun 2025. Pada kegiatan tersebut, 17 Desa yang ada di Kecamatan Sungai Tabukan telah beerpartisasi memberikan usulan desa masing-masing untuk RKPD Tahun 2025.
3. **Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan**, yang diukur dengan indikator sasaran "Persentasi penurunan konflik sosial dan keagamaan di kecamatan". Nilai Indikator ini pada periode 1 Jan-30 Juni 2024 atau Tahun berjalan belum ada realisasi, Karena tidak ada konflik dilaporkan ke kecamatan Sungai tabukan untuk dicatat dan di tangani.

B. Evaluasi Kinerja Program dan sasaran Progaram Kecamatan Sungai tabukan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan. Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 30 Juni 2024) Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program, Sasaran, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian 2024.

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN TW 1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		CAPAIAN	%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**46,81**	**%**	**46,81**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100	%	75	%	75,00
Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4	Dokumen	2	Dokumen	50,00
Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100	%	71,9	%	71,85
Terlaksanannya penyediaan gaji dan tunjangan asn yang tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	108	Orang	112	Orang	103,70
Terlaksanannya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd dan Laporan Koordinasi penyusunan Lapran Keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd	5	Laporan	2	Laporan	40,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100	%	50	%	50,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijaka Retribusi daerah	Jumlah laporan Hasil penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12	Laporan	6	Laporan	50,00
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pesentase SDM yang dapat Meningkatkan Kapasitas sesuai Tupoksi	100	%	0	%	0,00
Terlaksanannya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	Org	0	Org	0,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100	%	57,62	%	57,62
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai dengan DPA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Paket	6	Paket	60,00
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	1	Paket	50,00
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	22	Laporan	62,86
Pengadaan Barang milik daerah Penunjangng Urusan Urusan pemerintah Daerah	Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100	%	0	%	0,00
Pengadaan peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2	Unit	0	unit	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	50,00	%	50,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	6	Laporan	50,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	Laporan	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100	%	70	%	70,00
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya	2	Unit	2	Unit	100,00
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya yang siap digunakan untuk aktifitas pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara	5	Unit	2	Unit	40,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**50,00**	**%**	**50,00**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	100	%	50,00	%	12,50
Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	Laporan	6	Laporan	50,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada	100	%	50	%	50,00

	dikecamatan					
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	24	Laporan	12	Laporan	50,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentasi terlaksanaya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**41,67**		**41,67**
Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban Umum	Persentasi pelaksanaan monitoring pemilukada di kecamatan	100	%	41,67	%	41,67
Sinergiatas dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan	12	laporan	5	laporan	41,67
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**51,47**	**%**	**51,47**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	100	%	51,47	%	51,47
Terlaksanaya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	12	laporan	6	laporan	50,00
Terlaksanaya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sesuai ketentuan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	17	Dok	9	Dok	52,94
Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan	***Persentase Terlaksanaya Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan***	**100**	**%**	**50,00**	**%**	**50,00**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan desa	100	%	50,00	%	50,00
Terlaksanaya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai ketentuan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatn	12	Laporan	6	Laporan	50,00

C. Evaluasi Kinerja Keuangan Kecamatan Sungai Tabukan

Realisasi Keuangan atau serapan anggaran Kecamatan Sungai Tabukan sampai dengan TW II (per 30 Juni 2024) Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebegai benkut :

Tabel 2.3 tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan Kecamatan Sungai tabukan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN TW 1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU ANGGARAN	RELISASI S.D. TRIWULAN 2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**2.427.562.765**	629.516.544
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	8.600.000	1.530.000
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5.000.000	780.000
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.600.000	750.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	2.173.809.965	529.193.912
Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan asn yang tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	2.170.809.965	528.233.912
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd dan Laporan Koordinasi penyususnan Lapran Keuanagn	3.000.000	960.000

	bulanan / triwulanan/semesteran skpd		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	180.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakn Retribusi daerah	Jumlah laporan Hasil penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	8.000.000	180.000
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pesentase SDM yang dapat Meningkatkan Kapasitas sesuai Tupoksi	7.000.000	120.000
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7.000.000	120.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	57.989.000	23.659.000
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai dengan DPA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20.000.000	10.008.900
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.000.000	0
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.989.000	13.650.100
Pengadaan Barang milik daerah Penunjangng Urusan Urusan pemerintah Daerah	Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	23.585.000	0
Pengadaan peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	23.585.000	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	126.028.800	60.989.932
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	17.400.000	6.989.932

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108.628.800	54.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	22.550.000	13.843.700
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya	19.300.000	13.568.700
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya yang siap digunakan untuk aktifitas pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara	3.250.000	275.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik**	16.000.000	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	7.000.000	0
Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	7.000.000	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	9.000.000	0
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	9.000.000	0
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentasi terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	10.000.000	420.000
Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban Umum	Persentasi pelakasanaan monitoring pemilukada di kecamatan	10.000.000	420.000

Sinergisitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergisitas dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia , TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan	10.000.000	420.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	20.000.000	9.340.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	20.000.000	9.340.000
Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	12.000.000	3.140.000
Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sesuai ketentuan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8.000.000	6.200.000
Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan	***Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan***	40.000.000	3.980.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan desa	40.000.000	3.980.000
Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai ketentuan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatn	40.000.000	3.980.000
TOTAL		**2.513.562.765**	643.256.544

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta Realisasi Keuangan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian barang persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, diusulkan untuk penambahan anggaran pembelian peralatan rumah tangga
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,diusulkan penambahan anggaran untuk perjalanan dinas
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, diusulkan penambahan anggaran pada belanja peralatan dan mesin (belanja modal) Laptop, Printer, Kipas Angin Uap dan Tandon Air.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilakukan penambahan anggaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, untuk melakukan tambah daya, Beban Tarif PDAM dan PLN
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, diusulkan penambahan pada anggaran BBM
7. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan di lakukan pengurangan anggaran,berdasarkan evaluasi serapan semester 1 dan proyeksi Rencana Aksi sisa tahun anggaran
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan di lakukan pengurangan anggaran, berdasarkan evaluasi serapan semester 1 dan proyeksi Rencana Aksi sisa tahun anggaran
9. Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikaldi Wilayah Kecamatan di lakukan pengurangan anggaran,berdasarkan evaluasi serapan semester 1 dan proyeksi Rencana Aksi sisa tahun anggaran

Penambahan dan Pengurangan Anggaran dilakukan berdasarkan usulan Kecamatan Sungai Tabukan yang disetujui oleh TAPD Kabupaten Hulu Sungai

Utara dan Evaluasi Renja Semester 1. Adapun selisih anggaran kurang atau lebih dimasing-masing Program, Kegiatan dan sub kegiatan disamping berasal dari tambahan anggaran dari usulan diterima juga hasil dari pergeseran masing-masing sub kegiatan

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 atau Triwulan II) keseluruhan anggaran mumi Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. **2.513.562.765,-**

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan sebesar 52,56% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 50,00 % dan capain keuangan sebesar 25,33 % (DI Aplikasi SIPD RI sampai dengan 30 Juni 2024), sedangkan di Aplikasi Monev Bappedalitbang sebesar 25,59 %, selisih tersebut karena realisasi yang belum masuk proses GU, realisasi keuangan ini sangat rendah,karena selain Pagu anggaran Belanja Pegawai dihitung dengan jumlah pegawai ideal juga ada beberapa sub kegiatan atau kegiatan yang perlu dilakukan pergeseran.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 30 Juni 2024) **EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (KECAMATAN SUNGAI TABUKAN) TA. 2024**

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

7.01.0.00.0.00.09.0000 - KEC. SUNGAI TABUKAN

TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026/ Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
									I		II					
1	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	400%	46.000.000	99.07 %	4.090.000	100%	16.000.000	25%	0	50%	0	50%	0	50	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentasi tertib administrasi pelayanan masyarakat (Kec. Sei. Tabukan)	400%	24.000.000	100%	1.320.000	100%	8.000.000	25%	0	50%	0	50%	0	50	0
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	80 Laporan	24.000.000	24 Laporan	1.320.000	24 Laporan	8.000.000	6 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	50	0
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	0
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Kec. Sei. Tabukan)	400%	22.000.000	97.22 %	2.760.000	100%	7.000.000	25%	0	50%	0	50%	0	50	0
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	48 Laporan	22.000.000	22 Laporan	2.760.000	12 Laporan	7.000.000	3 Laporan	0	6 Laporan	0	6 Laporan	0	50	0

	Keterangan Lain yang Dimpahkan															
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	0
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	0
														Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi suksesnya kegiatan pemberdayaan desa	400%	23.800.000	100%	2.980.000	100%	40.000.000	25%	2.000.000	50%	3.980.000	50%	3.980.000	50	9,95
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksannya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	400%	23.800.000	100%	2.980.000	100%	40.000.000	25%	2.000.000	50%	3.980.000	50%	3.980.000	50	9,95
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	48 Laporan	23.800.000	12 Laporan	2.980.000	12 Laporan	40.000.000	3 Laporan	2.000.000	6 Laporan	3.980.000	6 Laporan	3.980.000	50	9,95
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	9,95
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	18,90
														Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentasi pelaksanaan monitoring penilaiada di kecamatan	400%	13.937.798	0%	0	100%	10.000.000	25%	120.000	41,67%	420.000	41,67%	420.000	41,67	4,2
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentasi terlaksannya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (kec. sel lafuka)	400%	13.937.798	0%	0	100%	10.000.000	25%	120.000	41,67%	420.000	41,67%	420.000	41,67	4,2
4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	36 Laporan	13.937.798	0 Laporan	0	12 Laporan	10.000.000	3 Laporan	120.000	5 Laporan	420.000	5 Laporan	420.000	41,67	4,2
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	41,67	4,2
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	83,34	8,4
														Predikat Kinerja (Kegiatan)	Tinggi	Sangat Rendah

4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentasi Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	400%	32.600.867	100%	4.066.000	100%	20.000.000	27,21%	8.360.000	51,47%	9.540.000	51,47%	9.540.000	51,47	46,7
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentasi terlaksanya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	400%	32.600.867	100%	4.066.000	100%	20.000.000	27,21%	8.360.000	51,47%	9.540.000	51,47%	9.540.000	51,47	46,7
3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlag dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1080 Dokumen	14.000.000	0 Dokumen	3.475.000	12 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	2.060.000	6 Dokumen	3.140.000	6 Dokumen	3.140.000	50	26,17
6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	56 Dokumen	18.500.867	17 Dokumen	1.480.000	17 Dokumen	8.000.000	5 Dokumen	6.200.000	9 Dokumen	6.200.000	9 Dokumen	6.200.000	52,94	77,50
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		51,47	51,03
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Sangat Rendah
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		102,94	93,40
														Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP meningkat	400%	7.024.531.989	69,82 %	881.083.491	100%	3.427.882.700	27,40%	306.869.301	40,61%	526.516.844	48,91%	626.516.84 4	48,91	36,93
	Pemicuan Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai Iduhan)	400%	24.900.000	100%	0	100%	9.000.000	37,50%	760.000	75%	1.530.000	75%	1.530.000	75	17,70
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	11.750.000	4 Dokumen	0	4 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	780.000	2 Dokumen	780.000	2 Dokumen	780.000	50	15,6
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 Laporan	13.150.000	4 Laporan	0	4 Laporan	3.600.000	1 Laporan	0	2 Laporan	750.000	2 Laporan	750.000	100	20,83
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		75	58,22
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Administrasi Keuangan	Persentasi Terselenggaranya	400%	6.572.906.000	94,6 %	800.236.805	100%	2.170.806.965	40,60%	166.811.527	71,88%	526.193.912	71,88%	526.193.91 2	71,88	24,24

	Perangkat Daerah	a.Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)														
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	79 Orang	6.564.809.000	171 Orang	799.715.805	186 Orang	3.170.809.965	48 Orang	185.991.327	112 Orang	528.233.812	112 Orang	528.233.812	100,7	24,33
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan hasilan bulanan /triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	48 Laporan	8.000.000	12 Laporan	530.000	5 Laporan	8.000.000	2 Laporan	120.000	3 Laporan	960.000	2 Laporan	960.000	40	32
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	71,85	28,17
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pemantauan Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	400%	7.500.000	0%	0	100%	6.000.000	25%	0	50%	180.000	50%	180.000	50	3,25
11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	3 Laporan	7.500.000	0 Laporan	0	12 Laporan	6.000.000	3 Laporan	0	6 Laporan	180.000	6 Laporan	180.000	50	3,25
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	3,25
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemantauan Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	400%	30.000.000	0%	0	100%	7.000.000	0%	120.000	0%	120.000	0%	120.000	0	1,71
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	5 Orang	30.000.000	0 Orang	0	1 Orang	7.000.000	0 Orang	120.000	0 Orang	120.000	0 Orang	120.000	0	1,71
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	0	1,71
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemantauan Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	400%	129.703.036	62,64 %	52.297.100	100%	57.969.000	16,67%	3.547.900	57,62%	23.659.000	57,62%	23.659.000	57,62	40,8
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Paket	43.800.000	5 Paket	33.480.000	10 Paket	20.000.000	3 Paket	2.547.900	6 Paket	10.008.900	6 Paket	10.008.900	60	50,04

14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	17 Paket	33.403.036	8 Paket	0	2 Paket	5.000.000	0 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	50	0
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan SKPDpenyelenggaraan rapat koordinasi	144 Laporan	52.500.000	8 Laporan	16.817.100	36 Laporan	32.589.000	7 Laporan	900.000	22 Laporan	13.650.100	22 Laporan	13.650.100	62,86	41,38
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		57,62	30,47
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Sangat Rendah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabuhan)	400%	27.500.000	0%	0	100%	23.585.000	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	26 Unit	27.500.000	0 Unit	0	2 Unit	23.585.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0	0
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabuhan)	400%	117.139.551	88,88 %	14.661.136	100%	126.026.800	29,17%	29.603.674	50%	60.889.932	50%	60.889.932	50	48,39
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Laporan	78.500.000	12 Laporan	13.133.138	12 Laporan	17.400.000	3 Laporan	2.603.674	6 Laporan	6.989.932	6 Laporan	6.989.932	50	40,17
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	36.839.551	8 Laporan	1.528.000	12 Laporan	108.626.800	4 Laporan	27.000.000	6 Laporan	54.000.000	6 Laporan	54.000.000	50	49,71
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	44,84
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabuhan)	400%	114[illegible]100	70%	13.868.850	100%	22.550.000	70%	6.706.400	70%	13.843.700	70%	13.843.700	70	61,39
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 Unit	95.482.100	4 Unit	13.868.850	2 Unit	10.000.000	2 Unit	8.431.400	2 Unit	13.868.700	2 Unit	13.868.700	100	70,3
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	19.[illegible]000	1 unit	50.000	5 unit	3.250.000	2 unit	275.000	2 unit	275.000	2 unit	275.000	40	8,46
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	70	39,39
														Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	93,62	49,17
														Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
														Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	47,99	17,36
														Predikat Kinerja (Program)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
														Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	63,66	28,89
														Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	Rendah	Sangat Rendah
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program	2.513.562.785		216.949.301		643.266.844		643.266,84 4		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Anggaran tersedia terlaksanakan perencanaan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Kurang nya jumlah ASN 2. Beberapa jabatan masih di isi oleh Pelaksana Tugas 3. Masih adanya ASN yang kurang Kompeten dalam bidang tugasnya"
Tindak Lanjut yang dperlukan dalam Triwulan berikutnya	"1. Penambahan jumlah ASN 2. Pelantikan pejabat definitif 3 Pelatihan dan bimbingan teknis"

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Seketaris Daerah No : 000.7.2.1/389/BAPPEDALITBANG tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Kecamatan Sungai Tabukan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2024. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Sungai Tabukan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN TW 1	INDIKATOR	TARGET SEBELUM		TARGET SESUDAH		KEUANGAN	
		NOMINAL	SATUAN	NOMINAL	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	100	%	100	%	**2.427.562.765**	**2.522.460.265**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**%**	**100**	**%**	**8.600.000**	**8.600.000**
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4	Dokumen	4	Dokumen	5.000.000	5.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4	Laporan	3.600.000	3.600.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**2.173.809.965**	**2.173.809.965**
Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan asn yang tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	108	Orang	192	ORG	2.170.809.965	2.170.809.965

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd dan Laporan Koordinasi penyusunan Lapran Keuanagn bulanan / triwulanan/semesteran skpd	5	Laporan	5	Laporan	3.000.000	3.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**8.000.000**	**7.500.000**
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakn Retribusi daerah	Jumlah laporan Hasil penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12	Laporan	3	Laporan	8.000.000	7.500.000
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Pesentase SDM yang dapat Meningkatkan Kapasitas sesuai Tupoksi**	**100**	**%**	**100**	**%**	**7.000.000**	**5.400.000**
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	Org	1	Org	7.000.000	5.400.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**%**	**100**	**%**	**57.989.000**	**83.790.600**
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai dengan DPA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Paket	10	Paket	20.000.000	21.291.780
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	5.000.000	8.874.820
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	35	Laporan	32.989.000	53.624.000
Pengadaan Barang milik daerah Penunjangng Urusan Urusan pemerintah Daerah	**Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**23.585.000**	**67.457.500**
Pengadaan peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2	unit	14	UNIT	23.585.000	67.457.500

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**126.028.800**	**145.702.200**
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	36	Laporan	17.400.000	**Rp 37.073.400**
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	108.628.800	108.628.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**22.550.000**	**30.200.000**
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya	2	Unit	2	Unit	19.300.000	**26.950.000**
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya yang siap digunakan untuk aktifitas pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara	5	Unit	5	Unit	3.250.000	3.250.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik**	100	%	100	%	**Rp 16.000.000**	**Rp 7.500.000**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	100	%	100	%	**Rp 7.000.000**	**Rp 3.000.000**
Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	Laporan	12	Laporan	7.000.000	**Rp 3.000.000**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit	100	%	100	%	**Rp 9.000.000**	**Rp 4.500.000**

	kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan						
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan kotentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	24	Laporan	24	Laporan	9.000.000	**Rp 4.500.000**
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentasi terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	%	100	%	**Rp 10.000.000**	**Rp 4.500.000**
Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban Umum	Persentasi pelaksanaan monitoring pemilukada di kecamatan	100	%	100	%	**Rp 10.000.000**	**Rp 4.500.000**
Sinergisitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan	12	laporan	12	laporan	10.000.000	**Rp 4.500.000**
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Rp 20.000.000**	**Rp 27.650.000**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	100	%	100	%	**Rp 20.000.000**	**Rp 27.650.000**
Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	12	laporan	275	DOKUMEN	12.000.000	**Rp 21.450.000**
Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sesuai ketentuan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	17	Dok	17	Dok	8.000.000	**Rp 6.200.000**
Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan	***Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan***	100	%	100	%	**Rp 40.000.000**	**Rp 40.000.000**

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan desa	100	%	100	%	**Rp 40.000.000**	**Rp 40.000.000**
Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai ketentuan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatn	12	Laporan	12	Laporan	**Rp 40.000.000**	**Rp 40.000.000**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Sungai Tabukan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD RI yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan **pagu indikatif sebesar Rp. 88.547.500,-,- atau 3,52 %** dari anggaran semula murni Rp.**2.513.562.765,-** menjadi anggaran perubahan Rp.**2.602.110.265,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) dan DPA Perubahan (DPPA) Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024.

Banua Hanyar, 19 Agustus 2024

CAMAT

SUNGAI TABUKAN

FAHRIADI, S.Sos.,M.I.P

NIP.19810151 200604 1 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PAMINGGIR TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN PAMINGGIR

2024

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan asumsi-asumsi makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang antara lain adanya SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan kembali untuk pembangunan daerah, adanya DAU tertentu, dana perimbangan (dana alokasi khusus) yang belum tertampung dalam APBD murni, adanya hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan adanya penajaman prioritas daerah dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;

b. bahwa Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);

32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2024.

(2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
   a. pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
   b. pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
   a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
   b. target sasaran pembangunan daerah;
   c. prioritas pembangunan daerah; dan
   d. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 12.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD 11

3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya 11

3.2. Pergeseran dan Penambahan Anggaran Kegiatan 13

BAB IV PENUTUP 21

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Paminggir Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II 9

Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Kegiatan Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 telah berjalan dan tentunya terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dilakukan penyesuaian perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu untuk menyesuaikan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan baik dari indikator kegiatan dan target kinerja serta perlu adanya pengurangan dan penambahan pagu anggaran kegiatan sebagai akibat perubahan target kinerja. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD berperan penting dalam setiap kinerja dalam suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dimulai dari usulan oleh setiap Seksi dan dari Sekretariat selaku Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan (PPTK), yang menganalisa realisasi dan rencana kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD tahun berjalan berdasarkan dan mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Prinsip-prinsip penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada RENSTRA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024;
b. Rumusan program dan kegiatan di dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu yang diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
c. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar merupakan pergeseran pagu anggaran kegiatan yang kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan pada kegiatan yang lain karena masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan sampai akhir tahun 2024 serta lebih optimal kemanfaatannya;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran dan total kebutuhan dana.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tentunya tidak terlepas dari landasan hukum dari Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 serta keberadaan organisasi kecamatan dan proses perencanaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun **Maksud** penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2024, selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan **Tujuan** dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS P tahun 2024 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2024.
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2024.
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2024 disusun berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 terdiri dari 4 bab, yang meliputi antara lain:

1) Bab I Pendahuluan.
2) Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.
3) Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan RENJA SKPD .
4) Bab IV Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengendalian ini selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang menganalisa gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Terkait dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, maka salah satu yang harus dipedomani adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terhadap Rencana Kerja SKPD yang tertuang dalam APBD tahun 2024 sampai berakhirnya Triwulan II memperlihatkan bahwa perkembangan pada aspek kinerja rata-rata seluruh SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 47,00%, sedangkan dalam hal penyerapan anggaran sudah mencapai 46,34%. Jumlah Belanja yang dialokasikan terhadap SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka melaksanakan berbagai program prioritas daerah serta pelaksanaan urusan baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang SKPD secara keseluruhan berjumlah Rp. 2.181.541.570,- dan sampai berakhirnya triwulan II atau semester I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.010.902.049,- atau 46,34%.

Secara ringkas realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini dapat disajikan pada matriks berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Paminggir Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

NO	Program/Kegiatan	Target Anggaran SKPD Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran Tahun2024 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 s.d. TW II (%)	
		Rp	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**103.920.000,-**	**50.990.000,-**	**49,07**	**49,07**
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	72.000.000,-	36.000.000,-	50,00	50,00
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.800.000,-	8.240.000,-	46,29	46,29
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.120.000,-	6.750.000,-	47,80	47,80
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**20.600.000,-**	**5.260.000,-**	**25,63**	**25,63**
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.600.000,-	5.260.000,-	25,63	25,63
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**13.200.000,-**	**0**	0	0
	Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000,-	0	0	0
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**34.740.000,-**	**23.850.000,-**	**68,65**	**68,65**
	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.990.000,-	9.660.000,-	96,77	96,77
	Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.750.000,-	14.190.000,-	57,33	57,33

5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.009.081.570,-**	**1.002.724.533,-**	**49,91**	**49,91**
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,-	10.705.850,-	89,22	89,22
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.899.596.720,-	938.297.783,-	49,39	49,39
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.790.000,-	5.610.000,-	72,02	72,02
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.003.600,-	7.560.000,-	94,46	94,46
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,-	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.673.400,-	1.050.000,-	62,75	62,75
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.650.000,-	825.000,-	50,00	50,00
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.499.600,-	420.000,-	12,00	12,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.370.000,-	18.180.000,-	77,79	77,79
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.669.000,-	2.393.400,-	31,21	31,21
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.864.250,-	7.260.000,-	66,82	66,82
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.965.000,-	10.422.500,-	80,39	80,39
Jumlah		**2.181.544.570,-**	**1.010.902.049,-**	**47,00**	**46,34**

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD KECAMATAN PAMINGGIR TAHUN 2024

Realisasi dari pelaksanaan program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analis terhadap beberapa program kerja dengan realisasi pencapaian targetnya, apabila kegiatan telah dilaksanakan dan pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhya, atau kemungkinan dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target atau penyerapannya.

Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu dilakukan perubahan dan pergeseran anggaran dengan mengambilkan dari pagu anggaran program kerja yang lain yang sudah optimal kerja fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program atau kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran.

3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagian besar merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dan telah disesuaikan dengan RENSTRA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun berjalan, yaitu :

1. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

   Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha,
   2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan,
   3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

4. Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa,
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

5. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
    3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
    4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
    2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

3.2. Pergeseran dan Penambahan Anggaran Kegiatan

Sehubungan adanya penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kepada SKPD dapat melakukan pergeseran/penambahan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka SPKD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan permohonan untuk melakukan pergeseran dan diberikan penambahan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.

125.740.800,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Adapun yang mendasari dilakukannya penambahan anggaran 2024 yang sangat menonjol dan prioritas dalam kelancaran tugas dan fungsi terdapat pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,** sehubungan untuk kelancaran tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran dan Kepala Subbag Program dan Data dalam pekerjannya menggunakan berbagai aplikasi, maka diperlukan ***Laktop*** yang mampu membuka/masuk menggunakan aplikasi tersebut, karena laktop yang digunakan saat ini kondisinya kurang baik dengan ditunjang ketersediaan perangkat jaringan ***Internet (Starling)*** sesuai kondisi daerah yang tidak dapat memakai jaringan wifi/telkom. Selain itu guna kelancaran kegiatan pertemuan/sosialisasi/ penyuluhan dan lain-lain diperlukan ***Proyektor*** serta untuk keamanan kantor berupa ***CCTV.***
   b. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, sehubungan diselenggarakannya kegiatan berupa pertemuan yang telah diikuti di tingkat provinsi dan kabupaten yang sampai saat ini belum dapat dibiaya karena kekurangan anggaran yang tersedia juga menghadapi Pemilu Kepala Daerah, maka diperlukan biaya perjalanan dinas yang cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan.
   a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**, sehubungan seringnya mobilitas dalam pelaksanaan tugas penggunaan mobil dan speed dinas, maka diperlukan

penambahan BBM dan pembayaran pajak mobil dinas roda 4 yang dimiliki.

Berdasarkan permohonan dan alasan yang disampaikan serta pertimbangan dan persetujuan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka telah disetujui dan diberikan penambahan anggaran SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 sebesar Rp 90.323.800,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang semula anggaran murni RENJA Tahun 2024 sebesar Rp. 2.181.541.570,- dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 menjadi Rp. 2.271.774.370,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)

Beberapa kegiatan dan sub kegiatan mengalami pengurangan anggaran sehubungan untuk efisiensi penggunaan yang sisa anggaran tersebut dilakukan pergeseran untuk kegiatan dan sub kegiatan lainnya guna dalam pelaksanaan dan penggunaan mencapai realisasi yang diharapkan selain itu agar penyerapan anggaran lebih maksimal, sedangkan dari sisi lain ada kegiatan dan sub kegiatan mengalami kenaikan atau penambahan anggaran tergantung dari kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Pergeseran dan perubahan program kegiatan secara rinci atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Kegiatan Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Utara
Perangkat Daerah : Kecamatan Paminggir

NO	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (*OUTCOME*)/ KEGIATAN (*OUTPUT*)	INDIKATOR		TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		SEMULA	MENJADI	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100%**	**100%**	**Rp 103.920.000**	**Rp 103.920.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100%	100%	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	100%	Rp 17.800.000	Rp 17.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	Rp 14.120.000	Rp 14.120.000	

2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**100%**	**100%**	**Rp 20.600.000**	**Rp 14.850.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	Rp 20.600.000	Rp 14.850.000	Dilakukan pergeseran untuk kegiatan lainnya
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**100%**	**100%**	**Rp 13.200.000**	**Rp 13.200.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu Kada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilu Kada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilu Kada di Kecamatan	100%	100%	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100%**	**100%**	**Rp 34.740.000**	**Rp 29.940.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	Rp 9.990.000	Rp 9.990.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	100%	Rp 24.750.000	Rp 19.950.000	Sisa anggaran dilakukan pergeseran untuk kegiatan lainnya

3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100%**	**100%**	**Rp2.099.081.570**	**Rp 2.199.864.370**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	Rp1.899.595.720	Rp 1.899.016.456	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	Rp 7.790.000	Rp 7.380.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	100%	100%	Rp 8.003.600	Rp 7.700.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	100%	100%	Rp 20.000.000	Rp -	Dilakukan pergeseran untuk kegiatan lainnya

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	Rp 1.873.400	Rp 1.873.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	Rp 1.550.000	Rp 54.780.000	Adanya Penambahan anggaran untuk belanja peralatan kantor lainnya
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	Rp 3.499.600	Rp 486.000	Dilakukan pergeseran untuk kegiatan lainnya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	Rp 23.370.000	Rp 85.938.000	Adanya Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	Rp 7.869.000	Rp 5.851.254	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	Rp 10.884.250	Rp 12.704.250	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggarenya Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	Rp 12.965.000	Rp 22.565.000	Adanya Penambahan Belanja BBM dan Pembayaran Pajak serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah								**Rp2.181.541.570**	**Rp 2.271.774.370**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sesuai ketetapan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi salah satu dokumen rencana yang digunakan sebagai bahan rujukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama legislatif daerah menjadi APBD Perubahan Tahun 2024 yang akhirnya dituangkan menjadi DPPA SKPD Kecamatan Paminggir Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini disusun guna proses selanjutnya. Dan dengan mengharap Ridha dari Allah Yang Maha Kuasa, semoga perubahan rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan untuk membangun daaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Paminggir, 26 Agustus 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

CAMAT PAMINGGIR,

RULLY LESMANA, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19841226 200312 1 003

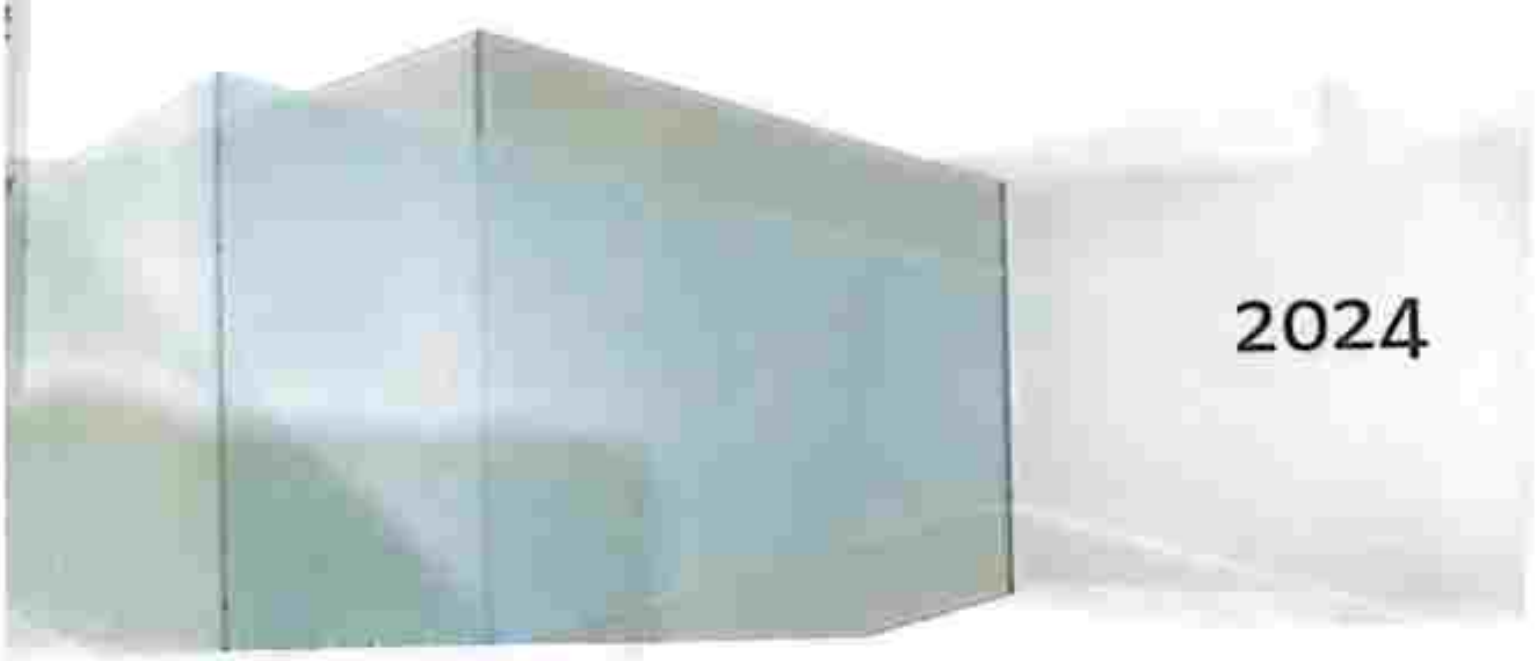
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
2. Untuk mengecek keaslian dokumen ini silakan melakukan pemindaian menggunakan smartphone

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH



2024

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan asumsi-asumsi makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang antara lain adanya SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan kembali untuk pembangunan daerah, adanya DAU tertentu, dana perimbangan (dana alokasi khusus) yang belum tertampung dalam APBD murni, adanya hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan adanya penajaman prioritas daerah dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;

b. bahwa Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang *Nomor 1 Tahun 2004* tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6323);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);

32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2024.

(2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
   a. pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
   b. pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
   a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
   b. target sasaran pembangunan daerah;
   c. prioritas pembangunan daerah; dan
   d. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

M. YULLESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 12.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD 11

3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya 11

3.2. Pergeseran dan Penambahan Anggaran Kegiatan 13

BAB IV PENUTUP 21

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II 9

Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Kegiatan Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 16

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 telah berjalan dengan baik walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dilakukan penyesuaian perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu untuk penyesuaian tersebut, maka perlu dilakukan perubahan baik dari indikator kegiatan dan target kinerja serta perlu adanya pengurangan dan penambahan pagu anggaran kegiatan sebagai akibat perubahan target kinerja. Dimana dalam hal ini Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD berperan penting dalam setiap kinerja dalam suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dimulai dari usulan oleh setiap Seksi dan dari Sekretariat selaku Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan (PPTK), yang menganalisis realisasi dan rencana kerja SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD tahun berjalan yang berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Prinsip-prinsip penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Berpedoman pada RENSTRA SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024;
b. Rumusan program dan kegiatan di dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu yang diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
c. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar merupakan pergeseran pagu anggaran kegiatan yang kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan pada kegiatan yang lain karena masih memerlukan anggaan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan sampai akhir tahun 2024;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran dan total kebutuhan dana.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak terlepas dari landasan hukum dari Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 serta SKPD Kecamatan Amuntai Tengah dan proses perencanaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dipindai dengan CamScanner

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Dipindai dengan CamScanner

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2024, selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS P tahun 2024 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2024.
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2024.
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2024 disusun berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 terdiri dari 4 bab, yang meliputi antara lain:

1) Bab I Pendahuluan.
2) Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.
3) Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan RENJA SKPD .
4) Bab IV Penutup.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah diletapkan. Hasil pengendalian ini selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang menganalisa gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Terkait dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, maka salah satu yang harus dipedomani adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Secara ringkas realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini dapat disajikan pada matriks berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

NO	Program/Kegiatan	Target Anggaran SKPD Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran Tahun2024 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 s.d. TW II (%)	
		Rp	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**157.200.000,-**	**72.000.000,-**	**45,80**	**45,80**
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	56.050.000,-	36.000.000,-	64,22	64,22
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	49.250.000,-	18.000.000,-	36,54	36,54
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51.900.000,-	18.000.000,-	34,68	34,68
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**62.442.850,-**	**0**	**0**	**0**
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.442.850,-	0	0	0
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**14.997.000,-**	**0**	0	0
	Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.997.000,-	0	0	0
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**23.918.800,-**	**15.910.000,-**	**66,52**	**66,52**
	Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.918.800,-	15.910.000,-	66,52	66,52

Dipindai dengan CamScanner

5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**6.343.875.157,-**	**2.502.061.964,-**	**39,45**	**39,45**
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.118.400,-	18.000.000,-	48,49	48,49
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.033.224.807,-	2.433.858.210,-	40,34	40,34
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.375.000,-	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.769.400,-	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.951.200,-	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.265.200,-	250.000,-	0	0
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.790.000,-	5.610.000,-	72,02	72,02
	Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	20.986.150,-	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	19,425.000-	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.668.000,-	11.296.182,-	44,01	44,01
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,-	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.790.000,-	7.884.000,-	34,59	34,59
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000,-	0	0	0
	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.987.000,-	25.163.572,-	19,36	19,36
Jumlah		**6.602.433.807,-**	**2.589.971.964,-**	**39,23**	**39,23**

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD KECAMATAN AMUNTAI TENGAH TAHUN 2024

Realisasi dari pelaksanaan program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja dengan realisasi pencapaian targetnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka agar mengoptimalkan dalam pencapaian target perlu dilakukan perubahan dan pergeseran anggaran. Disamping itu, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program atau kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya perubahan anggaran yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.

3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagian besar merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dan telah disesuaikan dengan RENSTRA SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun berjalan, yaitu :

1. Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah

   Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan : 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dipindai dengan CamScanner

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan/Material
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dipindai dengan CamScanner

	Program :	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan :	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	Program :	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Kegiatan :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Sub Kegiatan :	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	Program :	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Kegiatan :	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan :	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4.	Program :	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Kegiatan :	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Dipindai dengan CamScanner

5. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dii Wilayah Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

3.2. Pergeseran dan Penambahan Anggaran Kegiatan

Sehubungan adanya penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kepada SKPD dapat melakukan pergeseran/penambahan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka SPKD Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan permohonan untuk melakukan pergeseran anggaran Tahun 2024.

Pergeseran dan perubahan program kegiatan secara terperinci Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel 3.1 berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sesuai ketetapan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi salah satu dokumen rencana yang digunakan sebagai bahan rujukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama legislatif daerah menjadi APBD Perubahan Tahun 2024 yang akhirnya dituangkan menjadi DPPA SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini disusun guna proses selanjutnya. Dan dengan mengharap Ridha dari Allah Yang Maha Kuasa, semoga perubahan rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan membangun daaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Amuntai, September 2024

CAMAT AMUNTAI TENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

BUDIASTENDRA, S.IP.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19870309 200701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/345/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan ketentuan Pasal 368 bahwa Perubahan Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai Pedoman Perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

KEEMPAT : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah wajib
a. melaksanakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja-Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
3. Perangkat Daerah lainnya.

DAFTAR ISI

1	Halaman Depan	i
2	Daftar Isi	ii
3	Daftar Tabel	iii
4	Daftar Lampiran	iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024**	**10**
2.1	Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	10
2.2	Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	14
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	17
2.4	Telahaan terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan RKPD	18
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH**	**27**
3.1	Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
3.2	Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	27
3.3	Kesesuaian Antara Rumusan Program/Kegiatan dengan Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	31
3.4	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	31
BAB IV	**PENUTUP**	**32**
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

2.1.2	Capaian Kinerja Strategis Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026	13
2.2.1	Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak Lanjuti Tahun 2024	14
2.2.2	Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Tahun 2024	15
2.2.3	Capaian Kinerja Nilai LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024	16
2.2.4	Pelaksanaan Anggaran Pengarustamaan Gender Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	16
2.	Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	20
3.2.1	Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	28

DAFTAR LAMPIRAN

1 Formulir Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara -Inspektorat Daerah Triwulan II

2 Perubahan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor:000.7.2.4/314/Bappedalitbang Perihal Perubahan RKPD Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten untuk Urusan Pengawasan Unsur Pemerintahan agar dapat mencapai target yang direncanakan, dan dimasukkan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini bersifat pergeseraan anggaran dan penambahan pagu anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Dalam menyikapi hal tersebut, maka diperlukan langkah-angkah pengutamaan penggunaan alokasi sebagai upaya penajaman guna pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan dan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, dan analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5), akan tetapi penjabarannya masih mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Inspektorat.

Adapun kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas persetujuan bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara eksternal merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang oleh dijabarkan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Reformasi Birokrasi dan PAN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lebih lanjut diadopsi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 secara berjenjang, kemudian secara internal mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Tahun 2024 maupun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta berupaya untuk menelaah dan memperhatikan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu berkembang dan diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan melalui Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara "Terwujudnya Penyelengaraan Pemerintahan yang Baik", dengan Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemeirntah Daerah" dan "Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN".

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 7);

29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28).

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 12);

31. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 100.3.3.2/ /KUM/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah, dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
2. Sebagai upaya mengarahkan seluruh pelaksanaan, kebijakan, program serta kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pengawasan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan alat pengendali dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, Proses penyusunan, keterkaitan antara perubahan Renja dengan dokumen Perubahan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat pejelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang sistematika penulisan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara

Memuat hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, tantangan dan peluang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta tingkat kinerja Pelayanan SKPD.

2.4 Telaahan terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan proses, dan temuan-temuan setelah proses tersebut serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan. kesesuaian rumusan program/kegiatan dengan rancangan awal Perubahan RKPD serta rumusan rencana program dan kegiatan pendanaan perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Evaluasi Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (dapat dilihat pada Tabel 2.1.1). Secara umum dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara dalam periode tahun 2023 terdapat 1 (satu) indikator yang targetnya tidak tercapai, yaitu Indeks/Level Kapabilitas APIP, dimana ditargetkan Tahun 2023 pada Level 3, sedangkan realisasinya hanya pada Level 2.

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: PE.09.03/LHP-309/PW16/6/2023 tanggal 30 November 2023, berada pada level 2 dengan skor 2,81. Target ini tidak tercapai karena pada 4 (empat) elemen dengan *Area of Improvement* (AoI) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan yakni:

1. Pengelolaan SDM pada Pengembangan SDM Profesional adalah:
   - SDM yang memiliki sertifikasi professional dalam bidang pengelolaan risiko khususnya risiko fraud **belum tersedia**;
   - Anggaran pengembangan SDM **belum mengakomodasi** sertifikasi non JFA/sertifikasi professional.
2. Praktik Profesional pada Perencanaan Pengawasan adalah:
   - Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko **belum dilakukan;**
   - Risk Register OPD **belum dibuat;**
   - Auditable unit yang dihasilkan dari perencanaan pengawasan **bukan merupakan** program strategis dan lintas sektoral;
   - Pemahaman manajemen risiko oleh OPD **kurang**.
3. Struktur & Tata Kelola pada Mekanisme Pendanaan adalah:

- Anggaran untuk mendanai kegiatan pengawasan diluar gaji dan tunjangan **belum memenuhi** persyaratan 0,75% dari APBD.

4. Peran & Layanan.
   a. Audit Ketaatan yaitu:
      - Audit Ketaatan **belum dilakukan** pada lingkup program/fungsi prioritas dan memiliki risiko tinggi. seperti PBJ. perijinan. promosi dan mutasi.
      - Dokumentasi atas monitoring tindak lanjut **tidak sepenuhnya** tertib.
   b. Audit Kinerja
      - Audit Kinerja **belum dilakukan** pada program strategis yang menjadi prioritas dalam peningkatan ekonomi daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah:
      - Audit kinerja **belum dilakukan** terhadap program lintas sektoral.

Tabel 2.1.2 : Capaian Kinerja Strategis Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 -2026

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (T-C.30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIP A			45%	55%	60%	65%	51,28%		60%	65%	
2	Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)			≤15	≤14	≤13	≤12	10		≤13	≤12	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan Status Selesai			75%	80%	82%	85%	88,50%		82%	85%	
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dengan Status Selesai			60%	62%	65%	67%	96,34%		65%	67%	
5	Indeks/Level Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	
6	Indeks/Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2		Level 3	Level 3	Masih belum sesuai pada 4 Area of Improvement (AoI)

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdapat 2 (dua) sub kegiatan. Indikator capaian kinerja program penyelenggaraan Pengawasan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak Lanjuti. Adapun capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak Lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak Lanjuti Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Triwulan II	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak Lanjuti	72 %	40%	55.56%

Dari tabel diatas terlihat bahwa Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak Lanjuti sebesar 40%, hal ini karena hasil tindak lanjut temuan belum semua ditindak lanjuti oleh obrik.

2.2.2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan melalui 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan terdapat 1 sub kegiatan, dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi terdapat 3 Sub Kegiatan. Indikator Capaian Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP, capaiannya dapat dilihat pada tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2 Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Triwulan II	%
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	70 %	0 %	0%

Dilihat dari tabel Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP masih belum dilakukan, karena ada kendala pada aplikasi SPIP terintegrasi, sehingga jadwal penilaian SPIP dimulai pada Bulan Agustus atau Triwulan III.

2.2.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Inspektorat Daerah dilaksanakan melalui 7 Kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat 2 sub kegiatan, Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terapat 1 Sub Kegiatan, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 Sub Kegiatan, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 Sub Kegiatan Indikator Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Nilai LAKIP Inspektorat Daerah, capaiannnya dapat dilihat pada tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3 Capaian Kinerja Nilai LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Triwulan II	%
Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	83.15	82.85	99.64

Dilihat dari tabel diatas, Nilai LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar 82.85 point atau capaian sebesar 99.64%.

2.2.4 Pelaksanaan Anggaran Pengarustamaan Gender

Tabel 2.2.4 Pelaksanaan Anggaran Pengarustamaan Gender Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	
				Pagu Anggaran	Pagu Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.725.000	20.058.930
			2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2.703.712.000	775.816.514
2	Penyelenggaraan Pengawasan	2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Reviu Laporan Kinerja	110.334.400	39.515.000
			2. Reviu Laporan Keuangan	771.436.400	123.850.000
JUMLAH	2	2	4	3.735.207.800	959.240.444

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pelaksanaan anggaran pengarustamaan gender di Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari 2 Program, 2 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.735.207.800,- baru terealisasi sebesar Rp. 959.240.444,- atau sekitar 25,68%.

2.2.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut.

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu meningkatkan reviu laporan keuangan, pelaksanaan pencegahan dan penanganan pungutan liar, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu melalui pembuatan jumlah SOP, PKPT dan penilaian resiko yang dibuat dan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan target.
c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelaporan, mempercepat proses pengadaan peralatan kantor, serta pelaksanaan bimbingan teknis, workshop dan PKS.

Adapun analisis hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (IRB) dan tata kelola kepemerintahan serta pencegahan korupsi;
2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih;
3) Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
4) Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan (auditan), namun dalam pelaksanaannya cenderung terhadap aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai hasil (*outcome*) yang ingin dicapai oleh unit organisasi/SKPD;

5) Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukan kenaikan yang signifikan terutama terkait adanya pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD);
6) Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah;
7) Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD;
8) Jumlah dan komposisi aparatur pengawas antara JF Auditor dan JF PPUPD belum berimbang;
9) Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah;
10) Sarana dan sarana penunjang kegiatan opersional pengawasan masih sangat terbatas terutama sarana mobilitas darat berupa kendaraan roda 2 dan mobil operasional pemeriksaan/monitoring ke lapangan.

2.4. Telahaan terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan masih mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta dengan mengamati perkembangang yang terjadi baik ditingkat regional, nasional dan internasional. Arah Kebijakan RKPD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dengan Inspektorat Daerah adalah "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik".

Guna mencapai Tujuan Pembangunan Daerah, rumusan umum upaya mewujudkan tujuan yang berkaitan dengan Inspektorat adalah " Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik". Melalui Sasaran pembangunan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah melalui Strategi pada Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Arah Kebijakannya adalah Penguatan Kualitas Sistem Pengawasan Daerah.

2. Terwujudnya Pemerintah yang Bebas KKN, melalui Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dengan Arah Kebijakannya adalah Peningkatan Komptensi Aparatur.

Tema Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan dengan Didukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan fokus Prioritas dan Sasaran yang sesuai dengan Inspektorat Daerah adalah Prioritas Daerah 3 yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif". Program yang sesuai dan mendukung sasaran dan prioritas pada Inspektorat Daerah adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Indikator capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan program prioritas daerah dan sasarannya yang berkaitan dengan Inspektorat daerah yaitu Nilai SAKIP Kabupaten [B (66)], Opini BPK [WTP], dan Persentase Pencegahan Korupsi (MCP/KORSUPGAH) [85].

Adapun rekapitulasi hasil reviu terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Rancangan Awal PRKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**HSU**	**Nilai LAKIP Inspektorat Daerah**	**83,15**	**15.062.279.080**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**HSU**	**Nilai LAKIP Inspektorat Daerah**	**82,75**	**16.491.543.480**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**HSU**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**15**	**56.651.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**HSU**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**15**	**56.651.000**	
	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	9	28.719.800	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perancanaan perangkat daerah (dokumen)	9	28.719.800	
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	27.931.200	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	27.931.200	Pergeseran anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana APIP
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)**	**100**	**9.786.023.080**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)**	**100**	**9.773.296.480**	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	9.757.023.080	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	9.757.046.880	

No	Rancangan Awal PRKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	47	29.000.000	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	47	16.349.600	Pergeseran anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana APIP
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang diselesaikan (%)**	**100**	**9.968.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang diselesaikan (%)**	**100**	**9.968.000**	
	(Sub Kegiatan) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	7	9.968.000	(Sub Kegiatan) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	7	9.968.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)**	**8200%**	**2.883.437.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)**	**90**	**2.491.777.000**	
	(Sub Kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	148.723.000	(Sub Kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	209.740.000	Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Diklat Penjenjangan bagi JF PPUPD yang Baru
	(Sub Kegiatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45	2.709.712.000	(Sub Kegiatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45	2.272.057.000	Pergeseran anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana APIP

No	Rancangan Awal PRKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)**	**100**	**1.432.642.450**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)**	**100**	**3.204.431.450**	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	66	496.944.450	(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	66	1.944.280.450	Penambahan Anggaran untuk operasional Sarana dan Prasarana JPT dan Fasilitas Ruang Rapat
	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	86	935.698.000	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	86	1.260.151.000	Penambahan Anggaran untuk Jamuan Tamu, Rapat Koordinasi dan Konsultasi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)**	**100**	**348.653.600**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)**	**100**	**350.525.600**	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	72	121.759.600	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	72	89.081.600	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	136.570.000	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	156.120.000	Penambahan Anggaran untuk penyediaan listrik dan air

No	Rancangan Awal PRKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	90.924.000	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	105.324.000	Penambahan Jasa Pengamanan dan Jasa Petugas Kebersihan Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HSU	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)**	100	574.913.950	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	HSU	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)**	100	614.905.950	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48	100.100.000	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48	138.050.000	Penambahan biaya pemeliharaan mobil dinas (84) 3 Unit dan BBM Operasional pelaksanaan Pengawasan
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	435.673.950	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	437.713.950	Belanja Modal Rehab Gedung Kantor (PL)
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	35	39.140.000	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	35	39.140.000	
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	HSU	**Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)**	80	5.231.443.000	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	HSU	**Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)**	72	5.836.678.600	

No	Rancangan Awal PRKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**HSU**	**Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)**	**80**	**4.201.622.800**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**HSU**	**Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)**	**85**	**3.137.163.400**	
	(Sub Kegiatan) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	111.750.000	(Sub Kegiatan) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	124.500.000	Penambahan Anggaran pengawasan untuk 6 orang PPUPD yang baru
	(Sub Kegiatan) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	8	795.405.000	(Sub Kegiatan) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	8	618.825.000	
	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	4	110.934.400	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	4	90.000.000	
	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	26	771.436.400	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	26	601.178.400	Pergeseran Anggaran untuk pemenuhan Bimbingan Teknis APIP
	(Sub Kegiatan) Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	16	379.352.000	(Sub Kegiatan) Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	16	273.350.000	
	(Sub Kegiatan) Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	860.000.000	(Sub Kegiatan) Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	860.000.000	

No	Rancangan Awal PRKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	27	1.179.345.000	(Sub Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	27	969.310.000	Penambahan Anggaran untuk operasional Sarana dan Prasarana IFT
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**HSU**	**Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)**	**100**	**1.029.820.200**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**HSU**	**Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)**	**100**	**699.515.200**	
	(Sub Kegiatan) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12	471.260.000	(Sub Kegiatan) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12	240.810.000	Penambahan Anggaran untuk operasional Sarana dan Prasarana IFT
	(Sub Kegiatan) Pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	558.560.200	(Sub Kegiatan) Pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	458.705.200	
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**HSU**	**Persentase Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%)**	**100**	**943.242.000**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**HSU**	**Persentase Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%)**	**100**	**908.742.000**	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)**	**100**	**14.170.000**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)**	**100**	**14.170.000**	

No	Rancangan Awal PIKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Berkas)	2	14.170.000	(Sub Kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Berkas)	2	14.170.000	
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)**	**100**	**929.072.000**	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)**	**100**	**894.572.000**	
	(Sub Kegiatan) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	11	358.320.000	(Sub Kegiatan) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	11	407.520.000	Penambahan Anggaran pengawasan untuk 6 orang PPUPD yang baru
	(Sub Kegiatan) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	10	110.900.000	(Sub Kegiatan) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	10	61.650.000	Penambahan Anggaran untuk operasional Sarana dan Prasarana JFT
	(Sub Kegiatan) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	499.852.000	(Sub Kegiatan) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	10	426.402.000	
JUMLAH					**21.236.964.080**					**21.236.964.080**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Faktor -Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menjawab permsalahan dan isu-isu strategis;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengawasan
5. Peningkatan Kualitas Evaluasi Kinerja Pengawasan

3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti
	1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes
	1.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	1.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.1.3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
	1.1.4 Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan
	1.1.5 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
	1.1.6 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
	1.1.7 Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaaan Kasus yang Ditindaklanjuti
	1.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
	1.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP
	2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan
	2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi. Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
	2.2 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi
	2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
	2.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	2.2.3 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Unsur Non Urusan (Rutin)	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan ASN
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang Diselesaikan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
	1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang dapat Meningkatkan Kapasitas sesuai Tupoksi
	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dang Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan
	1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	1.5.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD
	1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak jalan
	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaab dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
	1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

3.3 Kesesuaian Antara Rumusan Program/Kegiatan dengan Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) apabila dilihat dari rumusan yang ada terjadi kesesuaian antara program dan kegiatan yang digunakan oleh Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di mana dalam rancangan awal Perubahan RKPD terdapat 2 (dua) Program urusan bidang Pengawasan dan 1 (satu) program non urusan (rutin) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada tahun anggaran 2024. Pada perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan 2 (dua) Program urusan bidang Pengawasan dan 1 (satu) program non urusan (rutin) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.4 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten. Guna pencapaian indikator kinerja dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ditunjang 3 Program, 11 Kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan yang bersumber pendanaannya dari APBD Kabupaten. Adapun Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Tahun 2024 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan Tahun 2024.
3. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2024.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.

Amuntai, 16 Agustus 2024
Inspektur Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

FAHRUDIN, SHut., MS., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19691024 199603 1 005

LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Analisa Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	IX	X		XI		XII		XIII
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	6.01.0.00	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen yang Telah Ditetapkan yang Disiplin sesuai	100 %	11.000.000.000,00	90 %	9.900.000.000,00	100 %	11.000.000.000	50 %	5.500.000.000	50 %	5.500.000.000				90 %	9.900.000.000	90 %	90 %	90 %	9.900.000.000,00	90 %	90 %	
	6.01.0.00.0.01	Terselenggaranya Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Audit dan Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100 %	1.000.000.000,00	90 %	900.000.000,00	100 %	1.000.000.000	50 %	500.000.000	50 %	500.000.000				90 %	900.000.000	90 %	90 %	90 %	900.000.000,00	90 %	90 %	
1	6.01.0.00.0.01.01	Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah	10 Laporan	1.000.000,00	9 Laporan	900.000,00	10 Laporan	1.000.000	5 Laporan	500.000	5 Laporan	500.000				9 Laporan	900.000	90 %	90 %	9 Laporan	900.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
2	6.01.0.00.0.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	1.000.000.000	18 Laporan	900.000.000	20 Laporan	1.000.000.000	10 Laporan	500.000.000	10 Laporan	500.000.000				18 Laporan	900.000.000	90 %	90 %	18 Laporan	900.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
3	6.01.0.00.0.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	100.000.000	9 Laporan	90.000.000	10 Laporan	100.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000				9 Laporan	90.000.000	90 %	90 %	9 Laporan	90.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
4	6.01.0.00.0.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	200.000.000	18 Laporan	180.000.000	20 Laporan	200.000.000	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	100.000.000				18 Laporan	180.000.000	90 %	90 %	18 Laporan	180.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
5	6.01.0.00.0.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan	1.000.000.000	36 Laporan	900.000.000	40 Laporan	1.000.000.000	20 Laporan	500.000.000	20 Laporan	500.000.000				36 Laporan	900.000.000	90 %	90 %	36 Laporan	900.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
6	6.01.0.00.0.01.06	Koordinasi Pengawasan Internal	Jumlah Kelengkapan Pengelolaan Keuangan yang Terkoordinir	4 Kelengkapan	4.000.000.000	3 Kelengkapan	3.600.000.000	4 Kelengkapan	4.000.000.000	2 Kelengkapan	2.000.000.000	2 Kelengkapan	2.000.000.000				3 Kelengkapan	3.600.000.000	90 %	90 %	3 Kelengkapan	3.600.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
7	6.01.0.00.0.01.09	Melaksanakan Evaluasi, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	1.000.000.000	90 Dokumen	900.000.000	100 Dokumen	1.000.000.000	50 Dokumen	500.000.000	50 Dokumen	500.000.000				90 Dokumen	900.000.000	90 %	90 %	90 Dokumen	900.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							
	6.01.0.00.0.02	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Permintaan Audit yang Ditindaklanjuti	100 %	2.000.000.000	100 %	1.800.000.000	100 %	2.000.000.000	50 %	1.000.000.000	50 %	1.000.000.000				90 %	1.800.000.000	90 %	90 %	100 %	1.800.000.000,00	90 %	100	
8	6.01.0.00.0.02.01	Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disahkan	10 Laporan	1.000.000.000	9 Laporan	900.000.000	10 Laporan	1.000.000.000	5 Laporan	500.000.000	5 Laporan	500.000.000				9 Laporan	900.000.000	90 %	90 %	11 Laporan	990.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
9	6.01.0.00.0.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	1.000.000.000	9 Laporan	900.000.000	10 Laporan	1.000.000.000	5 Laporan	500.000.000	5 Laporan	500.000.000				9 Laporan	900.000.000	90 %	90 %	11 Laporan	990.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)							
10	6.01.0.03	PROGRAM PENINGKATAN KESERAHASIAAN PENGELOLAAN INFORMASI	Persentase Keluhan Daerah yang Ditanggapi (%)	100 %	1.000.000.000	70 %	700.000.000	100 %	1.000.000.000	0 %	100.000.000	0 %	100.000.000				0 %	700.000.000	90 %	90 %	0 %	700.000.000,00	90 %	90 %	
	6.01.0.03.0.01	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Arsip, Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Rekomendasi SKPP yang Ditindaklanjuti	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	50 %	0	50 %	0				50 %	0	50 %	50 %	100 %	75.000.000,00	90 %	90 %	
10	6.01.0.03.0.01.01	Pemeliharaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Teknis di Gedung Pengawasan	Jumlah Kelengkapan Sarana dan Prasarana Teknis di Gedung Pengawasan yang Dirawat	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0				5 Dokumen	75.000.000	100 %	100 %	5 Dokumen	75.000.000,00	90 %	90 %	Inspektorat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							

No	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja (RKA) 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kerangka Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerangka Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/5*100%		14=6+12		15=12/7*100%		16
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.			Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	
	X.XX.XX.X.XX	Pelayanan/urusan dan Otonomi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan/Layanan dan Administrasi	100 %	2.371.344.242	100 %	357.960.000	100 %	928.000.000	71 %	10.000.000	50 %	225.000.000			50 %	223.600.000	50,00	24,10	150 %	581.600.000,00	77,50	0,00	
12	X.XX.XX.X.XX.XX	Pelayanan/urusan dan otonomi Lainnya Pemerintahan Daerah	jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pelayanan/Layanan dan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	44 Perangkat Daerah	2.230.775.242	10 Perangkat Daerah	97.250.000	11 Perangkat Daerah	302.000.000	2 Perangkat Daerah	10.000.000	5 Perangkat Daerah	125.000.000			5 Perangkat Daerah	125.000.000	45,45	41,39	15 Perangkat Daerah	222.600.000,00	42,19	14,55	Kepala Kantor
13	X.XX.XX.X.XX.XX	Pelayanan/urusan administrasi Umum, Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Sub Kegiatan	jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pelayanan/Layanan Administrasi Umum dan Pelaporan Keuangan	44 Perangkat Daerah	1.059.678.842	5 Perangkat Daerah	8.000.000	11 Perangkat Daerah	122.000.000	5 Perangkat Daerah	400.000	5 Perangkat Daerah	1.775.000			5 Perangkat Daerah	1.775.000	5,00	1,00	5 Perangkat Daerah	8.400.000,00	5,00	5,73	Kepala Kantor
14	X.XX.XX.X.XX.XX	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penyelesaian Sub Pembakumutasian Aset	jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penyelesaian dan Pembakumutasian Aset	22 Laporan	1.312.667.721	5 Laporan	223.800.000	6 Laporan	658.000.000	1 Laporan	1.000.000	2 Laporan	10.000.000			1 Laporan	12.000.000	50,00	30,00	7 Laporan	235.800.000,00	31,82	18,23	Kepala Kantor
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		26,45	15,77			77,73	31,41	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		50,10	34,13			77,50	9,00	
																Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
1	X.XX.XX	Program Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	75/F Nilai	10.000.000.000	67,11 Nilai	12.070.762.500	100 Nilai	17.500.000.000	50,00 Nilai	1.250.000.000	50,00 Nilai	4.500.000.000			50,00 Nilai	5.515.000.000	50,00	70,00	50,00 Nilai	5.885.000.000,00	43,00	41,00	
	X.XX.XX.X.XX.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Dokumen	308.330.000	12 Dokumen	24.700.000	11 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	0	10 Dokumen	7.400.000			6 Dokumen	7.400.000	54,55	15,00	23 Dokumen	32.100.000,00	58,00	10,00	
15	X.XX.XX.X.XX.XX	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	30 Dokumen	155.471.178	4 Dokumen	12.000.000	6 Dokumen	28.000.000	2 Dokumen	0	4 Dokumen	4.225.000			4 Dokumen	4.225.000	66,66	15,79	12 Dokumen	23.580.000,00	40,00	21,00	Kepala Kantor
16	X.XX.XX.X.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Kepala Kantor Daerah	24 Dokumen	102.367.472	6 Dokumen	1.000.000	6 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2.900.000			2 Dokumen	2.900.000	50,00	10,00	8 Dokumen	8.000.000,00	37,50	8,00	Kepala Kantor
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		57,07	12,13			54,61	15,29	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Cukup Kurang	Cukup Kurang			Cukup Kurang	Cukup Kurang	
	X.XX.XX.X.XX	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi SKPD	100 %	23.722.720.000	100 %	6.227.342.730	100 %	8.700.000.000	25 %	2.324.000.000	50 %	3.240.000.000			50 %	3.240.000.000	50,00	37,24	150 %	9.354.607.287,00	57,50	9,00	
18	X.XX.XX.X.XX.XX	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 Orang	23.635.720.000	45 Orang	6.071.342.730	45 Orang	8.757.000.000	45 Orang	2.320.000.000	45 Orang	3.240.000.000			45 Orang	3.240.000.000	50,00	36,97	90 Orang	9.311.342.730,00	44,64	37,00	Kepala Kantor
19	X.XX.XX.X.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pertama/Triwulan/Semesteran/Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Akhir Tahun yang disusun, Dokumen Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Terlaksana dengan Baik	12 Laporan	17.000.000	6 Laporan	1.000.000	6 Laporan	28.000.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.987.000			2 Laporan	1.987.000	33,33	5,96	7 Laporan	2.987.000,00	28,57	5,27	Kepala Kantor
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		52,78	13,56			30,81	11,45	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	X.XX.XX.X.XX	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terselesaikan Barang Milik Daerah yang Dimanfaatkan	100 %	23.000.000	100 %	0	100 %	8.000.000	25 %	2.000.000	50 %	2.000.000			50 %	2.000.000	50,00	33,33	150 %	2.000.000,00	37,50	8,00	
20	X.XX.XX.X.XX.XX	Administrasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan Administrasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	23.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000			1 Laporan	2.000.000	1,25	33,33	1 Laporan	2.000.000,00	17,50	2,78	Kepala Kantor
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		1,41,30	33,33			17,50	2,78	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	X.XX.XX.X.XX	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksana SDM yang Sesuai Kompetensinya Sesuai Bidang Tugas	80 %	2.000.000.000	100 %	2.200.597.312	80 %	2.900.000.000	50 %	800.000.000	40 %	700.000.000			40 %	700.000.000	44,75	25,00	140 %	3.000.000.000,00	142,79	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Awalnya Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Sesuai Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Disesuaikan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran OPD 2024 yang Disesuaikan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten (%)		Kualitasi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=(12/5)*100%		14=(12/6)*100		15=(12/6)*100%		16	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
18	X.XX.01.2.05.01	Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	674.057.946	6 Orang	91.120.000	4 Orang	246.722.000	0 Orang	0.000.000	2 Orang	30.000.000			1 Orang	20.000.000	25,00	13,33	7 Orang	111.120.000,00	43,75	23,53	Inspektorat
19	X.XX.01.2.05.11	Perencanaan Teknis, Implementasi dan Pemantauan Pembangunan Perkotaan	Jumlah Dokumen yang Mengikuti Sinkronisasi Teknis, Implementasi Kebijakan, Pendampingan Monitoring	100 Dokumen	3.422.000.000	40 Dokumen	2.130.428.613	45 Dokumen	2.703.712.000	0 Dokumen	0.000.000	20 Dokumen	224.000.000	30 Dokumen	777.600.000	25 Dokumen	777.600.000	55,56	28,89	75 Dokumen	3.911.200.000,00	41,67	80,00	Inspektorat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							
	X.XX.02.2.XX	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Barang Perlengkapan	100 %	4.146.000.000	100 %	1.296.324.000	100 %	1.420.000.000	25 %	000.000.000	50 %	000.000.000			50 %	000.000.000	50,00	25,00	100 %	1.488.000.000,00	57,50	5,63	
21	X.XX.02.2.XX.03	Penyusunan Peraturan dan Perundang-undangan Kepala	Jumlah Rules Kebijakan dan Perundang-undangan Kepala yang Disosialisasi	20,5 Paket	3.222.000.000	15 Paket	1.000.000.000	20 Paket	000.000.000	5 Paket	0.000.000	15 Paket	00.000.000			5 Paket	00.000.000	25,00	6,77	85 Paket	1.000.000.000,00	22,00	25,00	Inspektorat
22	X.XX.02.2.XX.04	Penyelenggaraan Tugas Kesekretariatan dan Kehumasan (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan Dokumentasi (OPD)	100 Laporan	1.230.700.000	100 Laporan	677.013.000	80 Laporan	970.000.000	20 Laporan	000.000.000	20 Laporan	000.000.000			20 Laporan	000.000.000	20,00	20,00	100 Laporan	000.000.000,00	20,00	20,00	Inspektorat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							
	X.XX.02.2.XX	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Urusan	100 %	1.000.000.000	100 %	000.000.000	100 %	000.000.000	25 %	00.000.000	50 %	000.000.000			50 %	000.000.000	50,00	25,00	100 %	000.000.000,00	57,50	0,00	
23	X.XX.02.2.XX.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	200 Laporan	000.000.000	75 Laporan	00.000.000	50 Laporan	000.000.000	10 Laporan	0.000.000	20 Laporan	0.000.000			20 Laporan	0.000.000	40,00	10,00	87 Laporan	00.000.000,00	31,84	16,00	Inspektorat
24	X.XX.02.2.XX.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150 Laporan	850.000.000	95 Laporan	00.000.000	80 Laporan	000.000.000	20 Laporan	00.000.000	20 Laporan	00.000.000			20 Laporan	00.000.000	40,00	20,00	90 Laporan	00.000.000,00	37,50	0,00	Inspektorat
25	X.XX.02.2.XX.03	Penyediaan jasa Perlengkapan Untuk Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Perlengkapan Untuk Kantor yang Disediakan	150 Laporan	000.000.000	00 Laporan	00.000.000	00 Laporan	00.000.000	0 Laporan	00.000.000	00 Laporan	00.000.000			00 Laporan	00.000.000	00,00	00,00	00 Laporan	00.000.000,00	00,00	00,00	Inspektorat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							
	X.XX.02.2.XX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi dan Terlaksananya Pemeliharaan	100 %	2.000.000.000	100 %	000.000.000	100 %	0.000.000.000	25 %	00.000.000	50 %	00.000.000			50 %	00.000.000	50,00	25,00	100 %	00.000.000,00	57,50	0,00	
26	X.XX.02.2.XX.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Dilengkapi Pajak dan Perlengkapan	150 Unit	360.000.000	60 Unit	00.000.000	80 Unit	000.000.000	20 Unit	00.000.000	20 Unit	00.000.000			20 Unit	00.000.000	40,00	20,00	80 Unit	00.000.000,00	31,25	25,00	Inspektorat
27	X.XX.02.2.XX.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	000.000.000	3 Unit	00.000.000	1 Unit	000.000.000	0 Unit	000.000	0 Unit	0.000.000			0 Unit	0.000.000	0,00	0,00	1 Unit	000.000.000,00	00,00	00,00	Inspektorat
28	X.XX.02.2.XX.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran dan Prasarana Gedung Operasional Lainnya	Jumlah Saluran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	425.057.214	75 Unit	00.000.000	50 Unit	00.000.000	1 Unit	0.000.000	0 Unit	0.000.000			0 Unit	0.000.000	00,00	00,00	100 Unit	00.000.000,00	00,00	0,00	Inspektorat
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)							
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)							
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)							
																		Predikat Kinerja (Program)							
	XX																	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	21,41	11,92			22,11	22,16	
																		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Pada Saat Perubahan Perangkat Daerah	Prakiraan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2025)	Target Kinerja dan Anggaran Yang Direncanakan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Misi yang Ditambahkan)	Kondisi Kinerja Pada Awalnya				Kondisi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Lalu (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 (%)	Kondisi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten di Akhir Tahun 2031		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten di Akhir Tahun 2031		Unit Penanggung Jawab
							A		B									
							A		B									
						Jumlah Anggaran dari seluruh Program	Rp. 83.530.884.000		1.086.433.344		1.058.676.575				8.086.676.475						
	Kepala Perangkat Kabupaten Daerah																	
	Nama Pengkoordinasi Perangkat Daerah																	
	Tempat Lokasi yang Dipertimbangkan dalam Urusan Pemerintah																	

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

FAHRUDIN, S.Hut., MS., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19691024 199603 1 005

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					RELOKASI SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						21.230.984.896,00								
	0	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.230.984.896,00							15.898.181.822,00	
															15.898.181.822,00	
	0.01	INSPEKTORAT DAERAH						21.230.984.896,00								
1	0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Inspektorat Daerah				83,17	14.481.943.486,00							15.898.181.822,00	
															9.966.380.824,00	
	0.01.01.2.01	Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				10 Dokumen	30.561.200,00			Menciptakan / Stimulasi Terbentuknya Dan Tercukupinya Pelayanan Publik	24. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN Inspektorat Daerah		14.830.344,00	INSPEKTORAT
	0.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	24.710.800,00	Wilt. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana TRANSFER UMUM/ Dana BAGI HASIL	Menciptakan / Stimulasi Terbentuknya Dan Tercukupinya Pelayanan Publik	24. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN inspektorat Daerah		27.990.040,00	INSPEKTORAT
	0.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	23.921.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHITUNGAN DAU / DASBAGI (PAD)	Menciptakan / Stimulasi Terbentuknya Dan Tercukupinya Pelayanan Publik	24. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN inspektorat Daerah		33.337.401,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN WAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROBITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.04.01.2.03	Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Kepemilikan KDK (%)				100 %	6.723.206.460,00			Mengkoordinasikan Distribusi Perlindungan dan Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Dir. Meneng katkan Tata kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan kes tabilitasi pem erintahan d pelayanan publik yang Inovatif	ASN Kabupaten Dairan		6.723.207.206,00	1.6(PEVDD)647
	6.04.01.2.03.0001	Penyelidikan Dajl dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Dajl dan Tunjangan ASN				61 Orang/Bulan	6.707.346.960,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Dalmua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengkoordinasikan Distribusi Perlindungan dan Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Dir. Meneng katkan Tata kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan kes tabilitasi pem erintahan d pelayanan publik yang Inovatif	ASN Kabupaten Dairan		6.708.957.960,00	1(PEVDD)0647
	6.04.01.2.03.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Konsolidasi Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				61 Laporan	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Dalmua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengkoordinasikan Distribusi Perlindungan dan Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Dir. Meneng katkan Tata kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan kes tabilitasi pem erintahan d pelayanan publik yang Inovatif	ASN Kabupaten Dairan		10.000.000,00	1(PEVDD)0647

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RUAS/SUB CAPAIAN / KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAN/RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang disampaikan (%)				100 %	1.000.000,00			Mendukung Terlaksana Pengelolaan dan Dan Tata Informasi Pelayanan Publik	04. Menteri Dalam Tata Kerja Pera pemerintah Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan aku Sesuai peru ministrasi & pelayanan publik yang	ASN Kabupaten Daerah		1.000.000,00	INSPEKTORAT
	5.01.01.2.03.0002	Melaksanakan dan Pengelolaan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Pengelolaan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendukung Terlaksana Pengelolaan dan Dan Tata Informasi Pelayanan Publik	04. Menteri Dalam Tata Kerja Pera pemerintah Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan aku sesuai peru ministrasi & pelayanan publik yang	ASN Kabupaten Daerah		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	5.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang (telah) meningkatkan Kompetensi sesuai Standar (%)				80 %	2.467.777.000,00			Mendukung Terlaksana Pengelolaan dan Dan Tata Informasi Pelayanan Publik	04. Menteri Dalam Tata Kerja Pera pemerintah Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan aku sesuai peru ministrasi & pelayanan publik yang	ASN Kabupaten Daerah		1.267.440.700,00	INSPEKTORAT
	5.01.01.2.15.0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN HASIL DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			Jumlah Pegawai Pembuatan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	208.741.000,00	Kab. Kuta Sungai Utara, Seluruh Kecamatan Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan Stabilitas Pertahanan dan Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintah & pelayanan publik yang inovatif	ASN Kepemimpin Daerah		124.631.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.03.0011	Bidang/ga Tahun Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tahun Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	7.272.227.000,00	Kab. Kuta Sungai Utara, Seluruh Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Stabilitas Pertahanan dan Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintah & pelayanan publik yang inovatif	ASN Kepemimpin Daerah		912.514.127,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)				100 %	1.258.431.485,00			Mewujudkan Stabilitas Pertahanan dan Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintah & pelayanan publik yang inovatif	ASN Kepemimpin Daerah		1.777.000.712,00	INSPEKTORAT
	8.24.17.2.08.0002	Penyediaan Pelayanan dan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN XXXX	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN (M2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KEINGINAN TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rata-Tersedian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	1.xxx.288.450,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Menuju Aparatur Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Peningkat dan atau kinerja pem erintahan & pelayanan publik yang inovatif	ADB Indonesia Daerah		800.947.910,00	PERPUSTAKAAN
	5.01.01.2.08.0008	Penyelenggaraan Kajian Kebijakan dan Kemasukan (UPD)														
			Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPD)				84 Layanan	1.263.101.936,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Menuju Aparatur Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Peningkat dan atau kinerja pem erintahan & pelayanan publik yang inovatif	ADB Indonesia Daerah		331.721.100,00	PERPUSTAKAAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kelengkapan Jasa Penunjang (SATU) (%)				100 %	151.515.000,00			Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Menuju Aparatur Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Peningkat dan atau kinerja pem erintahan & pelayanan publik yang inovatif	ADB Indonesia Daerah		295.848.335,00	PERPUSTAKAAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOKASI/ SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	RASIO INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	RASIO INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pengaduan dan Saran Masyarat				72 Layanan	20.251.402.000	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendorong Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Tersedia Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Dit. Khusus, Institusi, Tata Kelola Pem erintahan Yang Efektif, Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN Kepolisian Daerah		145.242.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Layanan	134.133.985.000	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendorong Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Tersedia Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Dit. Khusus, Institusi, Tata Kelola Pem erintahan Yang Efektif, Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN Kepolisian Daerah		134.984.985,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Layanan	108.324.003.000	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendorong Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Tersedia Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Dit. Khusus, Institusi, Tata Kelola Pem erintahan Yang Efektif, Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN Kepolisian Daerah		73.993.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PENYEBAB CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											KABUPATEN	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pelaksanaan Lelang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dari Lapak Pasar (%)				100 %	414.951.000,00			Mengembangkan Usaha Non Perbankan yan Dan Tra nformasi Pelayanan Publik	Dit. Sistem& Aplikasi Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkata ian tata kelola pem erintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN masyarakat Daerah		304.455.000,00	1020501CBA1
	6.01.01.2.05.0002	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kelurahan, Pajak dan Retribusi Kecamatan Dalam Operasional dan Layanan														
			Jumlah Pemberian Dana Operasional dan Layanan yang Dipublikasi dan Disyaratkan Pajak dan Perbendaha				192 Lbr	139.000.000,00	Kab. Kuu Sungai Utara, Dinasa Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Usaha Non Perbankan yan Dan Tra nformasi Pelayanan Publik	Dit. Sistem& Aplikasi Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkata ian tata kelola pem erintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN masyarakat Daerah		80.606.250,00	1020501CBA1
	6.01.01.2.04.0003	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	431.711.000,00	Kab. Kuu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Usaha Non Perbankan yan Dan Tra nformasi Pelayanan Publik	Dit. Sistem& Aplikasi Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkata ian tata kelola pem erintahan & pelayanan publik yang inovatif	ASN masyarakat Daerah		110.955.740,00	1020501CBA1
	6.01.01.2.05.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

(1)	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAHAN RENSTRA OPD	KEADAAN CAPAIAN AWAL OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENTANG TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan/Dimanfaatkan				23 Unit	20.140.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENGHIMPUNAN ADJ DAERAH (PAD)	Menyediakan Saluran Pelaporan dan Dan Tra ndomasi Pelayanan Publik	04. Menyg. kalkan Tata kerja Aparatur Pemerintah Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan kualitas pelayanan & pelayanan publik yang berkualit	ASN Inspektorat, Dinsar		11.140.000,00	INSPEKTORAT
2	5.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)	-			73 %	2.636.879.600,00						-	5.304.960.540,00	
	5.01.02.2.11	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelesaian dan pengawasan OPD/SKPD (Ber Pemko /%)	-			95 %	2.737.100.400,00			Menyediakan Saluran Pelaporan dan Dan Tra ndomasi Pelayanan Publik	04. Menyg. kalkan Tata Kerja Aparatur Pemerintah Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan kualitas pelayanan & pelayanan publik yang berkualit	APIP Inspektorat		2.783.260.135,00	INSPEKTORAT
	5.01.12.2.11.1005	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	733.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENGHIMPUNAN ADJ DAERAH (PAD)	Menyediakan Saluran Pelaporan dan Dan Tra ndomasi Pelayanan Publik	04. Menyg. kalkan Tata Kerja Aparatur Pemerintah Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan kualitas pelayanan & pelayanan publik yang berkualit	APIP Inspektorat		116.250.135,00	INSPEKTORAT
	5.01.12.2.11.1010	Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PARPUT AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	RANCANGAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH MAJU BERSAMA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	618.820.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengelola / Sosialisasi Pelaksanaan Dan Tata Informasi Pelayanan Publik	Di Wilayah Kantor Tata Kota Pelayanan Yang Untuk Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan sdm aparatur & pelayanan publik yang maupun	APIP Inspektorat		202.715.000,00	INSPEKTORAT
	5.01.02.2.01.0003	Rerata Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Rerata Laporan Keuangan				4 Laporan	46.000.000,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengelola / Sosialisasi Pelaksanaan Dan Tata Informasi Pelayanan Publik	Di Wilayah Kantor Tata Kota Pelayanan Yang Untuk Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan sdm aparatur & pelayanan publik yang maupun	APIP Inspektorat		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	5.01.02.2.01.0004	Rerata Laporan Keuangan														
			JUMLAH Laporan Hasil Rerata Laporan Keuangan				28 Laporan	202.175.400,00	Kab. Kota Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengelola / Sosialisasi Pelaksanaan dan Dan Tata Informasi Pelayanan Publik	Di Wilayah Kantor Tata Kota Pelayanan Yang Untuk Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan sdm aparatur & pelayanan publik yang maupun	APIP Inspektorat		77.037.200,00	INSPEKTORAT
	5.01.02.2.01.0005	Pengawasan Dana														

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (OPD)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU PERUBAHAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dinas				18 Laporan	211.000.000,00	Kab. Kutai Sungai Utara, Bontar Kecamatan, Samoja KalTara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendapatkan Opini/Hasil Pemeriksaan Dan Tindaklanjut Pengawasan Pelayanan Publik	Ok Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Focus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan kualitas pem erintah & pelayanan publik yang berkualit	ASN/ Inspektorat		555.000.000,00	INSPEKTORAT
	5.01.02.2.01.0288	Kasi Data Pengawasan Internal														
			Jumlah Pelaksanaan Pengawasan internal yang Terkontrol				3 Pelaksanaan	862.000.000,00	Kab. Kutai Sungai Utara, Bontar Kecamatan, Samoja KalTara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendapatkan Opini/Hasil Pemeriksaan Dan Tindaklanjut Pengawasan Pelayanan Publik	Ok Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Focus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan kualitas pem erintah & pelayanan publik yang berkualit	ASN/ Inspektorat		554.744.000,00	INSPEKTORAT
	5.01.02.2.01.0287	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				21 Dokumen	165.510.000,00	Kab. Kutai Sungai Utara, Bontar Kecamatan, Samoja KalTara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendapatkan Opini/Hasil Pemeriksaan Dan Tindaklanjut Pengawasan Pelayanan Publik	Ok Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Focus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan kualitas pem erintah & pelayanan publik yang berkualit	ASN/ Inspektorat		1.036.036.402,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRANGKAIN CAPAIAN TARGET RENJA OPD Tahun 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA SASARAN	PERKIRAAN BIAYA SECARA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PERATAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Khusus yang Ditindaklanjuti (%)	-			100 %	[illegible]			Memperkuat Sistem Pengawasan Dan Tata Kelola Pelayanan Publik	Ok Meeting Sekitar Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan kualitas pengawasan & pelayanan publik yang [illegible]	APIP Inspektorat		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penegakan Pemanfaatan Keuangan Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Pemanfaatan Keuangan Negara/Daerah yang Diteliti				12 Laporan	[illegible]	Kab. Kota Sangat Utara, Barat, Kecamatan Bencal Kab/Desa	PENERAPAN KELUSTERAN (PAD)	Memperkuat Sistem Pengawasan Dan Tata kelolaan Pelayanan Publik	Ok Meeting Sekitar Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan kualitas pengawasan & pelayanan publik yang [illegible]	APIP Inspektorat		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	[illegible]	Kab. Kota Sangat Utara, Barat, Kecamatan Bencal Kab/Desa	PENERAPAN KELUSTERAN (PAD)	Memperkuat Sistem Pengawasan Dan Tata kelolaan Pelayanan Publik	Ok Meeting Sekitar Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 3. Peningkatan kualitas pengawasan & pelayanan publik yang [illegible]	APIP Inspektorat		[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGADAAN BARANG DAN ASSET/BMD	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Izin	-			70 %	[illegible]							[illegible]	

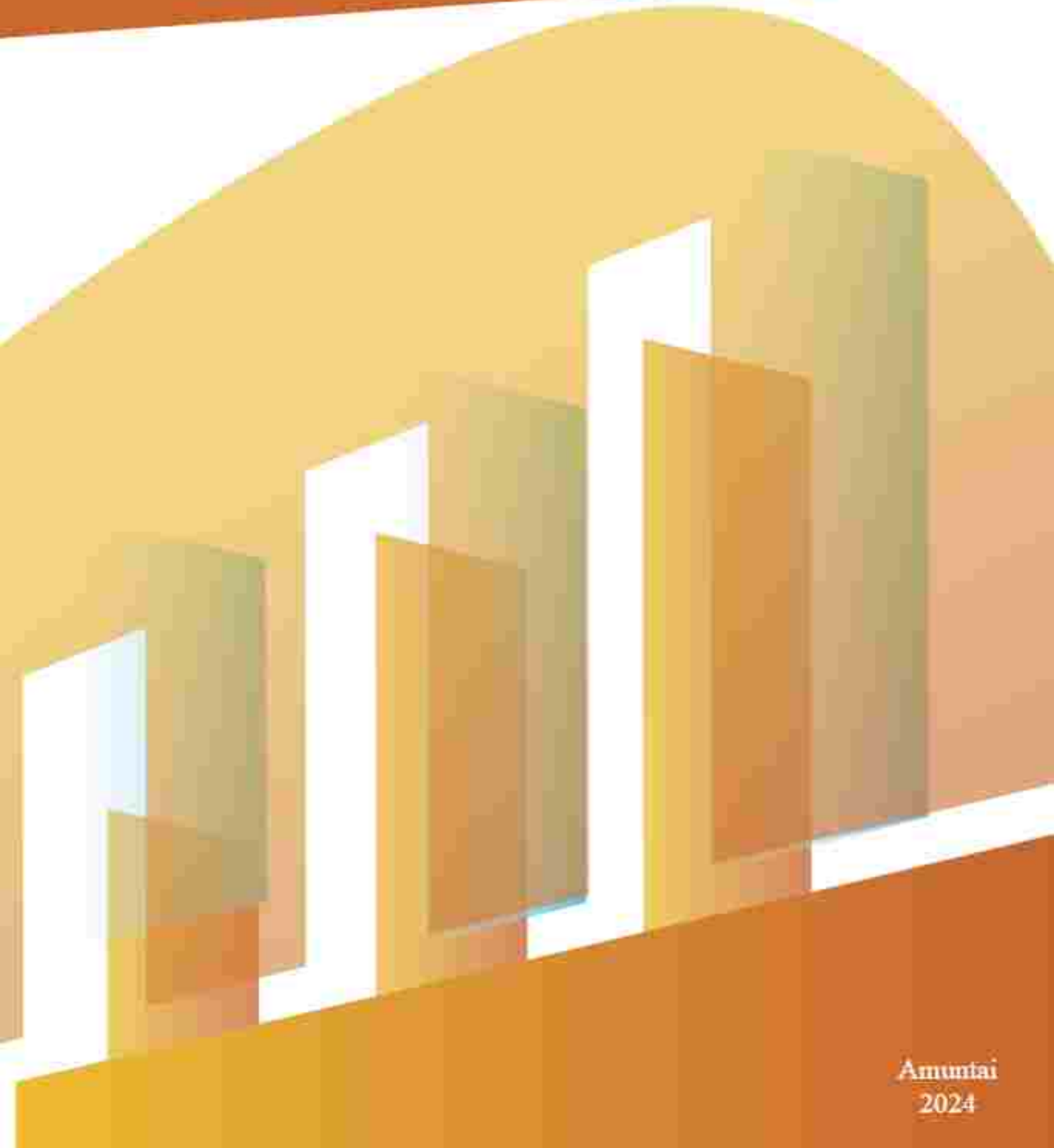
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN PANGKAL DAN KEBIJAKAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pelaksanaan APIP dan Sistur Pengawasan (%)				100 %	[illegible]			Mendapatkan Dukungan Pemerintah Pusat	01. Menyelesaikan Tata Kelola Pengawasan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan layanan kerja pengawasan yang sesuai	APIP Kabupaten		[illegible]	INSPEKTORAT
	[illegible]	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	[illegible]	Kab. Kutai Barat, Kantor Dinas, Rumah Kecamatan, Rumah Kab/Desa	PENGAWASAN, KEU, GAPKAN (DAU)	Mendapatkan Dukungan Pemerintah Pusat dan Dan Tata kelolaan Pelayanan Publik	01. Menyelesaikan Tata Kelola Pengawasan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola kerja pengawasan yang sesuai	APIP Kabupaten		[illegible]	INSPEKTORAT
	[illegible]	Pembinaan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Asistensi (%)				100 %	[illegible]			Mendapatkan Dukungan Pemerintah Pusat dan Dan Tata kelolaan Pelayanan Publik	01. Menyelesaikan Tata Kelola Pengawasan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola kerja pengawasan yang sesuai	APIP Kabupaten		[illegible]	INSPEKTORAT
	[illegible]	Pembinaan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

INSPEKTORAT DAERAH

FAHRUDIN, S.H., M.M., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19[illegible]4 199603 1 005

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024



Amuntai
2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2023 – 2026. Adapun penyusunan Renja Perubahan SKPD merupakan amanat dari Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Amuntai, Agustus 2024

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ---------- i

DAFTAR ISI ---------- ii

DAFTAR TABEL ---------- iii

BAB I PENDAHULUAN ---------- 1

1.1 Latar Belakang ---------- 1

1.2 Landasan Hukum ---------- 3

1.3 Maksud dan Tujuan ---------- 6

1.4 Sistematika Penulisan ---------- 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024 ---------- 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ---------- 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ---------- 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara ---------- 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan ---------- 25

2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat ---------- 39

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ---------- 40

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ---------- 40

BAB V PENUTUP ---------- 60

Lampiran

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024 ---- 10

Tabel 2.2 Target Indikator SPM Tahun 2024 ---------- 21

Tabel 2.3 Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara ---------- 26

Tabel 3.1 Pemetaan Program dan Kegiatan sesuai PMD RI N0 90 Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang---------- 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah yang antara lain :

a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 pada tahun berkenaan yang dijabarkan dalam bentuk dokumen RKPD;
b. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 – 2026 pada tahun berkenaan;
c. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
d. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan target dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan pendanaan prakiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk penyelerasan dan/atau penyesuaian program/ kegiatan/ sub kegiatan/ pagu anggaran sebagai penjabaran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 s.d. 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 ini mengacu pada RKPD Perubahan Tahun 2024 yang isinya memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam tahun 2024 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya serta mengakomodir hasil Musrenbang RKPD, Forum SKPD dan Prioritas Kegiatan.

Di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan dan Ruang untuk pencapaian kinerja pada tahun 2024.

Di dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat pengembangan infrastruktur daerah sehingga mengungkit daya saing daerah sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 diperlukan sebagai tahapan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat mencapai sasaran yang tercantum dalam RKPDP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dicabur sebagian dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangungan Nasional, yang diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

36. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/345/KUM/2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini adalah:

1. Mengintegrasikan program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan RPD Tahun 2023 – 2026.
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan bidang infrastruktur, dan tata ruang, serta pertanahan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis tahun kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja yang merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum.
4. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024.
5. Sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh fungsional umum agar dapat melaksanakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib, dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat tercapai secara optimal.

6. Sebagai tolak ukur menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023—2026.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Memuat review terhadap hasil evalusi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, tantangan dan peluang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta tingkat kinerja pelayanan SKPD.

2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2024

Membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan proses usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan dengan kesesuaian antara isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dana indikatif dan sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan mencakup 12 program, 20 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Total pagu anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 252.951.670.248 dengan sumber dana APBD sebesar Rp 202.017.835.248, DAK sebesar Rp 40.796.334.000, DAU sebesar Rp 5.751.012.000 dan DBH Sawit sebesar Rp 4.386.489.000.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp 10.326.703.691 dengan rata – rata capaian kinerja sub kegiatan = 18,53%.

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II masih tergolong rendah, beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

a. Untuk DAK, DAU dan DBH Sawit pagu anggaran tidak tersedia dari awal tahun, akan tetapi pada anggaran Pergeseran 1 yang baru bisa dipergunakan sekitar bulan Maret.
b. Adanya penyesuaian dan pemenuhan untuk penyedia katalog lokal pada e-katalog dan proses pada SIRUP yang memerlukan waktu.
c. Kondisi iklim yang cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan fisik.
d. Untuk capaian kinerja pekerjaan fisik masih berada pada tahap awal sehingga belum bisa dihitung proses penyelesaian pekerjaan, sehingga secara administratif capaian kinerja tergolong rendah walaupun pada realitanya pekerjaan sedang dilaksanakan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2024-2026 Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Triwulan Lalu (2023)		Target Anggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Ditetapkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (2024) yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.20.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan fasilitasi yang [illegible]	10,00 %	7.500.000.000	20,00 %	17.000.000.000	30,00 %	30.000.000.000	0 %	0,000,000	0 %	750.000.000			0 %	750.000.000	0,00	0,00	0 %	18.000.000.000	0,00	0,00		
	1.20.01.0.01	Pengelolaan Kawasan Bangunan Rumah Susun yang Dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lokasi Daerah Kabupaten Lain	Persentase cakupan fasilitasi yang [illegible]	10,00 %	2.500.000.000	20,00 %	10.000.000.000	30,00 %	12.000.000.000	0 %	10.000.000	0 %	387.500.000			0 %	387.500.000	0,00	0,00	20,00 %	10.000.000.000	0,00	0,00		
1	1.20.01.0.01.08	Pembangunan Rumah Negara	Tersedia Rumah Negara yang Dibangun	5,00 Unit	750.000.000	5,00 Unit	800.000.000	5,00 Unit	850.000.000	0 Unit	0	0 Unit	50.000.000			0 Unit	50.000.000	0,00	0,00	0,00 Unit	0	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.20.01.0.01.11	Pemeliharaan Rutin Berkala Perumahan Negara	Jumlah Rumah yang Dipelihara	5 Unit	750.000.000	5 Unit	800.000.000	5 Unit	850.000.000	5 Unit	0	5 Unit	50.000.000			5 Unit	50.000.000	0,00	0,00	5 Unit	0	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.20.01.0.01.12	Rehabilitasi Rumah Negara Perumahan Negara	Jumlah Rumah Negara Perumahan Negara yang Direhabilitasi	5 Unit	2.250.000.000	5 Unit	2.400.000.000	5 Unit	2.550.000.000	5 Unit	0	5 Unit	0			5 Unit	0	0,00	0,00	5 Unit	0	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1.20.01.0.01.13	Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Lingkungan	Panjang Jaringan yang Dibangun	2,50 km	1.500.000.000	2,50 km	1.600.000.000	2,50 km	1.700.000.000	0 km	0	0 km	0			0 km	0	0,00	0,00	0,00 km	0	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
															Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			0,00	0,00			0,00	0,00		
															Realisasi Kinerja (Sub Kegiatan)			Belum Terukur	Belum Terukur			Belum Terukur	Belum Terukur		
	1.20.01.0.02	Pengembangan Kawasan Permukiman Dalam Kota Pemerintah Daerah yang Lainnya dan di Luar Kawasan Lainnya Dalam Kabupaten/Kota	Persentase cakupan fasilitasi yang [illegible]	10,00 %	2.500.000.000	20,00 %	10.000.000.000	30,00 %	12.000.000.000	0 %	10.000.000	0 %	387.500.000			0 %	387.500.000	0,00	0,00	20,00 %	10.000.000.000	0,00	0,00		
1	1.20.01.0.02.01	Pembangunan Jaringan Jalan Baru	Panjang jaringan jalan baru yang dibangun	2 km	0	2 km	0	2 km	0	0 km	0	0 km	0			0 km	0	0,00	0,00	0 km	0	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.20.01.0.02.02	Peningkatan Jaringan Jalan Baru	Panjang jaringan jalan baru yang ditingkatkan	2,50 km	500.000.000	2,50 km	550.000.000	2,50 km	600.000.000	0 km	0	0 km	50.000.000			0 km	50.000.000	0,00	0,00	2,50 km	0	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.20.01.0.02.03	Pemeliharaan Jaringan Jalan Baru	Panjang jaringan jalan baru yang dipelihara	2,50 km	0,00	2,50 km	0,00	2,50 km	0,00	0 km	0	0 km	0			0 km	0	0,00	0,00	2,50 km	0	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Sesuai Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun ini (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang Ditelaah		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPD 2025) yang Akan Lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14=13/12		15=13/7		16=13/8		17
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																							
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																							
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																							
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																							
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																							
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																							
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																							
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Dalam Rancana Kerja Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun ini (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berikutnya (2026) yang Akan Dicapai		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPD 2025) yang Akan Lalu		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Akhir Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	4	5	6		8		7		8		9		10				11		12		13		14
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	
		Prioritas Kinerja (Sub Kegiatan)																						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																						
		Prioritas Kinerja (Kegiatan)																						
1	1.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH	Terwujudnya Lumbir Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	80 %	0	86,77 %	0	90 %	8.477.120.000	0 %	28.000.000	0 %	1.000.000.000				0 %	1.028.000.000	0,00	28,57	0 %	1.028.000.000,00	0,00	0,00	
	1.00.00.0.01	Pengelolaan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik pada Daerah Kabupaten Toba	Terwujudnya Lumbir Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	80 %	0	86,77 %	0	90 %	8.477.120.000	0 %	28.000.000	0 %	1.000.000.000				0 %	1.028.000.000	0,00	28,57	86,77 %	1.028.000.000,00	0,00	0,00	
2	1.00.00.0.01.01	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (PLT)	Lumlah Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (PLT) yang dioperasikan	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	17.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0					0 unit	0	0,00	0,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.00.00.0.01.02	Pengelolaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skematik	Lumlah Rumah Tangga yang terlayani Pelayanan Tangki Septik Secara Mekanik Berbasis	0 Rumah Tangga	0	0 Rumah Tangga	0	0,0 Rumah Tangga	8.460.000.000	0 Rumah Tangga	28.000.000	0 Rumah Tangga	1.000.000.000				0 Rumah Tangga	1.028.000.000	0,00	28,57	0 Rumah Tangga	1.028.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
		Prioritas Kinerja (Sub Kegiatan)																						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																						
		Prioritas Kinerja (Kegiatan)																						
2	1.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH	Terwujudnya sistem pengelolaan yang berwujud terbuat sampah baik	12,5 %	0	0 %	0	0 %	0.000.000.000	0 %	0	0 %	87.847.000				0 %	87.847.000	0,00	0,17	0 %	87.847.000,00	0,00	0,00	
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	1.00.00.0.02	Pengelolaan Pengembangan Sistem Pembuangan yang Terintegrasi, Lingkungan Aman Bangunan Sumber Kabupaten Toba	Terwujudnya sistem pengelolaan yang berwujud terbuat sampah baik	12,5 %	0	0 %	0	0 %	0.000.000.000	0 %	0	0 %	87.847.000				0 %	87.847.000	0,00	0,17	0 %	87.847.000,00	0,00	0,00	
4	1.00.00.0.02.01	Tahun Tata Sistem Pelayanan Pelanggan	Lumlah Sistem Pelayanan Pelanggan yang Dioperasikan	0 Sistem Pelayanan Pelanggan	0	0 Sistem Pelayanan Pelanggan	0	0 Sistem Pelayanan Pelanggan	0.000.000.000	0 Sistem Pelayanan Pelanggan	0	0 Sistem Pelayanan Pelanggan	87.847.000				0 Sistem Pelayanan Pelanggan	87.847.000	0,00	0,17	0 Sistem Pelayanan Pelanggan	87.847.000,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
		Prioritas Kinerja (Sub Kegiatan)																						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Awal Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun Berjalan (2025) yang Ditetapkan		Rencana Kinerja Tahun Berjalan				Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran yang Akan (RPJMD 2025) yang Akan Lalu		Target Capaian Kinerja dan Rencana Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 (%)		Rencana Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Lalu Tahun 2026		Target Capaian Kinerja dan Rencana Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Lalu (Akhir Tahun 2026)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16
				a	(%)	a	(%)	a	(%)	a	(%)	a	(%)	a (%)	a (%)	a	(%)	a	(%)	a	(%)	a	(%)	a	(%)	
		Pendidikan Kinerja (Sasaran)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	1.08.00	Meningkatkan Pendidikan Berkualitas untuk Semua	Persentase penduduk berusia yang telah tuntas	70 %	0	0 %	0	0 %	48.000.000.000	0 %	0	0 %	0 %	0				0 %	0	0,00	0,00	0 %	0	0,00	0,00	
	1.08.00.0.01	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Daerah Kabupaten Dalam Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan (TPP) dan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase penduduk berusia yang telah tuntas	70 %	0	0,0 %	0	0 %	48.000.000.000	0 %	0	0,0 %	0 %	0				0 %	0	0,00	0,00	0,0 %	0	0,00	0,00	
12	1.08.00.0.01.12	Pengelolaan Pendidikan Menengah Daerah Kabupaten Dalam Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Pendidikan Menengah yang Dikelola	0 Pendidikan Menengah	0	0 Pendidikan Menengah	0	12 Pendidikan Menengah	0	0 Pendidikan Menengah	0	0 Pendidikan Menengah	0 %					0 Pendidikan Menengah	0	0,00	0,00	0 Pendidikan Menengah	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
13	1.08.00.0.01.13	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Menengah Daerah Kabupaten Dalam Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	12 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0 %					0 Sekolah	0	0,00	0,00	0 Sekolah	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
14	1.08.00.0.01.14	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Menengah Daerah Kabupaten Dalam Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan (TPP), Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Daerah Kabupaten Dalam Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan (TPP), Tim Pembina dan Pengelola

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Awal Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun Berjalan (2025) yang Ditetapkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPD 2025) yang Ditetapkan		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Akhir RPD		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14=15/12		16=17/12		18
				I	Rp	I	Rp	I	Rp	I	Rp	I	Rp			I	Rp	I	Rp	I	Rp	I	Rp		
1	1.06.2.01.0.00	Pelindo Kabupaten	Tersedianya Jalan Kabupaten	1.10 km	3.000.000.000	10.00 km	75.000.000.000	0.0 km	75.000.000.000	0 km	10.000.000	0 km	5.272.227.000			0 km	5.272.227.000	0.00	0.00	10.00 km	75.000.000.000.00	0.007.00	0.01.27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.06.2.02.0.01	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	0 Jembatan	100.000.000	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0			0 Jembatan	0	0.00	0.00	0 Jembatan	0.00	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.06.2.03.0.02	Pelindo Jalan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	0.000.000.000	0 Jembatan	0.7.00.07.00.0	20 Jembatan	0.000.000.000	0 Jembatan	10.000.000	0 Jembatan	00.000.000			0 Jembatan	00.000.000	0.00	0.00	0 Jembatan	0.0.0.7.0.000.00	0.00	0.00.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0.00	0.00			0.00.0	0.00.00	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		00.00	0.00			00.00	0.00	
																Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
4	1.06.03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	Tersedianya RTH Jalan Kabupaten yang Memadai Fisik	00.00 Ha	0.0.0.0.0.0.0	0 Ha	0.0.0.0.0.0	0.0 Ha	0.0.0.0.0.0.0	0 Ha	0.0.0.0.0.0	0.0 Ha	0.0.0.0.0.0			0.0 Ha	0.0.0.0.0.0	0.0.00	0.00	0.0 Ha	0.0.0.0.0.0.0	0.0.00	0.0.0		
	1.06.3.1.0.01	Pembangunan Fasilitas Tenaga Kerja Kabupaten	Tersedianya RTH Jalan Memadai yang Memadai Fisik	00.00 Ha	00.0.0.0.0.0	0.00 Ha	0.0.0.0.0.0	0.00 Ha	0.0.0.0.0.0.0	0 Ha	0.0.0.0.0.0	0.0 Ha	0.0.0.0.0.0			0.0 Ha	0.0.0.0.0.0	0.0.00	0.00	0.00 Ha	0.0.0.0.0.0.0	0.0.0	0.00		
5	1.06.3.2.0.08	Pelindo Sarana Fasilitas Tenaga Kerja Kabupaten Jalan Fisik Jalan Operasional dan Teknis yang Layak	Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Jalan Fisik Jalan Operasional dan Teknis yang Jalan Layak Sesuai Jalan Fisik	0 Orang	0	0 Orang	0	00 Orang	0.0.0.0.0.0.0	0 Orang	0.0.0.0.0.0	0.0 Orang	0.0.0.0.0.0			0.0 Orang	0.0.0.0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0 Orang	0.0.0.0.0.0.0	0.0.0	0.0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	1.06.3.3.0.09	Pembangunan dan Pengelolaan Kegiatan Jalan Kabupaten dan Nasional	Jumlah Lembaga yang Memenuhi yang Standar dan Orang Jalan Operasional	0 Lembaga	00.0.0.0.0.0	0 Lembaga	0.0.0.0.0.0	00 Lembaga	0.0.0.0.0.0.0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0.00	0.00	0 Lembaga	0.0.0.0.0.0.0	0.00	0.0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	1.06.3.4.0.11	Pelindo Tenaga Kerja Kabupaten Jalan Fisik Jalan Operasional Teknis yang Jalan	Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Jalan Fisik Jalan Operasional Teknis yang Jalan yang Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	00 Orang	0.0.0.0.0.0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0.00	0.00	0 Orang	0.00	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
																Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0.00	0.00			0.00	0.00	
																Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.06.3.5.0.00	Pembangunan Sistem Informasi dan Sarana dan Dengan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya RTH Jalan Memadai yang Memadai Fisik	00.00 Ha	0.0.0.0.0.0.0	0.00 Ha	0	0.0 Ha	00.0.0.0.0.0	0 Ha	0	0 Ha	0.0.0.0.0.0			0 Ha	0.0.0.0.0.0	0.00	0.0.0	0.00 Ha	0.0.0.0.0.0.0	00.00	0.00		
8	1.06.3.5.0.12	Pelindo Data dan Informasi dan Sarana dan Dengan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi dan Sarana dan Dengan Kabupaten Kota yang Disebarkan	0 Dokumen	0.0.0.0.0.0.0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	00.0.0.0.0.0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0.0.0.0.0.0			0 Dokumen	0.0.0.0.0.0	0.00	0.0.0	0 Dokumen	0.0.0.0.0.0.0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Awal Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun Berjalan (2025) yang Akan Dicapai		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (KUA) yang Akan Dicapai		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Akhir Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/5		14=12/7		15=8+12		16
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	11	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	
9	1.20.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	Persentase Tertib Tata Ruang	100 %	2.400.000.000	97,61 %	30.000.000	98 %	1.410.000.000	2 %	2.000.000	97,71 %	28.000.000				97,71 %	30.000.000	97,98	1,02	97,71 %	30.000.000	93,97	0,98	
	1.20.01.2.10	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Ruang Lingkup Kabupaten Dalu	Persentase Tertib Tata Ruang	100 %	600.000.000	97,61 %	10.000.000	98 %	600.000.000	2 %	2.000.000	97,71 %	28.000.000				97,71 %	30.000.000	97,98	1,02	170,00 %	60.000.000	93,71	0,96	
10	1.20.01.2.10.01	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kabupaten Dalu	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Kabupaten Dalu	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	28.000.000				2 Dokumen	30.000.000	0,01	0,02	1 Dokumen	60.000.000	0,01	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	1.20.01.2.10.02	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kabupaten Dalu	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Kabupaten Dalu	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	810.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0				2 Dokumen	0	0,01	0,00	2 Dokumen	0,00	0,01	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.20.01.2.11	Operasional dan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Ruang Lingkup Kabupaten Dalu	Persentase Tertib Tata Ruang	100 %	300.000.000	97,61 %	10.000.000	98 %	180.000.000	2 %	1	97,71 %	1.000.000				97,71 %	1.000.000	97,98	1,00	170,00 %	10.000.000,00	93,71	0,96	
12	1.20.01.2.11.01	Operasional Pemeliharaan Peralatan Ruang	Jumlah Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Ruang	10 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	1	2 Dokumen	1.000.000				2 Dokumen	1.000.000	0,01	0,00	2 Dokumen	10.000.000,00	0,01	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	1.20.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH	Persentase pemanfaatan sarana pemerintah yang ditetapkan oleh Kabupaten Dalu	100 %	200.000.000	100 %	5.000.000	100 %	97.000.000	2 %	1	0 %	1				0 %	1	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
	1.20.02.2.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebudayaan Daerah Kabupaten Dalu	Persentase pemanfaatan sarana pemerintah yang ditetapkan oleh Kabupaten Dalu	100 %	200.000.000	100 %	5.000.000	100 %	97.000.000	2 %	1	0 %	1				0 %	1	0,00	0,00	100 %	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Awal Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang Ditelaah		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (KPA) 2025 yang Akan Lalu		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Akhir Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=14+15		16=17+18		19=20+21		22=23+24		25
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
10	0.00.00.0.00.00	Urusan Pemerintahan Bersifat Pilihan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Tana	Jumlah Perda Lama Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan Lama Perangkat Daerah Kabupaten Tana	5 Perda Lama	0.00.000.000	5 Perda Lama	9.750.000	5 Perda Lama	87.500.000	5 Perda Lama	7	5 Perda Lama	7				5 Perda Lama	7	0.00	0.00	5 Perda Lama	9.750.000,00	00.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	0.00	0.00			00.00	0.00		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang		
		Persentase Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	0.00	0.00			00.00	0.00		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang		
11	0.00.00	PROGRAM PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah	100 %	000.000.000	100 %	78.000.000	100 %	87.750.000	0 %	0	0 %	0				0 %	0	0.00	0.00	0 %	0,00.000.00	0.00	0.00		
	0.00.00.0.00	Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Tata Ruang, Pengelolaan Kawasan Strategis, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Cepat Tumbuh di Daerah Kabupaten Tana	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah Kota	100 %	000.000.000	100 %	78.000.000	100 %	87.750.000	0 %	0	0 %	0				0 %	0	0.00	0.00	0 %	0,00.000.00	0.00	0.00		
12	0.00.00.0.00.00	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bidang Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan nasional lainnya	1 Dokumen	000.000.000	1 Dokumen	78.000.000	1 Dokumen	87.750.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0.00	0.00	1 Dokumen	0,00.000.00	00.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	0.00	0.00			00.00	0.00		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang		
		Persentase Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	0.00	0.00			00.00	0.00		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang		
13	0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	n.a	n.a	0.000.000.000	n.a	0.000.000.000	n.a	0.000.000.000	n.a	0.000.000,00	n.a	0.000.000,00				n.a	0.000.000,00	n.a	0 %	n.a	0,00.000.000,00	n.a	0,00 %		
	0.00.00.0.00	Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengairan Daerah	Terpeliharanya dan terlaksananya pemeliharaan, perlengkapan dan evaluasi Prasarana PU	100 %	000.000.000	100 %	0.000.000	100 %	00.000.000	0 %	0.000.000	00 %	0.000.000				00 %	0.000.000	00.00	00,00	100 %	00,000,000.00	00.00	0.00		
14	0.00.00.0.00.00	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Perkerasan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Perkerasan Daerah	12 Dokumen	00.000.000	0 Dokumen	00.000.000	0 Dokumen	00.000.000	0 Dokumen	0.000.000	0 Dokumen	00.000.000				0 Dokumen	00.000.000	00.00	00,00	0 Dokumen	00,000,000.00	00.00	00,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15	0.00.00.0.00.00	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pasang Surut	Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang akan dilakukan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Rawa dan Jaringan Pasang Surut Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pasang Surut	0 Jaringan	0.000.000.000	0 Jaringan	00.000.000	0 Jaringan	00.000.000	0 Jaringan	0.000.000	0 Jaringan	0.000.000				0 Jaringan	0.000.000	00.00	00,00	0 Jaringan	00,000,000.00	00.00	00,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Dalam Rancana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun Berjalan (2025) yang diusulkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPD 2025) yang diverifikasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II	III											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=14/12		14=15/12		15=16/12		17
				4	Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp	4 Rp	4 Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp	4	Rp	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Sesuai Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang Ditetapkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (KPPA 2025) yang Ditetapkan		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s.d Akhir Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/5		14=12/7		15=12/9		16
				Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 Awal Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun Berjalan (2025) yang Direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPD 2025) yang Direvisi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Akhir Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Prediksi Kinerja (Sebelum)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rekomendasi Capaian Kinerja (Program) (%)																0.11	1.33			0.11	19.61	
		Prediksi Kinerja (Program)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
	47	Rekomendasi Capaian Kinerja (Sesuai Sub Kegiatan) (%)																33.00	1.33			100.00	97.39	
		Prediksi Kinerja (Sesuai Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Jumlah Anggaran (sesuai usulan Program)	222,500,000.00		1,000,000.00		12,000,000.00				12,000,000.00													
	Kode Permasalahan Kabupaten Kinerja	Permasalahan (sesuai pernyataan kegiatan)																						
	Kode Penghambat Pencapaian Kinerja	Kurangnya SDM Teknis Perencanaan yang berkualitas di pemerintah kabupaten/kota																						
	Tindak Lanjut yang dilakukan Dalam Triwulan Berikutnya	Pelaksanaan pembinaan dengan mengundang instansi yang terkait dalam pelaksanaan Tata																						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

A. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Adapun target dan indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2024
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	95%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	92%

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran yang teralokasi dalam rangka Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari adalah sebesar Rp 16.996.685.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 571.744.070,00;

Jumlah Anggaran yang teralokasi dalam rangka Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah sebesar Rp 8.177.125.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 1.526.334.182,00.

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihadapi yakni adalah sebagai berikut:

1. Program air minum merupakan program yang memerlukan pendalaman dan perencanaan yang berkelanjutan dan memiliki kebijakan yang khusus. Pada saat ini program air minum yang dicanangkan dalam rangka memberikan akses layanan air minum hanya sebatas pada cakupan layanan saja belum secara mendalam terhadap kuailitas dari layanan tersebut.
2. Beberapa lokasi yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan program secara nasional dengan standar tertentu yakni air minum dengan kualitas aman belum dapat terpenuhi karena keadaan lokasi di lapangan dan ketertarikan Masyarakat yang tidak bisa dipaksakan untuk menerima mutu layanan air minum aman (layanan PDAM) disebabkan oleh tarif per bulan yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan bantuan layanan yang diberikan hanya berupa layanan air minum dengan kualitas layak.
3. Beberapa lokasi yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan program secara nasional dengan standar tertentu yakni Akses Sanitasi (Air Limbah)

dengan Kualitas Aman belum dapat terpenuhi mengingat standar akses aman tersebut adalah tangki septik telah disedot dan diolah di IPLT. Untuk tahun 2024 masih pada tahapan rehabilitasi/pengoptimalan sarana IPLT, sehingga operasional IPLT direncanakan mulai dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

4. Lokasi-lokasi yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk lebih dari 25 jiwa / hektar masih menggunakan akses layanan sanitasi berupa cubluk yang menurut ketentuan pada kepadatan jiwa tersebut akses tersebut tidak dapat dianggap akses layak maupun aman.
5. Ketersediaan lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang masih terkendala/tidak tersedia.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menggunakan / menerima fasilitas / akses air minum dan sanitasi.
7. Sarana dan prasarana yang telah terbangun sebelumnya mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Kebijakan yang bersifat mengikat kepada masyarakat dan disertai dengan kebijakan untuk menurunkan tarif pada akses air minum aman apabila dikehendaki masyarakat menerima akses air minum aman (berupa layanan PDAM).
2. Sosialisasi mengenai pemahaman fasilitas air minum dan sanitasi kepada masyarakat.
3. Koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah desa serta instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan.
4. *Sharing cost* dengan pemerintah desa dan/atau instansi lain dalam pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.
5. Melakukan pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi kepada masyarakat penerima fasilitas.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari dan Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dan sub kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

Untuk kegiatan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan sub kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Kekuatan (*Strenghts*)

yaitu situasi dan kondisi positif internal yang memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara di dalam mewujudkan pencapaian sasaran, komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :

1. Adanya ketentuan yang jelas peraturan perundang undangan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
2. Indikator utama Dinas PUPR yang selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

yaitu situasi dan kondisi intenal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi didalam mewujudkan pencapaian sasaran. Komponen kelemahan yang ditemui antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur, baik dalam pemenuhan jabatan administrator maupun sumber daya aparatur yang sesuai kompetensi teknis dilingkup PUPR.

2. Belum maksimalnya pengelolaan *database* urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pertanahan.
3. Belum lengkapnya dokumen rinci penataan ruang dan pertanahan sebagai acuan teknis pelaksanaan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Tantangan

yaitu situasi dan kondisi eksternal negatif yang menghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara mewujudkan pencapaian sasaran SKPD. Komponen peluang yang dijumpai antara lain :

1. Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana banjir sehingga menurunkan kondisi infrastruktur Kabupaten.
2. Masih adanya ruas jalan kabupaten dan jalan penghubung desa dalam kondisi rusak sedang dan berat.
3. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak dan air bersih layak.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan lainnya.
5. Masih banyak sungai yang dangkal.
6. Masih rendahnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan pertanahan.
7. Belum maksimalnya peran organisasi profesi daerah di bidang konstruksi dalam mengembangkan ketenagakerjaan.

D. Peluang

yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara mewujudkan tujuan dan sasaran. Komponen peluang yang dijumpai antara lain :

1. Adanya program – program pemerintah provinsi maupun pusat yang lokasi kegiatan ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Adanya program – program pusat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, karang taruna, dan organisasi profesi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Rancangan awal RKPD-P merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD-P untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja-P SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun wkatu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun yang dikoordinasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten HSU, merupakan data dukung dan pedoman dalam pembuatan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan prioritas dan sasaran yang ada pada rancangan awal RKPD-P Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian prioritas dan sasaran bidang infrastruktur, yaitu:

- Peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar, dengan sasaran :
  a. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran :
  a. Meningkatnya kesesuaian peruntukan lahan

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran. Penyesuaian anggaran berupa pergeseran dan penambahan anggaran sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel review RKPD Perubahan 2024 dan pada lampiran berupa surat usulan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran.

Usulan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan dikarenakan adanya pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Perubahan terhadap pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan yang dilakukan untuk mengakomodir program/kegiatan yang bersifat prioritas atau mendesak, sesuai dengan kondisi realita di lapangan. Penyesuaian – penyesuaian juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selebihnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan target kinerja dan data realisasi.

Tabel. 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dinas : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.068.822.004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.795.006.978	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	89.999.900	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	70.220.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	59.999.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	40.220.000	Penyesuaian pagu sesuai dengan kebutuhan dan data realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	100%	3.481.868.004	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	100%	3.663.978.838	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	616 orang/bulan	5.367.868.504	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	616 orang/bulan	5.551.976.936	Penyesuaian untuk jumlah ASN dan PPPK sesuai dengan realisasi
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. HSU	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3 dokumen	72.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. HSU	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	72.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	42.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	100%	172.880.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan kepegawaian ASN	100%	172.880.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	70 paket	113.880.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	69 paket	113.880.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. HSU	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan	12 orang	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. HSU	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	12 orang	60.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	100%	749.634.730	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	100%	2.008.299.730	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	373.658.750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	1.645.508.750	penambahan untuk kendaraan dinas operasional
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	372.976.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	388.791.000	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi dan realisasi terbaru
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	100%	601.897.660	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	100%	612.701.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	122.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	143.511.300	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi dan realisasi terbaru
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	214.999.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	214.999.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	265.999.150	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	297.189.700	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi dan realisasi terbaru
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	30.872.740.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	20.264.132.390	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi dan realisasi terbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	99.997.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	99.999.990	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi dan realisasi terbaru
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. HSU	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 unit	20.737.784.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. HSU	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 unit	20.028.908.000	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan data dan kondisi realisasi
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	99.970.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	90.345.000	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi dan realisasi terbaru
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	74.989.400	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 unit	74.989.400	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kab. HSU**	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	35,31%	28.679.740.978	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kab. HSU**	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	35,31%	37.465.306.564	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35,31%	16.693.035.794	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	39,31%	16.095.573.979	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. HSU	Panjang tanggul sungai yang dibangun	0,09 km	699.867.000	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. HSU	Panjang tanggul sungai yang dibangun	0,093 km	730.335.000	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi, realisasi terbaru dan perdasarkan SHS
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 unit	701.993.000	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 unit	651.993.000	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kondisi, realisasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
											tanbaru dan pendasarkan SHS
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 unit	805.440.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 unit	805.440.000	
	Normalisasi/Pastorasi Sungai	Kab. HSU	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	0,480 km	14.688.635.794	Normalisasi/Pastorasi Sungai	Kab. HSU	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	0,719 km	14.107.584.678	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase luas areal sawah yang terairi irigasi rawa	39,31%	11.888.705.184	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase luas areal sawah yang terairi irigasi rawa	39,31%	21.354.734.888	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	0,13 km	1.389.896.200	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	0,11 km	1.401.681.200	Penyesuaian pagu sesuai dengan realisasi dan target kinerja
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	0,09 km	1.241.370.500	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	0,06 km	1.102.673.350	Penyesuaian pagu sesuai dengan realisasi dan target kinerja
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi	0,21 km	7.366.759.744	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi	3,13 km	14.597.815.599	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,948 km	1.877.584.740	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,799 km	4.252.594.740	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51,395%	96.692.878.344	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51,395%	120.945.963.399	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupetrn/Kota		Jalan dalam Kondisi Baik	168.997 km	86.652.879.344	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	168.997 km	120.945.963.399	
	Pembangunan Jalan	Kab. HSU	Panjang Jalan Yang Dibangun	0,01 km	9.326.760.000	Pembangunan Jalan	Kab. HSU	Panjang Jalan Yang Dibangun	0,1 km	9.326.760.000	
	Rekonstruksi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direkonstruksi	0,1 km	999.901.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direkonstruksi	3,434 km	16.434.120.000	sub kegiatan DAK
	Rehabilitasi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direhabilitasi	3 km	70.396.859.344	Rehabilitasi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direhabilitasi	17,4 km	87.027.543.449	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja dan prioritas pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini
	Pembangunan Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang dibangun	6 jembatan	500.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang dibangun	0 jembatan	58.415.992	Penyesuaian dikarenakan pembangunan jembatan telah dilaksanakan pada APBDP 2023
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	900 jembatan	8.888.954.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	27 jembatan	11.219.124.000	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja dan prioritas sesuai dengan data kondisi saat ini
a	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Kab. HSU	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	6,02%	255.868.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Kab. HSU	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	6,02%	255.825.800	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. HSU	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	6,02%	306.320.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. HSU	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	6,02%	306.283.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	80 orang	199.890.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	80 orang	199.890.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. HSU	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 lembaga	24.563.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. HSU	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	24.563.000	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 orang	44.999.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 orang	44.999.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	6,02%	49.540.000	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,02%**	**49.540.000**	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	49.540.000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	49.540.000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Kab. HSU	**Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum**	**96%**	**2.605.960.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Kab. HSU	**Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum**	**96%**	**17.331.472.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	95%	2.605.960.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	95%	17.333.472.000	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	392,5 liter/detik	391.810.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	402,3 liter/detik	9.300.947.000	Penyesuaian target kinerja dan prioritas pemenuhan SPM serta pengantasan kemiskinan ekstrem
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Unit	2.214.150.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun	28 Unit	8.030.525.000	Penyesuaian target kinerja dan prioritas pemenuhan SPM serta pengantasan kemiskinan ekstrem
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. HSU	Jumlah unit persampahan yang tersedia	5 Unit	359.750.672	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. HSU	Jumlah unit persampahan yang tersedia	0 Unit	0	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	5 Unit	359.750.672	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	0 Unit	0	
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. HSU	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	359.750.672	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. HSU	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Dikarenakan memerlukan pelaksanaan perluasan TPA sehingga tidak ada TPA yang perlu dilakukan optimalisasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. HSU	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	92%	3.313.335.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. HSU	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	92%	8.179.989.060	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	92%	3.313.335.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	92%	8.179.989.060	
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. HSU	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	27.300.000	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. HSU	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	346.280.560	Penyesuaian target kinerja dan prioritas pemenuhan SPM serta pengantaran kemajuhan elstrom
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 Rumah Tangga	3.286.335.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	515 Rumah Tangga	7.930.708.500	Penyesuaian target kinerja dan prioritas pemenuhan SPM serta pengantaran kemajuhan elstrom
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGENIBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. HSU	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	5%	1.703.860.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. HSU	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	5%	1.885.360.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	5%	1.703.860.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	5%	1.885.360.000	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	3 sistem drainase perkotaan	1.703.860.000	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	3 sistem drainase perkotaan	1.885.360.000	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. HSU	Persentase bangunan berizin yang laik fungsi	10%	49.154.931.250	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. HSU	Persentase bangunan berizin yang laik fungsi	10%	48.286.099.968	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. HSU	Persentase bangunan berizin yang laik fungsi	10%	49.154.931.250	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. HSU	Persentase bangunan berizin yang laik fungsi	10%	48.286.099.968	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	11 Bangunan Gedung	15.884.543.250	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	23 Bangunan Gedung	19.104.218.268	Penyesuaian target kinerja
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9 dokuman	30.086.272.600	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13 dokuman	28.996.073.700	Penyesuaian target kinerja
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Panitia, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. HSU	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Panitia, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	15 dokuman	224.012.800	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Panitia, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. HSU	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Panitia, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	15 dokuman	183.797.000	Untuk Mengakomodir kegiatan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. HSU	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya		0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. HSU	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10%	6.593.404.829	Penambahan program/ kegiatan/ sub kegiatan dikarenakan adanya pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		0	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 kawasan	6.593.404.829	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		0	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	36 kawasan	6.593.404.829	Penambahan sub kegiatan sebagai penyesuaian pemutakhiran nomenklatur
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. HSU	Persentase Tertib Tata Ruang	90%	1.012.581.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. HSU	Persentase Tertib Tata Ruang	90%	1.263.036.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Tertib Tata Ruang	90%	843.506.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Tertib Tata Ruang	90%	1.093.951.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	168.226.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	378.871.800	Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan data realisasi dan kebutuhan tindak lanjut

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	644.280.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	715.080.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Tertib Tata Ruang	**90%**	**169.075.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase Tertib Tata Ruang**	**90%**	**169.075.000**	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. HSU	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	5 Dokumen	169.075.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. HSU	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4 Dokumen	169.075.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
12	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	**37.844.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	**37.834.000**	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	37.844.000	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	37.834.000	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 berita acara	37.844.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 berita acara	37.834.000	
13	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI RERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Kab. HSU	**Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi**	**75%**	**91.772.000**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI RERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Kab. HSU	**Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi**	**75%**	**87.372.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	75%	91.772.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	75%	87.372.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 dokumen	91.772.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 dokumen	87.372.000	
					202.927.835.248					271.572.564.696	

2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebenarnya sudah cukup menyentuh masyarakat desa yang dilihat dari banyaknya program dan kegiatan SKPD yang sama atau sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga program masyarakat bisa berjalan dengan baik. Program yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan pertumbuhan bagi ekonomi keluarga maupun peningkatan ekonomi pedesaan, serta adanya hubungan kerja sama antar pihak terkait dalam hal penyusunan program, sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Akan tetapi tidak semua usulan masyarakat ataupun pokok – pokok pikiran DPRD dapat diakomodir pada DPA TA 2023, sehingga pada penyusunan Renja Perubahan ini disusunlah program/kegiatan yang bersifat prioritas yang memuat beberapa usulan dari masyarakat untuk diusulkan sebagai tambahan pada APBD Perubahan TA 2023. Usulan – usulan masyarakat tersebut terbagi untuk beberapa sub kegiatan, yaitu: sub kegiatan Rehabilitasi Jalan; sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan; sub kegiatan Normalisasi Sungai; sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa, dan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan memperhatikan evaluasi hasil renja tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024, RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan. Pada penyusunan program dan kegiatan yang ada pada dokumen Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini mengacu pada program dan kegiatan yang ada pada RKPD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 – 2026.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada perubahan tahun 2024 ini akan melaksanakan 12 (dua belas) program, 20 (dua puluh) kegiatan, 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan untuk mengimplementasikan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu dana indikatif sebesar **Rp. 271.122.164.598,-** (***Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah***). Total pagu dana bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH Sawit tahun anggaran 2024.

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA,

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
    5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    6) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
    10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
    13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    15) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA),

7. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
   17) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
   18) Normalisasi/Restorasi Sungai
   19) Pembangunan Tanggul Sungai
   20) Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
8. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
   21) Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
   22) Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
   23) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
   24) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM,

9. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
   25) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
   26) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

10. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    27) Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
    28) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
    29) Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

VI. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG,**

12. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub kegiatan :

    30) Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

    31) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

    32) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

VII. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

13. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

    33) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

VIII. **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN,**

14. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

    34) Pembangunan Jalan

    35) Rekonstruksi Jalan

    36) Rehabilitasi Jembatan

    37) Pembangunan Jembatan

    38) Rehabilitasi Jalan

IX. **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI,**

15. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan sub kegiatan:

    39) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

    40) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

41) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

16. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

42) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

X. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG,

17. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

43) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

44) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

18. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

45) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

XI. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN,

19. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

46) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

XII. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

20. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

47) Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 dan perkiran maju Tahun 2025 dilakukan pemetaan berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta perubahannya yang di rumuskan pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 1

Pemetaan Program dan Kegiatan sesuai PMD RI N0 90 Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN AWAL PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2020	PENGUKURAN CAPAIAN TARGET PERIODE OPD TAHUN 2021	CAPAIAN PERIODE LAIN DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PENGUKURAN KEADAAN TAHUN 2021		PERAN KEPALA DAERAH/ PERAN WAKIL KEPALA DAERAH
							TARGET 2021		PAGU INDIKATIF (Rp)			Belanja Pegawai (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	REGIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KOTA LUAR	KOTA DALAM	RANCANGAN AWAL RPJMD	RANCANGAN RENJA	RANCANGAN AKHIR RENJA				KOTA LUAR	KOTA DALAM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1																			
	1.03																			
1	1.03.01	PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang				100%	100%												
	1.03.01.01	Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Kawasan Perkotaan, Jembatan	Persentase terpeliharanya penyelenggaraan jalan (panjang jalan dan jembatan dalam km)				100 %	100 %							Mengalokasikan Untuk Pelaksanaan Dan Tersedianya Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan publik yang prima 2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat Desa, ASN dan Aparatur			
	1.03.01.01.01	Penyusunan DED jalan Perkotaan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah				Dokumen	Dokumen					Kab. Kec. Lurah Desa Semua Kecamatan Semua Kabupaten	Dalam Rangka Otonomi Daerah Untuk Kabupaten	Mengalokasikan Untuk Pelaksanaan Dan Tersedianya Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan publik yang prima 2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat				
	1.03.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SKPD)																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan					Kab. Kec. Lurah Desa Semua Kecamatan Semua Kabupaten	Dalam Rangka Otonomi Daerah Untuk Kabupaten	Mengalokasikan untuk Pelaksanaan Dan Tersedianya Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan publik yang prima 2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE BERJALAN ORD	KEADAAN AWAL PERIODE BERJALAN ORD TAHUN AWAL	PENERIMA / DAMPAK TARGET KELUARAN ORD TAHUN AKHIR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEADAAN AKHIR	PERKIRAAN KEMAJUAN RENCANA TINDAK AKHIR		PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENCAPAIAN
							TARGET AKHIR		PAGU INDIKATIF (Rp)			Sumber(s) Definitif (Y/N-R)	LOKUS	KEWENANGAN	PENGATUR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PERSENTASE	KEUANGAN	RATA-RATA	TAHUN AKHIR	RATA-RATA PERIODE BERJALAN				KEGIATAN	DAMPAK				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE SEKARANG ORD	KEADAAN AWAL PERIODE SEKARANG ORD TAHUN AWAL	PENUTUPAN / CAPAIAN TARGET AKHIR PERIODE SEKARANG ORD TAHUN AKHIR	CAPAIAN PERIODE LIMA TAHUN SEKARANG PERIODENYA										KEADAAN AKHIR	PENUTUPAN/REALISASI PERIODE LIMA TAHUN LALU		KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA YANG AKAN
							TARGET AWAL		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tambahan/Berkurang (TA-KE)	LOKASI	SUMBER DANA	PERSENTASE			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	PAGU PERUBAHAN AKHIR				PA/SKPA	DAERAH					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Terintegrasi Pedoman / Pendoman Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD				100 %	100 %													
		Penyelenggaraan Pelayanan dan Pengelolaan Aset																			
			Jumlah Aset Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dikelola				3 Paket	3 Paket													
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan													
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan PD				100 %	100 %													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat				4 Laporan	4 Laporan													
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																			

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA ORD	KELUARGA CAPAIAN RENJA ORD TAHUN BERJ	PENANGGUNG JAWAB / CAPAIAN TARGET RENJA ORD TAHUN BERJ	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KEGIATAN SEBELUMNYA	PERKIRAAN MASUK PERIODE TAHUN BERJ		RENCANA KOT SASARAN PENGELOLAAN DENGAN APBWB
							TARGET SAH		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tahun ke-2 (Sebelumnya) (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGATUR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PERUBAHAN	MURNI/SAH	RAPBD TAHUN	APBD TAHUN	RAPBD PERUBAHAN/MURNI				PENGATUR	DAERAH				
			Jumlah Layanan Perpustakaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lahan yang Disediakan				0 Layanan	0 Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	Kab. Kec. Dungi Desa Wetus Kecamatan Dampar Kab/Desa	Dalam Provinsi DI [illegible] Luar Negeri	Menyediakan Jaminan Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyediaan Jasa Pelayanan Komunikasi																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Jasa Pelayanan Umum Kepada yang Disediakan				0 Layanan	0 Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Dungi Desa Wetus Kecamatan Dampar Kab/Desa	Dalam Provinsi DI [illegible] Luar Negeri	Menyediakan Jaminan Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Pelaksanaan Bidang [illegible] Daerah Kewajiban Daerah	Persentase [illegible] sarana [illegible] [illegible] [illegible] pelaksanaan daerah				100 %	100 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Menyediakan Jaminan Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil	Kerjasama Desa PUSTA Kab. [illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Premi Asuransi Alat Transportasi dan Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Dipelihara dan Dipelihara Baik dan Pemanfaat				10 Unit	10 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Dungi Desa Wetus Kecamatan Dampar Kab/Desa	Dalam Provinsi DI [illegible] Luar Negeri	Menyediakan Jaminan Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sarana																		
			Jumlah Unit Mesin yang Dipelihara dan Dipelihara Baik dan Pemanfaat				1 Unit	1 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Dungi Desa Wetus Kecamatan Dampar Kab/Desa	Dalam Provinsi DI [illegible] Luar Negeri	Menyediakan Jaminan Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga																		
			Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Disediakan dan Dipelihara dan Dipelihara Baik dan Pemanfaat				1 Unit	1 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Dungi Desa Wetus Kecamatan Dampar Kab/Desa	Dalam Provinsi DI [illegible] Luar Negeri	Menyediakan Jaminan Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas untuk ibu hamil			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dan Rumah Tangga																		

No.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA ORD	KEADAAN AWAL PERIODE RENCANA ORD TAHUN AWAL	PENERIMA / DAMPAK TARGET KELUARAN ORD TAHUN AKHIR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEADAAN AKHIR	PERKIRAAN KELUARAN TAHUN AKHIR		PERANAN KOT SADARI PENANG SEKTOR UTAMA
							TARGET AWAL		PERKIRAAN AWAL (Rp)			Tanggung Jawab (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR			TARGET	PERKIRAAN AKHIR (Rp)	
							PERIODE	KEADAAN	RKPD 2024	KPPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				PERIODE	DAERAH				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) yang Lengkap				0 Unit	30 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Aceh Tengah Untuk Semua Kecamatan Dalam Kab/Daerah	Dana Transfer (DT) (DAU, DAK) Lokal Desa (Ladesa)	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Dan Tersedianya Peralatan Praktik	1. Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah untuk siswa/murid 2. Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah untuk siswa/murid			[illegible]	
1	1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas hutan dan lahan yang terkelola dalam rangka [illegible]				20,24 %	20,24 %	Rp 211.110.234,56	Rp 220.776.234,56	Rp 27.666.666.234,56	Rp 211.110.234,56							Rp 230.000.000,00	
	1.02.02.01	Pengelolaan Sumber Daya Air, Sistem Irigasi, Pengairan Pertanian, Jalan Irigasi Tengah (SD) Meter / Dalam Desain Infrastruktur	Persentase luas hutan dan lahan yang terkelola dalam rangka [illegible]				20,21 %	20,21 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Meningkatnya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi 2. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi	Kecamatan Kab. ABC		[illegible]	[illegible]
	1.02.02.01.0001	Rehabilitasi Pintu Air Bendung Pengairan Desa																		
			Jumlah Pos Lintas Batas Negara Pengairan Sawah (PLBN) Di Kecamatan				0 Unit	5 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Aceh Tengah Untuk Semua Kecamatan Dalam Kab/Daerah	Dana Transfer (DT) (DAU, DAK) Lokal Desa (Ladesa) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi 2. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi			[illegible]	
	1.02.02.01.0002	Normalisasi Sungai / Irigasi																		
			Panjang Jaringan Irigasi yang Dikembangkan/Direhabilitasi				0 [illegible]	1,7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Aceh Tengah Untuk Semua Kecamatan Dalam Kab/Daerah	Dana Transfer (DT) (DAU, DAK) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi 2. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi			[illegible]	
	1.02.02.01.0003	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 [illegible]	1,2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Aceh Tengah Untuk Semua Kecamatan Dalam Kab/Daerah	Dana Transfer (DT) (DAU, DAK) Dana Desa (Ladesa)	Meningkatnya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi 2. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan sosialisasi			[illegible]	
	1.02.02.01.0004	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Pengairan Sawah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA ORD	KEADAAN AWAL PERIODE RENCANA ORD	PENUTUP / CAPAIAN TARGET AKHIR PERIODE RENCANA ORD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN SASARAN	PERKIRAAN MASUK PERIODE TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tambahan Pendanung (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PERUBAHAN	MURNI/PAK	RANCANGAN	PERUBAHAN	RANCANGAN PERUBAHAN				MURNI/PAK	PERUBAHAN				
			Jumlah Pos Anggaran Pegawai Non-PNS yang Disiapkan				1 Unit	1 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Jungle Utara, Semua Kecamatan, Seluruh Kab/Desa	Dalam Penyusunan (DESAIGN-SYSTEM)	Mengalokasikan infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara merata di seluruh kecamatan dan kelurahan.			[illegible]	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PENGETAHUAN
	[illegible]	Pengelolaan dan Pengelolaan Gedung Kantor, Fisik, dan Sekunder untuk Operasional Pemerintah Daerah (termasuk Kantor Bupati, DPRD, dan Kantor Dinas Daerah lainnya)	Persentase Luas Gedung yang terpelihara dengan baik				30.01 %	30.01 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Mengalokasikan infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara merata di seluruh kecamatan dan kelurahan.	Wewenang Kab. / Kot.		[illegible]	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PENGETAHUAN
	[illegible]	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa																		
			Pengembangan Irigasi Rawa yang Ditangani				0 Unit	0 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Jungle Utara, Semua Kecamatan, Seluruh Kab/Desa	Dalam Penyusunan (DESAIGN-SYSTEM)	Mengalokasikan infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas.			[illegible]	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PENGETAHUAN
	[illegible]	Rehabilitasi Jaringan Irigasi																		
			Pembangunan Irigasi Rawa yang Dimanfaatkan				0.03 KM	0.03 KM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Jungle Utara, Semua Kecamatan, Seluruh Kab/Desa	Dalam Penyusunan (DESAIGN-SYSTEM)	Mengalokasikan infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas.			[illegible]	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PENGETAHUAN
	[illegible]	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa																		

No.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA ORD	KEADAAN AWAL PERIODE RENCANA ORD TAHUN AWAL	PENANGGUNG JAWAB / CAPAIAN TARGET PERIODE RENCANA ORD TAHUN AKHIR	CAPAIAN PERIODE LIMA TAHUN PERTAMA PERIODE RENCANA										KEADAAN AKHIR PERIODE RENCANA	PENGAMPU PERIODE RENCANA TAHUN 2027		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA
							TARGET AWAL		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tambahan/Berkurang (Rp-/+)	LOKUS	SUMBER DANA	PENGATUR				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	PAPS 2024	APBD 2024	RATA PERUBAHAN/2024				NASIONAL	DAERAH					
			Persen jumlah Objek Pajak yang Dimanfaatkan Digitalisasi				0 Unit/Unit	0 Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kot. Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dalam Transaksi Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah	Mengatur& Informasi Untuk Mendukung Pengambilan Kebijakan/Dalam Pelayanan Publik	1. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. 2. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.				[illegible]	
1	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN PERUM	Persentase desa dalam penyelesaian air minum				80 %	80 %	1.863.307.000,00	3.000.000.000,00	17.241.775.000,00	4.393.307.000,00								200.000.000,00	
	[illegible]	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum [illegible] di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang memperoleh akses dalam penyediaan air minum				30 %	30 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Mengatur& Informasi Untuk Mendukung Pengambilan Kebijakan/Dalam Pelayanan Publik	1. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. 2. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	Meningkatkan Kab. Kot.			[illegible]	[illegible]
	1.03.02.01.0001	Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	1.161.775.000,00	2.241.775.000,00	8.620.775.000,00	4.393.307.000,00	Kab. Kot. Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dalam Transaksi Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah	Mengatur& Informasi Untuk Mendukung Pengambilan Kebijakan/Dalam Pelayanan Publik	1. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. 2. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.				[illegible]	[illegible]
	1.03.02.01.0002	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dimanfaatkan				0 [illegible]	0 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kot. Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dalam Transaksi Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) dan Pendapatan Transfer	Mengatur& Informasi Untuk Mendukung Pengambilan Kebijakan/Dalam Pelayanan Publik	1. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. 2. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.				[illegible]	[illegible]
2	1.03.01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PENGAMANAN REGIONAL	Jumlah unit pemanfaatan yang memadai				0 unit	0 unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE SEKARANG ORD	KEHILANGAN CAPAIAN KOLUM ORD TAHUN BERJ	PENYEBAB / CAPAIAN TARGET KOLUM ORD TAHUN BERJ	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEGIATAN SEBELUMNYA	PERKIRAAN KEMAJUAN KINERJA TAHUN BERI		PERANGKA KOT SADARI PENANG JAWAB
							TARGET SAH		REALISASI KINERJA (Rp)			Tanggung Jawab Keuangan (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF				TARGET	REALISASI KINERJA (Rp)	
							KEADAAN	KEADAAN	AWAL	AKHIR	RATA-RATA				KEADAAN	DAERAH				

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA ORD	MENJADI CAPAIAN RENJA ORD TAHUN BERJ	PENERIMA / CAPAIAN TARGET RENJA ORD TAHUN BERJ	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEGIATAN SEBELUMNYA	PERKIRAAN KEMAJUAN KINERJA TAHUN BERJ		PERANGKA KOT SASARAN PERANGKA SEUNG JAWAB
							TARGET SAH		PAGU INDIKATIF (Rp)			Terkoneksi Belanja (Rp)	LOKUS	SUMBER DANA	PENGATUR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PENGELUAR	PENGELUAR	RANCANGAN	PERUBAHAN	PERGESERAN				PENGELUAR	DAERAH				
			jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tanah dan Tangan dapat akses dengan Benar				0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga					Kab. Kec. Gunga Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (DAU, DBH, DAK, DAU, DBH, DAK, DAU, DBH, DAK,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR : PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE SEBELUM ORO	KEADAAN AWAL PERIODE ORO TERAKHIR	PENERIMA / DAMPAK TARGET AKHIR PERIODE ORO	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEADAAN AKHIR	PERKIRAAN KEBUTUHAN TAHUN 2027		KOMPAK KOT SADAR PENTING SEKALI WWW.
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tahun ke-2 (Sebelum) (Rp)	LOKUS	SUMBER DANA	PENGATUR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PERSENTASE	KEADAAN	RANCANGAN	KEBUTUHAN	RANCANGAN PERUBAHAN				RASIONAL	DAMPAK				
			Jumlah Dokumen Rencana yang Telah Ditetapkan Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Telah Dievaluasi

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA ORD	KELUARGA CAPAIAN RENJA ORD TAHUN BERJ	PENANGGUNG JAWAB / CAPAIAN TARGET RENJA ORD TAHUN BERJ	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEGIATAN SEBELUM	PERKIRAAN KEMAJUAN RENCANA TAHUN INI		RENCANA AKHIR MASA PENERAPAN SEBELUM AWARE
							TARGET AWAL		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tambahan/Berkurang (Rp+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGATUR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]					
			Jumlah Sanggar dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Lainnya yang Dibina				-	0 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas.			[illegible]	
1	1.02.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	penyelenggaran penataan ruang daerah kab				31.267%	31.267%	30.000.000.419,00	30.000.875.241,00	120.875.661.398,00	-81.754.243.203,00							6.161.118.242,00	
	[illegible]	Perencanaan tata ruang/kawasan	Jumlah dokumen RTR/KSK/KSP				[illegible] Rpt	[illegible] Rpt	[illegible]	[illegible]	[illegible]				Menyediakan infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas.	Rekomendasi [illegible]		[illegible]	
	[illegible]	Perencanaan tata ruang																		
			Penyelenggaraan yang Dilakukan				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas.			[illegible]	
	[illegible]	Pemanfaatan ruang																		
			Penyelenggaraan yang Dilaksanakan				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas.			[illegible]	
	[illegible]	Pengendalian pemanfaatan																		
			Jumlah Dokumen yang Dievaluasi				[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Menyediakan infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara proporsional sesuaikan dan prioritas.			[illegible]	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA CPD	KEADAAN AWAL CAPAIAN RENJA CPD TAHUN AWAL	PENERIMAAN / CAPAIAN TARGET RENJA CPD TAHUN AKHIR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEADAAN AKHIR	PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN AKHIR		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET AWAL		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tahun ke-n (Sebelum) (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGATUR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PERTAMA	AKHIRAN	PERTAMA	AKHIRAN	AKHIR PERIODE RENCANA				RASIONAL	DAMPAK				
	[illegible]	Pendidikan Jenjang																		
			Jumlah peralatan yang Dibangun				5 Jenjang	7 Jenjang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Aceh Jaringan Utara Sarana Kecamatan Jaringan Kab/Desa	Dalam Tanah/Gedung (Jalan/Jembatan) Kab/Kota	Mempercepat Informasi Untuk Mendukung Pengambilan Ekonomi Dan Pelayanan Cepat	1. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan kondisi baik 2. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan sempurna			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang jalan yang Direhabilitasi				7 KM	11 KM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Aceh Jaringan Utara, Jaringan Kecamatan Jaringan Kab/Desa	Dalam Tanah/Gedung (Jalan/Jembatan) [illegible] Utara Tengah, [illegible] [illegible] Kab. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	Mempercepat Informasi Untuk Mendukung Pengambilan Ekonomi Dan Pelayanan Cepat	1. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan kondisi baik 2. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan sempurna			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PROGRAM PENGEMBANGAN JAGA KONSTRUKSI	Persentase [illegible] Jalan sepanjang [illegible] [illegible]				[illegible] %	[illegible] %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	Pembanggunan Peralatan Tenaga Teknis Kontruksi	Persentase [illegible] jalan kontruksi yang terpenuhi				[illegible] %	[illegible] %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengambilan Ekonomi Dan Pelayanan Cepat	1. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan kondisi baik 2. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan kondisi baik	Masyarakat Kab. [illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Pengembangan Kualifikasi Jabatan Operasi dan Pemeliharaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operasional Teknis yang Jasa Konstruksi yang Disertifikasi				80 Orang	100 Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Aceh Jaringan Utara Sarana Kecamatan Jaringan Kab/Desa	Dalam Tanah/Gedung (Jalan/Jembatan) [illegible] Utara [illegible]	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengambilan Ekonomi Dan Pelayanan Cepat	1. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan kondisi baik 2. Peningkatan infrastruktur desa, sarana prasarana sepenuhnya dan kondisi baik			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE SEKARANG ORD	KEADAAN AWAL PERIODE SEKARANG TERAKHIR	PENERIMA / DAMPAK TARGET PERIODE SEKARANG TERAKHIR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEGIATAN SEBELUM	PERKIRAAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN INI		RENCANA KOT SASARAN PERIODE SEKARANG AWARE
							TARGET (Rp)		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tahun ke-2 (Sebelum) (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGATUR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KEADAAN	KEADAAN	RANCANGAN	PERUBAHAN	PERGESERAN				RASIONAL	DAMPAK				
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Diregulasi Kepatuhannya				20 Lembaga	0 Lembaga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Lingk. Desa Semua Kecamatan Semua Kab/Desa	Dana TERKAIT DAERA [illegible]	Mengatur& Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan. 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Dilatih dan Disertifikasi Sesuai Standar Kompetensi				50 Orang	50 Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Lingk. Desa Semua Kecamatan Semua Kab/Desa	Dana TERKAIT DAERAH [illegible]	Mengatur& Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyelenggaraan Layanan Informasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan Kawasan Perkotaan	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat				0,27 %	0,27 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Mengatur& Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan	Rekomendasi Kab. [illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyelenggaraan Pelatihan Informasi dan Konsultasi Calon Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Dokumen Cara dan Informasi Jasa Konstruksi Dikirim, Aplikasi/Website yang Disebarkan				1 Dokumen	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Kec. Lingk. Desa Semua Kecamatan Semua Kab/Desa	Dana TERKAIT DAERAH [illegible]	Mengatur& Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan			[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	PROGRAM PENGELOLAAN/RUAS PERATAAN/RUANG	Persentase Tanah Tata Ruang				80 %	80 %	[illegible]	1.412.291.000,00	1.30.3.000.000,00	-982.776.240,00							370.000.000,00	
	[illegible]	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanah Tata Ruang				80 %	80 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Mengatur& Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan 2. Peningkatan infrastruktur dasar secara produktif secara berkelanjutan dan berkelanjutan	Rekomendasi Kab. [illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan [illegible] Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE SEKARANG ORD	KEADAAN AWAL PERIODE SEKARANG TAHUN AWAL	PENERIMAAN / CAPAIAN TARGET AKHIR PERIODE SEKARANG ORD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEADAAN AKHIR	PENERIMAAN/CAPAIAN TAHUN INI		KONDISI KHT SASARAN PENERIMA SEKARANG AKHIR
							TARGET		PENERIMAAN/CAPAIAN (Rp)			Tahun ke-2 Sekarang (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF			TARGET	PENERIMAAN/CAPAIAN (Rp)	
			Jumlah Dokumen Kontrak dan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kontrak Terlaksana				1 Dokumen	1 Dokumen					Kab. Ind. Sungai Utara, Kantor Kecamatan Sungai Tabuk	PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI/DBHCHT	Melaksanakan Administrasi Untuk Mendukung Pengadaan Barang/Jasa Dan Pelayanan Client	1. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan. 2. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan				
			Jumlah Dokumen Kontrak dan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kontrak Terlaksana				1 Dokumen	1 Dokumen					Kab. Ind. Sungai Utara, Kantor Kecamatan Sungai Tabuk	PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI/DBHCHT	Melaksanakan Administrasi Untuk Mendukung Pengadaan Barang/Jasa Dan Pelayanan Client	1. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan. 2. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan				
		Koordinasi Dokumen Pengendalian Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang				80 %	80 %							Melaksanakan Administrasi Untuk Mendukung Pengadaan Barang/Jasa Dan Pelayanan Client	1. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan 2. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan	Pelaksanaan Kab. ...			
			Jumlah Dokumen Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tata Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen					Kab. Ind. Sungai Utara, Kantor Kecamatan Sungai Tabuk	PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI/DBHCHT	Melaksanakan Administrasi Untuk Mendukung Pengadaan Barang/Jasa Dan Pelayanan Client	1. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan 2. Peningkatan efektivitas dan sistem prosedur pelaksanaan dan pengelolaan				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	3.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN																		
	3.01.01	PROGRAM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN	Persentase pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan di wilayah				100%	100%												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE SEKARANG ORD	KEADAAN AWAL PERIODE SEKARANG ORD TAHUN AWAL	PENERIMAAN / CAPAIAN TARGET AKHIR PERIODE SEKARANG ORD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEADAAN AKHIR	PENGELOLAAN/PENGUNDANG TAHUN INI		KONDISI YG DIHARAPKAN PENERIMA SETELAH BERAKHIRNYA
							TARGET (%)		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tambahan/Pengurang (Rp+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	PERSENTASE			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PERTAMA	AKHIRNYA	RAPO TAHUN	AKHIR TAHUN	RAPO PERIODE/PERIODE				RASIONAL	DAERAH				

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 mengacu pada RPD 2023 – 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 serta Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan manifestasi dari respon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Kerja Perubahan ini menjadi acuan kerja dari semua bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang diharapkan mampu memberikan konstribusi positif dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi instansi.

Kesadaran untuk secara terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan perancangan penerapan *Good Governance* di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka revitalisasi diri maupun organisasi.

Kami juga menyadari bahwa di dalam penulisan ini memiliki kekurangan dan segala kekurangsempurnaan, oleh karena itu kami siap menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif, untuk selanjutnya akan digunakan sebagai modal perbaikan penulisa dan kinerja organisasi.

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Dinas,

Ir. AMOS SILITONGA, ST., MMT.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. A. Yani No. 14 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61478 Kode Pos 71414

Amuntai, 11 Pebruari 2024

Nomor : 000.7.2.4/099/DPUPR
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penyesuaian Nomenklatur Sub Kegiatan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kepada :
Yth. Bappedalitbang HSU
cq. Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

di -
Amuntai

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya penyusunan Ranwal RKPD 2025 dan adanya pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan maka kami memohon agar dapat menambahkan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Penambahan sub kegiatan baru ini dikarenakan untuk dapat menyesuaikan antara target pelaksanaan pekerjaan dengan indikator sub kegiatan pemutakhiran. Sedangkan indikator Sub Kegiatan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan target pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

AMOS SILITONGA, ST, MMT
NIP. 19691001 199703 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. A. Yani No. 14 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61478 Kode Pos 71414

Amuntai, 2 April 2024

Nomor : 000.7.2.4/105/DPUPR
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penyesuaian Nomenklatur Sub Kegiatan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kepada :
Yth. Bappedalitbang HSU
cq. Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

di -
Amuntai

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya penyusunan Ranwal RKPD 2025 dan adanya pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan maka kami memohon agar dapat menambahkan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

Penambahan sub kegiatan baru ini dikarenakan untuk dapat menyesuaikan antara target pelaksanaan pekerjaan dengan indikator sub kegiatan pemutakhiran. Sedangkan indikator Sub Kegiatan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan target pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. AMOS SILITONGA, ST, MMT
NIP. 19691001 199703 1 009

DAFTAR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENYESUAIAN DENGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Keterangan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan 2024 (pada DPA Murni belum ada dan tidak ada pada Renstra)
Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Penambahan sub kegiatan (tidak ada pada Renstra)

TABEL PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rumus Indikator	2024		2025		2026		Keterangan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1						2	3		5	6	7	8	9	10	11
BIDANG CIPTA KARYA															
1	03	09				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem	10,00%	1.000.000.000,00	10,00%	1.000.000.000,00	10,00%	1.000.000.000,00	Penyesuaian pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan (sebelumnya Program Pengembangan Permukiman)
1	03	09	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	1.000.000.000,00	2 Kawasan	1.000.000.000,00	2 Kawasan	1.000.000.000,00	
1	03	09	2	01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 kawasan	1.000.000.000,00	2 kawasan	1.000.000.000,00	2 kawasan	1.000.000.000,00	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rumus Indikator	2024		2025		2026		Keterangan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1						2	3		3	6	7	8	9	10	11
BIDANG JASA KONSTRUKSI															
1	03	11				**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat**	**Jumlah SDM Jasa Konstruksi bersertifikat / Jumlah SDM Jasa konstruksi x100 %**	**6,02**		**6,68**		**7,30**		
1	03	11	2	04		**Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi yg di Awasi / Jumlah Keseluruhan Paket Pekerjaan Konstruksi x 100 %**			**25,00**	**200.000.000,00**	**35,00**	**300.000.000,00**	**Penyesuaian pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan**
1	03	11	2	04	0004	Sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			20 paket pekerjaan	50.000.000,00	20 paket pekerjaan	50.000.000,00	
1	03	11	2	04	0005	Sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk			20 bangunan konstruksi	50.000.000,00	20 bangunan konstruksi	50.000.000,00	
1	03	11	2	04	0006	Sub kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			2 lembaga	50.000.000,00	2 lembaga	50.000.000,00	
1	03	11	2	04	0007	Sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha			20 badan usaha	50.000.000,00	20 badan usaha	50.000.000,00	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rumus Indikator	2024		2025		2026		Keterangan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1						2	3		5	6	7	8	9	10	11
BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG															
1	03	12				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi / Jumlah rekomendasi yang sesuai tata ruang x 100%	90%		90%		90%		
1	03	12	2	01		Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi / Jumlah rekomendasi yang sesuai tata ruang x 100%	90%	100.000.000,00	90%	350.000.000,00	90%	450.000.000,00	Penyesuaian pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan
1	03	12	2	01	0006	Pelaksanaan Penetapan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0	-	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
1	03	12	2	01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1	100.000.000,00	0	-	0	-	
1	03	12	2	01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0	-	0	-	1	100.000.000,00	
1	03	12	2	01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

Tabel di atas memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang baru/tambahan dari Tabel Rekstra yang telah ada.
Penambahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ini dikarenakan penyesuaian antara indikator pemutakhiran nomenklatur Sub Kegiatan dengan target/indikator pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang akan dilakukan

April 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir. AMOS SILITONGA, ST, MMT
NIP. 19691001 199703 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. A. Yani No. 14 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61478 Kode Pos 71414

Amuntai, 5 Juli 2024

Kepada :
Yth. Kepala Bappedalitbang
Kab. Hulu Sungai Utara

di -
Amuntai

Nomor : 900.1.1/ 237 /DPUPR
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Usulan Penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perubahan Anggaran Tahun 2024, maka dari DPUPR mengajukan usulan penambahan anggaran.

Adapun usulan penambahan anggaran untuk pembayaran pemeliharaan tahun 2023 (telah ada reviu Inspektorat) dan untuk kegiatan lain yang bersifat mendesak/prioritas. Jumlah usulan penambahan untuk untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp14.982.494.350,-

Berikut terlampir daftar untuk usulan penambahan Perubahan Anggaran Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. AMOS SILITONGA, ST, MMT.
NIP. 19691001 199703 1 009

Tembusan:
- Kepala BPKAD Kab. HSU

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

NO.	SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	USULAN PAGU PENAMBAHAN	TOTAL PAGU
1	Rehabilitasi Jalan	76,883,342,344.00	6,406,328,400.00	83,289,670,744.00
2	Rehabilitasi Jembatan	8,589,364,000.00	2,026,165,950.00	11,015,529,950.00
3	Normalisasi/Restorasi Sungai	14,685,635,794.00	1,000,000,000.00	15,685,635,794.00
4	Pembangunan Tanggul Sungai	699,967,000.00	200,000,000.00	899,967,000.00
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	15,320,865,744.00	200,000,000.00	15,520,865,744.00
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00
7	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19,284,545,850.00	200,000,000.00	19,484,545,850.00
JUMLAH			**Rp 14,982,494,350**	Rp 150,845,215,082

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 BIDANG BINA MARGA

NO.	SUB KEGIATAN	RINCIAN PENAMBAHAN	LOKASI	USULAN PAGU PENAMBAHAN	TOTAL
1	Rehabilitasi Jalan	Pembayaran Sisa Pemeliharaan Tahun 2023		126,328,400.00	6,406,328,400.00
		Biaya Penyelidikan Tanah		100,000,000.00	
		Pembelian alat geodetik		150,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Desa Murung Padang RT 4	Kec Banjang	200,000,000.00	
		Pengaspalan Jalan Desa Pandulangan RT. 4 Sampai Desa Garunggang RT. 1	Kec Banjang	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Desa Kaludan Kecil Samping Pom Bensin	Kec Banjang	200,000,000.00	
		Pengaspalan Jalan Desa Teluk Buluh RT.1 ke Desa Patarikan RT 4	Kec Banjang	100,000,000.00	
		Peninggian Jalan / Cor Semen Desa Tambalang Raya	Kec Sungai Tabukan	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Desa Kandang Halang RT. 04	Kec Amuntai Tengah	100,000,000.00	
		Pengecoran Jalan Desa Kandang Halang RT. 01 Samping SMPN 7	Kec Amuntai Tengah	100,000,000.00	
		Pembuatan Siring Beton dan Urugan Tanah lanjutan Desa Beringin RT.1	Kec Banjang	200,000,000.00	
		Peninggian Jalan Desa Pinang Kara RT.2	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Urugan Tanah dan Dek Beton Jalan Tembus Paliwara RT. 6	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Pelebaran dan Peninggian Jalan Desa (Pengecoran dan Pembutan Dek) Desa Tambalang Kecil RT.5	Kec Sungai Pandan	100,000,000.00	
		Cor Beton Jalan Desa Desa Tambalang RT. 4 RW. 002	Kec Sungai Pandan	200,000,000.00	
		Pengaspalan Jalan Desa RT.1 dan RT.2 Desa Panyaungan	Kec Amuntai Utara	200,000,000.00	
		Peningkatan/Siring Beton/Urugan RT.4 Desa Padang Basar Hilir	Kec Amuntai Utara	100,000,000.00	
		Peninggian Jalan Dek Beton RT.6 Desa Teluk Masjid	Kec Danau Panggang	150,000,000.00	
		Peninggian Jalan Dek Beton RT.1 Desa Sungai Naman	Kec Danau Panggang	80,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Desa RT.4 Desa Telaga Silaba	Kec Amuntai Selatan	200,000,000.00	
		Lanjutan peningkatan Jalan Desa RT.3 Desa Sungai Turak	Kec Amuntai Utara	200,000,000.00	
		Renovasi Jalan di Desa Banyu Tajun Pangkalan RT 4	Kec Sungai Pandan	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan/Pengaspalan Desa Murung Kupang	L 2 mx P 1.000 m	100,000,000.00	
		Peningkatan Jalan/Pengaspalan Desa Sungai Durait Hulu	L 2 mx P 1.000 m	150,000,000.00	
		Peningkatan Jalan RT. 2 ke RT. 4 Desa Rantau Karau Hilir	L 1,8 m x P 500 m	200,000,000.00	
		Pengaspalan Jalan Tahfiz Qur'an Nahdatul Qur'an RT. 3 Desa Manarap	Kec Danau Panggang	150,000,000.00	
		Peningkatan Jalan RT. 2 Desa Pimping	Kec Sungai Pandan	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan RT.2 ke RT.1 Desa Rantau Karau Hilir	Kec Sungai Pandan	100,000,000.00	
		Peningkatan Jalan TPA Desa Cangkering RT.2	Kec Amuntai Selatan	150,000,000.00	
		Pembuatan Jalan Baru di Desa Tapus RT.2	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Lanjutan Peningkatan Jalan Pengaspalan/Cor Jalan Kubur Muslimin ke arah Datu Kuning Desa Muara Tapus RT.3 dan RT.4	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Cor beton RT.5 Desa Kayakah	Kec Amuntai Selatan	200,000,000.00	
		Peningkatan Cor Beton Jalan Raffa Geraha desa Palimbangan	Kec Haur Gading	100,000,000.00	
		Lanjutan Cor Beton Komplek Wanda Mubarak	Kec Haur Gading	200,000,000.00	
		Pembuatan/Pembangunan Titian Lanjutan Desa Pamintangan RT.4 untuk TK-Al Quran	Kec Amuntai Utara	200,000,000.00	
		Pengaspalan Jalan Lorong Petani RT.4 dan RT.7 Desa Pasar Senin	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Pengaspalan Komplek Jalan Desa RT.3 Desa Kandang Halang	Kec Amuntai Tengah	150,000,000.00	
		Pengaspalan Jalan Komplek Cahaya Candra Purnama Blok II/B Desa Bayur	Kec Haur Gading	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Komplek Citra Faqih Sentosa RT.7 Desa Teluk Pering	Kec Amuntai Selatan	200,000,000.00	

NO.	SUB KEGIATAN	RINCIAN PENAMBAHAN	LOKASI	USULAN PAGU PENAMBAHAN	TOTAL
2	Rehabilitasi Jembatan	Pembayaran Sisa Pemeliharaan Tahun 2023		56,185,950.00	2,026,185,950.00
		Pembuatan Titian Kayu Ulin RT.1 Desa Tayur	Kec Amuntai Utara	200,000,000.00	
		Rehab Titian Kayu Ulin RT.2 Desa Muara Baruh	Kec Amuntai Utara	100,000,000.00	
		Pembuatan Titian RT.4 Desa Pajukungan Hulu	Kec Babirik	200,000,000.00	
		Pembuatan Titian RT.5 Desa Pandamaan	Kec Danau Panggang	50,000,000.00	
		Pembuatan Titian RT.7 Sebrang Desa Danau Panggang	Kec Danau Panggang	120,000,000.00	
		Pembuatan Jalan Titian Ulin RT.3 Desa Parupukan	Kec Babirik	200,000,000.00	
		Pembuatan Jalan Titian Ulin RT.2 Desa Sungai Durait Tengah	Kec Babirik	200,000,000.00	
		Pembuatan Jalan Titian Ulin RT.3 Desa Sungai Luang Hilir	Kec Babirik	200,000,000.00	
		Pembuatan Jembatan Ulin RT. 1 Watun Seribu Desa Telaga Mas	Kec Danau Panggang	100,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Titian Desa Danau Teratai RT.2	Kec Banjang	200,000,000.00	
		Rehab Jembatan Desa Pematang Benteng Desa Pematang Benteng	Kec Sungai Tabukan	200,000,000.00	
		Pembuatan Jembatan Ulin Desa Pulau Damar RT.6	Kec Banjang	200,000,000.00	
TOTAL					Rp 8,432,494,350

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 BIDANG CIPTA KARYA

NO.	SUB KEGIATAN	RINCIAN PENAMBAHAN	LOKASI	USULAN PAGU PENAMBAHAN	TOTAL
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pengaspalan Gang Fansah Desa Nelayan RT.1	Kec Sungai Tabukan	200,000,000.00	4,950,000,000.00
		Pengaspalan Gang An Noor (Depan Gedung NU) Desa Sungai Pandan Hulu RT.1 dan	Kec Sungai Pandan	200,000,000.00	
		Pengaspalan Gang Darus Shalihin Desa Pangkalan Sari	Kec Sungai Pandan	150,000,000.00	
		Pengaspalan Gang RT.1 Desa Teluk Cati	Kec Sungai Tabukan	150,000,000.00	
		Peningkatan / Pengecoran Jalan Gang H. Ihat Desa Kandang Halang RT. 03	Kec Amuntai Tengah	100,000,000.00	
		Pengecoran Desa Muara Tapus Gang Sungai Tuhuran	Kec Amuntai Tengah	100,000,000.00	
		Pengecoran Desa Muara Tapus Gang Pagi Sore	Kec Amuntai Tengah	100,000,000.00	
		Pengecoran Desa Muara Tapus Gang Mesjid	Kec Amuntai Tengah	100,000,000.00	
		Pengaspalan Jalan/ Gang An Najah Desa Rantawan RT.6	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Perbaikan Gang / pembuatan siring beton dan urugan tanah/sirtu Desa Rantawan RT.8	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Pembuatan Jalan/Titian Beton Gang Desa Mawar Sari RT.2	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Lanjutan Peninggian Lapangan Serbaguna Depan MTSN 6 HSU Desa Sungai Turak RT.2	Kec Amuntai Utara	200,000,000.00	
		Peningkatan Gang Anita RT. 3 Desa Sungai Durait Tengah	L 2 m x 80 m	50,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Gang Labu RT. 4 Desa Sungai Durait Tengah	L 2 m x 80 m	50,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Gang Mama Agung RT. 2 Desa Sungai Durait Hilir	L 2 m x 80 m	50,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Gang RT. 1 Desa Pakacangan Kec. Amuntai Utara	Kec Haur Gading	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Paring Indah RT. 05 Desa Teluk Paring	Kec Amuntai Selatan	150,000,000.00	
		Pengecoran dan Rehab Titian Ulin RT. 1 Jalan Gang Samping PLN Desa Panangkalaan	Kec Haur Gading	200,000,000.00	
		Peningkatan Gang Kubah Kyai H. Muhammad Jahri Desa Teluk Haur	Kec Haur Gading	100,000,000.00	
		Pengecoran Gang Swadaya RT. 07 Jalan Abdul Hamidan Kelurahan Antasan	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Rehab total Pintu Gerbang Makam Pahlawan Datu Abdullah Desa Jumba RT.4	Kec Amuntai Selatan	100,000,000.00	
		Pembuatan Jalan Titian Gang Damai RT.5/RW.3 Desa Kayakah	Kec Amuntai Selatan	150,000,000.00	
		Lanjutan Pembuatan Titian Gang Cucu Kai Darham Desa Muara Tapus RT.1	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Peningkatan Gang/ Jalan Desa Tepi Kali Negara Desa Tambalang Kecil	Kec Sungai Pandan	150,000,000.00	
		Perbaikan Gang Darussa'adah RT.1 Desa Pandulangan	Kec Sungai Pandan	100,000,000.00	
		Pemasangan Batu/Urugan Gang Padang Tanggul RT.2 Desa Padang Tanggul	Kec Amuntai Selatan	200,000,000.00	
		Peningkatan Gang Pesantren Desa Pasar Senin RT.5	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Peningkatan Gang Desa Kaludan Besar RT.2	Kec Banjang	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Muara Tapus RT.2 RW.1 Gang Pertanian	Kec Amuntai Tengah	200,000,000.00	
		Pembuatan Jalan Lingkungan Desa Murung Padang RT.4	Kec Banjang	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Gang RT. 3 Desa Tangkawang	Kec Haur Gading	100,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Gang Desa Kota Raja Tambus Jumba RT.1	Kec Amuntai Selatan	100,000,000.00	
		Peningkatan Gang KUA Desa Sungai Sandung	Kec Sungai Pandan	150,000,000.00	
2	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir	Kec Paminggir	200,000,000.00	200,000,000.00
TOTAL					Rp 5,150,000,000

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 BIDANG CIPTA KARYA

NO.	SUB KEGIATAN	RINCIAN PENAMBAHAN	LOKASI	USULAN PAGU PENAMBAHAN	TOTAL
1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi Saluran Irigasi Desa Kaludan Kecil	Kec Banjang	200,000,000.00	1,000,000,000.00
		Normalisasi Sungai Awang Sajuta Di Desa Banyu Tajun Dalam	Kec Sungai Pandan	200,000,000.00	
		Normalisasi Sungai Awang Gudal Desa Danau Panggang	Kec Danau Panggang	200,000,000.00	
		Normalisasi Sungai Pararain RT. 1 sd RT. 4 Desa Pararain	Kec Danau Panggang	200,000,000.00	
		Normalisasi Sungai Tambak Gundul RT. 4 Desa Pajukungan Hilir	Kec Babirik	200,000,000.00	
2	Pembangunan Tanggul Sungai	Dek Penahan Banjir (Pemasangan Batu dan Urugan) Desa Tambalang Kecil RT.4	Kec Sungai Pandan	100,000,000.00	200,000,000.00
		Lanjutan Siring Ulin Desa Teluk Cati	Kec Sungai Tabukan	100,000,000.00	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Pembuatan saluran dan tanggul pertanian Desa Teluk Daun-Kuangan-Sungai Turak	Kec Amuntai Utara	200,000,000.00	200,000,000.00
TOTAL					Rp 1,400,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. A. Yani No. 14 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61478 Kode Pos 71414

Amuntai, 15 Juli 2024

Nomor : 900.1.1/244/DPUPR
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2024

Kepada :
Yth. Ketua TAPD
Kab. Hulu Sungai Utara

di -
Amuntai

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perubahan Anggaran Tahun 2024, maka dari DPUPR mengajukan usulan penambahan anggaran.

Adapun usulan penambahan anggaran untuk kegiatan yang bersifat mendesak yaitu pengaspalan jalan Desa Teluk Mesjid – Desa Sarang Burung sebesar Rp 3.000.000.000,- dan untuk Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten sebesar Rp 188.000.000,-. Total keseluruhan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 3.188.000.000,-.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. AMOS SILITONGA, ST, MMT.
NIP. 19691001 199703 1 009

Tembusan:
- Kepala BPKAD Kab. HSU
- Kepala Bappedalitbang Kab. HSU

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024



HSU MANTAP

MAJU - MANDIRI - SEJAHTERA - AGAMIS - PRODUKTIF

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) di susun berdasarkan Perubahan RKPD HSU Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) DPPPA HSU. Di mana Perubahan Rencana Kerja DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini merupakan Perubahan Rencana Kerja Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024 dan Pelaksanaan Tahun ke 2 (kedua) dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 selanjutnya disebut P-Renja DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode Tahun 2024. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan rencana program prioritas pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan rancangan Perubahan APBD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) DPPPA Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) (Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
15. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak;
20. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL);
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
26. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploatasi Seksual Komersial Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Daerah

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 ;
36. Peraturan Dearah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah di ubah dengan Peratuaran Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentuakan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daearah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
37. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
40. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 No. 17)
41. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 No. 21)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya dimaksudkan untuk:

a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024.
b. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024.
c. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
e. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
f. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Harapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program dan kegiatan serta sub

kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja DPPPA Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah:

a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); Tahun 2024.
c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya;
d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja (RENJA)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DPPPA Kab. HSU

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA Kab. HSU

4.1 Program dan Kegiatan dan sub kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI TAHUN BERJALAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2023

Dalam penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 7 (tujuh) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan, serta sub kegiatan 46 (Empat puluh enam). Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah dicapai per bulan Juni Tahun 2024 dapat terealisasi 42,25%.

Jumlah program / kegiatan / subkegiatan berdasarkan Rencana Perjanjian Kinerja DPPPA Tahun 2024 per bulan Juni 2024 yang dikurangi adalah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Bidang KHPK), Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Bidang KHPK), Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Bidang KHPK), Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Bidang KHPK), Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Bidang KHPK), Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat), Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat), Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sekretariat), Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat), anggaran dari kegiatan tersebut dialihkan untuk

menambah anggaran kegiatan lainnya karena tidak terpakai, pada proses perencanaan penganggaran APBD Perubahan Tahun 2024.

Sedangkan program/ kegiatan / subkegiatan yang ditambahkan anggarannya adalah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Bidang PPA), Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Bidang KHPK), Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat), Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat), Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat).

Untuk penambahan subkegiatan ada pada Bagian Sekretariat yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Subkegiatan yang dihapus anggarannya dan dialihkan ke subkegiatan lain yaitu Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Bidang PPA), Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat).

Untuk di subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Bagian Sekretariat terjadi pengurangan karena adanya defisit anggaran di Pemerintah Daerah.

Secara fisik pelaksanaan program / kegiatan / subkegiatan yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah Sebagian dilaksanakan. Di Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan target belanja Daerah sebesar RP. 3.796.358.108 dengan Realisasi per Juni 2024 Rp. 1.604.006.447 atau (42,25%).

Tabel 2.1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.253.777.308	2.553.777.308	(700.000.000)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.752.907.194	2.052.907.194	(700.000.000)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.265.451.164	1.265.451.164	(0)
5.2.	BELANJA MODAL	0	50.334.000	(50.334.000)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	(0)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.	0	39.984.000	(39.984.000)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	(0)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	10.350.000	(10.350.000)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	4.018.358.358	3.796.358.108	(222.000.250)

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Analisis Kinerja pelayanan DPPPA dilaksanakan dengan mengukur kinerja pelayanan sesuai kewenangan tugas dan fungsi berdasarkan

indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Program sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Capaian Kinerja diukur berdasar target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

2.2.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan Unit Pelayan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA)

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk acaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Indikator lainnya dalam bidang ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secarafisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantara rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perempasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian (%)

Menurunnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak dan TPPO :			
Rasio kekerasan terhadap Perempuan	13,14	7 korban	8,30
Persentase kekerasan terhadap anak	0,0001%	11 korban	0,000158 %

2.2.2. Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK)

Keberhasilan pencapaian ini erat kaitannya dengan SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan dibuktikan dokumen Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) SKPD.

Pengumpulan data untuk PPRG belum terlaksana karena akan diadakan Pelatihan terlebih dahulu untuk pembuatan GAB, GBS dan KAK yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian (%)
Meningkatnya implementasi kebijakan Pengarusutamaan	7 %	-	0 %

Gender (PUG) Meningkatnya kualitas keluarga Perempuan korban kekerasan	10 %	5 %	50 %
Efektivitas data gender dan anak	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %

2.2.3. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Pemenuhan hak anak dipenuhi dengan mulai dilaksanakannya pembentukan Forum Anak Desa bagi desa yang belum memiliki forum anak dan mengaktifkan kembali forum anak desa yang sudah terbentuk.

Hak anak pun mulai terpenuhi bukan hanya ditingkat desa tetapi juga merambah kesekolah-sekolah dan pesantren yaitu Desa Layak Anak (DEKELA), Sekolah Ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian (%)
Meningkatnya pemenuhan hak anak	75 %	42 %	56 %

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara *mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 3 (tiga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *mempunyai fungsi* yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
b. *Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
c. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
d. *Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan*
e. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.*

Penjelasan dalam Amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa "Setiap warga Negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga teknis daerah mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi

program-program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga memiliki peranan dalam rangka membuka sudut pandang para stake holder mengenai prespektif gender dan anak serta mensosialisasikan pola pikir strategis dimana perempuan dan anak dapat dijadikan aset dan potensi penting dalam pembangunan.

Masalah krusial yang masih dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perlunya meningkatkan sistem ketersediaan data terpilah sebagai pembuka wawasan dengan pemilahan data berdasarkan gender agar proses penyusunan perencanaan dan implementasi program yang dilaksanakan terukur.

Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor merupakan metode terbaik untuk mendapatkan outcome program yang optimal. Kemampuan SDM aparatur untuk mendokumentasikan berbagai program dan kegiatan serta merekam, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan data tiap tahun dapat diinventarisir sebagai dasar perumusan kebijakan dan mengatasi berbagai isu-isu dan permasalahan.

Dari berbagai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang meliputi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beberapa Permasalahan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

6 (enam) Sub Urusan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan
   1) Belum optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
   2) Kualitas sumber daya aparatur yang masih kurang dalam jumlah

dan kemampuan teknis serta penguasaan teknologi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal (SPM).

3) Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan program/ kegiatan dengan pelaksanaan anggaran.
4) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
5) Masih minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah yaitu 70,36% dibandingkan kondisi ideal dengan daerah lain.
2) Masih rendahnya Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Belanja Langsung APBD Kabupaten.
3) Semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG, ditandai dengan 30 Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG meskipun tidak optimal.
4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif meningkat, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi 7 orang atau 23,33% di tahun 2019 dari 5 orang atau 16,66% dari target 30% dari target 9 (sembilan) orang atau 30% anggota DPRD perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5) Belum semua desa memiliki posyandu lansia yang berpotensi lansia rentan menjadi korban KDRT.
6) Masih terbatasnya pemahaman di semua tingkatan terhadap kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender bidang

ekonomi, sosial, politik dan hukum.

7) Masih kurang optimalnya koordinasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

c. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga

1) Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya data legalitas keluarga. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk satu layanan satu pintu berbasis hak anak berfungsi sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melayani Konseling Pra Pernikahan, Konseling Masalah Keluarga, Konseling Pengasuhan Anak dan Pendampingan Komunitas Anak. Mekanisme layanan Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terbagi menjadi layanan pasif dan aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Layanan ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia.

2) Masih belum maksimalnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

d. Permasalahan Sistem Data Gender dan Anak

1) Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender pada SKPD terkait.

2) Belum tersedianya data dan belum optimalnya kualitas data terpilah gender yang akurat sehingga menyulitkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender

e. Permasalahan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1) Masih adanya anak yang belum memiliki akta kelahiran.
2) Belum semua Kelurahan/Desa memiliki forum anak.
3) Masih belum maksimalnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak.
4) Belum semua sekolah ramah anak.
5) Belum semua kecamatan dan desa memiliki ruang bermain ramah anak dan anak berkebutuhan khusus (ABK).
6) Belum semua kecamatan memiliki Pusat Kreatifitas Anak.
7) Belum tersedianya pemenuhan hak anak (pojok laktasi) di semua SKPD Kab. Hulu Sungai Utara.

f. Permasalahan terkait Perlindungan Khusus anak

1) Masih adanya kasus anak berhadapan dengan hukum.
2) Belum terdatanya pekerja anak pada sektor informal.
3) Masih adanya anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
4) Belum tersedianya rumah aman untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.
5) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam perlindungan anak, seperti anak pelabelan, anak terisolasi, dan anak terisolir.
6) Belum terlayaninya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang rentan KDRT.
7) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak termasuk korban TPPO.
8) Belum tersedianya sarana di tempat umum dan lembaga pemerintahan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
9) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan jumlah kasus KDRT.

10) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kelembagaan perlindungan hak anak.

g. Permasalahan terkait perlindungan perempuan
   1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
   2) Masih adanya korban kekerasan perempuan yang belum berani melapor.
   3) Masih belum terlatihnya penanganan kasus TPPO.
   4) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk korban TPPO.
   5) Masih terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia pada Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memfasilitasi Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga di Desa/Kelurahan.
   6) Belum tersedianya sarana di tempat umum dan lembaga pemerintahan untuk perempuan berkebutuhan khusus.
   7) Belum tersedianya data dan pemberdayaan disabilitas perempuan yang mengakibatkan perempuan disabilitas rentan menjadi korban KDRT.

h. Permasalahan terkait data kekerasan perempuan dan anak
   1) Masih kurangnya sumber daya manusia pengelola data kekerasan perempuan dan anak.
   2) Masih lemahnya data dukung terhadap data anak pelabelan, anak terisolasi, anak terisolir, dan anak berkebutuhan khusus.
   3) Masih kurangnya data dukung terhadap data perempuan disabel

korban kekerasan.

4) Belum tersedianya data perempuan lansia rentan korban KDRT.
5) Belum tersedianya data perempuan dan anak yang pernah mengalami perlakuan salah dan KDRT.

Permasalahan dan Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain adalah:

1. Dukungan sumberdaya aparatur belum secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
2. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas di semua tingkatan.
3. Belum optimalnya bentuk-bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang berprespektif gender.
4. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak, antara lain:
   a. layanan kesehatan perempuan dan anak, misalnya upaya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak.
   b. layanan pendidikan dan akses perempuan dalam pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.
   c. upaya layanan bantuan/advokasi penegakan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   d. upaya peningkatan kesejahteraan perempuan melalui berbagai pola pemberdayaan sebagai bekal memperoleh pekerjaan disemua

sektor, termasuk peningkatan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik.

Dari berbagai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang meliputi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beberapa isu dan analisa/Permasalahan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan Pelaksanaa Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) secara Komprehensif.
2. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif, Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi;
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Masih tingginya kasus–kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) pekerja anak khusus di sektor informal, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
5. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara garis besar, sasaran pokok pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional Tahun 2020-2024 dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia1 yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2019.

Adapun visi Ir. Joko Widodo dan KH. Ma"ruf Amin adalah ***"Tewujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkerpribadian, berlandaskan gotong royong"***

Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJM Tahun 2020- 2024 di tetapkan 7 Agenga Pembangunanan tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup,meningkatkan ketahanan bencana dan pertahanan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Visi kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memperhatikan visi dan misi (platform) presiden terpilih. Memperhatikan visi presiden terpilih tersebut, maka kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi kementrian PPPA tahun 2020-2024 yaitu :

" **Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang Berkualitas dan Terlindungi dari Tindak Kekerasan** "

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penyusunan misi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan ke-3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas perempuan dan anak. Perumusan misi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) juga memperhatikan isu strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan misi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
3. Mewujudkan keluarga yang berkualitas
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA)

Tujuan adalah penjabaran visi kementrian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam

rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas,2014). Perumusan tujuan kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) mendasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2020-2024, dengan memperhatikan tugas dan fungsi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Tujuan yang ingin di capai kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan
2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
3. Meningkatkan kualitas keluarga
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA).

Terdapat dua poin penting di dalam agenda tersebut mengenai pembangunan yang melibatkan perempuan. Agenda pembangunan perempuan tersebut secara lugas dituangkan dalam 2 (dua) sub-agenda prioritas dengan agenda prioritas pertama (**Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**) yaitu Perempuan merupakan kunci keberhasilan negara dalam membumikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh karena itu, kita harus mendorong perempuan Indonesia makin memiliki peran penting dalam ranah keluarga maupun publik. Sebagai ibu bangsa, perempuan mendidik anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa, memperbaiki mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, serta menggerakan ekonomi keluarga dan masyarakat, diantaranya :

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan peranan dan keterwakilan

perempuan dalam politik dan pembangunan.

2. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
3. Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu.
4. Meningkatkan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan.
5. Menfasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga.
6. Menfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi menjadi wirausahawan.
7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.
8. Meningkatkan pelibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga.

Dari agenda prioritas kedua ***Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM*** sesuai dengan Kontitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.
2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebesan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.
4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.
6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.
7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.
8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini di mulai dari lingkungan yang ramah.
9. Meningkatkan kinerja dan kerjasama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Arah kebijakan nasional dan strategi pencapaian di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi: 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; 3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta 4) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan strategi: 1) Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

secara lengkap dan kontinyu; 2) Peningkatan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 3) Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera; 4) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial); 5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan 6) penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Ketiga, meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan strategi: 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; 2) Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; 3) Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/ pemerintah daerah; 4) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan; 5) Identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP yang

disharmonis; 6) Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan; 8) Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 9) Peningkatan efektivitas pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; 10) Pengembangan insentif untuk SDM di kementerian/lembaga/SKPD/ unit layanan terkait KtP; dan 11) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KTP.

3.1.2. Perlindungan Anak

Pertama, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dengan strategi: 1) Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan; 2) Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak; 3) Percepatan kepemilikan akta kelahiran; 4) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; 5) Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak; 6) Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak; 7) Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan 8) Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di

dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.

Kedua, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui strategi: 1) Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak; 2) Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak; 3) Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak; 4) Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif; 5) Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan; 6) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks local masyarakat; 7) Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa; 8) Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan 9) Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.

Ketiga, peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui strategi: 1) penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 2) peningkatan koordinasi

antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan; 3) penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data dan informasi lintas kementerian/lembaga/SKPD; dan 4) peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.

A. Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan Kesetaraan Gender sesuai RPJMD Tahun 2021-2025, dilaksanakan dengan prioritas pembangunan yakni "Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran Perempuan Di Semua Bidang Serta Terjaminnya Kesetaraan Gender". Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan yang responsif gender dan anak dituangkan melalui Meningkatkan pemberdayaan ekonomi produktif, perlindungan perempuan dan anak melalui sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Komitmen terhadap pembangunan responsif gender melaui RPJMD Tahun 2021-2025
2. Melaksanakan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan menyusun Peraturan Gubernur.
3. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011.

B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu Strategi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui berbagai aspek yaitu:

1. Aspek Penguatan Kelembagaan

a) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA
b) Mengembangkan kerjasama dan jaringan kelembagaan PUG, PP dan PA.
c) Membentuk dan mengoptimalkan forum data yang melibatkan lintas sektor/lembaga terkait.
d) Meningkatkan kualitas bahan-bahan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk optimalisasi pelaksanaan PUG, PP dan PA.
e) Mengembangkan monitoring, evaluasi pelaksanaan PUG, PP dan PA.

2. Aspek Pemberdayaan

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur, pemangku kepentingan dan masyarakat) dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA;
b) Memanfaatkan dan mengefektifkan peran Pokja/gugus tugas PUG, PP dan PA untuk meningkatkan kapasitas *focal point*;
c) Meningkatkan kemampuan perempuan untuk berperan aktif

dalam mekanisme perencanaan pembangunan tingkat desa dan mekanisme program yang menjadi mainstreamnya;

d) Meningkatan kepedulian dan peran lembaga Pemerintah dan non Pemerintah (LSM, Masyarakat serta Dunia Usaha) dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
e) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, advokasi untuk pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan/anak dan pemenuhan hak-haknya;

3. Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak

a) Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas fasilitator layanan pengaduan.
b) Meningkatkan koordinasi penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan instansi vertical dan leading sector penyelenggara Standar Pelayanan Minimal
c) Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Aspek Penguatan Kebijakan

Dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, maka untuk memberikan kesatuan pandang dalam menentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan arah kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan yaitu:

a) Mendorong pemahaman kepada pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep gender, kesetaraan

dan pengarusutamaan gender;

b) Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
c) Mendorong Komitmen dari Pemerintah daerah untuk melakukan regulasi kebijakan yang responsif gender;
d) Mengintegrasikan Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan monitoring dalam kebijakan/program/ kegiatan yang terformulasi pada penganggaran pada SKPD;
e) Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak.
f) Keserasian dan sinkronisasi kebijakan PUG, PP dan PA;

5. Aspek Pemenuhan Hak Anak

a) Pelaksanaan kebijakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai wujud pemenuhan 31 hak anak.
b) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran Tahun 2024 Berdasarkan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut pada tabel ;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TARGET TAHUN 2023	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
1.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik	Indeks reformasi Birokrasi	BB(0)	1.Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DP3A	BB/79,17	B/66	B/67.5
4.Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	66.12	9.Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks pembangunan gender(IDG)	70.65	72.70	78.85
				Indeks pembangunan gender (IPG)	91.52	92.02	93.52
				Jumlah perkawinan anak (orang)	69	59	29

Sumber data : DPPPA Kab. HSU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA KAB HSU

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun kedudukan tahun rencana RKPD tahun 2024 ini masuk pada tahapan tahun pertama dari dokumen RPD. Program dan Kegiatan yang direncakan tahun 2024 sebanyak 7 Program 21 kegiatan 53 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 5.299.774.965

4.1 Program dan Kegiatan serta sub kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

2.1. Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah

3.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

3.2 Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

4. Administrasi umum perangkat daerah

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.2 Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4.3 Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

4.4 sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.5 sub kegiatan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu

4.6 sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1. Sub Kegiatan pengadaan mebel

5.2. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lannya

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

6.1 Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

6.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

6.3 Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

7.1 Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

7.2 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

7.3 Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

7.4 Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi gedumg kantor dan bangunan lainnya

II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender(PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota

1.1 sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksaan PUG

1.2 Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksaan PUG termasuk PPRG

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik,ekonomi,hokum,social,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota

2.1. Sub kegiatan penyediaan sosialiasasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi

2.2. Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,hukum,sosial,dan ekonomi

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

3.1. Sub kegiatan pengembangan komunikasi,informasi,dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

III. Program Perlindungan Perempuan.

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota

1.1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,program,dan kegiatan pencegahan,kekerasan terhaap perempuan lingkup Daerah kabupetn/kota

1.2. Sub kgiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota

2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewengan kabupaten.kota

2.1 Sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekkrasann kewenangan kabupaten/kota

2.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota

3.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prsarana layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap kewenangan kabupaten/kota

3.2. Sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

3.3. Sub kegiatan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan komdisi khusus kewenangan kabupeten/kota

IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota

1.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota

1.2 Sub kegiatan pelaksanaan komunikasi,informasi, dan edukasi KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota

1.3 Sub kegiatan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota

2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota

2.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

2.2 Sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

2.3 Sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten/kota.

V. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota

1.1 Sub kegiatan penyediaan data gender dan anak dikewenangan kabupaten/kota

VI. Program Pemenuhan Hak Anak,

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah,non pemerintah,dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**

1.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembagabpemerintah,nonpemerintah,media dan dunia usaha kewenangan kabupetn/kota

1.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota

2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

2.1. Sub kegiatan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

2.2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.kota

2.3. Sub kegiatan pengembangan komunikasi,informasi,dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

2.4. Sub kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerahbkabupaten/kota

VII. Program Perlindungan Khusus Anak,

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota

1.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaankebijakan,program dan kegiatan pencegshsn kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

1.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota

2.1 Sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

2.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan nagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

3.1 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

3.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitaas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerahbkabupaten/kota

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta sub kegiatan DPPPA Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
2	**08**				**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daearah.**	**DPPPA HSU**	**100%**	**3,336,230,097**	**APBD**	-	**100%**	**3,327,455,019**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**DPPPA HSU**	**100%**	**45,490.000**	**APBD**	-	**100%**	**62,772,574**
2	08	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPPA HSU	6 Dokumen	24,120,000	APBD	-	6Dokumen	47,132,047
2	08	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPPA HSU	3 Laporan	21,370,000	APBD	-	3 Laporan	15,640,527
2	**08**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**DPPPA HSU**	**100%**	**2.678.879.967**	**APBD**	-	**100%**	**2,634,492,385**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	=08	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPA HSU	100%	2.678.879.987	APBD	-	100%	2,634,492,385
2	**08**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah**	**DPPPA HSU**	**100 %**	**38,109,375**	**APBD**	-	**100%**	**13,602,094**
2	08	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPPPA HSU	30 Set	10,749,375	APBD	-	30 Set	11,286,844
2	08	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Kabupaten HSU	6 Orang	27,360,000	APBD	-	6 Orang	2,315,250
2	**08**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah.**	**DPPPA HSU**	**100%**	**298,656,853**	**APBD**	-	**100%**	**301,731,620**
2	08	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	10 Paket	2,796,106	APBD	-	10 Paket	2,935,911
2	08	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	60 Paket	12,961,500	APBD	-	60 Paket	13,609,575

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	500 Paket	33,021,802	APBD	-	500 Paket	55,672,892
2	08	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPPPA HSU	1500 Paket	25,000,000	APBD	-	1500 Paket	163,485,236
2	08	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPA HSU	5 Laporan	4,365,900	APBD	-	5 Laporan	4,584,195
2	08	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten HSU	26 Laporan	220,511,545	APBD	-	26 Laporan	61,443,811
2	**08**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya pengadaan mebeler dan peraltan mesin lainnya**	**DPPPA HSU**	**4 Unit**	**27,736,746**	**APBD**	-	**4 Unit**	21,443,134
2	08	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Mebel yang dibeli	DPPPA HSU	1 Unit	1,844,971	APBD	-	1 Unit	9,044,970
2	08	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	DPPPA HSU	3 Unit	25,891,775	APBD	-	3 Unit	12,398,164

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**DPPPA HSU**	**100%**	**144,102,889**	**APBD**	-	**100%**	**219,436,233**
2	08	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPA HSU	10 Lapran	4,410,000	APBD	-	10 Lapran	4,630,500
2	08	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPPPA HSU	12 Laporan	91,692,869	APBD	-	12 Laporan	64,777,533
2	08	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	12 Laporan	48,000,000	APBD	-	12 Laporan	150,028,200
2	**08**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**DPPPA HSU**	**100%**	**106,254,267**	**APBD**	-	**100%**	**73,976,979**
2	08	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPPPA HSU	17 Unit	48,777,630	APBD	-	17 Unit	31,686,511

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapalangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPPPA HSU	3 Unit	26,893,406	APBD	-	3 Unit	20,678,076
2	08	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPPPA HSU	8 Unit	6,339,375	APBD	-	8 Unit	6,656,344
2	08	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peresentase Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	DPPPA HSU	8 Unit	24,243,856	APBD	-	8 Unit	14,956,048
2	**08**	**02**			**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan baru Covid-19**	**DPPPA HSU**	**75% APE**	**244,845,061**	**APBD**	-	**75% APE**	**257,136,383**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga**	**DPPPA HSU**	**38 Lembaga**	**72,966,561**	**APBD**	-	**38 Lembaga**	**76,664,083**
2	08	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	DPPPA HSU	2 Dokumen	8,683,841	APBD	-	2 Dokumen	9,118,033

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08	02	2.01	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	52 Perangkat Daerah	64,282,720	APBD	-	52 Perangkat Daerah	67,546,050
2	**08**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina**	**DPPPA HSU**	**12**	**164,954,800**	**APBD**	-	**12**	**173,202,500**
2	08	02	2.02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	30 Dokumen	46,548,500	APBD	-	30 Dokumen	48,675,900

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	02	2.02	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	42 Organisasi	118,406,300	APBD	-	42 Organisasi	124,325,600
2	**08**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat**	**DPPPA HSU**	**10**	**6,923,700**	**APBD**	-	**10**	**7,269,800**
2	08	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPPPA HSU	1 Dokumen	6,923,700	APBD	-	1 Dokumen	7,269,800
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**DPPPA HSU**	**100 %**	**265,550,446**	**APBD**	-	**100 %**	**278,870,174**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**75,221,000**	**APBD**	-	**10 kasus**	**78,982,200**
2	08	03	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	3 Dokumen	27,458,400	APBD	-	3 Dokumen	28,831,400
2	08	03	2.01	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	4 Perangkat Daerah	47,762,600	APBD	-	4 Perangkat Daerah	50,150,800
2	**08**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**84,182,460**	**APBD**	-	**10 kasus**	**88,391,640**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	DPPPA HSU	10 Orang	59.458.900	APBD	-	10 Orang	62.431.900
2	08	03	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 Layanan	24.723.560	APBD	-	10 Layanan	25.959.740
2	**08**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang dibina**	**DPPPA HSU**	**60 Lembaga**	**106,186,986**	**APBD**	-	**160 Lembaga**	**111,496,334**
2	08	03	2.03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 Laporan	10.170.563	APBD	-	10 Laporan	10.679.091

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	03	2.03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	DPPPA HSU	800 orang	86.034.948	APBD	-	800 orang	90.336.695
2	08	03	2.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Desa dan Kelurahan	10 orang	9.981.475	APBD	-	10 orang	10.480.548
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Meningkatnya persentase kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi kebiasan covid-19**	**DPPPA HSU**	**100 %**	**694,135,161**	**APBD**	-	**100 %**	**434,841,819**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga**	**DPPPA HSU**	**10 Kali**	**148,730,956**	**APBD**	-	**10 Kecamatan**	**156,167,474**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	04	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	52 Perangkat Daerah	48,245,538	APBD	-	52 Perangkat Daerah	50,657,815
2	08	04	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPPPA HSU	5 Dokumen	7,216,818	APBD	-	5 Dokumen	7,577,659
2	08	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	1 Laporan	93,268,600	APBD	-	1 Laporan	97,932,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan**	**DPPPA HSU**	**10 Lembaga**	**545,404,205**	**APBD**	-	**10 Lembaga**	**278,674,345**
2	08	04	2.02	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	DPPPA HSU	1 Lembaga	163,678,805	APBD	-	1 Lembaga	171,862,745
2	08	04	2.02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	200 Orang	10,302,300	APBD	-	200 Orang	10,817,400
2	08	04	2.02	03	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	2 Dokumen	371,423,100	APBD	-	2 Dokumen	95,994,200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Data terpilah gender dan anak**	**DPPPA HSU**	**2 dokumen**	**39,574,800**	**APBD**	-	**2 dokumen**	**41,553,550**
2	**08**	**05**			**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen**	**DPPPA HSU**	**2 dokumen**	**39,574,800**	**APBD**	-	**2 dokumen**	**41,553,550**
2	08	05	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPPPA HSU	2 dokumen	39,574,800	APBD	-	2 dokumen	41,553,550
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak**	**DPPPA HSU**	**70%**	**448,236,600**	**APBD**	-	**70%**	**470,648,300**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerinta, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemenuhan Indikator KLA**	**DPPPA HSU**	**3 lembaga**	**76,537,900**	**APBD**	-	**3 lembaga**	**80,364,700**
2	08	06	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	DPPPA HSU	20 Organisasi	44,367,100	APBD	-	20 Organisasi	46,585,400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha							
2	08	06	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	7 Dokumen	32,170,800	APBD	-	7 Dokumen	33,779,300
2	**08**	**06**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Indikator KLA**	**DPPPA HSU**	**60%**	**371,698,700**	**APBD**	-	**70%**	**390,283,600**
2	08	06	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	50 Orang	61,693,000	APBD	-	50 Orang	64,777,600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	06	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	30 Dokumen	201,392,800	APBD	-	30 Dokumen	211,462,500.
2	08	06	2.02	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	6 Dokumen	51,917,500	APBD	-	6 Dokumen	54,513,400
2	08	06	2.02	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	110 Dokumen	56,695,400	APBD	-	110 Dokumen	59,530,100
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Kasus yang tertangani pada anak**	**DPPPA HSU**	**100%**	**271,202,800**	**APBD**	-	**100%**	**282,697,600**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**07**	**2.01**		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Menurunnya jumlah kasus pada Anak**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**29,502,200**	**APBD**	-	**10 kasus**	**30,977,200**
2	08	07	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	3 Perangkat Daerah	19.042.200	APBD	-	3 Perangkat Daerah	19.994.300
2	08	07	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 Dokumen	10.460.000	APBD	-	10 Dokumen	10.982.900
2	**08**	**07**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**91,099,600**	**APBD**	-	**10 kasus**	**95,655,600**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	07	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 orang	67.431.000	APBD	-	10 orang	70.803.600
2	08	07	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampian Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 Layanan	23,668,600	APBD	-	10 Layanan	24.852.000
2	**08**	**07**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**PIK Keluarga dan PATBM yang dibina**	**Desa dan Kelurahan**	**120 lembaga**	**150,601,000**	**APBD**	-	**160 lembaga**	**156,064,800**
2	08	07	2.03	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasaranan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	70 Dokumen	86.642.600	APBD	-	70 Dokumen	88.908.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	07	2.03	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	15 Dokumen	63.958.400	APBD	-	15 Dokumen	67.156.300
TOTAL									**2.620.894.998**				**2.458.710.460**
TOTAL + GAJI ASN									**5.299.774.965**				**5,093,202,845**

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja-PD) Tahun 2024 merupakan rancangan kerja tahun ke 2 (Kedua) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026. Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan, memastikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sektor terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka hal-hal strategis dan operasional yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Mendorong pengarusutamaan gender terimplementasi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dapat memberikan manfaat, akses, partisipasi dan kontrol yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendorong implementasi kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan pola-pola pemberdayaan bagi perempuan serta kelompok lansia rentan KDRT melalui program dan kegiatan SKPD yang berkesinambungan dan bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Memperkuat kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melaksanakan upaya pencegahan dan pelayanan bagi korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan harapan berkurangnya rasio kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak.

4. Mendorong peran swasta, masyarakat dan lembaga non government untuk berperan aktif mengambil inisiatif dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas perempuan dan anak yang bersinergi dengan pemerintah daerah.
5. Mendorong kompetensi Sumber Daya Manusia, aparatur dan kinerja lembaga untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

Demikian untuk dilaksanakan.

Amuntai, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hj. HERMANI JOHAN, SKM, MAP, MMKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660717 198903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU









BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD. Renja Perubahan SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD juga disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga

target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja Perubahan SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun RKPD Perubahan Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan dan RAPBD Perubahan menjadi pedoman untuk menetapkan APBDP.

Dalam prosesnya penyusunan Renja Perubahan SKPD ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD pembangunan daerah Tahun 2024. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Pereknomian yang diprioritaskan untuk Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja DPMPTSP, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi;
   b. Analisis gambaran pelayanan DPMPTSP Kab HSU;
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra;
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
   e. Telaahan terhadap rancangan awal;
   f. Perumusan tujuan dan sasaran;
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   h. Perumusan kegiatan prioritas;
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
   j. Pembahasan forum;

Penyesuaian dokumen Rancangan Renja Perubahan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara
   a. Perumusan tujuan, sasaran indikator kinerja dan target kinerja DPMPTSP;
   b. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per bidang;

c. Menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi satu kesatuan utuh Renja Perubahan DPMPTSP.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (tentang Tahapan,) Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

j. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

k. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Ketenagakerjaan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berlanjut, memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personel dan kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan program dimasa yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP.

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7,539,894,247,- dengan realisasi sampai dengan semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 2,729,750,791,- atau sebesar 36,20% . Adapun hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan semester I adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Rp 731,134,808**	**Rp 195,728,420**	26.77%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Rp 704,222,608**	**Rp 195,728,420**	**27.79%**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 704,222,608	Rp 195,728,420	27.79%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Rp 16,912,200**	**Rp -**	**0.00%**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 16,912,200	Rp -	0.00%
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Rp 10,000,000**	**Rp -**	**0.00%**
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Rp 10,000,000	Rp -	0.00%
2.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Rp 63,442,400**	**Rp 18,000,000**	28.37%
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 63,442,400**	**Rp 18,000,000**	**28.37%**
	Pelayanan antar Kerja	Rp 45,200,000	Rp 18,000,000	39.82%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 18,242,400	Rp -	0.00%
3.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Rp 19,997,100**	**Rp 14,636,200**	73.19%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 9,998,100**	**Rp 7,068,100**	**70.70%**
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 9,998,100	Rp 7,068,100	70.70%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 9,999,000**	**Rp 7,567,100**	**75.68%**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,999,000	Rp 7,567,100	75.68%
4.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 6,126,672,989**	**Rp 2,331,009,910**	38.05%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp 6,990,000**	**Rp 2,800,000**	**40.06%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,990,000	Rp 2,800,000	40.06%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp 5,336,928,070**	**Rp 2,155,477,727**	**40.39%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5,336,928,070	Rp 2,155,477,727	40.39%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp**	**140,125,920**	**Rp**	**84,041,070**	**59.98%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3,535,100	Rp	1,332,000	37.68%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	9,449,720	Rp	660,000	7.20%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	17,498,100	Rp	7,237,300	41.36%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	109,643,000	Rp	74,791,870	68.21%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp**	**373,920,000**	**Rp**	-	**0.00%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	373,920,000	Rp	-	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**205,482,999**	**Rp**	**69,223,613**	**33.53%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	75,412,800	Rp	28,997,900	38.45%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	74,674,199	Rp	13,225,713	17.71%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	55,396,000	Rp	27,000,000	47.66%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**62,226,000**	**Rp**	**19,467,500**	**31.29%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	31,976,000	Rp	12,632,500	39.51%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	30,250,000	Rp	6,835,000	22.60%
5.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Rp**	**52,756,150**	**Rp**	-	**0.00%**
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Rp**	**52,756,150**	**Rp**	-	**0.00%**
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp	52,756,150	Rp	-	0.00%
6.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Rp**	**36,022,800**	**Rp**	**32,971,240**	**91.53%**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**36,022,800**	**Rp**	**32,971,240**	**91.53%**
	Pelaksanaan Kegatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp	36,022,800	Rp	32,971,240	91.53%
7.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Rp**	**14,999,650**	**Rp**	**1,980,000**	13.20%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Rp**	**14,999,650**	**Rp**	**1,980,000**	**13.20%**
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp	14,999,650	Rp	1,980,000	13.20%
8.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Rp**	**471,168,150**	**Rp**	**131,235,921**	27.85%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**471,168,150**	**Rp**	**131,235,921**	**27.85%**
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp	276,046,450	Rp	116,367,221	42.16%
	Pengawasan Penanaman Modal	Rp	195,121,700	Rp	12,868,700	6.60%
9.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Rp**	**23,700,000**	**Rp**	**4,189,100**	17.68%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**23,700,000**	**Rp**	**4,189,100**	**17.68%**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp	23,700,000	Rp	4,189,100	17.68%
TOTAL		**Rp**	**7,539,894,247**	**Rp**	**2,729,750,791**	**36.20%**

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa reaslisasi kinerja anggaran sebesar Rp. 2.729.750.791,- dari anggaran sebesar Rp. 7.539.894.247,- atau sebesar 36,20%. Dari realisasi

36,20% tersebut realisasi terbesar pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sebesar 91,53%. Sedangkan yang belum ada realisasi antara lain ada pada Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0%, Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil sebesar 0% dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 0%, Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar 0%.

Adapun capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target Akhir Renstra	%
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	81	0	0%	82	0%
2.	Meningkatnya kesempatan kerja	Pesentasi pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan	2%	0,014%	0,7%	8%	8,75 %
3.	Meningkatnya investasi	Realisasi Investasi (Rp. 000)	Rp. 20.000.000	Rp. 7.801.087.265	39,00 %	Rp. 80.000.000	9,75 %

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa kinerja pertama memiliki hasil yang cukup rendah, Dari hasil kinerja pertama sebesar 0% dikarenkan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih tahap proses perencanaan dan pendataan. Sedangkan kinerja dua Persentasi pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan sebesar 0,7% kurang maksimalnya reliasasi ini dikarenakan banyaknya para angkatan kerja yang belum melaporkan datanya ke pihak pelayanan bidang tenaga kerja, dan Realisasi Investasi sebesar 39%, belum maksimal dikarenakan masih belum terlaksanakannya pengawasan lebih intensif dan juga investasi yang ada didominasi oleh perusahaan yang bergerak dalam perdagangan barang dan jasa serta jasa konstruksi .

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang terdiri dari :

NO.	JENIS PELAYANAN PERIZINAN	JUMLAH
1	PBG	11
2	NIB	1007
3	PKKPR	2
4	REKLAME	2
5	LPK	0
6	PHPB	0

7	Izin Usaha Tempat Parkir Khusus	1
8	Izin Usaha Tempat Parkir Tepi Jalan Umum	17
9	Izin Penutupan Jalan	20
10	Izin Trayek	0
11	Izin Apotik	4
12	Izin Toko Obat	2
13	Izin Praktek Dokter Hewan	0
14	Izin Praktek Dokter Internsip	1
15	Izin Operasional Klinik	2
16	Izin Praktek Dokter Umum	9
17	Izin Optikal	0
18	Izin Praktek Dokter Umum	9
19	Izin Praktek Dokter Gigi	2
20	Izin Praktek Dokter Gigi Internsip	8
21	Izin Praktek Dokter Spesialis	12
22	Izin Praktek Bidan	53
23	Izin Praktek Perawat	74
24	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	1
25	Izin Praktek Refraksionis dan Optisien	0
26	Izin Praktek Fisioterafis	1
27	Izin Praktek Tenaga Gizi	2
28	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	14
29	Izin Praktek Ahli Teknis Kefarmasian	17
30	Izin Praktek Apotiker	4
31	Izin Praktek Apotiker Pendamping	4
32	Izin Praktek Radiografer	0
33	Izin Praktek Sanitarian	2
34	Izin Praktek Perawat Anastesi	3
35	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	22
36	Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/ Barang	2
37	Izin Operasional Lembaga Kursus/Pelatihan (LKP)	1
38	Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	8
	JUMLAH	**1317**

NO.	JENIS PELAYANAN NON PERIJINAN	JUMLAH
1	Kartu Pencari Kerja AK-I	169
	JUMLAH	**169**

Dari data tabel diatas jumlah pelayanan perizinan yang diterbitkan sebayak 1317 buah dan jumlah pelayanan non perizinan sebanyak 169 buah. Dari Pelayanan Perizinan jumlah terbanyak adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1007 buah atau 76,46% dan Pelayanan Non Perizinan jumlah terbanyak adalah Kartu Pencari Kerja/AK1 sebanyak 169 buah.

2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Masih rendahnya ketaatan masyarakat dalam hal pemenuhan perizinan dan non perizinan;
4. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
5. Masih rendahnya serapan tenaga kerja;
6. Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam melaksakanan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

2.4 Review Pada DPA-SKPD Murni Tahun 2024

Mempedomani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Murni Tahun 2024 yang menyediakan pagu indikatif anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 7.123.788.847,-. Setelah dilakukan telaahan maka disusunlah kebutuhan Anggaran Perubahan RPPA-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 sebesar Rp. 7.539.880.948,- atau mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 416.092.101,- atau sebesar 5,51%, yang terdiri dari penambahan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 416.092.101.

TABEL TC.31

Review terhadap Pelaksanaan DPA-SKPD Murni Tahun 2024

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Amuntai	Nilai SAKIP SKPD	79.00	6,126,672,989.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Amuntai	Nilai SAKIP SKPD	79.00	6,126,708,390.00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Amuntai	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	100%	6,990,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Amuntai	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	100%	46,339,000.00	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Amuntai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen	6,990,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Amuntai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen	46,339,000.00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Amuntai	**Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**5,336,928,070.00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Amuntai	**Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**5,336,928,070.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Amuntai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	408 Orang/Bulan	5,336,928,070.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Amuntai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	408 Orang/Bulan	5,336,928,070.00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Amuntai	**Realisasi paket penyediaan dan laporan**	**100%**	**140,125,920.00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Amuntai	**Realisasi paket penyediaan dan laporan**	**100%**	**197,490,420.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Amuntai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	3,535,100.00	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Amuntai	Jumlah paket kompoonen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	3,535,100.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Amuntai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	9,449,720.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Amuntai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	11,695,220.00	

	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amuntai	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	17,498,100.00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amuntai	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	17,498,100.00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amuntai	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	109,643,000.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amuntai	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	164,762,000.00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Amuntai	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**100%**	**373,920,000.00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Amuntai	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**100%**	**305,610,000.00**	
	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	Amuntai	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	8 Unit	373,920,000.00	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	Amuntai	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	8 Unit	305,610,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Amuntai	**Realisasi laporan**	**100%**	**206,482,999.00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Amuntai	**Realisasi laporan**	**100%**	**173,490,900.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Amuntai	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	75,412,800.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Amuntai	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	58,412,800.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amuntai	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	74,674,199.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amuntai	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	34,142,600.00	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Amuntai	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Laporan	56,396,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Amuntai	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Laporan	80,935,500.00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Amuntai	**Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin**	**100%**	**62,226,000.00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Amuntai	**Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin**	**100%**	**66,850,000.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Amuntai	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	31,976,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Amuntai	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	36,600,000.00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Amuntai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	30,250,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Amuntai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	30,250,000.00	
2.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Amuntai	**Jumlah investasi yang direalisasikan (Rp. 000)**	**20,000,000,000.00**	**55,062,750.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Amuntai	**Jumlah investasi yang direalisasikan (Rp. 000)**	**20,000,000,000.00**	**471,168,150.00**	

	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal**	**100%**	**55,062,750.00**	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal**	**100%**	**471,168,150.00**	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	**Amuntai**	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	8 Kegiatan Usaha	47,187,650.00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	**Amuntai**	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	8 Kegiatan Usaha	276,046,450.00	
	Sub Kegiatan Pengawasan penanaman modal	**Amuntai**	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan	25 Pelaku Usaha	7,875,100.00	Sub Kegiatan Pengawasan penanaman modal	**Amuntai**	(umlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan	25 Pelaku Usaha	195,121,700.00	

			berusaha					berusaha			
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Persentasi Peluang Usaha yang dapat dipromosikan**	**100%**	**52,756,150.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Persentasi Peluang Usaha yang dapat dipromosikan**	**100%**	**52,756,150.00**	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan**	**1 Peluang Usaha**	**52,756,150.00**	**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan**	**1 Peluang Usaha**	**52,756,150.00**	
	Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	**Amuntai**	Jumlah Dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52,756,150.00	Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	**Amuntai**	Jumlah Dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52,756,150.00	
4.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Persentasi kegiatan investasi yang dapat diikuti**	**100%**	**36,022,800.00**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Persentasi kegiatan investasi yang dapat diikuti**	**100%**	**36,022,800.00**	
	Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti**	**2 Kegiatan**	**36,022,800.00**	**Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti**	**2 Kegiatan**	**36,022,800.00**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	**Amuntai**	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	36,022,800.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	**Amuntai**	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	36,022,800.00	
5.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80**	**14,999,850.00**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80**	**14,999,500.00**	

	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Terealisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu**	**100%**	**14,999,850.00**	**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Terealisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu**	**100%**	**14,999,500.00**	
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	**Amuntai**	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	30 Kegiatan Usaha	14,999,850.00	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	**Amuntai**	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	30 Kegiatan Usaha	14,999,500.00	
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Persentasi ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi**	**100%**	**23,700,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Amuntai**	**Persentasi ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi**	**100%**	**23,699,800.00**	

	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Terealisasinya pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada kabupaten/kota**	**100%**	**23,700,000.00**	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Terealisasinya pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada kabupaten/kota**	**100%**	**23,699,800.00**	
	Sub Kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemantauan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	**Amuntai**	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dokumen	23,700,000.00	Sub Kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemantauan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	**Amuntai**	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dokumen	23,699,800.00	
7.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Amuntai**	**Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**	**2%**	**731,134,808.00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Amuntai**	**Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**	**2%**	**731,132,058.00**	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Amuntai**	**Persetasi tenaga kerja bersertifikat keahlian**	**32%**	**704,222,608.00**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Amuntai**	**Persetasi tenaga kerja bersertifikat keahlian**	**32%**	**704,219,858.00**	

	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Amuntai	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Tahun n	144 Orang	704,222,608.00	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Amuntai	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Tahun n	144 Orang	704,219,858.00	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	**Amuntai**	**Realisasi pembinaan lembaga kerja swasta**	**100%**	**16,912,200.00**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta**	**Amuntai**	**Realisasi pembinaan lembaga kerja swasta**	**100%**	**16,912,200.00**	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Amuntai	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	12 Lembaga	16,912,200.00	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Amuntai	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	12 Lembaga	16,912,200.00	
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	**Amuntai**	**Terealisasinya pelaksaaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil**	**100%**	**10,000,000.00**	**Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**Amuntai**	**Terealisasinya pelaksaaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil**	**100%**	**10,000,000.00**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kosultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Amuntai	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan praduktivitas	5 Perusahaan	10,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kosultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Amuntai	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan praduktivitas	5 Perusahaan	10,000,000.00	
II.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Amuntai**	**Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**	**2%**	**63,442,400.00**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Amuntai**	**Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**	**2%**	**63,397,000.00**	

	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja**	**100%**	**63,442,400.00**	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja**	**100%**	**63,397,000.00**	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	**Amuntai**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	70 Orang	45,200,000.00	Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	**Amuntai**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	70 Orang	45,197,000.00	
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	**Amuntai**	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75 Orang	18,242,400.00	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	**Amuntai**	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75 Orang	18,200,000.00	
9.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Amuntai**	**Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan**	**4%**	**19,997,100.00**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Amuntai**	**Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan**	**4%**	**19,997,100.00**	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Terlaksananya penyusunan PP/PKB di perusahaan**	**100%**	**9,998,100.00**	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Terlaksananya penyusunan PP/PKB di perusahaan**	**100%**	**9,998,100.00**	

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Amuntai	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	5 Perusahaan	9,998,100.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Amuntai	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	5 Perusahaan	9,998,100.00	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota	Amuntai	**Termediasinya perselisihan hubungan industrial**	100%	9,999,000.00	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota**	Amuntai	**Termediasinya perselisihan hubungan industrial**	100%	9,999,000.00	
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Amuntai	Jumlah perselisihan yang di cegah	2 Perkara	9,999,000.00	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Amuntai	Jumlah perselisihan yang di cegah	2 Perkara	9,999,000.00	
					7,123,788,847.00					**7,539,680,948.00**	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

Dari Hasil usulan masyarakat yang telah masuk kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk usulan tahun 2024 sesuai daftar di bawah ini :

No.	Pengusul	Desa	Permasalahan	Usulan	Alamat Pengusul
5.	ABDUL BASIR	Kepala Desa Datu Kuning	Dana Desa tidak mencukupi untuk membiayai pelatihan menjahit desa	Pelatihan Menjahit	Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah

Dari satu usulan tersebut dapat disetujui kegiatan menjahit di Desa Datu Kuning. Kegiatan tersebut memerlukan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah sasaran strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal, maka sejalan dengan itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran ketiga adalah Meningkatnya Investasi, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang penanaman modal.

Kemudian menelaah sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka sejalan dengan itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran kedua adalah Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang ketenagakerjaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban dua urusan sekaligus yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal.

Tujuan yang termuat dalam Rencana Strategis yang ingin di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya peluang usaha penunjang investasi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Penciptaan dan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja.

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis yang ingin di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD;
2. Meningkatnya investasi di daerah;
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayana Publik;
4. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

Tabel Keterkaitan antara Renstra K/L, RPD dan Reanstra DPMPTSP

No.	Renstra K/L	RPD Pemda HSU	Renstra DPMPTSP
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	Meningkatnya peluang usaha penunjang investasi
2.	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	Penciptaan dan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja
3.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Meningkatnya pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dari tabel diatas sudah selaras antara Sasaran di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 dan juga dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu peran anggaran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Pada penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini mengacu pada rancangan Renstra, RKPD Perubahan dan RPD. Adapun kedudukan tahun rencana Renja Perubahan Tahun 2024 ini masuk pada tahapan ke-2 (Dua) dari dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode	Urusan Bidang/Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Amuntai	79,00	6,126,708,390.00	APBD		80.00	6,224,569,020.00
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	Amuntai	100%	46,339,000.00	APBD		100%	35,000,000.00

2.18.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amuntai	10 Dokumen	46,339,000.00	APBD		12 Laporan	35,000,000.00
2.18.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentasi realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**Amuntai**	**100%**	**5,336,928,070.00**	**APBD**		**100%**	**5,336,928,070.00**
2.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Amuntai	408 Orang/Bulan	5,336,928,070.00	APBD		462 Orang/Bulan	5,336,928,070.00
2.18.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi realisasi bahan logistik kantor**	**Amuntai**	**100%**	**197,490,420.00**	**APBD**		**100%**	**467,194,750.00**
2.18.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Amuntai	12 Paket	3,535,100.00	APBD		12 Paket	6,750,000.00
2.18.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Amuntai	12 Paket	11,695,220.00	APBD		12 Paket	20,944,750.00
2.18.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Amuntai	12 Paket	17,498,100.00	APBD		12 Paket	35,000,000.00
2.18.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amuntai	35 Laporan	164,762,000.00	APBD		35 Laporan	405,000,000.00

2.18.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentasi realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**Amuntai**	**100%**	**305,610,000.00**	**APBD**		**100%**	**70,000,000.00**
2.18.01.2.07.06	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya	**Amuntai**	8 Unit	305,610,000.00	**APBD**		7 Unit	70,000,000.00
2.18.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentasi realisasi jasa kantor**	**Amuntai**	**100%**	**173,490,900.00**	**APBD**		**100%**	**270,446,200.00**
2.18.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	**Amuntai**	12 Laporan	58,412,800.00	**APBD**		12 Laporan	38,700,000.00
2.18.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	**Amuntai**	12 Laporan	34,142,600.00	**APBD**		12 Laporan	125,746,200.00
2.18.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	**Amuntai**	24 Laporan	80,935,500.00	**APBD**		36 Laporan	106,000,000.00
2.18.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin**	**Amuntai**	**100%**	**66,850,000.00**	**APBD**		**100%**	**45,000,000.00**
2.18.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	**Amuntai**	14 Unit	36,600,000.00	**APBD**		20 Unit	35,000,000.00
2.18.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	**Amuntai**	30 Unit	30,250,000.00	**APBD**		30 Unit	10,000,000.00

	lainnya								
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investasi yang direalisasikan (Rp. 000)**	**Amuntai**	**20,000,000,000.00**	**471,168,150.00**	**APBD**		**20 Milyar**	**90,614,648.00**
2.18.05.2.01	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal**	**Amuntai**	**100%**	**471,168,150.00**	**APBD**		**100%**	**90,614,648.00**
2.18.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	**Amuntai**	8 pelaku Usaha	276,046,450.00	**APBD**		2 Kegiatan Usaha	37,577,400.00
2.18.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan di verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	**Amuntai**	25 kegiatan usaha	195,121,700.00	**APBD**		25 Kegiatan Usaha	25,000,000.00

2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentasi peluang usaha yang dapat di promosikan	Amuntai	100%	52,756,150.00	APBD		100%	64,086,750.00
2.18.02..2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan	Amuntai	1 Peluang Usaha	52,756,150.00	APBD		1 Peluang Usaha	64,086,750.00
2.18.02.2.02.04	Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Amuntai	1 Dokumen	52,756,150.00	APBD		1 Dokumen	64,086,750.00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentasi kegiatan investasi yang diikuti	Amuntai	100%	36,022,800.00	APBD		100%	27,000,000.00
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti	Amuntai	2 Kegiatan	36,022,800.00	APBD		2 Kegiatan	27,000,000.00
2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Amuntai	2 Dokumen	36,022,800.00	APBD		2 Dokumen	27,000,000.00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	Amuntai	80	14,999,500.00	APBD		81	224,804,500.00
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	Amuntai	100%	14,999,500.00	APBD		100%	224,804,500.00

2.18.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko jlintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku	Amuntai	30 Kegiatan Usaha	14,999,500.00	APBD		30 Kegiatan Usaha	224,804,500.00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentasi ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi**	**Amuntai**	**100%**	**23,699,800.00**	**APBD**		**100%**	**90,000,000.00**
2.18.06.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terealisasinya pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada kabupaten/kota**	**Amuntai**	**100%**	**23,699,800.00**	**APBD**		**100%**	**90,000,000.00**
2.18.06.2.01.00 02	Sub Kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	**Amuntai**	6 Dokumen	23,699,800.00	**APBD**		6 Dokumen	90,000,000.00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**	**Amuntai**	**2%**	**731,132,058.00**	**APBD**		**2%**	**1,002,968,608.00**
2.07.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persetasi tenaga kerja bersertifikat keahlian**	**Amuntai**	**32%**	**704,219,858.00**	**APBD**		**33%**	**961,968,608.00**

2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Tahun n	Amuntai	144 Orang	704,219,858.00	APBD		144 Orang	961,968,608.00
2.07.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta**	**Realisasi pembinaan lembaga kerja swasta**	**Amuntai**	**100%**	**16,912,200.00**	**APBD**		**100%**	**16,000,000.00**
2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Amuntai	12 Lembaga	16,912,200.00	APBD		12 Lembaga	16,000,000.00
2.07.03.2.04	**Kegiatan Kosultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**Terealisasinya pelaksaaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil**	**Amuntai**	**100%**	**10,000,000.00**	**APBD**		**100%**	**25,000,000.00**
2.07.03.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kosultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	Amuntai	5 Perusahaan	10,000,000.00	APBD		5 Perusahaan	25,000,000.00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**	**Amuntai**	**2%**	**63,397,000.00**	**APBD**		**2%**	**110,934,463.00**
2.07.04.2.01	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja**	**Amuntai**	**100%**	**63,397,000.00**	**APBD**		**100%**	**110,934,463.00**
2.07.04.2.01.00 02	Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Amuntai	70 Orang	45,197,000.00	APBD		30 Orang	43,214,675.00

2.07.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Amuntai	75 Orang	18,200,000.00	APBD		75 Orang	67,719,788.00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan**	**Amuntai**	**4%**	**19,997,100.00**	**APBD**		**4%**	**70,237,788.00**
2.07.05.2.01	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penyusunan PP/PKB di perusahaan**	**Amuntai**	**100%**	**9,998,100.00**	**APBD**		**100%**	**25,000,000.00**
2.07.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Amuntai	5 Perusahaan	9,998,100.00	APBD		5 Laporan	25,000,000.00
2.07.05.2.02	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota**	**Termediasinya perselisihan hubungan industrial**	**Amuntai**	**100%**	**9,999,000.00**	**APBD**		**100%**	**45,237,788.00**

2.07.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah perselisihan yang di cegah	**Amuntai**	2 Perkara	9,999,000.00	**APBD**		2 Perkara	45,237,788.00
JUMLAH					**7,539,680,948.00**				**7,905,215,777.00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 ini adalah merupakan program tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hulu Sungai Utara. Di samping itu Renja juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Renja di masa yang akan datang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Ir. ISMARLITA
Pembina Utama Muda
NIP.19670816 199303 2 004

PERUBAHAN/PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA-SKPD/DPPA
KAB. HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024	
Nomor DPPA : DPPA/4.3/478.3.07/0.00.00/0.00/V/2024	
SKPD : 4.16.2.07.0.00.16.0.0.0.0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		Ket
									Setelah					Sesudah							
									Bertambah (Berkurang)	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4.16.2.07.0.00.16.0.0.0.0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									Rp8.834.344.847.733	Rp488.642.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.723.186.847.733	Rp7.908.300.696.693	Rp470.344.200.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.723.186.847.733	Rp(110.980.947.039)	5.57	
4					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp8.834.344.847.733	Rp488.642.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.723.186.847.733	Rp7.908.300.696.693	Rp470.344.200.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.723.186.847.733	Rp(110.980.947.039)	5.57	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				Rp889.374.408.000	Rp26.900.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp916.274.408.000	Rp849.974.208.000	Rp64.300.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp914.274.208.000	[illegible]	[illegible]	
1	01	03			PROGRAM PELAYANAN KERJA DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA				Rp811.894.408.000	Rp26.900.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp737.794.408.000	Rp743.894.208.000	Rp64.300.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp737.194.208.000	[illegible]	[illegible]	
1	01	03	1.03		Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Inti Kompetensi				Rp577.920.808.000	Rp26.900.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp604.220.808.000	Rp583.420.808.000	Rp64.300.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp647.720.808.000	[illegible]	[illegible]	
1	01	03	1.03	0001	Proses Pendaftaran Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja berdasarkan Standar Kompetensi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp577.920.808.000	Rp26.900.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp604.220.808.000	Rp583.420.808.000	Rp64.300.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp647.720.808.000	[illegible]	[illegible]	
2	01	03	2.03		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				Rp311.951.200.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp311.951.200.00	Rp159.252.703.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp159.252.703.00	Rp0.00	0.00	
2	01	03	2.03	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp311.951.200.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp311.951.200.00	Rp159.252.703.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp159.252.703.00	Rp0.00	0.00	
3	01	03	3.04		Kemudahan/ Produktivitas pada Perusahaan Kecil				Rp70.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp70.000.000.00	Rp70.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp70.000.000.00	Rp0.00	0.00	
3	01	03	3.04	0001	Pelaksanaan Kemudahan Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp70.000.000.00	Rp70.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp70.000.000.00	Rp0.00	0.00	
2	01	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Rp83.443.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp83.443.400.00	Rp49.447.600.00	Rp422.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp83.290.000.00	[illegible]	[illegible]	
3	01	04	3.01		Pelayanan antar Kerja di Dalam Kabupaten/Kota				Rp82.443.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp83.443.400.00	Rp49.447.600.00	Rp28.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp82.800.000.00	[illegible]	[illegible]	
4	01	04	3.01	0001	Pelayanan antar Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua		Rp43.300.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43.300.000.00	Rp27.300.000.00	Rp16.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43.300.000.00	Rp0.00	0.00	

Kode	Bidang (Kode)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Sesudah							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	01	01	1.01	0003	Penyusunan dan Pembinaan Jabatan yang Zona Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp56.243.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.243.400,00	Rp4.800.000,00	Rp53.443.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.243.400,00	[illegible]	[illegible]	
2	01	05			PAGUNAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			Rp18.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.897.000,00	Rp18.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.897.000,00	Rp0,00	0,00	
1	01	05	1.01		Pengusulan Pencairan Perusahaan dan Pemutusan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	0,00	
2	01	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Lembaga Kerja Sama Bipartit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	0,00	
3	01	05	1.01		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	0,00	
1	01	03	1.01	0003	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berada/Beroperasi pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	0,00	
1	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBANGSAAN, MUSIK,			Rp8.888.874.000,00	Rp373.243.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.909.214.580,00	Rp8.888.874.000,00	Rp8.804.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.735.264.780,00	Rp(18.949.200,00)	0,00	
2	10	01			PROGRAM PENGEMBANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp8.753.400.888,00	Rp373.243.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.677.888,00	Rp8.831.778.880,00	Rp8.804.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.735.788.880,00	Rp(30.407,00)	0,00	
1	10	01	1.01		Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	0,00	
2	10	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.000,00	Rp0,00	0,00	
2	10	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp8.888.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.888.000,00	Rp8.888.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.888.000,00	Rp0,00	0,00	
3	10	01	2.01	0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.888.888.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.888.888,00	Rp8.888.888.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.888.888.888,00	Rp0,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	7=5+6	Jumlah												
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	19	01	1.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp140.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.125.000,00	Rp97.436.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.436.423,00	Rp97.364.303,00-	25,92	
1	19	01	1.01	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00	
1	19	01	1.01	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp9.643.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.643.750,00	Rp7.886.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.886.250,00	Rp2.243.500,00-	18,20	
1	19	01	1.01	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.486.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.486.000,00	Rp57.486.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.486.000,00	Rp0,00	0,00	
1	19	01	1.01	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.084.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.084.000,00	Rp44.788.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.788.304,00	Rp34.704.304,00	33,45	
1	19	01	1.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp881.000,00	Rp373.043.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.924.000,00	Rp889.704,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.889.704,00	[redacted]	[redacted]	
1	19	01	1.01	0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp881.000,00	Rp373.043.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.924.000,00	Rp889.704,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.889.704,00	[redacted]	[redacted]	
1	19	01	1.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp208.490.988,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.490.988,00	Rp173.436.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.436.900,00	[redacted]	[redacted]	
1	19	01	1.01	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.412.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.412.840,00	Rp58.412.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.412.840,00	[redacted]	[redacted]	
1	19	01	1.01	0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.674.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.674.568,00	Rp34.143.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.143.800,00	[redacted]	[redacted]	
1	19	01	1.01	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp195.996.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.996.010,00	Rp80.095.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.895.800,00	Rp34.136.010,00-	58,50	
1	19	01	1.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp82.226.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.226.010,00	Rp80.800.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.800.010,00	Rp4.804.000,00-	5,82	
1	19	01	1.01	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua		Rp31.975.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.975.010,00	Rp36.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.820.000,00	Rp4.844.990,00	13,93	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
			Tahun									Keterangan / Deskripsi		Tv1
			Sebelum					Sekarang						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Ket.	%	
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAK	Kecamatan, Seluruh Kelurahan/Desa												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rp80.737.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.737.072,00	Rp80.700.034,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.700.034,00	Rp40,00	0,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA PENANAMAN MODAL			Rp52.756.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.756.700,00	Rp52.756.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.756.700,00	Rp0,00	0,00	
Pembinaan Pola Kemitraan Investasi Kabupaten/Kota			Rp52.700.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.700.100,00	Rp52.700.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.700.700,00	Rp0,00	0,00	
Penyelenggaraan Pola Kemitraan Investasi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rp52.756.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.756.700,00	Rp52.756.701,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.756.701,00	Rp0,00	0,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Rp36.222.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.222.801,00	Rp36.222.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.222.801,00	Rp0,00	0,00	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp36.222.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.222.801,00	Rp36.222.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.222.801,00	Rp0,00	0,00	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rp36.222.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.222.801,00	Rp36.222.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.222.801,00	Rp0,00	0,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Rp14.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.800,00	Rp14.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.800,00	[illegible]	[illegible]	
Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp14.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.800,00	Rp14.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.800,00	[illegible]	[illegible]	
Pemeriksaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha terbatas risiko	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rp14.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.800,00	Rp14.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.800,00	[illegible]	[illegible]	
PROGRAM PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Rp55.642.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.642.750,00	Rp54.913.987,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.913.987,00	Rp16.509.615,00	99,31	
Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp55.642.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.642.750,00	Rp54.913.987,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.913.987,00	Rp16.509.615,00	99,31	
Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah	DAK Non Fisik - Penguatan Penanaman Modal PENDAPATAN	Kab. Hulu Sungai Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Rp47.587.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.587.600,00	Rp47.587.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.587.600,00	Rp22.808.400,00	99,99	

								Jumlah											
									Tahun								Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Sekarang					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						4.02.2.04.0.00.0001															
1	12	01	1.01	0.01.1	Pengawasan Pengelolaan Waste	SMK Non Fiska Fakultas Pemerintah Mutlak PENDAMPING 4.02.2.04.0.00.0001	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.875.125.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.875.125.00	Rp96.721.256.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp96.721.256.00	Rp167.846.631.00	95.99	
2	16	04			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH				Rp23.750.625.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp23.750.625.00	Rp73.888.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp73.888.800.00	[redacted]	[redacted]	
3	16	08	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp23.750.625.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp23.750.625.00	Rp73.888.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp73.888.800.00	[redacted]	[redacted]	
4	16	08	2.01	0.0.0.7	Pengadaan, Pelayanan dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Nonfisik Terintegrasi secara Elektronik	4.02.2.04.0.00.0001	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.750.625.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp23.750.625.00	Rp73.888.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp73.888.800.00	[redacted]	[redacted]	



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan mengacu pada dokumen RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026. Rencana ini akan menjadi acuan dan kerangka dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Amuntai, Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

ASIKIN NOOR, SSTP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 .	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kab. HSU dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	II-4
Tabel II.2	Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022	II-15
Tabel II.3	Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-19
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-22
Tabel II.5	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022	II-25
Tabel II.6	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022	II-32
Tabel II.7	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan kabupaten HSU	II-40
Tabel II.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten HSU	II-44
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara	III-4
Tabel III.2	Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024	III-7
Tabel III.3	Target Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024	III-7
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	IV-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efesien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stakeholder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan

sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk penyempurnaan RKPD, dan untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Renstra SKPD. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten HSU tahun 2024 yang mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD Tahun 2024. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Sosial Budaya yang diprioritaskan untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting; Menurunnya angka kemiskinan; Pemerataan

dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak; Penurunan angka pernikahan anak; Perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1 Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran.
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
   h. Perumusan kegiatan prioritas.
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
   j. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 – 2026.

26. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (Renja-P SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program – program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 - 2026.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (Renja_P) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan usulan program sebanyak 3 dengan 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2. Penyediaan Bahan/Material
      3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2). Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota
2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota

3). Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SATPOLPP DAN DAMKAR KAB. HULU SUNGAI UTARA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

		Perangkat Daerah								
		(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
9		*(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan	-	58 Orang	58 orang	46 Orang	81,03	-	-	-
		(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya yang disediakan	-	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	-	-	-
		(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	35 Jenis	31 Jenis	29 Jenis	93,55%	-	-	-

		(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang disediakan	-	55 Jenis	55 Jenis	51 Jenis	92,73%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	-	14 Kali	20 Kali	20 kali	100%	-	-	-
		(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	-	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Gedung dalam Kondisi Baik	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

		Lainnya									
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	-	35 Buah	30 Buah	28 Buah	93,33%	-	-	-
2.	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		***Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)***	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pelanggaran yang Ditertibkan	-	168 Kegiatan	192 Kegiatan	192 Kegiatan	100%	-	-	-

		(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Satlinmas yang dilaksanakan	-	96 Kegiatan	72 Kegiatan	72 Kegiatan	100%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-	7 Orang	12 Orang	9 Orang	75%	-	-	-
		(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	**Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup**	-	**68,17%**	**80%**	**74,42%**	**93,03%**			
		(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggar Perda	-	240 Kali	145 Kali	145 Kali	100%			
		(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah kegiatan penanganan dan penindakan Pelanggar perda yang dilaksanakan	-	31 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	100 %	-	-	-
3	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-

		(Kegiatan) Pencegahan Pengendalian , Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan	-	147 Kegiatan	96 Kegiatan	86 Kegiatan	89,58%	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Musibah Kebakaran yang Ditangani	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	**(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan	***Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	-
		(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-
		(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	-	-	-	-	58 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	100%
		(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	-	-	-	-	Paket	Paket	-
		(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	-	-	-	-	32 Paket	32 Paket	100%

		(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	-	-	-	-	12 Paket	12 Paket	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang disediakan	55 Jenis	-	-	-	-	55 Jenis	55 Jenis	100%
		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	-	-	-	-	20 Kali	20 Kali	100%
		(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	-		-	-	-	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-							
		(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

		(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	-
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	-
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	-	-	-	30 Unit	30 Unit	-
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	-
2.	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah	***Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	144 Kasus	-	-	-	-	144 Kasus	144 Kasus	100%

		Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							
		(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	150 Kasus	-	-	-	-	150 Kasus	150 Kasus	100%
		(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		(Sub Kegiatan) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
		(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	***Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***	-	-	-	-	***100%***	***100%***	***100%***

		(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
3	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Pencegahan Pengendalian , Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	***Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran***	***100%***	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%

		/ Kota	dalam Daerah Kabupaten / Kota								
		(Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	-	-	-	-	-	-	-
		(Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran	1 Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	100%

Untuk capaian hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun ke-(empat) Renstra Satpol PP dan Damkar (Tahun 2022) cukup berhasil dengan baik, walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis SKPD, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan/ kegagalan SKPD menjalankan misinya.

Pada dasarnya kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, yaitu urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan lingkup pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas :

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mencakup Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan Perda; dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mencakup Seksi Operasional, pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi; dan Seksi Pengamanan dan Pengawalan
3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang mencakup Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat; dan Seksi Pencegahan, Pemulihan, Penanganan dan Pengendalian kebakaran.

Dalam tahun anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah
3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara
4. Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan

realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2. Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	BB	A*	100%
2.	Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Diselesaikan (%)	80	80	100%
3.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani (%)	90	72,07	80,08%
4.	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran	Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km (%)	100	95	95%

Catatan : Bertanda bintang (*) Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2022 adalah cukup berhasil.

Berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Tahun 2022 :

1. **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel**

   a. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

   Pencapaian Indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan kategori "BB". Untuk Penilaian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 dijadwalkan tahun 2023 setelah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan di Tahun 2022 penilaian SAKIP dari Inspektorat adalah untuk SAKIP 2021, dimana nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 adalah kategori "A" dengan nilai 80,06.

2. **Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah**

   ❖ Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan

   Tingkat capaian kinerja untuk Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan secara umum dapat dicapai. Dari target yang ditetapkan 80% terealisasi sebesar 80% sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 100%. Dengan penjelasan jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan berjumlah 8 perda dibandingkan dengan jumlah pelanggaran perda sebanyak 10 perda, hal ini dikarenakan masih kurangnya aparatur penegak perda dibandingkan dengan jumlah penduduk dan cakupan wilayah yang harus dilayani serta jumlah perda/perkada yang harus diawasi.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Peraturan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kuantitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib dilaksanakan.

3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara

- Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani

Pencapaian Indikator kinerja untuk Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani secara umum telah berhasil, dari target yang ditetapkan 90% terealisasi sebesar 72,07%, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 80,08%. Dengan penjelasan Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi atau dilaporkan pada tahun 2022 sebanyak 906 pengaduan, dari jumlah tersebut yang dapat ditangani dan diselesaikan sebanyak 653 pengaduan atau 72,07%. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan penertiban terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

peraturan daerah, masih rendahnya tingkat kesadaran PKL terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta diperparah dengan jumlah PKL liar yang terus bertambah, serta masih rendahnya kesadaran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dilingkungannya

4. Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran

- Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km

Pencapaian Indikator kinerja untuk Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km secara umum telah berhasil dicapai melebihi target yang ditetapkan. Adapun untuk Target Persentase Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km pada tahun 2020 dari target 100% terealisasi sebesar 95%, dimana target capaian kinerjanya mencapai 95%.

Hal ini dijelaskan dari jumlah musibah kebakaran yag terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 sebanyak 20 kali, dan yang dapat tertangani dalam waktu tanggap (Respon Time) sebanyak 19 kali, sedangkan 1 kali kejadian kebakaran tidak dapat terlayani dalam waktu tanggap, yaitu di Desa Padang Bangkal Kecamatan Sungai Pandan, karena kondisi akses jalan yang sangat minim.

Untuk mendukung sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh beberapa sasaran program yang ada di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta , Bidang Perlindungan

Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

II.3 Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan pelanggaran perda	80%	74,42%	93,03%	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per Undang-undangan Daerah
2.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ter hadap pelanggaran perda	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran perda	145 kali	145 kali	100%	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda
3.	Melaksanakan Penindakan Pelanggaran Perda	Jumlah kegiatan penanganan dan penindakan pelanggar perda yang dilaksanakan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	100%	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	

5.	Melaksanakan Penertiban Umum	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	192 kali	192 kali	100%	Kepala Seksi Operasional Pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi
6.	Memfasilitasi Anggota Satpol PP dan Damkar untuk mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan pemadam kebakaran	12 orang	9 orang	75%	
7.	Melaksanakan kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	100%	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan
8.	Meningkatkan perlindungan masyarakat dan pelayanan kebakaran	Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	**Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran**
		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	
		Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	
9.	Melaksanakan Pembinaan	Jumlah pembinaan	72 kali	72 kali	100%	Kepala Seksi Satuan Perlindungan

	Satlinmas	satlinmas yang dilaksanakan				dan Partisipasi Masyarakat
10.	Melaksanakan penanganan musibah kebakaran	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan	96 kali	86 kali	89,58%	Kepala Seksi Pencegahan, Pemulihan, penanganan dan Pengendalian Kebakaran
		Persentase musibah kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%	

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Ditindaklanjuti	-	-	60 %	70%	80%	100%	71,43 %	70%	80%	100%	
2	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani	-	-	75%	80%	90%	100%	86,44%	79,27%	72,07%	100%	
3	Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km	-	-	88%	96%	100%	96%	94,74%	81,82%	95%	96%	

Memasuki tahun terakhir Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, pencapaian Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebesar 100% atau 100% dari target Renstra 2017-2022 sebesar 80%, untuk pencapaian indikator Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani adalah sebesar 80,08% atau 80,08% dari target Renstra 2017- 2022 sebesar 90%. Sedangkan untuk indikator Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km pada tahun 2022 tercapai sebesar 95% atau 95% dari target Renstra 2017-2022 sebesar 100%. Pencapaian kinerja tersebut dapat tercapai dengan baik melalui upaya meningkatkan sosialisasi peraturan daerah yang terkait ketentraman dan ketertiban umum secara lebih intensif, melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam upaya-upaya pendekatan dimasyarakat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keindahan sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud. Melakukan patroli dalam kota dan wilayah kecamatan-kecamatan dilingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Melakukan sosialisasi dan himbauan secara lebih intensif tentang risiko bahaya kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran.

Untuk capaian indikator kinerja program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2022 cukup berhasil dengan baik, namun masih ada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan yang belum tercapai, hal ini dapat dilihat pada tabel capaian indikator kinerja program dan kegiatan berikut ini :

Tabel II.5. Capaian Realisasi Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	BB	A*	100%	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100
								(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	*100%*	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100
								(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100
								(Kegiatan) Administrasi keuangan perangkat daerah	*Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah*	*100%*	100%	100

								(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan	58 Orang	46 Orang	81,03
								(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100%***	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100
								(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat daerah	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***100%***	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 Jenis	29 Jenis	93,55
								(Sub Kegiatan) Penyediaan bahan material	Jumlah ATK yang disediakan	55 Jenis	51 Jenis	92,73
								(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 kali	20 kali	100
								(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***100%***	***100***
								(Sub Kegiatan) Penyediaan	Persentase Surat Masuk	100%	100%	100

								Jasa Surat Menyurat	dan Surat Keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya			
								(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100
								(Kegiatan) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	100
								(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Gedung dalam kondisi baik	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah peralatan gedung kantor yang	30 buah	28 Buah	93,33

								Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	dipelihara			
2.	Mewujudkan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif	Jumlah kejadian berlatar belakang konflik SARA	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	90%	72,07%	80,08%	(Program) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan kebindahan)	100%	100%	100
								(Kegiatan) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	100
								(Sub Kegiatan) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasakan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	192 Kegiatan	192 Kegiatan	100

								kerusuhan massa				
								(Sub Kegiatan) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan satlinmas yang dilaksanakan	72 Kegiatan	72 Kegiatan	100
								(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang berhuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan pemadam kebakaran	12 Orang	9 Orang	75
			Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	80%	80%	100%	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan***	***Persentase Penegakan Pelanggaran Perda***	*80%*	74,42%	93,03
								(Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar perda	145 kali	145 kali	100
								(Sub Kegiatan) Penanganan atas pelanggaran Peraturan	Jumlah penanganan dan penindakan pelanggar	27 kegiatan	27 kegiatan	100

								Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	perda yang dilaksanakan			
			Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran	Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) penanganan kebakaran dalam radius 10 km	100%	95%	95%	(Program) Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
								(Kegiatan) Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	***Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran***	***100%***	100%	100%
								(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan	96 Kegiatan	86 Kegiatan	89,58
								(Sub Kegiatan) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Persentase musibah kebakaran yang ditangani	100%	100%	100

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten HSU Tahun 2022 mendapat alokasi dana yang bersumber dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 7.209.896.530,- dan setelah mengalami revisi-revisi pergeseran melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.227.184.093,-, adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.6 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	**(PROGRAM) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**4.888.774.093,-**	***4.004.192.597***	***81,91***
1.	***(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***3.375.000,-***	***3.112.500,-***	***92,22***
a.	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.575.000,-	1.312.500,-	83.33
b.	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,-	1.800.000,-	100
2.	***(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***4.357.888.700,-***	***3.538.020.738***	***81,19***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.888.700,-	3.538.020.738	81,19
3.	***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***69.597.550,-***	***67.133.000,-***	***96,46***
a.	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	69.597.550,-	67.133.000,-	96,46
4.	***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***163.919.335,-***	***140.341.080,-***	***85,62***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.343.034,-	21.079.500,-	71,84
b.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	55.576.301,-	41.700.750,-	75,03
c.	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat	79.000.000,-	77.560.830,-	98,18

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
5.	***(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***147.934.008,-***	***134.071.629,-***	***90,63***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.150.000,-	16.005.000,-	99,10
b.	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,536,008,-	44.834.831,-	76,59
c.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.248.000,-	73.231.798,-	99,98
6.	***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***146.059.500,-***	***121.513.650,-***	***83,19***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	136.500.000,-	114.583.650,-	83,94
b.	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.059.500	2.050.000	99,54
c.	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7.500.000,-	4.880.000,-	65,07
2)	**(PROGRAM) PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.803.505.000,-**	**1.767.950.000**	**98,03**
7.	***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota***	***1.446.855.000,-***	**1.414.945.000**	**97,79**
a.	(Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.023.650.000,-	1.021.150.000	99,76
b.	(Sub Kegiatan) Penindakan dan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	234.925.000,-	234.895.000,-	99,99

	Massa			
c.	(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	89.425.000,-	89.350.000,-	99,92
d.	(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	98.855.000,-	69.550.000,-	70,36
8.	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota***	***356.650.000,-***	***353.005.000,-***	***98,98***
a.	(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	332,250.000,-	329.155.000,-	99,07
b.	(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24.400.000,-	23.850.000,-	97,75
3)	**(PROGRAM) PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**534.905.000,-**	**517.329.000,-**	**96,71**
9.	***(Kegiatan) Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***534.905.000,-***	***517.329.000,-***	***96,71***
a.	(Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.430.000,-	275.980.000,-	99,84
b.	(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	258.475.000,-	241.349.000,-	93,37
Total Belanja		***7.227.184.093,-***	***6.289.471.597***	***87,03***

Realisasi anggaran Pada Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 7.227.184.093,- atau 90,09 % dari total anggaran sebesar Rp. 8.021.161.750,- .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, mempunyai tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP dan Damkar untuk tahun 2022 dapat dilihat bahwa :

1. Pencapaian indikator kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan telah berhasil tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan 80% terealisasi sebesar 80%.
2. Pencapaian indikator kinerja Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani telah berhasil tercapai sebesar 80,08% dari target yang ditetapkan 90% terealisasi sebesar 72,07%.
3. Pencapaian Indikator kinerja Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km telah berhasil tercapai sebesar 95% dari target yang ditetapkan 100% realisasinya mencapai 95% .

Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2022 telah tercapai dengan baik. Hal ini didukung dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu antara lain :

- Melibatkan semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengoptimalkan potensinya, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Memberi pemahaman kepada anggota Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bahwa substansi dan Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja.
- Mengupayakan pelaksanaan diklat fungsional bagi pegawai PNS untuk menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja, serta melakukan pendidikan dan pelatihan teknis serta bimbingan teknis untuk anggota trantibum dan anggota PPNS

- Peningkatan jalinan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait, dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Perda dan Perbup sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tantangan yang harus dihadapi, meliputi tantangan Internal dan tantangan eksternal, yaitu :

1. Masih kurangnya personil (Tenaga Teknis Lapangan).
2. Masih minimnya Sumber Daya Aparatur (Manusia) yang handal.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
5. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
6. Tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan pada kawasan pemukiman yang cukup tinggi menyebabkan kawasan yang ada menjadi rentan terhadap kejadian bencana kebakaran.

Sedangkan peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, meliputi :

1. Tuntutan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan aturan semakin kuat, sehingga keperdulian dan partisipasi masyarakat diharapkan juga meningkat.
2. Adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Aparatur (Manusia).

3. Adanya produk – produk peraturan dan perundang – undangan terkait penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat semakin kuat.
4. Optimalisasi koordinasi antar instansi baik instansi vertikal maupun horizontal.
5. Banyaknya jumlah Kelompok BPK yang ada dimasyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demi mewujudkan keberhasilan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara disamping memperhatikan strategi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat juga perlu penentuan isu-isu strategis SKPD, adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Kurangnya SDM dan PPNS penegak perda yang akan melaksanakan penegakkan hukum perda dan perkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kurangnya kesadaran / kepatuhan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
3. Perlu memaksimalkan pelayanan terhadap warga Negara akibat dari penegakkan Hukum Perda dan Perkada di Kabupaten
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
5. Perlu peningkatan terhadap sarana dan prasarana Damkar dalam penanganan kebakaran
6. Perlunya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan bahaya kebakaran.
7. Perlunya pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arahan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tidak terlepas dari apa yang telah dituangkan pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 -2026. Selain itu arah pembangunan tentunya tidak terlepas dan berkesinambungan dengan yang dilaksanakan pada tahun berjalan ditahun 2023. Dalam aspek pemerintahan yakni terlaksananya berbagai urusan layanan umum, urusan wajib, urusan pilihan, dan berbagai urusan lainnya yang menjadi kewajiban daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan pemerintahan juga dengan mendorong adanya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kompetensi aparatur juga semakin ditingkatkan guna terciptanya perbaikan kinerja pemerintahan, terbinanya kelembagaan pemerintah, meningkatnya kinerja dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam rangka menjalani masa-masa transisi pemerintahan sampai terlaksana dan terpilihnya pimpinan daerah yang akan datang, serta terpeliharanya kerukunan hidup dalam suasana keagamaan.

Untuk Indikator Capaian Kinerja tahun 2024 yang diinginkan pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.7. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten HSU

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun	Capaian Akhir Periode
			2024	2026
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
	PELAYANAN URUSAN WAJIB			
A.	**Terkait Pelayanan Dasar**			
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	NA	1,4	1,4
5.2	Cakupan pelayanan Musibah kebakaran Kabupaten / Kota (%)	NA	100	100
5.3	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) pelayanan kebakaran (%)	NA	96	96

Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap SKPD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Rencana Program dan Kegiatan ini harus terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 yang ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 terdiri dari 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum
3. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebanyak 3 Program sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Prioritas dan sasaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yakni Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RKPD. Adapun Prioritas pembangunan pada Bidang Sosial Budaya tahun 2024 terarah pada :

1. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik, dengan sasaran :
   a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
   b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah
   c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manuasia, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
   b. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting
   c. Menurunnya angka kemiskinan

3. Penanganan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sasaran :
   a. Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

b. Penurunan angka pernikahan anak
c. Perencanaan penganggaran yang responsive gender

Prioritas pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas sosial budaya
2. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial budaya
3. Peningkatan pengelolaan bencana kebakaran

Adapun untuk Rencana kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.257.949.704,-.

Kemudian dari hasil analisis kebutuhan, dilihat dari beberapa permasalahan dan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk bidang Pemadam Kebakaran perlu merencanakan penerimaan personil damkar dan membentuk pasukan Damkar dan menyusun rencana perlengkapan safety, dan perlengkapan lainnya, serta menambah biaya operasional dan kompensasi aparatur yang memiliki resiko kerja dengan penambahan anggaran untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga terkendala dengan masih minimnya anggaran operasional dalam pembiayaan kegiatan, baik untuk kegiatan patroli maupun pengamanan kantor dan rumah pejabat (Upah Jaga Piket). Selain itu pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan anggota DPRD, serta pemilihan Kepala daerah, sehingga berdasarkan analisis kebutuhan yang ada, perlu

penambahan alokasi pembiayaan untuk kegiatan patroli, penertiban dan panwal, serta penambahan alokasi pembiayaan untuk kegiatan pam pemilihan Kepala Daerah.

Untuk Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasarkan dari Hasil Analisis Kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.8. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I.	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%		(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%		
1.)	*(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	100%		*(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	100%		
	- (Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	Rp 630,000	- (Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	Rp 630,000	
	- (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	1,575,000	- (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	1,575,000	
2)	*(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	*100%*		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	*100%*		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / bulan	6,835,777,249	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		6,835,777,249	
3)	***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	*100%*		***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	*100%*		
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	
4)	***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	***100%***		***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket penalatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Paket	83,921,310	(Sub Kegiatan) Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket penalatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Paket	83,921,310	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	28,513,500	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	28,513,500	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	42 Paket	26,695,150	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	42 Paket	26,695,150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten / Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	125,189,000	- (Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten / Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	125,189,000	
5)	***(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	***100%***		***(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	
6)	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,600,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,600,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	62,372,500	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	62,372,500	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87,192,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87,192,000	
7)	***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	***100%***		***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***		***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp & Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	200,793,500	- (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp & Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	200,793,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	9,000,000	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	9,000,000	
	- (Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	-	- (Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	-	
II	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan kebudahan)**	**100%**		**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan kebudahan)**	**100%**		
8)	***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**100%**		***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**100%**		
	- (Sub Kegiatan) Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	1,727,260,000	- (Sub Kegiatan) Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	1,727,260,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 laporan	150,225,000	(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 laporan	150,225,000	
	- (Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. HSU	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	189,805,000	(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. HSU	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	189,805,000	
	- (Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuatan Hak Asasi Manusia	Kab. HSU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	48,645,000	(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuatan Hak Asasi Manusia	Kab. HSU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	48,645,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak penegakan perda dan perkda yang terlayani	2 Laporan	7,000,000	(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkda yang Terlayani, Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak penegakan perda dan perkda yang terlayani	2 Laporan	7,000,000	
9)	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***		***Persentase Penegakan pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***		***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***		***Persentase Penegakan pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kesesuaian					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kesesuaian Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	171,307,500	- (Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	171,307,500	
	- (Sub Kegiatan) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	14,550,000	- (Sub Kegiatan) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	14,550,000	
III	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**		**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**		
10	***(Kegiatan) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / Kota***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran***	***100%***		***(Kegiatan) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / Kota***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	186,500,000	- (Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	186,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelemahan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	277,393,000	- (Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	277,393,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	10,725,000	- (Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	10,725,000	
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	6,330,000	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	6,330,000	
	- (Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. HSU	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Audit Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	-	- (Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Audit Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	-	
Jumlah					**10,257,949,784**	**Jumlah**				**10,257,949,784**	

Dari tabel II.8 tentang review rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat bahwa program yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 3 program dengan 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan pagu anggaran sesuai Pagu Indikatif Penyesuaian sebesar Rp. 10.257.949.704,-,

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembagunan (Musrenbang) di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengakomodir usulan masyarakat dan pokok pikiran (Pokir) DPRD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap IV Tahun (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat, terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal, terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum, terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Sasaran Strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Untuk pencapaian sasaran tersebut ditetapkan program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Adapun Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terpadu dan berkesinambungan melalui penelaahan isu strategis rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan sasaran pokok untuk RPJPD ke IV (RPJMN Tahun 2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan fokus pembangunan, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditanda dengan daya saing perekonomian yang kompetitif

4. Terjaganya daya dukung dan daya tamping lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Adapun beberapa isu strategis nasional pada rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya adalah :

1. Penciptaan nilai tambah dan devisa, serta tantangan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru (Pariwisata dan Ekonomi Digital/Kreatif)
2. Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan manusia yang holistik dan terintegrasi
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Pembangunan infrastruktur dan penurunan ketimpangan antar wilayah
5. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
6. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
7. Daya Dukung dan Daya Tampung SDA dan LH
8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkait tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 serta terintegrasi dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

3. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU.
4. Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	-	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B/66	B/66,5	B/67	B/67,5
SASARAN RENSTRA SATPOL PP & DAMKAR									
				Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A / 80,62 Poin	A / 81,12 Poin	A / 81,62 Poin	A / 82,12 Poin
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
2.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan Sosial, agama di masyarakat	Angka Kriminalitas	-	Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Jumlah Kasus Konflik Sosial	-	-	-	-
SASARAN RENSTRA SATPOL PP & DAMKAR									
				Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan (%)	100%	100%	100%	100%

				Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	Persentase Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani (%)	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran	Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) penanganan kebakaran dalam radius 10 km (%)	96%	96%	96%	96%

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masuk dalam aspek kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pengemban urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum. Untuk penerima jenis pelayanan dasar sub urusan

trantibum ini adalah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Sedangkan jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tersebut meliputi layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Adapun target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda/Perkada sesuai mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan perda/perkada	Jumlah penegakan perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar	Capaian (%)	Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	Capaian (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	650	650	100%	0	0	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel III.3.Target Capaian SPM Sub sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Total persentase (%) capaian SPM kebakaran (Layanan Penyelamatan dan evalusai korban kebakaran	Jumlah Operasi Non Kebakaran	Korban Jiwa				Jumlah Taksiran Aset	
				Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan	Jumlah korban meninggal dunia	Jumlah korban mengalami luka bakar	Jumlah korban mengalami luka fisik lainnya	Jumlah taksiran aset yang berhasil diselamatkan	Jumlah taksiran kerugian aset
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Hulu Sungai Utara	100%	30 kegiatan	200 jiwa	-	-	-	Rp. 500.000.000	Rp. 2.000.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Kinerja Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka dilaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan beberapa

program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 meliputi :

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
      3. Penyediaan Bahan/Material
      4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu :
      1. Pengadaan Mebel

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

2). Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum :
   a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah, dengan 5 sub kegiatan, yaitu :
      1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM) / (Analisis Responsif Gender)***
      2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM) / (Analisis Responsif Gender)***
      3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
2. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. ***(Kegiatan Pendukung pencapaian SPM) / (Analisis Responsif Gender)***
2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

3). Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota, dengan 5 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
4. Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

Pada tahun 2024 ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan akan melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 Kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.150.391.204,-, yaitu untuk pagu belanja Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 7.235.759.144,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 2.914.632.060,-. Setelah ada pergeseran dan penambahan anggaran berubah menjadi Rp. 10.257.949.704,-, untuk pagu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.835.777.244, sedangkan belanja kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.422.172.460,-.

Adapun rumusan rencana program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 tercantum pada tabel berikut :

Tabel IV.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA THN 2025	
			LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 01	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 01 0001	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. HSU	6 Dokumen	Rp 6.00.000	-	-	6 Dokumen	Rp 1,811,250
1 0.5 01 2 01 0006	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. HSU	4 Laporan	Rp 3,535,000	-	-	4 Laporan	Rp 4,534,000
1 0.5 01 2 02	(Kegiatan) Administrasi Kewanguan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanya Administrasi Kewanguan Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 02 0001	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	58 Orang / Bulan	Rp 6,033,777,244	-	-	58 Orang / Bulan	Rp 6,033,777,244
1 0.5 01 2 03	(Kegiatan) Administrasi Perlengkapan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanya Administrasi Perlengkapan Perangkat Daerah		100%				100%	
1 0.5 01 2 03 0002	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. HSU	Paket	Rp -	-	-	1 Paket	Rp 92,000,000
1 0.5 01 2 06	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%				100%	
1 0.5 01 2 06 0002	(Sub Kegiatan) Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket perlengkapan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. HSU	33 Paket	Rp 83,021,330	-	-	34 Paket	Rp 12,030,045
1 0.5 01 2 06 0005	(Sub Kegiatan) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. HSU	12 Paket	Rp 25,511,500	-	-	13 Paket	Rp 15,500,000
1 0.5 01 2 06 0007	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kab. HSU	42 Paket	Rp 26,693,350	-	-	43 Paket	Rp 23,739,467

KODE							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN AWAL RENCANA TAHUN 2025	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	0.5	01	2	06	0005		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	21 Laporan	Rp 115,300,000	-	-	22 Laporan	Rp 253,630,330
1	0.5	01	2	07			(Kegiatan) Pengelolaan Barang Milik Daerah Penanggung Jawab Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		%				%	
1	0.5	01	2	07	0005		(Sub Kegiatan) Pengadaan Mobil	Jumlah Unit Mobil yang Diadakan	Kab. HSU	0 Unit	Rp -	-	-	4 Unit	Rp 23,000,000
1	0.5	01	2	08			(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
1	0.5	01	2	08	0001		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 6,600,000	-	-	12 Laporan	Rp 12,666,740
1	0.5	01	2	08	0002		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. HSU	36 Laporan	Rp 62,322,500	-	-	36 Laporan	Rp 56,536,000
1	0.5	01	2	08	0004		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 82,192,000	-	-	12 Laporan	Rp 82,192,000
1	0.5	01	2	09			(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanggung Jawab Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100%				100%	
1	0.5	01	2	09	0002		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. HSU	8 Unit	Rp 200,243,500	-	-	8 Unit	Rp 305,810,000
1	0.5	01	2	09	0006		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. HSU	30 Unit	Rp 9,000,000	-	-	30 Unit	Rp 5,775,000

KODE							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PERUBAHAN	PROGRAM MASA RENCANA TAHUN 2025	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	01	2	01	0003		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung, Bangunan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung, Bangunan dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab/Kota	1 Unit		-	-	1 Unit	Rp 1,225,500
							Jumlah Program 1				Rp 7,468,200,294				Rp 7,540,605,200
URAIAN PENDISTRIBUSIAN BEBAN/ PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PERUBAHAN ANTAR URUSAN															
1	01	02					(Program) Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Ketertiban		100%				100%	
1	01	02	2	01			(Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum Dalam Kabupaten	Persentase Penyelesaian Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum		100%				100%	
1	01	02	2	01	0035		(Sub Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bencana Alam, Bencana Sosial dan Penanganannya	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Mengganggu Masyarakat Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bencana Alam, Bencana Sosial, Penanganannya	Kab/Kota	12 Laporan	Rp 1,237,500,000	-	-	12 Laporan	Rp 1,359,750,000
1	01	02	2	01	0036		(Sub Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bencana Alam, Bencana Sosial dan Penanganannya	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bencana Alam, Bencana Sosial yang Ditindaklanjuti	Kab/Kota	12 Laporan	Rp 300,225,000	-	-	12 Laporan	Rp 315,105,150
1	01	02	2	01	0004		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Perlengkapan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Jumlah Perlengkapan yang Dipelihara Perlengkapan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Kab/Kota	1 Perlengkapan	Rp 855,855,000	-	-	1 Perlengkapan	Rp 60,000,000

KODE							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERUBAHAN MAKI RENCANA THR 2025	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	02	2	01	0003		*(Sub Kegiatan)* Penanggulangan Gangguan Sosial Lainnya Akibat Konflik Sosial, Pengungsi, Pengungsian Sosial, Pemulangan Pengungsi, Penanganan Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Korban Tindak Kekerasan Lainnya yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang Korban Konflik Sosial, Pengungsi, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Korban Tindak Kekerasan Lainnya yang Ditanggulangi Kebutuhannya	Kab. HSU	3 Orang	Rp 45,685,000	-	-	3 Orang	Rp 93,400,000
1	03	02	2	01	0007		(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam Gedung Bagi Penyandang Permasalahan Disabilitas dan Psikotik	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dasar, Penyediaan Rehabilitasi Sosial Dasar, Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Layanan yang Tidak Dampak, Penanganan Penduduk Rehabilitasi yang Terdaftar	Kab. HSU	2 Laporan	Rp 3,000,000	-	-	2 Laporan	Rp 3,750,000
1	03	02	2	02			(Regulasi) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup		100%				100%	
1	03	02	2	03	0012		*(Sub Kegiatan)* Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 313,307,500	-	-	12 Laporan	Rp 313,240,500
1	03	02	2	03	0013		*(Sub Kegiatan)* Penanganan dan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan dan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Satpol PP	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 14,550,000	-	-	12 Laporan	Rp 11,212,500
							Jumlah Program 2				Rp 2,886,787,500				Rp 1,749,805,500
1	03	03					*(Program)* Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten / Kota		100%				100%	
1	03	04	2	01			(Regulasi) Penanggulangan Bencana, Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Bencana, Penanggulangan dan Pencegahan di Kabupaten		100%				100%	
1	03	04	2	01	0003		*(Sub Kegiatan)* Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Korban KSPM Penanggulangan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. HSU	3 Dokumen	Rp 350,500,000			3 Dokumen	Rp 975,955,500

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN PERENCANAAN)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MASA RENCANA THN 2025	
								LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	04	2	01	0003	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan dan Pengendalian Ketertiban Dalam Rumah Ibadah / Gereja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pemeliharaan Ketertiban dalam Rumah Ibadah / Gereja	Di Kab.OKU	2 Laporan	Rp 275,950,000			2 Laporan	Rp 303,545,000
1	05	04	2	01	0003	(Sub Kegiatan) Pengamanan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Non Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Perundang-Undangan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Non Kelembagaan	Di Kab.OKU	1 Dokumen	Rp 10,725,000			1 Dokumen	Rp 11,500,000
1	05	04	2	01	0013	(Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Siap dan Layak Operasional Standar Tertib Lantas	Di Kab.OKU	10 Unit	Rp 6,330,000			10 Unit	Rp 20,000,000
1	05	04	2	01	0007	(Sub Kegiatan) Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Mengikuti Sertifikasi Bersertifikat Tertib dan Aman Dalam Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran	Di Kab.OKU	0 orang	-			1 Orang	Rp 15,232,500
						Jumlah Program 1				Rp 480,000,000				Rp 130,000,000
						JUMLAH TOTAL ANGGARAN				Rp 10,297,980,704				Rp 9,010,000,000

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Ulu Sungai Utara

ADRIAN NOOR, SSTP, MAP
NIP. 197504041994031003

Pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024, dapat dilihat bahwa rencana program dan kegiatan dari APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan sebanyak 3 Program dengan 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar 10.257.949.704,-, yaitu untuk pagu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.835.777.244, sedangkan belanja kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.422.172.460,-.

Sedangkan rumusan prakiraan maju rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 9.619.003.501,-.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024.

Isi dokumen Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 3 Program dengan 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 10.150.391.204,-, yaitu untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp. 7.235.759.144,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 2.914.632.060,- sesuai dengan pagu indikatif penyesuaian tahun 2024 untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian setelah ada pergeseran dan penambahan anggaran berubah menjadi Rp. 10.257.949.704,-, dengan untuk pagu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.835.777.244, sedangkan belanja kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.422.172.460,-.

Amuntai, Agustus 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

ASIKIN NOOR, SSTP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199403 1 003

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Jalan Emas Mandastana,
Sungai Malang, Amuntai Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 ini dibuat sebagai acuan Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2024 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini kami berharap semua rencana dapat terealisasi dengan baik dan terpadu serta mendapat dukungan dari semua pihak sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan dapat bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan serta dapat meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimasa yang akan datang.

Amuntai , 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Hj. SITI FIKRIYAH, SP, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 200701 2 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2024 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB IV PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dinas Ketahanan Pangan Triwulan II Tahun 2024 10

Tabel 2.2 Review Rancangan Awal 29

Tabel 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubanan Renja SKPD) untuk menyesuaikan perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan untuk menyesuaikan perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023–2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 memuat pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan target kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan Penyusunan RKA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan kebijakan Pembangunan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
11. Peraturan Presiden RI No 22 tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah;

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 /2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 -2024);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamananan Pangan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2011 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 12 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini untuk mensinergikan antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan tahun 2024.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, APBN dan sumber dana lainnya.
3. Sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2024

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta beberapa proses yang membutuhkan waktu.

Dukungan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. **4.459.723.057,-** yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 4.398.023.057,-** dan Belanja modal **Rp. 61.700.000,-** dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan triwulan II (dua) pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Pagu (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.501.117.638**	**1.490.371.786**	**42,57**	**2.010.745.852**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**76.700.000**	**24.742.250**	**32,26**	**51.957.750**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	9.782.400	48,91	10.217.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.500.000	3.772.150	14,23	22.727.850
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.200.000	11.187.700	37,05	19.012.300
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.995.811.210**	**1.258.009.510**	**41,99**	**1.737.801.700**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.935.811.210	1.231.773.215	41,96	1.704.037.995
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60.000.000	26.236.295	43,73	33.763.705
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**188.382.039**	**120.137.228**	**63,77**	**68.244.811**
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	54.460.000	51.200.000	94,03	3.260.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.093.140	6.463.650	45,86	7.629.490
8	Penyediaan Bahan/Material	42.000.000	26.281.900	62,58	15.718.100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.828.899	36.191.678	46,50	41.647.221
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**110.789.389**	**46.485.258**	**41,96**	**64.304.131**
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	24.222.258	49,43	24.777.742
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.789.389	22.263.000	36,03	39.526.389
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**95.000.000**	**21.357.540**	**22,48**	**73.642.460**
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	21.357.540	32,86	43.642.460
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	30.000.000	-	0,00	30.000.000

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Pagu (Rp)
	Lainnya				
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**25.435.000**	**12.740.000**	**50,09**	**12.695.000**
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	21.500.000	12.740.000	59,26	8.760.000
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.935.000	-	0,00	3.935.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**9.000.000**	**6.900.000**	**76,67**	**2.100.000**
16	Pengadaan Mebel	9.000.000	6.900.000	76,67	2.100.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**24.377.700**	**7.720.793**	**31,67**	**16.656.907**
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**24.377.700**	**7.720.793**	**31,67**	**16.656.907**
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	24.377.700	7.720.793	31,67	16.656.907
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**588.966.544**	**197.473.400**	**28,66**	**491.493.144**
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**174.583.300**	**32.841.100**	**18,81**	**141.742.200**
18	Penyediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	19.283.700	1.793.100	9,31	17.470.600
19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	91.996.300	14.881.000	15,96	77.315.300
20	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	63.323.300	16.367.000	25,85	46.956.300
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**299.471.221**	**93.647.000**	**31,27**	**205.824.221**
21	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299.471.221	93.647.000	31,27	205.824.221
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**214.912.023**	**70.985.300**	**33,03**	**143.926.723**
22	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	32.883.240	9.000.000	27,37	23.883.240
23	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	182.028.783	61.985.300	34,05	120.043.483
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**158.393.150**	**13.455.100**	**8,49**	**144.938.050**
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**46.842.700**	**10.319.100**	**22,03**	**36.523.600**
24	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	46.842.700	10.319.100	22,03	36.523.600
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**111.550.450**	**3.136.000**	**2,81**	**108.414.450**
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	111.550.450	3.136.000	2,81	108.414.450
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**86.868.025**	**25.511.000**	**29,37**	**61.357.025**
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**86.868.025**	**25.511.000**	**29,37**	**61.357.025**
26	Penguatan Kelembagaan Pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7.184.100	2.516.000	35,02	4.668.100
27	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.292.200	290.000	1,43	20.002.200
28	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	59.391.725	22.705.000	38,23	36.686.725
	Total	**4.459.723.057**	**1.734.532.079**	**38,89**	**2.725.190.978**

Secara keseluruhan realisasi belanja dari Program/Kegiatan dari Dinas Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 38,89 % atau masih belum mencapai target sebesar 50%.

Adapun untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Triwulan II (dua) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

2.1 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 dalam Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Jamsar Sangan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPD) 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7*100%		14=8+9		15=14/7*100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang ditetapkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 yang ditetapkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
a	b	c	d	e		f		g		h		i		j	k	l	m	n	o	p		q		r
				Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp					Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	
	2.04.01.2.04	Pelaksanaan Penyajian Pangan Konsumsi Pangan Pertanian Tahun Untuk dengan Angka Kecukupan Gizi	Ketersediaan Data Pola Konsumsi	2 jenis	910.976.764	0,5 jenis	136.464.894	0,5 jenis	214.913.021	0 jenis	10.000.000	0 jenis	70.465.300					0 jenis	70.465.300	0,00	32,93	0,5 jenis	337.480.194,00	25,00	0,00	
6	2.04.01.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	112.825.842	1 Dokumen	27.465.794	1 Dokumen	32.882.340	Dokumen	4.000.000	Dokumen	9.000.000					Dokumen	9.000.000	0,00	27,27	1 Dokumen	46.448.794,00	25,00	22,00	Dinas Ketahanan Pangan
7	2.04.01.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Pengembangan konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28 Laporan	798.775.891	4 Laporan	99.309.794	8 Laporan	182.030.781	Laporan	6.000.000	Laporan	61.465.300					Laporan	61.465.300	0,00	34,03	4 Laporan	141.774.594,00	14,29	31,00	Dinas Ketahanan Pangan
																						Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		14,64	26,65	
																						Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	32,41			44,51	0,00	
																						Prediksi Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	2.04.04	PROGRAM PENGEMBANGAN MEKANISME PASAR	Ketersediaan Data Sentral Dalam Pangan	0 %	1.311.935.752	7,24 %	181.358.843	7,76 %	188.303.230	0 %	6.000.000	0 %	12.465.100					0 %	12.465.100	0,00	6,39	0 %	143.813.943,00	0,00	12,97	
	2.04.04.2.01	Penyusunan Pola Kelembagaan dan Kepastaan Pangan Masyarakat	Terbentuknya Pola Kelembagaan Pangan Masyarakat	4 Pola	331.641.824	1 Pola	33.715,750	1 Pola	44.842,750	0 Pola	4.000.000	0 Pola	10.314.100					0 Pola	10.314.100	0,00	23,23	1 Pola	38.114.850,00	25,00	0,00	
8	2.04.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan analisis Pola Kelembagaan dan Kelembagaan Pangan	Pola dan analisis Kelembagaan dan Kelembagaan Pangan yang dimutakhirkan	4 Dokumen	331.641.824	1 Dokumen	33.715,750	1 Dokumen	44.842,750	Dokumen	4.000.000	Dokumen	10.314.100					Dokumen	10.314.100	0,00	23,23	1 Dokumen	38.114.850,00	25,00	10,39	Dinas Ketahanan Pangan
																						Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	23,23			25,00	10,39	
																						Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.04.04.2.02	Peningkatan Kelancaran Pangan Kemerangan Kabupaten Kota	Jumlah Desa yang Sentral Kemudi Tahan Pangan	0 Desa	662.294.929	0 Desa	134.343 (+0)	0 Desa	111.032.430	0 Desa	0	0 Desa	2.134.000					0 Desa	2.134.000	0,00	1,91	0 Desa	113.511 (+0,00)	00,00	0,00	
9	2.04.04.2.02.01	Koordinasi dan Orientasi Peningkatan Kelancaran Pangan Kabupaten Kota	Jumlah koordinasi dan orientasi pelancaran kelancaran pangan dan gizi kabupaten kota	2 Laporan	662.294.929	1 Laporan	134.343 (+0)	1 Laporan	111.032.430	Laporan	0	Laporan	2.134.000					Laporan	2.134.000	0,00	1,91	1 Laporan	113.511 (+0,00)	00,00	10,48	Dinas Ketahanan Pangan
																						Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	1,91			00,00	10,48	
																						Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	14,64			17,50	0,00	
																						Prediksi Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	2.04.05	PROGRAM PENGEMBANGAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan FSVA yang memenuhi syarat kelancaran dan mutu Pangan	80 %	140.938.999	84,29 %	17.609 (+0)	88 %	44.848.023	0 %	0	0 %	10.311.000					0 %	10.311.000	0,00	23,27	0 %	65.110 (+00,00)	0,00	20,42	
	2.04.05.2.01	Pelaksanaan Pengelolaan Kelancaran Pangan Segar Daerah kabupaten Kota	Penanganan Pengelolaan kelancaran Pangan Segar dan Tumbuhan yang Dilindungi	20 %	140.938.999	10,29 %	17.609 (+0)	0 %	44.848.023	0 %	0	0 %	10.311.000					0 %	10.311.000	0,00	23,27	10,29 %	65.110 (+00,00)	10,29	0,00	
+2	2.04.05.2.01.04	Rekomendasi kelancaran Pangan Segar dan Tumbuhan Daerah kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi kelancaran Pangan Segar dan Tumbuhan Daerah kabupaten Kota	2 Dokumen	24.218 (+2	Dokumen	1.823.000	1 Dokumen	30.231.000	Dokumen	0	Dokumen	200.000					Dokumen	200.000	0,00	1,43	Dokumen	2.143.000,00	0,00	8,73	Dinas Ketahanan Pangan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2016 s/d/d Periode Rencana Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13 = 5/7*100%		14=9/11		15= 9/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11	2.24.05.2.11.07	Penyediaan sarana pengujian kesehatan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	Jumlah sarana pengujian kesehatan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	79 Dokumen	14.565.918	16 Dokumen	15.244.150	17 Dokumen	84.201.705	Dokumen	0	17 Dokumen	11.705.000			17 Dokumen	11.705.000	100.00	58.33	22 Dokumen	37.624.150.00	65.71	44.67	Dinas Kesehatan Pangan
12	2.24.05.2.11.09	Pengujian kesehatan, pengawas kesehatan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pengujian kesehatan, pengawas kesehatan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	8 Dokumen	11.029.847	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	7.184.100	Dokumen	0	2 Dokumen	1.314.000			2 Dokumen	2.314.000	100.00	55.55	2 Dokumen	1.960.000.00	42.50	17.58	Dinas Kesehatan Pangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	64.67	34.89			35.50	31.94	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	0.00	58.73			12.50	9.00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Kurang	Kurang			Kurang	Sangat Kurang	
2	2.24.0.-	PROGRAM PENGUNGKIT UNTUK PENGENTASAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah Dinas Kesehatan Pangan	400 %	12.408.965.732	98.870 %	2.234.700.000	100 %	2.301.117.000	10,45 %	668.000.000	47,86 %	1.000.271.784			47,86 %	1.668.271.784	47,86	42.57	47,86 %	2.827.272.400.00	11.97	22.77	
	2.24.01.-	Penerapan Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	400 %	226.417.471	100 %	21.900.000	100 %	76.700.000	23,29 %	7.000.000	47,86 %	2.171.251			47,86 %	19.710.000	47,86	28.69	147,86 %	86.400.760.00	34,77	0.00	
13	2.24.01.2.01.17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	100.622.222	8 Dokumen	17.474.000	8 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	2.700.000	4 Dokumen	9.782.400			4 Dokumen	9.782.400	50,47	58.91	12 Dokumen	27.240.700.00	41.67	22.60	Dinas Kesehatan Pangan
14	2.24.01.2.01.20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	59.835.000	1 Laporan	21.271.000	1 Laporan	34.500.000	Laporan	0	Laporan	2.771.150			Laporan	2.771.150	0.00	14.23	1 Laporan	35.242.350.00	25.00	14.67	Dinas Kesehatan Pangan
15	2.24.01.2.01.27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	100.542.500	10 Laporan	13.134.800	10 Laporan	30.000.000	2 Laporan	4.500.000	4 Laporan	11.457.700			4 Laporan	11.457.700	40.00	37.38	14 Laporan	34.346.500.00	35.00	33.33	Dinas Kesehatan Pangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	20.24	22.10			23.83	22.43	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksana Administrasi Keuangan	400 %	6.784.965.900	100 %	2.202.249.245	100 %	2.945.241.210	24,29 %	61.425.000	47,82 %	1.226.005.210			47,82 %	1.226.005.210	47,82	41.64	147,82 %	2.202.259.200.00	34.38	0.00	
16	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	800 orang	6.412.965.700	168 orang	2.012.709.245	207 orang	2.835.241.210	50 orang	800.700.000	98 orang	1.221.772.210			98 orang	1.221.772.210	47.34	41.94	239 orang	2.202.965.145.00	33.82	27.42	Dinas Kesehatan Pangan
17	2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Laporan	172.584.333	18 Laporan	21.324.241	19 Laporan	60.000.000	4 Laporan	12.641.000	8 Laporan	14.232.000			8 Laporan	26.232.000	31.58	33.73	23 Laporan	37.772.964.00	33.80	33.31	Dinas Kesehatan Pangan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	27.33	22.84			31.86	30.62	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Kurang	Sangat Kurang			Sangat Kurang	Sangat Kurang	
	2.24.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Gaji dan Absensi Kerja	400 %	114.760.000	100 %	0	100 %	20.433.000	0 %	0	80 %	11.760.000			80 %	11.760.000	80.00	80.00	180 %	13.760.000.00	37.50	0.00	

No.	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub-Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan 2024 yang dinilaikan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 yang (Revisikan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7 (%)		14=8+9		15=14/6(%)		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18	5.XX.01.2.22.10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	22 Paket	60.000.000	20 Paket	0	20 Paket	21.300.000	0 Paket	0	20 Paket	12.710.000			20 Paket	12.710.000	100,00	59,39	22 Paket	12.710.000,00	100,00	21,00	Dinas Kelautan Perikan
19	5.XX.01.2.22.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	74.760.000	0 orang	0	0 orang	3.600.000	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	Dinas Kelautan Perikan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				50,00	10,50	
																		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.XX.01.2.22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	400 %	464.822.181	100 %	137.491.910	120 %	148.350.000	6,25 %	19.610.014	30,00 %	100.137.210			62,08 %	100.137.210	51,73	43,77	100,00 %	247.823.118,00	38,57	8,59	
20	5.XX.01.2.22.12	Penjaditan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	142.100.000	2 Paket	0	6 Paket	24.450.000	0 Paket	1.600.000	0 Paket	31.200.000			0 Paket	31.200.000	83,33	56,09	2 Paket	31.200.000,00	33,33	21,96	Dinas Kelautan Perikan
21	5.XX.01.2.22.20	Penjaditan Barang Cadangan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cadangan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25.600.270	2 Paket	2.431.000	1 Paket	14.000.000	0 Paket	1.600.000	0 Paket	6.000.000			0 Paket	6.461.000	0,00	46,04	2 Paket	12.223.250,00	20,00	34,74	Dinas Kelautan Perikan
22	5.XX.01.2.22.27	Penjaditan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	10 Paket	104.272.217	0 Paket	21.247.000	0 Paket	42.000.000	0 Paket	0	0 Paket	26.291.500			0 Paket	26.291.500	62,62	62,59	11 Paket	67.791.250,00	45,83	64,90	Dinas Kelautan Perikan
23	5.XX.01.2.22.29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	177.320.195	12 Laporan	80.220.900	12 Laporan	77.826.999	3 Laporan	19.456.594	9 Laporan	46.791.479			9 Laporan	64.791.479	91,67	64,59	27 Laporan	174.054.536,00	56,25	64,59	Dinas Kelautan Perikan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				53,74	46,72	
																		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.XX.01.2.27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kelautan Perikan	100 %	24.800.000	0 %	0	100 %	6.000.000	0 %	0	100 %	6.000.000			100 %	6.000.000	100,00	75,47	100 %	6.000.000,00	50,00	0,00	
24	5.XX.01.2.27.20	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Paket kendaraan yang Disediakan	1 Unit	24.800.000	0 Unit	0	1 Unit	6.000.000	0 Unit	0	1 Unit	6.000.000			1 Unit	6.000.000	100,00	75,47	1 Unit	6.000.000,00	50,00	17,61	Dinas Kelautan Perikan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				50,00	17,61	
																		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Tinggi	
	5.XX.01.2.28	Penyaditan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyaditan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 %	277.806.314	100 %	75.389.421	100 %	110.750.000	21,99 %	11.441.817	43,08 %	48.482.339			43,08 %	48.482.339	43,08	41,34	100,00 %	115.971.699,00	25,00	0,00	
25	5.XX.01.2.28.21	Penyaditan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyaditan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	187.804.314	12 Laporan	43.441.421	12 Laporan	48.000.000	3 Laporan	9.451.817	9 Laporan	24.222.339			9 Laporan	24.222.339	50,00	45,43	18 Laporan	67.664.260,00	37,50	36,11	Dinas Kelautan Perikan
26	5.XX.01.2.28.22	Penyaditan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyaditan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	100.001.746	23 Laporan	28.468.000	76 Laporan	61.761.180	18 Laporan	10.219.000	27 Laporan	23.260.000			27 Laporan	23.260.000	34,18	36,24	36 Laporan	50.711.000,00	34,00	50,67	Dinas Kelautan Perikan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				42,09	43,73	
																		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.XX.01.2.29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang dipelihara sesuai dengan spesifikasi	400 %	151.421.733	103,13 %	31.700.000	120 %	50.000.000	0 %	8.110.000	6,25 %	21.227.500			6,25 %	21.227.500	4,25	22,48	100,00 %	84.117.500,00	37,50	0,00	

No.	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021a (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2021 yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Terkait Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan IV (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terkait Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Kabupaten s/d Triwulan IV (2021) (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12:7x100%		14=4+12		15=5+13x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dioperasikan Pelayanya	44 Unit	174.600.784	17 Unit	35.790.000	16 Unit	65.000.000	3 Unit	9.150.000	3 Unit	21.227.840			3 Unit	31.227.840	12,50	32,84	14 Unit	91.127.840,00	25,00	36,95	Dinas Kehutanan Pangkep
18	5.02.01.2.09.12	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	4 Unit	14.870.400	1 Unit	2.480.000	1 Unit	50.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0,00	0,00	1 Unit	2.480.000,00	25,00	16,68	Dinas Kehutanan Pangkep
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																6,25	16,42			37,50	53,42		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																18,75	51,64			37,50	0,00		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																6,25	16,42			0,00	16,68		
		Predikat Kinerja (Program)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	28	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																31,25	68,84			31,25	31,67		
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Jumlah anggaran dari seluruh Program				4.459.731.227		518.797.231		1.731.331.379						1.731.331.379								
	Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja		'1. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi dan Perhutanan Pangkep : - Tim yang cukup solid di Bidang Konservasi dan Rehabilitasi dan Perhutanan Pangkep 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangkep : - adanya dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2021 - adanya koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor 3. Bidang Konsumsi dan Kemitraan Pangkep : - Kerja sama yang baik antara pemerintah di Bidang - Koordinasi dengan antar lintas sektor / PKBI 4. Sekretariat : - Sdm yang cukup memadai - Kerjasama yang baik dalam unit																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		'1. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi dan Perhutanan Pangkep 2. : - Proses pembuatan SK cukup lama, Proses e-katalog memboroskan waktu juga 3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangkep : - Proses Pemesanan untuk pengadaan CPP cukup lama Pangkep 3. Bidang Konsumsi dan Kemitraan Pangkep : - Belum sepenuhnya proses e-katalog 4. Sekretariat : - Proses e-katalog yang memerlukan waktu pada saat vaksi sehingga surat pesanan terlambat																						
	Tindak lanjut yang dilakukan dalam Triwulan Berikutnya		'1. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi dan Perhutanan Pangkep : - Perlu pengawasan dalam proses pembuatan SK, Percepatan Proses Penyelesaian e-katalog 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangkep : - membuat rekapan staf untuk pendampingan pengusulan CPP selama 1 tahun berjalan 3. Bidang Konsumsi dan Kemitraan Pangkep : - Percepatan proses penyelesaian e-katalog 4. Sekretariat : - Percepatan proses penyelesaian e-katalog"																						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan triwulan II tahun 2024 masih belum bisa menampilkan data/informasi capaian kinerja. Dari tabel hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Capaian Kinerja untuk indicator Nilai SAKIP SKPD

Untuk mencapai target kinerja ini Program yang mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 47,06 % dengan realisasi anggaran Rp. 24.742.250,-
   Pada Kegiatan ini sudah tersusun Laporan LPPD/LKPJ, LAKIP, Laporan monitoring evaluasi renja triwulan I dan II, Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I dan II serta RKA tahun 2024.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 37,53 % dengan realisasi anggaran Rp. 1.258.009.510,-
   Telah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan realisasi bulanan/triwulan dan semester. Diperlukan penambahan anggaran gaji untuk ASN karena adanya penambahan nominal honorarium untuk penanggungjawab pengelola keuangan, kekurangan gaji pokok, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS dan pembulatan gaji PNS.
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 52,08 % dengan realisasi anggaran Rp. 120.137.228,-
   Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan, terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi serta terlaksananya penyediaan bahan/material. Adanya penambahan dana untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 42,08 % dengan realisasi anggaran Rp. 46.485.258,-
Ada penambahan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik karena anggaran tidak mencukupi.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 6,25 % dengan realisasi anggaran Rp. 21.357.540,-
Terpeliharanya 3 buah kendaraan roda 4 dan terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2. Dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga dilakukan penambahan anggaran

6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 50 % dengan realisasi anggaran Rp. 12.740.000,-

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100 % dengan realisasi anggaran Rp. 6.900.000,-

2.2.2 *Indeks Ketahanan Pangan Daerah*

Program yang mendukung adalah :

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini terdiri dari Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam satu sub kegiatan.
Capaian kinerja sampai dengan triwulan II belum dapat diukur, karena data akan diperoleh diakhir tahun dengan realisasi anggaran Rp.7.720.793,- (31,67 %)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik, sebagai penjabaran kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui

pendampingan lumbung pangan masyarakat pada tahun 2024, dengan jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat yang didampingi sebanyak 6 kelompok yang tersebar pada 3 kecamatan yaitu :

Kecamatan	Desa	Tahun Pembangun Fisik Lumbung (Dana DAK)
Sungai Pandan	Teluk Sinar	2013
	Putat Atas	2013
Babirik	Pajukungan Hulu	2013
	Hambuku Baru	2013
	Sungai Dalam	2014
Amuntai Selatan	Kutai Kecil	2014

Kegiatan lumbung pangan berupa pembelian gabah dari dana bansos APBN yang dipergunakan untuk usaha tunda jual gabah/beras dan pengisian cadangan pangan lumbung, untuk saat ini lumbung memiliki stok kurang dari 2 ton gabah, stok ini berkurang dari stok minimal gabah yang ada di lumbung yaitu minimal 2 ton hal ini dikarenakan banyak petani yang mengalami gagal panen dan juga adanya serangan hama tikus dan burung terhadap gabah yang dimiliki petani yang disimpan di lumbung. Adapun stok gabah padi yang ada di lumbung bisa dipergunakan untuk pinjaman ke anggota kelompok apabila diperlukan dengan perhitungan jasa pengembalian sesuai kesepakatan kelompok, selain itu ada beberapa kelompok lumbung yang melaksanakan iuran kelompok untuk menambah modal lumbung, dan apabila ada keuntungan dari usaha kelompok maka sisa hasil usaha dapat dibagi sesuai kesepakatan anggota kelompok. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kelompok yang mengalami kerugian akibat usaha tunda jual dan pinjaman gabah/beras tersebut.

Sampai dengan saat ini kegiatan yang dilaksanakan baru melaksanakan monitoring kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina, untuk kegiatan lainnya akan dilaksanakan pada saat triwulan III dan IV.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu yang pertama Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dibagi dalam 3 sub kegiatan.

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II belum dapat diukur, karena data akan tersedia diakhir tahun dengan realisasi anggaran Rp. 197.473.400,- (28,66 %)

Pada Sub Kegiatan Penyediaan informasi dan harga pangan dan neraca bahan makanan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pertemuan Koordinasi anggota Tim NBM Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Kuperindag Kabupaten Hulu Sungai Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kualitas ketersediaan pangan yang dinyatakan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan, pada tahun 2024 skor Pola Pangan Harapan angka perkiraan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023 angka skor pola pangan harapan ketersediaan adalah 60,6 sedangkan tahun 2024 angka perkiraan adalah 60,7 angka skor pola pangan mengalami peningkatan hal ini dikarenakan peningkatan produksi ketersediaan bahan pangan,seperti padi-padian, daging ,telor, makanan berpati, buah biji berminyak dan sayur-sayuran, sedangkan buah tidak ada perubahan.

Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pertemuan anggota tim Neraca Bahan Makanan dilaksanakan pada triwulan III dan IV dengan sasaran kegiatan mendapatkan angka sementara dan angka tetap Neraca Bahan Makanan yang angka tersebut baru bisa didapatkan pada triwulan III dan IV.

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota Pada tahun 2024 mencakup 10 desa rentan pangan dari 16 desa, kegiatannya adalah Untuk 1 desa, ada 3 kali pertemuan yang pesertanya ibu-ibu yang tergolong miskin yang datanya diambil dari data P3KE yang diperoleh dari Bappedalitbang. Melalui pengolahan hasil, diharapkan setelah kegiatan ini selesai ibu-ibu bisa mengolah untuk kebutuhan sendiri ataupun dijual agar pendapatannya meningkat.

Pada Sub Kegiatan berikutnya yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya, kenaikan harga pangan secara makro yang berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga/rumah tangga untuk pangan yang akan mempengaruhi ketahanan pangan di rumah tangga. Oleh karena itu perlu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen/masyarakat.

Dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat Konsumen.

Di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni untuk kegiatan ini dengan jumlah dana sebesar Rp. 91.996.300,- yang terdiri dari; Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak, Belanja bahan komputer, belanja Natura dan Pakan-Natura, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga administrasi dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Realisasi dari sampai dengan triwulan 2 (dua) cuma sebesar 15,96 % hal ini di sebabkan untuk belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor–Bahan Cetak, belanja bahan komputer kegiatan dilaksanakan pada triwulan III (tiga), belanja makanan dan minuman rapat dipindah menjadi makan dan minum lapangan untuk petugas kegiatan operasi pasar (pasar murah dan gerakan pangan murah) dan belanja Natura – Pakan Natura dan untuk belanja pakan natura kode rekening belanja bukan belanja yang diberikan kepada masyarakat. Untuk sub kegiatan ini tidak ada pengurangan dan penambahan anggaran.

Untuk Sub Kegiatan berikutnya yaitu Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen,dan sebagainya. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan.

Tujuan kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok tingkat konsumen adalah:

a. Mendapatkan data perkembangan harga pangan pokok di tingkat pedagang besar (grosir) dan eceran (pasar) yang terus-menerus dari waktu ke waktu (*time series*).
b. Membangun keterpaduan dan sinergisme sistem dan kegiatan pemantauan harga pangan dalam upaya mendukung pemantapan sistem pemantauan ketahanan pangan.
c. Mendapatkan masukan untuk perumusan kebijakan yang berkaitan dengan upaya antisipasi dan menjaga penyediaan dan stabilitas harga pangan.
d. Mendapatkan data awal dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan bahan masukan kebijakan harga yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni untuk kegiatan ini dengan jumlah dana sebesar 63.323.300,- yang terdiri dari; Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak, Belanja bahan computer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga administrasi dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Realisasi dari sampai dengan triwulan 2(dua) cuma sebesar 25,85 %.

Untuk sub kegiatan Pemantauan Stock, pasokan dan harga pangan bertambah menjadi Rp. 98.323.300,- atau sebesar 55,27 %, untuk belanja jasa upah tenaga operator komputer dalam rangka penginputan data pemantauan harga dan pasokan pangan.

Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II (dua) sebesar Rp. 93.647.000,- atau 31,27% dari pagu anggaran Rp. 299.471.221,-. Hal ini dikarenakan realisasi pengadaan beras baru sebanyak 5.000 kg dari target 15.000 kg. Sedangkan untuk di Anggaran Perubahanan ini untuk sub kegiatan ini mendapat tambahan menjadi Rp.319.446.221,-

Pada Anggaran perubahan ini sisa pengadaan beras sebesar 10.000 kg akan diganti dengan pengadaan gabah 16.000 kg. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan beras yang sangat susah/sulit.

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan adalah tidak adanya indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumberdaya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah, dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan.

Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga.

Berikutnya kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terdiri dari 2 sub kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II belum dapat diukur, karena data akan tersedia diakhir tahun dengan realisasi anggaran Rp. 70.985 300,-

Pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun tersedia data Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat dengan tingkat kecukupan konsumsi 2.000 kkal/52 gr protein (berdasar WNPG X, 2012). Kegiatan ini dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) desa dengan karakter wilayah pertanian, perikanan dan wilayah lainnya. Kegiatan ini adalah data dari hasil survey yang akan dilaksanakan pada akhir triwulan III (tiga) dengan sasaran desa lokus stunting, desa miskin untuk jumlah sasaran per desa adalah 10 KK (Kepala Keluarga) di wilayah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada tahun 2023 hasil kegiatan diperoleh data Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan skor **83,7** dengan tingkat kecukupan konsumsi rata-rata **1.863,2** kkal/kap/hari dari konsumsi protein rata-rata **46,8** gram.

Pada Anggaran Perubahan terjadi penambahan dana guna menunjang pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun yang (PPH

Konsumsi) berupa pemberian upah jasa kepada petugas operator dan perjalanan dinas untuk persiapan menghadiri Rapat Koordinasi/sosialisasi, Bimtek ke Provinsi dan Luar Provinsi yang sebelumnya tidak tersedia.

Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Penganekaragaman pangan merupakan upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Guna mendorong percepatan penganekaragaman pangan, maka perlu dilakukan secara fokus baik di sisi hulu maupun hilir. Dari sisi hulu dilakukan dengan peningkatan penyediaan berbagai jenis dan aneka ragam pangan, sehingga tidak tergantung hanya pada salah satu jenis bahan pangan saja. Dari sisi hilir, strategi yang dilakukan meliputi pengembangan pengolahan pangan lokal berbasis industri rumah tangga, inovasi resep menu khas nusantara, serta kampanye atau gerakan sosialisasi dan promosi untuk mengubah mindset masyarakat dalam pola konsumsi pangan.

Sejalan dengan itu, dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya berupa promosi olahan pangan lokal dan penerapan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Praktek Pengolahan Pangan Lokal. Melalui praktek ini diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas dan inovasi yang membuat olahan pangan yang menarik, cita rasa tinggi, dan bernilai gizi, tetapi nilai komersialnya juga menjadi perhatian, sehingga ada nilai ekonomi yang diperoleh. Hal ini sangat beralasan, agar pemanfaatan pangan lokal dapat terus berkelanjutan.

Kegiatan Praktek Pengolahan makanan non beras non terigu adalah salah satu upaya untuk melaksanakan penganekaragaaman pengolahan pangan bagi masyarakat dengan memanfaatkan pangan lokal yang mengandung gizi yang tinggi dan dengan harga yang terjangkaau serta aman dikonsumsi. Pelaksanaan kegiatan praktek pengolahan pangan lokal ini dengan sasaran kegiatan adalah desa lokus stunting.

Peserta Praktek Pengolahan Pangan Lokal adalah terdiri dari Ibu – Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu – ibu yang mempunyai anak Balita, Kader Posyandu dan TP. PKK di desa yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang per desa atau kelurahan, dengan tempat pelaksanaan pada tabel dibawah ini :

No	Desa	Kecamatan
1.	Sei Luang Hulu	Babirik
2.	Murung Panti Hilir	Babirik
3.	Panangian	Amuntai Utara
4.	Pandawanan	Amuntai Utara
5.	Pandulangan	Banjang
6.	Beringin	Banjang
7.	Sungai Binuang	Haur Gading
8.	Rantau Bujur Hilir	Sungai Tabukan

Jenis makanan pangan lokal yang di praktekkan adalah Pelaut Balon (Empal Belut Bakar Teplon), Yachaejeon / Dadar Sayur Korea (untuk balita), Ading Rakus (Wadai Bingka dari Ikan Gabus)

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan disusun dalam kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang diurai dalam 1 sub kegiatan, yaitu Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II belum dapat diukur, karena data akan tersedia diakhir tahun dengan realisasi anggaran Rp. 13.455.100,- (8,49%)

Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dilaksanakan melalui Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi. Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG), yang merupakan instrument kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya masalah pangan dan gizi. Sesuai dengan analisis SKPG terbaru, tidak ada lagi skor komposit, maka untuk

penentuan kemungkinan terjadinya kerawanan pangan harus dilihat melalui masing-masing indikator.

Pelaksanaannya dengan mengumpulkan data dari anggota tim SKPG baik Dinas Pertanian, Diskuperindag, Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa luas tanam tanaman padi, luas panen padi, jumlah tanaman padi yang puso dan jumlah bayi stunting per kecamatan dan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara serta data pendukung lainnya.

Untuk pelaksanaan di desa, ada 3 kali pertemuan dengan peserta ibu dari rumah tangga miskin yang datanya diambil dari Bappedalitbang, dengan pengolahan hasil, diharapkan setelah kegiatan ini mereka bisa mengolah kebutuhan sendiri ataupun dijual agar pendapatannya meningkat.

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II belum dapat diukur, karena data akan tersedia diakhir tahun dengan realisasi anggaran Rp. 5.992.000,-. Sub kegiatan lain ini dianggap lebih prioritas karena didalamnya ada bantuan pengetahuan keterampilan anggota masyarakat sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan mengaalami peningkatan. Adapun kegiataannya adalah pemberian Pelatihan mencakup 10 desa rentan pangan dari 16 desa.

Untuk 1 desa, ada 3 kali pertemuan yang pesertanya masyarakat yang tergolong miskin yang datanya di ambil dari bapedalitbang dengan pengolahan hasil, diharapkan setelah kegiatan ini selesai ibu-ibu bisa mengolah untuk kebutuhan sendiri ataupun dijual agar pendapatannya meningkat.

Pada kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dibutuhkan dana yang lebih besar pada tahun 2024 mencakup 10 desa rentan pangan dari 16 desa. Untuk 1 desa, ada 3 kali pertemuan yang pesertanya ibu-ibu yang tergolong miskin yang datanya diambil dari Bappedalitbang (P3KE), dengan pengolahan hasil, diharapkan setelah kegiatan ini selesai ibu-ibu bisa mengolah untuk kebutuhan sendiri ataupun dijual agar pendapatannya meningkat. Untuk kegiatan pendampingan Desa Mandiri Pangan pada tahun ini ditiadakan mengingat keterbatasan

dana, pada tahun yang akan datang apabila dana mencukupi maka kegiatan ini akan dilaksanakan lagi.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang terurai dalam 3 sub kegiatan dengan realisasi Rp.25.511.000,- (29,37 %)

Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; Target Tahun 2024 ada 3 pelaku usaha yang dibina yaitu yang sudah memiliki nomor daftar (registrasi) PSAT-PDUK Pembinaan ataupun yang memperpanjang registrasi. Pelaku usaha yang sudah memiliki nomor registrasi PSAT-PDUK Pembinaan yaitu UD. Suka Makmur, Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik. Selanjutnya yang memperpanjang registrasi UD. Cahaya Rezky, Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik dan Gapoktan Desa Teluk Limbung, Kecamatan Babirik.

Sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; Tahun 2024 menargetkan 1 dokumen pelaku usaha beras kemasan berlabel yang mengajukan permohonan nomor registrasi PSAT-PDUK yang memenuhi syarat. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan dan sosialisasi. Dalam Triwulan II ada 2 pelaku usaha yang mengajukan permohonan yaitu UD. Suka Makmur, Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan UD. Cahaya Rezky, Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan pengujian dengan metode rapid test kit telah dilaksanakan. Tahap I ada 17 jenis komoditas yang diuji yaitu tomat, cabe rawit, cabe merah besar, cabe merah keriting, cabe hijau besar, Cabe kering, Seledri, Bawang merah, Bawang putih, Bawang prei, Sawi, Apel , Lengkeng, Mangga, Pir, Buah Naga dan Anggur. Hasil uji tes pestisida I menunjukan bahwa **Bawang putih di Pasar Babirik tidak aman**. Selanjutnya **Cabe merah berasal dari wilayah HST dan Bawang putih di Pasar Unggas tidak aman**. Uji tahap II dan uji lab rencana triwulan ke III/IV.

Penambahan anggaran 2024 untuk perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas dalam/luar provinsi, makan minum pertemuan teknis /pengujian sampel.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting yang ada dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan adalah :

1. Stabilisasi ketersediaan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam usaha menurunkan tingkat kerawanan pangan

   Isu stabilisasi ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapat perhatian. Walaupun produksi pangan di kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum tersedia cukup.

   Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Kabupaten Hulu Sungai Utara surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun. Hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.

   Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.

   Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih cukup tinggi yang diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar perdesaan, potensi sumber daya yang rendah serta adanya bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah.

2. Mewujudkan sistem distribusi yang efisien dan menjaga stabilisasi harga pangan dan pasokan pangan

   Isu sistem distribusi yang efisien diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting.

Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menguhubungkan produsen dan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Meningkatkan promosi dan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih belum maksimal yang ditunjukkan dengan angka pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi. Problematika gizi masyarakat seperti stunting, wasting dan obesitas.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang bergam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat salah satunya dilaksanakan dengan menggencarkan promosi pangan lokal.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan

Saat ini masih cukup banyak ditemukan sampel sayuran/ buahan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di pasar yang mengandung residu pestisida, dalam jangka panjang dapat menggangu kesehatan.

Untuk itu pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditingkatkan, serta belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga

memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Review Rancangan Awal

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Kab. HSU**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah**	**100**	**2.737.097.100**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Kab. HSU**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah**	**100**	**2.983.020.014**	
1	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**70.700.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**70.700.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	20.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	20.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	28.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	28.500.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	10	24.200.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	10	24.200.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan**			**100**	**2.303.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan**	**100**	**2.501.713.586**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	18	2.257.400.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	18	**2.456.113.586**	Penambahan Gaji dan Tunjangan P3K tahun 2024 sebanyak 3 orang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan yang selesai tepat waktu	19	46.600.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan yang selesai tepat waktu	19	46.600.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian**			**100**	**25.435.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian**	**100**	**25.435.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52	21.500.000				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52	21.500.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5	3.935.000				Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5	3.935.000	
4	**Adiministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**			**100**	**175.380.240**	**Adiministrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**188.382.039**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	48.450.000				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	84.450.000	Perlu penambahan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pekerjaan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		Persentase Barang yang dicetak dan digandakan	100	14.093.140		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		Persentase Barang yang dicetak dan digandakan	100	14.093.140	
		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	42	42.000.000		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	42	42.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	70.837.100		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan/ Rapat dan Konsultasi yang dilaksanakan	18	77.636.899	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100	**98.581.860**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**98.789.389**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	49.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penggunaan sambungan telepon, listrik, air dan internet pertahun	12	49.000.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jass Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	49.581.860		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase barang yang dipelihara	30	49.789.389	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah**				**100**	**84.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah**				**100**	**89.000.000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan, Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	59.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan, Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	59.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	30.000.000	**Kondisi kantor perlu perbaikan pasca beberapa kali banjir sehingga banyak bagian yang rusak**
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**9.000.000**	
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10	-		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10	9.000.000	**Perlu pengadaan kursi kerja, karena beberapa sudah rusak**

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**		**Kab. HSU**	**Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat**	22,2	**17.700.000**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**		**Kab. HSU**	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	**22,2**	**24.387.450**	
6	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenanagan daerah kabupaten / kota			Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	2	17.700.000	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenanagan daerah kabupaten / kota			Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	3	24.387.450	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik	1	17.700.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik	3	**24.387.450**	
III	**PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Kab. HSU**	**% penurunan desa rentan rawan pangan**	**62,22**	**133.980.100**	**PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN**	**62,82**	**143.297.100**	
9	**Penyusunan Peta dan Kerentanan Pangan**			**Tersedianya Peta Kerentanan Pangan**	**2**	**36.553.500**	**Penyusunan Peta dan Kerentanan Pangan**			**Tersedianya Peta Kerentanan Pangan**	**2**	**38.090.650**	
		Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Jumlah Analisis Peta Ketahanan dan kerentanan pangan dan Analisis SKPG yang terlaksana	2	36.553.500		Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Jumlah Analisis Peta Ketahanan dan kerentanan pangan dan Analisis SKPG yang terlaksana	2	38.090.650	
10	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan**	2	**97.426.600**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan**	3	**105.206.450**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2	97.426.600		Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2	105.206.450	Pemberdayaan masyarakat desa rentan pangan
IV	**Program Peningkatan Diversefikasi dan Ketahanan Pangan**		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN**	**62,52**	**261.954.599**	**Program Peningkatan Diversefikasi dan Ketahanan Pangan**		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN**	**62,52**	**468.740.821**	
11	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**			**% Ketersediaan Pangan Utama**	**221,89 %**	**118.483.279**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**			**% Ketersediaan Pangan Utama**	**221,89 %**	**175.269.600**	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan		Terlaksananya Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	26.950.000		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan		Terlaksananya Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	26.950.000	
		Pemantauan Stock,Pasokan dan Harga Pangan		Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2	20.636.979		Pemantauan Stock,Pasukan dan Harga Pangan		Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2	57.323.300	Biaya operasional untuk petugas survei harga pangan
		Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan		Terlaksananya Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan	1	71.996.300		Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan		Terlaksananya Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	1	91.996.300	Untuk kegiatan Stabilisasi Pasokan

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pokok dan Pangan Lainnya		Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				Pokok dan Pangan Lainnya		Pokok dan Pangan Lainnya			dan Harga Pangan (SPHP)
12	Pegelolaan dan Keseimbangann Cadangan pangan Kabupaten/Kota			% Peningkatan Cadangan pangan Daerah	3	143.471.320				% Peningkatan Cadangan pangan Daerah	9	293.471.221	
		Pengadaan Cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	5	143.471.320		Pengadaan Cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	15	293.471.221	Penambahan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa beras
	Program Peningkatan Diversefikasi dan Ketahanan Pangan		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI**	**84,2**	116.870.100	**Program Peningkatan Diversefikasi dan Ketahanan Pangan**		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI**	**84,2**	**196.912.023**	
13	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi**			**% Peningkatan PPH Konsumsi**	**0,6**	**116.870.100**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi**			**% Peningkatan PPH Konsumsi**	**0,6**	**196.912.023**	
g	g	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun	1	21.943.500		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun	1	26.883.240	Penambahan bimtek penyusunan PPH Konsumsi

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6	94.926.600		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16	170.028.783	Penambahan Praktek Pengolahan Pangan Lokal; Lomba Tingkat Kabupaten dan Provinsi serta Pameran Pangan Lokal
V	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**		**Kab. HSU**	**Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**	**88**	**36.909.948**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**		**Kab. HSU**	**Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**	**88**	**86.868.025**	
14	**Pelaksanaan PengawasanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar**	**4,8**	36.909.948	**Pelaksanaan PengawasanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar**	**4,8**	**86.868.025**	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	2	4.510.600		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	3	7.184.325	Peningkatan kelembagaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2	8.112.600		Registrasi Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3	13.982.600	Peningkatan pembinaan ke pelaku usaha penggilingan yang sudah berkemas tapi belum

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													berlabel
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	4.952.000		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	6.309.950	Peningkatan pembinaan ke pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasrana Pengujian Mutu Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	17	19.334.745		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasrana Pengujian Mutu Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	17	59.391.150	Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, perlu dilakukan uji laboratorium

Tabel 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Untuk program / kegiatan Dinas Ketahanan Pangan usulan melalui hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan ***tidak ada.***

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2024 mengakomodasi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program dan Kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, dilaksanakan secara sinergi dan terpadu baik antar maupun inter sektor, agar lebih efektif dan efisien, untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Ketahanan Pangan				3.704.611.647	4.459.723.057,00	4.936.837.905,0							5.473.861.225,00	
2				1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				3.704.611.647,0	4.459.723.057,00	4.936.837.905,0							5.473.861.225,00	
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.704.611.647,0	4.459.723.057,00	4.936.837.905,0							5.473.861.225,00	
2	0	9	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan	100 %	100 %	2.764.308.429,00	3.501.117.638,00	3.802.634.468,00							4.073.212.839,00	
2	0	9	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	70.700.000,00	78.700.000,00	78.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Karyawan / ti Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Utara		194.297.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	0	9	0	1	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			56.298.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	0	9	0	1	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			68.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	0	9	0	1	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	24.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			69.209.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatahnya Administrasi Keuangan	100	100	2.303.000.000,00	2.995.811.210,00	2.995.811.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Karyawan ti Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Utara		3.056.674.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.02	0 0 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.257.400.000,00	2.935.811.210,00	3.179.424.210,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			2.985.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.02	0 0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesta...	19 Laporan	19 Laporan	45.600.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			90.674.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian	100	100	25.435.000,00	25.435.000,00	25.435.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Karyawan/ti Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Utara		90.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.05	0.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayana			50.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.05	0.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	3 Orang	3 Orang	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayana			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100	100	188.382.039,00	188.382.039,00	188.382.039,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Karyawan/ti Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Utara		431.102.239,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.05	0.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	54.450.000,00	54.450.000,00	54.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			51.387.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.05	0.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.093.140,00	14.093.140,00	14.093.140,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			44.900.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	0003		Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			87.072.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	0005		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	57 Laporan	77.838.899,00	77.838.899,00	113.442.399,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			247.841.839,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi	100	100	9.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Kenyeken/ti Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Utara		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	0003		Pengadaan Mebel															

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	99.789.389,00	110.789.389,00	110.789.389,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Karyawan/ti Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Utara		145.839.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.10	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	54.251.348,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3 Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			93.339.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.10	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 Laporan	73 Laporan	49.789.389,00	61.789.389,00	63.739.389,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3 Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			60.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.11		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	39.500.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3 Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Karyawan/ti Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Utara		124.800.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

2	09	01	2.03	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	59.000.000,00	65.000.000,00	71.999.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			94.800.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.03	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	22,2 %	22,2 %	24.377.700,00	24.377.700,00	24.377.700,00							75.475.202,00	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	2	2	24.377.700,00	24.377.700,00	24.377.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Anggota Kelompok Lumbung		75.475.202,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.03	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														

							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1 Laporan	24.377.700,00	24.377.700,00	24.377.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			75.475.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Skor PPH Konsumsi/ Skor PPH Ketersediaan	84,2 82,72 Poin Poin	84,2 82,72 Poin Poin	668.966.544,00	668.966.544,00	813.298.544,00								916.833.087,00	
2	09	03	2 01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	221,89	221,89	168.583.300,00	174.583.300,00	174.583.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Pedagang dan Penggilingan		291.667.028,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya															
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	91.996.300,00	91.996.300,00	91.996.300,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			97.388.028,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0 07	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan															
						Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	57.323.300,00	63.323.300,00	58.323.300,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			96.231.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

2	09	03	2.03	0.01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.283.700,00	19.283.700,00	19.283.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfar Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			98.048.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.03.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Cadangan pangan Daerah	12	12	292.471.221,00	299.471.221,00	299.471.221,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Masyarakat pasca bencana (kecelakaan / banjir / puting beliung)		370.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.03.02	0.02	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton	15 Ton	293.471.221,00	299.471.221,00	319.446.221,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfar Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			370.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.03.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Skor PPH Konsumsi Persentase Ketersediaan Pangan Utama	0,6 221,89	0,6 221,89	196.912.023,00	214.912.023,00	214.912.023,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Desa BDA		253.195.039,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.03.05	0.05	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														

							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	26.883.240,00	32.883.240,00	73.287.240,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			63.186.039,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	05	04	2.07	2.07.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal															
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16 Laporan	8 Laporan	170.028.783,00	182.028.783,00	210.978.783,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekoonomi dan peningkatan SDM			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	05	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN	Penurunan desa rentan rawan pangan	7,75 %	7,75 %	149.993.150,00	155.393.150,00	155.893.150,00							329.193.000,00	
2	05	04	2.07		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan Pangan	1	1	38.442.700,00	46.842.700,00	46.842.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1 Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Masyarakat Desa dan Kelurahan		98.383.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	05	04	2.07	2.07.02	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan															
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.442.700,00	46.842.700,00	46.842.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekoonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			98.383.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan	2	2	111.550.450,00	111.550.450,00	111.550.450,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi Inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Ibu rumah tangga yg ada di desa rentan pangan dan tercatat di PSKE (Kemiskinan		226.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02	0.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota															
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	111.550.450,00	111.550.450,00	119.050.450,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi Inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			226.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan	88 %	88 %	86.868.025,00	86.868.025,00	130.737.025,00							84.357.117,00	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar	5	5	86.868.025,00	86.868.025,00	86.868.025,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi Inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM	Pedagang sayur dan buah		84.357.117,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.01	0.00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota															

						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.292.200,00	20.292.200,00	41.726.200,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			28.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.02	0.00	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	17 Dokumen	17 Dokumen	59.391.725,00	59.391.725,00	73.376.725,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			37.432.517,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.02	0.00	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	3 Dokumen	7.184.100,00	7.184.100,00	15.634.100,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan	1. Pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga kestabilan ekonomi dan peningkatan SDM			28.024.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					J U M L A H				3.704.511.847,00	4.455.723.657,00	5.936.837.965,00							5.473.861.225,00	

BAB IV
P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, maka setiap bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program kegiatan, baik kerangka regulasi dan pelayanan publik mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 diharapkan dapat mengakomodir program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yang perlu mendapat perhatian khusus pada Rencana Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024 ini adalah :

1. Pemetaan dan Pemutahiran Data Daerah Rentan Rawan Pangan
2. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
3. Terbatasnya petugas yang trampil dan ahli dibidang analisis ketahanan pangan dan pengolah hasil pangan lokal, dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan segar
4. Koordinasi dan sinkronisasi Lumbung Pangan Masyarakat

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Pelaksanaan Survei FSVA dan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan
2. Pengisian Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah
3. Menfasilitasi kegiatan pengolahan hasil pangan lokal dan melaksanakan kegiatan penyuluhan di masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan serta uji sampel pangan segar asal tumbuhan.

4. Pembinaan terhadap Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.

Amuntai, 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Hj. SITI FIKRIYAH, SP, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 200701 2 18

PERUBAHAN RENJA 2024

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya jua, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen Rencana Kerja ini.

Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa yang akan datang, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Hulu Sungai Utara, 30 September 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan
Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara

JONY RAKHMAD, ST,MT, MSc
NIP. 19750608 200504 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Bab. I Pendahuluan 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukim 5

1.3. Maksud Dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

Bab. Ii Pendahuluan 13

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara 18

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian 28

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Skpd Dan Perubahan 35

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 39

Bab. Iii Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 46

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi 46

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian 48

3.3. Program Dan Kegiatan 51

Bab. Iv Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian 53

Bab. V Penutup 55

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adanya peraturan perundang-undangan yang baru maka penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 selain mengacu pada Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 juga menyesuaikan dengan peraturan perundang-undagan tersebut khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Disamping itu, Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara harus terintegrasi dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, substansi Renja Perubahan harus selaras dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Pusat dan Dokumen Perencanaan Tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKIM

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

n. Undang-Undangn Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),

q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara

u. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

x. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;

y. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
z. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
aa. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
bb. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
cc. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
dd. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
ee. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
ff. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
hh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman;
ii. ii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika;
jj. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Startegis Pertahanan Nirmiliter;
kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

nn. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

rr. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

tt. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;

uu. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;

vv. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

ww. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

xx. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;

yy. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

zz. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024;

aaa. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;

bbb. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024;

ccc. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Statistik Nasional;

ddd. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survey Statistik Sektoral;

eee. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

fff. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

ggg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

hhh. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026;

iii. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

jjj. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0428/KUM/2018 tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

kkk. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

lll. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

mmm. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

nnn. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022;

ooo. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).

ppp. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

qqq. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tujuan Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.

rrr. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

sss. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

ttt. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pedoman mengenai arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah :

a. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024.
b. Sebagai tolok ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2024.
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **BAB I Pendahuluan**
  Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

- **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023**
  Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

- **BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara**
  Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Program dan Kegiatan;

- **BAB IV Rencana Kerja & Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara**
  Bab ini berisi Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan, Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan, Penjelasan jika Rumusan Program/Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dan Prakiraan Maju.

- **Bab V Penutup**
  Bab ini berisi Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindaklanjut.

BAB. II
PENDAHULUAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 89,70% yang termasuk dalam kategori predikat tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 7.943.256.001,- atau sebesar 89,70% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 8.855.516.595,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

A. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran Rp. 83.204.375,- realisasinya mencapai Rp. 83.010.000,- atau sebesar 99,77%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rencana anggaran Rp. 2.541.348.250,- realisasinya mencapai Rp. 1.936.777.521,- atau sebesar 76,21%, dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dari rencana anggaran Rp. 145.643.860,- realisasinya mencapai Rp. 143.595.500,- atau sebesar 98,59%, dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran Rp. 54.991.090,- realisasinya mencapai Rp. 48.354.000,- atau sebesar 87,93% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 95%.
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran Rp. 25.999.920,- realisasinya mencapai Rp. 25.958.000,- atau sebesar 99,84% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyediaan Bahan/Material, dari rencana anggaran Rp. 39.332.596,- realisasinya mencapai Rp. 38.579.500,- atau sebesar 98,09% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari rencana anggaran Rp. 502.969.975,- realisasinya mencapai Rp. 497.624.534,- atau sebesar 98,94% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran Rp. 75.095.125,- realisasinya mencapai Rp. 70.970.290,- atau sebesar 94,51%, dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran Rp. 94.272.880,- realisasinya mencapai Rp. 66.807.134,- atau sebesar 70,87%, dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran Rp. 29.850.000,- realisasinya mencapai Rp. 29.628.000,- atau sebesar 99,26%, dengan keluaran/realisasi fisik sebesar 100%.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari rencana anggaran Rp. 33.528.425,- realisasinya mencapai Rp. 30.857.500,- atau sebesar 92,03%, dengan keluaran/realisasi fisik sebesar 100%.

e. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari rencana anggaran Rp. 64.996.800,- realisasinya mencapai Rp. 60.259.680,- atau sebesar 92,71%, dengan keluaran/realisasi fisik sebesar 100%.

2) Program Aplikasi Informatika memiliki 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran Rp. 368.500.000,- realisasinya mencapai Rp. 315.902.700,- atau sebesar 83,73%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 95%;
   b. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, dari rencana anggaran Rp. 73.491.750,- realisasinya mencapai Rp. 56.825.000,- atau sebesar 77,32%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 90%
      - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran Rp. 178.996.250,- realisasinya mencapai Rp. 173.430.000,- atau sebesar 96,89%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, dari rencana anggaran Rp. 116.889.855,- realisasinya mencapai Rp. 105.645.400,- atau sebesar 90,38%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
      - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dari rencana anggaran Rp. 155.748.625,- realisasinya mencapai Rp. 154.939.261,- atau sebesar 99,48%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
      - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran Rp. 18.100.000,- realisasinya mencapai Rp. 14.530.000,- atau sebesar 80,28%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 95%;
3) Program Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Sub Kegiatan :
      - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 14.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 12.237.500,- atau sebesar 87,41%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 90%;
      - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 680.887.000,- realisasinya mencapai Rp. 653.163.297,- atau sebesar 95,93%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 87.500.000,- realisasinya mencapai Rp. 83.087.500,- atau sebesar 94,96%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Pelayanan Informasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 465.033.500,- realisasinya mencapai Rp. 463.915.000,- atau sebesar 99,76%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Layanan Hubungan Media, dari rencana anggaran Rp. 2.476.646.110,- realisasinya mencapai Rp. 2.474.586.000,- atau sebesar 99,92%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 28.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 25.260.000,- atau sebesar 90,21%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dari rencana anggaran Rp. 28.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 8.345.000,- atau sebesar 29,80%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 50%;

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dari rencana anggaran Rp. 160.999.735,- realisasinya mencapai Rp. 120.983.750,- atau sebesar 75,15%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 80%;
      - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, dari rencana anggaran Rp. 45.499.875,- realisasinya mencapai Rp. 31.595.000,- atau sebesar 69,44%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 80%;

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 37.994.875,- realisasinya mencapai Rp. 34.974.000,- atau sebesar 92,05%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
      - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 54.499.875,- realisasinya mencapai Rp. 29.880.000,- atau sebesar 54,83%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 60%;

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dari rencana anggaran Rp. 27.469.850,- realisasinya mencapai Rp. 19.369.200,- atau sebesar 70,51%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 80%;
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 76.026.000,- realisasinya mencapai Rp. 67.522.568,- atau sebesar 88,82%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 90%;

b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota , dengan Sub Kegiatan :

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 70.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 64.646.166,- atau sebesar 92,35%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%.

B. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Tahun 2023

Untuk Tahun anggaran 2023 ada program ataupun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang sudah disusun sebelumnya yakni :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dikarenakan recofusing pada perubahan anggaran tahun 2023
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemeritah Daerah Kab/Kota, dikarenakan recofusing pada perubahan anggaran tahun 2023.

C. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Tahun 2023

Selengkapnya lihat Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian s/d Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada Tabel 2.2. dapat dilihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023
dan Penetapan Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Kelurusan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun N-1)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kelurusan Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program/Kegiatan Kinerja SKPD Tahun Berjalan (Tahun N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/N-1)		Catatan
					Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d Tahun berjalan (thn n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)x100	9	10=(5+7+9):3	11	12
1	**Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**										
1.16	**Komunikasi dan Informatika**										
1.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**88%**	**100%**	**100%**	**82%**	**100%**	**100%**	**83%**	
1.16.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**87%**	**100%**	**100%**	**88,77%**	**100%**	**100%**	**99,77%**	
1.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	87%	100%	100%	99,77%	100%	100%	99,77%	
1.16.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**88%**	**100%**	**100%**	**77%**	**100%**	**100%**	**77%**	
1.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kelengkapan penatausahaan/pembayaran gaji dengan ketepatan anggaran kas	100%	88%	100%	100%	76,21%	100%	100%	76,21%	
1.16.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kelengkapan penatausahaan/pembayaran gaji dengan ketepatan anggaran kas	100%	77%	100%	100%	99,54%	100%	100%	99,54%	
1.16.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**87%**	**100%**	**100%**	**88%**	**100%**	**100%**	**88%**	
1.16.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan	23 item	20 item	23 item	23 item	87,93%	23 item	23 item	87,93%	
1.16.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dibutuhkan untuk cetak dan penggandaan	34 item	24 item	34 item	34 item	99,84%	34 item	34 item	99,84%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Persentase alat tulis kantor yang digunakan	100%	90%	100%	100%	98,88%	100%	100%	98,88%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SKPD yang dilaksanakan	100%	98%	100%	100%	99,54%	100%	100%	99,54%	
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**76%**	**100%**	**100%**	**85%**	**100%**	**100%**	**85%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai prosedurnya	100%	84%	100%	100%	94,51%	100%	100%	94,51%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	60%	100%	100%	78,87%	100%	100%	78,87%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat dimanfaatkan)	100%	97%	100%	100%	99,24%	100%	100%	99,24%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi	100%	94%	100%	100%	92,83	100%	100%	92,83	

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**86%**	**100%**	**100%**	**93%**	**100%**	**100%**	**93%**	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Ijin Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	92,71%	5 buah	5 buah	92,71%	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	**Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik**	**90%**	**88%**	**90%**	**90%**	**88%**	**90%**	**90%**	**88%**	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase skpd yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik**	**90%**	**88%**	**90%**	**90%**	**88%**	**90%**	**90%**	**88%**	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah sosialisasi	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	87,41%	3 kali	3 kali	87,41%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pengaduan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita/tayangan khusus	1.500 kali/berita	–	1.500 kali/berita	1.500 kali/berita	93,93%	1.500 kali/berita	1.500 kali/berita	88,93%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media center yang dikelola	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	94,06%	2 buah	2 buah	94,06%	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah liputan dinas/berita	5.500 kali/berita	5000 kali/berita	5.500 kali/berita	5.500 kali/berita	99,79%	5.500 kali/berita	5.500 kali/berita	99,79%	
	Sub Kegiatan Layanan Halaman Media	Jumlah media yang beklanganan	23 media/kali	23 media/kali	23 media/kali	23 media/kali	99,32%	24 media/kali	24 media/kali	99,32%	
	Sub Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah tenaga pelatihan/sertifikasi	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	98,21%	3 kali	3 kali	98,21%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Hubungan Masyarakat, Media dan Kreativitas Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (kim) yang dibina	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	29,00%	10 buah	10 buah	29,00%	
	Program Aplikasi Informatika	**Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)**	**88%**	**85%**	**88%**	**88%**	**99%**	**88%**	**88%**	**88%**	
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)**	**68%**	**90%**	**68%**	**68%**	**83,73%**	**68%**	**68%**	**83,73%**	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah layanan (sesuai lisk hasil opd) terpenuhi	60%	90%	60%	60%	83,73%	60%	60%	83,73%	
	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Layanan Internet Pemerintah Daerah**	**88%**	**84%**	**88%**	**88%**	**99%**	**88%**	**88%**	**85%**	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah server yang dikelola	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	77,32%	1 buah	1 buah	77,32%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang terhubung internet	80%	–	80%	80%	96,83%	80%	80%	96,83%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jenis aplikasi pemerintah berbasis elektronik	5 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	98,38%	5 aplikasi	5 aplikasi	98,38%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase skpd yang mengelola website resmi	85%	86%	85%	85%	99,48%	85%	85%	99,48%	
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga pelatihan/sertifikasi	36 kali	36 kali	36 kali	36 kali	98,28%	36 kali	36 kali	98,28%	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral**	**90%**	**95%**	**90%**	**90%**	**74%**	**90%**	**90%**	**74%**	

	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kota	**Persentase pemutakhiran data statistik sektoral**	**90%**	**85%**	**88%**	**90%**	**74%**	**88%**	**90%**	**74%**	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyampaian, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku yang diterbitkan jumlah dokumen	4 buku dokumen	4 buku dokumen	4 buku dokumen	4 buku dokumen	74,13%	4 buku dokumen	4 buku dokumen	74,13%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pertemuan	2 kali	-	2 kali	2 kali	95,44%	2 kali	2 kali	95,44%	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	**Persentase penisyikatan skpd yang menerapkan keamanan informasi**	**83%**	**74%**	**88%**	**88%**	**81%**	**88%**	**88%**	**81%**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah**	**88%**	**73%**	**88%**	**88%**	**77%**	**88%**	**88%**	**77%**	
	Sub Kegiatan Penyusun Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Sinkronisasi Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah rancangan kebijakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	92,06%	2 dokumen	2 dokumen	92,06%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah data sumber daya keamanan informasi	5 data	5 data	5 data	5 data	94,83%	5 data	5 data	94,83%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kegiatan pengamanan informasi	50 kali	-	50 kali	50 kali	76,51%	50 kali	50 kali	70,51%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kegiatan layanan keamanan informasi	9 layanan	9 layanan	9 layanan	9 layanan	93,82%	9 layanan	9 layanan	88,82%	
	Kegiatan Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota	**Persentase perbandingan jumlah entitas terasosiasi dengan jumlah entitas PHKS**	**60%**	**76%**	**88%**	**88%**	**92%**	**88%**	**88%**	**92%**	
	Sub Kegiatan Optimalisasi Satuan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah entitas yang komunikasi sandi	45 entitas	40 entitas	45 entitas	45 entitas	92,53%	45 entitas	45 entitas	92,53%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, ada beberapa item yang dijadikan indikator capaian kinerja yaitu :

1. Media Massa Cetak Nasional/Lokal yang ada di daerah



Pelayanan dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media cetak seperti surat kabar, tabloid dan majalah nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terkait pelayanan langsung ke masyarakat berupa penyebarluasan informasi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kemitraan berupa kerjasama publikasi/pemberitaan maupun liputan khusus dengan beberapa media cetak/elektronik yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hingga tahun 2023 media cetak nasional/lokal yang masuk dan beredar di Hulu Sungai Utara ada 12 judul, seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Data media cetak nasional/ lokal yang beredar di Hulu Sungai Utara

No	Nama Media Cetak	Status	Alamat Redaksi
1	Kompas	Nasional	Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
2	Majalah Fakta	Nasional	Jl. Asem IV/12 Surabaya
3	Banjarmasin Post	Lokal	Jl. AS Musyaffa No. 16 Banjarmasin
4	Radar Banjarmasin	Lokal	Jl. A. Yani KM 26,900 Landasan Ulin Banjarbaru
5	Kalimantan Post	Lokal	Jl. Dl Panjaitan No. 67 Banjarmasin
6	Barito Post	Lokal	Jl. Simpang Telawang No. 11 Banjarmasin
7	Kalsel Post	Lokal	Handil Bakti No. 01 A Batola
8	Aktual	Lokal	Jl. Kuin Utara No. 32 RT.16 Banjarmasin
9	Fokus Banua	Lokal	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Gg. Mufakat RT 01/08 Banjarmasin
10	Mata Banua	Lokal	Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 27 Banjarmasin
11	Demokrasi Plus	Lokal	Jl. H. Ali Gg. Rawa Indah RT. 5 Kelurahan Antasari Amuntai

12	Derap Kalimantan	Lokal	Jl. Mesjid Jami' No. 09 / 70 Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin

2. Media Luar Ruang

Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang adalah berupa baliho, backdrop dan spanduk. Media luar ruang ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik berupa informasi kegiatan pemerintah daerah, ucapan selamat maupun himbauan kepada masyarakat.

3. Media Interpersonal



Pelayanan informasi ke masyarakat melalui media interpersonal adalah berupa kegiatan pembinaan dan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta kegiatan pembinaan internet sehat.

4. Media Tradisional tugas pokok dan fungsi

Di Hulu Sungai Utara terdapat beberapa kelompok / grup media tradisional yang bisa dilibatkan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Media tradisional yang ada di Hulu Sungai Utara terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Media Tradisional yang ada di Hulu Sungai Utara

No	Nama Kelompok/ Pemimpin	Jenis Media Tradisional	Alamat
1	Assalam	Sinoman Hadrah	Desa Sungai Limas Kec. Haur Gading
2	Arsyadiah	Rebana	Desa Sungai Karias Kec. Banjang
3	Tiga Beranak	Orkes	Desa Pelanjungan Sari Kec. Banjang
4	Budi Rahmad	Musik Panting	Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah
5	Sri Nada Al Qaramah (Aam)	Qasidah/ Madihin	Desa Pararain Kec. Danau Panggang
6	Teratai	Kelompok Pencak Silat	Desa Pelanjungan Sari Kec. Banjang
7	Batara	Kelompok Pencak Silat	Desa Banyu Tajun Dalam Kec. Sungai Pandan

8	Rajawali	Kelompok Pencak Silat	Desa Pangkalan Sari Kec. Sungai Pandan
9	Harimau Hitam	Kelompok Pencak Silat	Desa Kandang Halang Kec. Amuntai Tengah
10	Bina Remaja	Kelompok Pencak Silat	Desa Teluk Baru Kec. Amuntai Selatan
11	Naga Mas	Kelompok Pencak Silat	Desa Kaludan Kecil Kec. Banjang

5. Siaran Televisi Pemerintah Daerah



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengelola media penyiaran melalui televisi yaitu Kominfo TV. Kominfo TV bertahap akan diarahkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu Amuntai TV yang saat masih dalam proses pengajuan ijin penyiaran.

6. Media Center



Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi melalui internet Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyediakan ruang Media Center. Jumlah personal komputer (PC) yang disediakan sebanyak 6 (enam) unit dengan waktu pelayanan selama hari kerja mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita. Pelayanan diutamakan bagi pelajar dan mahasiswa.

7. Cakupan layanan telekomunikasi

Salah satu layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah layanan telekomunikasi. Keberadaan sarana telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, perdagangan dan pendidikan. Penyediaan jaringan telekomunikasi dan data/internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil segera dapat dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, sekaligus mempercepat pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah.

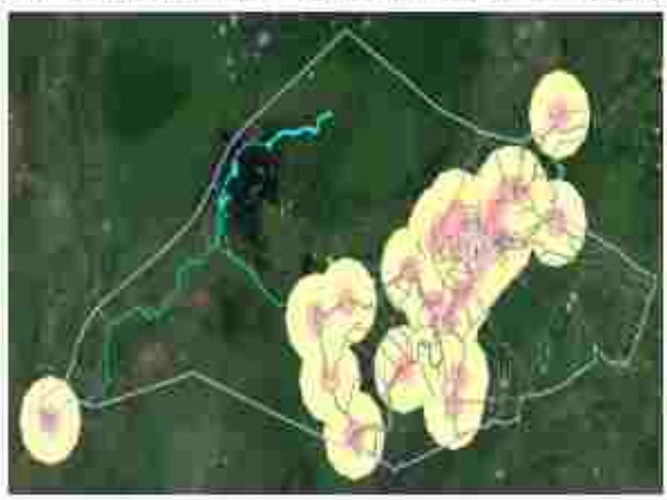
Dilihat dari luas wilayah, cakupan layanan telekomunikasi di Hulu Sungai Utara baru mencapai 68% pada tahun 2022. Di Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2022 baru terdapat 67 buah menara telekomunikasi yang tersebar di 10 kecamatan. Sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara dapat dilihat

pada Tabel 2.5. Sedangkan cakupan layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Tabel 2.5. Data sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Menara
1	Amuntai Tengah	21
2	Banjang	4
3	Danau Panggang	4
4	Haur Gading	4
5	Amuntai Utara	8
6	Sungai Pandan	9
7	Amuntai Selatan	8
8	Babirik	5
9	Sungai Tabukan	2
10	Paminggir	2
Total		**67**

Gambar 2.1. Cakupan layanan telekomunikasi di Hulu Sungai Utara



Di Hulu Sungai Utara terdapat 8 (delapan) perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan/ penyewaan menara telekomunikasi (tower provider). Menara tersebut umumnya diperuntukkan penempatan BTS milik perusahaan itu sendiri maupun disewakan kepada operator telekomunikasi (telco operator) lain. Di Hulu Sungai Utara terdapat 4 (empat) operator telekomunikasi yaitu Telkomsel, Indosat, XL, H3i. Data pemilik menara dan operator telekomunikasi di Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel 2.5.

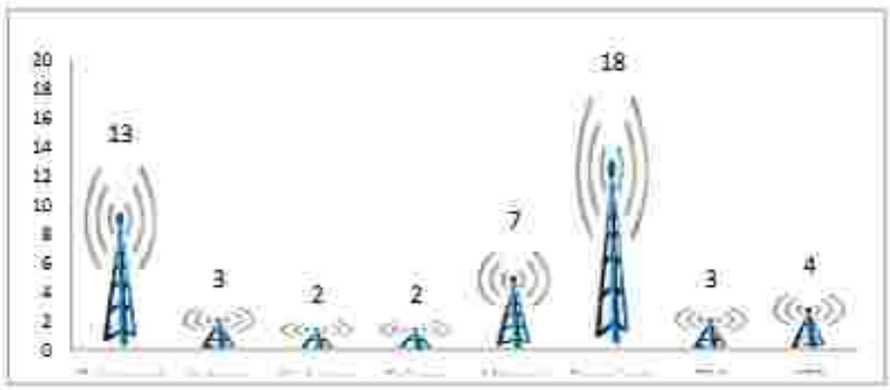
Tabel 2.6. Data pemilik menara dan operator telekomunikasi yang beroperasi di Hulu Sungai Utara

No	Pemilik Menara	Jumlah Menara (Buah)	Operator Telekomunikasi
1	PT. Telkomsel Tbk	17	Telkomsel, XL
2	PT. Indosat Tbk	1	Telkomsel, Indosat, XL, H3i
3	PT. CMI	5	
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel)	6	Telkomsel, Indosat, XL
5	PT. Sarana Menara Nusantara / Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)	27	Telkomsel, Indosat, XL, H3i
6	Tower Bersama Group (TBG)	6	Telkomsel, Indosat
7	PT. Solusi Tunas Pratama (STP)	5	XL
	TOTAL	67	

Gambar 2.2. Grafik sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara



Gambar 2.3. Data kepemilikan menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara



8. Persentase penduduk yang mengakses internet

Menurut data Kabupaten BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023, sebanyak 82,35% penduduk HSU berusia 5 tahun keatas menguasai telepon seluler (HP) dan 60,94% penduduk HSU berusia 5 tahun keatas mengakses internet.

Akses masyarakat terhadap internet makin meningkat setiap tahunnya. Kebanyakan masyarakat mengakses internet melalui telepon seluler yaitu sebesar 53%. Hal ini dipengaruhi oleh semakin maraknya smartphone yang memungkinkan mengakses internet dengan lebih mudah dan murah. Akses internet lainnya adalah melalui laptop/notebook/tablet sebanyak 30%, personal komputer 14% dan lainnya 3%.

9. Website Pemerintah Daerah



Berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan untuk urusan Komunikasi dan Informatika bahwa di setiap daerah harus memiliki website pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun kegiatan pembangunan. Alamat website Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah https://web.hsu.go.id/.

10. Pengelolaan Sub Domain

Sebagai pelaksana urusan komunikasi dan informatika di daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengelola sub - sub domain dari hsu.go.id yaitu website SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan beberapa instansi lainnya.

11. WiFi gratis (Free Hotspot)

Untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyediakan akses WiFi gratis (free hotspot) pada beberapa ruang terbuka publik di sekitar Kota Amuntai. Untuk sementara WiFi gratis dapat diakses pada lokasi Taman Junjung Buih, Siring Patung Itik dan ruang terbuka sekitar Lapangan Pahlawan pada hari Sabtu dan Minggu.

12. CCTV Online



Terkait pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang disediakan juga CCTV yang bisa diakses secara online sebanyak 10 buah yang terpasang pada lokasi-lokasi strategis di sekitar Kota Amuntai. Untuk sementara sebagian besar titik lokasi CCTV online hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu terutama aparat keamanan dan pejabat pemerintah daerah terkait.

13. Media Sosial Pemerintah Daerah

Untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara beberapa akun media sosial yaitu :

a. Facebook

Fans Page Facebook resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikunjungi pada https://www.facebook.com/pemkabhulusungaiutara/

b. Instagram

Akun instagram resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan alamat https:// www.instagram.com/pemkabhsu/

c. Twitter

Akun twitter resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah @PemkabHsu. Akun twitter ini sudah terverifikasi (verified).

d. Youtube

Channel Youtube resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diakses pada alamat PEMKAB HULU SUNGAI UTARA atau https://www.youtube.com/channel/ UCU9dZQ6GZFxFu7_qe17YssQ.

14. Sistem Informasi Pintar Hulu Sungai Utara (Sintar HSU)



Untuk memudahkan mendapatkan informasi tentang Hulu Sungai Utara secara lebih praktis, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara meluncurkan aplikasi Smartphone Sistem Informasi Pintar Hulu Sungai Utara (Sintar HSU). Aplikasi ini dibangun sepenuhnya oleh putera daerah yang bekerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sintar HSU berisi konten HSU Dalam Angka, Direktori HSU, HSU Terkini, Info HSU, Call Center dan shorcut media-media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Aplikasi ini dapat didownload di Google Playstore atau melalui shortlink http://bit.ly/sintarHSU.

15. Rekomendasi teknis terhadap perijinan di bidang telekomunikasi dan informatika

Sebagai SKPD teknis, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan strategis dalam pelayanan langsung ke masyarakat terkait pemberian rekomendasi terhadap pemberian ijin di bidang komunikasi dan informatika. Pemberian ijin merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi, sementara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memberikan rekomendasi terhadap permohonan Ijin Mendirikan Menara Telekomunikasi. Kegiatan survey lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi ijin pembangunan menara telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Survey lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi ijin pembangunan menara telekomunikasi



16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Akan tetapi pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum bisa dilaksanakan karena belum tersedianya data kepemilikan menara yang valid dan adanya gugatan perusahaan pemilik menara terkait besaran retribusi pengendalian menara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk itu dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011. Dengan adanya regulasi tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Utara sudah berhasil memungut retribusi pengendalian menara dari pemilik menara telekomunikasi (tower provider) yang beroperasi di Hulu Sungai Utara. Kegiatan monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi



17. Pengelolaan data statistik sektoral



Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memegang urusan pemerintah daerah di bidang statistik. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan kerjasama pengelolaan data dengan Badan Pusat Statitstik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama dalam penerbitan beberapa publikasi daerah. Beberapa publikasi yang sudah diterbitkan antara lain Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2020, Indikator Makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020, Tinjauan Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2020, dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

18. Pengamanan informasi melalui persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian juga mendapat mandat sebagai pemegang urusan pemerintah daerah di bidang persandian. Selama kurun waktu berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara belum banyak kewenangan di bidang persandian yang bisa dilaksanakan mengingat keterbatasan personil, sarana prasarana persandian dan anggaran. Selama ini pelaksanaan tugas masih berkisar pada pengelolaan informasi yang bersifat rahasia secara terbatas. Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara baru memiliki satu orang staf yang sudah mendapat pelatihan dasar Sandiman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya urusan pemerintahan daerah bidang persandian, sebagai pelaksana kewenangan urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat surat dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 046/217/Bangda tertanggal 17 Januari 2019 dengan perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian yang isinya menegaskan tentang tugas dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang persandian yang meliputi :

a. Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b. Melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian di lingkungan pemerintah daerah;
c. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah
d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah
e. Membangun pola hubungan persandian antar organisasi pernagkat daerah kabupaten/kota.

Dan Fungsi Dinas yang menyelenggarakan ururan persandian yang meliputi :

a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
e. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
g. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
h. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;

Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode 2017-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi Komunikasi, Informatika & Persandian	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentasi SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%
3	Persentase peningkatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (E-Government)	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%
4	Persentase peningkatan pengelolaan statistik sektoral	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%
5	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dan yang sedang berjalan, dapat dikatakan bahwa sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian telah berlangsung cukup baik. Akan tetapi sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintah daerah di berbagai wilayah, ada beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pelaksanaan urusan khususnya pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

a. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
b. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
c. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.
d. Pengelolaan Televisi masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada terhambatnya pencapaian misi utama pemerintah daerah di bidang TIK yaitu : Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat serta meningkatnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*media center*), pengembangan pengelolaan televisi, serta keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi melalui penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (e-government) adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya Implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat mewajibkan diterapkan Open Source Software (OSS) diseluruh jajaran instansi pemerintah. Penerapan penggunaan OSS dapat menurunkan biaya pembelian perangkat lunak (khususnya penggunaan sistem operasi desktop dan jaringan) sehingga dapat menghemat anggaran pada setiap SKPD dalam pengadaan perangkat lunak. Untuk itu diperlukan sosialisasi mengenai penggunaan software ini kepada SKPD di Hulu Sungai Utara.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana

dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal-hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan TIK di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan TIK Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Professional Berbasis Teknologi Informasi Modern.

Isu krusial lainnya dewasa ini adalah penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi non-profit melainkan juga digunakan sebagai sarana transaksi perdagangan atau yang lebih dikenal dengan *e-Commerce / e- Business*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. Hal ini merupakan peluang bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memanfaatkan internet bagi kepentingan ekonomi daerah yaitu dengan cara membangun situs *E-Commerce/E- Business* yang menampilkan berbagai produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau komoditi unggulan di Hulu sungai Utara sekaligus sebagai sarana promosi produk UMKM.

Menurut data *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)* tahun 2023, jumlah pengguna Internet di Indonesia januari tahun 2023 telah mencapai 221,5 juta jiwa, terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan, 73,7% di 2020, 77,01% di 2022, dan 78,19% di 2023. Penggunaan layanan belanja lewat Internet *(online shopping)* di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi penjualan lewat internet dan jumlah pengakses online shopping di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat. Oleh sebab itu kedepan kegiatan pembangunan TIK akan mulai diarahkan pada Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan perekonomian (profit) dan kesejahteraan rakyat. Salah satunya dengan membangun Media promosi produk / komoditas daerah di internet sekaligus membantu meningkatkan perekonomian UMKM daerah sebagai basis perekonomian rakyat.

Permasalahan yang menjadi kendala dan isu yang mendasari penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian diantaranya :

a. Kelembagaan pelaksanaan urusan persandian yang belum memadai

   Kelembagaan yang menangani urusan persandian tidak sesuai dengan hasil pemetaan urusan persandian, hal ini disebabkan level kelembagaan pelaksana urusan persandian memiliki kecendrungan turun grade yang pada Pemerintah Daerah telah berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian.

   Tranformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan terhadap informasi RAHASIA, menjadi kegiatan untuk mengamankan infromasi secara keseluruhan, bukan hanya informasi rahasia tetapi seluruh informasi publik melalui pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi, terlebih munculnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki tanggungjawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE, begitu pula dengan pembentukan ekosistem kabupaten pintar (smart regency) harus didukung dengan keamanan yang baik.

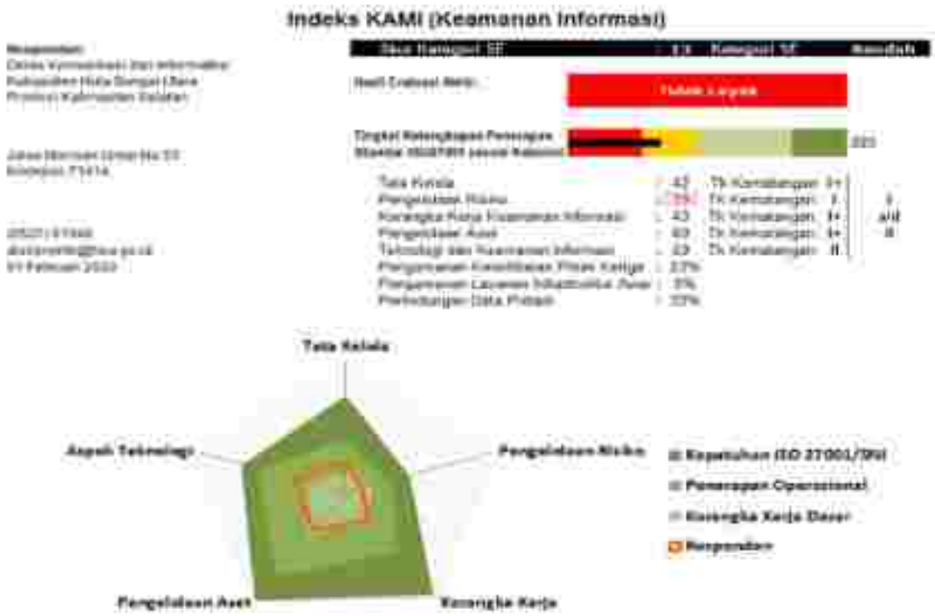
b. Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah

Hal ini disebabkan belum masuknya isu dan permasalahan strategis tentang urusan persandian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga menyebabkan belum tersedianya dokumen perencanaan di bidang keamanan informasi termasuk belum adanya peraturan perundang-undangan di lingkup Pemerintah Daerah sebagai bentuk kebijakan mikro tata kelola, manajemen, dan operasional penerapan keamanan informasi yang berisi regulasi, standar teknis dan pedoman. Selain itu koordinasi, komunikasi dan kolaborasi penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah juga belum efektif.

Pengamanan informasi harus mampu untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan teknologi terkini dan masa mendatang diantaranya Mobil Internet, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, dan Artificial Intelligence (AI) sehingga pengguna dengan dengan aman, efeketif dan efisien mengakses layanan SPBE dengan harapan dapat memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan dan transaksi keuangan.

c. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang

Dari hasil penilaian Indeks Keamanan Informasi dari tahun 2020, Pengelolaan Risiko di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan risiko keamanan informasi sebagaimana terlampir pada gambar berikut :



Sementara itu berdasarkan laporan *Indonesia Cyber Security Monitoring Report 2019* yang dilaporkan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, pada tahun 2019 sistem monitoring mata garuda mendeteksi adanya sekitar 290,3 juta serangan (intrusi) siber ke jaringan internet Indonesia. Terbesar adalah serangan percobaan pembocoran data, diikuti dengan serangan menggunakan metoda malware. Dibanding besarnya jumlah serangan siber, jumlah aduan publik terkait insiden yang dialaminya relatif masih sangat kecil.

Berbeda dengan tahun tahun lalu, sistem monitoring mata garuda mendeteksi serangan terbesar pada tahun ini adalah serangan percobaan pembocoran data (attempted information leak). Serangan ini tidak langsung membuktikan bahwa pengumpulan data informasi berhasil dilakukan sehingga terjadi kebocoran data, akan tetapi merupakan sinyal dan indikasi bahwa percobaan kearah sana sudah dilakukan yang jika kondisinya ternyata sesuai dengan harapan hacker, memungkinkan terjadinya ekskalasi ke arah pengambil alihan sistem dan kebocoran data penting.

Serangan malware merupakan serangan kedua terbesar tahun ini, akan tetapi meskipun yang kedua dalam sembilan bulan dari dua belas bulan tahun ini, serangan malware selalu merupakan metoda serangan yang paling sering digunakan dan berada pada peringkat pertama.



Hal ini tentu sanggat merugikan karena berdampak pada menurunnya reputasi instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta terganggunya pelayanan publik yang berbasis *e-government* kepada masyarakat karena sebanyak 52% dari 3.523 aduan publik insiden siber berasal dari sektor pemerintah.

d. Masih belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi

Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah dan pelaksana pengamanan informasi di Pemerintah Daerah diisi oleh personil yang kurang memiliki latar belakang dan/atau kemampuan TIK yang memadai, para personil sandi berkualifikasi ahli sandi yang menangani pengamanan informasi masih banyak yang belum memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mendukung pengamanan penyelenggaraan SPBE, dan pada umumnya belum tersertifikasi sesuai dengan standar. Terlebih belum adanya Fungsional sandiman dan Manggala Informatika sebagai jabatan fungional khusus yang menangani keamanan siber dan sandi di Pemerintah Daerah.

Permasalahan ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengamanan informasi, karena ketersedian aparatur daerah yang memiliki latar belakang dan/atau kemampuan TIK sangat diperlukan disertai peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dalam mendukung pengamanan penyelenggaran SPBE.

e. Kurangnya kesadaran informasi ASN Pemerintah Daerah

Budaya kesadaran keamanan informasi masih beragam dan relatif rendah di kalangan instasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya berkaitan dengan strategi dan taktik dalam melaksanakan literasi keamanan informasi yang belum efektif dan terukur. Budaya literasi keamanan informasi perlu dilakukan untuk membangun sikap, pengetahuan, dan perilaku aparatur pemerintah. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia.

Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal ini yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan Internet of Things disekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi di dunia maya sehingga Perlindungan Data Pribadi juga dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.

f. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi

Dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi terdapat standar atas sarana dan prasarana yang wajib atau harus dimiliki oleh pemerintah daerah terlebih metode, tools, dan teknik terkait keamanan informasi.

Saat ini dan kemungkinan mendatang pola menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal dengan menggunakan kekuatan militer, tetapi dengan kekuatan non militer yang dilakukan dengan cara non linier, tidak langsung dan bersifat proxy war. Tren untuk menguasai suatu negara dengan menggunakan cara-cara berpikir yang tidak lazim karena sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi. Itulah sebabnya jenis ancaman perang saat ini memiliki spektrum yang sangat luas dan secara masif melalui berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ancaman non militer merupakan bagian dari ancaman nyata yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat dan merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya.

Ancaman non militer berdimensi teknologi diantaranya kejahatan siber yang meliputi pembobolan situs, pencurian data, penyebaran virus/program jahat, kejahatan perbankan, penyadapan ilegal, pembajakan hak cipta, penyalahgunaan teknologi melalui berbagai media online untuk tujuan propaganda, intimidasi, penyebaran opini menyesatkan (HOAX) yang mendorong gerakan sosial bermotif politik atau motif lain yang mengancam kedaulatan negara.

Ancaman juga dapat dilakukan oleh hacker untuk membuat tidak berfungsinya peralatan atau fasilitas sistem tertentu atau terhentinya fasilitas seluruh sistem atau dikendalikan dari jarak jauh sehingga dapat dikendalikan sesusi kepentingannya.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Startegis Pertahanan Nirmiliter disebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu lini depan dalam postur pertahanan nirmiliter. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengamanan terhadap seluruh sistem informasi atau sistem elektronik pemerintah daerah.

Adapun Permasalahan Umum, isu strategis dan arah kebijakan terkait urusan Bidang Statistik antara lain :

a. Permasalahan umum terkait bidang statistik, diantaranya :
   - Belum adanaya SDM yang kompeten menangani Urusan Pemerintah Bidang Statistik
   - Masih belum optimalnya peran walidata dan forum masyarakat statistik daerah
   - Masih kurangnya infrastruktur untuk urusan pemerintah bidang statistik
   - Masih kurangnya produk kompilasi data sektoral daerah
   - Belum optimalnya metadata statistik sektoral
   - Kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan statistik sektoral daerah

b. Dan beberapa isu strategis terkait bidang statistik ialah :
   - Perpres satu data indonesia (pasal 3), data yang dihasilkan produsen data harus :
     a. Memenuhi standar data
     b. Memiliki metadata
     c. Menggunakan kode referensi dan/atau data induk
     d. Memenuhi kaidah interoperbilitas data
   - Salah satu tujuan SDI (satu data indonesia) adalah mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan
   - Hadirnya PMDN no. 90 tahun 2019 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

c. Lalu terkait arah kebijakan urusan bidang statistik, melakukan mapping program, kegiatan dan subkegiatan urusan pemerintahan bidang statistik :
   - Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, kegiatan penyusunan dan pengumpulan data tinjauan perekonomian, serta kegiatan penyusunan analisis kewilayahan kab. hsu dimasukkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral
   - Kegiatan sosialisai, penyusunan dan pengumpulan data statistik dimasukkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota dengan subbidang peningkatan kapasitas sdm pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
   - Menambahkan kegiatan penyelengaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota dengan subbidang :
     a. Membangun metadata statistik sektoral untuk penyediaan data sektoral pembangunan daerah
     b. Peningkatan kapasitas kelembangaan statistik sektoral untuk mewadahi forum masyarakat statistik daerah
     c. Pengembangan infrastuktur untuk mencukupi kebutuhan infrastruktur bidang statistik
     d. Penyelenggaran otorisasi statistik sektoral di daerah untuk wadah operasional wali data

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD DAN PERUBAHAN

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun Anggaran 2024 diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   i) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   ii) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   i) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   ii) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   iii) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
   iv) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   ii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   iii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   iv) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e) Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Rp. 3.647.187.785,-

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2024 berbeda dengan Rancangan Awal yakni menjadi Rp. 5.177.650.864,-

Hasil Perubahan :

Hasil RKPD Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungau Utara Tahun 2024 menjadi Rp. 5.605.651.264,-

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
   i) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi & Komunikasi Publik
   ii) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik
   iii) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
   iv) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
   v) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
   vi) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

vii) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media & Kemitraan Komunitas

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Informasi dan Komunikasi Publik : Rp. 2.791.139.700,-

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 adalah berkurang dengan rancangan awal yakni dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.645.925.050,-

Hasil Perubahan :

Hasil RKPD Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungau Utara Tahun 2024 menjadi Rp. 2.885.924.850,-

3) Program Aplikasi Informatika
   a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
   b) Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
      ii) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
      iii) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
      iv) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Aplikasi Informatika Rp. 2.548.491.700,-

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2024 adalah tidak sama dengan rancangan awal dikarenakan adanya penambahan anggaran, sehingga merubahnya dengan menjadi total kebutuhan anggaran Rp. 2.590.491.700,-

Hasil Perubahan :

Hasil RKPD Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungau Utara Tahun 2024 menjadi Rp. 2.524.491.700,-

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
      ii) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral : Rp. 64.249.600,-

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2024 adalah sama dengan rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 64.249.600,-

Hasil Perubahan :

Hasil RKPD Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungau Utara Tahun 2024 menjadi Rp. 14.249.600,-

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      ii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      iii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      iv) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi : Rp. 106.412.600,-

   Hasil Review :

   Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2024 pada Program Penyelenggaraan Persandian adalah sama dengan rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 106.412.600,-

   Hasil Perubahan :

   Hasil RKPD Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungau Utara Tahun 2024 menjadi Rp. 166.051.400,-

Selengkapnya lihat Tabel 2.8. Review terhadap Rancangan Awal dan Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dan Tabel 2.9 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, kunjungan kerja anggota legislatif/reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

Aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan ini nantinya dialokasikan dalam rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.10. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.5
Pakaian terhadap Rancangan Awal RKPD dan RKPOP Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Hulu Sungai Utara

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Kelompok Sasaran
									RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			9.137.481.989,00	10.984.729.814,00	11.196.988.814,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.137.481.989,00	10.984.729.814,00	11.196.988.814,00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.968.819.168,00	10.414.067.814,00	11.016.067.814,00			
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100 %	3.947.087.789,00	5.277.690.884,00	5.809.691.264,00			
	2	16	01	2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100 %	30.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Karyawan/ti di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2 01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	63.000.000,00	26.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	2	16	01	2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	3.202.547.000,00	4.685.010.079,00	4.885.010.079,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Karyawan/ti di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2 03	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3.134.375.000,00	3.914.499.079,00	3.918.918.483,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	2	16	01	2 03	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	78.372.000,00	770.571.000,00	1.069.227.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	2	16	01	2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	127.451.950,00	127.451.950,00	127.451.950,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Karyawan/ti di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	$4.977.000,00	$4.977.000,00	280.427.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	29.999.900,00	29.999.900,00	29.999.900,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		
	2	16	01	2.08	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	20.279.050,00	20.279.050,00	29.507.550,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		
	2	16	01	2.08	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	42.300.000,00	42.300.000,00	100.786.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif		
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	222.191.895,00	242.191.895,00	242.191.895,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		Karyawan/ti di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	64.990.000,00	62.990.000,00	64.990.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	89.999.091,00	89.999.091,00	89.000.991,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	88.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		

	2	16	01	2 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	27.300.800,00	99.202.800,00	49.900.800,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	2	16	01	2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	34.997.000,00	60.997.000,00	80.997.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kenyawati/bi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2 09	0003	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	34.997.000,00	60.997.000,00	80.497.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	2	16	01	2 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	240.000.000,00	-	-	
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Ketarbukaan Informasi Publik	90 %	2.791.139.700,00	2.845.923.050,00	2.885.924.850,00			
	2	16	02	2 01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase skpd yang sudah melaksanakan ketarbukaan informasi publik	90 %	2.791.139.700,00	2.845.923.050,00	2.845.923.050,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Utara
	2	16	02	2 01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 Dokumen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
	2	16	02	2 01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	307.107.900,00	184.729.050,00	374.728.850,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	
	2	16	02	2 01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9 Dokumen	87.340.000,00	91.340.000,00	91.340.000,00	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	9 Dokumen	347.119.400,00	431.119.400,00	931.119.400,00	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media								
							Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	2.011.489.000,00	1.760.646.900,00	1.860.646.900,00	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik								
							Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	23 Orang	49.790.000,00	49.790.000,00	49.790.000,00	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas								
							Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	9 Dokumen	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	90 %	2.548.491.700,00	2.590.491.700,00	2.924.491.700,00			
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	90 %	2.332.409.900,00	2.332.409.900,00	2.332.409.900,00	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Pemkab HSU
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								

							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	29 Unit	2.332.409.900,00	2.332.409.900,00	2.286.409.900,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	
	2	16	03	2.03		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan internet pemerintah daerah	90 %	198.082.200,00	198.082.200,00	198.082.200,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan konektivitas	Pemkab HSU
	2	16	03	2.03	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah								
							Jumlah Dokuman Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	5 Dokuman	79.390.000,00	84.390.000,00	84.390.000,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan konektivitas	
	2	16	03	2.03	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik								
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	29 Unit	119.692.200,00	149.692.200,00	149.692.200,00	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana kesehatan dan konektivitas	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			64.249.600,00	64.249.600,00	14.249.600,00			
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	90 %	64.249.600,00	64.249.600,00	14.249.600,00			
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan statistik sektoral	90 %	64.249.600,00	64.249.600,00	64.249.600,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Pemkab HSU
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi								
							Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	29 Orang	14.249.600,00	14.249.600,00	14.249.600,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			106.413.600,00	106.413.600,00	186.092.400,00			

9	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90 %	106.413.600,00	106.413.600,00	106.091.400,00			
	2	21	02	2 01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	90 %	73.818.000,00	73.818.000,00	73.818.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pemkab HSU
	2	21	02	2 01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Dokumen	19.371.200,00	19.371.200,00	19.371.200,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
	2	21	02	2 01	0002	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengalokasian Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Analisis kebutuhan dan Pengalokasian Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	17.022.400,00	17.022.400,00	17.022.400,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
	2	21	02	2 01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan	18.655.600,00	18.655.600,00	78.294.400,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	2	21	02	2 01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	23 Perangkat Daerah	24.769.800,00	24.769.800,00	24.769.800,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
	2	21	02	2 02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perbandingan jumlah entitas teramankan dengan jumlah entitas ptsi	90 %	32.569.800,00	32.569.800,00	32.569.800,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	Pemkab HSU
	2	21	02	2 02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	32.569.800,00	32.569.800,00	32.569.800,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan & pelayanan publik yang inovatif	
								JUMLAH	9.157.401.385,00	10.584.723.834,00	11.196.368.814,00			

Tabel 2.9.
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Kebutuhan Dana Perubahan	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	62.000.000,-	APBD	26.000.000,-	APBDP
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.914.439.079,-	APBD	3.518.318.483,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	770.571.000,-	APBD	1.063.227.000,-	APBDP
c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	34.977.000,-	APBD	260.427.000,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan	Paket	29.999.900,-	APBD	29.999.900,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	20.275.050,-	APBD	25.507.550,-	APBDP

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42.200.000,-	APBD	100.790.000,-	APBDP
d	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	82.990.000,-	APBD	84.990.000,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	89.999.035,-	APBD	85.000.531,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	30.000.000,-	APBD	35.000.000,-	APBDP
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39.202.800,-	APBD	45.903.800,-	APBDP
e	Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60.997.000,-	APBD	330.487.000,-	APBDP
II	Program Aplikasi Informatika							
a	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat & Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2.352.409.500,-	APBD	2.286.409.500,-	APBDP
b	Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							

	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	-	APBD	XXXXX,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	94.390.000,-	APBD	94.390.000,-	APBDP
	Sub Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Data & Informasi Elektronik	Kab. HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	-	APBD	XXXXX,-	APBDP
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi & Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. HSU	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	143.692.200,-	APBD	143.692.200,-	APBDP
	Sub Kegiatan Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi & Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	-	APBD	XXXXX,-	APBDP
III	Program Informasi & Komunikasi Publik							
a	Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara							
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi & Komunikasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	2.600.000,-	APBD	2.600.000,-	APBDP
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	284.729.050,-	APBD	374.728.850,-	APBDP

	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	91.340.000,-	APBD	91.340.000,-	APBDP
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	431.119.400,-	APBD	501.119.400,-	APBDP
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kab. HSU	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	1.780.646.600,-	APBD	1.860.646.600,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	49.790.000,-	APBD	49.790.000,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media & Kemitraan Komunitas	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	5.700.000,-	APBD	5.700.000,-	APBDP
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
a	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	50.000.000,-	APBD	0,-	APBDP
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. HSU	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	14.249.600,-	APBD	14.249.600,-	APBDP
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							
a	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola	Kab. HSU	Jumlah Kebijakan dan Petunjuk Teknis	2 dokumen	13.371.200,-	APBD	13.371.200,-	APBDP

	Keamanan Informasi & Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Pengamanan Informasi					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan & Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Personel Persandian Yang Mengikuti Diklat dan Bimtek	3 Orang	17.022.400,-	APBD	17.022.400,-	APBDP
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. HSU	Jumlah OPD Yang Telah Menggunakan Sertifikasi Elektronik Untuk Tandatangan Elektronik	30 OPD	18.655.600,-	APBD	78.294.400,-	APBDP
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal	100%	24.769.800,-	APBD	24.769.800,-	APBDP
b	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Entitas (OPD) Yang Terlayani Jaring Komunikasi Sandi	30 OPD	32.593.600,-	APBD	32.593.600,-	APBDP

Tabel 2.10.
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional baik jangka panjang maupun menengah disusun untuk mempercepat perwujudan Visi Presiden Joko Widodo yang menggagas "Impian Indonesia 2015-2025", yaitu:

1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia,
2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika,
3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia,
4) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi,
5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,
6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan
7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam mewujudkan impian tersebut, disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu:

1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,
3) Pemerataan Pembangunan, serta
4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Melalui Visi Indonesia 2045, Indonesia menargetkan untuk keluar dari kelompok negara *middle-income-trap* pada tahun 2036. Puncaknya, pada tahun 2045, Indonesia menargetkan menjadi negara maju dengan PDB terbesar ke-5 dengan nilai USD 7,4 T (tujuh koma empat triliun dolar Amerika Serikat). Keempat pilar Visi 2045 tersebut diterjemahkan ke dalam Visi Misi Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.1

Visi Misi Presiden 2020-2024

VISI
"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"

	MISI
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8	Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Adapun arah kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah : peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sarana pelayanan publik, peningkatan kualitas data dan informasi, mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Berkaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun sejumlah program dan kegiatan serta sub kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan propinsi di bidang komunikasi dan informatika yang tertuang dalam rencana kegiatan 2024, diantaranya yaitu :

1) Program Aplikasi Informatika
   a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
   b) Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
      ii) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
      iii) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
      iv) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
   i) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi & Komunikasi Publik
   ii) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
   iii) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
   iv) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
   v) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
   vi) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
   vii) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media & Kemitraan Komunitas

3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
      ii) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   b) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      ii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      iii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      iv) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   c) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, realiabel, dan lengkap;
c. Mewujudkan layanan akses komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien;
d. Penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas;
e. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang.
c. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, realiabel, dan lengkap;
d. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika.
e. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang terintegrasi di Hulu Sungai Utara;
f. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi.

Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Ket.
1	2	3	4
A	**Nasional**		
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan public	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan		
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital		
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan		

5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	
13	Penguatan pengamanan infrastruktur siber	Renstra BSSN 2020-2024
14	Pembangunan dan penguatan computer emergency response team.	
15	Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber	
16	Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber	
17	Penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber.	
18	Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	Rentsra BPS 2020-2024
19	Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN	
20	Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN	
21	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	
B	**Provinsi Kalimantan Selatan**	
1	Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah	RPJMD Prov Kalsel Thn 2016 - 2021
2	Peningkatan kualitas sarana pelayanan public	
3	Peningkatan kualitas data dan informasi	
4	Mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah	
5	Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan	

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      i) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      ii) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
   c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      i) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      ii) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      iii) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
      iv) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      ii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      iii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      iv) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e) Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Program Aplikasi Informatika
   a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
   b) Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
      ii) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
      iii) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
      iv) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3) Program Informasi dan Komunikasi Publik
   a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
      i) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi & Komunikasi Publik
      ii) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
      iii) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
      iv) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
      v) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
      vi) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
      vii) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media & Kemitraan Komunitas
4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
      ii) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      ii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      iii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      iv) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      i) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RENJA Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBDP. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan.

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan

evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kab. HSU dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB. V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini.

Hulu Sungai Utara, 30 September 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara



JONY RAKHMAN, ST,MT. MSc
NIP. 19750608 200504 1 008

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2024

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. RENJA Perubahan Tahun 2024 ini merupakan salah satu media perencanaan yang memuat gambaran tentang program dan kegiatan yang akan kami kerjakan pada tahun anggaran Perubahan 2024. Diharapkan dengan adanya dokumen ini, segala bentuk kegiatan dapat lebih terarah dan fokus kepada tujuan yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Penyusunan dokumen perencanaan RENJA Perubahan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini mengacu kepada dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan dokumen perencanaan RENJA Perubahan masih jauh dari sempurna. Namun kami berharap dokumen perencanaan ini ada manfaatnya, minimal sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai maupun yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga pembuatan dokumen perencanaan RENJA Perubahan tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami memohon saran, tanggapan dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan dokumen perencanaan ini pada masa yang akan datang.

Amuntai, Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

JUMADI, S.AP, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19730608 199311 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL MUKA		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	**9**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	30
	2.3 Isu-Isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD	40
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	45
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	**54**
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	54
	3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**61**
BAB V	**PENUTUP**	**77**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, maka prasyarat utama adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik *(good governance)*. Dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan kepemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan perencanaan yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Salah satu penerapan sistem perencanaan instansi pemerintah adalah berupa dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan.

Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 - 2026. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis SKPD diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Adapun kedudukan tahun rencana Renja Perubahan Tahun 2024 ini masuk pada tahapan ke-1 (satu) dari dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026
36. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan;
37. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
38. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 Rencana Stategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam menyusun dan melaksanakan sumber daya yang ada agar mampu menjawab tantangan perkembangan strategi regional, nasional maupun global. Serta menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan pembuatan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat diketahui kebutuhan riil dalam melaksanakan serangkaian kebijaksanaan, program serta

kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi berbagai pemasalahan yang dihadapi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV ini menjabarkan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatn penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian renja perangkat daerah tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pendidikan tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi/telah memenuhi/yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1 Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi/Telah Memenuhi/Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Capaian
1	(Program) Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI/PAKET A, APK SMP/MTS/PAKET B dan Angka Melek Hurup	100%	100%
1.1	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD/MI/PAKET A	100%	93,84%
1.2	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK SMP/MTs/PAKET B	100%	100%
1.3	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase APK PAUD	92,5 %	81,85%
1.4	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Melek Hurup	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Capaian
2	(Program) Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	80.00%	77.72%
2.1	(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik	100%	75.06%
3	(Program) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
3.1	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%
3.2	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%
3.3	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
3.4	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%
3.5	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan, 71 (tujuh puluh satu) Sub kegiatan. Semuanya sangat menunjang pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi nya masih belum maksimal di antaranya adalah:

- Pandemi COVID-19 berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan;

- Dampak dari pandemi covid-19 PTMT ditiadakan yang menyebabkan orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang PAUD sehingga realisasi Pendidikan anak usia dini terjadi penurunan;
- Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan merencanakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja utama.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja di antaranya refocusing anggaran akibat dari pandemi covid-19 yang menyebabkan realisasi dari target tidak bisa mencapai 100%. Tindak Lanjut yang diperlukan dengan menganggarkan kembali kegiatan yang di refocusing di tahun berikutnya.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang masih direncanakan pada Renja Tahun 2024 ini perlu menjadi prioritas peningkatan kinerja dan pendanaan guna menunjang mengoptimalkan pencapaian target.

Sedangkan terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target dan melebihi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetap dipertahankan dengan mengoptimalkan sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki .

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disebutkan maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- Tabulasi kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan;
- Membuat time line yang lebih mendetail terhadap semua program, kegiatan, mulai perencanaan sampai dengan evaluasi;
- Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK PAUD, APK SD/MI/PAKET A, APK SMP/MTs/PAKET B dan Persentase Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.01	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD/MI/PAKET A	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
1.01.02.2.01.04	(Sub Kegiatan) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangun	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.02.2.01.05	(Sub Kegiatan)Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terbangun	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	0	0	0%
1.01.02.2.01.06	(Sub Kegiatan) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terbangun	2 Unit	16 Paket16 Paket/Unit	5 Paket/Unit	4 Paket/Unit	80%	5 Paket/Unit	5 Paket/Unit	100%
1.01.02.2.01.08	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Terehabilitasi		2 Paket/ruang	10 Paket/ruang	7 Paket/ruang	70%	7 Paket/Ruang	7 Paket/Ruang	100%
1.01.02.2.01.10	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan yang terehabilitasi		1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0	0	0%
1.01.02.2.01.12	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terehabilitasi	2 Unit	3 Paket/Unit	5 Paket/Unit	4 Paket/Unit	80%	5 Paket/Unit	5 Paket/Unit	100%
1.01.02.2.01.13	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Terehabilitasi		3 Unit/ruang	3 Unit/ruang	4 Unit/ruang	100%	3 Unit/ruang	3 Unit/ruang	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02.2.01.14	(Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer yang terpenuhi		1440 Buah	1440 Buah	1038 Buah	72.08%	1440 Buah	1440 Buah	100%
1.01.02.2.01.22	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai		0	12 Sekolah	12 Sekolah	100%	0	0	0%
1.01.02.2.01.23	(Sub Kegiatan) Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian Nasional		4500 Siswa	0 Siswa	0 Siswa	0%	0	0	0%
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang siap dan mampu menyelenggarakan AKM Jenjang SD		218 Sekolah	218 Sekolah	218 Sekolah	100%	218 Sekolah	218 Sekolah	100%
1.01.02.2.01.25	(Sub Kegiatan)Pemimnaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang kegiatan dalam lomba kreatifitas siswa SD (Kompetensi Siswa Nasional, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional dan FLS2N)		3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	100%	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	100%
1.01.02.2.01.26	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SD	310 Orang	431 Orang	431 Orang	276 Orang	64.04%	431 Orang	431 Orang	100%
1.01.02.2.01.27	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	1162 Orang	431 Orang	586 Orang	586 Orang	100%	1383 Orang	1383 Orang	100%
1.01.02.2.01.28	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan karakter	184 Sekolah	1517 Orang/sekolah	1517 Orang/sekolah	1150 Orang/sekolah	75.81%	1517 Orang/sekolah	1517 Orang/sekolah	100%
1.01.02.2.01.42	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima	184 Sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	100%	184 Sekolah	184 Sekolah	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase APK SMP/MTs/PAKET B**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.02.2.02.06	(Sub Kegiatan) Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium komputer yang baik dan memadai terbangun	-	2 Unit/bangunan	3 Unit/bangunan	3 Unit/bangunan	100%	2 Unit/bangunan	2 Unit/bangunan	100%
1.01.02.2.02.10	(Sub Kegiatan) Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir yang terbangun	-	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0	0	0%
1.01.02.2.02.12	(Sub Kegiatan) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun musholla, halaman dan wc yang baik dan memadai	1 Unit	9 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.02.2.02.13	(Sub Kegiatan)Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terehabilitasi		3 Unit/Bangunan	0 Unit/Bangunan	0 Unit/Bangunan	0%	0	0	0%
1.01.02.2.02.14	(Sub Kegiatan)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas sekolah yang terehabilitasi		3 Ruang	21 Ruang	21 Ruang	100%	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.2.02.16	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan yang terehabilitasi		1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%	0	0	0%
1.01.02.2.02.18	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Laborstorium	Jumlah Bangunan Laboratorium yang Terehabilitasi		1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%	3 Ruang	3 Ruang	100%
1.01.02.2.02.24	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman dan ruang ibadah yang terehabilitasi	2 Unit	7 Unit/bangunan	26 Unit/bangunan	26 Unit/bangunan	100%	14 Unit/bangunan	14 Unit/bangunan	100%
1.01.02.2.02.28	(Sub Kegiatan) Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan alat transportasi	-	378 Orang	500 Orang	500 Orang	100%	500 Orang	500 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02.2.02.32	(Sub Kegiatan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima beasiswa Berprestasi akademik SMP	1154 Peserta Didik	243 Orang	754 Orang	661 Orang	87,67%	754 Orang	754 Orang	100%
1.01.02.2.02.35	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai	-	15 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0%	0	0	0%
1.01.02.2.02.37	(Sub Kegiatan) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang siap dan mampu menyelenggarakan Ujian Nasional/AKM jenjang SMP	-	32 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	100%	32 Sekolah	32 Sekolah	100%
1.01.02.2.02.38	(Sub Kegiatan) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang kegiatan dalam lomba kreatifitas siswa SMP (Kompetensi Siswa Nasional, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, FLS2N dan Gala Siswa)	-	4 Cabang lomba	4 Cabang lomba	4 Cabang lomba	100%	4 Cabang lomba	4 Cabang lomba	100%
1.01.02.2.02.39	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SMP	60 Orang	66 Orang	66 Orang	49 Orang	74,24%	66 Orang	66 Orang	100%
1.01.02.2.02.40	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru SMP yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	590 Orang	482 Orang	938 Orang	938 Orang	100%	938 Orang	938 Orang	100%
1.01.02.2.02.41	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti kegiatan Pendidikan karakter dan terpenuhinya jumlah Guru mata Pelajaran	28 Satuan Pendidikan	2319 Siswa	4625 Siswa	4625 Siswa	100%	4625 Siswa	4625 Siswa	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02.2.02.42	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	100%	31 Sekolah	31 Sekolah	100%
1.01.02.2.03	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase APK PAUD**	**62,00%**	**59%**	**90%**	**59%**	**65.56%**	**92,50%**	**92,50%**	**100%**
1.01.02.2.03.02	(Sub Kegiatan) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	1 Unit	1 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0%	0	0	0%
1.01.02.2.03.12	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai		3 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0%	0	0	0%
1.01.02.2.03.13	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan Taman kanak-kanak (TK)	2842 Peserta Didik	475 Orang	475 Orang	369 Orang	77,68%	475 Orang	475 Orang	100%
1.01.02.2.03.15	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang PAUD	277 Orang	291 Orang	291 Orang	265 Orang	91,07%	291 Orang	291 Orang	100%
1.01.02.2.03.16	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	275 Orang	273 Orang	586 Orang	0 Orang	0%	586 Orang	586 Orang	100%
1.01.02.2.03.17	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina	-	10 Gugus	10 Gugus	10 Gugus	100%	10 Gugus	10 Gugus	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02.2.03.18	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%
1.01.02.2.04	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Melek Huruf**	**100%**	**100%**	**99,85%**	**100%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.02.2.04.12	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti kesetaraan Paket A,B dan C	-	12 Satuan Dikmas	12 Satuan Dikmas	12 Satuan Dikmas	100%	12 Satuan Dikmas	12 Satuan Dikmas	100%
1.01.02.2.04.16	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Paud dan Lembaga PNF yang dibina yang mengikuti lomba apresiasi GTK dan Lomba	13 Satuan Pendidikan	200 Orang	200 Orang	100 Orang	50%	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.2.04.17	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**	**78,00%**	**80%**	**80%**	**74%**	**92,84%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.04.2.01	(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik	78%	80%	80%	74%	92,84%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.04.2.01.01	(Sub Kegiatan) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah yang terhitung dan terpetakan	3 Dokumen	2500 Orang	3104 Orang	3104 Orang	100%	3104 Orang	3104 Orang	100%
1.01.04.2.01.02	(Sub Kegiatan) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Jumlah guru dan kepala sekolah yang dibina dan memiliki kinerja baik	3 Laporan	216 Orang	216 Orang	216 Orang	100%	216 Orang	216 Orang	100%
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
X.XX.01.2.01	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01.06	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	31164 orang	15572 orang	15572 orang	15572 orang	100%	31164 orang	31164 orang	100%
X.XX.01.2.05	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
X.XX.01.2.05.10	(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya kegiatan sosialisasi	24 Orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	20 Buah	20 Buah	20 Buah	100%	20 Buah	20 Buah	100%
X.XX.01.2.06.04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang digunakan	8 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.05	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	50 Paket	53 Buah	53 Buah	53 Buah	100%	53 Buah	53 Buah	100%
X.XX.01.2.06.06	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	4 Dokumen	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%
X.XX.01.2.06.09	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	50 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang ditribusikan sesuai peruntukkannya	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
X.XX.01.2.08.04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100%	75%	75.00	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.02	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	7 Unit	393 Buah	466 Buah	179 Buah	100%	466 Buah	466 Buah	100%
X.XX.01.2.09.09	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	-	0	2 Buah	2 Buah	100%	2 Paket	2 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021										
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
X.XX.01	**(PROGRAM) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	**(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01.06	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02	**(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100.00**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31164 Orang		2226 orang	2226 orang	100%	31164 Orang	31164 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
X.XX.01.2.05	**(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100,00**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.05.10	(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang		100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06	**(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja**	**100,00**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		20 Buah	20 Buah	100%	20 Buah	20 Buah	100%
X.XX.01.2.06.04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.05	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket		53 Buah	53 Buah	100%	53 Buah	53 Buah	100%
X.XX.01.2.06.06	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Kenja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Kenja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Kenja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
XXX.01.2.06.09	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
XXX.01.2.08	**(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
XXX.01.2.08.01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
XXX.01.2.08.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
XXX.01.2.08.04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
XXX.01.2.09	**(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100.00**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XXX.01.2.09.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	467 Unit		466 Buah	279 Buah	59,87	466 Buah	466 Buah	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
	Lapangan									
1.01.02	**(PROGRAM) PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka rata-rata lama sekolah**	8.83		100%	93.84%	93.84%	100%	100%	100%
1.01.02.01	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase APK SD/MI Paket A**	100.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.01.14	(Sub Kegiatan) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	215 Satuan Pendidikan		184 Sekolah	172 Sekolah	93.48%	184 Sekolah	184 Sekolah	100%
1.01.02.2.01.15	(Sub Kegiatan) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	100%	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	3 Lomba KSN, KOSN, FLS2N	100%
1.01.02.2.01.16	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	510 Orang		431 Orang	276 Orang	64.04%	431 Orang	431 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02.2.01.27	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1162 Orang		586 Orang	586 Orang	100%	586 Orang	586 Orang	100%
1.01.02.2.01.28	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	184 Satuan Pendidikan		1517 Orang/sekolah	1150 Orang/sekolah	75,81%	1517 Orang/sekolah	1517 Orang/sekolah	100%
1.01.02.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase APK SMP/MTs Paket B**	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.02.32	(Sub Kegiatan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1154 Peserta Didik		754 Orang	661 Orang	87,67%	754 Orang	754 Orang	100%
1.01.02.2.02.37	(Sub Kegiatan) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	31 Satuan Pendidikan		31 Sekolah	31 Sekolah	100%	31 Sekolah	31 Sekolah	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Kenja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Kenja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Kenja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.02.2.02.38	(Sub Kegiatan) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3330 Peserta Didik		4 Cabang lomba	4 Cabang lomba	100%	4 Cabang lomba	4 Cabang lomba	100%
1.01.02.2.02.39	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60 Orang		66 Orang	49 Orang	74,24%	66 Orang	66 Orang	100%
1.01.02.2.02.40	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	590 Orang		938 Orang	938 Orang	100%	938 Orang	938 Orang	100%
1.01.02.2.02.41	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	28 Satuan Pendidikan		4625 Siswa	4625 Siswa	100%	4625 Siswa	4625 Siswa	100%
01.01.2.2.03	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase APK PAUD**	**60.00**		92,5%	75,71%	81,85%	92,5%	92,5%	92,5%
1.01.02.2.03.13	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2842 Peserta Didik		475 Orang	369 Orang	77,68%	475 Orang	475 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.01.1.03.15	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	177 Orang		291 Orang	265 Orang	91,07%	291 Orang	291 Orang	100%
1.01.01.1.03.16	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	175 Orang		586 Orang	0 Orang	12,73%	586 Orang	586 Orang	100%
1.01.02.2.04	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.02.2.04.12	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3050 Peserta Didik		12 Satuan Dikmas	12 Satuan Dikmas	100%	12 Satuan Dikmas	12 Satuan Dikmas	100%
1.01.02.2.04.16	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan		200 Orang	100 Orang	50%	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.04	**(PROGRAM) PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**	**76.00**		**100%**	75,06%	75,06%	**100%**	**100%**	**100%**

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Kenja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Kenja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Kenja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
1.01.04.2.01	**(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**	**76.00**		100%	75.06%	75.06%	100%	100%	100%
1.01.04.2.01.01	(Sub Kegiatan) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah yang terhitung dan terpetakan	2 Dokumen		3104 Orang	3104 Orang	100%	3104 Orang	3104 Orang	100%
1.01.04.2.01.02	(Sub Kegiatan) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru dan kepala sekolah yang dibina dan dimiliki kinerja baik	2 Laporan		216 Orang	216 Orang	100%	216 Orang	216 Orang	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
2.22.02	**(PROGRAM) PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.02.2.01	**(Kegiatan) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.02.2.01.01	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek		1 Event/Kegiatan	1 Event/Kegiatan	100%	1 Event/Kegiatan	1 Event/Kegiatan	100%
2.22.02.2.01.02	(Sub Kegiatan) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang		1 Event/Kegiatan	1 Event/Kegiatan	100%	1 Event/Kegiatan	1 Event/Kegiatan	100%
2.22.02.2.02	**(Kegiatan) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2023(%)
2.22.01.2.02.01	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek		2 Event/Kegiatan	2 Event/Kegiatan	100%	2 Event/Kegiatan	2 Event/Kegiatan	100%
2.22.05	**(PROGRAM) PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.05.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.05.2.02.03	(Sub Kegiatan) Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek		6 Buah	6Buah	100%	6 Buah	6Buah	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pendidikan dilakukan terhadap penilaian capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan indikator yang telah ditetap dalam Renstra tahun 2023-2026. Berdasarkan target kinerja tahun 2023 dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	8	9	10		13	14		15	16		17
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)													
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)		✓	7.43	7.55	7.67	8.03	7.37	7.53	7.76	7.67	8,03	8,70	
2	Harapan Lama sekolah		✓	14	14	14	13,36	12,88	12,91	12,93	14	13,36	13,58	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	✓	✓	87.50%	90.00%	92.50%	60,00	64.52%	58,96%	70,53%	92.50%	60,00%	62,00%	
4	Angka Melek Huruf	✓	✓	99,65%	99,85%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	✓	✓	100%	100%	100%	88,50	90,30%	87,65%	86,64%	100%	88,50%	89,00%	
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	✓	✓	88,58%	90,58%	92,58%	81,50	80,16%	81,31%	81,56%	92,58%	81,50%	82,00%	
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	✓		100%	100%	100%	98,50	95,99%	96,10%	91,11%	100%	96,50%	99,00%	
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	✓		100%	100%	100%	94,00	92,56%	93,88%	141,83%	100%	94,00%	95,00%	

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	8	9	10		13	14		15	16		17
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	✓		100%	100%	100%	100	100.37%	98,60%	93,84%	100%	100%	100%	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	✓		100%	100%	100%	100	107.92%	107,03%	111,29%	100%	100%	100%	
11	Angka Putus Sekolah SD		✓	0,20%	0,18%	0,16%	0,15	0,04%	0,13%	0,86%	0,16%	0,15%	0,14%	
12	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs		✓	100%	100%	100%	95,00	98,55%	97,10%	100%	100%	95,00%	96,00%	
13	Rata-rata Nilai ujian Nasional SD			7,1	7,15	7,2	-	7,6	8,36	-	7,2	0	-	
14	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional			-	-	1,81	1,90	-	-	1,74	-	-	-	
15	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional			-	-	1,70	1,80	-	-	1,64	-	-	-	
14	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP			59%	60%	65%	-	70,65%	70,65%	70,65%	65%	0	-	
15	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	✓		90%	95%	100%	-	91,30%	91,95%	91,95%	100%	0	-	

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	8	9	10		13	14		15	16		17
16	Rata-rata Nilai Sikap siswa SD Minimal baik (pendidikan karakter)			100	100	100	-	100	100	-	100	0	-	
17	Persentasi Lembaga PAUD yang berakreditasi minimal B			97,50%	100%	100%	-	75,52%	74,44%	67,38%	100%	0	-	
18	Persentasi SD yang berakreditasi minimal B			97,50%	100%	100%	-	91,30%	91,85%	93,30%	100%	0	-	
19	Angka Putus Sekolah SMP		✓	0,11%	0,10%	0,09%	0,50	0,58%	1,42%	0,67%	0,09%	0,50%	0,49%	
20	Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA		✓	97,50%	100%	100%	95,00	97,64%	98,29%	100%	100%	95,00%	96,00%	
21	Persentasi Sekolah SMP berakreditasi minimal B			100%	100%	100%	-	96,77%	93,55%	90,32%	100%	0	-	
22	Rata-rata Nilai ujian Nasional SMP			6,6	6,75	7	-	7,52	7,52	-	7,52	0	-	
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional			-	-	1,62	1,90	-	-	1,74	-	-	-	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional			-	-	1,71	1,80	-	-	1,64	-	-	-	

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
1	2	3	4	8	9	10		13	14		15	16		17
23	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP			59%	60%	65%	-	58.06%	61,29%	60,00%	65%	0	-	
24	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	✓		90%	95%	100%	-	100%	100%	95%	100%	0	-	
25	Rata-rata Nilai Sikap siswa SMP Minimal baik (pendidikan karakter)			100	100	100	-	100	100	100	100	0	-	
26	Persentase Guru bersertifikat pendidik			70%	80%	100%	76,00	67.65%	74,27%	70,16%	100%	76.00%	76.00%	
27	Persentase GTK PAUD,SD,SMP memperoleh Kejuaraan di Tk.Provinsi			100%	100%	100%	100%	60.00%	100%	100%	100%	0	-	
28	Persentase PTK yang mengikuti kegiatan PKB			79.03%	93%	95%	-	80.08%	81,62%	81,62%	95%	0	-	
29	Persentase guru sesuai dengan mapel/keahlian (Linear)			0%	terpenuhi	terpenuhi	-	0%	0%	terpenuhi	terpenuhi	0	-	
30	Persentase PTK yang memiliki indek kinerja baik			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0	-	
31	Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan mencapai 80.00			81	82	83	-	90.3	94,51	94,51%	83	0	-	

Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas di dalam pengelolaan Pendidikan Dasar serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.

B. Target Pencapaian Spm

Beberapa indikator tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi(SD/MI, SMP/MTs)	100%	Tahun 2022
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Tahun 2022
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Tahun 2022

C. **Realisasi**

Realisasi pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupeten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 2. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI. SMP/MTs) (28.991)	100%	78.45%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (5.310)	100%	55.03%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (5431)	100%	70.53%

Berdasarkan tabel perhitungan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2022 tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa :

Pencapaian tertinggi dari 3 Jenis Pelayanan dasar dibidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Dasar yaitu sebesar 78.45% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap Tahun. Jumlah penduduk usia 7-15 Tahun yaitu sebanyak 36.956 Orang dimana telah bersekolah di SD/MI. SMP/MTs sebanyak 28.991 orang sehingga didapat angka capaian sebesar 78.45% penduduk sudah bersekolah formal. Ada sebagian warga Negara yang usia 15 Tahun sudah menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA sebanyak 9230 orang. dan pada pondok pesantren di bawah naungan Kemenag sebanyak 4977 orang.

Pencapaian terendah dari 3 Jenis Pelayanan dasar dibidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 55.03% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap Tahun. Berdasarkan data Jumlah Penduduk

usia 7-18 Tahun yaitu sebanyak 49.006 Orang dan telah bersekolah di pendidikan formal sebanyak 39.356 orang terdapat selisih sebesar 9.650 orang. Dimana penduduk yang mengikuti sekolah kesetaraan berjumlah 5.310 orang sehingga di dapat angka capaian SPM Bidang Kesetaraan sebesar 55,03% dengan kata lain masih ada 49,97% penduduk tidak masuk di sekolah formal maupun informal atau sebanyak 2.911 orang.

Capaian realisasi SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 70,53% yaitu dari jumlah penduduk usia 5-6 sebesar 7.700 orang dan Siswa usia 5-6 Tahun yang bersekolah di PAUD berjumlah 5.431 orang sehingga di dapat angka 70,53%. Usia 6 tahun sudah mengikuti Pendidikan jenjang SD Sebanyak 964 orang, dan yang belum mengikuti pendidikan PAUD sebanyak 1.305 orang.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran terkait SPM untuk urusan Pendidikan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2022

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Capaian	Ket.
		Pagu Anggaran	Realisasi	(%)	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.1	(Kegiatan)Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1.1.1	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,789,604,098	1,356,494,758	75,80	Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan SPM
1.2	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.2.1	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,667,390,877	1,551,183,190	93,03	Pemenuhan SPM PAUD yang Belum Sekolah/ Mengikuti Pendidikan PAUD

1.3	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1.3.1	(Sub Kegiatan)Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1,682,208,611	1,626,294,350	96,68	Kegiatan Pemenuhan SPM Program Kesetaraan
	Jumlah	**5,139,203,586**	**4,533,972,298**	**88.22**	

E. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Data Personil Dinas Pendidikan

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	33	S3 : - orang S2 : 12 orang S1 : 19 orang D3 : 2 orang D2 : - orang D1 : - orang SMA : 8 orang SMP : - orang SD : - orang	Gol I : 0 orang Gol II : 8 orang Gol III : 17 orang Gol IV : 6 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 5 orang Esl.IV : 11 orang	8 orang

F. Permasalahan Dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan :

Pandemi COVID-19 berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dinl. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan.

Akibat dari pandemi covid-19 PTMT ditiadakan yang menyebabkan orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke PAUD sehingga realisasi SPM Pendidikan anak usia dini terjadi penurunan.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

Rendahnya realisasi Pendidikan Kesetaraan karena target usia hanya 7-18 tahun yang masuk dalam data perhitungan, sementara banyak penduduk usia lebih dari 18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan sehingga tidak termasuk dalam perhitungan.

Solusi :

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dapat dilaksanakan dengan cara Satuan Pendidikan menyampaikan usulan kepada Satgas Covid – 19 dengan mematuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini juga harus di dukung dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan dan Siswa di segala jenjang terutama Jenjang SD dan SMP.

Memberikan Pemahaman dengan mengadakan Sosialisasi tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini terutama di usia 5 – 6 tahun. Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan. Indikator capaian untuk

perhitungan rentang umur yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan agar mencakup peserta didik yang berusia di atas 18 tahun agar bisa masuk hitungan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Isu strategis bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :
   - Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
   - Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM;
   - Pemenuhan SPM Pendidikan belum optimal;
   - Sarana dan Prasarana pendidikan yang belum optimal dan belum memenuhi standar minimal;
   - Kebutuhan pendidik secara kuantitas memang belum mencukupi dan belum merata penyebarannya sehingga diperlukan pemetaan dan pemerataan tenaga pendidik yang tepat dan sesuai kebutuhan;
   - Penyediaan layanan pendidikan yang setara, adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat;
   - Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan.

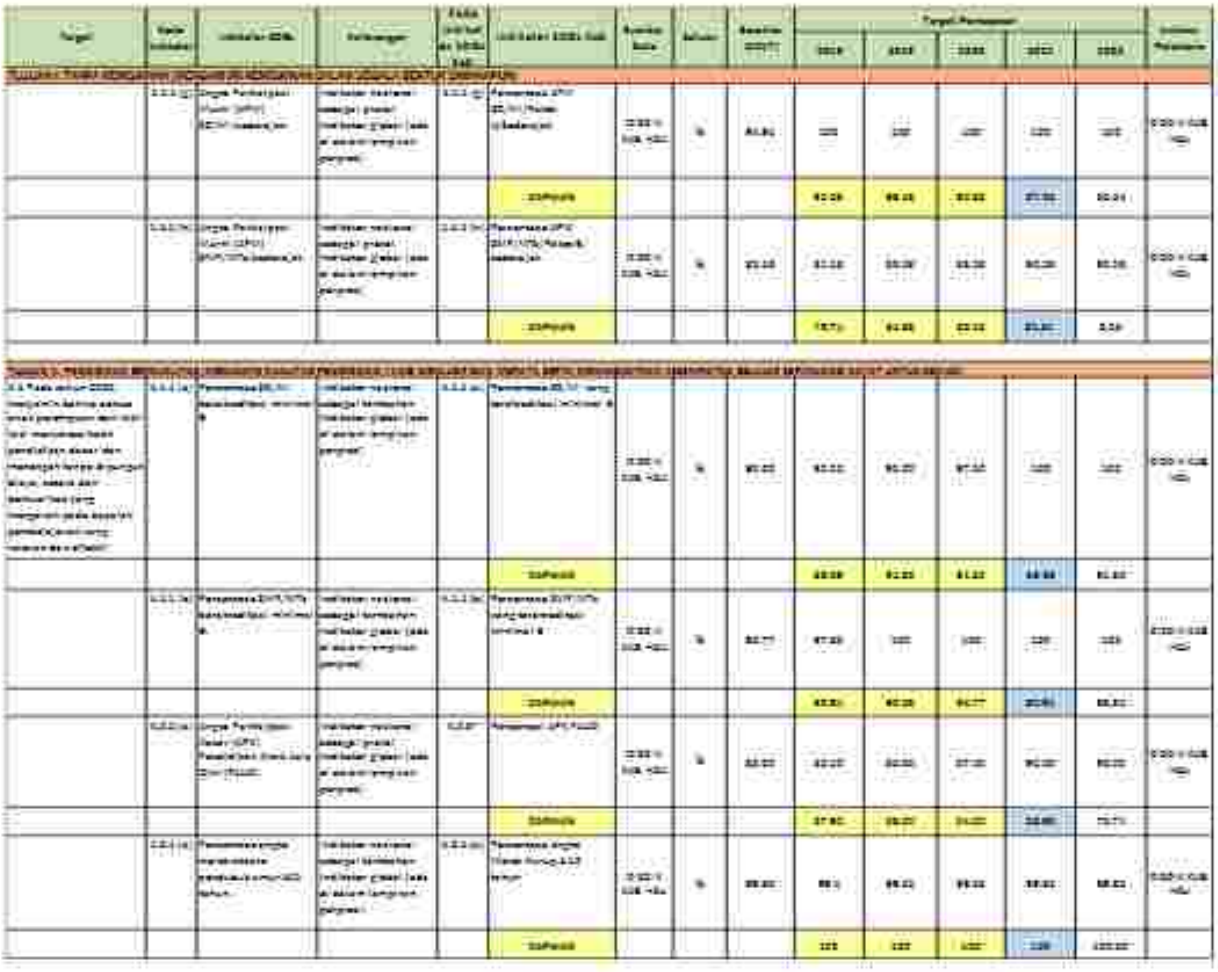
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :
   - Pandemi COVID-19 berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan.
   - Masih ada ada guru yang belum linear kualifikasi pendidikannya dengan tugas yang diampu sehinga mempengaruhi indikator penilaian SPM.
   - Dinas pendidikan sekarang ini kekurangan pengawas mata pelajaran (sampai dengan tahun 2023 masih tersisa 2 orang pengawas mata pelajaran) atau masih kekurangan 5 orang pengawas mata pelajaran. Sedangkan untuk Pengawas satuan pendidikan sekolah dasar yang ada sebanyak 8 orang, kebutuhan sebanyak 18 orang atau masih kekurangan pengawas satuan pendidikan sekolah dasar sebanyak 10 orang.

- Banyak sekolah yang kekurangan guru kelas SD dan guru mata pelajaran, baik pada SD maupun SMP.
- Belum adanya kepastian anggaran yang dapat menjamin pembayaran tunjangan gaji guru Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Masih rendahnya pemberian kesejahteraan insentif kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan (yang diterima sekarang Rp 150.000,- per bulan).
- Masih banyaknya Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan yang belum mendapatkan pemberian insentif dari Pemerintah Daerah (750 orang).
- Masih rendahnya pemberian kesejahteraan (stimulant) kepada Kepala Sekolah dan Guru dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, khususnya di daerah terpencil (Paminggir).
- Akibat dari pandemi covid-19 PTMT ditiadakan yang menyebabkan orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke PAUD sehingga realisasi SPM Pendidikan anak usia dini terjadi penurunan.
- Masih ada Pendidik PAUD (Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak) Yang masih belum linier Latar Belakang Pendidikannya.
- Masih ada orang tua yang masih enggan menyekolahkan anak usia 3 – 4 tahun di Lembaga / Satuan Pendidikan pada layanan Kelompok Bermain.
- Masih banyak sekolah SMP yang belum memiliki Kepala Sekolah defintif (permasalahan yang sudah terjadi beberapa tahun)
- Pengawas Mata Pelajaran SMP banyak yang pensiun, sementara perekrutan Pengawas Mata Pelajaran belum ada.
- Ada dua belas (12) bangunan SMP yang kepemilikan tanahnya belum memiliki sertifikat tanah.
- Ada sekolah SMP yang beberapa tahun jumlah siswanya selalu kurang dari 60 orang.

- Masih kurangnya Tenaga Pengawas khususnya Jenjang SD karena adanya Pengawas yang memasuki Purna Tugas sehingga pengawasan dilapangan menjadi kurang maksimal
- Saat ini banyak Sekolah Dasar yang Kepala Sekolahnya di jabat oleh Pelaksana Tugas(Plt) disebabkan Kepala Sekolah yang definitif telah memasuki Purna Tugas juga.
- Dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) banyak Sekolah yang tidak memiliki fasilitas peralatan computer
- Masih banyak sekolah terutama Sekolah Dasar Negeri yang belum memiliki kepemilikan tanah yang memadai dan masih berupa surat pinjam pakai.
- Minimnya dana untuk pengembangan seni budaya sehingga dalam mencipta dan menggelar hasil karyanya pelaku seni harus menyesuaikan kebutuhannya dengan dana yang tersedia.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals) antara lain :

Tabel 5. Target Indikator Sdgs - Pilar Pembangunan Sosial



- Atas capaian kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Pendidikan, maka capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah atas capaian program nasional adalah pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, walaupun belum maksimal 100 % setiap satuan pendidikan memenuhi pemenuhan SPM ini. Tidak terpenuhi ini, bukanlah sesuatu sikap menyatakan terpenuhinya SPM tersebut. tetapi beberapa kegiatan program kami tahun 2022 tidak termasuk dalam indikator capaian SPM. Namun kegiatan ini sangat penting sesuai dengan kondisi exsting satuan pendidikan:
- Disamping hal tersebut diatas, capaian kinerja layanan tahun 2022 juga mempunyai dampak terhadap program internasional yakni program SDGS. Menghadirkan pemerataan layanan pendidikan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan disemua satuan pendidikan adalah upaya yang kami lakukan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Tantangan/Hambatan (*Treath*)

Usaha peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya dihadapkan pada hambatan sebagai berikut :

a) Larangan atau pembatasan pembelajaran tatap muka karena adanya pandemi covid-19.
b) Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
c) Kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat/orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi sehingga anak terancam putus sekolah.
d) Belum adanya koordinasi yang sinergi secara optimal antar sektor-sektor pembangunan lainnya.

2. Peluang *(Opportunity)*

Peningkatan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan telah memberikan dasar sekaligus peluang yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekarang ini. Peluang yang mendukung kegiatan tersebut :

a) Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah.
b) Peran aktif masyarakat desa dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat cukup tinggi.
c) Adanya pendidikan gratis dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu atau keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan baik Wajar 9 Tahun.
d) Tersedianya dana dalam usaha pelaksanaan kegiatan peningkatan Perkembangan tekhnologi informasi bidang pendidikan yang semakin maju.
e) Adanya kesempatan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan profesionalime.

f) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pendidikan secara sinergi dan berkelanjutan.

g) Adanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak putus sekolah dengan cara mengikuti program Pendidikan Luar Sekolah (Paket A, B dan Paket C).

h) Tersedianya tenaga profesional dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang pendidikan.

i) Tersedianya sistem informasi data yang tepat dan akurat di bidang pendidikan.

j) Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam usaha pembangunan pendidikan.

k) Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pembiayaan Pendidikan;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar yang professional;
4. Program Prioritas Budaya Lokal;
5. Pengembangan sistem pembelajaran, sistem manajemen, sarana prasarana dan optimalisasi potensi lingkungan untuk peningkatan kualitas Pendidikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	177.897.938.480	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	177.897.938.480	
X.XX.01.2.01	*(Kegiatan) Perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah*		Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	14,908,750	*(Kegiatan) Perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah*		Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	14,908,750	
X.XX.01.2.01.06	*(Sub Kegiatan)* Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.908.750	*(Sub Kegiatan)* Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	14.908.750	
X.XX.01.2.02	*(Kegiatan) Administrasi keuangan perangkat daerah*		Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah	100%	175.978.936.280	*(Kegiatan) Administrasi keuangan perangkat daerah*		Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah	100%	175.978.936.280	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.02.01	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disdikbud	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31164 Orang/bulan	175.978.936.280	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disdikbud	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31164 Orang/bulan	**175.978.936.280**	
X.XX.01.2.05	***(Kegiatan) Administrasi kepegawaian perangkat daerah***		**Persentase Tertatanya Adminastrasi Keupegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**16,250,000**	***(Kegiatan) Administrasi kepegawaian perangkat daerah***		**Persentase Tertatanya Adminastrasi Keupegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**16,250,000**	
X.XX.01.2.05.10	*(Sub Kegiatan)* Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	16.250.000	*(Sub Kegiatan)* Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	16.250.000	
X.XX.01.2.06	***(Kegiatan) Administrasi umum perangkat daerah***		**Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**441.311.100**	***(Kegiatan) Administrasi umum perangkat daerah***		**Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**441.311.100**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.06.02	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	53.753.250	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.753.250	
X.XX.01.2.06.04	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan bahan logistik kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	117.887.450	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan bahan logistik kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	117.887.450	
X.XX.01.2.06.05	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdikbud	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	66.196.400	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdikbud	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	66.196.400	
X.XX.01.2.06.06	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	41.000.000	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	41.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.06.09	*(Sub Kegiatan)* Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	162.474.000	*(Sub Kegiatan)* Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	162.474.000	
X.XX.01.2.08	***(Kegiatan) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.380.998.710**	***(Kegiatan) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.380.998.710**	
X.XX.01.2.08.01	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan jasa Surat Menyurat	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	135.696.900	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan jasa Surat Menyurat	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	135.696.900	
X.XX.01.2.08.02	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224.400.410	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224.400.410	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.08.04	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.020.901.400	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.020.901.400	
X.XX.01.2.09	***(Kegiatan) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**65,533,430**	***(Kegiatan) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**65,533,430**	
X.XX.01.2.09.02	*(Sub Kegiatan)* penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasinal atau lapangan	Disdikbud	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	65,533,430	*(Sub Kegiatan)* penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasinal atau lapangan	Disdikbud	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	65,533,430	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	(Program) Pengelolaan Pendidikan		**Angka rata-rata lama sekolah**	**8.17**	**15.631.600.859**	**(Program) Pengelolaan Pendidikan**		**Angka rata-rata lama sekolah**	**8.03**	**15.631.600.859**	
1.01.02.2.01	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***		**Persentase APK SD/MI/PAKET A**	**100%**	**7.256.955.559**	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***		**Persentase APK SD/MI/PAKET A**	**100%**	**7.256.955.559**	
1.01.02.2.01.03	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Disdikbud	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	569.360.000	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Disdikbud	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	569.360.000	
1.01.02.2.01.06	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	253.750.000	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	253.750.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.01.26	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	310 Orang	558.852.500	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	310 Orang	558.852.500	
1.01.03.2.01.17	*(Sub Kegiatan)* Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Sekolah Dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	827 Orang	260.546.875	*(Sub Kegiatan)* Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Sekolah Dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	827 Orang	260.546.875	
1.01.02.2.01.28	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	184 Satuan Pendidikan	1.944.368.000	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	184 Satuan Pendidikan	1.944.368.000	
1.01.02.2.01.35	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	184 Orang	135.850.000	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	184 Orang	135.850.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.01.38	*(Sub Kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	848.362.500	*(Sub Kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	848.362.500	
1.01.02.2.01.39	*(Sub Kegiatan)* Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	138.875.000	*(Sub Kegiatan)* Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	138.875.000	
1.01.02.2.01.47	*(Sub Kegiatan)* Pembangunan Ruang Kelas Baru	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	948.060.000	*(Sub Kegiatan)* Pembangunan Ruang Kelas Baru	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	948.060.000	
1.01.02.2.01.48	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	146.930.959	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	146.930.959	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.01.51	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	150.000.000	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	150.000.000	
1.01.02.2.02	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***		**Persentase APK SMP/MTs/PAKET B**	**100%**	**2,317.871.110**	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***		**Persentase APK SMP/MTs/PAKET B**	**100%**	**2,317.871.110**	
1.01.02.2.02.12	*(Sub Kegiatan)* Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	55.680.000	*(Sub Kegiatan)* Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	55.680.000	
1.01.02.2.02.24	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	237.676.460	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	237.676.460	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.02.32	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1154 Peserta Didik	678.150.000	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1154 Peserta Didik	678.150.000	
1.01.02.2.02.39	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60 Orang	360.394.900	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60 Orang	360.394.900	
1.01.02.2.02.40	*(Sub Kegiatan)* Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	590 Orang	35.999.750	*(Sub Kegiatan)* Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	590 Orang	35.999.750	
1.01.02.2.02.41	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembin	28 Satuan Pendidikan	831.970.000	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	28 Satuan Pendidikan	831.970.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.02.41	*(Sub Kegiatan)* Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31 Dokumen	116.000.000	*(Sub Kegiatan)* Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31 Dokumen	116.000.000	
01.01.2.2.03	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***		**Persentase APK PAUD**	**62%**	**4.327.605.940**	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***		**Persentase APK PAUD**	**62%**	**4.327.605.940**	
1.01.02.2.03.04	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	249.985.000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	249.985.000	
1.01.02.2.03.13	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Disdikbud	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2842 Peserta Didik	2.398.451.690	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Disdikbud	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2842 Peserta Didik	2.398.451.690	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.03.15	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	277 Orang	1.665.265.650	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	277 Orang	1.665.265.650	
1.01.02.2.03.16	*(Sub Kegiatan)* Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	275 Orang	13.903.600	*(Sub Kegiatan)* Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	175 Orang	13.903.600	
1.01.02.2.04	***(Kegiatan)Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***		**Persentase Melek Hurup**	**100%**	**1.729.168.250**	**Persentase Melek Hurup**		**Persentase Melek Hurup**	**100%**	**1.729.168.250**	
1.01.02.2.04.14	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	464 Orang	1.392.000.000	*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	464 Orang	1.392.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.04.16	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	337,168,250	Jumlah Lembaga Paud dan Lembaga PNF yang dibina yang mengikuti lomba apresiasi GTK dan Lomba	Disdikbud	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	337,168,250	
1.01.04	**(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Disdikbud**	**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**180,478,910**	**(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**180,478,910**	
	(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Disdikbud**	**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**180,478,910**	**(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**180,478,910**	
1.01.04.2.01.01	***(Sub Kegiatan)*** Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD,	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	8,331,750	***(Sub Kegiatan)*** Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD, dan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	8,331,750	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
1.01.04.2.01.03	*Sub Kegiatan)* Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	172.147.160	*Sub Kegiatan)* Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	172.147.160	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
2.22.02	**(Program) Pengembangan Kebudayaan**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**466.728.052**	**(Program) Pengembangan Kebudayaan**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**466.728.052**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.22.02.2.01	***(Kegiatan) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**286.740.300**	***(Kegiatan) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**286.740.300**	
2.22.02.2.01.01	***(Sub Kegiatan)*** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	117.428.800	***(Sub Kegiatan)*** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	117.428.800	
2.22.02.2.01.02	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	169.311.500	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	169.311.500	
2.22.02.2.02	***(Kegiatan) Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase keragaman seni budaya yang dilestarikan**	**100%**	**179.987.752**	***(Kegiatan) Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase keragaman seni budaya yang dilestarikan**	**100%**	**179.987.752**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.22.02.2.02.01	*(Sub Kegiatan)* Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi Budaya	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	179.987.752	*(Sub Kegiatan)* Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi Budaya	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	179.987.752	
2.22.05	**(Program) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**59.007.000**	**(Program) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**8,999,380**	
2.22.05.2.02	***(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***		**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**	**59.007.000**	***(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***		**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**	**59.007.000**	
2.22.05.2.02.03	*(Sub Kegiatan)* Pemanfaatan Cagar Budaya	Disdikbud	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek	59.007.000	*(Sub Kegiatan)* Pemanfaatan Cagar Budaya	Disdikbud	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	6 buah	59.007.000	
	TOTAL PAGU INDIKATIF				**18.256.868.811**	**TOTAL PAGU INDIKATIF**				**18,256.868.811**	
	TOTAL PAGU + GAJI				**194.235.805.091**	**TOTAL PAGU + GAJI**				**194.235.805.091**	

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan, SKPD juga memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang pendidikan berdasarkan pengumpulan informasi dan penelitian lapangan, serta melalui pengamatan musrenbang kabupaten, yang kemudian di usulkan berdasar usulan prioritas per kecamatan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.6 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan (POKIR DPRD) Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Nama Dewan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Usulan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	H. Fadillah	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa sungai turak rt 3 kecamatan amuntai utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Rehabilitasi ruang musholla	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Usulan Diterima dan akan diusulkan tahun 2025
2	Junaidi, S.Sos	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Di Desa Teluk Haur Kecamatan Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Pembangunan ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Unit	Usulan belum bisa di penuhi karena bukan ranah Dinas Pendidikan dan kebudayaan

3	Munawari, S.Sos	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa Palimbnagan Gusti Rt. 06 Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Usulan Diterima atau diproses untuk di usulkan Tahun 2023
4	H. M. Yusuf HD., S.Pd.I	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa manarap, kecamatan danau panggang, Kab. Hulu Sungai Utara	Rehabilitasi bagian gedung sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Usulan belum bisa di penuhi karena bukan terbatasnya anggaran
5	Aserani, S.Pd	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa Ambahai Kec Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara	Pembangunan Halaman Baru	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Di tolak dengan alasan anggaran untuk belanja modal tidak tersedia untuk tahun anggaran
				Desa Paminggir Sebaerang Kec. Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara	Rehabilitasi Ruang Kelas		2 Unit	

	H. Norani, S.H	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
6			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa Banyu Tajun Dalam RT.03 Kecamatan Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Peningkatan Halaman dan Paving Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Usulan belum bisa di penuhi karena bukan terbatasnya anggaran
7	Abd. Rahman, S.Sos	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Rehabilitasi halaman sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Usulan Belum bisa diterima karena tanah belum bersertifikat
8	H. A. Al Gifari	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara	Peningkatan Halaman dan Paving Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	Usulan belum bisa di penuhi karena bukan terbatasnya anggaran

Tabel. 2.7 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Nama Dewan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Usulan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	RAHMAT	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Panyaungan Rt.02, Kab. Hulu Sungai Utara	Rehabilitasi ruang kelas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Usulan Diterima dan akan diusulkan untuk Dana DAK 2024
2	MULIANI	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
			(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Desa, Kab. Hulu Sungai Utara	Pengadaan alat, bahan Praktik Keterampilan dan Media Pembelajaran	Jumlah PAUD yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai	1 Unit	Usulan belum bisa di penuhi karena terbatasnya anggaran.
3	NASRULLAH	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			Panangkalaan Hulu RT 003, Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Palimbnagan Gusti Rt. 06 Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Peningkatan halaman dan paving sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Usulan Diterima atau diproses untuk di usulkan Tahun 2025

4	SAM' ANI	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
			(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Desa Guntung Rt 01, Kab. Hulu Sungai Utara	Pengadaan Meja Sekolah	Jumlah PAUD yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai	3 unit	Usulan belum bisa di penuhi karena bukan terbatasnya anggaran
					Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE)			
					Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pembelajaran			
7	ZULKIPLI	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Rehabilitasi halaman sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Usulan Belum bisa diterima karena tanah belum bersertifikat
6	BADARUDIN	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
			(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Balai Penyuluh Pertanian, Kab. Hulu Sungai Utara	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pembelajaran	Jumlah PAUD yang memiliki alat praktik dan peraga siswa yang lengkap/memadai	2 Unit	Usulan belum bisa di penuhi karena bukan ranah Disdikbud.

9	ALFIAN NOOR	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
			(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Desa Tangga Ulin Hilir RT 01, Kab. Hulu Sungai Utara	Pembangunan Fasilitas Parkir			

Keterangan :

a. Usulan Pokir DPRD yang berkaitan dengan bidang Pendidikan yang bisa di akomodir untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
   1. Rehabilitasi musholla at taubah rt 3 desa sungai turak (Di Usulkan pada tahun 2025)
   2. Rehabilitasi Ruang Kelas di Desa Palimbnagan Gusti Rt. 06 Kec. Haur Gading (Di akomodir pada tahun 2023)

b. Usulan Masyarakat yang berkaitan dengan bidang Pendidikan yang bisa di akomodir untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
   1. Rehabilitasi ruang kelas di Panyaungan Rt.02. Kab. Hulu Sungai Utara (Diusulkan pada anggaran DAK 2024)
   2. Peningkatan halaman dan paving sekolah Desa Palimbnagan Gusti Rt. 06 Kec. Haur Gading (Diusulkan pada Tahun 2025)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai visi 2024 untuk " menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) ".

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Dalam visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Cita-cita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua difokuskan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk merealisasikan Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2023-2026.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran jugamenjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak *(impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ini sendiri ditentukan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu strategis. Selanjutnya sasaran menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis daerah maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan.

Dalam upaya memenuhi instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen pengganti terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 untuk urusan Pendidikan sebagai berikut :

1. Tujuan

   Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Indikator Tujuan

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Sasaran

   Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.

4. Indikator sasaran

   Indikator sasaran adalah : a) Rata-rata lama sekolah; b) Harapan lama sekolah.

5. Strategi

   Strategi RKPD adalah : a) Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan; b) Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya.

6. Arah kebijakan

   Arah kebijakan RKPD adalah : a) Meningkatkan Aksesbilitas pada semua jenis dan jenjang Pendidikan; b) Pengembangan manajemen sekolah; c) Peningkatan kompetensi Guru; d) Pemenuhan Standar Minimal Pendidikan (SPM); e) Pelestarian Cagar Budaya dan Nilai warisan tradisi.

Dengan demikian sangat dibutuhkan perwujudan sumberdaya manusia di daerah yang memuliki kualitas dan dapat bersaing dalam eksistensi kehidupan di era globalisasi, memiliki akses

dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai kemajuan global serta dapat bersikap mandiri dalam kehidupan sosial baik dalam lingkungan regional, nasional bahkan internasional.

Tabel 3.1
HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PERIODE RENSTRA 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
					2023	2024	2025	2026	
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
1.Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A/82,17	A/82,18	A/82,19	A/82,20	A/82,21	A/82,21
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
4. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	6.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,75	8,03	8,17	8,31	8,45	8,45
			Harapan Lama sekolah	12,92	13,36	13,58	13,80	14,02	14,02
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	58,96	60,00	62,00	64,00	66,00	66,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	98,60	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	107,03	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	87,65	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,31	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12	98,10	98,50	99,00	99,50	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15	93,88	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00
			Persentasi Angka Putus Sekolah SD	0,13	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
					2023	2024	2025	2026	
			Persentasi Angka Putus Sekolah SMP	0,46	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47
			Persentase Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	97,10	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00
			Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	98,29	98,00	98,50	99,00	99,50	100
			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,78	1,90	2,00	2,10	2,20	2,20
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,69	1,80	1,90	2,00	2,10	2,10
			Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,74	1,90	2,00	2,10	2,20	2,20
			Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,64	1,80	1,90	2,00	2,10	2,10
			Persentase Guru bersertifikat pendidik	74,24	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00
			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,51	98,00	98,50	99,00	99,50	100
			Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	100	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2 Rekap Program dan Kegiatan Renja Dinas Perubahan Pendikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Pagu Anggaran + Gaji Tahun 2024	Ket.
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretariat)	**1**	**7**	**15**	**6,127,548,150**	**267,142,509,106**	
(Program) Pengelolaan Pendidikan	**1**	**4**	**57**	**84,386,344,256**	**84,386,344,256**	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1	23	52,989,868,209	52,989,868,209	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1	21	12,815,197,407	12,815,197,407	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1	10	14,291,950,690	14,291,950,690	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan (Nonformal/Kesetaraan)		1	3	4,289,327,950	4,289,327,950	
(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**1**	**1**	**2**	**694,349,600**	**694,349,600**	
(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	2	694,349,600	694,349,600	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	**2**	**3**	**4**	**1,925,484,852**	**1,925,484,852**	

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Pagu Anggaran + Gaji Tahun 2024	Ket.
(Program) Pengembangan Kebudayaan	**1**	**2**	**3**	**1,852,563,852**	**1,852,563,852**	
(Kegiatan) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota		1	2	833,476,100	833,476,100	
(Kegiatan) Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota		1	1	1,019,087,752	1,019,087,752	
(Program) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	**1**	**1**	**1**	**72,921,000**	**72,921,000**	
(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		1	1	72,921,000	72,921,000	
Total	**5**	**15**	**78**	**93,133,726,858**	**354,148,687,814**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
X.XX.01	**(PROGRAM) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**177.897.920.270**			**100%**	**269.472.291.734**
X.XX.01.2.01	**(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**		**100%**	**14.890.750**			**100%**	**40,239,900**
X.XX.01.2.01.06	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Disdikbud	1 Laporan	14.890.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	40,239,900

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
X.XX.01.2.02	**(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi kenangan perangkat daerah**		**100%**	**175.978.936.280**			**100%**	**267,198,186,200**
X.XX.01.2.02.01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdikbud	31164 Orang/bulan	175.978.936.280	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,DAK NON FISIK-TGP PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD		31164 Orang/bulan	267,198,186,200
X.XX.01.2.05	**(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi tertatanya administrasi kepegawaian**		**100%**	**16,250,000**			**100%**	**50.873.700**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
		perangkat daerah							
X.XX.01.2.05.10	(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdikbud	24 Orang	16,250,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		24 Orang	50.873.700
X.XX.01.2.06	**(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja**		**100%**	**441.311.100**			**100%**	**382.731.477**
X.XX.01.2.06.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdikbud	2 Paket	53.753.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	32.850.000
X.XX.01.2.06.04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disdikbud	8 Paket	117,887.450	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		8 Paket	77.558.477
X.XX.01.2.06.05	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disdikbud	50 Paket	66,196,400	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Paket	68.838.000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
X.XX.01.2.06.06	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disdikbud	4 Dokumen	41.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	41.000.000
X.XX.01.2.06.09	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdikbud	50 Laporan	162.474.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Laporan	162.485.000
X.XX.01.2.08	**(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**1.380.998.710**			**100%**	**1.616.840.561**
X.XX.01.2.08.01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdikbud	4 Laporan	135.696.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Laporan	255.327.860
X.XX.01.2.08.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disdikbud	12 Laporan	224.400.410	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	344.999.978

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
X.XX.01.2.08.04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdikbud	12 Laporan	1.020.901.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	1.016.512.723
X.XX.01.2.09	**(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**		**100%**	**65,533,430**			**100%**	**183.419.896**
X.XX.01.2.09.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disdikbud	7 Unit	65,533,430	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		467 Unit	183.419.896
1.01.02	**(PROGRAM) PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka rata-rata lama sekolah**	Disdikbud	**8.03**	**15.631.600.859**			**8.03**	**15.149.501.286**
1.01.02.01	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase APK SD/MI Paket A**		**100%**	**7.256.955.559**			**100%**	**7.187.765.354**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.02.2.01.03	*(Sub Kegiatan)* Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Disdikbud	3 Ruang	569.360.000,	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		3 Ruang	569.360.000,
1.01.02.2.01.06	*(Sub Kegiatan)* Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Disdikbud	2 Unit	253.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Unit	296.343.433
1.01.02.2.01.26	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdikbud	310 Orang	1,860,852,300	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		310 Orang	560,815,000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.02.2.02.27	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Disdikbud	1162 Orang	260,546.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1512 Orang	1.296.440.216
1.01.02.2.01.28	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Disdikbud	184 Satuan Pendidikan	1.944.368.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		184 Satuan Pendidikan	1.847.301.407
1.01.02.2.01.35	*(Sub Kegiatan)* Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	184 Orang	135.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		184 Orang	261.842.311
1.01.02.2.01.38	*(Sub Kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	4 Dokumen	848.362.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	1.305.688.594

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.02.2.01.39	*(Sub Kegiatan)* Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Disdikbud	2 Dokumen	138.875.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Dokumen	267.672.808
1.01.02.2.01.47	*(Sub Kegiatan)* Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Disdikbud	6 Ruang	948.060.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		6 Ruang	948.060.000
1.01.02.2.01.48	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdikbud	2 Unit	146.930.959	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Unit	103.601.585

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.02.2.01.51	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdikbud	1 Ruang	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Ruang	150.000.000
1.01.02.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase APK SMP/MTs Paket B**		**100%**	**2.317.871.110**			**100%**	**3.975.355.466**
1.01.02.2.02.12	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Disdikbud	1 Unit	55.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	97.824.727
1.01.02.2.02.24	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdikbud	2 Unit	237.676.460	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Unit	417.576.058

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.02.2.02.32	(Sub Kegiatan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Disdikbud	1154 Peserta Didik	678.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1254 Peserta Didik	1.191.448.255
1.01.02.2.02.39	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	60 Orang	360.394.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		60 Orang	108,395,000
1.01.02.2.02.40	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Disdikbud	590 Orang	35.999.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		590 Orang	491.100.000
1.01.02.2.02.41	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Disdikbud	28 Satuan Pendidikan	831.970.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		28 Satuan Pendidikan	1.461.696.092

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.02.2.02.41	*(Sub Kegiatan)* Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	31 Dokumen	118.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		31 Dokumen	207.315.334
01.01.2.2.03	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase APK PAUD**		**62%**	**4.327.605.940**			**62%**	**2.298.450.233**
1.01.02.2.03.04	*(Sub Kegiatan)* Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdikbud	1 Unit	249.985.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	250.000.000
1.01.02.2.03.13	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Disdikbud	2842 Peserta Didik	2.398.451.690	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2842 Peserta Didik	1.447.930.233
1.01.02.2.03.15	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Disdikbud	277 Orang	1.665.265.650	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		277 Orang	501,866,250

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.02.2.03.16	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Disdikbud	275 Orang	13,903,600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		275 Orang	98.653,750
1.01.02.2.04	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**		**100%**	**1.729.168.250**			**100%**	**1,687.930,233**
1.01.02.2.04.14	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	464 Orang	1.392.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		464 Orang	1.447.930.233
1.01.02.2.04.16	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Disdikbud	13 Satuan Pendidikan	337.168,516	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		13 Satuan Pendidikan	240.000.000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
1.01.04	**(PROGRAM) PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**		**78%**	**180,483,750**			**78%**	**318,590,250**
1.01.04.2.01	**(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**		**78%**	**180,483,750**			**78%**	**318,590,250**
1.01.04.2.01.01	(Sub Kegiatan) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	2 Dokumen	8,331,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	40,539,000
1.01.04.2.01.02	(Sub Kegiatan) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan	Disdikbud	2 Laporan	172,147,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	278,051,250

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**525.805.052**				**395,165,260**
2.22.02	**(PROGRAM) PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**		**100%**	**466.728.052**			**100%**	**386,165,880**
2.22.02.2.01	**(Kegiatan) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**		**100%**	**286.740.300**			**100%**	**144,163,380**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
2.22.02.2.01.01	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Disdikbud	6 Objek	117.428.800	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		6 Objek	128,163,410
2.22.02.2.01.02	(Sub Kegiatan) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disdikbud	40 Orang	169.311.500	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		40 Orang	15,999,970
2.22.02.2.02	**(Kegiatan) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional**		**100%**	**179.987.752**			**100%**	**242,002,500**
2.22.02.2.02.01	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Disdikbud	6 Objek	179.987.752	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		6 Objek	242,002,500
2.22.05	**(PROGRAM) PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**		**100%**	**59.007.000**			**100%**	**8,999,380**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
2.22.05.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**		**100%**	**59.007.000**			**100%**	**8,999,380**
2.22.05.2.02.03	(Sub Kegiatan) Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Disdikbud	6 Objek	59.007.000	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		6 Objek	8,999,380
	TOTAL PAGU + GAJI				**194.235.805.091**				**285.335.548.530**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode Tahun 2024. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan. pengawasan dan pengendalian. pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA dan akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini untuk merupakan rencana kerja tahunan yang menunjang tercapainya tujuan serta target dan sasaran pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD. RPD dan RKPD.

Dalam hal ini kami akan berupaya untuk terus menyempurnakan dokumen perencanaan ini dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Diharapkan segala bentuk Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dapat lebih terarah dan terfokus kepada tujuan utama bangsa Indonesia yaitu untuk mencerdaskan segenap bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, Juni 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JUMADI, S.AP, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730608 199311 1 002

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



DINAS PERPUSTAKAAN

Jl. A. Yani no. 02 Amuntai
Telp. (0527) 61015
Email: perpustarda.hsu@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji dan Syuku kami ucapkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, sebagaimana di amanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, maka segala perubahan / penjelasan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun anggaran 2024 dapat dicapai lebih optimal sebagaimana mestinya.

Kami menyadari Renja Perubahan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami haturkan untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 ini, sehingga tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Akhirnya Semoga Renja Perubahan Tahun 2024 ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam mencapai serta mendukung tujuan kinerja utama Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Amuntai, Juli 2024
Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. Karyanadi, S.Pd, M.AP.
Pembina
NIP. 19710703 199803 1 010

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

LEMBAR PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER I DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 7

2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Semester I Tahun 2024 9

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Sampai Dengan Semester I (satu) 8

2.1.3. Realisasi Keuangan Tahun 2024 Semester I (satu) 17

2.1.4. Realisasi Target Capaian Renstra 2023-2026 24

2.1.5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu untuk Kedepannya 25

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 26

2.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja 26

2.2.2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja 26

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 31

2.3.1. Identifikasi Masalah Perpustakaan 31

2.3.2. Identifikasi Masalah Kearsipan 31

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 33

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI 43

3.1.1. Telaahan Kebijakan Nasional 43

3.1.2. Telaahan Kebijakan Propinsi 45

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 48

4.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 49

BAB V PENUTUP 57

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Semester I (Satu) 9

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Semester I (satu) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 11

Tabel 2.3 Realisasi Keuangan Tahun 2024 Semester I (Satu) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 18

Tabel 2.4 Capaian Renstra Periode 2023-2026 Dinas Perpustakaan 24

Tabel 2.5 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 28

Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 32

Tabel 2.7 Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara 35

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan & Kearsipan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 45

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 46

Tabel 4.1 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara 49

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu setengah Tahun guna mengoptimalkan capaian program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta sesuai Instruksi Inmendagri No 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perancanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada Tahun 2023, maka untuk itu daerah harus menyusun kembali Rencana Starategis pada setiap OPD kabupaten yang berdasarkan ketentuan dengan memperhatikan penyelelarasan target indikator makro dan program nasional, serta Isu – isu yang berkembang.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara menggambarkan bagaimana setiap pekerjaan akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap pekerjaan yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu program dan kegiatan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Renja Perubahan (Renja-P) juga merupakan komitmen Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam era globalisasi sekarang ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan puncak sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Rencana kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengandung tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, evaluasi pelaksanaan kegitan Tahun yang talu, Isulsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Review terhadap Rancangan Awal serta menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tujuan Dinas Perpustakaan.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- P SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerh untuk periode Setengah Tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan, RENJA Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengelolaan Arsip, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perubahan (Renja-P) SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. RENJA Perubahan (Renja-P) SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan pada Tahun 2024.
3. RENJA Perubahan (Renja-P) SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Adapun Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun Tahun berjalan;
b. Program dan Kegiatan dalam RENJA Perubahan (Renja-P) harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026;
c. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan (Renja-P) harus setaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kecamatan;

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

d. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan (Renja-P) dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dinas Pepustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang susunan Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pepustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dinas Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pepustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 yang sesuai dan selaras dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023-2026.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pepustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 akan menjadi pedoman dan indikator penyusunan program dan kegiatan sisa Tahun Anggaran 2024 beserta pendanaan indikatifnya dengan mengakomodir semua usulan stakeholder. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) untuk Tahun 2024 ini telah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah yang mengacu kepada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta kondisi perekonomian sampai saat ini. Karenanya bila terjadi perubahan arah kebijakan dan perkembangan kondisi perekonomian baik nasional maupun daerah maka Renja perlu ditelaah kembali agar dapat up to date dengan kebutuhan riil di lapangan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai seperti yang di cita- citakan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar dan landasan hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025;
10) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
11) Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16) Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
17) Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
19) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
20) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 nomor 17);
21) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 21);

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan Tahunan SKPD Dinas Perpustakaan yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD Dinas Perpustakaan yang memuat kebijakan Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Tahunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 6 (enam) bulan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta merealisasikannya dalam perencanaan Tahunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 6 (enam) bulan.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan Tahunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daearah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) serta Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada semester 1 (satu) dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat kerangka pendanaan sesuai Tahun perencanaan

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Renja-P SKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER 1 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Secara umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya pada periode semester 1 (satu) yakni Tahun 2024 dari Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun program/ kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyedian gaji dan tunjangan ASN
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor
   - Sub Kegiatan Penyedian peralatan rumah tangga
   - Sub Kegiatan Penyedian bahan logistik kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Fasiliasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5) Kegiatan Penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   - Sub Kegiatan Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Sub Kegiatan Penyedia Jasa pelayanan umum kantor

6) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   - Sub Kegiatan Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pembinaan Perpustakaan

1) Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standard nasional perpustakaan
   - Sub Kegiatan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
   - Sub Kegiatan Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
2) Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pengembangan literasi berbasis inklusi social

III. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

1) Kegiatan Pengambangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

IV. Program Pengelolaan Arsip

1) Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
   - Sub Kegiatan Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota
2) Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
3) Kegiatan Pengelolaan simput jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

V. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

1) Kegiatan Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun
   - Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun
2) Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan arsip akibat bencana

Adapun Pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 pada semester 1 (satu) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 4 indikator yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada semester 1 (satu) Tahun 2024

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan indikator kinerja utama untuk OPD melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melakukan reviu terhadap IKU, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama reviu Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 semester 1 (satu) menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 semester 1 (satu)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Perpustakaan sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	63,00 *)	-	0,00%
		Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	50,00 *)	-	0,00%
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban.	Persentase tingkat ketersediaan arsip	%	91,00%	59,20%	65,06%

3	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Nilai	79,00	81,50	103,16%

Keterangan : *) Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023

Pada tabel capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) semester 1 (satu) Dinas Perpustakaan Tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Kinerja Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja utama belum ada realisasi, dikarenakan penghitungan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Tahun 2024 ini masih dalam tahap pengumpulan pendataan dan masih dalam penghitungan oleh Bidang Perpustakaan dan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Tim yang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional RI, jadi data IPLM Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berproses. Begitu juga dengan Data Survey Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 juga masih dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil TGM nantinya baru bia diketahui pada akhir Tahun atau triwulan IV Tahun 2024.
2. Pada sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan arsp yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban dengan indikator kinerja Persentase tingkat ketersediaan arsip telah dilaksanakan dengan baik, sehingga pencapaian pada indikator kinerja ini sampai semester 1 (satu) Tahun 2024 **sebesar 59,20% dari target yang ditetapkan yaitu 91,00%**
3. Pada sasaran kinerja Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel dengan indikator kinerja Nilai SAKIP SKPD Dinas Perpustakaan target pada Tahun 2024 adalah sebesar **79,00,** sesuai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara pada awal Tahun kemarin, dan nilai keluar yaitu pada Tanggal 27 Maret 2024 bahwasanya disampaikan nilai SAKIP Dinas Perpustakaan yaitu **81,50 Dengan Interpretasi "Memuaskan".**

Dari data yang diatas, bahwasanya masih ada Indikator Kinerja Utama yang masih dalam tahap proses pelaksanaan, sehingga tidak dapat menampilkan realisasi kinerja, akan tetapi semuanya perlu proses yang baik dan ada beberapa penguatan yang perlu dilaksanakan dan melalui perubahan Renja ini fokus kepada peningkatan kinerja yang telah disepakati.

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2024 sampai dengan semester 1 (satu)

Pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan (output) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator.

Capaian kinerja selama Tahun 2024 pada semester 1 (satu) dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja kegiatan prioritas dan pengukuran sasarannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Namun demikian masih banyak kegiatan yang harus dicermati ketercapaiannya.

Adapun realisasi kinerja indikator program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja 2024 Semester 1 (satu)
Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)
1						2	3	4	5	6
Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel										
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	79,00	81,30	103,16%
2	23	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	66,66%	66,66%
2	23	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	66,67%
2	23	01	2	01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0,00%
2	23	01	2	01	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Leporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	4 laporan	50,00%
2	23	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	100%	48,57%	48,57%
2	23	01	2	01	0001	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 org/bulan	168 org/bulan	50,00%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2	23	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1 laporan	50,00%
2	23	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100,00%	28,57%	28,57%
2	23	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	2	28,57%
2	23	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	100%	80,43%	80,43%
2	23	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
2	23	01	2	06	0002	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
2	23	01	2	06	0003	Penyedian peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
2	23	01	2	06	0004	Penyedian bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
2	23	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0,5 Paket	50,00%
2	23	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Temu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Temu	3 Laporan	2 Laporan	66,67%
2	23	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	12 Laporan	80,00%
2	23	01	2	08		Penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah	100%	50%	50,00%
2	23	01	2	08	0002	Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyedian jasa komunikasi, sumber	12 laporan	6 Laporan	50,00%
2	23	01	2	08	0004	Penyedia Jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan	6 Laporan	50,00%
2	23	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	100%	71,42%	71,42%
2	23	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	7 Unit	70,00%
2	23	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	2 Unit	50,00%
2	23	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	10 Unit	66,67%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2	23	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	16 Unit	80,00%
Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat										
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	83,00 *)	-	
							Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	50,00 *)	-	
2	23	02	2	01		Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Nilai IKM Layanan Perpustakaan	82,00		
2	23	02	2	01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	4 Perpustakaan	133,33%
2	23	02	2	01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	8 Perpustakaan	160,00%
2	23	02	2	01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 layanan	4 Layanan	133,33%
2	23	02	2	01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	623 eksemplar	635 Eksemplar	101,93%
2	23	02	2	01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 Dokumen	100,00%
2	23	02	2	02		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	1.000 orang	926 Orang	92,60%
2	23	02	2	02	0004	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	9 Perpustakaan	4 Perpustakaan	44,44%
Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno / koleksi budaya etnis nusantara										
2	23	03				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1 naskah	-	0,00%
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	362 judul	469 Judul	129,56%
2	23	03	2	02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	6 eksemplar	49 Eksemplar	816,67%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2	23	03	2	02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	6 eksemplar	49 Eksemplar	816,67%
Meningkatnya kepatuhan OPD/ BUMD/ desa terhadap kebijakan Kearsipan										
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentasi tingkat ketersediaan Arsip	91,00%	59,20%	65,05%
2	24	02	2	01		Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Persentase arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola	85,00%	70,00%	82,35%
2	24	02	2	01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 berkas	50 berkas	100,00%
2	24	02	2	01	0003	Pengawasan Arsip dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 laporan	10 laporan	100,00%
2	24	02	2	02		Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persentase arsip terjaga dan arsip statis yang dibuatkan daftarnya	85,00%	0,00%	0,00%
2	24	02	2	02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 arsip	-	0,00%
2	24	02	2	03		Pengelolaan simput jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Persentase pengguna layanan penyedia informasi, akses	85,00%	75,00%	88,24%
2	24	02	2	03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15 pengguna	15 pengguna	100%
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban										
2	24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	25,00%	20,00%	80,00%
2	24	03	2	01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	750 Berkas	500 Berkas	66,67%
2	24	03	2	01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh)Tahun	750 Arsip	500 Arsip	66,67%
2	24	03	2	02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten/Kota	10 Arsip	-	0,00%
2	24	03	2	02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	-	0,00%

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dari capaian kinerja semester 1 (satu) Tahun 2024 dapat dilihat beberapa kegiatan yang mengalami keberhasilan / peningkatan kinerja maupun masih dalam proses pelaksanaan, ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

1. **Pelaksanaan Kesekretariatan**

   Pada unit kerja kesekretariatan Dinas Perpustakaan pada semester 1 (satu) yaitu melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan sasaran program terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan mempunyai indikator kinerja persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah realisasi kinerja pelaksanaan program tersebut adalah 49,51 % dari target 100% (Rata-rata dari 6 Kegiatan), adapun penunjang Pelaksanaan program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

     Pada kegiatan ini sudah terealisasi 66,66% dari target 100%, yang masih belum terlaksana adalah pelaksanaan dokumen DPA perubahan, untuk Renja 2025, Lakip, dan laporan perjanjian kinerja sudah terealisasi dan tepat waktu pelaksanaan.

   - Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

     Pada pelaksanaan kegiatan diatas sudah terealisasi 48,57%, kegiatan ini berisikan pelaksanaan gaji dan tunjangan ASN terpenuhi sesuai perencanaan serta sub kegiatan penyusunan pelaporan keuangan yang sudah terealisasi 100% yaitu laporan Keuangan an audited dan audited Tahun 2023.

   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

     Pada kegiatan ini menargetkan jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya, dan selama semester I Tahun 2024 dari target sebanyak 7 Orang baru terealisasi sebanyak 2 orang atau sebesar 28,57 %

   - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

     Pada kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yang mana dari target 100% sudah terealisasi 80,43 %, pada kegiatan ini berbagai pelaksanaan seperti penyedian komponen listrik, peralatan dan pertengkapan kantor, penyedian peralatan rumah tangga, barang cetakan dan penggandaan dan bahan logistik kantor dan fasilitasi kunjungan tamu serta penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

   - Kegiatan penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah

     Pada kegiatan penyedian jasa penunjang ada terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu penyedian jasa komunikasi dan sumberdaya air, listrik serta sub kegiatan jasa

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

pelayanan umum kantor, adapun target dari kegiatan ini 100% dan sudah terealisasi 50% artinya penyedian jasa pada Dinas perpustakaan sesuai dan terencana dengan baik.

- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah

  Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, ada 4 (empat) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pemeliharaan mobil operasional jabatan, sub kegiatan pemeliharaan mobil operasional lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, dan dari target kinerja 100% sudah terealisasi 71,42 %.

2. **Pelaksanaan Bidang Perpustakaan**

   Bidang perpustakaan mempunyai 2 (dua) program yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu Program pembinaan perpustakaan dan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Adapun target program pembinaan perpustakaan yaitu dengan indikator Nilai IPLM dan TGM yang belum terealisasi, dikarenakan masih dalam tahap proses penghitungan yaitu pada triwulan III, sedangkan untuk target kinerja Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno/koleksi budaya etnis nusantara dari target 1 naskah dan 362 judul terealisasi 0 naskah dan 469 judul, adapun 2 (dua) program tersebut di dukung 3 (tiga) kegiatan yaitu :

   - Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota

     Pada kegiatan perpustakaan tingkat daerah kab/kota dengan indikator kinerja nilai IKM layanan perpustakaan dengan target nilai 82,00 untuk penilaian semester I Tahun 2024 belum terealisasi dikarenakan pengumpulan data survey IKM baru dilaksanakan pada minggu ke empat Bulan Juni 2024 dan akan keluar hasilnya pada minggu pertama Bulan Juli 2024. Adapun kendala pelaksanaan kegiatan ini diantaranya :

     a) Banyaknya permintaan pembinaan dan rolling buku serta pembuatan MOU yang memerlukan materai
     b) Adanya pelayanan perpustakaan daerah yang buka pada Jum'at siang, Sabtu dan Minggu, membutuhkan anggaran extra, sementara dana yang tersedia pada pagu anggaran 2024 murni hanya mampu membuka layanan perpustakaan daerah sampai dengan Bulan Juli 2024.

   - Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota

     Dalam kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Perpustakaan target 1.000 orang dengan realisasi 926 orang, adapun kendala yang dihadapi diantaranya :

a) Terbatasnya pilihan narasumber sebagai instruktur pelatihan dalam sub kegiatan pengembangan literasi yang berbasis inklusi sosial
b) Keterbatasan Sumberdaya manusia baik pada Bidang Perpustakaan maupun pada pemerintahan desa sehingga koordinas tentang pelaksanaan kegiatan usulan Masyarakat sering tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Bidang Kearsipan

Sesuai Rencana Kerja 2024, Bidang Kearsipan mempunyai 2 (Dua) program yaitu Program Pengelolaan Arsip terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 untuk Program Pengelolaan Arsip dari target indikator kinerja sebesar 91,00 %, sudah terealisasi 59,20 % atau sebesar 65,05%, sedangkan untuk program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari target 25,00 % sudah teralisasi 20,00 % atau sebesar 80,00 %, hampir tidak ada kendala yang berarti (Pelaksanaan kegiatan Bidang Kearsipan sudah sesuai dengan perencanaan), akan tetapi masih tetap diperlukan pergeseran guna memaksimalkan capaian target kinerja. Sementara itu adanya kegiatan seminar Candi Agung sebagai Upaya penyelamatan khazanah arsip statis memerlukan pendanaan yang belum ter cover pada pagu anggaran 2024 murni.

2.1.3 Realisasi Keuangan Tahun 2024 semester 1 (satu)

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun anggaran 2024 semester 1 (satu), Dinas Perpustakaan mempunyai kekuatan pendanaan sebesar **Rp. 4.707920.011,-.** kemudian dari pendanaan tersebut terealisasi sampai semester 1 (satu) Tahun 2024 sebesar **Rp 2.040.039.506,- .** atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar **43,33 %.** Untuk lebih jelasnya realisasi program/kegiatan dan sub kegiatan Tahun anggaran 2024 semester 1 (satu) dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tabel 2.3

Realisasi Keuangan 2024 Semester 1 (satu)

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Anggaran Murni (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Capaian Keuangan (%)
1						2	3	4	5	6
DINAS PERPUSTAKAAN								**Rp 4.707.920.011**	**Rp 2.040.039.506**	**43,33%**
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		Rp 4.512.247.011	Rp 1.938.533.156	42,96%
Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel										
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Rp 4.101.263.611	Rp 1.786.457.656	43,56%
2	23	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	Rp 13.986.600	Rp 7.281.000	52,06%
2	23	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.781.500	Rp 2.166.000	57,28%
2	23	01	2	01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 1.380.800	Rp 550.000	39,83%
2	23	01	2	01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.824.300	Rp 4.565.000	51,73%
2	23	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.464.011.146	Rp 1.488.658.724	42,97%
2	23	01	2	01	0001	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.463.021.346	Rp 1.488.272.774	42,98%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2	23	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	989.800	Rp	385.950	38,99%
2	23	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	Rp	8.200.000	Rp	-	0,00%
2	23	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp	8.200.000	Rp	-	0,00%
2	23	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	Rp	126.352.150	Rp	80.479.500	63,69%
2	23	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp	3.759.600	Rp	3.477.000	92,48%
2	23	01	2	06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp	2.415.500	Rp	2.398.000	99,28%
2	23	01	2	06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp	2.831.500	Rp	2.491.500	87,98%
2	23	01	2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp	11.538.650	Rp	10.547.700	91,41%
2	23	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp	19.033.300	Rp	9.501.600	49,92%
2	23	01	2	06	0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	3.250.000	Rp	1.100.000	33,85%
2	23	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	83.523.000	Rp	50.963.700	61,02%
2	23	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp	426.250.900	Rp	184.216.732	43,22%
2	23	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	Rp	119.149.200	Rp	56.257.732	47,22%
2	23	01	2	08	0004	Penyedia Jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum	Rp	307.101.600	Rp	127.959.000	41,67%
2	23	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	Rp	62.462.919	Rp	25.821.700	41,34%
2	23	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp	24.671.000	Rp	11.817.000	47,90%

2	23	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp	26.093.965	Rp	9.099.200	34,87%
2	23	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp	3.250.000	Rp	1.500.000	46,15%
2	23	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp	8.447.950	Rp	3.405.500	40,31%
Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat												
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	Rp	406.733.400	Rp	150.967.500	47,33%
2	23	02	2	01		Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Nilai IKM Layanan Perpustakaan	Rp	193.703.400	Rp	91.838.000	47,41%
2	23	02	2	01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Rp	12.927.000	Rp	1.045.000	8,08%
2	23	02	2	01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Rp	13.262.200	Rp	4.378.000	32,96%
2	23	02	2	01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Rp	77.522.500	Rp	22.184.000	28,62%
2	23	02	2	01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Rp	83.016.900	Rp	64.231.000	77,37%
2	23	02	2	01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.954.800	Rp	-	0,00%

DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2	23	02	2	02		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Peibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	Rp	213.030.000	Rp	59.129.500	27,76%
2	23	02	2	02	0004	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Rp	213.030.000	Rp	59.129.500	27,76%
Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno / koleksi budaya etnis nusantara												
2	23	03				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	Rp	4.250.000	Rp	1.108.000	47,55%
2	23	03	2	02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Rp	4.250.000	Rp	1.108.000	26,07%
2	23	03	2	02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Rp	4.250.000	Rp	1.108.000	26,07%
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Rp	195.673.000	Rp	101.506.350	51,88%
Meningkatnya kepatuhan OPD/ BUMD/ desa terhadap kebijakan Kearsipan												
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentasi tingkat keteraedian Arsip	Rp	118.079.400	Rp	56.151.350	47,55%
2	24	02	2	01		Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Persentase arsip dinamis yang dipelihara dan disusut	Rp	57.380.100	Rp	36.338.100	63,33%
2	24	02	2	01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusuten	Rp	15.550.800	Rp	11.147.100	71,68%
2	24	02	2	01	0003	Pengawasan Arsip dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	41.829.300	Rp	25.191.000	60,22%
2	24	02	2	02		Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persentase arsip terjaga dan arsip statis yang dibuatkan daftarnya	Rp	20.965.300	Rp	-	0,00%
2	24	02	2	02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp	20.965.300	Rp	-	0,00%
2	24	02	2	03		Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan sesuai tingkat kabupaten/kota	Persentase pengguna layanan penyedia informasi akses	Rp	39.734.000	Rp	19.813.250	49,86%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2	24	02	2	03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Rp	39.734.000	Rp	19.813.250	49,86%
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban												
2	24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	Rp	77.593.600	Rp	45.355.000	58,45%
2	24	03	2	01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Rp	58.551.400	Rp	45.355.000	77,46%
2	24	03	2	01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh)Tahun	Rp	58.551.400	Rp	45.355.000	77,46%
2	24	03	2	02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten/Kota	Rp	19.042.200	Rp	-	0,00%
2	24	03	2	02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Rp	19.042.200	Rp	-	0,00%

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dari data diatas persentase capaian realisasi keuangan sebesar **43,33 %,** capaian tersebut dari jumlah pagu anggaran 2024 sebesar **Rp. 4.707.920.011**,- terealisasi sampai dengan semester 1 (satu) sebesar **Rp. 2.040.039.506,-.** Jumlah pagu dan realisasi anggaran tersebut diatas sudah termasuk gaji dan tunjangan ASN dan Belanja operasi lainnya sesuai ketentuan.

Dilihat dari tabel diatas mencerminkan bahwa penyerapan anggaran pada awal Tahun yaitu semester 1 (satu) Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan dan penetapan pagu anggaran yang dilakukan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan **Baik.**

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.1.4 Realisasi Target Capaian Renstra 2023-2026

Tabel 2.4
Capaian Renstra Periode 2023-2026 Dinas Perpustakaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		2024		2025		2026		AKHIR RENSTRA	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	12,00 (skala 20)	82,34 (skala 100)	63,00 *)		13,00		13,50		13,50	
					17,30 (skala 20)								
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	12,70 (skala 20)	49,77 (skala 100)	50,00 *)		12,90		13,00		13,00	
					10,46 (skala 20)								
2	Meningkatnya Ketersediaan arsp yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Persentase tingkat ketersediaan araip	%	90,50	90,46	91,00 *)		91,50		92,00		92,00	
3	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Nilai	78,50	82,54	79,00	81,50	79,50		80,00		80,00	

Keterangan : *) Hasil kesepakatan rakortekbang Tahun 2023

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.1.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk kedepannya

Evaluasi terhadap Rencana Aksi dan gambaran yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

No.	Sasaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya pebaikan system administrasi kearsipan di SKPD, pemerintahan desa dan swasta	1. Melakukan pembinaan arsip terjaga sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Arsip Nasional RI. 2. Melaksanakan audit pengawasan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. adanya aturan dan kebijakan khusus tentang serah simpan arsip statis 4. SKPD harus membuat kebijakan khusus tentang alih media dan reproduksi arsip
2.	Meningkatnya SDM kearsipan yang mempunyai kompetensi dibidang kearsipan menuju tertibnya pengelolaan arsip pemerintahan dan swasta	1) Pengmbangan kompetensi SDM kearsipan sesuai dengan amanah UU 43 Tahun 2009 tentang karsipan. 2) Perlunya koordinasi stakeholder terkait dalam pengembangan SDM kearsipan agar lebih dioptimalkan. 3) Masih dipertukan adanya Bimtek khusus pengelola arsip SKPD dalam penerapan Srikandi
3.	Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	1) Menerapkan jam layanan perpustakaan sesuai aturan protokol kesehatan dan lebih mengoptimalkan layanan perpustakaan digital sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan melalui layanan perpustakaan digital 2) Pengembangan koleksi melalui berbagai kegiatan terus di upayakan, baik penambahan koleksi melalui pendanaan APBD maupun APBN (DAK) subbidang perpustakaan, dan juga berusaha untuk mendapatkan melalui hibah bantuan lainnya 3) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pengembangan perpustakaan. 4) Jangkauan akses layanan perpustakaan keliling agar dapat dimaksimalkan agar mendorong kualitas layanan perpustakaan.
4.	Meningkatnya pengembangan semua jenis perpustakan dan minat baca masyarakat	1) Mendorong semua jenis perpustakaan dalam kegiatan akreditasi perpustakaan 2) Pemetaaan dan peningkatan kualitas SDM perpustakaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Mendorong kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan 4) Kolaborasi, koordinasi dan kerjasama antar stakeholder harus ditingkatkan agar terciptanya masyarakat pembelajar dan berbudaya baca

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dari capaian kinerja Tahun 2024 semester 1 (satu) dapat dilihat beberapa kegiatan yang mengalami keberhasilan/ peningkatan kinerja maupun penurunan kinerja, agar di akhir Tahun 2024 akan datang tidak mengulangi kesalahan / kegagalan seperti Tahun-Tahun sebelumnya, perlu diadakan analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja maupun kegagalan/ penurunan kinerja.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Dari hasil analisis yang dilakukan, beberapa penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja :

a. Memaksimalkan anggaran keuangan yang tersedia meskipun ditengah kekurangan anggaran agar target kinerja SKPD dapat dicapai semaksimal mungkin.
b. Kurangnya SDM yang cakap, kreatif, inovatif dalam rangka pencapaian hasil kinerja yang diinginkan dan pertunya pemahaman konsep layanan publik sesuai standar layanan publik pemerintah.
c. Kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi dan penguatan literasi hendaknya dapat terlaksana dengan maksimal dengan memanfaatkan kekuatan media yang ada sesuai perkembangan zaman.
d. Melaksanakan peningkatan layanan perpustakaan seperti layanan diluar jam kerja, layanan perpustakaan kelliling (sarana armada sudah mencukupi).
e. Pemetaan perpustakaan yang ada diwilayah agar dimaksimalkan untuk lebih mempermudah pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan survey Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).
f. Waktu pelaksanaan yang tepat;
g. Sasaran kegiatan yang tepat;
h. Adanya kerjasama antar bidang dan stekholder lain untuk menunjang kegiatan.

2. Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja

Dari hasil analisis yang dilakukan, beberapa penyebab kegagalan/ penurunan kinerja :

a. Sistem perencanaan kegiatan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan dan terlihat belum matang.
b. Meningkatkan disiplin kinerja layanan perpustakaan dan penguatan sarana dan prasarana dalam mendukung program kinerja perpustakaan dan kearsipan;
c. Waktu pelaksanaan yang kurang tepat menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal;

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

d. Belum adanyanya review terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, sebagai tindak lanjut output dalam mendukung pengurangan jumlah pengangguran pada kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

e. Kurangnya pemahaman pegawai tentang manajemen berbasis kinerja, sehingga belum mengetahui tentang semestinya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pelaporan yang berbasis kinerja.

f. Kurangnya perhatian dari sasaran kinerja mengenai kegiatan yang dilakukan;

Sedangkan capaian kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan target Renstra berjalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tabel 2.5
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar Propinsi Kalsel 2025	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n +2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n +2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,00		12,00 / 57,12	12,50 / 59,50	13,00 / 61,88	13,50 / 64,26	62,34	-	13,00 / 61,88	13,50 / 64,26	Angka Konversi 4,76
2	Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	49,00		12,70 / 60,45	12,80 / 60,93	12,90 / 61,40	13,00 / 61,88	49,77	-	12,90 / 61,40	13,00 / 61,88	Angka Konversi 4,76
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80 Nilai	82	84	86	81,08 (I) 84,37 (II)		84	86	
4	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan			600 orang	650	720	750	3.125		720	750	
5	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah			358 Judul	362	367	373	403		367	373	
6	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip			90,50 %	91,00 %	91,50 %	92,00	90,46		91,50 %	92,00	
7	Persentase arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola			80 %	85 %	90 %	95 %	80 %		90 %	95 %	
8	Persentase arsip terjaga dan arsip statis yang dibuatkan daftarnya			80 %	85 %	90 %	95 %	80 %		90 %	95 %	

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

9	Persentase Pengguna Layanan Penyedia informasi, akses dan layanan kearsipan			80 %	85 %	90 %	95 %	80 %		90 %	95 %	
10	Persentase Tingkat Perlindungan & Penyelamatan Arsip			25 %	25 %	25 %	25 %	-		25 %	25 %	
11	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK			0 berkas	1000 berkas	1000 berkas	1000 berkas	3.492 berkas		1000 berkas	1000 berkas	
12	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana			0 Arsip	10 Arsip	15 Arsip	15 arsip	5 arsip		15 Arsip	15 arsip	
13	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan			0 Arsip	0 Arsip	100 arsip	0 arsip	-		100 arsip	0 arsip	
14	Jumlah arsip statis yang dialih media			0 Arsip	20 Arsip	0 arsip	0 arsip	96 arsip		0 arsip	0 arsip	
15	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang			0 Arsip	0 Arsip	0 arsip	50 arsip	-		0 arsip	50 arsip	
16	Persentase arsip yang digunakan / di akses			0 %	35 %	35 %	35 %	-		35 %	35 %	
17	Jumlah Pengguna arsip yang bersifat tertutup			0 pengguna	7 pengguna	10 pengguna	15 pengguna	-		10 pengguna	15 pengguna	
18	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan			78,50 Nilai	79,00	79,50	80,00	82,54	81,50	79,50	80,00	
19	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
20	Persentase realisasi penyerapan keuangan perangkat daerah			90 %	90 %	90 %	90 %	89,30 %		90 %	90 %	
21	Persentase pengelolaan barang milik daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	-		100 %	100 %	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

22	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD			100 %	100 %	100 %	100 %	-		100 %	100 %	
23	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
24	Persentase barang yang dibeli			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
25	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
26	Persentase barang yang dipelihara dengan baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ada beberapa indikator kinerja yang masih belum dapat dihitung penilaiannya, dikarenakan kegiatan penghitungan nilai IPLM dan TGM akhir Tahun baru bisa diketahui, kemudian dalam bidang kearsipan target kinerja utama tingkat ketersedian arsip mulai berproses dan sampai semester 1 (satu) 2024 yakni rerealisasi sebesar 59,20 % dari target kinerja 91,00 %.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertanggung jawab dalam Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sehingga harus berupaya mengoptimalkan kinerja organisasi antara lain:

2.3.1 Identifikasi Masalah Perpustakaan

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi serta berbasis inklusi sosial memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan;
2) Masih rendahnya rasio ketercukupan koleksi perpustakaan (tercetak dan terekam/digital) dengan populasi jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca;
3) Diverifikasi pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih rendah.
4) Masih Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi pendukung perpustakaan;
5) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan.
6) Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perpustakaan baik perpustakaan daerah maupun perpustakaan keliling yang kurang memadai, baik itu karena rusak ataupun yang sudah usang, sehingga perlu pemeliharaan dan pembaruan.

2.3.2 Identifikasi Masalah Kearsipan

Arsip merupakan rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun permasalahan kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara,

antara lain:

1) Belum adanya diorama arsip sebagai sarana dalam pelayanan kearsipan untuk masyarakat.
2) Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
3) Pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
4) Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kearsipan;
5) Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
6) Status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai
7) Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Kearsipan) di masing-masing OPD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
8) Masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan berbasis digital; dan
9) Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang

Kemudian Berdasarkan sasaran Renstra K/L, beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Perpustakaan Nasional RI			
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat ketercukupan Koleksi	Anggaran kurang memadai, layanan paket koleksi untuk masyarakat kurang memadai, SDM Pustakawan kurang	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
		Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Anggaran kurang memadai, SDM Pustakawan kurang	Peningkatan Jumlah SDM pengelola perpustakaan
		Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka	SDM IT belum memadai, Budaya kerja IT belum sempurna	Telah dibangunnya jaringan e library dan pendaftaran online serta

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

				server pada jaringan perpustakaan digital.
	Arsip Nasional RI			
	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan	Masih rendahnya tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan tersebut terhadap peraturan Perundang-undangan Kearsipan	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Pemerintah Daerah
	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Peran Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa Kurang Optimal	Preservasi arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya
	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Kualitas Pelayanan Kearsipan kepada Publik Masih Rendah	Telah dibangunnya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Dinas Perpustakaan merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut, Pada Prioritas peningkatan implementasi good governance, dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, Dinas Perpustakaan merencanakan Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dan Program Pengelolaan arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Pada Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, dengan sasaran Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, direncanakan Program Pembinaan perpustakaan dan program pelestarian naskah kuno, dengan adanya dua program tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

Sesuai program nasional bidang perpustakaan, ada beberapa perubahan dengan kebijakan nasional yaitu tentang pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, diharapkan nantinya semua perpustakaan yang ada di Indonesia dapat menerapkan program tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat, maka oleh

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

karena itu perlunya kegiatan dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut kegiatan perpustakaan dalam mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui perpustakaan dapat terwujud dengan baik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tabel 2.8 (Tabel T-C 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara lember dari

No.	Rancangan Awal RKPD (Semester 1)					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Bertambah / Berkurang
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	100%	Rp 4.101.263.611	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	100%	Rp 4.172.351.211	Rp 71.087.600
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	Rp 13.986.600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	Rp 13.986.600	Rp -
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 3.781.500	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 3.781.500	Rp -
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 1.380.800	Kpordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 1.380.800	Rp -
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	Rp 8.824.300	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	Rp 8.824.300	Rp -
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3.464.011.146	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3.464.011.146	Rp -

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 org/bulan	Rp 3.463.021.346	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 org/bulan	Rp 3.463.021.346	Rp -
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	Rp 989.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	Rp 989.800	Rp -
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100%	Rp 8.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100%	Rp -	-Rp 8.200.000
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 Orang	Rp 8.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 Orang	Rp -	-Rp 8.200.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	100%	Rp 126.352.150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	100%	Rp 182.696.150	Rp 56.344.000
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 3.759.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 3.759.600	Rp -
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.415.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.415.500	Rp -
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.831.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.831.900	Rp -
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Hulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 11.538.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Hulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 12.648.850	Rp 1.110.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

		Sungai Utara					Sungai Utara					
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 19.033.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 19.033.300	Rp -
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 Laporan	Rp 3.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 Laporan	Rp 2.250.000	-Rp 1.000.000
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	Rp 83.523.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	Rp 139.757.000	Rp 56.234.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 426.250.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 440.098.400	Rp 13.847.600
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 119.149.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 127.396.800	Rp 8.247.600
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 307.101.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 312.701.600	Rp 5.600.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Hulu Sungai Utara	Peraentase barang yang terpelihara dengan baik	100%	Rp 62.462.915	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Hulu Sungai Utara	Peraentase barang yang terpelihara dengan baik	100%	Rp 71.558.915	Rp 9.096.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	Rp 24.671.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	Rp 34.797.000	Rp 10.126.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Rp	26.093.965	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Rp	23.563.965	-Rp 2.530.000
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Rp	3.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Rp	4.750.000	Rp 1.500.000
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	Rp	8.447.950	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	Rp	8.447.950	Rp -
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,00	Rp	406.733.400	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,00	Rp	411.692.000	Rp 4.958.600
		Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	50,00				Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	50,00			
2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	Rp	193.703.400	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	Rp	188.822.000	-Rp 4.881.400
2.1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	Rp	12.927.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	Rp	10.002.000	-Rp 2.925.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	Rp	13.282.200	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	Rp	11.282.200	-Rp	2.000.000
2.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 layanan	Rp	77.522.500	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 layanan	Rp	77.566.100	Rp	43.600
2.1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	623 eksemplar	Rp	83.016.900	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	623 eksemplar	Rp	83.016.900	Rp	-
2.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	Rp	6.954.800	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	Rp	6.954.800	Rp	-
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	1.000 orang	Rp	213.030.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	1.000 orang	Rp	222.870.000	Rp	9.840.000
2.2.3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	9 Perpustakaan	Rp	213.030.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	9 Perpustakaan	Rp	222.870.000	Rp	9.840.000
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1 naskah	Rp	4.250.000	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1 naskah	Rp	4.250.000	Rp	-

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

		Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	362 judul			Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	362 judul			
3.1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	6 eksemplar	Rp	4.250.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	6 eksemplar	Rp	4.250.000	Rp -
3.1.1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	6 eksemplar	Rp	4.250.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	6 eksemplar	Rp	4.250.000	Rp -
4	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentasi tingkat ketersedian Arsip	91,00%	Rp	118.079.400	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentasi tingkat ketersedian Arsip	90,50%	Rp	117.980.600	-Rp 98.800
4.1	Pengelolaan arsip dinamis daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola	85%	Rp	57.380.100	Pengelolaan arsip dinamis daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola	80%	Rp	57.345.300	-Rp 34.800
4.1.1	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 berkas	Rp	15.550.800	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 berkas	Rp	15.550.800	Rp -
4.1.2	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 laporan	Rp	41.829.300	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 laporan	Rp	41.794.500	-Rp 34.800
4.2	Pengelolaan arsip statis daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip terjaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	85,00%	Rp	20.965.300	Pengelolaan arsip statis daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip terjaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	80%	Rp	20.901.300	-Rp 64.000
4.2.1	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 arsip	Rp	20.965.300	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 arsip	Rp	20.901.300	-Rp 64.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

4.3	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	85,00%	Rp	39.734.000	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	80%	Rp	39.734.000	Rp -
4.3.1	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15 penggun a	Rp	39.734.000	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 penggun a	Rp	39.734.000	Rp -
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase tingkat Perlindungan dan Penyelamatan arsip	25,00%	Rp	77.593.600	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase tingkat Perlindungan dan Penyelamatan arsip	25,00%	Rp	77.593.600	Rp -
5.1	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kab/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	750 berkas	Rp	58.551.400	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kab/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	750 berkas	Rp	58.551.400	Rp -
5.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	750 arsip	Rp	58.551.400	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	750 arsip	Rp	58.551.400	Rp -
5.2	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala Kab/Kota	10 Arsip	Rp	19.042.200	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala Kab/Kota	10 Arsip	Rp	19.042.200	Rp -
5.2.1	Pemulihan dan Penyimpanan arsip akibat bencana	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	10 Arsip	Rp	19.042.200	Pemulihan dan Penyimpanan arsip akibat bencana	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	10 Arsip	Rp	19.042.200	Rp -
TOTAL PAGU ANGGARAN					Rp	4.707.920.011	TOTAL PAGU ANGGARAN				Rp	4.783.867.411	Rp 75.947.400

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dari tabel diatas yaitu review prioritas pagu anggaran Tahun 2024, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara membangdingkan antara Pagu sesuai rancangan awal semester 1 (satu) sebesar **Rp. 4.707.920.011,-** dengan pagu analisis prioritas sesuai kebutuhan yang mana pagu yang diberikan pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 4.783.867.411,-.** Dengan penambahan anggaran sebesar **Rp. 75.947.400**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan dengan adanya kamus usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara,tidak adanya usulan masyarakat pada Dinas Perpustakaan pada rencana kerja perubahan Tahun anggaran 2024.

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL & PROPINSI

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Visi-Misi Presiden Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju : "Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" diterjemahkan dalam 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
2. Pembangunan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrasturktur untuk Ekoriomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 Agenda Pembangunan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki keterkaitan dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut yaitu bahwa dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta Melakukan revolusi karakter bangsa dengan melaksanakan program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan dari program tersebut, perlu keselarasan dengan program dan kegiatan pada Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI.

a. Bidang Perpustakaan

- Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar membaca, Perpusnas RI memberikan fasilitas pembangunan Perpustakaan model tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan, dan fasilitas perpustakaan keliling serta fasilitas pengembangan perpustakaan umum desa/ kelurahan.

  Kegiatan tersebut selaras dengan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan diadakannya layanan perpustakaan daerah, layanan perpustakaan keliling, serta pembinaan dan pengembangan minat baca pada semua lapisan masyarakat.

- Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perpustakaan, teknis perpustakaan, manajemen perpustakaan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan diadakannya Bimbingan teknis untuk Pengelola Perpustakaan Desa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi, salah satunya kegiatan adalah peningkatan jam layanan perpustakaan umum daerah (lembur kerja layanan perpustakaan
- Peningkatan kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi dengan memaksimalkan layanan perpustakaan digital iHSU, yaitu dengan penambahan koleksi digital.
- pengembangan koleksi daerah harus dapat diakomodir sebagai upaya penyelamatan lokal konten sebagai sebuah kekhasan budaya lokal yang dapat terpelihara dengan baik. Disinilah peran perpustakaan hadir untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat peradaban daerah dan pusat informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Peningkatan promosi, publikasi dan event-event yang bertajuk pengembangan minat baca harus dapat dilaksanakan sebagai upaya pemasyarakatan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, karena tanpa adanya publikasi dan promosi perpustakaan, lama kelamaan perpustakaan akan ditinggalkan oleh pemustakanya.
- Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah salah satu upaya berbasis inklusi adalah program nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

b. Bidang Kearsipan

- Dalam rangka peningkatan apresiasi pemerintah terhadap Arsiparis,pengelola kearsipan, ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui Bimtek Kearsipan yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hulu Sungai Utara dengan peserta dari seluruh SKPD se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Sarana dan prasarana kearsipan adalah aspek yang memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depo Arsip untuk penyimpanan. Hal ini sudah terealisasi, Hulu Sungai Utara telah memiliki depo arsip berlantai 2 untuk penyimpanan arsip daerah. Tetapi untuk Tahun depan kami berharap agar ditambah depo arsip karena penyimpanan yang ada hampir penuh.
- Upaya peningkatan pengembangan di bidang teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip telah mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di bidang kearsipan. ANRI telah membangun *e*-arsip dengan mengimplementasikan SIKD dan SIKN untuk mendukung birokrasi modern.

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Atas dasar keselarasan tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaedah kearsipan dengan efisien dan efektif.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Propinsi

Strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yangselaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategis dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukan bagaimana cara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencapai tujuan, sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan target kinerja hasil (outcome) Program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bagi setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Perpustakaan & Kearsipan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun2021-2026

Visi : Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan daya saing manusia yang cerdas dan terampil melalui kesadaran untuk melakukan meningkatkan minat baca	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan Ketercukupan Jumlah	Mengoptimalkan pelayanan Perpustakaan baik yang konvensional maupun melalui teknologi informasi digital
		Ketercukupan Jumlah Koleksi	Meningkatnya Koleksi perpustakaan
		Ketercukupan tenaga Perpustakaan	Meningkanta ketersediaanTenaga Pengelola Perpustakaan
		Tingkat Kunjungan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan
		Jumlah Perpustakaan yangBer SNP	Meningkatnya Perpustakaan yang Berstandar Nasional Perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

		Keterlibatan Masyarakatdalam kegiatan Perpustakaan	Melakasanakan kegiatan yang dapat menggugah masyarakat untuk datangke Perpustakaan melaluiSosialisasi, Rakoor, Bimtek, Webinar, Lomba- lomba dan Roudshow ke Kab/Kota
		Anggota perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Anggota Perpustakaan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan melakukan komitmen menerapkan NSPK Kearsipan dan Perpustakaan yang berorintasi Layanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan PenggunaanArsip Dinamis
			Pemeliharaan dan PenyusutanArsip Dinamis
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses ArsipStatis
			Penyediaan Informasi, Aksesdan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kote Melalui JIKN

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai Renstra Dinas Perpustakaan 2023-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembaungan Daerah (RPD) 2023-2026, maka rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renja SKPD Dinas Perpustakaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan
Dinas Perpustakaan Kab. Hulu Sungai Utara

Tujuan RPD : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik			
Sasaran RPD : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Peningkatan tata kelola dan manajemen kualitas pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Terpenuhinya administrasi keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana penunjang perangkat daerah
Tujuan RPD : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Sasaran RPD : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan			
Meningkatkan budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat melalui pembudayaan Kegemaran Membaca	Pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
			Peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum daerah sesuai perkembangan teknologi informasi
			Peningkatan koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat
			Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
	Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Peningkatan Penelusuran Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara	Terlaksananya seleksi naskah kuno dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara
Tujuan RPD : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik			
Sasaran RPD : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Meningkatkan kepatuhan OPD/BUMD/desa Terhadap kebijakan kearsipan	Meningkatnya kepatuhan OPD/BUMD/desa Terhadap kebijakan kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kearsipan
Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Pengelolaan, perlindungan, dan Penyelamatan Arsip	Terkelolanya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan juga mengacu kepada sasaran prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Pada anggaran perubahan Tahun anggaran 2024, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.783.867.411,-** terdiri dari 5 Program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan, adapun rincian program / kegiatan / sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2) Kegiatan Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyedian gaji dan tunjangan ASN
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor
   - Sub Kegiatan Penyedian peralatan rumah tangga
   - Sub Kegiatan Penyedian bahan logistik kantor
   - Sub Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5) Kegiatan Penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   - Sub Kegiatan Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
   - Sub Kegiatan Penyedia Jasa pelayanan umum kantor
6) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

II. **Program Pembinaan Perpustakaan**

1) Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standard nasional perpustakaan
   - Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
   - Sub Kegiatan Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
2) Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pengembangan literasi berbasis inklusi social

III. **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

1) Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

IV. **Program Pengelolaan Arsip**

1) Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
   - Sub Kegiatan Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota
2) Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Akusisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis
3) Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota

V. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

1) Kegiatan Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki rentensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun
   - Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun
2) Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan arsip akibat bencana

4.2. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Adapun Program/Kegiatan/Sub kegiatan rumusan pendanaan Dinas Perpustakaan RAPBD perubahan Tahun 2024 dengan indikator kinerjanya serta perkiraan program / kegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tabel 4.1 (Tabel T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah perubahan Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

lembar dari

Kode	urusan / bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana	(Berkurang/Bertambah)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	79,00	Rp 4.172.354.211		Rp 71.087.600	79,50	Rp 3.251.780.808
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	Hulu Sungai Utara	100%	Rp 13.986.600		Rp -	100%	Rp 13.329.000
2.23.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hulu Sungai Utara	3 dokumen	Rp 3.781.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	1 Dokumen	Rp 3.000.000
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Hulu Sungai Utara	2 dokumen	Rp 1.380.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	1 Dokumen	Rp 1.500.000
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hulu Sungai Utara	8 laporan	Rp 8.824.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	3 Laporan	Rp 7.326.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	Hulu Sungai Utara	100%	Rp 3.464.011.146		Rp -	90%	Rp 2.685.434.850
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hulu Sungai Utara	336 org/bulan	Rp 3.463.021.346	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp -	25 Org / Bulan	Rp 2.684.434.850
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hulu Sungai Utara	2 laporan	Rp 989.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	1 Laporan	Rp 1.000.000
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelancaran adminsitrasi kepegawaian SKPD	Hulu Sungai Utara	100%	Rp -		-Rp 8.200.000	100,00%	Rp 10.500.000
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Hulu Sungai Utara	7 Orang	Rp -	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-Rp 8.200.000	2 Orang	Rp 10.000.000
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	Hulu Sungai Utara	100%	Rp 182.696.150		Rp 55.344.000	100%	Rp 108.500.058
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	Rp 3.759.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	1 Paket	Rp 4.500.000
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlangkapan Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	Rp 2.415.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	1 Paket	Rp 7.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	Rp	2.831.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	-	1 Paket	Rp 6.000.000
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	Rp	12.648.850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	1.110.000	1 Paket	Rp 25.000.058
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	Rp	19.033.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	-	1 Paket	Rp 15.000.000
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Hulu Sungai Utara	3 Laporan	Rp	2.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-Rp	1.000.000	10 Laporan	Rp 6.000.000
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hulu Sungai Utara	15 laporan	Rp	139.757.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	56.234.000	20 Laporan	Rp 45.000.000
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hulu Sungai Utara	100%	Rp	440.098.400		Rp	13.847.600	100%	Rp 335.000.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	12 laporan	Rp	127.396.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	8.247.600	12 Laporan	Rp 120.000.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	12 laporan	Rp	312.701.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	5.600.000	12 Laporan	Rp 215.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.23.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	Hulu Sungai Utara	100%	Rp	71.558.915		Rp	9.096.000	100%	Rp	85.000.000
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Hulu Sungai Utara	10 unit	Rp	34.797.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	10.126.000	10 Unit	Rp	25.000.000
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hulu Sungai Utara	4 unit	Rp	23.563.965	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-Rp	2.530.000	4 Unit	Rp	27.500.000
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hulu Sungai Utara	15 unit	Rp	4.759.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	1.500.000	25 Unit	Rp	7.000.000
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hulu Sungai Utara	20 unit	Rp	8.447.950	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp	-	15 Unit	Rp	5.500.000
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	Hulu Sungai Utara	69,00 50,00	Rp	411.692.000		Rp	4.958.600	70,50 *) 55*)	Rp	370.000.000
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hulu Sungai Utara	82,00	Rp	188.822.000		-Rp	4.881.400	84,00	Rp	280.000.000
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Hulu Sungai Utara	3 Perpustakaan	Rp	10.002.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-Rp	2.925.000	3 Perpustakaan	Rp	15.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	5 Perpustakaan	Rp 11.282.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-Rp 2.000.000	17 Perpustakaan	Rp 25.000.000
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Hulu Sungai Utara	3 layanan	Rp 77.566.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp 43.600	4 Layanan	Rp 125.000.000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	623 eksemplar	Rp 83.016.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	800 Eksemplar	Rp 115.000.000
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	3 dokumen	Rp 6.954.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	3 Dokumen	Rp 10.000.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	1.000 orang	Rp 222.870.000		Rp 9.840.000	700 Orang	Rp 80.000.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Hulu Sungai Utara	9 Perpustakaan	Rp 222.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp 9.840.000	9 Perpustakaan	Rp 80.000.000
02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	Hulu Sungai Utara	1 naskah	Rp 4.250.000		Rp -	1 naskah	Rp 10.000.000
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terdaftar / terdaftar yang ada dimilayahnya (judul)		362 judul				367 Judul	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Hulu Sungai Utara	6 eksemplar	Rp 4.250.000		Rp -	367 Judul	Rp 10.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

	Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota									
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Hulu Sungai Utara	6 eksemplar	Rp 4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	70 Eksemplar	Rp 10.000.000	
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentasi tingkat ketersediaan Arsip	Hulu Sungai Utara	91,00%	Rp 117.980.600		-Rp 98.800	91,50%	Rp 400.000.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan arsip dinamis daerah Kab/Kota	Persentase arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola	Hulu Sungai Utara	85,00%	Rp 57.345.300		-Rp 34.800	90,00%	Rp 250.000.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Hulu Sungai Utara	50 berkas	Rp 15.550.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	1.000 Berkas	Rp 125.000.000	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	10 laporan	Rp 41.794.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-Rp 34.800	10 Laporan	Rp 125.000.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan arsip statis daerah Kab/Kota	Persentase arsip tenaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	Hulu Sungai Utara	85,00%	Rp 20.901.300		-Rp 64.000	90%	Rp 75.000.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Hulu Sungai Utara	25 arsip	Rp 20.901.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-Rp 64.000	35 Arsip	Rp 75.000.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	Hulu Sungai Utara	85,00%	Rp 39.734.000		Rp -	90%	Rp 75.000.000	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Hulu Sungai Utara	15 pengguna	Rp 39.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	20 Pengguna	Rp 75.000.000
02.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Hulu Sungai Utara	25,00%	Rp 77.583.600		Rp -	25%	Rp 100.000.000
2.24.03.2.01	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kab/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Hulu Sungai Utara	750 berkas	Rp 38.551.400		Rp -	1.000 Berkas	Rp 65.000.000
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Hulu Sungai Utara	750 arsip	Rp 38.551.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	1.000 Arsip	Rp 65.000.000
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Hulu Sungai Utara	10 Arsip	Rp 19.042.200		Rp -	15 Arsip	Rp 35.000.000
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	Hulu Sungai Utara	10 Arsip	Rp 19.042.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp -	15 Arsip	Rp 35.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN					**Rp 4.783.867.411**		**Rp 75.947.400**		**Rp 4.131.760.908**

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB V
PENUTUP

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada semester 1 (satu) yaitu Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dilandasi dengan Visi dan Misi dalam upaya membina dan mengembangkan sektor Perpustakaan dan Kearsipan sehingga terwujudnya masyarakat Hulu Sungai Utara Gemar Membaca Serta Terkelolanya Manajemen Arsip Secara Dinamis dan Profesional.

Dari capaian dan analisa kinerja diperlukan peningkatan terutama fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan, serta terselenggaranya Koordinasi dan Komunikasi yang baik antar Bagian Kesekretariatan dan Bidang Bidang pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri maupun dengan Instansi/Dinas/Lembaga terkait lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dan Departemen/Kementerian terkait.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai antisipasi untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Semester II Tahun 2024 diantaranya :

- ✓ Meningkatkan kinerja personal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya komitmen, integritas dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki nilai ASN Berakhlak
- ✓ Meningkatkan kesatuan persepsi dan rasa kebersamaan dalam pelaksanaan program serta meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi baik internal maupun eksternal dalam mengatasi permasalahan yang ada
- ✓ Melanjutkan Program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan sektor Perpustakaan dan Kearsipan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- ✓ Perlunya dukungan dana untuk menunjang Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan serta sasaran dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 ini kami buat untuk diketahui, dan semoga Allah SWT meridhoi usaha kita sekalian.

Amuntai, Juli 2024
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

H. KARYANADI, S.Pd, M.AP
Pembina
NIP. 19710703 199803 1 010

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Norman Umar (Terminal Banua Lima) Telp./Fax (0527) 61048

Email : dinas.perhubunganhsu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun anggaran 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana ini akan menjadi acuan dan kerangka dalam pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024.

Dengan tersusunnya rencana kerja Perubahan ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Amuntai, September 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. HAMDANI, S.Sos. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650701 198602 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN (2022)	II-5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubugan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	III-24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	III-26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	IV-28
BAB V PENUTUP	V-35
LAMPIRAN RKAP	36

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023	II-7
Tabel 2.2	Review Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan	II-12
Tabel 2.3	Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-15
Tabel 2.4	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024	II-19
Tabel 2.5	Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024 kabupaten Hulu Sungai Utara	II-20
Tabel 2.6	SDG's, Kemiskinan, Stunting	II-22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	III-24
Tabel 4.1	Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-Rkpd) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	IV-30

BAB I



PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Rancangan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra 2023 - 2026 dan pedoman yang memuat, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas Jalan;
16. Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang terminal Transportasi Jalan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022 (Lemabaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5).
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 tahun 2018 tentang rencana strategis perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN (2022)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Renstra yaitu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2023 – 2026.

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan 11 kegiatan yang berisi 19 sub kegiatan dan total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022 Sebagai Berikut :

Dari pos pendapatan diperoleh sebesar Rp. 991.900.000,- dari target Rp. 813.650.000,- (121,91 %) dengan perincian sebagai berikut :

Dari pos pendapatan diperoleh sebesar Rp. 991.900.000,- dari target Rp. 813.650.000,00,- (121,91%) dengan perincian sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

   Retribusi jasa umum direalisasikan sebesar Rp. 577.810.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 425.000.000,- jadi mencapai (135,96 %), dengan perincian sebagai berikut:

   - retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp 83.490.000,- dari target Rp 75.000.000,- (111,32%)
   - retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) sebesar 494.320.000,- dari target 350.000.000,- (141,23%)

2. Retribusi Jasa Usaha

   Retribusi jasa usaha direalisasikan sebesar Rp. 414.090.000,- dari target sebesar Rp. 388.650.000,- (106,55 %) dengan perincian sebagai berikut :

   - retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 3.200.000,- dari target Rp 10.000.000,- (32 %) Retribusi pemakaian kekayaan daerah rendah dalam hal ini pemakaian bus,karena masih masa transisi dari pandemi ke masa endemi sehingga bus beroperasi belum maksimal.
   - retribusi terminal sebesar Rp 11.840.000,- dari target Rp 7.550.000,- (156,82 %)
   - retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 395.500.000,- dari target Rp 366.000.000,- (108,06 %)
   - retribusi pelayanan kepelabuhan sebesar Rp 3.550.000,- dari target Rp 5.000.000,- (71%)
   - Retribusi izin trayek sebesar Rp. 0,- dari target Rp.100.000,- (0%)

Sedangkan belanja secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.450.389.462,- dari Rp. 5.548.287.233,- yang dianggarkan (80,21%) dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai

      Belanja Pegawai direalisasikan sebesar Rp. 1.994.921.493,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.820.817.700,- jadi mencapai (70,72%).

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Belanja barang dan jasa direalisasikan sebesar Rp 1.935.839.969,- dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.205.355.533,- jadi mencapai (87,78%).

2. Belanja Modal
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

      Belanja modal untuk peralatan dan mesin direalisasi sebesar Rp. 221.665.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 222.294.000,- jadi mencapai (99,72 %).

   b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

      Belanja modal untuk gedung dan bangunan direalisasi sebesar Rp. 297.863.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp 299.820.000,- mencapai (99,35%).

   c. Belanja Modal Aset Lainnya

      Belanja Modal Aset Lainnya direalisasikan sebesar Rp. 0,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 0,- mencapai (0%).

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERHUBUNGAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Lembar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DISHUB) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja DISHUB tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.01	01	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan anggaran kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.02	02	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DISHUB) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kerangka Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja DISHUB) tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	15	01	2.02	03	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketepatan pertanggung jawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.06	02	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang diberi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan	1337 buah	1337 buah	216 buah	216 buah	100%	216 buah	1337 buah	100%
2	15	01	2.06	03	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase peralatan rumah tangga kantor yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.06	04	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.06	05	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.06	09	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penerimaan SPPD yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.08	02	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	95%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DISHUB) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurusan Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja DISHUB) tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia & terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.09	02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional/Lapangan yang dipelihara	40 Unit	40 unit	40 unit	40 Unit	100%	40 unit	40 unit	100%
2	15	01	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik (dapat dioperasikan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan baik**	**90%**	**88%**	**90%**	**88%**	**98%**	**90%**	**88%**	**98%**
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesadaran Penggunna Jalan Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2.01	03	- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian disiplin yang melibatkan aparat kemanunan	64 Kali Kegiatan	64 Kali Kegiatan	16 kali kegiatan	16 kali kegiatan	100%	16 Kali Kegiatan	64 kali kegiatan	100%
2	15	02	2.02		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Berfungsinya seluruh fasilitas Lalu Lintas	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	90%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DISHUB) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelantan Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja DISHUB) tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	15	02	2.02	02	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelengkap Jalan yang terpasang	11 Paket	11 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	11 Paket	100%
2	15	02	2.02	04	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas pelengkap jalan yang disediakan	172 buah	170 buah	43 buah	41 buah	95%	43 buah	170 buah	99%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terciptanya kenyamanan dan kemudahan terminal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2.03	04	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang dipelihara	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	100%	5 buah	5 buah	100%
2	15	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**persentase terkelolanya pelayaran dengan baik**	**95%**	**95%**	**95%**	**94%**	**99%**	**95%**	**94%**	**99%**
2	15	03	2.07		Penataan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLASD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	03	2.07	02	- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan pengendalian alur sungai	12 Alur sungai	12 alur sungai	12 alur sungai	12 Alur sungai	100%	12 alur sungai	12 alur sungai	100%
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Pemeliharaan Pengamanan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terciptanya ketenteraman dan keselamatan dermaga	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	95%

Kode						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DISHUB) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelauran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja DISHUB tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	15	03	2.13	03	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang terpelihara	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	100%	3 buah	3 buah	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan Tugas Pokok Dinas Perhubungan, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni transportasi yang efektif berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, ketersediaan aksesbilitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam Pelayanan masyarakat di bidang perhubungan.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Dishub				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Nilai sakip Dinas Perhubungan	-	-	A	A	A	A	A	-	A	A	-
2	Desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	-	-	96.80	97.26	97.72	98.17	95.89	96.35	96.80	97.26	-
3	Tingkat pemanfaatan terminal (%)	-	-	85.79	90.47	95.14	99.07	66.92	72.90	85.79	86.73	-
4	Tingkat pemanfaatan dermaga (%)	-	-	60.73	62.83	64.92	65.97	56.23	57.70	60.73	62.57	-
5	Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan (%)	-	-	74.09	76.49	78.89	81.30	28.56	54.66	74.09	82.55	-

Pada Tahun 2024 untuk indikator kinerja utama "Nilai Sakip Dinas Perhubungan" di targetkan mendapatkan kategori A, dengan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat berserta tim yang terkait, untuk realisasi sampai akhir tahun 2022 belum dapat direalisasikan karena untuk hasil penilaiannya akan ditetapkan di tahun 2023 sehingga belum dapat di realisasikan.

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi" sebesar 96,35% dari target yang telah ditetapkan RPJMD pada tahun 2022 sebesar 96,35% sehingga persentase Capaian realisasi dari target tahun tahun 2022 sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2022 telah tercapai dengan perbandingan jumlah desa yang terhubung dengan moda transportasi berjumlah 211 desa dari jumlah desa

se Kabupaten sebanyak 219 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang didukung dengan kegiatan pembersihan alur sungai sehingga memperlancar alur transportasi sungai.

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase tingkat pemanfaatan terminal" pada tahun 2022 sebesar 72,90% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 81,12% sehingga persentase capaian realisasi dari target tahun 2022 sebesar 89,86%. Dengan formulasi perhitungan Jumlah angkutan umum yang masuk ke terminal perminggu dibagi jumlah angkutan se Kabupaten. Dengan jumlah yang di data oleh bidang angkutan dan terminal yang berjumlah 4680 buah angkutan umum yang masuk/beraktivitas sampai triwulan IV (Januari s.d Desember) dari 5 buah terminal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta di dukung dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2022 sudah baik.

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase tingkat pemanfaatan dermaga" pada tahun 2022 sebesar 57,70% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 58,64% sehingga persentase capaian realisasi dari target tahun 2022 sebesar 98,39%. Dengan formulasi perhitungan jumlah angkutan sungai yang bersandar di dermaga perminggu dibagi jumlah angkutan sungai se kabupaten. Dengan jumlah yang di data oleh bidang angkutan dan kepelabuhan yang jumlah angkutan sungai yang bersandar di dermaga sampai triwulan IV (Januari s.d Desember) berjumlah 6612 buah dari 25 buah dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta didukung dengan sub kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2022 sudah baik.

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase penuruman pelanggaran lalu lintas dan angkutan" pada tahun 2022 sebesar 54,66% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 (71,68%), sehingga persentase Capaian realisasi dari target tahun 2022 sebesar 76,26%. Dengan formulasi perhitungan jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah angkutan umu yang wajib uji tahun 2022. Hasil tersebut diperoleh dengan dukungan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah angkutan yang lulus uji sampai triwulan IV (Januari s.d Desember) berjumlah 1137 unit dari target di tahun 2022 berjumlah 1491 unit angkutan yang lulus uji

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, terutama di bidang teknis, karena banyak tenaga teknis di Dinas Perhubungan yang akan pensiun, sehingga di perlukan pelatihan bagi tenaga pengganti di bidang teknis tersebut.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana bidang darat
3) Masih kurangnya sarana dan prasarana bidang sungai dan danau

4) Perlunya rehabilitasi beberapa sarana dan prasarana di bidang darat dan sungai dan danau, karena sebagaian sudah mulai rusak atau tidak layak pakai.
5) Masih kurangnya kesadaran para sopir untuk masuk ke terminal dan melaporkan jumlah penumpangnya.
6) Masih kurangnya kesadaran pemilik kapal untuk melaporkan jumlah penumpang dan barang yang dimuat dalam kapal baik ketika datang maupun ketika berangkat.
7) Masih adanya kapal yang beroperasi dimana tingkat keselamatan penumpang kurang diperhatikan (sangat diabaikan).
8) Untuk alur sungai masih adanya pembangunan jembatan di alur Sungai Nagara dan Sungai Luang Kecamatan Babirik, dimana ruang bebas di atas permukaan air sangat rendah sehingga mengganggu kapal berlayar pada saat kondisi air sungai dalam, hal tersebut berlangsung setiap tahun.
9) Adanya kebiasaan masyarakat yang berada disepanjang aliran sungai, apabila membersihkan lahan pertanian berupa enceng gondok dan gulma lainnya di buang ke sungai, dan limbah kayu dan bambu beserta rantingnya yang hanyut dibawa air akibat erosi di alur sungai baik dari Sungai Tabalong dan Balangan sehingga mengakibatkan alur sungai diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami penyempitan bahkan tertutup oleh limbah tersebut.
10) Adanya penambahan PJU yang dilimpahkan Disperkim LH ke Dishub.
11) Adanya pelimpahan pengelolaan CCTV dari Diskominfo ke Dishub.
12) Masih kurangnya Alat pengujian pada UPT PKB Banjang untuk melengkapi syarat akreditasi dari B ke A.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sama halnya dengan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini, RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026.

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SKPD : Dinas Perhubungan Kab. HSU

Lembar ....dari.....

Rancangan Awal RKPD						Analisa Hasil Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	30,803,300	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	52,453,100	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	788,996,000	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	793.996.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 orang/ bulan	4,688,763,444	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	379 orang/bula n	4.688.763.756	
4	Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	9,994,330	4	Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	90.902.750	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	9,998,800	5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	9,998,800	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24,422,300	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24,422,300	
7	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	53,730,300	7	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	78.306.700	

Rancangan Awal RKPD						Analisa Hasil Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program / kegiatan / Sub . Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138,599,000	8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	481,369,000	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kantor Induk Dishub dan UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,551,076	9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kantor Induk Dishub dan UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	188,549,946	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	33 buah	246,009,750	10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	33 buah	1,015,840,750	
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	10,000,000	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Perajatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	8,950,000	
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1,147,800,000	12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1,147,252,000	
13	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	8 Dokumen	553,300,000	13	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	8 Dokumen	481,300,000	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	1,456,506,999	14	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	103 Unit	2,080,049,999	
15	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten HSU	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	21 Unit	5,097,158,800	15	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten HSU	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	21 Unit	6,516,330,000	

16	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal palampitan, hulu pasar, pasir mas, sungal pandan,babirik	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	17,169,500	16	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal palampitan, hulu pasar, pasir mas, sungal pandan,babirik	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	19,164,800	
17	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten HSU	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	526,650,000	17	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten HSU	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	361,650,000	
18	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dermaga Babirik, Danau Panggang dan Sungai Pandan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	740,373,000	18	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dermaga Babirik, Danau Panggang dan Sungai Pandan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	1,092,373,600	
	Jumlah				**15,680,830,001**		**Jumlah**				**19.120.082.501**	

Dari tabel diatas ada penambahan anggaran yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk membeli Mobil Patwal Rp. 650.000.000,- dan Kendaraan Roda Dua Rp. 120.000.000,- guna untuk pengawalan Pejabat dan pemantauan serta pengaturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan atau kemacetan.

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang semula Rp. 1.456.509.999,- bertambah menjadi Rp. 2.080.049.999,- , karena untuk Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan serta tercapainya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota di setiap Kecamatan dengan merata, maka dibutuhkan penambahan anggaran pembuatan Marka Jalan Zebra Cross Kecamatan Amuntai Tengah Rp. 200.000.000, pembuatan Marka Jalan Zebra Cross Kecamatan Haur Gading Rp. 200.000.000,- Pengadaan Warning Light di Desa Pamintangan Rp. 199.000.000,- Pemasangan Tiang Listrik dan Lampu

PJU di Desa Tapus Dalam dan Banyu Tajun Hulu Kecamatan Sungai Pandan Rp. 222.500.000,-. Dan Pengadaan Marka Jalan Zebra Cross Rp. 99.500.000 untuk perlengkapan jalan masih sangat minim serta perlu dipelihara kembali karena sudah mulai pudar.

Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp. 1.491.171.400,- karena perlu penambahan untuk pembayaran listrik PJU yang mana anggaran tidak cukup untuk membayar pada 3 bulan sampai dengan akhir tahun sehingga harus ditambahkan sebesar Rp. 790.998.100 untuk 3 bulan, penambahan untuk Belanja Komponen-komponen Rambu dan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp. 62.000.000, untuk Belanja Alat Listrik PJU sebesar Rp. 59.987.800, Belanja Meterisasi PJU sebesar Rp. 180.000.000 dan untuk Meningkatkan kelancaran Administrasi Pelayanan pada kantor UPT PKB Banjang perlu dilakukan Instalasi dan Upgrade Server untuk Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Full Cycle sehingga ditambahkan anggaran sebesar Rp.58.500.000,-.

Juga terkait Kinerja Utama yaitu Desa yang terhubung dengan moda transportasi, dengan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau berkurang Rp. 165.000.000,- karena untuk Pembersihan Alur Sungai cukup rendah karena berdasarkan survei alur sungai dan usulan dari desa untuk pembersihan alur sungai juga minim sehingga perkiraan anggaran masih banyak untuk anggaran pembersihan alur sungai sampai akhir tahun sehingga dipindahkan ke Sub Kegiatan yang kekurangan anggaran

Selain itu terdapat usulan penambahan anggaran untuk sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yaitu Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang, Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah dan Desa Sungai Durait Kecamatan Babirik, yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menopang ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat setempat. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau memiliki pagu Rp. 740.373.600,- tetapi untuk mengakomodir hal tersebut, maka diperlukan dana sebesar Rp. 350.000.000 sehingga menjadi Rp 1.090.373.600,-.

2.5.Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengumpulan informasi dari beberapa penelitian tersebut terkait usulan program dan kegiatan untuk Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat di lihat di tabel berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Hulu Sungai Utara

SKPD : Dinas Perhubungan

No	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Guntung RT.02 dan 03 Kec. Amuntai Utara Kab.HSU, Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Guntung	Pembersihan Alur Sungai	1 Kali/Kegiatan	-
2	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Bayur RT 01 dan RT 03, Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Bayur	Pembersihan Alur Sungai	1 Kali/Kegiatan	-
3	Kegiatan Penetapan Lintas	Desa Sungai Luang Hulu,	Pembersihan Alur Sungai	1 Kali/Kegiatan	Diterima

	Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara			
4	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Pulau Damar RT. 004 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Banjang, Pulau Damar	Pembersihan Alur Sungai	1 Kali/Kegiatan	Persyaratan Lengkap
5	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan	Persimpangan Desa, Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Tambalangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	1 Unit	Dikembalikan

Tabel. . Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Urusan Bidang Perhubungan					
No	**Nama Dewan**	**Program**	**Kegiatan**	**Usulan**	**Lokasi**
1	Munawari, S.Sos	Program Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembersihan Alur Sungai	Desa Palimbangan Gusti Rt. 06 Kecamatan Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara. ,

2	H. A. Musadik, S.Sos. M.Si	Program Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Danau	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa tangkawang kecamatan haur gading, Kab. Hulu Sungai Utara, ,
3	H. A. Musadik, S.Sos. M.Si	Program Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Desa pamintangan kecamatan amuntai utara-desa lok soga kecamatan haur gading, Kab. Hulu Sungai Utara, ,
4	H. A. Musadik, S.Sos, M.Si	Program Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Desa lok soga-desa pihaung kecamatan haur gading, Kab. Hulu Sungai Utara, ,
5	Hj. Masni	Program Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Danau	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa pasar senin rt6 , kec amuntai tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, ,
6	Teddy Suryana, S.Pd.I, SE, MM	Program Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	SMPN 2 Sungai Pandan, SMAN 1 Sungai Pandan, SMPN 3 Sungai Pandan, MTsN Sungai Pandan Kecamatan Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, ,

7	Hj. Erlyn Febrina, SE, MAB	Program Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembersihan Alur Sungai	Desa Manurap Kecamatan Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara, .
8	Hj. Erlyn Febrina, SE, MAB	Program Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Danau	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Paminggir RT.09 Kecamatan Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara, .

Pada Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ini, untuk Program kegiatan usulan yang ada tidak bisa terealisasi karena Pagu Indikatif pada Dinas Perhubungan tidak mencukupi dengan usulan yang ada. Salah satunya pada Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau hanya memiliki Pagu Indikatif sebesar Rp.31.374.475 sedangkan untuk membangun 1 buah tambatan perahu membutuhkan Dana Sekitar Rp.200.000.000.

Sebagai tindak lanjutnya, untuk Usulan Musrembang Kecamatan yang tidak masuk pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 tetapi memenuhi persyaratan akan di usulkan ke Provinsi / Pusat melalui Dana APBD Provinsi atau APBN.

Tabel SDG's, Kemiskinan dan Stunting

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024	Indikatif Alokasi	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	3	Rp.31.374.475	APBD

		Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					
2	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Dermaga/Pelabuhan Rakyat antar desa untuk SDG's

BAB III



TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementrian Perhubungan,2020- 2024 maka Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Adapun 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan;

Dengan berlandaskan pada isu strategis dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 serta strategi pembangunan yang telah dirumuskan, maka sasaran strategis pembangunan sektor perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1.

SS 1. Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional

Tujuan 2.

SS 2. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

SS 3. Meningkatnya Kinerja Pelayananan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tujuan 3.

SS 4. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan

Tujuan 4.

SS 5. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran

SS 6. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan

SS 7. Terciptanya Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum Secara Konsisten

SS 8. Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas

Tujuan 5.

SS 9. Meningkatnya Inovasi Terapan Bidang Perhubungan

SS 10. Meningkatnya Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi.

Adapun sesuai rumusan sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam 4 fokus yaitu

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi;
4. Transportasi Perkotaan sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

3.1.2 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perhubungan dibentuk untuk mendukung visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 "Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing".

Dinas perhubungan secara khusus mendukung misi pembangunan keempat yaitu "Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya" dengan Prioritas Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas.

Tujuan pembangunan transportasi adalah untuk mewujudkan transportasi regional dan nasional yang terpadu, tertib dan lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau, efektif dan efisien. Untuk mendukung produksi dan perdagangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha, pengembangan wilayan, peningkatan dinamika pembangunan serta untuk memperlancar mobilitas manusia, barang dan jasa agar mampu mengantisipasi perkembangan perdagangan global dengan melibatkan peran serta masyarakat dan usaha nasional.

Strategi transportasi saat ini cukup pesat perkembangannya baik di darat, laut dan maka Strategi dimasing-masing subsektor sebagai berikut :

1. Transportasi Darat

   a. Angkutan Jalan

      Tujuan pembangunan transportasi jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan meningkatkan kelancaran/ kemudahan aksesibilitas daerah terisolir kewilayah berkembang serta mendukung

pengembangan kawasan strategis dengan meningkatkan kondisi jalan dari kelas III menjadi kelas II, merealisasikan angkutan massal di wilayah Metropolitan Banjarbakula serta peningkatan pelayanan transportasi, penataan struktur dan penyederhanaan sistem perizinan.

b. Angkutan Sungai dan Danau

Pengembangan transportasi sungai dan danau di Kalimantan Selatan diarahkan pada peningkatan kondisi alur pelayaran, baik lebar dan kedalamannya dermaga/ pelabuhan maupun fasilitas keselamatan pelayaran untuk lebih menjamin keselamatan dan kelancaran angkutan, mengupayakan pelayanan angkutan sungai mendapatkan subsidi pemerintah.

c. Angkutan Penyeberangan

Pengambangan transportasi angkutan penyeberangan pada daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman dan handal.

Sasaran pembangunan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 yang akan diformulasikan rencana strategis, untuk menciptakan sistem transportasi handal, aman, nyaman dan selamat.

Kebijakan pengembangan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengembangan wilayah sesuai dengan struktur tata ruang yang diharapkan. Maka dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, sistem transportasi dikembangkan ke arah terpadunya intra dan antar moda transportasi baik darat, laut maupun udara.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan perencanaan jangka Pendek Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan dan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang infrastruktur wilayah. Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Tujuan dan Sasaran yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai sakip Dinas Perhubungan	A	A
2.	Meningkatkan pelayanan bidang transportasi	SKM layanan transportasi	Meningkatnya fungsi fasilitas perhubungan	Desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	97.26	96.80
				Tingkat pemanfaatan terminal (%)	86.73	83.93
				Tingkat pemanfaatan dermaga (%)	62.57	60.88
				Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan (%)	82.55	78.62

Pada indikator sasaran Nilai Sakip di tahun 2024 mempunyai target mendapatkan nilai Sakip dengan kategori A serta sampai akhir periode renstra 2024 – 2026, untuk mewujudkan target tersebut maka SKPD Dinas Perhubungan akan lebih meningkatkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Data awal yang ada pada tahun 2023 jumlah desa yang dapat terhubung oleh moda transportasi darat maupun sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 211 desa dari jumlah desa se kabupaten berjumlah 219 desa dengan persentase sebesar (96,80%), dengan menargetkan di tahun 2024 ini capaian peningkatan desa yang terhubung dengan moda transportasi sejumlah 213 desa (97,26%) dari jumlah 219 desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan di dukung instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, dengan adanya peningkatan desa yang terhubung dengan moda transportasi juga akan mempengaruhi kelancaran jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang kepedesaan yang akan berdampak peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di pedesaan serta terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996), dengan adanya isu strategis tentang kurangnya pemanfaatan terminal di Kabupaten

Hulu Sungai Utara maka Dinas Perhubungan sebagai instansi yang terkait memiliki target untuk lebih meningkatkan fungsi terminal, dengan jumlah total angkutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 535 buah, pada tahun 2024 dengan target jumlah angkutan yang masuk ke dalam terminal berjumlah 464 buah dengan persentase 86.73% sampai dengan target akhir periode renstra 2024 – 2026 sebesar persentase 92.34%, dengan adanya peningkatan angkutan yang masuk ke terminal sehingga akan ada peningkatan aktivitas di terminal yang akan berdampak meningkatnya fungsi terminal dengan didukung dengan program dan kegiatan agar terminal lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat.

Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan/merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Bukan Cuma sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum ataupun saluran kotor. Pada indikator sasaran tingkat pemanfaatan dermaga pada tahun 2024 dengan target jumlah angkutan sungai yang bertambat/bersandar berjumlah 555 buah dari total angkutan sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 887 buah (62.57%) dan sampai dengan target akhir periode renstra 2023 – 2026 dengan target capaian persentase sebesar 65.95%, dengan di dukung program dan kegiatan agar lebih meningkatkan fungsi dermaga bagi masyarakat.

Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak terdapat, terutama para angkutan umum sehingga terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor human error maupun dari segi teknis angkutan tersebut, sehingga perlunya pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan - kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalulintas, penumpang dan lingkungan. Maka Dinas Perhubungan sebagai instansi yang terkait memiliki target adanya peningkatan jumlah angkutan yang lulus uji disetiap tahun nya dari jumlah angkutan umum wajib uji sebanyak 1272 unit angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan pada tahun anggaran 2024 ini SKPD Dinas Perhubungan memiliki target jumlah angkutan yang lulus uji berjumlah 1050 unit atau persentase sebesar (82.55%), sehingga akan terciptanya angkutan umum yang standar layak jalan bagi keselamatan pengemudi dan penumpang ataupun pengguna jalan lainnya.

BAB IV



RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana kerja Dinas Perhubungan meliputi program dan kegiatan . Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Untuk Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan serta tercapainya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota di setiap Kecamatan dengan merata, maka dibutuhkan penambahan anggaran berupa Pembuatan Marka Jalan Zebra Cross di Kabupaten/Kota perlu dipelihara kembali karena sudah mulai pudar, Pengadaan Marka Jalan Zebra Cross Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Haur Gading yang mana pada Kecamatan tersebut untuk perlengkapan jalan masih sangat minim serta Pengadaan Warning Light di Desa Pamintangan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Lampu PJU di Desa Tapus Dalam dan Banyu Tajun Hulu Kecamatan Sungai Pandan.

Serta dilakukan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan penambahan komponen rambu dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas darat dan penambahan Alat Listrik dan Meterisasi untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), dan untuk Meningkatkan kelancaran Administrasi Pelayanan pada kantor UPT PKB Banjang perlu dilakukan Instalasi dan Upgrade Server untuk Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Full Cycle

Serta pengadaan Mobil Patwal dan Kendaraan Roda Dua sebagai bahan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka untuk pengawalan Pejabat dan pemantauan serta pengaturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan atau kemacetan.

Juga terkait kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pembersihan Alur Sungai cukup rendah karena berdasarkan survei alur sungai dan usulan dari desa untuk pembersihan alur sungai juga minim sehingga perkiraan anggaran masih banyak untuk anggaran pembersihan alur sungai sampai akhir tahun sehingga dipindahkan ke Sub Kegiatan yang kekurangan anggaran

Selain itu pada Renja 2024 Perubahan ini juga terdapat penambahan yaitu Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang, Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah dan Desa Sungai Durait Kecamatan Babirik., yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menopang ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat setempat, karena hampir sebagian daerah tersebut didominasi oleh sungai.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan Kebutuhan anggaran sangat penting dalam melaksanakan program dan kegiatan dan dapat diusulkan melalui pendanaan anggaran

pendapatan belanja daerah (APBD), adapun rencana kerja dan pendanaan Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				ALASAN PERUBAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	DPA 2024	PERUBAHAN APBD 2024	RKPD 2024	DPA 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)**	**100%**	**100%**	**100%**	**6.108.848.302**	**6.141.828.302**	**8.580.214.102**	**2.438.385.800**		
2.1	**Kegiatan Perencanaan,penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	30.803.300	30.803.300	52.453.100	21.649.800		
2.1.1	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	30.803.300	30.803.300	52.453.100	21.649.800		DISHUB
2.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	100%	100%	100%	5.477.759.444	5.477.759.444	5.482.759.756	5.000.312		
2.2.1	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/Bulan	378 Orang/Bulan	378 Orang/Bulan	4.688.763.444	4.688.763.444	4.688.763.756	312		DISHUB

2.2.2	(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	288.906.000	768.996.000	753.996.000	5.000.000		DISHUB
2.4	**Kegiatan Administrasi Umum**	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	100%	100%	100%	204.724.730	239.704.750	684.999.550	647.694.820		
2.4.1	(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	9.994.330	9.994.330	90.902.750	80.908.420	Penambahan belanja Peralatan dan perlengkapan kantor berupa pembelian PC, Laptop, Printer dan Scanner, yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam proses kelancaran pekerjaan	DISHUB
2.4.2	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	9.998.800	9.998.800	9.398.800	(600.000)	-	DISHUB
2.4.3	(Sub Kegiatan) Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	24.422.300	24.422.300	24.422.300			DISHUB
2.4.4	(Sub Kegiatan) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	53.730.300	53.730.300	78.306.700	24.576.400	Penambahan untuk cetak kartu retribusi karena anggaran nya tidak mencukupi untuk persediaan sampai dengan akhir tahun karena sebelumnya yang melakukan pemungutan retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah dan sekarang sudah di alihkan ke Dinas Perhubungan	DISHUB
2.4.5	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	106.579.000	138.559.000	481.969.000	343.010.000	Karena anggaran Perjalanan Dinas untuk 5 bulan kedepan sudah tidak ada lagi, sedangkan kemungkinan 5 bulan kedepan tidak menutup kemungkinan ada rapat keluar daerah, maka disediakanlah anggaran yang di ambil dari pergeseran dana Perjalanan Dinas Dalam Kota.	DISHUB
2.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	140.553.078	140.553.078	188.549.946	47.998.868		

2.5.1	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	140.551.078	140.551.078	188.549.946	47.998.868	Penambahan anggaran untuk Tagihan Listrik Kantor Induk dan UPTD.	DISHUB
2.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedia & terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	255.009.750	256.009.750	2.172.051.750	1.916.042.000		
2.6.1	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	245.009.750	246.009.750	1.015.849.750	769.840.000	Penambahan anggaran BBM dan Penggantian Suku Cadang Alat Angkutan dan pembelian Mobil Patwal dan Kendaraan Roda Dua (Trail).	DISHUB
2.6.2	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	21 Unit	10.000.000	10.000.000	8.950.000	(1.050.000)	-	DISHUB
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	1.147.252.000	1.147.800.000	1.147.252.000	(548.000)		
3	**Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93%	93%	93%	27.524.138.099	27.134.138.099	9.096.844.799	(18.027.293.300)		
3.1	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Kesadaran Pengguna Jalan Raya	100%	100%	100%	553.300.000	553.300.000	481.300.000	(72.000.000)		
3.1.1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	553.300.000	553.300.000	481.300.000	(72.000.000)	Terdapat pengurangan anggaran, karena sisa realisasi Belanja Sewa Transportasi untuk jamaah haji dipakai ke kegiatan lain	DISHUB
3.2	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota**	Berfungsinya Seluruh Fasilitas Lalu Lintas	100%	100%	100%	26.553.668.599	26.553.668.599	8.596.379.999	(17.957.288.600)		

3.2.1	(Sub Kegiatan) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	6 Unit	103 Unit	1.456.509.999	1.456.509.999	2.080.049.999	623.540.000	penambahan anggaran berupa pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross Kecamatan Haur Gading, Warning Light di Desa Pansintangan, Pengadaan Cermin Cembung serta pemasangan Tiang Listrik dan lampu PJU di Des Tapus Dalam dan Desa Banyu Taun Hulu Kecamatan Sungai Pandan	DISHUB
3.2.2	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	21 Unit	21 Unit	21 unit	25.097.158.600	25.097.158.600	6.516.330.000	1.419.171.400	Penambahan anggaran untuk belanja alat listrik PJU, belanja komponen rambu, untuk membayar tagihan listrik PJU selama 3 bulan sampai akhir tahun, pengadaan meterisasi lampu PJU dan Pengadaan Mobil Operasional pengawasan pemeliharaan PJU	DISHUB
3.3	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Terciptanya kenyamanan dan keindahan terminal	100%	100%	100%	417.169.500	17.169.500	19.164.800	1.995.300		
3.3.1	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	417.169.500	17.169.500	19.164.800	1.995.300	Penambahan anggaran untuk Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Terminal	DISHUB
4	**Program Pengelolaan Pelayaran**	Persentase Terselolanya Pelayaran dengan Baik	96%	96%	96%	1.267.023.600	1.267.023.600	1.452.023.600	185.000.000		
4.1	**Kegiatan Penatapan Untas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terciptanya Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLASD	100%	100%	100%	526.650.000	526.650.000	361.650.000	(165.000.000)		

4.1.1	(Sub Kegiatan) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	526.650.000	526.650.000	361.650.000	(165.000.000)	Adanya penambahan anggaran berupa pengadaan Speedboat dan Pembersihan Alur sungai	DISHUB
4.2	**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Danau**	Terciptanya kebersihan dan lancaran pelabuhan sungai dan Danau	100%	100%	100%	740.373.600	740.373.600	1.090.373.600	350.000.000		
4.2.1	(Sub Kegiatan) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3 unit	3 unit	3 unit	740.373.600	740.373.600	1.090.373.600	350.000.000	Penambahan anggaran berupa Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang, Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah dan Sungai Durat Kecamatan Babirik	DISHUB
JUMLAH						**14.900.010.001**	**14.532.990.001**	**19.129.082.501**	**4.596.092.500**		

Mengetahui
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. Hamdani, S.Sos, M.AP
NIP. 19650701 198602 1 007

BAB V



PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara satuan kerja perangkat daerah dan dukungan dari penyelenggara satuan kerja daerah lainnya serta masyarakat secara umum.

Dengan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja perangkat daerah di bidang Perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Perubahan satuan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian rencana kerja ini dibuat untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tahun - tahun mendatang.

Amuntai, September 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. HAMDANI, S.Sos. M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650701 198602 1 007

LAMPIRAN



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/401-A /KUM/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program kegiatan RKPD berkenaan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 367 ayat 2 bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan, dan ketentuan Pasal 368 bahwa Perubahan Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai Pedoman Perangkat daerah dalam Menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, Tambahan Berita Daerah Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023;
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : PENUTUP.

KETIGA : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;

KEEMPAT : Perubahan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah wajib

a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 Agustus 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat :
Jl Karya Manuntung Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan,
Telpon/Fax: (0527) 61903

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Untuk ini tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2024, dimana dalam penyusunannya mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan telah mengacu serta selaras dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSU tahun 2023-2026.

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta dapat menjawab berbagai isu - isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga untuk itu diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Amuntai, September 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TONY FITRIADY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780918 199711 1 003

DAFTAR ISI

Cover i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II 6

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan 14

2.3 Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 16

2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran 16

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 17

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan 19

BAB V Penutup 23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya tim penyusunan Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas poko dan fungsi yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan 360).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
23. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Perubahan Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023-2026, yang merupakan cerminan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Pencapaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6 Telaahan Terhadap usulan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan tehadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengendalian ini selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan :

a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b) Konsistensi antara Renja dengan Renstra; dan
c) Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kab. Hulu Sungai Utara dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pelaksanaan Perubahan Renja 2024, maka salah satu yang harus dipedomani adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan terhadap Rencana Kerja SKPD yang tertuang dalam APBD tahun 2024 sampai berakhirnya Triwulan II memperlihatkan bahwa perkembangan pada aspek kinerja rata-rata Dinas Sosial mencapai 53.39%, sedangkan dalam hal penyerapan anggaran baru mencapai 26.47%. Jumlah Belanja yang dialokasikan pada Dinas Sosial dalam rangka menunjang berbagai program prioritas daerah serta pelaksanaan urusan wajib bidang sosial adalah sebsar Rp. 11.809.631.746,00 dan sampai berakhirnya triwulan II atau semester I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.126.240.940,00 atau 26.47%. Diharapkan pada sisa triwulan yang ada di semester II tahun 2024 ini dapat direalisasikan secara lebih optimal

Secara ringkas realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 ini dapat disajikan pada matriks berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1
Realisasi Per Sub Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II 2024

No	URAIAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.262.037.946	1.430.990.769	43,87	1.831.047.177
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.200.000	1.885.000	14,28	11.315.000
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.200.000	1.885.000	14,28	11.315.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.855.494.496	1.207.077.157	42,27	1.648.417.339
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.494.496	1.207.077.157	42,27	1.648.417.339
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.479.050	136.705.978	62,29	82.773.072
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.173.500	0	0,00	8.173.500
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.471.400	30.440.000	39,29	47.031.400
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.742.650	41.793.500	84,02	7.949.150
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.146.500	16.600.750	74,96	5.545.750
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	0	0,00	9.900.000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.045.000	47.871.728	91,98	4.173.272
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000	0	0,00	250.000
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000	0	0,00	250.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.114.400	62.871.834	54,62	52.242.566
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.314.400	2.136.799	33,84	4.177.601
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.800.000	60.735.035	55,82	48.064.965
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.500.000	22.450.800	38,38	36.049.200
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	35.000.000	11.810.800	33,75	23.189.200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	URAIAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
.	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000	7.760.000	57,48	5.740.000
14.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	2.880.000	28,80	7.120.000
	Program Pendaftaran Penduduk	58.730.000	54.410.000	92,64	4.320.000
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30.300.000	29.410.000	97,06	890.000
15.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.750.000	3.370.000	89,87	380.000
16.	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	26.550.000	26.040.000	98,08	510.000
	Penataan Pendaftaran Penduduk	3.750.000	3.375.000	90,00	375.000
17.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	3.750.000	3.375.000	90,00	375.000
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	24.680.000	21.625.000	87,62	3.055.000
18.	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	24.680.000	21.625.000	87,62	3.055.000
	Program Pencatatan Sipil	29.830.000	20.561.000	68,93	9.269.000
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	29.830.000	20.561.000	68,93	9.269.000
19.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	29.830.000	20.561.000	68,93	9.269.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	632.360.000	362.305.000	57,29	270.055.000
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	632.360.000	362.305.000	57,29	270.055.000
20.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	632.360.000	362.305.000	57,29	270.055.000
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1.800.000	1.725.000	95,83	75.000
	Penyusunan Profil Kependudukan	1.800.000	1.725.000	95,83	75.000
21.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	1.800.000	1.725.000	95,83	75.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	URAIAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
	yang lain				
TOTAL		**3.984.757.946**	**2.217.766.429**	**55,66**	**1.766.991.517**

Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
						I		II	
1	2	3	4	7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**n/a**	**n/a**	**58.730.000**	**n/a**	**14.465.000**	**n/a**	**54.410.000**
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%	30.300.000	97,86%	14.465.000	98,52%	29.410.000
1	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3200 Dokumen	3.750.000	800 Dokumen	435.000	1600 Dokumen	3.370.000
2	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil pelaporan Peristiwa Kependudukan	10 Laporan	26.550.000	3 Laporan	14.030.000	5 Laporan	26.040.000
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Pendaftaran Pendaftaran Penduduk tertata dengan baik	100%	3.750.000	25%	0	50%	3.375.000
3	2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	3.750.000	2 Dokumen	0	5 Dokumen	3.375.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
						I		II	
1	2	3	4	7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Pendaftaran Penduduk Terselenggara dengan baik	100%	24.680.000	25%	0	50%	21.625.000
4.	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	24.680.000	2 Laporan	0	5 Laporan	21.625.000
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	n/a	n/a	**29.830.000**	n/a	**4.065.000**	n/a	**20.561.000**
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Sipil Terselenggara dengan baik	100%	29.830.000	25%	4.065.000	50%	20.561.000
5	2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	10 Laporan	29.830.000	2 Laporan	4.065.000	5 Laporan	20.561.000
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	n/a	n/a	**632.360.000**	n/a	**94.500.000**	n/a	**362.305.000**
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Data Kependudukan yang dihasilkan dan disajikan Berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik	100%	632.360.000	25%	94.500.000	50%	362.305.000
6	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	17 Dokumen	632.360.000	5 Dokumen	94.500.000	9 Dokumen	362.305.000
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	n/a	n/a	**1.800.000**	n/a	**0**	n/a	**1.725.000**
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang disusun Berdasarkan Peraturan dan	100%	1.800.000	25%	0	50%	1.725.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
						I		II	
1	2	3	4	7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Perundang-undangan yang Berlaku						
7	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	1.800.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.725.000
5.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**n/a**	**n/a**	**3.262.037.946**	**n/a**	**462.988.535**	**n/a**	**1.438.990.769**
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	13.200.000	25%	0	50%	1.885.000
8	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	13.200.000	25%	0	50%	1.885.000
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SDM yang dapat Meningkatkan Kapasitas sesuai Tupoksi	100%	2.855.494.496	25%	375.296.099	50%	1.207.077.157
9	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2.855.494.496	16 Orang	375.296.099	16 Orang	1.207.077.157
	X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	100%	219.479.050	25%	43.983.638	50%	136.705.978
10	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	1 Paket	8.173.500	0 Paket	0	0 Paket	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
						I		II	
1	2	3	4	7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	77.471.400	0 Paket	12.750.000	1 Paket	30.440.000
12	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	49.742.650	0 Paket	0	1 Paket	41.793.500
13	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	22.146.500	0 Paket	1.293.250	1 Paket	16.660.750
14	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.900.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0
15	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	52.045.000	5 Laporan	29.946.386	10 Laporan	47.871.728
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang yang akan dibeli sesuai dengan Spesifikasi yang dibutuhkan	100%	250.000	0%	0	0%	0
16	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	250.000	0 Unit	0	0 Unit	0
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemetintah Daerah	100%	115.114.400	25%	35.389.800	50%	62.871.834
17	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat	1200 Laporan	6.314.400	400 Laporan	750.000	800 Laporan	2.136.799
18	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanJasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	108.800.000	3 Laporan	34.639.800	6 Laporan	60.735.035

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
						I		II	
1	2	3	4	7		5		6	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	58.500.000	25%	8.319.000	50%	22.450.800
19	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	35.000.000	5 Unit	4.417.000	12 Unit	11.810.800
20	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11 Unit	13.500.000	4 Unit	3.500.000	11 Unit	7.760.000
21	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	0 Unit	402.000	1 Unit	2.880.000
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**3.984.757.946**		**576.018.535**		**1.869.991.769**

Laporan lengkap hasil evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program/kegiatan, antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dari pagu anggaran Rp 3.262.037.946,00 baru terealisasi Rp. 1.430.990.769,00 atau 43,87%, hal ini disebabkan pada program tersebut sebagian besar belanjanya adalah belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sedangkan jumlah ASN yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih belum lengkap mengakibatkan anggaran tidak terserap.
2. **Program Pendaftaran Penduduk**, dari pagu anggaran Rp 58.730.000,00 baru terealisasi Rp. 54.410.000,00 atau 92,64%, hal ini disebabkan anggaran yang tidak banyak, sehingga dapat terlaksana dan terserap dengan baik.
3. **Program Pencatatan Sipil**, dari pagu anggaran Rp 29.830.000,00 baru terealisasi Rp. 20.561.000,00 atau 68,93%, anggaran pada program/kegiatan ini untuk jemput bola / sosialisasi bidang pencatatan sipil. Anggaran yang kecil menyebabkan dapat terserap dengan baik, namun dibutuhkan anggaran untuk menunjang kinerja kedepannya.
4. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**, dari pagu anggaran Rp 632.360.000,00 baru terealisasi Rp. 362.305.000,00 atau 57,29%. Realisasinya sudah sesuai target, karena belanja yang ada pada program ini adalah belanja rutin seperti belanja ribbon dan upah Non PNS.
5. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**, dari pagu anggaran Rp 1.800.000,00 baru terealisasi Rp. 1.725.000,00 atau 95,83%, hal ini hal ini disebabkan anggaran yang tidak banyak, sehingga dapat terlaksana dan terserap dengan baik.

Berikut merupakan capaian target kinerja triwulan II Tahun 2024 :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel T-C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022 (th n-2)	Tahun 2023 (th n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 Tri II	Tahun 2024 (thn n 1)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	4	6	7	8	9						
1	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil		BB (85,00)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	√	100	100	100	100	100	100	99,9	100	100	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara	√	40	50	60	70	43,17	50	56,97	60	70	
4	Persentase penduduk yang berusia 17 tahun atau pernah kawin yang memiliki KTP-el	√	100	100	100	100	96,3	100	98,52	100	100	
5	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang ber akta kelahiran	√	92,5	97	98	99	93,2	97	96,68	95,5	99	
6	Persentase penduduk yang ber Akta Kelahiran	√	64,62	70	71	72	59,4	70	70	71	72	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3 Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran triwulan I dan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk dalam kategori rendah, oleh karena itu, implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah belum tergambarkan pada triwulan II ini.

2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Kurangnya jumlah SDM, terutama kekosongan pejabat struktural menyebabkan banyak kegiatan lambat di eksekusi. Kurangnya SDM juga menyebabkan banyak tugas yang dilaksanakan secara tumpang tindih. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Kurangnya anggaran akibat tidak adanya bantuan dari pusat mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.

Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran penduduk lanjut usia (Lansia), untuk meningkatkan hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelayanan jemput bola ke Desa-desa. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal dan berkembangnya fungsi sistem informasi SIAK, untuk meningkatkan hal ini perlu adanya koneksitas jaringan dan kerjasama antar stackholder. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang dihasilkan database Disdukcapil, hal ini perlu dilakukan peremajaan dan pemutahiran data serta pembuatan buku profil Kependudukan. Masih kurangnya pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai target, hal ini perlu adanya langkah-langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Belum lagi adanya Pilkada pada bulan november 2024, mengakibatkan perlunya peningkatan pelayanan pada perekaman dan pencetakkan ktp elektronik, sebagai dasar untuk melakukan pemilihan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Agenda Nasional RPJMN tahun 2020-2024. Dalam Agenda Nasional RPJMN tahun 2020-2024 dirumuskan salah satu Prioritas Pembangunan yang berkaitan dengan Urusan Kependudukan yaitu "Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing".

Dari prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah "Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan".

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi-misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu strategi yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi visi-misi Kepala Daerah, visi-misi Kemendagri dan visi-misi DisdukcapilKB Propinsi Kalsel. Tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta sasaran yang ingin dicapai, maka telah disusun rencana program dan kegiatan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 ini mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Serta berlandaskan kebutuhan pada target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024.

4.1. Program Dan Kegiatan

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Adapun program dan kegiatan yang sudah disusun pada Renja 2024 dilihat belum mencukupi untuk menyelesaikan target kinerja dan kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024, sehingga perlu penambahan anggaran dan beberapa penyesuaian agar agar semua penduduk diwilayah tersebut sudah tercatat dalam administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil, dengan rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksudkan sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TABEL ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

No	URAIAN	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (%)	Selisih Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.262.037.946	3.856.197.946	594.160.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.200.000	13.200.000	0
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.200.000	13.200.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.855.494.496	2.855.565.896	71.400
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.494.496	2.855.565.896	71.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.479.050	772.990.050	553.511.000
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.173.500	8.173.500	0
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.471.400	541.011.400	463.540.000
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.742.650	49.742.650	0
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.146.500	29.746.500	7.600.000
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	13.350.000	3.450.000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.045.000	130.966.000	78.921.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000	0	-250.000
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000	0	-250.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	URAIAN	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (%)	Selisih Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.114.400	130.798.000	15.683.600
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.314.400	6.768.000	453.600
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.800.000	124.030.000	15.230.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.500.000	83.644.000	25.144.000
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	50.300.000	15.300.000
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000	15.000.000	1.500.000
14.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	18.344.000	8.344.000
	Program Pendaftaran Penduduk	58.730.000	99.960.000	41.230.000
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30.300.000	57.750.000	27.450.000
15.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.750.000	3.750.000	0
16.	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	26.550.000	54.000.000	27.450.000
	Penataan Pendaftaran Penduduk	3.750.000	3.750.000	0
17.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	3.750.000	3.750.000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	URAIAN	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (%)	Selisih Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
	Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk			
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	24.680.000	38.460.000	13.780.000
18.	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	24.680.000	38.460.000	13.780.000
	Program Pencatatan Sipil	29.830.000	67.160.000	37.330.000
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	29.830.000	67.160.000	37.330.000
19.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	29.830.000	67.160.000	37.330.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	632.360.000	612.140.000	-20.220.000
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	632.360.000	612.140.000	-20.220.000
20.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	632.360.000	612.140.000	-20.220.000
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1.800.000	1.800.000	0
	Penyusunan Profil Kependudukan	1.800.000	1.800.000	0
21.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1.800.000	1.800.000	0
TOTAL		**3.984.757.946**	**4.637.257.946**	**652.500.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bagian dari proses Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Apabila ada program kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, maka akan membebani organisasi pada tahun berikutnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi dan Daerah.

Kesadaran untuk secara terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penerapan *good governance* dilingkungan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini masih belum sempurna, maka untuk itu kami berharap masukan atau saran yang membangun dari berbagai pihak.

Amuntai, September 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TONY FITRIADY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780918 199711 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dan dengan kuasa-Nya jualah sehingga kami dapat menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 1 (satu) tahun kedepan. Renja Perubahan ini juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2023-2026, Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Kami kami berharap dokumen perencanaan ini ada manfaatnya, minimal sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai maupun yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*betterperformance*). Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Amuntai, 18 Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN,

H.M. HUSNI THAMRIN, S. Sos. M. AP
NIP. 19680204 199002 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKAD 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD 26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 44

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD 47

BAB V PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara	27
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara	33
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Tahun 2023-2026	46
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Tahun 2024	48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan SKPD yang selanjutnya disebut Renja Perubahan SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial sebagai penerjemah tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk mengakomodir program kegiatan ke dalam perencanaan program kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2024.
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun 2024.

Dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Dearah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 14);

29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas; Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah;

32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam kurun waktu satu tahun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja Perubahan ini juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2024. Penyusunan Renja Perubahan SKPD Tahun 2024 merupakan tahun ketiga tahapan Renstra 2023 - 2026.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Terwujudnya sinergi dan kesinambungan pencapaian tujuan dalam RENSTRA BPKAD dan RENJA Perubahan BPKAD Tahun 2024.
3. Untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan 2024 ke dalam RKA Perubahan BPKAD.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

2.4. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN BPKAD

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pada Bab ini akan memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian Tahun Berjalan (Tahun 2023). Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2022 dan capaian renstra 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 :

TABEL 2.1 (T.C 29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DEARAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	95%	95%	95%	75,38	79,35	95%	95%	100%
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	95%	95%	95%	49,27	51,86	90%	90%	94,74%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA BPKAD	1 Dok	100%	1 Dok	24,76	24,76	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen Perubahan RKA BPKAD	1 Dok	100%	1 Dok	39,05	39,05	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan	Dokumen DPA	1 Dok	100%	1 Dok	69,45	69,45	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DPA SKPD	BPKAD								
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dokumen Perubahan DPA BPKAD	1 Dok	100%	1 Dok	24,48	24,48	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	100%	10 Lap	63,98	63,98	10 Lap	10 Lap	100%
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	95%	95%	95%	75,18	79,13	95%	95%	100%
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD	100%	100%	100%	75,19	75,19	100%	100%	100%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD	1 Lap	100%	1 Lap	70,44	70,44	1 Lap	1 Lap	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Lap	100%	4 Lap	67,72	67,72	4 Lap	4 Lap	100%
5	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daeran BPKAD	80%	95%	95%	38,39	40,41	95%	95%	100%
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah BPKAD	1 Dok	100%	1 Dok	0,00	0%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	01	2.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD	4 Dok	100%	4 Dok	38,93	38,93	4 Dok	4 Dok	100%
5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	80%	80%	100%	100,00	100%	90%	90%	90%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas keperluan khusus hari-hari tertentu yang tersedia	45 Buah	100%	45 Buah	100,00	100,00	45 Buah	45 Buah	100%
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	1 Kali	0%	1 Kali	0,00	0,00	1 Kali	1 Kali	100%
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-udangan	5 Orang	0%	5 Orang	0,00	0,00	5 Orang	5 Orang	100%
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	**90%**	92%	**90%**	**79,72**	88,57	**90%**	**90%**	85,07%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang	8 Jenis	100%	8 Jenis	94,35	94,35			0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dibutuhkan								
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang digunakan	95%	72,22%	95%	65,22	68%	95%	95%	95%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan penggandaan yang digunakan	95%	48,88%	95%	76,37	80%	95%	95%	95%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	90%	84,16%	90%	80,57	89%	90%	90%	100%
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**95%**	95%	**90%**	**74,25**	82%	**95%**	**95%**	100%
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar	100%	100%	100%	60,31	60%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						yang didistribusikan sesuai peruntukannya								
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	100%	100%	88,11	88%	100%	100%	100%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	90%	77,78%	90%	61,17	61%	90%	90%	100%
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**90%**	90%	**90%**	**87,22**	97%	**90%**	**90%**	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara rutin	4 Unit	100%	4 Unit	88,58	88%	4 Unit	100%	100%
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin lainnya dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	90%	90%	90%	79,02	88%	90%	90%	100%
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung dalam kondisi baik	85%	100%	100%	99,32	99%	85%	85%	100%
5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**	**90%**	100%	**95%**	**94,31**	99%	**90%**	**90%**	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	**100%**	100%	**90%**	**66,86**	73%	**90%**	**90%**	90%
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA-PPAS	1 Dok	100%	1 Dok	27,97	28%	1 Dok	100%	100%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA-PPAS Perubahan	1 Dok	100%	1 Dok	27,80	28%	1 Dok	100%	100%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	SKPD yang menyusun RKA yang sesuai KUA PPAS dan tepat waktu	42 Unit/Sub Unit	100%	42 Unit/Sub Unit	52,44	52%	42 Unit/Sub Unit	100%	100%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD yang menyusun RKPA yang sesuai KUPA PPAS Perubahan dan tepat waktu	42 Unit/Sub Unit	100%	42 Unit/Sub Unit	81,96	100%	42 Unit/Sub Unit	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel	**90%**	80%	**95%**	**51.89**	98%	**90%**	**90%**	100%
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	6000 Lbr	100%	6000 Lbr	92,55	93%	6000 Lbr	100%	100%
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan,Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan,Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	12 Lap	100%	12 Lap	77,45	77%	12 Lap	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						ketiga (PFK)								
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Bendahara SKPD yang melaksanakan Penata usahaan penerimaan & pengeluaran kas daerah	69 Orang	100%	69 Orang	96,44	96%	69 Orang	69 Orang	100%
5	02	02	2.05		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	**90%**	100%	**90%**	**80,32**	89%	**100%**	**100%**	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan , Pendapatan-LO dan Beban	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang melakukan rekonsiliasi	93 Orang	100%	93 Orang	52,06	52%	93 Orang	93 Orang	100%
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah - Kementerian Keuangan Republik Indonesia	12 Lap	100%	12 Lap	74,14	74%	12 Lap	12 Lap	100%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	39 SKPD	100%	39 SKPD	95,55	95%	39 SKPD	39 SKPD	95%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dan Laporan Keuangan SKPD								
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dok	100%	2 Dok	76,96	76%	2 Dok	2 Dok	100%
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPK dan LHP atas LKPD Pemerintah Daerah	1 Lap	100%	1 Lap	64,99	64%	1 Lap	1 Lap	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang dapat disinkronisasikan	16 Kasus	100%	16 Kasus	0,00	0%	16 Kasus	16 Kasus	100%
5	02	02	2.03	09	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Draft/Konsep Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	100%	1 Dok	0,00	0%	1 Dok	1 Dok	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Draft/Konsep Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	100%	1 Dok	0,00	0%	1 Dok	1 Dok	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**100%**		**100%**	**94,45**	94%	**100%**	**100%**	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		90%	100%	100%	32,18	32%	100%	100%	100%
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		95%	100%	100%	99,91	99%	100%	100%	100%
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		95%	100%	100%	13,95	14%	100%	100%	100%
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota		90%	100%	100%	100,00	100%	100%	100%	100%
				3										
5	02	03			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel**	85%	100%	90%	86,08	96%	85%	85%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	03	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	**90%**		**90%**	**86,08**	96%	**85%**	**85%**	94%
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dok	100%	1 Dok	83,39	83%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang menyampaikan Perencanaan Kebutuhan BMD yang akuntabel	39 Persil	100%	39 Persil	93,66	94%	52 UPB	52 UPB	100%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Persil tanah yang dilakukan pengamanan	10 Persil	100%	10 Persil	82,17	82%	25 Persil	25 Persil	100%
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang dilakukan Pengawasan dan	52 UPB	100%	52 UPB	92,93	93%	52 UPB	52 UPB	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2022	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pengendalian								
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang yang dilakukan Optimalisasi	39 SKPD	100%	39 SKPD	66,13	66%	52 UPB	52 UPB	100%
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yg melakukan Rekonsiliasi Semesteran & Tahunan BMD yang akuntabel	52 UPB	100%	52 UPB	88,53	88%	52 UPB	52 UPB	100%

Pada tabel 2.1 tersebut terlihat hampir semua program tingkat realisasinya sudah memenuhi target kinerja atau berhasil. Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggap berhasil karena semua peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan telah dipenuhi sesuai keperluan. Sub Kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan juga berhasil dimana semua laporan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur juga dikategorikan berhasil.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, karena itu tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah digunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

"**Persentase SKPD Yang Pengelolaan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel**"

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2 (T- C. 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	-	-	95%	95%	95%	95%	49.27%	95%	95%	95%	Semua Laporan Kinerja dibuat sudah sesuai dengan ketentuan
2	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	-	-	95%	95%	95%	95%	75%	95%	95%	95%	Semua laporan yg dibuat sudah sesuai dengan ketentuan
3	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	-	-	80%	85%	85%	90%	38%	85%	85%	90%	Semua Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD telah diselesaikan
4	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Sedikitnya Bimtek & sosialisasi peraturan perundangZan yg diadakan instansi yg berkompeten sehingga BPKAD jg terbatas mengikutinya
5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	-	-	90%	90%	90%	90%	79%	90%	90%	90%	Semua peralatan & perlengkapan kantor yg diperlukan sudah terpenuhi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	95%	95%	95%	95%	74%	95%	95%	95%	Listrik,air internet dan pelayanan terpenuhi
7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Penyediaan jasa pemeliharaan sudah terpenuhi
8	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	-	-	95%	95%	95%	95%	66%	95%	95%	95%	Semua SKPD membuat DPA SKPD tepat waktu
9	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Semua SP2D yg diterbitkan telah dicairkan ke Bank Kalsel selaku kas daerah
10	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	-	-	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	Semua SKPD wajib membuat & menyampaikan laporan keuangan SKPD yang akuntabel

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	94,00%	100%	100%	100%	Terselesaikannya semua kewajiaban Pemda Kab. HSU
12	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	85%	85%	85%	90%	85%	85%	85%	90%	Semua SKPD melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya. Dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia hampir disemua bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah terutama di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan teknologi informasi yang profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah;
2. Regulasi di bidang keuangan khususnya terkait Akuntansi dan pelaporan sangat dinamis;
3. Sistem informasi manajemen keuangan yg dipegunakan dalam menyusun laporan berbasis Web sering terkendala jaringan internet ;
4. Kapasitas aparatur yg terkait dgn pelaporan keuangan, baik dibidang akuntansi maupun SKPD belum memadai;
5. Perubahan kebijakan terkait penganggaran pada masing-masing SKPD menyebabkan proses entryan pada aplikasi SIPD membutuhkan waktu yang lama, selain itu juga adanya pergantian operator yg bertugas melakukan entryan rincian sub kegiatan pada SKPD juga menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian

penginputan data pada SIPD. sehingga penyusunan Perda dan Perbup Penjabaran APBD Murni berpotensi terlambat dari rencana yg telah ditetapkan;

6. Ruangan Kerja Yang kurang refresentatif mengurangi kenyamanan dalam bekerja dan pelayanan terhadap tamu yang sering datang utk berkonsultasi;
7. Kebijakan yang berubah-rubah yang kadang-kadang bertabrakan dengan regulasi yang ada, sehingga perlu dicarikan alternatif lain yang sesuai dengan regulasi. Hal ini tentunya menyita waktu dan tenaga;
8. Jumlah SDM yang terbatas tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang ada, sehingga membutuhkan waktu kerja tambahan dimalam hari;
9. Data Aset masih belum informatif, di karenakan sebagian pengurus barang belum menguasai tata kelola BMD dengan baik;
10. Masih adanya Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan;
11. Kurang maksimalnya pencapaian target realisasi dikarenakan kurangnya personel di Bidang Aset;
12. Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan perencanaan pada SKPD pengguna barang;
13. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
14. Tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun hasil telaahan dengan Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan pada program yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3 (T-C.31)

REVEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	8	2	8	4	5	8	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)**	**100 %**	**39,687,176,030.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)**	**100 %**	**28,514,716,988.00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase Capaian Kinerja BPKAD*	100 %	65,378,550.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase Capaian Kinerja BPKAD*	100 %	55,378,550.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	3,499,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	3,499,500.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	3,557,850.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	3,557,850.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	3,629,700.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	3,629,700.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	8	2	8	4	5	8	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	3,528,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	3,528,700.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	10 Laporan	41,184,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	10 Laporan	41,184,800.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD*	100 %	38,494,886,590.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD*	100 %	38,109,906,554.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	44 Orang/ bulan	38,458,867,390.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/ bulan	28,061,907,354.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	10,999,550.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	10,999,550.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan	24,999,650.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan	36,999,650.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	8	2	8	4	5	8	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah BPKAD*	100 %	57,520,250.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah BPKAD*	100 %	57,520,150.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	52 Dokumen	63,220,450.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	52 Dokumen	63,220,450.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	4,299,800.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	4,299,700.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi*	90 %	107,419,300.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi*	90 %	623,644,300.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	45 Paket	73,160,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	39 Paket	73,860,000.00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	5 Orang	7,994,300.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	21,724,300.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	5 Orang	28,245,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	528,060,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana*	90 %	317,116,600.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana*	90 %	921,833,794.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	8	2	8	4	5	8	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	30,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	818,883,194.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	60 Paket	75,990,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	60 Paket	91,830,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	11,195,600.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	11,195,600.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	50 Laporan	199,825,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	50 Laporan	199,825,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana*	95 %	323,280,740.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana*	95 %	366,985,640.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	14,666,500.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	14,666,500.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	216,180,640.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	241,876,840.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	92,534,600.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	110,543,560.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	6	4	5	6	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	*Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara*	90 %	331,600,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	*Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara*	90 %	379,450,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	4 Unit	151,966,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	30 Unit	178,166,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	159,700,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	151,500,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	19,992,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	49,784,000.00	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	BPKAD	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**	**90 %**	**251,847,421,619.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	BPKAD	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**	**90 %**	**264,818,586,922.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	*Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu*	90 %	635,391,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	*Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu*	90 %	1,205,135,400.00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	1 Dokumen	12,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	1 Dokumen	153,690,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	8	2	8	4	5	8	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	1 Dokumen	12,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	1 Dokumen	12,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	42 Dokumen	87,274,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	42 Dokumen	87,274,400.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	42 Dokumen	523,117,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	42 Dokumen	952,674,000.00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	*Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel*	90 %	158,839,850.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	*Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel*	90 %	158,838,750.00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	156 Dokumen	45,874,450.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	156 Dokumen	45,874,600.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan*	0 Laporan	39,299,300.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan*	12 Laporan	39,299,050.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	6	4	5	6	12
			dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					*Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	12 Dokumen	73,666,100.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	12 Dokumen	73,666,100.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	*Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel*	100 %	493,749,050.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	*Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel*	100 %	493,749,050.00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	17 Dokumen	14,303,200.00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	17 Dokumen	11,153,200.00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	4 Laporan	62,612,850.00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	4 Laporan	4,932,850.00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	7 Laporan	108,350,000.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	7 Laporan	217,131,200.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	75,244,200.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	41,613,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	1 Dokumen	87,569,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	1 Dokumen	87,569,000.00	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	18,259,800.00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	18,259,800.00	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	24,320,000.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	0 Dokumen	0.00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	38 Orang	61,650,000.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	38 Orang	61,650,000.00	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina*	14 Lembaga	51,520,000.00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina*	12 Lembaga	51,520,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	*Kewenangan pengelolaan keuangan daerah*	100 %	250,669,441,319.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	*Kewenangan pengelolaan keuangan daerah*	100 %	282,959,980,722.00	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah*	4 Laporan	3,307,987,000.00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah*	4 Laporan	3,759,867,603.00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	3 Laporan	231,722,000,000.00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	3 Laporan	249,422,226,800.00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	2 Laporan	13,404,464,319.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	2 Laporan	7,853,086,519.00	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	3 Laporan	2,125,000,000.00	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	3 Laporan	2,125,000,000.00	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel**	**85 %**	**467,852,400.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel**	**85 %**	**631,712,200.00**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah*	85 %	467,852,400.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah*	85 %	631,712,200.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	8	2	3	4	5	8	12
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	1 Dokumen	45,859,800.00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	1 Dokumen	45,859,800.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	25 Laporan	252,784,600.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	25 Laporan	305,284,600.00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	52 Laporan	78,514,600.00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	52 Laporan	158,514,400.00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	52 Dokumen	61,731,800.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	52 Dokumen	93,091,800.00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	52 Laporan	29,161,800.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	52 Laporan	29,161,800.00	
	TOTAL				292,002,450,049.00					293,965,118,110.00	

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini terjadi beberapa pergeseran dan perubahan anggaran pada sub kegiatan. Perubahan Anggaran terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan anggaran, seperti :

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Pelampauan anggaran atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sebelumnya telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah, untuk perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan tahun 2023 mengacu kepada arah kebijakan yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, serta dengan mengikuti perkembangan yang terjadi baik ditingkat regional, nasional serta internasional. Dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 terarah pada :

1. Peningkatan produksi barang dan jasa yang berbasis pada potensi ekonomi lokal;
2. Meningkatnya lapangan kerja yang disertai penyerapan tenaga kerja;
3. Pemberdayaan dan revitalisasi lembaga ekonomi lokal;
4. Peningkatan investasi serta permodalan.

Adapun arah kebijakan ekonomi pada tahun 2023 diarahkan sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu trategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Meningkatkan efektivitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib dan akuntabel

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan dan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Nilai SAKIP BPKAD
2. Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya tertib dan akuntabel.

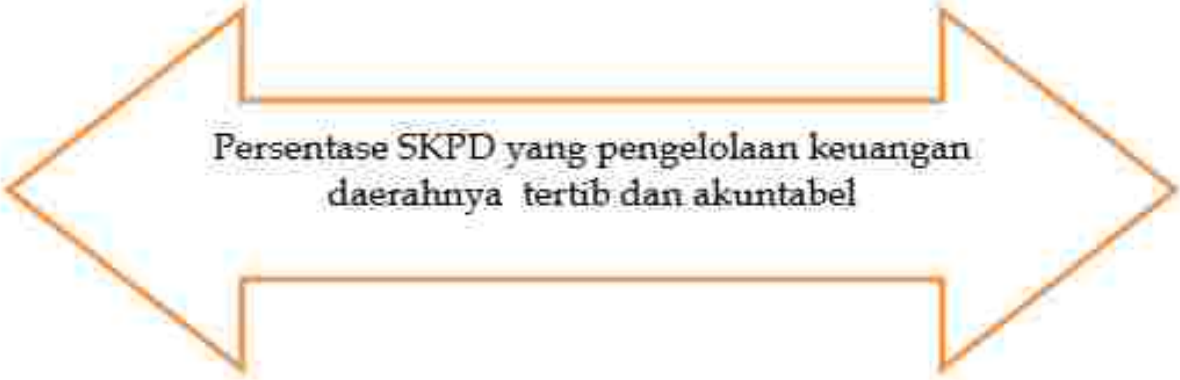
Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah:

TABEL 3.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. HSU

VISI : Hulu Sungai Utara MANTAP (Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif						
MISI: Terwujudnya Sistem Pengelolaan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel						
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-			
1	2	3	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pelaksanaan dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan akuntabel, efektif dan efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	95 %	95 %	95 %	95 %
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyuiunan laporan Kinerja dan keuangan Daerah Kabupaten HSU yang akuntabel	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel	90 %	90 %	90 %	90 %
Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta barang milik daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	85%	85 %	85%	85 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin di capai yaitu :



Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merencanakan program dan kegiatan perubahan tahun 2024 yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan.

Pada Tabel 4.1 berikut dapat dilihat Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 :

TABEL 4.1 (T-C.33)
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**309,465,118,110.00**			**293,965,118,110.00**	**-15,500,000,000.00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)**		**100 %**	**38,598,629,888.00**		**100 %**	**28,514,719,988.00**	**-10,083,909,900.00**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja BPKAD*		100 %	55,378,550.00		100 %	55,378,550.00	0.00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	3,499,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	3,499,500.00	0.00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	3,557,850.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	3,557,850.00	0.00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	3,629,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	3,629,700.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	3,626,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	3,626,700.00	0.00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10 Laporan	41,164,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	10 Laporan	41,164,800.00	0.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD*		100 %	36,272,406,254.00		100 %	26,109,906,554.00	-10,162,499,700.00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	44 Orang/bulan	36,224,407,054.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	37 Orang/bulan	26,061,907,354.00	-10,162,499,700.00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Laporan	10,999,550.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Laporan	10,999,550.00	0.00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 Laporan	36,999,550.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 Laporan	36,999,550.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah BPKAD*		100 %	57,520,250.00		100 %	57,520,150.00	-100.00
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52 Dokumen	53,220,450.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	52 Dokumen	53,220,450.00	0.00
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 Laporan	4,299,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 Laporan	4,299,700.00	-100.00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi*		90 %	622,964,300.00		90 %	623,644,300.00	680,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	45 Paket	73.180.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	39 Paket	73.860.000,00	680,000.00
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5 Orang	7.994.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	50 Orang	21.724.300,00	13,730,000.00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5 Orang	541.790.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	50 Orang	528.060.000,00	-13,730,000.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana*		90 %	667.273.794,00		90 %	921.833.794,00	254,560,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20 Paket	380,163,194.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	20 Paket	618,883,194.00	238,720,000.00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	60 Paket	75,990,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	60 Paket	91,830,000.00	15,840,000.00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10 Paket	11,195,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	10 Paket	11,195,600.00	0.00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50 Laporan	199,925,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	50 Laporan	199,925,000.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana*		95 %	341,280,740.00		95 %	366,985,640.00	25,704,900.00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12 Laporan	14,565,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	14,565,500.00	0.00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12 Laporan	216,180,640.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	241,876,640.00	25,696,000.00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12 Laporan	110,534,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	110,543,500.00	8,900.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara*		90 %	581,806,000.00		90 %	379,450,000.00	-202,356,000.00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 Unit	187,166,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	30 Unit	178,166,000.00	-9,000,000.00
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20 Unit	244,700,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	20 Unit	161,500,000.00	-83,200,000.00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Unit	149,940,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Unit	49,784,000.00	-100,156,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**		**90 %**	**270,367,275,822.00**		**90 %**	**264,818,686,922.00**	**-5,548,588,900.00**
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu*		90 %	1,003,338,400.00		90 %	1,206,138,400.00	**202,800,000.00**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	153,890,000.00	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	153,890,000.00	0.00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	12,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	12,500,000.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42 Dokumen	87,274,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	42 Dokumen	87,274,400.00	0.00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42 Dokumen	749,874,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	42 Dokumen	952,874,000.00	202,800,000.00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel*		90 %	158,839,850.00		90 %	158,838,750.00	-1,100.00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	156 Dokumen	45,874,450.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	156 Dokumen	45,874,600.00	150.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0 Laporan	39,299,300.00	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	12 Laporan	39,298,050.00	-1,250.00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPJD dengan Instansi Terkait*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12 Dokumen	73,666,100.00	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	12 Dokumen	73,666,100.00	0.00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel*		100 %	493,749,050.00		100 %	493,749,050.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17 Dokumen	14,303,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	17 Dokumen	11,153,200.00	-3,150,000.00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 Laporan	52,612,850.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 Laporan	4,932,850.00	-47,680,000.00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7 Laporan	108,350,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7 Laporan	217,131,200.00	108,781,200.00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 Dokumen	75,244,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Dokumen	41,613,000.00	-33,631,200.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	87,589,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	87,589,000.00	0.00
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	18,259,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	18,259,800.00	0.00
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	24,320,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	0 Dokumen	0.00	-24,320,000.00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	38 Orang	61,550,000.00	DANA PERIMBANGAN	38 Orang	61,550,000.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14 Lembaga	51,520,000.00	DANA PERIMBANGAN	12 Lembaga	51,520,000.00	0.00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Kewenangan pengelolaan keuangan daerah*		100 %	288,711,348,522.00		100 %	282,959,960,722.00	-5,751,387,800.00
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 Laporan	3,759,887,603.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 Laporan	3,759,887,603.00	0.00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3 Laporan	249,422,226,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3 Laporan	249,422,226,600.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 Laporan	13,404,454,319.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	7,653,066,519.00	-5,751,387,800.00
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3 Laporan	2,125,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3 Laporan	2,125,000,000.00	0.00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel**		**85 %**	**499,212,400.00**		**85 %**	**631,712,200.00**	**132,499,800.00**
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah*		85 %	499,212,400.00		85 %	631,712,200.00	132,499,800.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Dokumen	45,659,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	45,659,800.00	0.00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25 Laporan	252,784,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	25 Laporan	305,284,600.00	52,500,000.00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52 Laporan	78,514,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	52 Laporan	158,514,400.00	79,999,800.00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52 Dokumen	93,091,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	52 Dokumen	93,091,800.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Sumber Dana	Sesudah Perubahan		Bertambah / Berkurang
				Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52 Laporan	29,161,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	52 Laporan	29,161,600.00	0.00
	TOTAL				308,465,118,110.00			293,965,118,110.00	-15,500,000,000.00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Selain itu, Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan salah satu alat perencana untuk mencapai tujuan dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada.

Semoga Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, 18 Juli 2024

PLt. KEPALA BADAN,

H.M. HUSNI THAMRIN, S. Sos. M. AP
NIP. 19680204 199002 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Jend. A. Yani No. 04 Amuntai Telp (0527) 61056 - 61788
Kode Pos 71414

RANHIR RENJA
(RENCANA KERJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026



BANGGA BAYAR PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK BERSAMA
BANGUN BANUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) SKPD. Rancangan Akhir Renja SKPD adalah produk perencanaan pada

unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD juga disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah dengan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD pembangunan daerah Tahun 2026. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Perekonomian yang diprioritaskan untuk Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Rancangan Akhir Renja BAPENDA, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi;
   b. Analisis gambaran pelayanan BAPENDA Kab HSU;
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra;
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
   e. Telaahan terhadap rancangan awal;
   f. Perumusan tujuan dan sasaran;
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   h. Perumusan kegiatan prioritas;
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;

j. Pembahasan forum;

Penyesuaian dokumen Rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
   a. Perumusan tujuan, sasaran indikator kinerja dan target kinerja Bapenda;
   b. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per bidang;
   c. Menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi satu kesatuan utuh Renja Bapenda.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 , Tambahan Berita Daerah Nomor 20);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 dengan maksud sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Asli Daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berlanjut, memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personel dan kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan

gambaran kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah dalam rangka memaksimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan program dimasa yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN Bapenda

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2024 12

2.2 Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah 14

2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 15

2.4 Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah (T-C 30) 23

2.5 Review terhadap rancangan awal RPD Tahun 2026 (T-C 31) 27

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju tahun 2027 35

4.1. Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2026 .....

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2024.

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. **7.502.883.063,00,-** dengan realisasi sebesar Rp. **5.557.922.912,00** - atau sebesar **74,08%**. Adapun hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
I.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.286.979.800,00,-**	**1.237.411.764,00,-**	**96.15%**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**1.286.979.800,00,-**	**1.237.411.764,00,-**	**96.15%**
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	297.345.000,00	283.631.564,00	95.39%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	323.785.000,00	318.860.000,00	98.48%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	84.680.000,00	77.600.000,00	91.64%
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	232.674.800,00	230.224.200,00	98.95%
	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	55.130.000,00	54.237.000,00	98.38%
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	77.505.000,00	77.303.000,00	99.74%
	Penilaian Pajak PBB P2 dan BPHTB	161.300.000,00	142.063.000,00	88.07%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	19.650.000,00	19.622.000,00	99.86%
	Penagihan Pajak Daerah	34.910.000,00	33.871.000,00	97.02%
IV.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.215.903.263.00,-**	**4.322.782.770,00,-**	**69,54%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.500.000,-**	**1.500.000,-**	**100%**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan	1.500.000,-	1.500.000,-,-	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.164.539.441,00,-**	**3.346.093.396,00**	**87,66%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.163.039.441,00	3.344.593.396,00	64.78%
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun	1.500.000,-	0,-	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**459.740.750,00**	**427.772.785,00**	**93.05%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.110.650,00	22.034.500,00	70.83%%
	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.084.000,00	21.622.500,00	82.90%
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.852.100,00	26.817.500,00	62.58%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.694.000,00	357.298.285,00	99.33%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**31.180.000,00**	**17.000.000,00**	**54.52%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	21.180.000,00	16.400.000,00	77.43%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	10.000.000,00	600.000,00	6.00%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**53.630.000,00**	**50.680.000,00**	**94.50%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	53.630.000,00	50.680.000,00	94.50%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**413.692.072,00**	**406.684.099,00**	**98.31%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.525.672,00	111.249.599,00	94.66%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.166.400,00	295.434.500,00	99.75%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**91.621.000,00**	**74.552.490,00**	**81.37%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	75.761.000,00	66.022.490,00	87.15%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	5.605.000,00	62.28%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.860.000,00	2.925.000,00	42.64%
	JUMLAH	**7,502,883,063.00**	**5,557,922,912.00**	**74.08%**

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa reaslisasi kinerja anggaran sebesar Rp. **5,557,922,912.00,-** dari anggaran sebesdar Rp7,502,883,063.00,- atau sebesar **74.08%.** Dari realisasi **74.08%.** tersebut realiaasi pada Sub Kegiatan rata-rata sebesar 90% bahkan lebih.

Adapun anggaran program tahun 2024 yang tidak terserap sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan tidak tercapai karena alokasi peserta yang mengikuti diklat berdasarkan surat panggilan Instansi Pembina (BPKP dan Kemendagri);
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD belum terealisasi ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan;

Adapun capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pendapatan Daerah	BB	BB	100%
2.	Meningkatnya Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD	1,91%	1,5%	79%
3.	Meningkatnya	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	13,8%	18,73%	136%

	Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah PAD			
4.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Tungggakan Pajak Retribusi Daerah	151.552.203.799	153.645.369.639	101,38%
5.	Menurunnya Jumlah Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah		0,5%	2718%	136%

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Pelayanan pembayaran pajak tunai dan non tunai.
2. Pelayanan pembayaran retribusi.
3. Pelayanan pembayaran penerimaan lain – lainnya.
4. Melakukan rapat – rapat , konsultasi dan koordinasi dengan dinas instansi terkait, mitra kerja dalam hal perencanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
5. Melakukan pendataan, penilaian, penetapan, pembukuan, penagihan, monitoring,evaluasi, pengawasan, sosialisasi atau penyuluhan kepada para wajib pajak.
6. Melakukan konsultasi, koordinasi dan tukar menukar informasi dengan daerah atau provinsi lain dalam hal pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

Dari berbagai cara kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Badan Pendapatan Daerah untuk pajak dan retribusi daerah telah mencapai target yang ditentukan. Walaupun sudah tercapai target namun Badan Pendapatan Daerah akan tetap berusaha memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2025 tahun berjalan/n-1	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
	a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan ketepatan Waktu perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggarezn Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	n/a	n/a	64,79	64,79	n/a	n/a	n/a
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
d	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	54,52	54,52	**100%**	**100%**	**100%**

	Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	0 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
e	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Tertib Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**93,05%**	**93,05%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	*4 paket*	17 Jenis	*4 paket*	3 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	*4 paket*	*4 paket*	4 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	*2 paket*	*2 paket*	*2 paket*	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*75 laporan*	*75 laporan*	*75 laporan*	74 Laporan	74 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan
f	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**100%**	**100%**	**100%**	94,50	94,50	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya Yang disediakan	25 unit	39 unit	7 unit	8 unit	8 unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit

f	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100%**	**100%**	**94,66%**	**94,66%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	57 laporan	57 laporan	60 Laporan	57 laporan	57 laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	80 laporan	80 laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan
g	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	28 Unit	11 unit	25 Unit	25 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	36 Buah	5 Unit	22 Unit	22 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	2 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase wajib pajak yang taat pajak**	**100%**	**99%**	**100%**	**101,38%**	**101,38%**	**Rp 184.427.191.653,00**	**Rp 184.427.191.653,00**	**Rp 184.427.191.653,00**
	a	**Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Rp 19.030.805.101.200,00**	-	**Rp 151.552.000.000,00**	**Rp 153.645.369.639,00**	**Rp 153.645.369.639,00**	**Rp 184.427.191.653,00**	**Rp 184.427.191.653,00**	**Rp 184.427.191.653,00**
		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak daerah	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 laporan	2000WP	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 laporan	1500 WP/WR	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya	1400 Objek Pajak	56889 NOP PBB P2	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak
Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	90750 Dokumen	35000 Ketetapan	90750 Dokumen	90750 Dokumen	90750 Dokumen	90750 Dokumen	90750 Dokumen	90750 Dokumen
Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1500 Layanan	2000 WP	1500 Layanan	1500 Layanan	1500 Layanan	1500 Layanan	1500 Layanan	1500 Layanan
Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian,dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	12 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan meningkatkan PBB-P2 dan BPHTB, meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah, meningkatkan pertumbuhan PAD dan Penurunan Tunggakan Pajak dan Retribusi maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu persentase pajak PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD, persentase pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, persentase pertumbuhan PAD dan persentase penurunan tunggakan pajak dan retribusi daerah. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2		3	4	5	6	7			8	9	12
1.	Nilai SAKIP		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	79,85	80,00	80,50	80,60	79,67	80,00	80,50	80,60	
2.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	100%	108,10%	101,38%	101,38%	101,38%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;g

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dihadapkan pada permasalahan, tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Berdasarkan hal tersebut maka diidentifikasi tantangan dan peluang terbesar yang dihadapi selama ini yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan PAD antara lain :

Identifikasi tantangan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah belum tersosialisasikan dengan baik, hal ini tentunya berdampak pada pemahaman masyarakat tentang apa itu pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk apa pajak daerah dan retribusi daerah tersebut digunakan.
- Terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya secara jujur dengan kondisi sebenarnya.
- Belum terintegrasinya aplikasi pajak dan retribusi daerah dengan baik.

Identifikasi peluang :

- Tuntutan kemajuan teknologi /pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

- Melakukan inovasi-inovasi baik pengembangan aplikasi sehingga dapat terintegrasi dengan baik ataupun pelayanan pendapatan.

- Adanya kesadaran Wajib Pajak yang menghitung dan meyetorkan sendiri kewajiban pajaknya.

Dalam menjalan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau isu - isu strategis yang dihadapi antara lain :

A. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

a. Perlunya peningkatan kualitas pendataan dan pendaftaran objek pajak, subyek pajak dan wajib pajak dengan cara pemutakhiran data, baik data pajak dan retribusi maupun data wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

b. Aplikasi perpajakan agar segera diintegrasikan.

c. Adanya regulasi pajak dan retribusi segera disesuaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

d. Peningkatan SDM dibidangnya.

B. Bidang Penetapan dan Penagihan

a. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, retribusi dan PBB-P2.

Objek dari PBB-P2 ini adalah seluruh Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau jenis pajak ini mempunyai objek yang cukup banyak baik yang ada diperkotaan maupun pedesaan, sehingga masih banyak wajib pajaknya yang belum mempunyai kesadaran untuk membayar pajak disamping juga ada yang belum memahami arti kewajiban membayar pajak.

Hal tersebut menyebabkan piutang PBB-P2 ini semakin tahun semakin bertambah.

b. Belum adanya aturan yang mensyaratkan dalam setiap pengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan Desa dengan melampirkan pelunasan PBB-P2 baik oleh PNS mapun masyarakat sebagai Wajib Pajak.

c. Aplikasi perpajakan yang ada belum terintegrasi dengan baik.

d. Penagihan belum dapat dilakukan secara optimal karena terbatasnya SDM yang ada.

C. Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi

a. Sarana dan Prasarana masih belum memadai.

b. Aplikasi belum terintegrasi dengan baik dan perlu pengembangan sesuai dengan keperluan dan perkembangan teknologi.

c. Masih diperlukan rekonsiliasi penerimaan secara manual dengan SKPD pemungut dan Kecamatan.

d. Masih Kurangnya SDM dan Tenaga IT dibidangnya.

Berdasarkan isu – isu strategis diatas, maka Badan Pendapatan Daerah selalu berupaya mengatasinya dengan melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak dan wajib retribusi daerah agar berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara taat membayar pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak/ retribusi daerah.

2. Koordinasi atau kerjasama dengan Dinas instansi terkait atau instansi pemungut untuk membangun persepsi/komitmen dalam rangka pencapaian target pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui pelayanan secara tunai maupun non tunai.

4. Meningkatkan pelaksanaan penagihan langsung terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengupayakan penghapusan tunggakan.

5. Aplikasi pajak dan retribusi yang ada segera dapat berintegrasi dengan baik

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja (Renja) 2026 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Ranwal Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2026. Pada Bab ini memuat tentang Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026.

Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD TAHUN 2026

KABUPARTEN HULU SUNGAI UTARA

NO	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Amuntai**	**Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi**	**100%**	**8.872.058.825**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Amuntai**	**Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi**	**100%**	**8.872.058.825,00**	Program ini mendukung Program prioritas SAIJWA yaitu HSU Maiman Program GEMA (Generasi Maju Aparatur) dan Sinergis dengan Misi 04 yaitu Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Amuntai**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diurus sesuai SOP**	**100%**	**45.244.400**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Amuntai**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diurus sesuai SOP**	**100%**	**45.244.400**	
2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	22.764.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	22.764.000	

2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Amunisi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Amunisi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.000.000	
		Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Amunisi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 dokumen	4.500.000	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Amunisi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 dokumen	4.500.000	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Amunisi	Jumlah Data Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12 Data	4.980.400	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Amunisi	Jumlah Data Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12 Data	4.980.400	
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Amunisi**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu**	**100%**	**7.501.264.470**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Amunisi**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu**	**100%**	**7.501.264.470,00**	
2.02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Amunisi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / Bulan	7.499.764.470,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Amunisi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang / Bulan	7.499.764.470,00	
2.02.	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Amunisi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Amunisi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	1.500.000	
2.03	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Amunisi	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian**	**100%**	**99.600.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Amunisi**	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian**	**100%**	**99.600.000,00**	

2.03	0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Amunisi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	99.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Amunisi	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	99.600.000	
2.03	0002	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Amunisi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Amunisi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	
2.04	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Amunisi**	**Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**294.663.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Amunisi**	**Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**294.663.700,00**	
2.04	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Amunisi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	20.172.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Amunisi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	20.172.000	
2.05	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Amunisi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	37.191.500	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Amunisi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	37.191.500	
2.06	0005	Sub Kegiatan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Amunisi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	44.109.200	Sub Kegiatan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Amunisi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	44.109.200	
2.07	0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amunisi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 Laporan	193.191.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amunisi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 Laporan	193.191.000	
2.08	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Amunisi**	**Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100%**	537.249.050	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Amunisi**	**Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100%**	537.249.050,00	

2.08	0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amunisi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya Yang Tersedia	18 unit	537.249.050	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amunisi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya Yang Tersedia	18 unit	537.249.050	
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Amunisi	**Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP**	**100%**	214.577.205	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Amunisi	**Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP**	**100%**	**214.577.205,00**	
2.09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Amunisi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	117.453.205	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Amunisi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	117.453.205	
2.09	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Amunisi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	97.124.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Amunisi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	97.124.000	
2.10	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Amunisi	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**179.460.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Amunisi	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**	14 unit	**179.460.000,00**	
2.10	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Amunisi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	119.230.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Amunisi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	119.230.000	
2.10	0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amunisi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	10.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amunisi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	10.250.000	
2.10	0003	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amunisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.980.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amunisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.980.000	

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Amounts**	**Persentase wajib pajak yang taat pajak**	**100%**	1.308.498.400	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Amounts**	**Persentase wajib pajak yang taat pajak**	**100%**	**1.308.498.400,00**	Program ini mendukung Program prioritas SAFIWA yaitu HSU Juara Program OVOC dan Sinergis dengan Misi 01 yaitu Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya saing
2.04	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Amounts**	**Persentase Permasalahan/Pelanggaran Pajak Daerah yang Terselesaikan**	**100%**	369.272.400	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Amounts**	**Persentase Permasalahan/Pelanggaran Pajak Daerah yang Terselesaikan**	**100%**	369.272.400,00	
2.04	0002 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Amounts	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	269.284.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	**Amounts**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	269.284.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Amounts	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1500 Layanan	99.988.400	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	**Amounts**	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1500 Layanan	99.988.400	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Amounts	Persentase Layanan Pajak yang Memiliki Pembayaran secara Online	**100%**	131.000.000	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Amounts**	Persentase Layanan Pajak yang Memiliki Pembayaran secara Online	**100%**	131.000.000,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Amounts	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	12 Laporan	131.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	**Amounts**	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	12 Laporan	131.000.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Amounts	Jumlah Wajib Pajak prioritas terselesaikan	**6.016**	908.226.000	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Amounts**	Jumlah Wajib Pajak prioritas terselesaikan	**6.016**	908.226.000,00	

		Penagihan Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7112 Dokumen	149.995.000	Penagihan Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7112 Dokumen	149.995.000	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	90750 Dokumen	558.244.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	90750 Dokumen	558.244.000	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Amuntai	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya	1400 Objek Pajak	99.987.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Amuntai	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya	1400 Objek Pajak	99.987.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Amuntai	Jumlah realisasi Retribusi Daerah	8.679.004.403,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Amuntai	Jumlah realisasi Retribusi Daerah	8.679.004.403,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Amuntai	Persentase Pertumbuhan Objek Pajak Daerah Baru	100	2.102.282.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Amuntai	Persentase Pertumbuhan Objek Pajak Daerah Baru	100	2.102.282.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Amuntai	Jumlah Potensi Retribusi baru	Rp 1.165.792.721,00	482.551.000	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Amuntai	Jumlah Potensi Retribusi	Rp 1.165.792.721,00	482.551.000,00	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	342.551.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	342.551.000	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi	4 Dokumen	140.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi	4 Dokumen	140.000.000	

	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Potensi Pajak Daerah yang Terrealisas	85	1.619.731.000	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**		Persentase Potensi Pajak Daerah yang Terrealisas	85	1.619.731.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan	1.368.481.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	**Amuntai**	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan	1.368.481.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	180.250.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	**Amuntai**	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12Laporan	180.250.000	
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Amuntai	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak daerah	2 Dokumen	71.000.000	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	**Amuntai**	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak daerah	2 Dokumen	71.000.000	
					12.282.839.225,00					**12.282.839.225,00**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada Undang-undang nomor 23 pasal 285 tahun 2014 dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jika kita telusuri ketentuan pasal 285 tersebut maka diketahui bahwa diantara sumber pendapatan tersebut hanya " Pendapatan Asli Daerah " yang merupakan sumber pembiayaan pendapatan yang otonom, karena sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Landasan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kemudian terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah, sumber pendapatan ini dikelola dan didistribusikan secara langsung oleh pemerintah daerah guna membiayai pelaksanaan program-program / kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengelolaan distribusi pajak dan retribusi daerah akan berjalan baik, jika didukung sepenuhnya oleh masyarakat, ini hanya dapat terjadi apabila masyarakatnya telah mengerti, mengetahui apa dan bagaimana pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya.

Program prioritas pembangunan bidang urusan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikembangkan tentunya juga selaras dengan Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi dimana sinergi dengan prioritas pembangunan nasional antara lain pembangunan bidang urusan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaya menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, terutama untuk target pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan SKPD pemungut dan UPT Pendapatan se Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2018, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai peranan penting dalam hal pengelolaan pendapatan terutama dari pajak dan retribusi daerah, dimana PAD merupakan tumpuan utama dalam pembiayaan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. PAD merupakan acuan kemandirian suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD-nya maka daerah semakin besar pula nilai kemandiriannya secara fiskal.

2. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB, meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan penurunan jumlah tunggakan pajak dan retribusi daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah persentase PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD, persentase pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, Jumah PAD dan persentase penurunan tunggakan pajak dan retribusi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah

tercapainya target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB, tercapainya target pajak dan retribusi daerah, meningkatnya kemampuan keuangan daerah dan menurunnya jumlah tunggakan pajak dan retribusi daerah dengan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah .

3. Indikator juga merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggung jawab dari seluruh kegiatan. Keterkaitan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada dari tabel berikut.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara 2025-2029, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 2 Program Yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang menyediakan Fasilitas-fasilitas penunjang bagi Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah program yang menjadi tugas Pokok dan fungsi utama Badan Pendapatan Daerah.

Program ini terkait langsung dengan fungsi-fungsi pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah. Program ini juga mendukung terwujudnya Sustainable Develovment Goals (SDGs) yaitu dengan menyediakan teknologi informasi pembayaran pajak daerah melalui sistem online. Pembayaran pajak secara online ini mengurangi penggunaan kertas, sehingga turut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup 2(dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Program pertama adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kota. Program ini lebih banyak terpusat di Kantor Bapenda Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sedangkan Program kedua adalah Pengolaan Pendapatan Daerah. Program ini sasarannya tersebar di seluruh Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Utara, masyarakat yang menjadi fokus sasaran adalah masyarakat wajib pajak yang memiliki objek pajak yang menjadi kewenangan daerah.

Pada Rencana Kerja Bapenda tahun 2026, dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan **2 Program 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan adalah sebesar Rp. 12.282.839.225**

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode	Urusan Bidang/Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH									
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi	Amuntai	100%	8.872.058.825,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	APBD		80,00	7.843.934.162,00
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Amuntai	100%	45.244.400,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD		100%	42.480.800,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amuntai	12 Laporan	3.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	APBD		12 Laporan	3.000.000,00

5.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Amuntai	7 Dokuman	32.764.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD		7 Dokuman	30.000.000,00
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Amuntai	3 Dokuman	4.500.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	APBD		3 Dokuman	4.500.000,00
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Amuntai	3 Data	4.980.400,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	APBD		3 Data	4.980.600,00
5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu**	**Amuntai**	**100%**	**7.501.264.470,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**7.501.171.070,00**
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Amuntai	50 Orang Bulan	7.499.764.470,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD		45 Orang Bulan	7.499.671.070,00
5.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Amuntai	1 Laporan	1.500.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD		1 Laporan	1.500.000,00
5.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian**	**Amuntai**	**100%**	**99.600.000,00**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**38.000.000,00**

5.02.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Amuntai	4 Paket	99.600.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD		1 Paket	20.000.000,00
5.02.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Amuntai	3 Orang	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD		10 Orang	10.000.000,00
5.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi**	**Amuntai**	**100%**	**294.663.700,00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**48.000.000,00**
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Amuntai	4 Paket	20.172.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD		4 Paket	10.000.000,00
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Amuntai	4 Paket	37.191.500,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD		4 Paket	10.000.000,00
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Amuntai	2 Paket	44.109.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	APBD		2 Paket	10.000.000,00
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amuntai	75 Laporan	193.191.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	APBD		75 Laporan	10.000.000,00

5.02.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Amuntai**	**100%**	**537.249.050,00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**30.000.000,00**
5.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	Amuntai	31	537.249.050,00	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	APBD		2	30.000.000,00
5.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP**	**Amuntai**	**100%**	**214.577.205,00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**160.282.492,00**
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Amuntai	36 Laporan	117.453.205,00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	APBD		60 Laporan	100.000.000,00
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Amuntai	60 Laporan	97.124.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD		60 Laporan	60.282.492,00
5.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**	**Amuntai**	**100%**	**179.460.000,00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**40.000.000,00**

5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Amuntai	35 Unit	119.230.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD		33 Unit	20.000.000,00
5.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Amuntai	39 Unit	10.250.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	APBD		76 Unit	10.000.000,00
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Amuntai	1 Unit	49.980.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD		1 Unit	10.000.000,00
05.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase wajib pajak yang taat pajak**	**Amuntai**	**100%**	**1.308.498.400,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PAD**		**100%**	**700.000.000,00**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Permasalahan/Pelanggaran Pajak Daerah yang Terselesaikan**	**Amuntai**	**100%**	**369.272.400,00**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**PAD**		**100%**	**200.000.000,00**
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Amuntai	10 Laporan	269.284.000,00	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PAD		10 Laporan	100.000.000,00

5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Amunisi	1500 Layanan	99.988.400,00	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PAD		1500 Layanan	100.000.000,00
		Persentase Layanan Pajak yang Memiliki Pembayaran secara Online	Amunisi	100%	131.000.000,00				100%	100.000.000,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	Amunisi	12 Laporan	131.000.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PAD		12 Laporan	100.000.000,00
		Jumlah Wajib Pajak piutang tersalesaikan	Amunisi	6016	808.226.000,00				6136	400.000.000,00
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Amunisi	7112 Dokumen	140.995.000,00	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	PAD		7112 Dokumen	100.000.000,00
5.02.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Amunisi	90750 Dokumen	558.344.000,00	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	PAD		90750 Dokumen	200.000.000,00

5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya	Amountai	1400 Objek Pajak	99.987.000,00	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PAD		1400 Objek Pajak	100.000.000,00
05.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Jumlah realisasi Retribusi Daerah	Amountai	8.679.004.403,00	2.031.282.000,00	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	PAD		8.852.584.491,00	800.000.000,00
		Persentase Pertumbuhan Objek Pajak Daerah Baru	Amountai	100	2.031.282.000,00		PAD		100	800.000.000,00
		Jumlah Potensi Retribusi Baru		Rp 1.165.792.721,00	482.551.000,00				Rp 1.339.372.809,00	300.000.000,00
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Amountai	4 Dokumen	342.551.000,00	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PAD		12 Dokumen	200.000.000,00
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi	Amountai	4 Dokumen	140.000.000,00	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PAD		12 Dokumen	100.000.000,00
		Persentase Potensi Pajak Daerah terrealisasi	Amountai	85	1.548.731.000,00				85	500.000.000,00
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Amountai	24 Laporan	1.368.481.000,00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PAD		24 Laporan	200.000.000,00

5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Amuntai	12 Laporan	180.250.000,00	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PAD		4 Laporan	100.000.000,00
5.02.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Amuntai	2 Dokumen	71.000.000,00	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PAD		2 Dokumen	100.000.000,00
						Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PAD		2 Dokumen	100.000.000,00
		JUMLAH (Rp.)			12.282.838.225,00					9.343.934.162,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Indikator (Output) : Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Kegiatan

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu

Indikator Keluaran (Output) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP

Sub Kegiatan

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Kelompok sasaran : Sekretariat Bapenda

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil

Kelompok Sasaran : Sekretariat Bapenda

1.1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Kelompok Sasaran : Sekretariat Bapenda

1.1.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran : Sekretariat Bapenda

Kegiatan

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah

Indikator Keluaran (Output) : Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu

Sub Kegiatan

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Kelompok sasaran : ASN Badan Pendapatan Daerah

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kelompok sasaran : ASN Bapenda

Kegiatan

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Hasil (Outcome):

Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pegawai yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian

Sub Kegiatan

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Hasil : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Outcome)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kelompok sasaran : ASN Bapenda

1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Indikator Hasil (Outcome): Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok sasaran : ASN Bapenda

Kegiatan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Hasil (Outcome) : Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Sarana Penunjang yang disediakan

Sub Kegiatan

1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan

Kelompok sasaran : ASN Bapenda

1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
Kelompok sasaran : ASN Bapenda

1.4.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Kelompok sasaran : ASN Bapenda

1.4.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kelompok sasaran : ASN Bapenda

Kegiatan

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
Indikator Keluaran (Output) : Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang

Sub Kegiatan

1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan
Kelompok sasaran : ASN Bapenda

Kegiatan

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah
Indikator Keluaran (Output) : Persentase Jasa Penunjang yang terpenuhi sesuai SOP

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Kelompok sasaran : ASN Bapenda

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Hasil (Outcome) Indikator : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kelompok sasaran : Petugas Kebersihan dan Petugas Kemananan

Kegiatan

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil (Outcome) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik

Indikator Keluaran (Output) : Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Kelompok sasaran : ASN Bapenda

1.7.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Kelompok sasaran : Sekretariat Bapenda

1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Kelompok sasaran: Sekretariat Sekretariat Badan Pendapatan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak
Indikator (Output) : Persentase Wajib Pajak yang taat pajak

Kegiatan

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Persentase Permasalahan/Pelanggaran Pajak Daerah yang Terselesaikan

Indikator (Output) : Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah

2.1.1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.2. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjutai

Indikator (Output) : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

2.1.3. . Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

2.1.4. Penagihan Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

2.1.5. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

2.1.6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Indikator Hasil (Outcome) : Terdatanya Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya

Indikator (Output) : Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya

2.2. Indikator Hasil (Outcome) : Meningkatnya Realisasi Potensi Pajak dan Retribusi daerah
Indikator (Output) : - Jumlah realisasi Retribusi Daerah
- Persentase Pertumbuhan Objek Pajak Daerah Baru

2.2.1. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian,dan Pengawasan Pajak Daerah.

2.2.2. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi

Indikator (Output) : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi

2.2.3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak daerah, Subjek Pajak dan wajib Pajak Daerah

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

2.2.4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

2.2.5. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak daerah

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak daerah

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKAB. HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2026

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Pendapatan Daerah						13.282.889.239,00							8.173.290.808,00	
	3					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.282.889.239,00							8.173.290.808,00	
	3	02				KEUANGAN						13.282.889.239,00							8.173.290.808,00	
1	3	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksana Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi	-			100 %	5.863.433.826,00						-	7.979.893.484,00	
	3	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kelancaran waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	45.244.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU	-	33.000.000,00	
	3	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	32.764.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3 0	4.500.000,00	-	DANA BAGI HASIC (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah															
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	4.950.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	7.901.171.070,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU	-	6.701.983.979,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	7.499.671.070,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		6.700.483.979,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		3.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian	-			100 %	102.780.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU	-	30.680.000,00	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	102.780.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntal Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		20.680.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	303.808.700,00			-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU	-	144.390.790,00	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.173.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.191.300,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntal Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		34.688.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	44.113.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntal Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		34.704.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79 Laporan	202.881.200,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemanunan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	-			100 %	457.236.050,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU	-	150.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	437.236.050,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	-			100 %	310.025.105,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU	-	403.497.105,00	
	3	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				97 Laporan	117.688.105,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		117.325.105,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	182.937.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		285.972.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3	02	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	-			100 %	143.210.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU	-	113.900.000,00	
	3	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	83.990.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		84.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	10.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		9.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	48.880.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	ASN BAPENDA KAB. HSU		33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase wajib pajak yang taat pajak	-			100%	3.420.413.700,00						-	585.427.375,00	
							Jumlah realisasi Retribusi Daerah				Rp 6.679.004.400										
							Persentase Pertumbuhan Objek Pajak Daerah Baru				80%										
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	3.420.413.700,00			Memantapkan sistem pertahanan kemaritiman negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Wajib Pajak	-	585.427.375,00	
	5	02	04	2.01	0003	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah															

							Jumlah Dokumen Hasil Analisi Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	71.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Wajib Pajak		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Pelayanbantuaan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanbantuaan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	272.401.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
							Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				24 Laporan	1.374.990.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.824.133,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	180.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.924.153,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1400 Objek Pajak	99.887.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.924.153,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah															
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				80750 Dokumen	338.247.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.924.153,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															

							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1300 Layanan	99.999.400,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.604.153,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	01	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokuman	140.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.604.153,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah															
							Jumlah Dokuman Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1112 Dokuman	149.999.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.604.153,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	03	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															

							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	342.933.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui pembangunan pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengakselerasikan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.804.133,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	9	03	04	Z.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	131.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desakab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui pembangunan pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Mengakselerasikan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Wajib Pajak		50.804.151,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
											JUMLAH	12.282.839.225,00							8.172.290.809,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang, dengan partisipasi dan respon pemegang kegiatan. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kondisi lingkungannya baik internal SKPD maupun lingkup Kabupaten.

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 ini para pemangku kepentingan diharapkan mampu untuk lebih mengoptimalkan kinerja, yaitu kinerja yang terkait dengan profesionalitas manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan tetap berpegang pada azas efisien, efektif, transparan, akuntabel, hal ini diharapkan mampu memberikan akselerasi dalam proses pembangunan dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Dengan Rencana Kerja ini juga para aparatur Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai /memenuhi target sasaran yang ingin dicapai yaitu "Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah."

Rencana Kerja tahun 2026 ini adalah merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (RENSTRA 2025 – 2029).

Dengan kegiatan dan pendanaan yang direncanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam Peningkatan Pendapatan sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Amuntai, Juli 2025
KEPALA BADAN PENDATAN DAERAH
Kabupaten Hulu Sungai Utara

BUDIA HENDRA, S.IP.,M.Si
Pembina (Iva)
NIP. 19870309 200701 1 001